Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2024

Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia



Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bulukumba
2024

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII PENUTUP
(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksanaan program pembangunan dari RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 4 Juli 2024
BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 4 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 12

Daftar Isi

Daftar Tabel iii
Daftar Gambar xiv
Daftar Grafik xv
Daftar Kuadran xvii
Lampiran – lampiran xviii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-3
1.4 Maksud Dan Tujuan I-4
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-7
2.1 Kondisi Umum Daerah II-7
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-7
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-20
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-55
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-137
2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemeritah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 ..... II-140
2.1.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-150
2.1.7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistanable Development Goals* (TPB/SDGs) II-155
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-192
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-265
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah II-265
2.3.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah) II-265
2.4 Isu Strategis II-271
2.4.1 Isu Strategis Global II-272
2.4.2 Isu Straegis Nasional II-277
2.4.3 Isu Strategis Daerah II-279
2.5 Inovasi Daerah II-283
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-12
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-13
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja III-16
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayan Daerah III-22
3.3 Pendanaan Pembangunan Lainnya III-24
3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) III-24
3.3.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) III-24
3.3.3 Pembiayaan Utang Daerah III-25

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-9
4.2.1 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba IV-9
4.2.2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba IV-14
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ..... IV-23
4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-41
4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bulukumba IV-43
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Kerangka Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ..... V-1
5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... V-1
5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ..... V-18
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1 Indikator Makro Pembangunan VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-1
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) VI-3
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) VI-21
6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs) VI-23
BAB VII PENUTUP VII-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan VII-1
7.2 Kesimpulan VII-2

Daftar Tabel

Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba II-7
Tabel II-2 Tutupan Lahan Di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023 ..... II-11
Tabel II-3 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023 ..... II-19
Tabel II-4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba, 2023 ..... II-20
Tabel II-5 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023 ..... II-20
Tabel II-6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019-2023 ..... II-21
Tabel II-7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba (persen), 2019-2023 ..... II-23
Tabel II-8 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-24
Tabel II-9 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019 – 2023. II-25
Tabel II-10 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019 – 2023 ..... II-25
Tabel II-11 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023 ..... II-26
Tabel II-12 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023 ..... II-28
Tabel II-13 Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2019-2023 ..... II-29
Tabel II-14 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023 ..... II-29
Tabel II-15 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) II-30
Tabel II-16 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba tahun 2023 ..... II-31
Tabel II-17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023 ..... II-32
Tabel II-18 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023 ..... II-34
Tabel II-19 Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Bulukumba II-36
Tabel II-20 Perbandingan Capaian Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023 ..... II-38
Tabel II-21 ..... II-41
Tabel II-22 Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup (UUH-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional Tahun 2023 ..... II-42
Tabel II-23 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba II-43
Tabel II-24 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Ribu Rp/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019– 2023 ... II-45
Tabel II-25 Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2019 - 2023 ..... II-47
Tabel II-26 Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2019 - 2023 ..... II-48
Tabel II-27 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020 - 2023 ..... II-50
Tabel II-28 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba 2020-2023 II-51

Tabel II-29 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-51
Tabel II-30 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Perikanan Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-51
Tabel II-31 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-51
Tabel II-32 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-52
Tabel II-33 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-52
Tabel II-34 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata; Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ... II-53
Tabel II-35 Indeks Daya saing infrastruktur Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-53
Tabel II-36 Indeks Pendidikan Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-53
Tabel II-37 Indeks Kesehatan Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-53
Tabel II-38 Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-54
Tabel II-39 Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-54
Tabel II-40 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-54
Tabel II-41 Skor LPPD/Kategori Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-54
Tabel II-42 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bulukumba 2020-2023 ..... II-55
Tabel II-43 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019 - 2023 ..... II-56
Tabel II-44 Perkembangan APM Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-56
Tabel II-45 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) II-56
Tabel II-46 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019-2023 ..... II-57
Tabel II-47 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019 – 2023 ..... II-57
Tabel II-48 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022 ..... II-58
Tabel II-49 Rasio Guru-Murid dan Sekolah Kabupaten Bulukumba,Tahun 2019 - 2023 . II-58
Tabel II-50 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-58
Tabel II-51 Angka Kematian Bayi (AKB)Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ...II-59
Tabel II-52 Angka Kematian Balita (AKBa)Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-59
Tabel II-53 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 II-59
Tabel II-54 Angka Kematian Ibu (AKI)Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023. II-60
Tabel II-55 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-60
Tabel II-56 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk II-61
Tabel II-57 Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik Per Satuan Penduduk II-61
Tabel II-58 Rasio Dokter Per Satuan PendudukKabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-62
Tabel II-59 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-62
Tabel II-60 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-62
Tabel II-61 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) II-63

Tabel II-62 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-63
Tabel II-63 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA..... II-63
Tabel II-64 Tingkat Prevalensi Tuberkolosis II-64
Tabel II-65 Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023..... II-64
Tabel II-66 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD..... II-65
Tabel II-67 Angka Kejadian Malaria Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023..... II-65
Tabel II-68 Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023..... II-66
Tabel II-69 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-66
Tabel II-70 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023..... II-67
Tabel II-71 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-67
Tabel II-72 Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-68
Tabel II-73 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-68
Tabel II-74 Proporsi Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-69
Tabel II-75 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023..... II-69
Tabel II-76 Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-69
Tabel II-77 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-70
Tabel II-78 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023..... II-70
Tabel II-79 Persentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-70
Tabel II-80 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh..... II-71
Tabel II-81 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau II-71
Tabel II-82 Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-71
Tabel II-83 Persentase penduduk berakses air minum Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-72
Tabel II-84 Persentase areal kawasan kumuh Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ...II-72
Tabel II-85 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan..... II-72
Tabel II-86 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023..... II-72
Tabel II-87 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan) II-73
Tabel II-88 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota..... II-73
Tabel II-89 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di KabupatenBulukumba Tahun 2019 – 2023..... II-73
Tabel II-90 Persentase Penegakan PERDA) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 II-74
Tabel II-91 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi..... II-74
Tabel II-92 Jumlah Korban Bencana yang Ditangani II-75
Tabel II-93 Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di II-75
Tabel II-94 Perentase PMKS yang tertanganidi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-75

Tabel II-95 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-76
Tabel II-96 Persentase penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ....II-76
Tabel II-97 Angka sengketa pengusaha-pekerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-77
Tabel II-98 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) II-77
Tabel II-99 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-78
Tabel II-100 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-78
Tabel II-101 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-78
Tabel II-102 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019– 2023 ..... II-78
Tabel II-103 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-79
Tabel II-104 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-79
Tabel II-105 Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 II-79
Tabel II-106 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-79
Tabel II-107 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat... II-80
Tabel II-108 Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-80
Tabel II-109 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-80
Tabel II-110 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-81
Tabel II-111 Rasio KDRT Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-81
Tabel II-112 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-81
Tabel II-113 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-81
Tabel II-114 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-82
Tabel II-115 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 ..... II-82
Tabel II-116 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-83
Tabel II-117 Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2023 ..... II-83
Tabel II-118 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten BulukumbaTahun 2019-2023 ..... II-83
Tabel II-119 Luas Lahan Bersetifikat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-84
Tabel II-120 Penyelesaian kasus tanah Negara di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-84
Tabel II-121 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-85

Tabel II-122 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-85
Tabel II-123 Hasil Pengukuruan IKTL Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-85
Tabel II-124 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-86
Tabel II-125 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA II-86
Tabel II-126 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-86
Tabel II-127 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-87
Tabel II-128 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-87
Tabel II-129 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-87
Tabel II-130 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 II-87
Tabel II-131 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-88
Tabel II-132 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-88
Tabel II-133 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kotaKabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-88
Tabel II-134 Timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 II-89
Tabel II-135 Persentase jumlah sampah yang tertangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-89
Tabel II-136 TabelOperasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-89
Tabel II-137 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-90
Tabel II-138 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-90
Tabel II-139 Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-90
Tabel II-140 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-90
Tabel II-141 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-91
Tabel II-142 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-94
Tabel II-143 Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-94
Tabel II-144 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-95
Tabel II-145 Persentase PKK aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-95
Tabel II-146 Persentase Posyandu aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-96
Tabel II-147 Persentase LSM aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-96

Tabel II-148 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-97
Tabel II-149 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023..... II-98
Tabel II-150 Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung Kb Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-98
Tabel II-151 Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba 2019-2023 ..... II-98
Tabel II-152 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yg Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-99
Tabel II-153 Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-99
Tabel II-154 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-100
Tabel II-155 Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-100
Tabel II-156 Ratio Akseptor KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-100
Tabel II-157 Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-101
Tabel II-158 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19)Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-101
Tabel II-159 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-101
Tabel II-160 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-102
Tabel II-161 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-102
Tabel II-162 Persentase Tinggkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-103
Tabel II-163 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-103
Tabel II-164 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-103
Tabel II-165 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-103
Tabel II-166 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-104
Tabel II-167 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-104
Tabel II-168 Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dibidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-104
Tabel II-169 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .II-104
Tabel II-170 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..II-105

Tabel II-171 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-105
Tabel II-172 Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-105
Tabel II-173 Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-106
Tabel II-174 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-106
Tabel II-175 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-106
Tabel II-176 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-107
Tabel II-177 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-107
Tabel II-178 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-107
Tabel II-179 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba.....II-107
Tabel II-180 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten BulukumbaTahun 2019-2023 .....II-108
Tabel II-181 Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-108
Tabel II-182 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-108
Tabel II-183 Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ...II-109
Tabel II-184 Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-109
Tabel II-185 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-109
Tabel II-186 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-109
Tabel II-187 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-110
Tabel II-188 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-110
Tabel II-189 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-110
Tabel II-190 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-111
Tabel II-191 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-111
Tabel II-192 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-111
Tabel II-193 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 II-111
Tabel II-194 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-112
Tabel II-195 Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional PMA/PMDN Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023.....II-112
Tabel II-196 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-112

Tabel II-197 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-113
Tabel II-198 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-113
Tabel II-199 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-113
Tabel II-200 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-114
Tabel II-201 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-114
Tabel II-202 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-115
Tabel II-203 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-115
Tabel II-204 Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2023 ..... II-116
Tabel II-205 Buku ”PDRB” Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-116
Tabel II-206 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-116
Tabel II-207 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-117
Tabel II-208 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-117
Tabel II-209 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-118
Tabel II-210 Tabel Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-118
Tabel II-211 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-119
Tabel II-212 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-119
Tabel II-213 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-119
Tabel II-214 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-120
Tabel II-215 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-120
Tabel II-216 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-120
Tabel II-217 Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-121
Tabel II-218 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-121
Tabel II-219 Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2019-2023 ..... II-122
Tabel II-220 Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2019-2023 ..... II-122
Tabel II-221 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2019-2023 ..... II-122
Tabel II-222 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-122
Tabel II-223 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-123
Tabel II-224 Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Bulukumba 2019-2023 ..... II-123
Tabel II-225 Cakupan Bina Kelompok Perdagangan di Kabupaten Bulukumba 2019-2023 ..... II-124
Tabel II-226 Jumlah Pasar berdasarkan Kecamatan, Tipe serta Alamat Kabupaten Bulukumba tahun 2020 ..... II-124
Tabel II-227 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-125

Tabel II-228 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten BulukumbaTahun 2019-2023 ..... II-126
Tabel II-229 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-126
Tabel II-230 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-127
Tabel II-231 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun2019-2023 ..... II-127
Tabel II-232 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-127
Tabel II-233 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-127
Tabel II-234 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-128
Tabel II-235 Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-128
Tabel II-236 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-128
Tabel II-237 Persentase belanja pendidikan (20%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-129
Tabel II-238 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-129
Tabel II-239 Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-130
Tabel II-240 Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-130
Tabel II-241 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-131
Tabel II-242 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-131
Tabel II-243 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-132
Tabel II-244 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-132
Tabel II-245 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-133
Tabel II-246 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-133
Tabel II-247 Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2023 ..... II-133
Tabel II-248 Persentase pelanggaran Pegawai Kabupaten Bulukumba 2019 - 2023 ..... II-133
Tabel II-249 Jumlah temuan BPK Kabupaten Bulukumba 2019 - 2023 ..... II-134
Tabel II-250 Persentase implementasi rencana Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2019-2023 ..... II-134
Tabel II-251 Persentase pemanfaatan hasil KelitbanganKabupaten Bulukumba 2019-2023 ..... II-134
Tabel II-252 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Bulukumba 2019-2023 ..... II-135
Tabel II-253 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kabupaten Bulukumba 2019-2023 ..... II-135
Tabel II-254 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kabupaten Bulukumba 2019-2023 ..... II-135

Tabel II-255 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba 2019-2023 II-136
Tabel II-256 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Bulukumba 2019-2023 .....II-137
Tabel II-257 Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Kabupaten Bulukumba 2019-2023 .....II-137
Tabel II-258 Nilai Tukar Petani Tahun 2019-2023 .....II-139
Tabel II-259 Kesesuaian Pemanfataan Ruang Sesuai RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 .....II-139
Tabel II-260 Hasil Analis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 .....II-141
Tabel II-261 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-150
Tabel II-262 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2023 ..II-157
Tabel II-263 Identifikasi Masalah hambatan dan kendala dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2023 .....II-177
Tabel II-264 Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD.....II-193
Tabel II-265 Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD II-196
Tabel II-266 Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD II-198
Tabel II-267 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 .....II-201
Tabel II-268 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....II-202
Tabel II-269 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil RKPD II-202
Tabel II-270 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba II-207
Tabel II-271 Daftar Inovasi Kabupaten Bulukumba II-285
Tabel II-272 Tabel Kompetisi Inovasi Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional Dan Internasional Tahun 2022-2023 .....II-327
Tabel III-1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... III-5
Tabel III-2 Perbandingan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023. III-6
Tabel III-3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... III-6
Tabel III-4 Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... III-6
Tabel III-5 Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023..... III-7
Tabel III-6 Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018- 2022.....III-10
Tabel III-7 Realisasi, Asumsi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023-2026 .....III-15
Tabel III-8 Realisasi, Asumsi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023-2025 .....III-20
Tabel III-9 Penganggaran Kemiskinan Ekstrem, Standar Pelayanan Minimal dan Penanganan Stunting Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 .....III-21
Tabel III-10 Realisasi, Asumsi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2025.....III-23
Tabel III-11 Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..III-24
Tabel IV-1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 .....IV-2
Tabel IV-2 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 IV-2

Tabel IV-3 Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ..... IV-4
Tabel IV-4 Keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2025 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025 dengan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 ..... IV-7
Tabel IV-5 Keselarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ..... IV-11
Tabel IV-6 Highlight Indikasi Intervensi berdasarkan Prioritas Nasional berdasarkan RKP Nasional Tahun 2025 ..... IV-12
Tabel IV-7 Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ... IV-14
Tabel IV-8 Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2025 ..... IV-16
Tabel IV-9 Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-24
Tabel IV-10 Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-27
Tabel IV-11 Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2025 ..... IV-30
Tabel IV-12 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-32
Tabel IV-13 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2025 ..... IV-39
Tabel IV-14 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ..... IV-41
Tabel V-1 Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2025 ..... V-1
Tabel V-2 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ..... V-3
Tabel V-3 Rekap pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Bulukumba V-18
Tabel V-4 Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ..... V-20
Tabel VI-1 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2023-2025 ..... VI-1
Tabel VI-2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2025 Kabupaten Bulukumba VI-2
Tabel VI-3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2025 Kabupaten Bulukumba VI-4
Tabel VI-4 Capaian Indikator SPM Tahun 2022 dan Target Indikator SPM Tahun 2023-2025 Kabupaten Bulukumba VI-21
Tabel VI-5 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 VI-25

Daftar Gambar

Gambar I-1 Sistematika Penyusunan RKPD I-2
Gambar I-2 Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ..... I-3
Gambar II-1 Peta Administratif Kabupaten Bulukumba II-7
Gambar II-2 Peta Topografi Bulukumba II-8
Gambar II-3 Peta Geologi Bulukumba II-9
Gambar II-4 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba II-10
Gambar IV-1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-10
Gambar IV-2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-13

Daftar Grafik

Grafik II-1 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 2023 ..... II-9
Grafik II-2 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-17
Grafik II-3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba Menurut Kecamatan Tahun 2023 ..... II-18
Grafik II-4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019-2023 ..... II-21
Grafik II-5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan target daerah dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2023 ..... II-23
Grafik II-6 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023 ..... II-27
Grafik II-7 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Target Daerah, dan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2023 ..... II-28
Grafik II-8 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara tahun 2019-2023 ..... II-29
Grafik II-9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (periode Agustus) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019 – 2023 ..... II-31
Grafik II-10 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kabupaten Bulukumba Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara Tahun 2019-2023 ..... II-32
Grafik II-11 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2023 ..... II-33
Grafik II-12 Perbandingan Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba II-34
Grafik II-13 Perbandingan Capaian Gini Ratio dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2023 ..... II-35
Grafik II-14 Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2019-2023 ..... II-37
Grafik II-15 Perbandingan Capaian IPM dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2023 ..... II-38
Grafik II-16 Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2023 ..... II-39
Grafik II-17 Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2019 - 2023 ..... II-40
Grafik II-18 Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2019-2023 ..... II-41
Grafik II-19 Perbandingan Capaian Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2019-2023 ..... II-43
Grafik II-20 Perbandingan Capaian harapan Lama sekolah (HLS-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2019-2023 ..... II-44
Grafik II-21 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Juta Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, Tahun 2019-2023 ..... II-45
Grafik II-22 Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, Tahun 2023 ..... II-46
Grafik II-23 Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2019-2023 ..... II-48
Grafik II-24 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional, Tahun 2023 ..... II-49
Grafik II-25 Perkembangan Laju Inflasi Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan II-50

Grafik II-26 Rata-rata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Per Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 ..... II-137
Grafik II-27 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Bulukumba 2019 – 2023 ..... II-138
Grafik II-28 Angka Kriminalitas yang tertangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2023 ..... II-139
Grafik II-29 Rasio ketergantungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 -2023 ..... II-140
Grafik III-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, Asumsi 2024 dan Target 2025 ..... III-9
Grafik III-2 PDRB Perkapita Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian 2023, Asumsi 2024 dan Target 2025 ..... III-9
Grafik III-3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2023, Asumsi 2024 dan Target 2025 ..... III-10
Grafik III-4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025 ..... III-11
Grafik III-5 Gini Rasio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional III-11
Grafik III-6 Inflasi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional III-12
Grafik IV-1 Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) IV-14

Daftar Kuadran

Kuadran II-1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023 (Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Rata-Rata Capaian Wilayah) II-22
Kuadran II-2 Analisis Kuadran Perubahan Angka Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019-2023 ..... II-27
Kuadran II-3 Analisis Kuadran Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara (2019-2023) II-30
Kuadran II-4 Analisis Kuadran Perubahan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019-2023 ..... II-33
Kuadran II-5 Analisis Kuadran Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019-2023 ..... II-35
Kuadran II-6 Analisis Kuadran Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019-2023 ..... II-37
Kuadran II-7 Analisis Kuadran Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019-2023 ..... II-40
Kuadran II-8 Analisis Kuadran Perubahan Nilai UHH Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019-2023 ..... II-42
Kuadran II-9 Analisis Kuadran Perubahan Nilai HLS Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 - 2022 ..... II-44
Kuadran II-10 Analisis Kuadran Perubahan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah tahun 2022 ..... II-46
Kuadran II-11 Analisi Kuadran Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB) Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah, Tahun 2019-2023 ..... II-48

Lampiran – lampiran

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 12 TAHUN 2024 TANGGAL 4 JULI 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 12 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 JULI 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

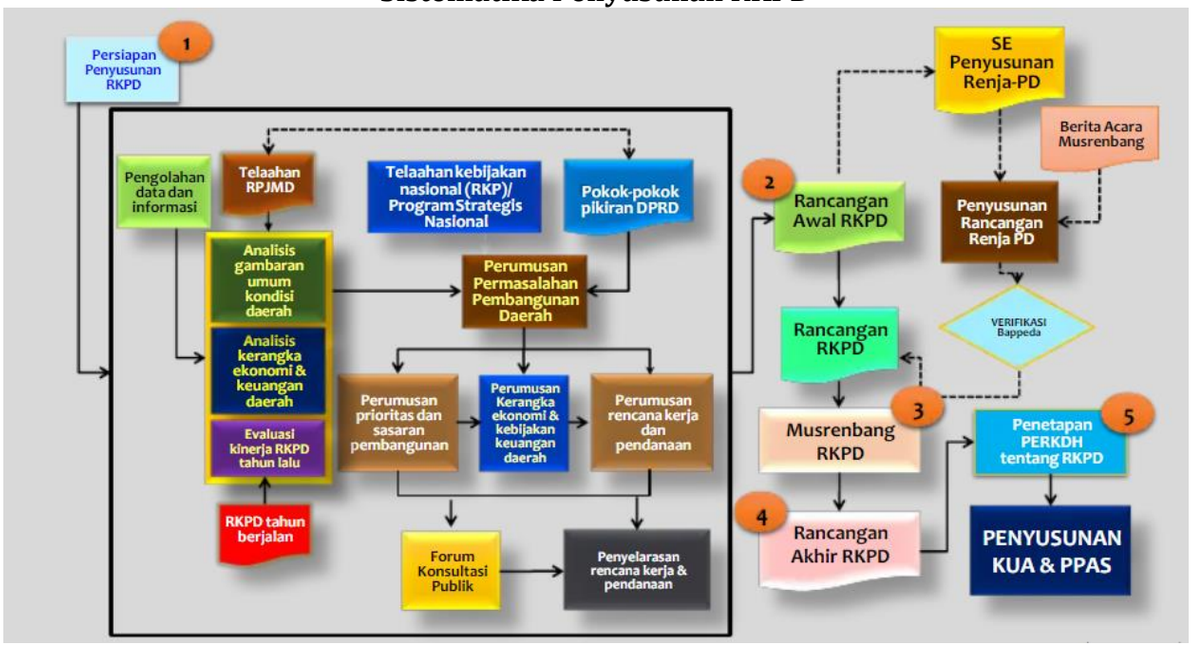
1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan program kegiatan yang melibatkan beberapa stakeholder pembangunan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 juga berpedoman pada RKP Nasional 2025 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat.

Sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pada Pasal 16 Ayat (1) ini mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Sistematika penyusunan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I-1
Sistematika Penyusunan RKPD



Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari rembug warga, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi. Adapun capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,11 Persen, Tingkat Kemiskinan 7,22 Persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 1,31 Persen, Gini Ratio 0,379, Indeks Pembangunan Manusia 73,64 Angka/Nilai dan PDRB Perkapita (ADHB) 41,90 Juta/Rp.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemuka dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 sebagai berikut:

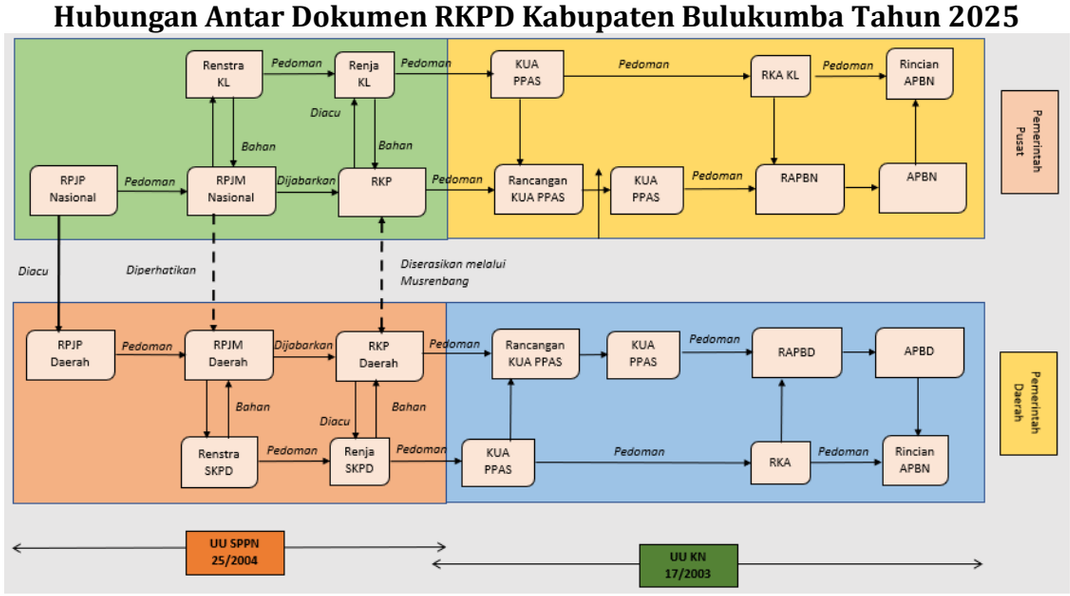
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai satu kesatuan dari seluruh rangkaian proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan keterkaitan tersebut dapat dilihat dengan mengukur target kinerja yang ditetapkan pada setiap dokumen perencanaan serta dengan melihat tingkat konsistensi, kesesuaian tujuan serta tahapan penyusunan dan pelaksanaan tiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan upaya pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan jangka panjang daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada alur berikut:

Gambar I-2
Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2025 mengacu berbagai substansi dalam RKP Nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP Nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025. Meskipun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bulukumba, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya, dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2025. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Wilayah Kabupaten Bulukumba yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Bulukumba. RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 dan merupakan penjabaran tahun keempat. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan kedalam program kegiatan RKPD, serta memuat capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanahkan bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

Penyusunan KUA ini merupakan langkah untuk menjawab amanat yang dimuat dalam pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai kewajiban bagi Kepala Daerah untuk menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.KUA ini memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret. Selanjutnya KUA-PPAS menjadi landasan penyusunan rancangan APBD yang kemudian ditetapkan menjadi Perda APBD setelah melalui proses pembahasan dan persetujan antara Bupati dan DPRD.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 yaitu:

1. Penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
2. Pedoman perumusan dan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyelerasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten;

4. Pedoman dalam memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
5. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
6. Pedoman untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
7. Sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan capaian tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 yaitu:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini memuat latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan BAB serta garis besar isi setiap BAB didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah, aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan, Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, serta permasalahan pembangunan dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan secara eksplisit terkait tema, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 disinergikan dengan perencanaan tingkat provinsi dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun rencana, instansi pelaksana/OPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya dalam bentuk matriks program dan rencana kegiatan pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada BAB ini ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Pada BAB ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

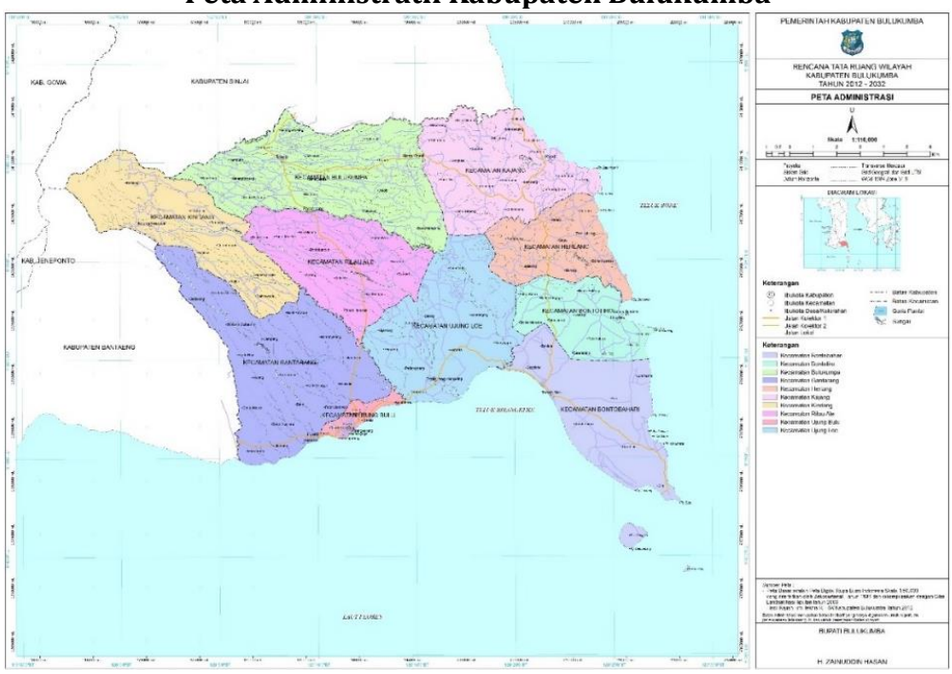
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba memiliki luas 1.175,53 Km^2.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan selayar
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Gambar II-1
Peta Administratif Kabupaten Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Kabupaten Bulukumba memiliki kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa, yang masing-masing seluas 175,84 km^2 dan 173,63 km^2 . Sementara, Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota memiliki luas wilayah terkecil hanya sekitar 1,24 km^2. Kabupaten Bulukumba secara administratif terdiri dari 10 kecamatan, 27 kelurahan dan 109 desa. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel II-1 berikut.

Tabel II-1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (Km^2)	% Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten
1.	Gantarang	3	18	8	82	175,84	14,96
2.	Ujung Bulu	9	0	31	-	14,63	1,24
3.	Ujung Loe	1	12	4	42	146,25	12,44
4.	Bontobahari	4	4	13	13	115,51	9,83
5.	Bontotiro	1	12	5	45	79,39	6,75
6.	Herlang	2	6	10	27	69,71	5,93
7.	Kajang	2	17	11	100	130,79	11,13

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (Km²)	% Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten
8.	Bulukumpa	3	14	7	76	173,63	14,77
9.	Rilau Ale	1	14	5	58	119,11	10,13
10.	Kindang	1	12	4	46	150,67	12,82
Kabupaten Bulukumba		**27**	**109**	**98**	**489**	**1.175,53**	**100,00**

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tanggal 9 November Tahun 2022

1. Letak dan Kondisi Geografis

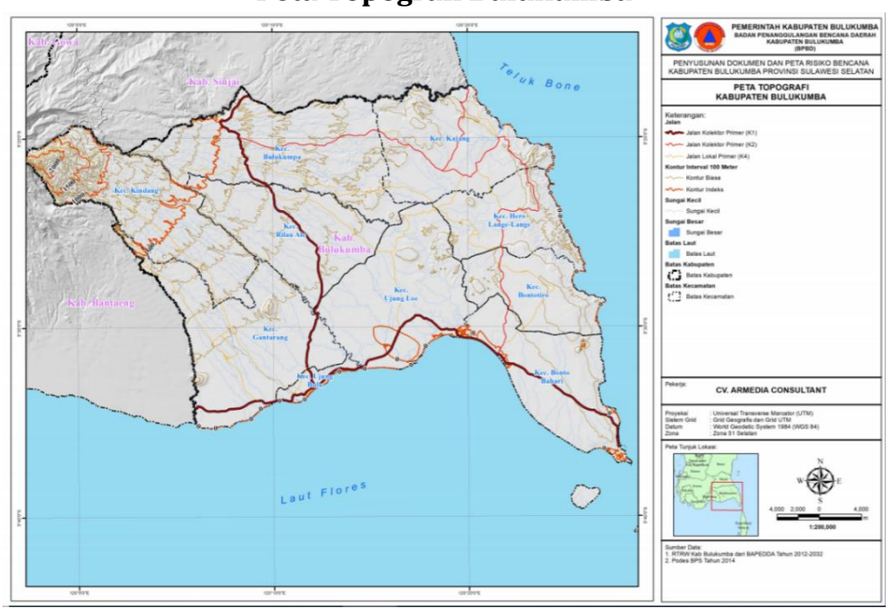
Secara Geografis, Kabupaten Bulukumba berada terletak diantara 05°20´-05°40´ Lintang Selatan (LS) dan 119°58´-120°28´ Bujur Timur (BT) dan secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng–Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

2. Topografi

Kabupaten Bulukumba memiliki daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Disamping itu, Kabupaten Bulukumba memiliki daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan juga terdapat daerah perbukitan yang terbentang mulai dari barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50.28% maka dataran tinggi mencapai 49.72%. Untuk lebih jelasnya topografi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II-2
Peta Topografi Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95.4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter Di Atas Permukaan Laut (DPL) dengan tingkat kemiringan tanah 0-400. Sementara itu, untuk kecamatan dengan jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Kajang sekitar 62 km. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik II-1
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 2023

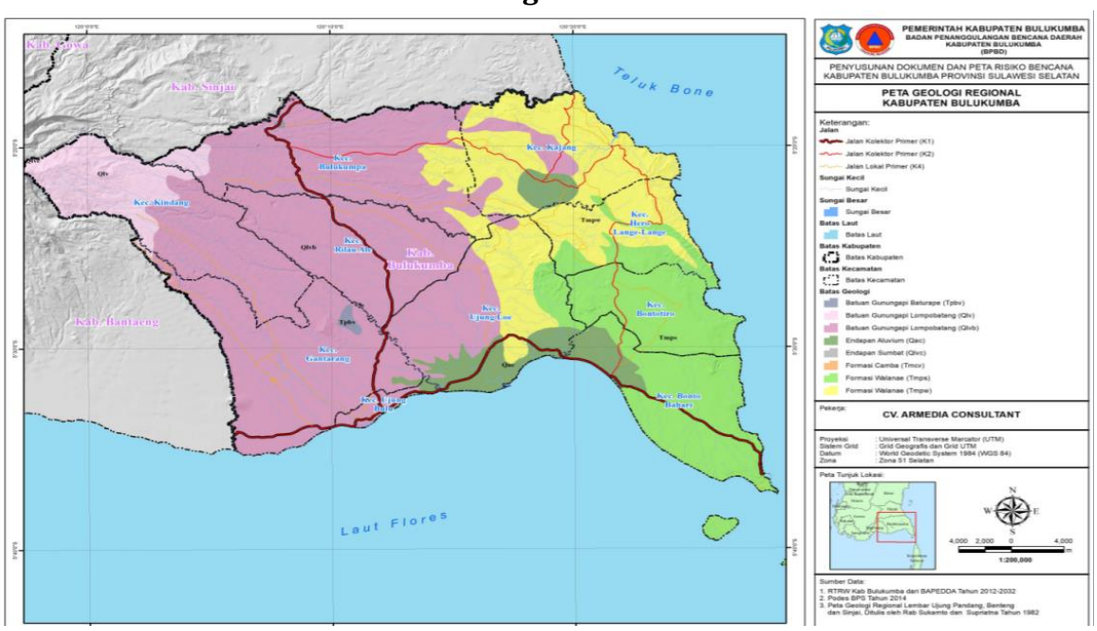
Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
Gantarang	25	5
Ujung Bulu	0	1
Ujung Loe	26	11
Bonto Bahari	26	27
Bontotiro	100	35
Herlang	80	42
Kajang	80	62
Bulukumpa	100	31
Rilau Ale	100	24
Kindang	500	33

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2024

3. Geologi

Keberadaan satuan batuan yang menyusun geomorfologi Bulukumba mempunyai dimensi yang berbeda-beda. Batuan tertua berumur Miosen tengah (Bedrock) berada pada pemekaran dasar laut Teluk Bone sementara batuan termuda berumur Plistosen berada pada sesar Walanae di daratan Bulukumba (Formasi Lompobattang). Hal ini menandakan sistem tektonik yang bekerja tidak selalu sama. Untuk lebih jelasnya geologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II-3
Peta Geologi Bulukumba



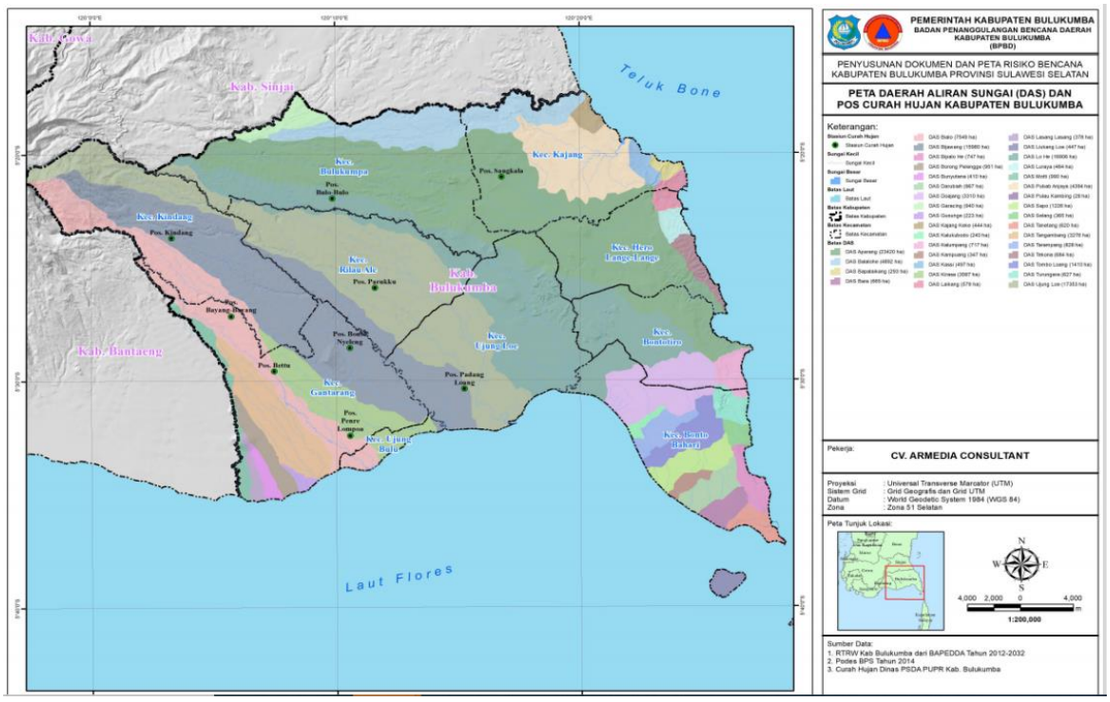
Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

4. Hidrologi

Sungai di Kabupaten Bulukumba terdapat 43 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 772,5 km dan yang terpanjang adalah

Sungai Balangbessi yakni 65.30 km, sedangkan yang terpendek adalah Sungai Balibo yakni 5 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. Untuk lebih jelasnya hidrologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada berikut di bawah ini.

Gambar II-4
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

5. Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23.82°C-27.68°C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki 14 (empat belas) stasiun penakar hujan yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan. Intensitas curah hujan cukup tinggi di periode pertengahan desember sampai dengan pertengahan bulan maret. Dan sepanjang tahun Kabupaten Bulukumba mendapatkan curah hujan berada di atas 1000 mm/ tahun di seluruh kecamatan. Hampir sebagian besar daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan sebagian bagian selatan sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada sebagian bagian selatan curah hujannya rendah.
Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa.
- Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujung Loe, Ujung Bulu, Bonto Tiro, Rilau Ale dan Kajang.
- Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, dan Kecamatan Bonto Bahari.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bulukumba merupakan wilayah dengan karakter wilayah relatif cukup beragam. Dengan karakter wilayah cukup beragam maka wilayah kabupatan Bulukumba ditandai oleh wilayah pertanian, perkebunan, wilayah hutan, perikanan dan sebagainya. Berbagai jenis karakter wilayah tersebut pada gilirannya menghasilkan berbagai jenis produk baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan sebagainya.

Selain itu dengan potensi dan kondisi wilayah yang ada maka ke depan beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian untuk dikembangkan agar produk yang dihasilkan oleh wilayah bersangkutan dapat dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Tutupan lahan di Kabupaten Bulukumba terdiri atas lahan sawah meliputi: irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, pengairan desa/non PU dan tadah hujan. Sedangkan lahan bukan sawah terdiri atas hutan rimba, perkebunan, perkebunan dan tempat kegiatan, semak belukar, alang-alang, tegalan, tambak, danau. Untuk jelasnya, penggunaan lahan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-2
Tutupan Lahan Di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Air Danau / Situ	1.19	0.002712
2.	Air Tambak	2658.60	1.714418
3.	Air Tawar Sungai	224.05	0.134834
4.	Hutan Rimba	9029.59	9.482225
5.	Perkebunan (Kebun Karet)	15.938	17.2654
6.	Permukiman dan Tempat Kegiatan	4777.82	2.584842
7.	Sawah	25853.75	22.59224
8.	Semak Belukar / Alang Alang	8543.27	7.281995
9.	Tanah Kosong / Gundul	152.62	0.131173
10.	Tegalan / Ladang	45043.48	38.81015
Total Jumlah		**117.425,91**	**100**

Hal ini menunjukkan bahwa ruang di Kabupaten Bulukumba masih didominasi oleh lahan tidak terbangun sehingga pengalokasian ketersediaan lahan skala kabupaten sangat dapat diaplikasikan dengan dikembangkannya kawasan budidaya antara lain :

1. Kawasan Hutan Produksi

Penetapannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan, hutan suaka alam, hutan wisata,dan hutan konservasi. Kriteria penetapan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

1. Kawasan hutan yang memiliki skor ≤ 124 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan) diluar hutan suaka alamdan hutan pelestarian alam;dan
2. Secara ruang jika digunakan untuk budidayaakan memberikan manfaat berupa:
   a. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektordan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
   b. Meningkatkan fungsi lindung;
   c. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
   d. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
   e. Meningkatkan pendapatan daerahdan nasional;
   f. Meningkatkan kesempatan kerja terutama masyarakat setempat;
   g. Meningkatkan ekspor; dan

h. Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.

Kawasan hutan produksi terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang dan dengan luas sekitar 1.013 (seribu tiga belas) hektar.

2. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Potensi masing-masing sumber daya yang ada satu sama lain tentunya sangat berbeda, yang disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang ada di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Luas kawasan peruntukan pertanian di kabupaten Bulukumba kurang lebih 86.788,38 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma tiga delapan) hektare. Kawasan Pertanian terdiri dari :

a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luasan 69.753,78 (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma tujuh delapan) hektare, terdapat disebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang.
b. Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura, dengan luasan total 11.869,58 (sebelas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma lima delapan) hektare terdiri dari :
    1. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan terdapat disebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagaian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari; dan
    2. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayur-sayuran terdapat disebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagaian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale.
c. Kawasan Tanaman Perkebunan dengan luas kurang lebih 5.165,02 (lima ribu seratus enam puluh lima koma nol dua) hektare di Kabupaten Bulukumba yang tersebar di wilayah Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang.

3. **Kawasan Peruntukan Perikanan**
    1. **Perikanan tangkap**

        Perairan Kabupaten Bulukumba merupakan daerah penangkapan yang baik untuk jenis ikan Pelagis seperti Kembung, Layang, Tembang, Teri, Lamuru, Cakalang, dan Balanak. Daerah penangkapan utama nelayan umumnya masih di perairan Kabupaten Bulukumba;dan

        Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat pada kawasan pesisir dan laut seluas 5,43 (lima koma empat tiga) hektare terdapat di Kecamatan Bontobahari.
    2. **Budidaya Perikanan**

        Budidaya laut wilayah pesisir di Kabupaten Bulukumba dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu ; budidaya tambak, budidaya laut (rumput laut), budidaya kolam dan budidaya sawah. Perikanan budidaya seperti tambak, laut, kolam, mina padi juga merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Komoditas budidaya tambak mayoritas adalah Ikan Bandeng, Udang Windu, Udang Api-api.

Komoditas budidaya kolam mayoritas adalah ikan mas dan ikan mujahir. Komoditas budidaya sawah (mina padi) mayoritas adalah ikan mas, mujair dan lele.

Selain usaha perikanan tersebut di atas juga terdapat komoditi rumput laut disepanjang pesisir pantai. Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, berupa kawasan perikanan budidaya seluas kurang lebih seluas 2.803,28 (dua ribu delapan ratus tiga koma dua delapan) hektare, Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdapat disemua Kecamatan yang terdiri atas:

a. Kawasan budidaya perikanan tambak dengan luasan ± 2.262 hektar ditetapkan disebagian Kecamatan Gantarang, sebagian Kecamatan Ujungbulu, sebagian Kecamatan Ujung Loe, sebagian Kecamatan Bontobahari, sebagian Kecamatan Bontotiro, sebagian Kecamatan Herlang, dan sebagian Kecamatan Kajang;
b. Kawasan budidaya perikanan air laut ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu;
c. Kawasan budidaya perikanan air payau ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Gantarang, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang; dan
d. Kawasan budidaya perikanan air laut dan air payau ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe.

3. **Pengelolaan Perikanan**
   a. Kawasan pengolahan ikan terdapat disebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Herlang dan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan; dan
   b. Pengembangan Kawasan minapolitan direncana kan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Bulukumba disebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Herlang dan dipusatkan di Kecamatan Kajang.

4. **Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi**

Arahan lokasi pengembangan kawasan pertambangan pada lokasi-lokasi yang terdapat potensi bahan tambang dan mempunyai potensi cadangan yang menguntungkan untuk dieksploitasi. Wilayah usaha pertambangan (WUP), adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Wilayah usaha pertambangan (WUP) ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Dalam mengelola usaha pertambangan , pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan (WUP) di Kabupaten Bulukumba, yang berupa kawasan pertambangan dan energi kawasan pertambangan batuan berupa batu gamping, batu andesit (batu gajah), kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil, tanah liat, dan tras seluas kurang lebih 62,04 (enam puluh dua koma nol empat) hektare terdapat di Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bontotiro.

5. **Kawasan Peruntukan Perindustrian**

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10,30 (sepuluh koma tiga nol) hektare di Kecamatan Gantarang.

6. **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kriteria pengembangan kawasan pariwisata , meliputi:

1. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam,dan lingkungan;

2. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata mampu memberikan manfaat:
   (1) Meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
   (2) Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektordan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
   (3) Tidak mengganggu fungsi lindung;
   (4) Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
   (5) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
   (6) Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
   (7) Meningkatkan kesempatan kerja;
   (8) Melestarikan budaya; dan
   (9) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Bulukumba seluas 1.060,86 (seribu enam puluh koma delapan enam) hektare, terdapat di Kecamatan Bontobahari,

7. **Kawasan Permukiman**

Kawasan yang diperuntukan bagi permukiman yang mempunyai ketersediaan air, lokasi terkait dengan kawasan hunian yang telah ada/berkembang, tidak terletak di kawasan pertanian, Kawasan permukiman seluas 16.199,66 (enam belas ribu seratus sembilan puluh sembilan koma enam enam) hektare yang dirinci meliputi kawasan :

a. Peruntukan permukiman perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan pada umumnya mengikuti jaringan jalan yang telah ada, hal ini mengingat aksessibilitas menjadi lebih tinggi. Sebagai akibatnya, kawasan permukiman perkotaan membentuk sistem linier yang memanjang sepanjang jalan,dan mengingat jalan yang ada berada di sepanjang pantai di Kabupaten Bulukumba, maka permukiman yang terbentuk adalah secara linier. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 5.517,02 (lima ribu lima ratus tujuh belas koma nol dua) hektare di Kabupaten Bulukumba, diarahakan pada :

a. Kecamatan Ujungbulu;
b. Kecamatan Ujung Loe;
c. Kecamatan Bontobahari;
d. Kecamatan Bontotiro;
e. Kecamatan Bulukumpa;
f. Kecamatan Kindang;
g. Kecamatan Gantarang; dan
h. Kecamatan Kajang.

Pengelolaan kawasan permukiman perkotaan diusahakan agar hanya memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif, dapat melayani kebutuhan penduduknya, kerapatan dan ketinggian bangunan yang sesuai, dan penyesuaian dengan sistem prasarana dan sarana dasar yang tersedia.

b. Peruntukan permukiman perdesaan

Sistem permukiman perdesaan adalah arahan hirarki pusat-pusat permukiman perdesaan sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pelayanan pemerintahan dan pusat pelayanan jasa bagi wilayah permukiman perdesaan sekitarnya. Pusat permukiman perdesaan merupakan pusat-pusat terkonsentrasinya penduduk dan kelengkapan fasilitas dengan dominasi kegiatan utama di sector pertanian .

Kriteria dalam penentuan pusat permukiman perdesaan adalah:

a. Wilayah Desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan Desa sekitarnya;

b. Desa-Desa yang memiliki potensi untuk tumbuhnya investasi;
c. Dapat berfungsi sebagai pusat perantara wilayah ;dan
d. Dapat berfungsi sebagai tempat penyediaan pelayanan pada Desa-Desasekitarnya.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana adalah kawasan yang ada di berkembang di luar kawasan perkotaan yang telah ditetapkan di Kabupaten Bulukumba, Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 10.682,64 (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh dua koma enam empat) hektare di Kabupaten Bulukumba, meliputi:

a. Kawasan Permukiman perdesaan Kecamatan Gantarang;
b. Kawasan Permukiman perdesaan Kecamatan Ujungbulu;
c. Kawasan Permukiman perdesaan Kecamatan Ujung Loe;
d. Kawasan Permukiman perdesaan Kecamatan Bontobahari;
e. Kawasan Permukiman perdesaan Kecamatan Bontotiro;
f. Kawasan Permukiman perdesaan Kecamatan Herlang;
g. Kawasan Permukiman perdesaan Kecamatan Kajang;
h. Kawasan Permukiman perdesaan Kecamatan Bulukumpa;
i. Kawasan Permukiman perdesaan Kecamatan Rilau Ale;dan
j. Kawasan Permukiman perdesaan Kecamatan Kindang.

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Bulukumba,adalah:

a. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan yang memadai terutama penyediaan air bersih, jalan dan listrik;
b. Penataan pusat-pusat perdesaan sehingga memberikan kesan yang asri, indah dan fungsional;
c. Perbaikan perumahan penduduk sehingga terpenuhinya persyaratan rumah tinggal yang layak huni;
d. Pengembanganpermukiman perdesaan di masa datang lebih diorientasikan ke lahan-lahan pertanian atau lahan usaha penduduknya dengankonsep agropolitan yang tepat; dan
e. Menghindari pembangunan permukiman perdesaan di kawasan hutan lindungdankawasan rawan bencana alam.

8. **Kawasan Transportasi**

Kawasan trasportasi seluas 97,50 (sembilan puluh tujuh koma lima nol) hektare, terdapat di Kecamatan Bontobahari dan Kecamatan Ujung Bulu.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Letak wilayah Kabupaten Bulukumba yang berhadapan langsung dengan Laut Flores menjadikan wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki gelombang pasang yang cukup tinggi. Daerah rawan abrasi terdapat di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari dan Kecamatan Herlang. Selain Abrasi, Gempa Bumi juga kerap terjadi walaupun masih dalam magnitudo yang rendah, merupakan salah satu wilayah yang dilintasi oleh sesar aktif, yaitu Sesar Walanae membentang dari arah barat laut hingga tenggara di wilayah Sulawesi Selatan. Sesar ini memiliki panjang sekitar 130 Km dan tergolong jenis sesar strike-slip (sesar geser).

Potensi bencana berkaitan dengan tanah longsor, banjir dan angin puting beliung masih cukup besar dirasakan oleh masyarakat Bulukumba, mengingat letak Kabupaten Bulukumba yang tepat di Kaki Gunung Lompobattang dan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Bialo, DAS Bijawang, DAS Balantieng, DAS Bonto Mate'ne, DAS Annyorang dan DAS Sangkala. Kondisi tanah yang labil dan perbukitan sehingga kerap terjadinya tanah

longsor disaat intensitas hujan yang cukup tinggi. Tanah longsor terjadi di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kindang, Gantarang, Rilau Ale dan Kajang. Hasil survei juga menunjukkan bahwa kawasan lereng Gunung Lompobattang sudah mulai gundul dan berpontensial banjir bandang, karna aliran air dari puncak ke lereng gunung akan semakin besar.

Upaya dalam pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan penyusunan kebijakan khusus untuk menanggulangi bencana alam. Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi meliputi kegiatan peringatan dini, mitigasi, dan kesiap-siagaan. Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk-bentuk kegiatan peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dapat dilakukan di wilayah potensi bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk-bentuk kegiatan peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dapat dilakukan sebagai berikut

A. Peringatan Dini Tsunami di Kawasan Perkotaan Bulukumba:
   - Melakukan penyusunan rencana darurat dan rencana siaga.
   - Melaksanakan simulasi bencana yang melibatkan masyarakat secara luas.
   - Membangun jaringan sistem peringatan dini (*early warning system*).
   - Peningkatan kapasitas institusi dan aparat yang terkait dengan penanganan bencana.

B. Mitigasi Bencana Tsunami di Kawasan Perkotaan Bulukumba

   1) Struktural

      Mitigasi struktural yang dapat dilakukan pada Kawasan Perkotaan Bulukumba adalah dengan melakukan pembuatan kawasan greenbelt, penentuan jalur evakuasi, penyediaan shelter evakuasi, dan pengembangan jaringan jalan pola grid.

   a) Greenbelt

      Penyediaan kawasan g*reenbelt* menitik beratkan pada pengaturan vegetasi di wilayah pesisir Kawasan Perkotaan Bulukumba dapat diisi pohon cemara udang maupun mangrove kemudian diatur sedemikian rupa berdasarkan bentuk dan tinggi jenis pohon tersebut. Mangrove berfungsi sangat vital bagi aspek geologi, terutama untuk mempertahankan stabilitas substrat, mencegah erosi dan abrasi, sumber makanan biota laut, dan mampu meredam hantaman gelombang tsunami.

   b) Jalur Evakuasi

      Penentuan jalur evakuasi didasarkan pada variabel ketinggian, kelerengan, aksesibilitas, jumlah lantai bangunan, hirarki jalan, lebar jalan, daya tampung jalan, waktu tempuh, struktur jalan, jarak menuju lokasi evakuasi, jumlah penduduk di pusat kegiatan, kepadatan penduduk, dan jumlah penduduk berdasarkan umur.

   c) Shelter Evakuasi

      Jika bencana tersebut berupa bencana tsunami, penentuan shelter evakuasi dengan berdasar kriteria sebagai berikut.
      - Terletak pada jarak lebih dari 200 meter dengan garis pantai atau 100 meter dengan sungai yang berada dekat pantai;
      - Terletak dekat dengan konsentrasi penduduk;
      - Memiliki fungsi alternatif seperti mesjid, sekolah, kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, convention centre, gelanggang olahraga, hotel dan gedung parkir;
      - Lantai gedung yang digunakan sebagai tempat evakuasi memiliki ketinggian di atas ketinggian gelombang tsunami;

- Didesain dan terencana dengan baik. Jika bencana tersebut berupa bencana gempabumi, maka shelter evakuasi diarahkan pada ruang terbuka ataupun pada bangunan yang memiliki kualitas konstruksi tahan akan bencana gempa.

2) Non Struktural

Mitigasi non struktural yang dapat dilakukan pada Kawasan Perkotaan Bulukumba adalah sebagai berikut.

a) Pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tsunami serta pengembangan sistem peringatan dini adanya bahaya bencana;
b) Mempersiapkan pos sistem pemantauan ancaman bencana tsunami;
c) Pembangunan rumah maupun bangunan lainnya menggunakan konstruksi yang tahan terhadap hantaman gelombang;
d) Memberi arahan kepada penduduk untuk memiliki alat-alat 'darurat tsunami' seperti lampu senter maupun obat-obatan.

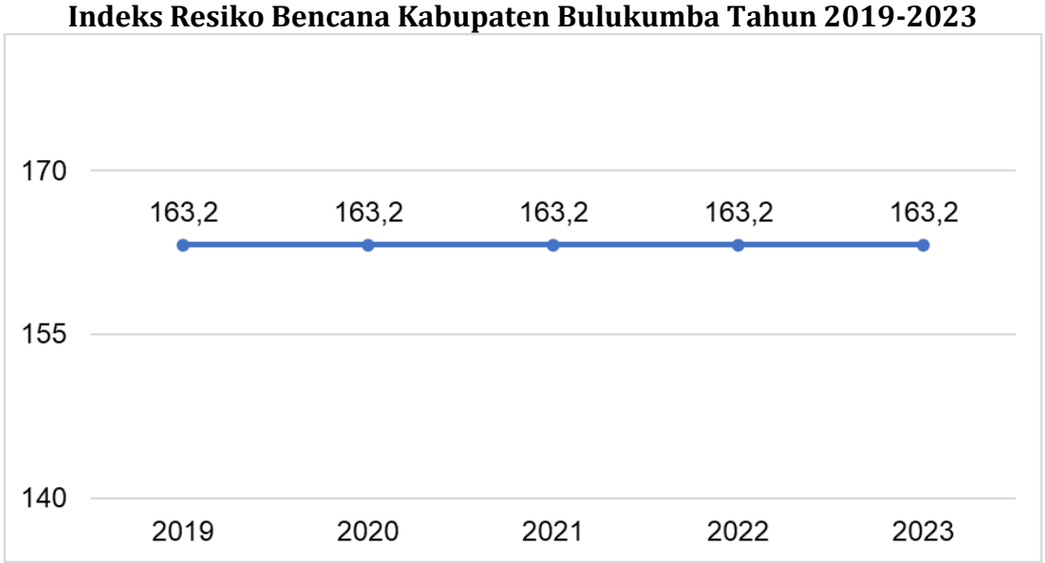
C. Kesiapsiagaan Bencana

1) Melakukan pelatihan siaga atau simulasi atau gladi teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum);
2) Mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
3) Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
4) Menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumberdaya dan logistik;
5) Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;
6) Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan).

Kebakaran merupakan bencana yang paling sering terjadi utamanya di musim kemarau. Untuk memadamkan kebakaran telah disediakan armada berjumlah 11 (sebelas) unit tetapi diantaranya 2 (dua) unit dalam kondisi rusak berat. Untuk mempercepat akses layanan ke titik lokasi kebakaran, maka sektor pemadam kebakaran ditempatkan disetiap kecamatan.

Indeks resiko bencana merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Adapun indeks risiko bencana Kabupaten Bulukumba tertera pada tabel berikut :

Grafik II-2
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023



Berdasarkan hasil analisa kajian risiko Kabupaten Bulukumba didapatkan indeks risiko bencana sebesar 163,2 selama 5 tahun terakhir. Angka tersebut termasuk dalam kategori kelas risiko yang tinggi dibandingkan dengan provinsi dan nasional yang berada pada angka 150,07 dan 98,49 pada tahun 2022. Secara umum Bencana di Kabupaten Bulukumba adalah Bencana Hidrometeorologi yaitu bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.

Tingginya Indeks resiko bencana di Kabupaten Bulukumba dikarenakan letak geografis berada di kaki Gunung Lompobattang dan Gunung Bawakaraeng, berdasarkan hasil survei juga menunjukkan bahwa kawasan lereng Gunung sudah mulai gundul dan berpotensi banjir bandang karena aliran air dari puncak ke lereng gunung akan semakin besar, sehingga kondisi ini berpotensi terjadinya tanah longsor. Beberapa wilayah di sepanjang garis pantai terjadi abrasi dengan naiknya permukaan air laut yang menyebabkan kerusakan dan timbulnya banjir rob.

Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat sampai ke pemulihan rehabilitasi dan rekontruksi.

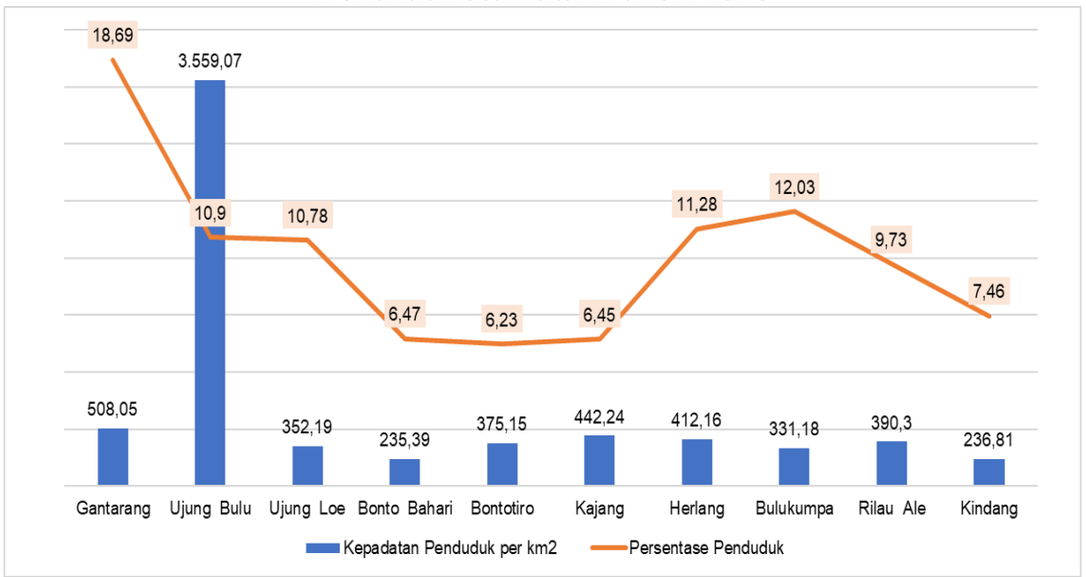
2.1.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan data BPS penduduk tahun 2023 adalah 471.688 jiwa, yang terdiri atas 230.557 jiwa penduduk laki-laki dan 241.131 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2023, penduduk di Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 2,76 persen dari tahun 2020-2023. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 95,6 persen, selengkapnya pada gambar berikut.

1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulukumba tahun 2023 mencapai 403,12 jiwa/km^2. Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Ujung Bulu dengan kepadatan sebesar 3.559,07 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Bontobahari sebesar 235,39 jiwa/Km^2.

Grafik II-3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba
Menurut Kecamatan Tahun 2023

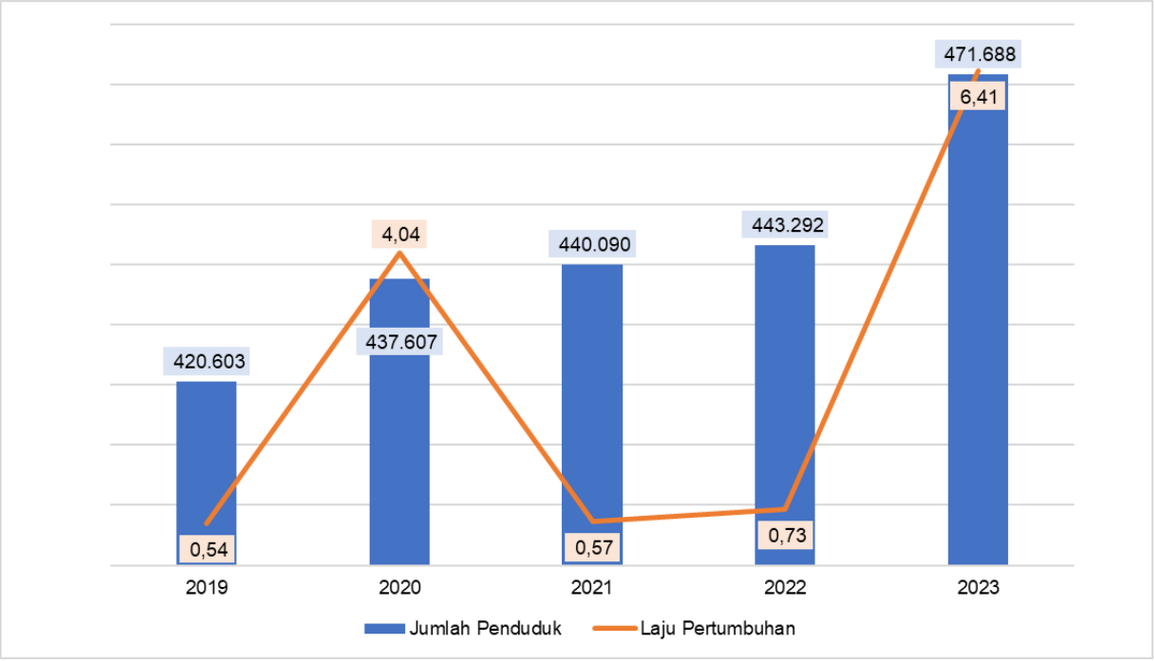


Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2024 (Diolah)

Sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Gantarang, dengan jumlah penduduk sebesar 88.151 jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bontotiro dengan jumlah penduduk sebesar 29.389 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2023 jika dilihat dari diagram penduduk menunjukkan jenis ekspansif dimana jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan dan pada tahun 2020 hingga 2023 dilakukan Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Berdasarkan data pada Tabel di bawah, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sebanyak 420.603 jiwa. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 471.688 jiwa. Artinya selama lima tahun terkahir, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba bertambah sekitar 51.085 jiwa atau 2,46 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-3
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2024 (Diolah)

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi/ rendahnya tingkat kelahiran, jumlah penduduk lansia serta dapat mencerminkan angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan atau yang sering disebut Dependency Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun & 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun). Dependency ratio dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba, 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0–4	14.662	13.807	28.469
5–9	19.869	18.431	38.300
10–14	21.833	20.447	42.280
15–19	16.734	17.029	33.763
20–24	20.143	20.991	41.134
25–29	17.197	17.530	34.727
30–34	16.108	16.504	32.612
35–39	17.079	17.924	35.003
40–44	18.124	19.121	37.245
45–49	16.666	17.748	34.414
50–54	16.489	17.378	33.867
55–59	11.300	13.290	24.590
60–64	8.588	10.484	19.072
65–69	6.005	7.394	13.399
70–74	4.299	5.379	9.678
75+	5.461	7.674	13.135
Bulukumba	**230.557**	**241.131**	**471.688**

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025

Selanjutnya, untuk mengetahui komposisi penduduk di Kabupaten Bulukumba menurut jenis kelaminnya. Rasio Jenis Kelamin (RJK) tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel, Informasi mengenai Rasio Jenis Kelamin dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-5
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 14	102,06	104,59	104,48	104,35	106,98
15 - 65	87,31	93,79	93,96	94,12	94,30
65 +	69,15	81,13	81,14	81,18	77,10
Total	89,54	95,22	95,24	95,26	95,61

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2024 (Diolah)

Pada tahun 2023, Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba sebesar 96 (dibulatkan). Artinya, setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 96 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk perempuan di Kabupaten Bulukumba lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jika dilihat menurut kelompok umur, komposisi penduduk usia 0-14 tahun justru menunjukkan perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada Tahun 2023, Rasio Jenis Kelamin untuk penduduk usia 0-14 tahun adalah sebesar 106,98. Sementara itu, untuk penduduk usia 15-16 tahun dan usia 65 tahun keatas komposisinya menunjukkan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Rasio Jenis Kelamin penduduk usia 15-65 tahun sebesar 94,30 pada tahun 2023. Untuk penduduk usia 65 tahun keatas Rasionya sebesar 77,10.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator diantaranya sebagai berikut;

1. Petumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,30 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19, dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan aktifitas ekonomi tidak lancar sehingga perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh kabupaten/kota. Namun, seiring berjalannya waktu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan yang positif. Pertumbuhan rata-ratanya masih relatif berimbang pada daerah setara, diantaranya Selayar, Bulukumba, Pangkep, Luwu Utara dan Luwu Timur. Pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir terhadap daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut.

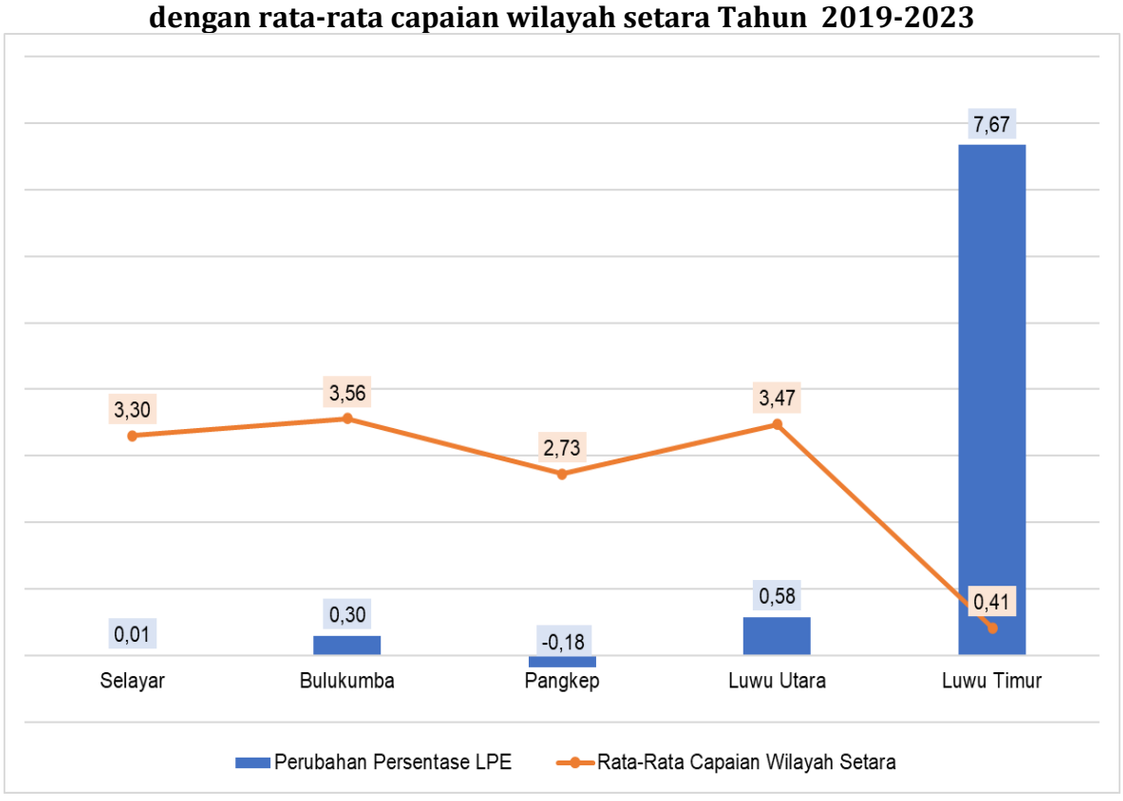
Tabel II-6
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi					Perubahan Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata capaian wilayah setara
	2019	2020	2021	2022	2023		
Selayar	7,66	-1,78	4,02	3,67	3,68	0,01	3,30
Bulukumba	5,49	0,43	4,76	3,81	4,11	0,30	3,56
Pangkep	6,41	-1,69	3,46	4,93	4,75	-0,18	2,73
Luwu Utara	7,11	-0,59	3,90	4,54	5,12	0,58	3,47
Luwu Timur	1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66	7,67	0,41

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan sebesar 4,11 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 3,81 persen. Adapun perbandingan Perkembangan pertumbuhan ekononi khususnya wilayah yang setara dengan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut.

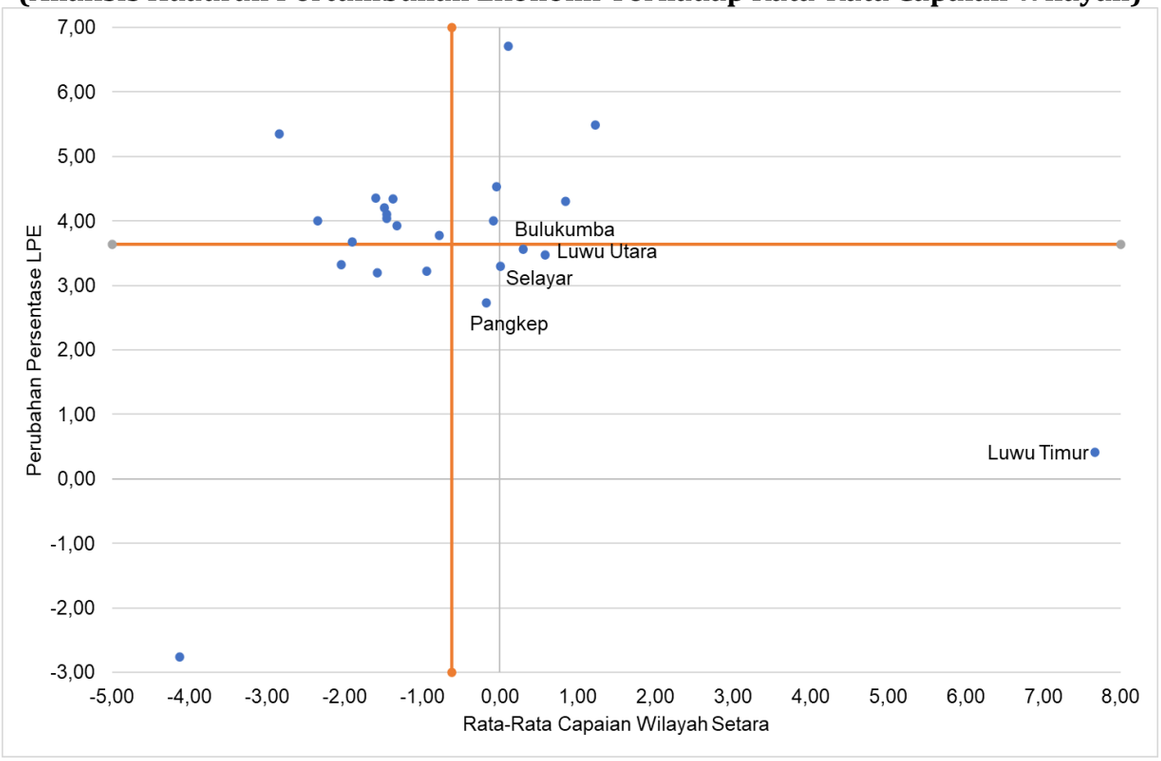
Grafik II-4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019-2023



Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025 (diolah)

Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan rata-rata capaian tahun 2019-2023 pada Kabupaten Bulukumba berada pada kuadran IV dengan Kabupaten Selayar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, ini dipengaruhi berdasarkan capaian pertumbuhan yang relatif rendah begitupun dengan rata-rata capaiannya pada tahun 2019-2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Kuadran II-1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023
(Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Rata-Rata Capaian Wilayah)

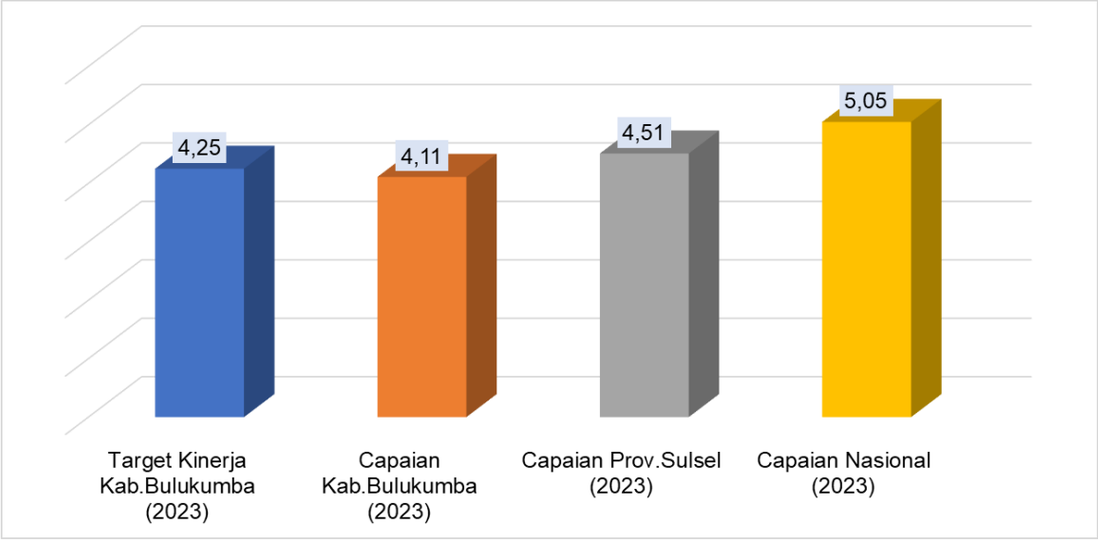


Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 belum mencapai target. Target Pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2023 yaitu sebesar 4,25 persen dengan capaian yang sebesar 4,11 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2023 masih rendah jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,51 persen dan Nasional sebesar 5,05 persen.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-5
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan target daerah dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2023



Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi year-on-year tahun 2023 sebesar 4,11%. Pertumbuhan ekonomi ini dibedakan menjadi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yaitu sebesar Rp18.870,56 Miliar dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yaitu sebesar 9.741,40 Miliar dengan PDRB Per Kapita sebesar Rp 41,90 Juta. Jika dilihat menurut Lapangan Usaha, Pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada sektor Jasa Lainnya (11,64%), Konstruksi (10,77), Pengadaan Listrik dan Gas (10,57), Jasa Perusahaan (8,19%) dan Jasa Keuangan dan Asuransi (7,89%). Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan share tertinggi sebesar 37,59% diikuti Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,59 serta Sektor Konstruksi sebesar 11,53%.

Tabel II-7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba (persen), 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,13	-1,12	3,65	0,61	1,07
B	Pertambangan dan Penggalian	3,14	2,09	3,06	-2,31	7,17
C	Industri Pengolahan	11,76	-3,59	5,72	8,41	5,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,24	3,76	8,91	12,63	10,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,52	5,11	0,01	9,89	2,04
F	Konstruksi	3,27	5,11	5,12	7,12	10,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,93	-1,25	6,51	5,37	4,25
H	Transportasi dan Pergudangan	9,67	-14,41	5,95	10,17	5,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,22	-1,99	5,88	19,98	7,67
J	Informasi dan Komunikasi	7,66	11,92	4,42	6,79	5,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,65	9	7,54	7,8	7,89
L	Real Estate	2,18	1,03	3,28	6,19	4,98
M,N	Jasa Perusahaan	10,43	-4,44	6,8	-3,11	8,19

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,35	-0,43	4,36	-0,41	2,24
P	Jasa Pendidikan	3,31	9,27	4,12	-0,19	3,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,71	6,31	6,39	10,07	7,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,91	-1,2	8,81	17,62	11,64
	Produk Domestik Regional Bruto	5,49	0,43	4,76	3,81	4,11

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025

Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan diberbagai sektor lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2023 sebesar 9.741.403,88 juta rupiah, capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 yang nilainya sebesar 9.357.105,91 juta rupiah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-8
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.273.767,92	3.237.166,80	3.355.167,97	3.375.515,89	3.411.726,86
B	Pertambangan dan Penggalian	183.586,14	187.423,10	193.158,23	188.696,28	202.225,80
C	Industri Pengolahan	593.899,03	572.546,10	605.310,82	656.241,40	689.667,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.708,05	16.300,80	17.753,75	19.995,24	22.108,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.332,11	3.498,00	3.498,33	3.844,24	3.922,67
F	Konstruksi	760.124,09	798.966,40	839.873,51	899.642,11	996.533,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.444.433,94	1.426.383,90	1.519.221,25	1.600.788,14	1.668.811,81
H	Transportasi dan Pergudangan	199.063,21	170.370,30	180.507,08	198.870,50	209.953,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.831,86	57.658,90	61.047,78	73.245,09	78.859,95
J	Informasi dan Komunikasi	341.290,67	381.979,70	398.863,18	425.945,99	447.967,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	304.229,51	331.596,40	356.591,23	384.408,09	414.720,98
L	Real Estate	393.674,14	397.735,00	410.780,74	436.208,06	457.931,23
M,N	Jasa Perusahaan	1.798,09	1.720,50	1.838,51	1.781,34	1.927,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	561.037,80	558.607,30	582.952,26	580.574,39	593.591,95
P	Jasa Pendidikan	262.551,00	286.880,40	298.699,83	298.132,30	308.686,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97.025,08	103.145,90	109.736,94	120.787,46	129.580,78
R,S,T,U	Jasa Lainnya	73.102,50	72.220,40	78.583,05	92.429,39	103.188,17
	Produk Domestik Regional Bruto	**8.567.455,14**	**8.604.200,90**	**9.013.584,47**	**9.357.105,91**	**9.741.403,88**

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025

Tahun 2023 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Bulukumba mencapai 18.870.558,58 juta rupiah, nilai tersebut mengalami peningkatan jika

dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 17.233.311,24 juta rupiah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-9
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019 – 2023

LapanganUsaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.277.238,38	5.369.176,70	5.932.125,62	6.394.119,86	7.092.936,22
B	Pertambangan dan Penggalian	384.752,43	401.041,10	418.575,13	421.457,64	464.511,74
C	Industri Pengolahan	973.445,68	950.298,20	1.027.683,66	1.150.815,15	1.233.849,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.944,65	16.320,50	17.553,49	19.978,09	25.043,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.330,24	4.569,60	4.870,67	5.400,45	5.572,84
F	Konstruksi	1.447.690,40	1.543.900,10	1.690.339,41	1.901.441,58	2.175.373,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.443.283,05	2.463.874,00	2.684.236,81	2.923.619,32	3.130.227,84
H	Transportasi dan Pergudangan	339.972,98	301.703,60	338.751,60	397.409,74	465.789,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108.362,60	106.662,90	114.064,77	138.585,21	152.949,66
J	Informasi dan Komunikasi	459.679,42	516.013,30	550.878,31	596.454,50	630.057,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	501.216,42	546.997,00	605.563,29	697.129,81	769.446,72
L	Real Estate	618.538,06	626.137,00	648.713,73	697.337,62	738.200,89
M,N	Jasa Perusahaan	4.843,80	4.756,90	5.173,57	5.196,22	5.798,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	907.915,29	919.620,80	969.450,28	971.476,52	1.008.055,78
P	Jasa Pendidikan	427.430,38	475.621,90	506.757,32	507.886,32	526.030,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	185.685,59	204.182,90	224.470,31	248.608,02	269.677,51
R,S,T,U	Jasa Lainnya	114.264,57	114.610,10	129.656,39	156.395,21	177.036,64
	Produk Domestik Regional Bruto	**14.214.593,94**	**14.565.486,50**	**15.868.864,34**	**17.233.311,24**	**18.870.558,58**

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025

Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,59 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,59 persen); Konstruksi (11,53 persen).

Tabel II-10
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,13	36,86	37,38	37,1	37,59
B	Pertambangan dan Penggalian	2,71	2,75	2,64	2,45	2,46
C	Industri Pengolahan	6,85	6,52	6,48	6,68	6,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,12	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	10,18	10,6	10,65	11,03	11,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,19	16,92	16,92	16,96	16,59
H	Transportasi dan Pergudangan	2,39	2,07	2,13	2,31	2,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,73	0,72	0,8	0,81

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
J	Informasi dan Komunikasi	3,23	3,54	3,47	3,46	3,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,53	3,76	3,82	4,05	4,08
L	Real Estate	4,35	4,3	4,09	4,05	3,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,39	6,31	6,11	5,64	5,34
P	Jasa Pendidikan	3,01	3,27	3,19	2,95	2,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,4	1,41	1,44	1,43
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,8	0,79	0,82	0,91	0,94
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat. Secara umum, pada periode tahun 2019-2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada tahun 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi *Covid-19*.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba sebesar 30.650 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 406 .882/kapita/bulan. Jumlah penduduk miskin tahun 2023 mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, dengan persentase penurunan sebesar 0,17 persen.

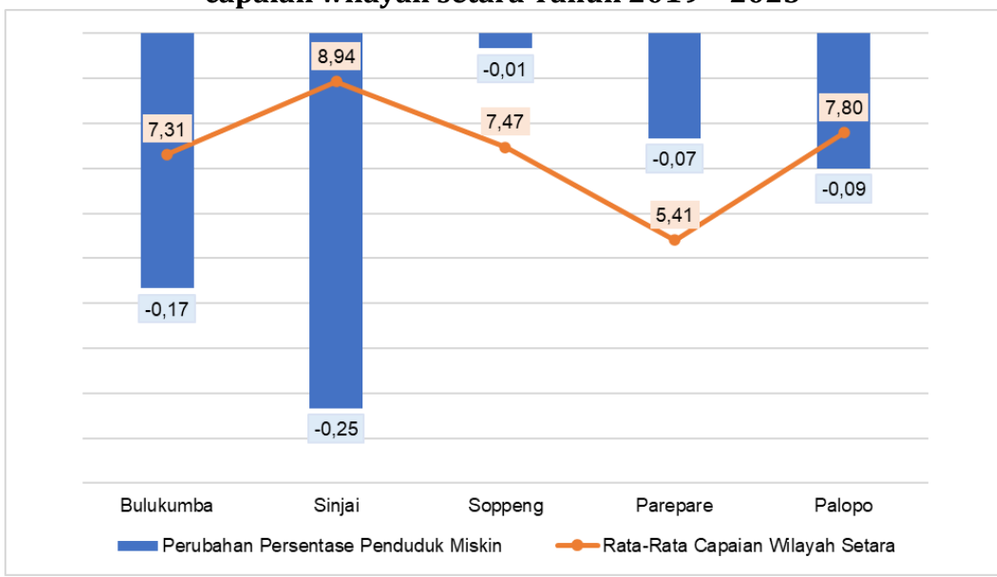
Tabel II-11
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023

No	Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Bulukumba	7,26	7,10	7,43	7,39	7,22	7,31
2	Sinjai	9,14	9,00	8,84	8,80	8,55	8,94
3	Soppeng	7,25	7,59	7,53	7,49	7,48	7,47
4	Parepare	5,26	5,44	5,40	5,41	5,34	5,41
5	Palopo	7,82	7,85	8,14	7,78	7,69	7,80

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 (diolah)

Jika diperbandingkan persentase penduduk miskin secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2019-2023, persentase kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Sinjai dengan nilai rata-rata sebesar 8,94 persen dan disusul oleh Kabupaten Palopo sebesar 7,80 persen. Adapun rata-rata persentse kemiskinan yang terendah adalah Pare-Pare yaitu 5,41 persen, demikian pula perubahan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan dan daerah setaranya dapat dilihat pada grafik berikut.

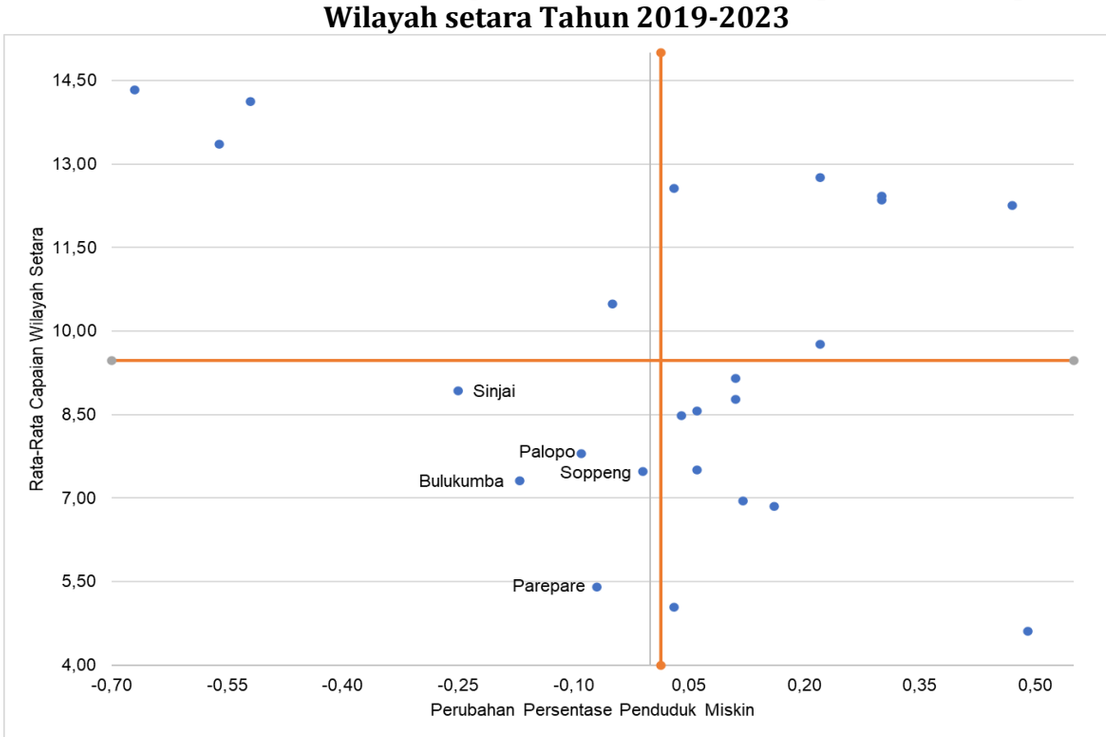
Grafik II-6
Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi kemiskinan, baik itu berdasarkan jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskinnya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

Kuadran II-2
Analisis Kuadran Perubahan Angka Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019-2023

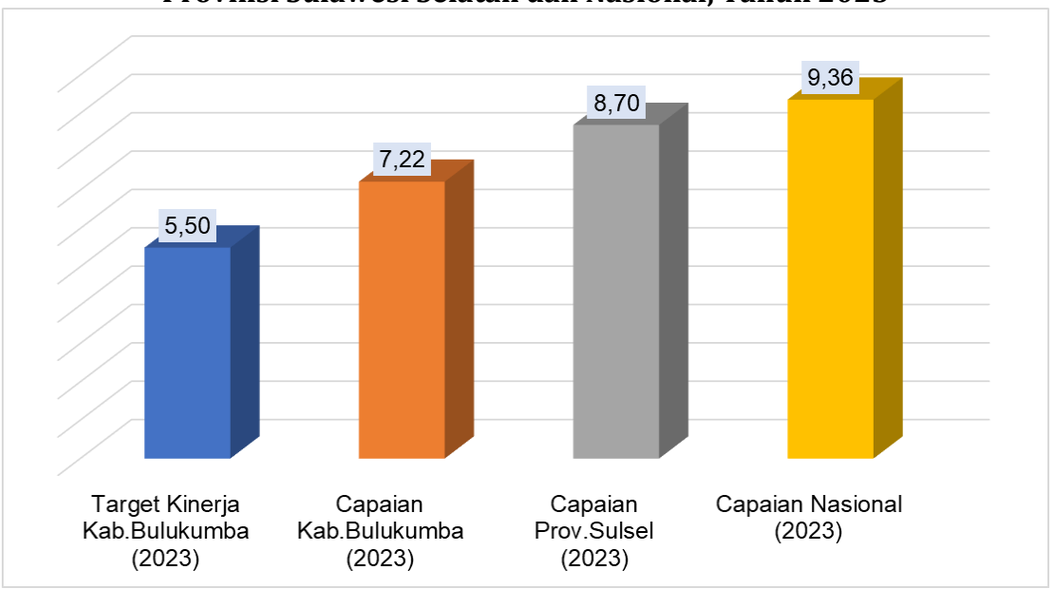


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 (diolah)

Adapun target Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 adalah 5,50 persen dengan capaian diangka 7,22 persen (lebih tinggi daripada angka target), ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari perhitungan target sebelumnya. Akan tetapi Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang mencapai angka 8,70 persen dan 9,36 persen (Maret 2023). Secara lengkap perbandingan antara target Kabupaten Bulukumba

dengan capaian perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-7
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Target Daerah, dan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 (diolah)

Periode tahun 2019-2023 garis kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, garis kemiskinan mencapai Rp.390.040, kemudian meningkat menjadi Rp406.882 atau meningkat sebesar Rp.16.842,-/kapita/bulan pada tahun 2023. Jika diperbandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, rata-rata capaian Garis Kemiskinan Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah dalam kurun waktu 2019-2023. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-12
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023

Wilayah/Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba	Rp/Kapita/ Bulan	330.161	351.180	369.022	390.040	406.882
Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan	Rp/Kapita/ Bulan	341.555	362.031	384.455	399.755	436.025
Garis Kemiskinan Nasional	Rp/Kapita/ Bulan	423.231	338.699	486.168	505.469	550.458

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 (diolah)

Ditinjau dari jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,74 persen, lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan 91,31 persen dan Nasional 90,59 persen. Demikian pula halnya pada tahun 2023, penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,78 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 91,30 persen dan Nasional pada Maret 2023 yaitu 90,64 persen.

Tabel II-13
Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2019-2023

Wilayah	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk di Atas Garis Kemiskinan						
Kab. Bulukumba	%	92,74	92,90	92,57	92,61	92,78
Prov. Sulawesi Selatan	%	91,31	91,28	91,22	91,37	91,30
Nasional	%	90,59	90,22	90,29	90,43	90,64

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Perbandingan penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional tersebut, menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan kabupaten Bulukumba lebih baik daripada kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2023 jumlah Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba sebesar 1,16 nilai indeks, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang nilainya sebesar 0,99 nilai indeks. Selengkapnya pada tabel berikut.

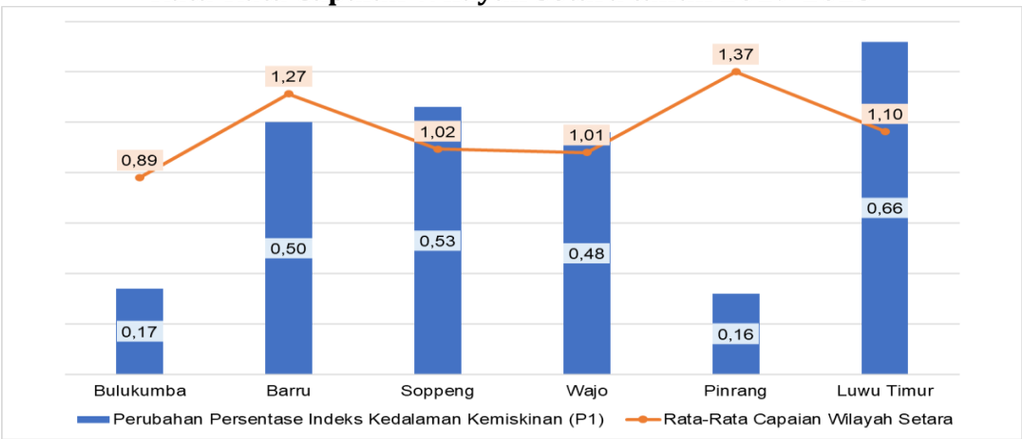
Tabel II-14
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023

No	Kabupaten/ Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Persentase	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Bulukumba	0,6	0,71	1,00	0,99	1,16	0,17	0,89
2	Barru	1,07	1,31	1,52	0,98	1,48	0,50	1,27
3	Soppeng	0,69	0,83	1,24	0,91	1,44	0,53	1,02
4	Wajo	1,06	0,98	0,79	0,86	1,34	0,48	1,01
5	Pinrang	1,54	1,27	1,77	1,06	1,22	0,16	1,37
6	Luwu Timur	1,11	1,05	1,09	0,8	1,46	0,66	1,10

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Pada tahun 2023 perubahan tertinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan dialami oleh Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Soppeng sebesar 0,66 poin dan 0,53 poin dan perubahan yang terendah adalah Kabupaten Pinrang dengan nilai perubahan sebesar 0,16 poin, Adapun Perbandingan Pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba dengan wilayah setara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

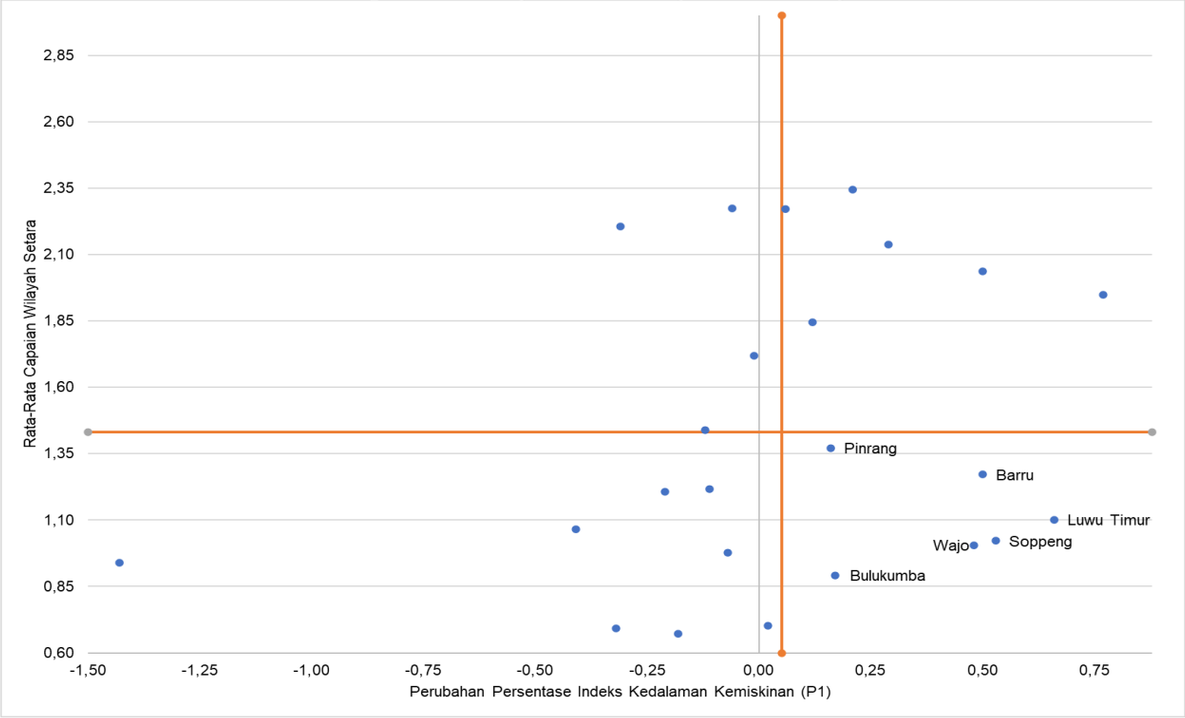
Grafik II-8
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi kemiskinan, baik itu berdasarkan perubahan P1 dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

Kuadran II-3
Analisis Kuadran Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara (2019-2023)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Ditinjau dari Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 1,16 lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan 1,57 dan capaian Nasional (2022) yaitu 1,58. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-15
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2019-2023

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bulukumba	0,60	0,71	1,00	0,99	1,16
Prov. Sulawesi Selatan	1.63	1.65	1,39	1,36	1,57
Nasional	1.50	1.75	1,67	1,58	

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 adalah sebesar 248.205 jiwa, yang terdiri dari 244.955 jiwa penduduk yang berkerja, dan 3.250 jiwa pengangguran terbuka. Selain itu, jumlah bukan angkatan kerja adalah 102.475 jiwa, dengan rincian 27.044 jiwa penduduk yang bersekolah, 60.544 jiwa penduduk yang mengurus rumah tangga, dan 14.887 jiwa lainnya. Untuk tahun 2023 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bulukumba adalah 1,31 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah 70,78 persen. Untuk lebih jelasnya statistik ketenagakerjaan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

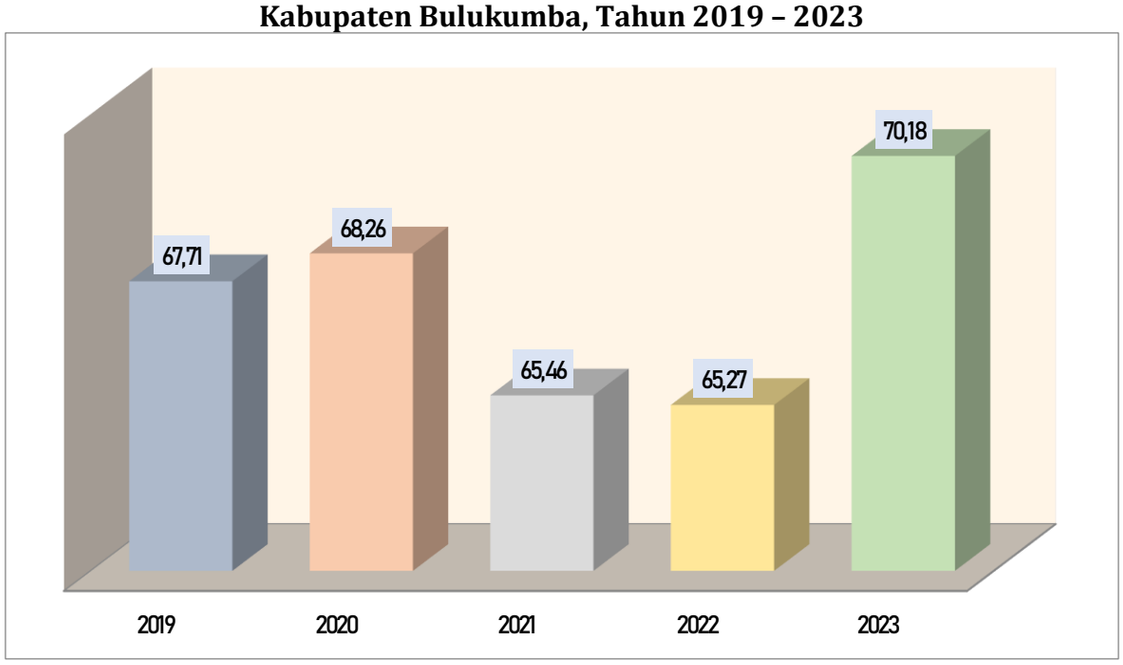
Tabel II-16
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba tahun 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	**142.933**	**105.272**	**248.205**
1. Bekerja	141.577	103.378	244.955
2. Pengangguran Terbuka	1.356	1.894	3.250
II. Bukan Angkatan Kerja	**26.005**	**76.470**	**102.475**
1. Sekolah	11.087	15.957	27.044
2. Mengurus Rumah Tangga	6.043	54.501	60.544
3. Lainnya	8.875	6.012	14.887
Jumlah	**168.938**	**181.742**	**350.680**

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja dan merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 sebesar 70,78 persen. Indikator ini mengalami Pertumbuhan 7,5 persen dibanding TPAK Agustus 2022. Penurunan TPAK disebabkan menurunnya angkatan kerja. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik II-9
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (periode Agustus)
Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019 – 2023



Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025

Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut: Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengganggur terbuka (open unemployment).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 adalah sebesar 1,31 persen. Pada Agustus 2023, nilai TPT mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 3,97 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Tingkat pengangguran terbuka untuk daerah wilayah setara dengan Kabupaten Bulukumba mengalami tren berfluktuatif. TPT tertinggi adalah Kabupaten Wajo sebesar 3,26 persen dan terendah dialami oleh Kabupaten Sinjai hanya sebesar 2,18 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

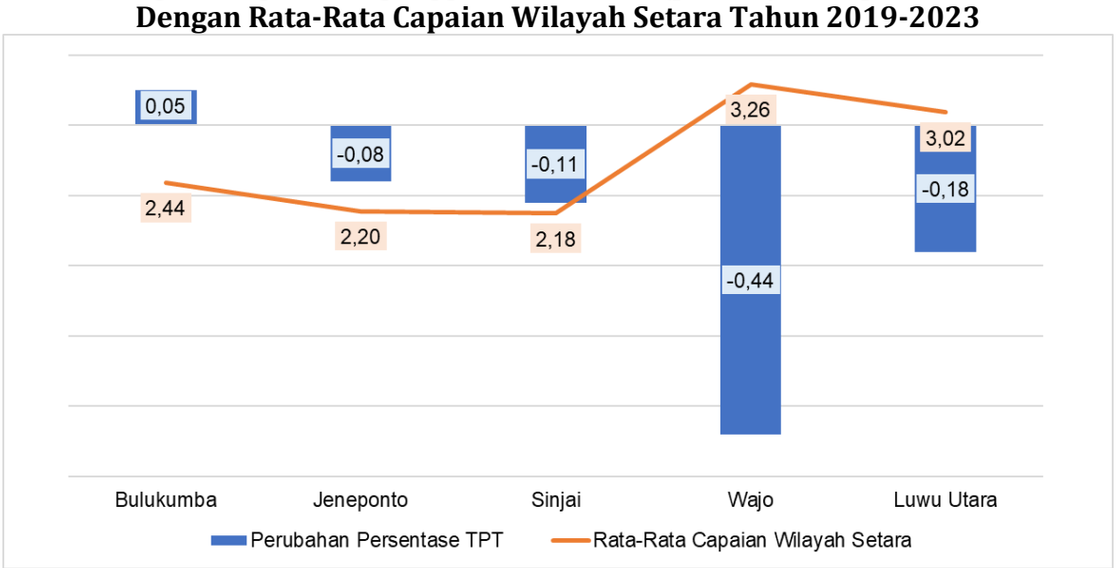
Tabel II-17
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023

No	Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					Perubahan Persentase TPT	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Bulukumba	3,06	3,42	3,14	1,26	1,31	0,05	2,44
2	Jeneponto	1,99	2,31	2,38	2,21	2,13	-0,08	2,20
3	Sinjai	2,17	2,65	2,61	1,80	1,69	-0,11	2,18
4	Wajo	3,00	4,33	4,32	2,54	2,10	-0,44	3,26
5	Luwu Utara	2,76	3,01	3,91	2,81	2,63	-0,18	3,02

Sumber : Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba), Tahun 2024

Dari data TPT untuk 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, sebagian besar mengalami penurunan TPT dari tahun 2022. Capaian ini merupakan upaya dari pemerintah pusat dengan adanya beberapa program untuk pemulihan ekonomi mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke beberapa sektor yang tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba dengan wilayah setara tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

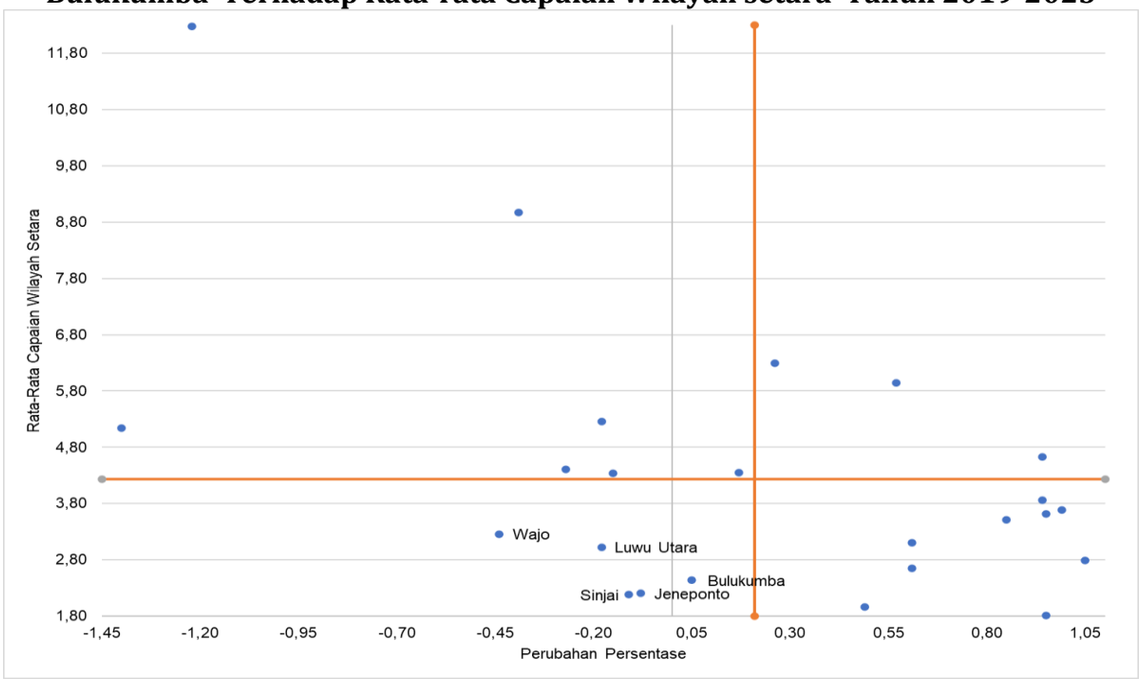
Grafik II-10
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kabupaten Bulukumba Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara Tahun 2019-2023



Sumber : Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba), Tahun 2024

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), baik itu berdasarkan perubahan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

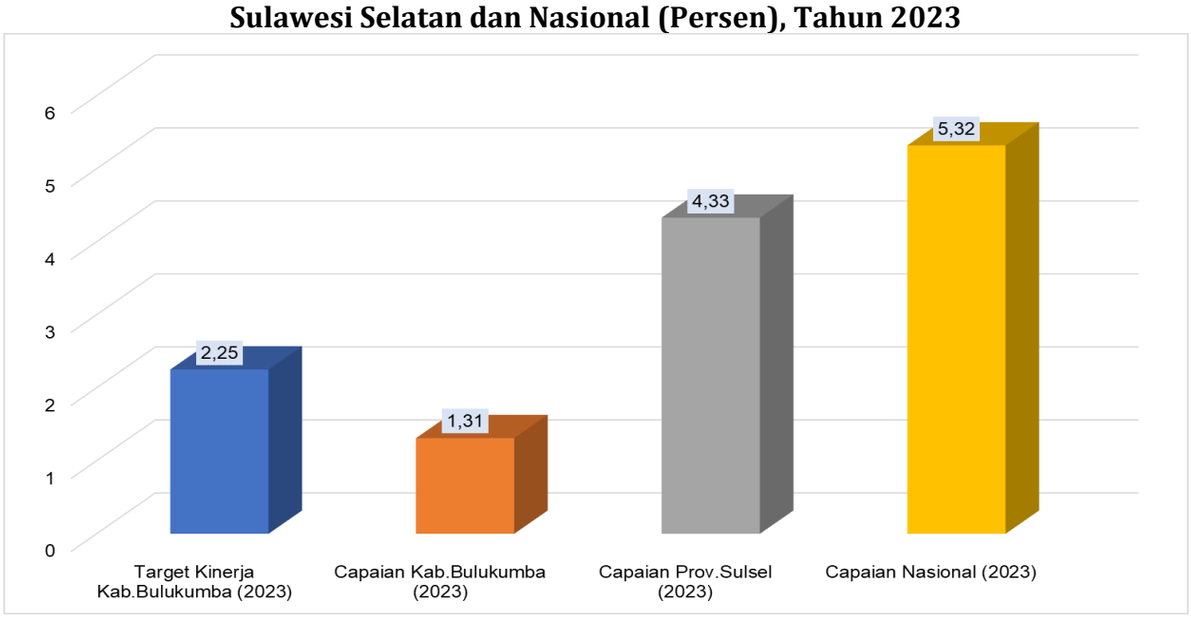
Kuadran II-4
Analisis Kuadran Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Capaian Kinerja untuk TPT Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 sebesar 1,31 persen, ini menandakan bahwa capaian kinerja mengalami perubahan yang positif karena ditandai dengan adanya penurunan jumlah pengangguran terbuka dari tahun sebelumnya. Dan perbandingan TPT Kabupaten Bulukumba jauh lebih baik dibanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dimana angka pengangguran terbuka mencapai 4,33 persen dan 5,32 persen. Ini menandakan bahwa angka pengangguran terbuka untuk provinsi dan nasional jauh lebih besar dibanding angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya pada tabel berikut.

Grafik II-11
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

4. Gini Ratio

Koefisien Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh. Todaro 1994 memberikan kriteria ketimpangan berdasarkan nilai Gini rasio diantaran ; Rasio Gini < 0,35 (rendah), Rasio Gini 0,35-0,5 (moderat) dan Rasio Gini > 0,5 (tinggi). Pada periode tahun 2019-2023 Capaian Rasio Gini di Kabupaten Bulukumba mengalami tren yang berfluktuasi dengan kategori "Ketimpangan Moderat"..

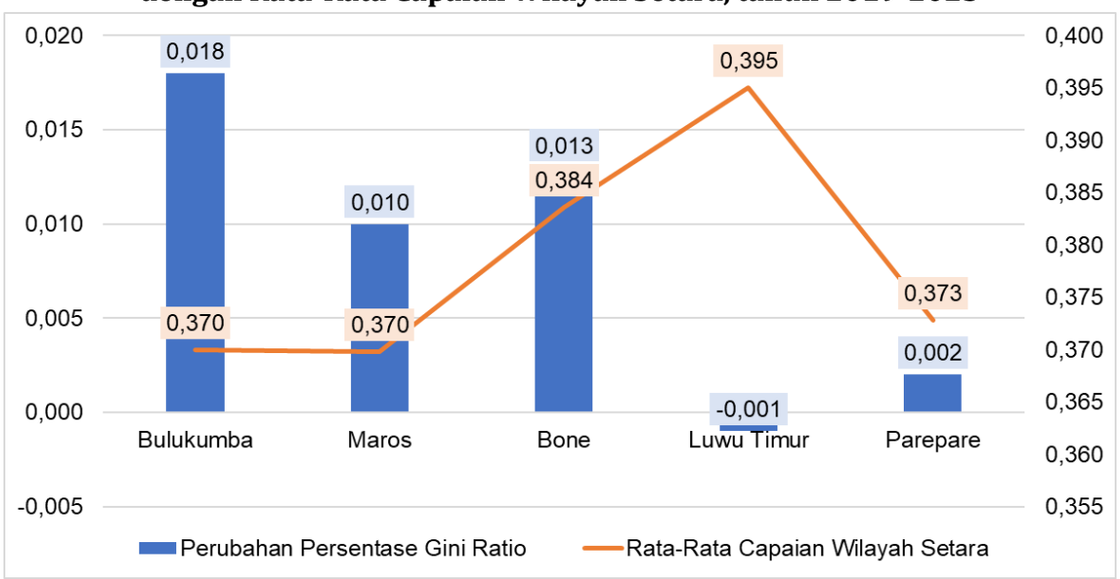
Tabel II-18
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023

No	Kabupaten/ Kota	Gini Ratio					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Bulukumba	0,377	0,371	0,362	0,361	0,379	0,018	0,370
2	Maros	0,382	0,368	0,365	0,362	0,372	0,010	0,370
3	Bone	0,366	0,404	0,383	0,376	0,389	0,013	0,384
4	Luwu Timur	0,387	0,405	0,396	0,394	0,393	-0,001	0,395
5	Parepare	0,350	0,373	0,381	0,379	0,381	0,002	0,373

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Adapun perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba tahun 2023 adalah sebesar 0,379, dan mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian Gini Ratio tahun 2022 yang nilainya mencapai 0,361 atau mengalami peningkatan 0,018 poin. Adapun perbandingan Pertumbuhan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara secara lengkap rata-rata Capaian Wilayah Setara dapat dilihat pada grafik berikut.

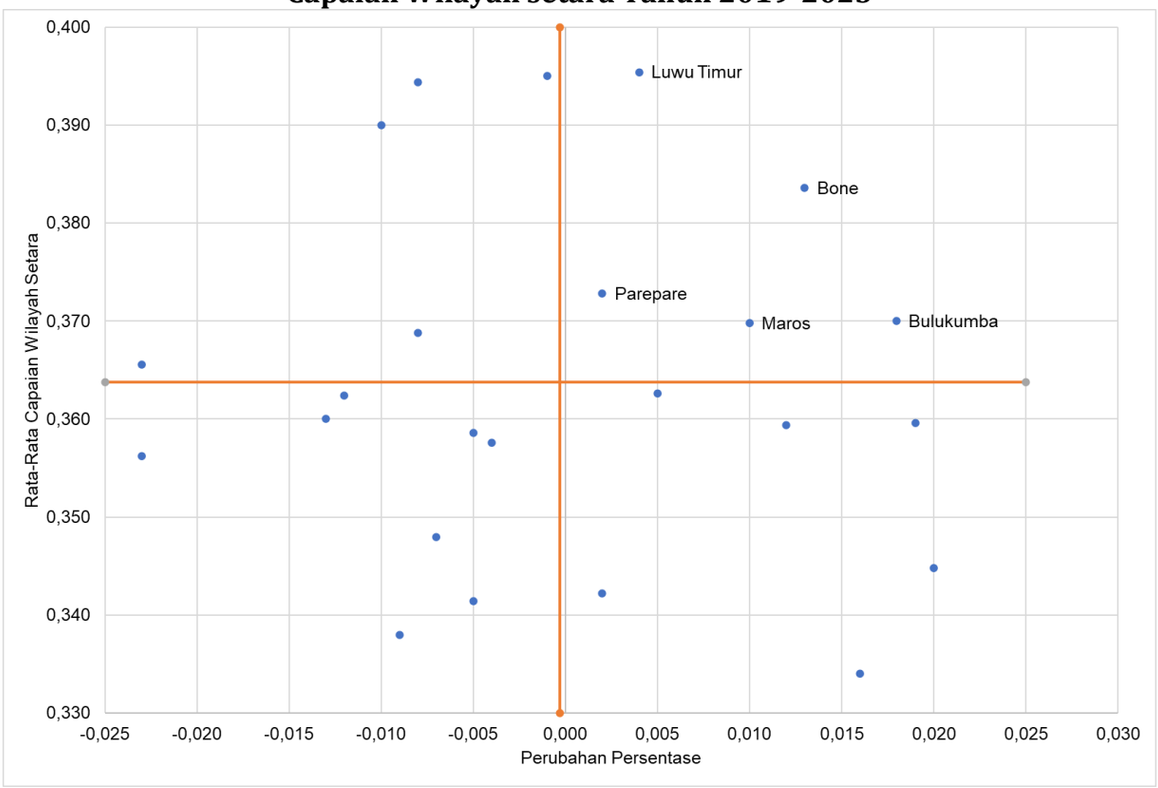
Grafik II-12
Perbandingan Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi Gini Ratio, baik itu berdasarkan perubahan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

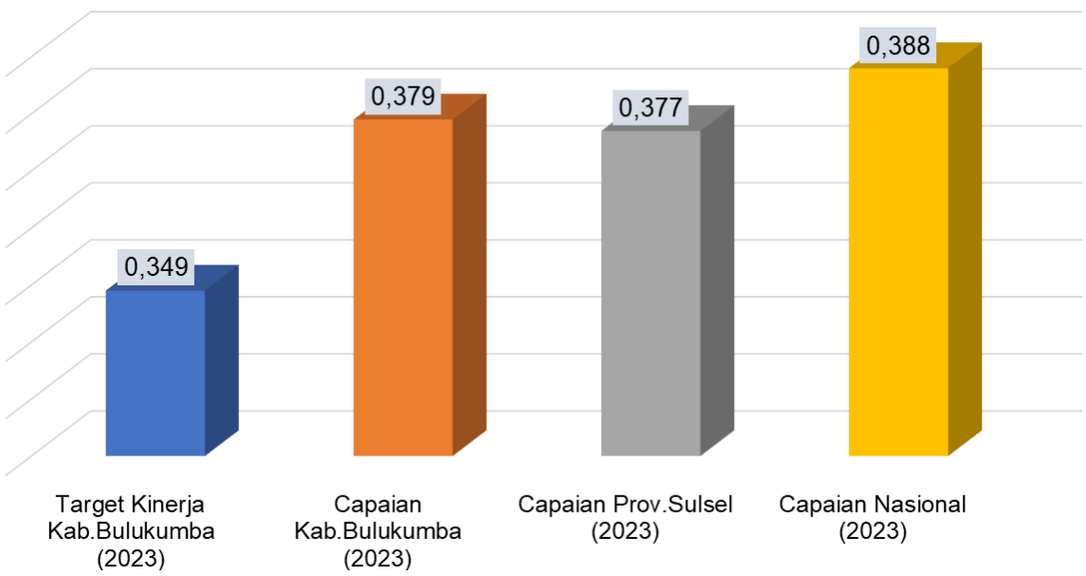
Kuadran II-5
Analisis Kuadran Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Jika dibandingkan dengan capaian Gini Ratio nasional, terlihat bahwa ketimpangan di Kabupaten Bulukumba lebih rendah namun lebih tinggi dibanding Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,002 poin. Meskipun secara nasional beberapa tahun terakhir angka *Gini Ratio* mengalami penurunan sampai dengan Maret 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun demikian, akibat adanya pandemi *Covid-19* dan pengaruh resesi sehingga terjadi perubahan pada nilai capaian gini ratio, secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-13
Perbandingan Capaian Gini Ratio dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia menjadi sebuah konsep yang terukur untuk mengukur kemajuan suatu negara. Secara umum, pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk *(enlarging people choice)*. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010 dan untuk tahun 2020 ke atas menggunakan metode baru berdasarkan Umur Harapan Hidup Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)* dan standard hidup layak *(decent standard of living)*. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba terus mengalami kemajuan selama periode 2019 hingga 2023. IPM Kabupaten Bulukumba meningkat dari 66,91 pada tahun 2019 menjadi 71,13 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh sebesar 1,71 persen pada periode 2019 - 2023. Capaian IPM Kabupaten Bulukumba., secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

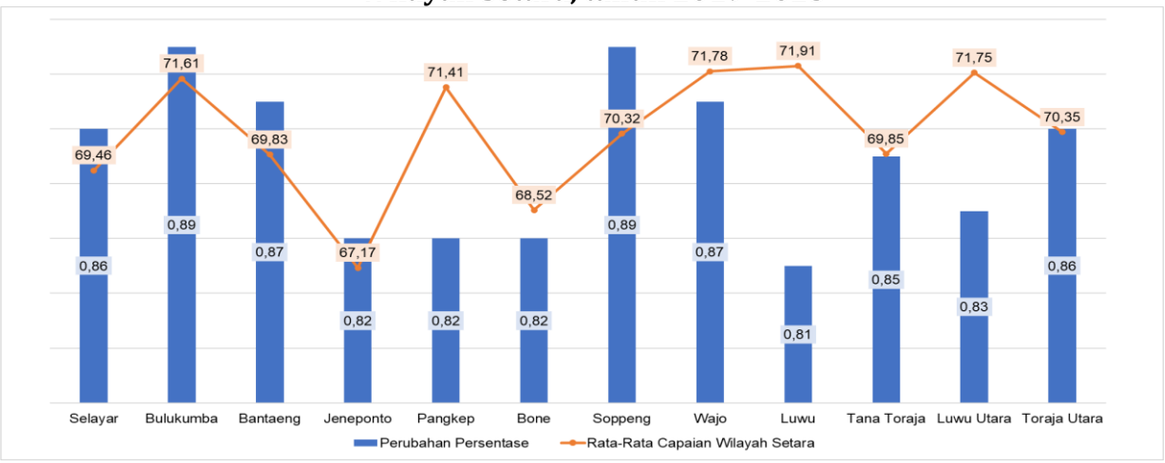
Tabel II-19
Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Bulukumba
dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023

No	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Perubahan Persentase	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
1	Selayar	66,91	69,29	69,68	70,27	71,13	0,86	69,46
2	Bulukumba	68,28	71,37	72,02	72,75	73,64	0,89	71,61
3	Bantaeng	68,30	69,45	69,71	70,41	71,28	0,87	69,83
4	Jeneponto	64,00	67,22	67,54	68,13	68,95	0,82	67,17
5	Pangkep	68,29	71,31	71,81	72,41	73,23	0,82	71,41

No	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Perubahan Persentase	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
6	Bone	65,67	68,46	68,81	69,43	70,25	0,82	68,52
7	Soppeng	68,26	70,01	70,33	71,05	71,94	0,89	70,32
8	Wajo	69,05	71,57	72,05	72,69	73,56	0,87	71,78
9	Luwu	70,39	71,58	71,92	72,42	73,23	0,81	71,91
10	Tana Toraja	69,23	69,05	69,78	70,16	71,01	0,85	69,85
11	Luwu Utara	69,46	71,53	71,99	72,48	73,31	0,83	71,75
12	Toraja Utara	69,23	69,80	70,22	70,83	71,69	0,86	70,35

Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2024 (diolah)

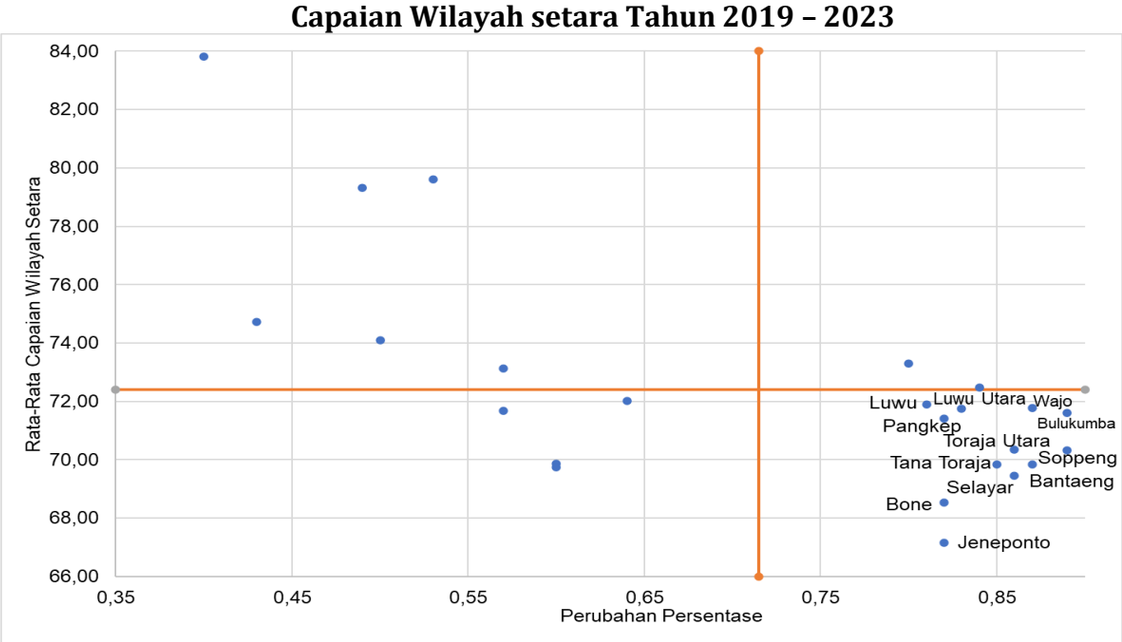
Grafik II-14
Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2019-2023



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2024, (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian IPM, baik itu berdasarkan nilai pertumbuhan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

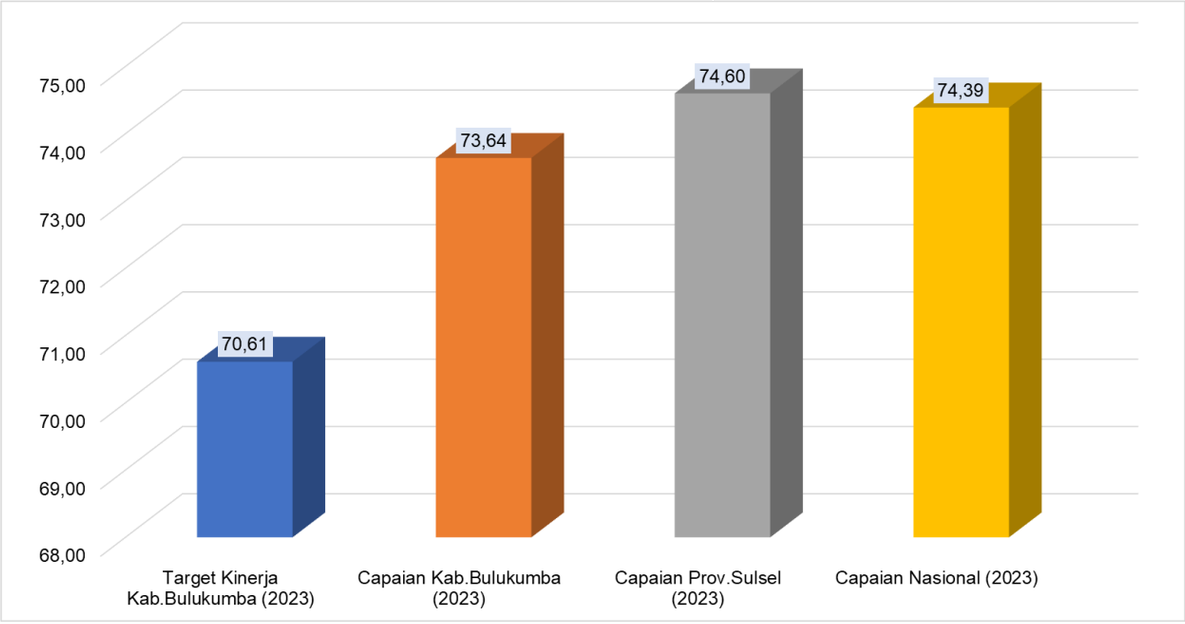
Kuadran II-6
Analisis Kuadran Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019 – 2023



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2024, (diolah)

Adapun target IPM Kabupaten Bulukumba tahun 2023 adalah 70,61 poin, dengan capaian 73,64 poin. Adapun capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,60 dan capaian IPM Nasional yaitu sebesar 74,39 poin. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-15
Perbandingan Capaian IPM dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2023



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2024, (diolah)

6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu aspek dalam pengkuran IPM adalah rata-rata lama sekolah. Lama sekolah yang menggambarkan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2023 rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh 7,84 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bulukumba yang lebih baik. Hingga tahun 2023, secara rata-rata penduduk Kabupaten Bulukumba usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Jika dibandingkan dengan daerah setara, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 menempati ukuran keenam dari 11 kabupaten rata-rata capaian wilayah setara sebesar 7,59 tahun, adapun urutan pertama diraih oleh Kabupaten Toraja Utara dengan nilai RLS sebesar 8,18 tahun dan diikuti dengan Kabupaten Selayar sebesar 8,01 tahun dan Kabupaten Pinrang sebesar 7,98 tahun. Tahun yang terendah lama sekolah adalah Kabupaten Bantaeng dengan capaian RLS sebesar 6,77 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah secara lengkap dapat lihat pada tabel berikut.

Tabel II-20
Perbandingan Capaian Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019 – 2023

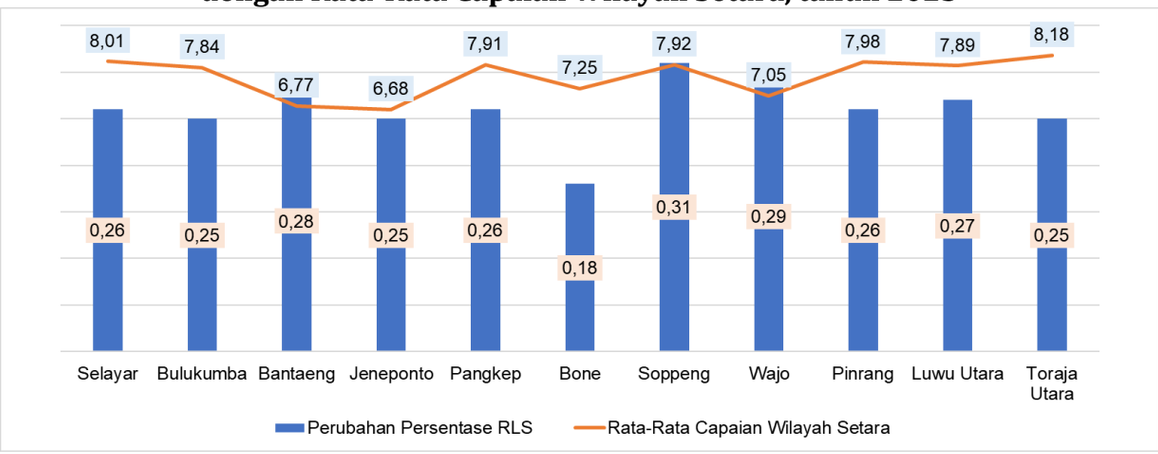
No	Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Selayar	7,63	7,88	8,08	8,09	8,35	8,01
2	Bulukumba	7,43	7,67	7,82	8,01	8,26	7,84
3	Bantaeng	6,48	6,72	6,77	6,81	7,09	6,77

No	Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)					Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
		2019	2020	2021	2022	2023	
4	Jeneponto	6,48	6,59	6,60	6,75	7,00	6,68
5	Pangkep	7,60	7,66	7,92	8,05	8,31	7,91
6	Bone	6,98	7,15	7,23	7,36	7,54	7,25
7	Soppeng	7,74	7,81	7,82	7,96	8,27	7,92
8	Wajo	6,80	6,81	7,05	7,16	7,45	7,05
9	Pinrang	7,85	7,86	7,87	8,04	8,30	7,98
10	Luwu Utara	7,78	7,79	7,86	7,87	8,14	7,89
11	Toraja Utara	7,92	7,96	8,25	8,26	8,51	8,18

Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2024, (diolah)

Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2023 pada daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba untuk urutan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Soppeng dengan pertumbuhan sebesar 0,31 poin dan Kabupaten Bone dengan posisi RLS terendah dengan nilai 0,18 poin. Secara lengkap perkembangan rata-rata lama sekolah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

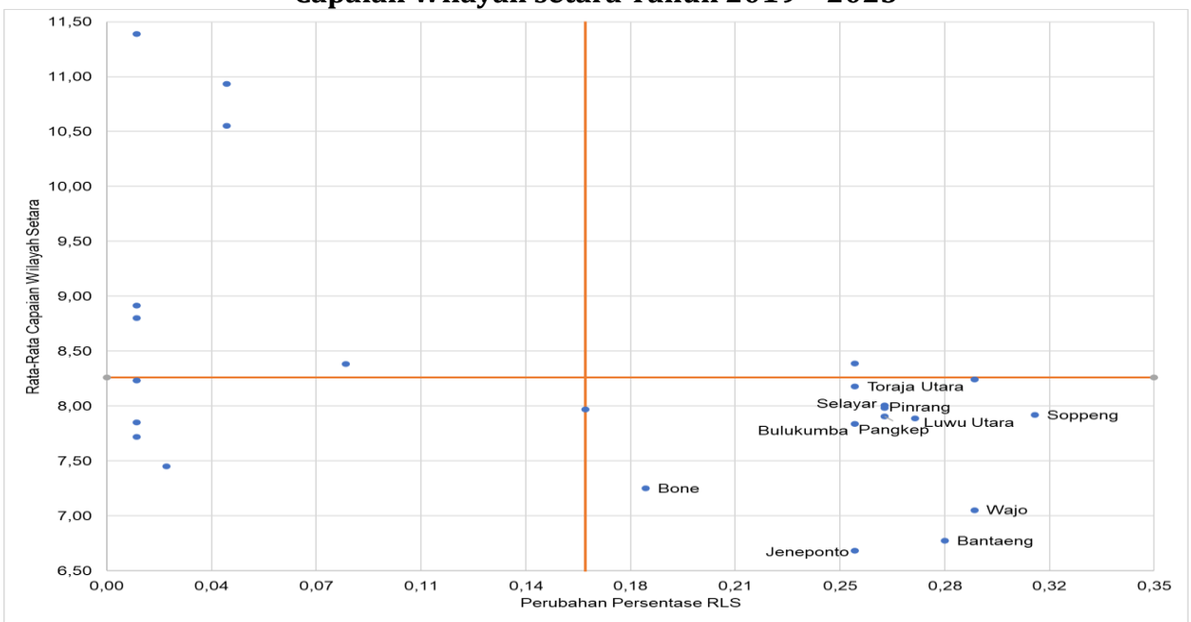
Grafik II-16
Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2023



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2024 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian RLS, baik itu berdasarkan nilai perubahan RLS dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

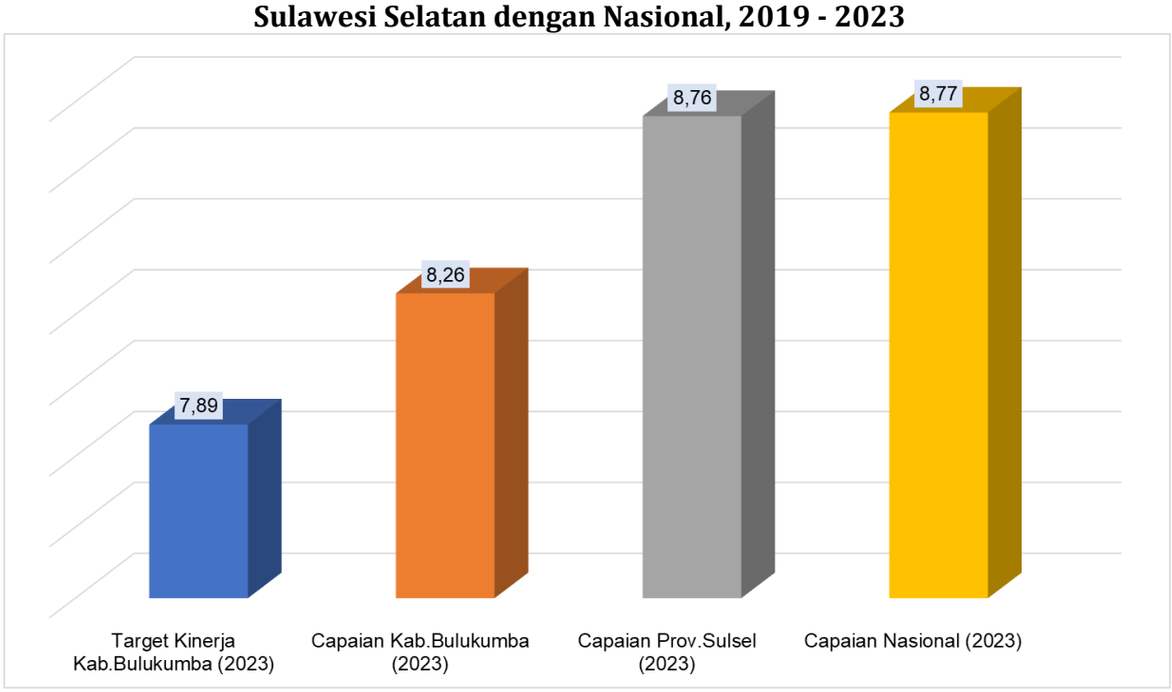
Kuadran II-7
Analisis Kuadran Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019 – 2023



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2024 (diolah)

Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional periode 2019-2023, menyajikan fakta bahwa capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara Nasional lebih tinggi daripada Capaian RLS Kabupaten Bulukumba. Peningkatan RLS baik di level kabupaten, nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningktan setiap tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-17
Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2019 - 2023



Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2024, (diolah)

7. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023, Kabupaten Bulukumba telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,27 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh

sebesar 1,53 persen per tahun. Pada tahun 2019, UHH saat lahir di Kabupaten Bulukumba sebesar 67,69 tahun dan pada tahun 2023 telah mencapai 74,01 tahun. Jika diperbandingkan dengan daerah setara Kabupaten Bulukumba, penduduk dengan capaian umur terpanjang tahun 2023 ada di Kabupaten Toraja Utara yaitu 74,88 tahun, sedangkan daerah yang penduduk dengan usia terendah adalah Kabupaten Sinjai yaitu 72,83 tahun. Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun) Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2019-2023 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

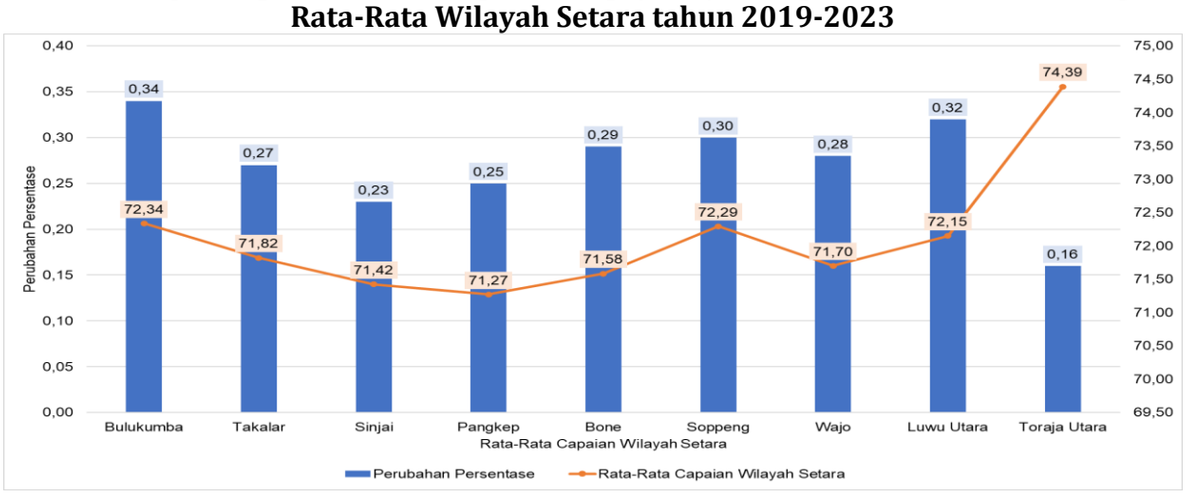
Tabel II-21
Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2019-2023

No	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Perubahan Persentase	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
1	Bulukumba	67,69	73,06	73,25	73,67	74,01	0,34	72,34
2	Takalar	67,01	72,69	72,81	73,16	73,43	0,27	71,82
3	Sinjai	67,17	72,22	72,30	72,60	72,83	0,23	71,42
4	Pangkep	66,49	72,12	72,25	72,62	72,87	0,25	71,27
5	Bone	66,88	72,39	72,54	72,91	73,20	0,29	71,58
6	Soppeng	69,43	72,61	72,78	73,17	73,47	0,30	72,29
7	Wajo	67,17	72,49	72,62	72,97	73,25	0,28	71,70
8	Luwu Utara	68,31	72,74	72,89	73,24	73,56	0,32	72,15
9	Toraja Utara	73,35	74,49	74,50	74,72	74,88	0,16	74,39

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Jika memperhatikan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) selama 5 tahun terakhir (2019-2023), secara rata-rata UHH Kabupaten Bulukumba sebesar 72,34 tahun. Adapun untuk daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba, yang memiliki rata-rata UHH tertinggi dicapai oleh kabupaten Toraja Utara dengan nilai 74,39 Tahun dan yang terendah ditempati oleh Kabupaten Pangkep yaitu 71,27 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut

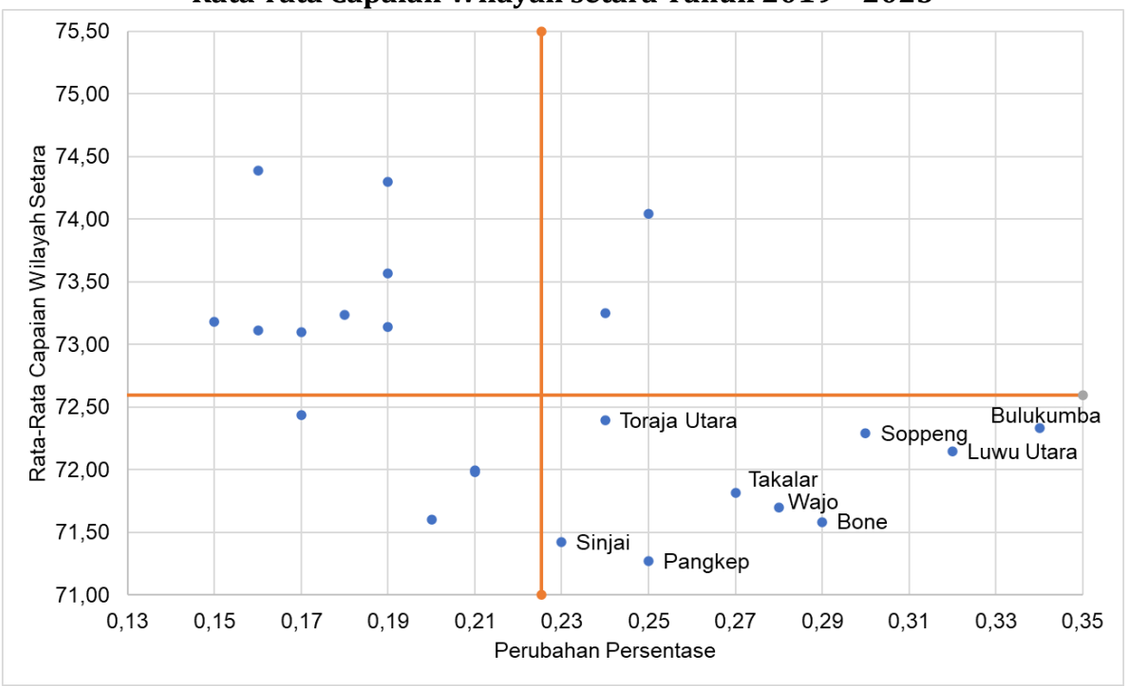
Grafik II-18
Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian UHH baik itu berdasarkan nilai perubahan UHH, pertumbuhan UHH dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

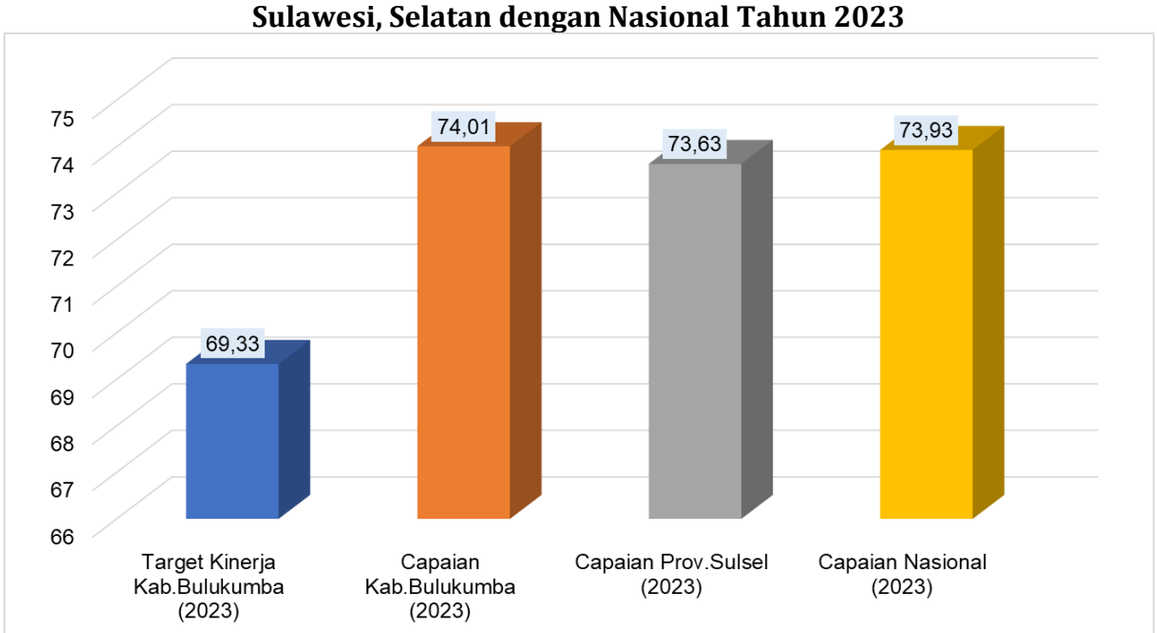
Kuadran II-8
Analisis Kuadran Perubahan Nilai UHH Terhadap
Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Jika memperhatikan capaian Usia Harapan Hidup (UHH) skala Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan secara Nasional tahun 2019-2023, maka capaian UHH Kabupaten Bulukuba masih berada jauh dibandingkan dengan capaian UHH Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Mekipun demikian, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH - Tahun) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional tahun 2019-2023 secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut

Tabel II-22
Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup (UUH-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

8. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menjadi penentu IPM. Harapan lama sekolah yang menggambarkan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-

Rata Lama Sekolah. Selama kurun waktu tahun 2019-2023 di Kabupaten Bulukumba kedua indikator ini mengalami pertumbuhan yang positif. Tahun 2019 HLS Kabupaten Bulukumba sebesar 12,91 tahun dan tahun 2023 nilai HLS sebesar 13,43 tahun. Indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata peningkatan sebesar 0,98 persen setiap tahunnya.

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2023, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bulukumba telah mencapai 13,43 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma I. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bulukumba yang lebih baik. Jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian wilayah setara Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023, rata-rata capaian wilayah setara HLS tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bulukumba dengan nilai RLS sebesar 13,27 tahun, dan kabupaten yang nilai capaian rata-rata HLS terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 12,06 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-23
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019-2023

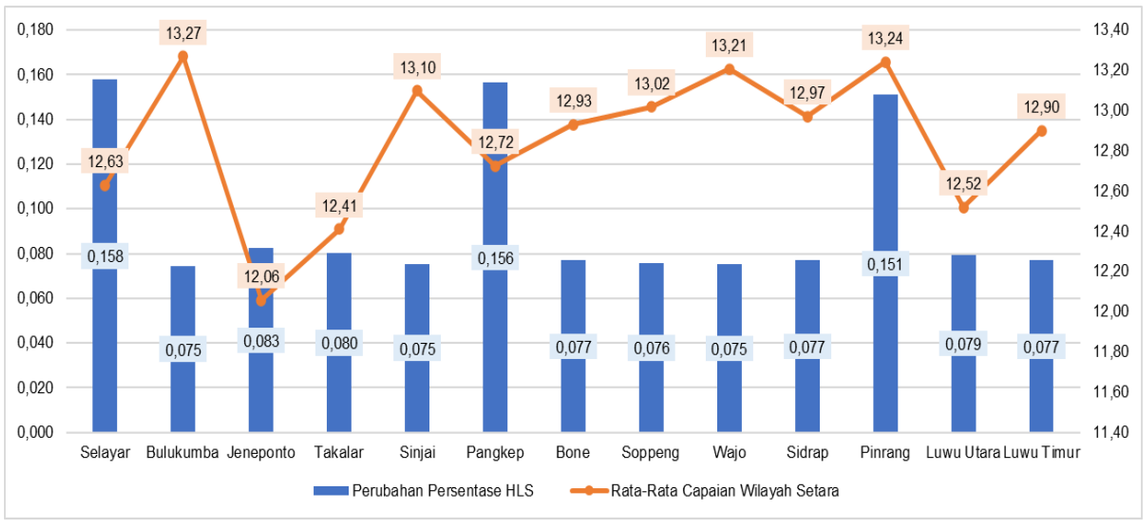
No	Kabupaten/ Kota	Harapan Lama Sekolah - HLS (Tahun)					Perubahan Persentase HLS	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Selayar	12,48	12,65	12,66	12,67	12,69	0,158	12,63
2	Bulukumba	12,91	13,17	13,41	13,42	13,43	0,075	13,27
3	Jeneponto	11,97	11,98	12,10	12,11	12,12	0,083	12,06
4	Takalar	12,25	12,41	12,42	12,48	12,49	0,080	12,41
5	Sinjai	12,87	13,05	13,06	13,25	13,26	0,075	13,10
6	Pangkep	12,51	12,76	12,77	12,78	12,80	0,156	12,72
7	Bone	12,80	12,88	12,98	12,99	13,00	0,077	12,93
8	Soppeng	12,73	12,90	13,05	13,20	13,21	0,076	13,02
9	Wajo	13,13	13,14	13,15	13,30	13,31	0,075	13,21
10	Sidrap	12,93	12,94	12,95	13,01	13,02	0,077	12,97
11	Pinrang	13,22	13,23	13,24	13,25	13,27	0,151	13,24
12	Luwu Utara	12,42	12,43	12,57	12,58	12,59	0,079	12,52
13	Luwu Timur	12,82	12,83	12,84	13,00	13,01	0,077	12,90

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Dari segi pertumbuhan, Kabupaten Selayar adalah daerah yang tertinggi nilai pertumbuhannya di Tahun 2023, yaitu sebesar 0,158 persen dan daerah setara yang menempati pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Wajo dengan angka pertumbuhan sebesar 0,075 persen.

Perbandingan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata Capaian Wilayah Setara pada Tahun 2019-2023 memperlihatkan bahwa Kabupaten Bulukumba adalah daerah yang menduduki posisi pertama sebesar 13,27 tahun setelah Kabupaten Wajo sebesar 13,21, Kabupaten Soppeng sebesar 13,02 tahun dan daerah setara yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan angka HLS sebesar 12,06 tahun. Secara lengkap dapat diliat pada grafik berikut.

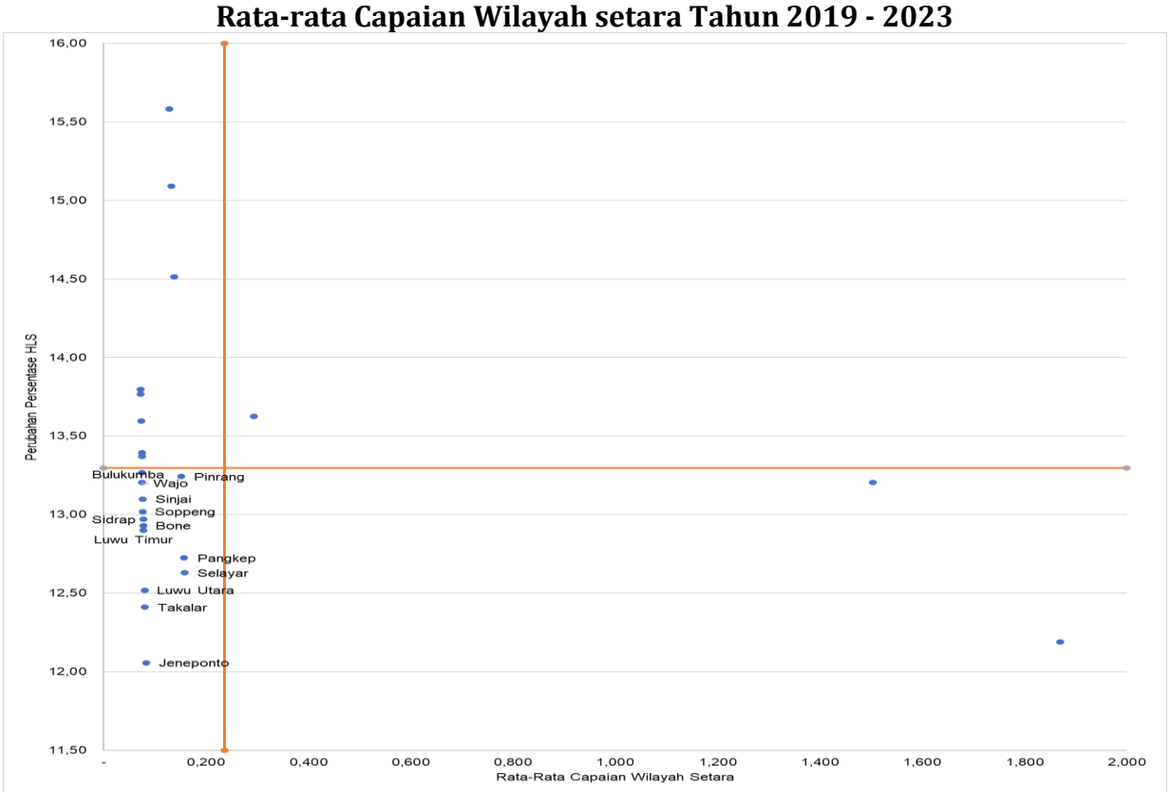
Grafik II-19
Perbandingan Capaian Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian HLS baik itu berdasarkan nilai perubahan HLS, pertumbuhan HLS dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

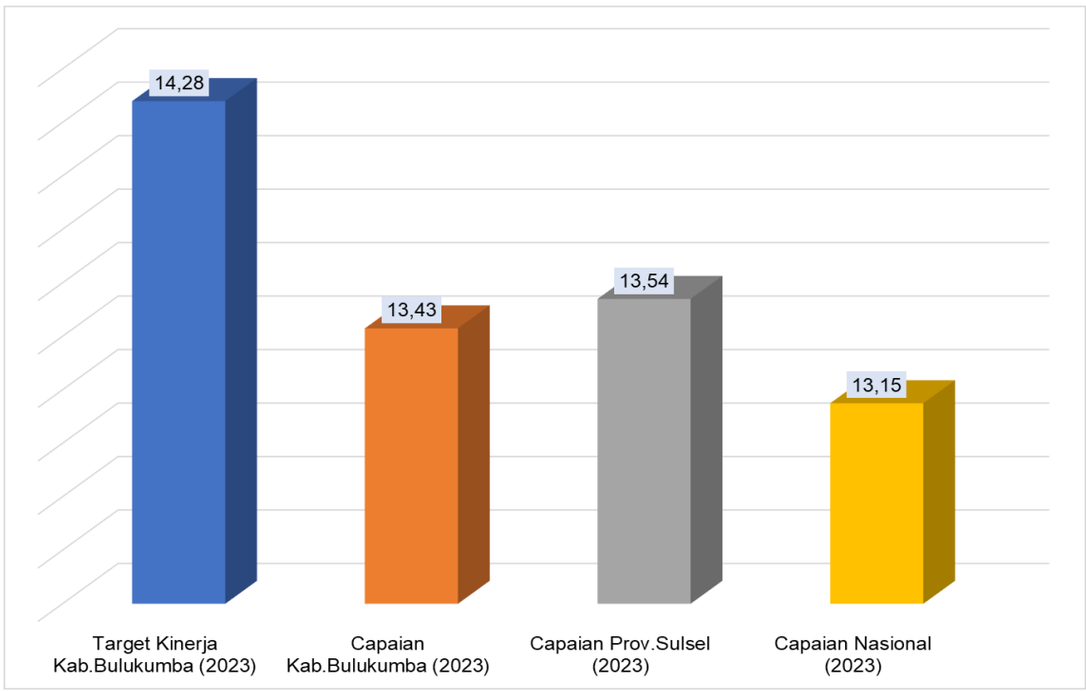
Kuadran II-9
Analisis Kuadran Perubahan Nilai HLS Terhadap
Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2019 - 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024(diolah)

Adapun Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional tahun 2019-2023. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Selatan masih di atas capaian HLS Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, capaian HLS Kabupaten Bulukumba lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian HLS Nasional. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-20
Perbandingan Capaian harapan Lama sekolah (HLS-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

9. Pengeluaran Perkapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari tahun ke tahun, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Ribu Rp/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019–2023 terdapat 5 Kabupaten diantaranya Bulukumba, Takalar, Gowa, Sinjai dan Enrekang. Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Wilayah Setara, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

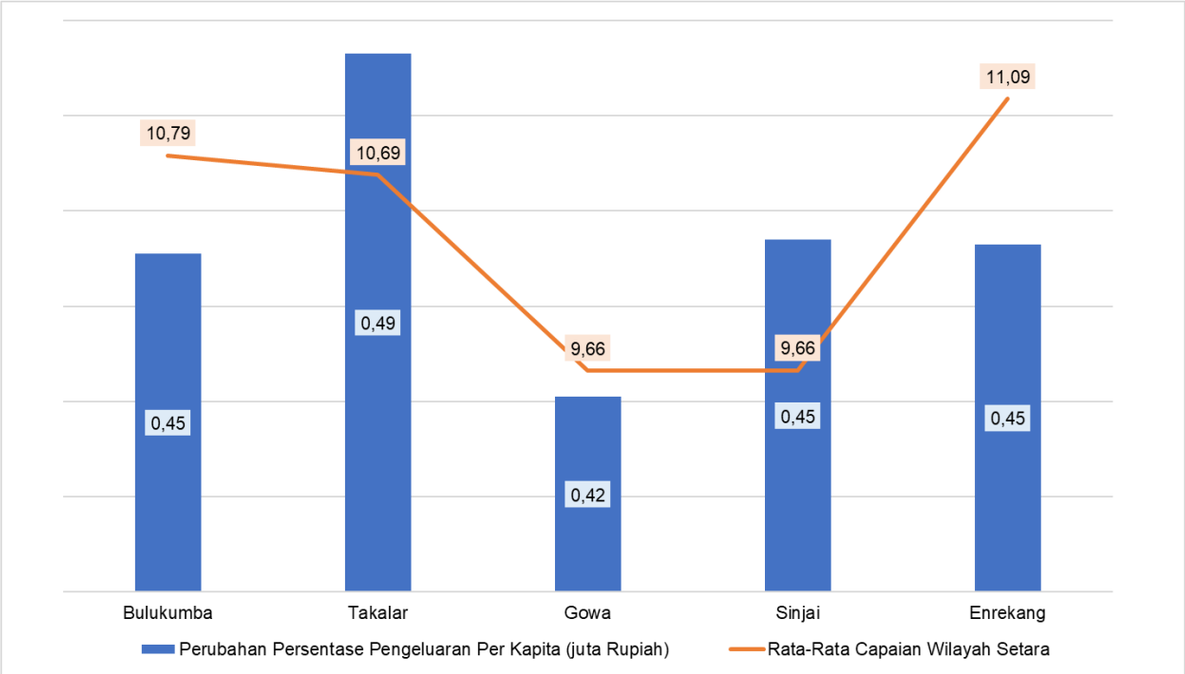
Tabel II-24
Perbandingan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Ribu Rp/Orang/Tahun)
Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2019– 2023

No	Kabupaten/ Kota	Pengeluaran Per Kapita (juta Rupiah)					Perubahan Persentase Pengeluaran Per Kapita	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Bulukumba	10,48	10,51	10,63	10,94	11,39	0,45	10,79
2	Takalar	10,47	10,45	10,54	10,75	11,24	0,49	10,69
3	Gowa	9,37	9,39	9,50	9,81	10,23	0,42	9,66
4	Sinjai	9,47	9,44	9,51	9,73	10,18	0,45	9,66
5	Enrekang	10,80	10,84	10,97	11,18	11,64	0,45	11,09

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Adapun rata-rata capaian pengeluaran per kapita disesuaikan hingga pada tahun 2023 untuk kabupaten setara dengan Kabupaten Bulukumba, nilai tertinggi dicapai oleh Kabupaten Enrekang angka Rp 11,09 Juta Rupiah dan terendah adalah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai sebesar Rp 9,66 Juta Rupiah. Adapun perubahan pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Takalar sebesar 0,49 poin dan perubahan pengeluaran per kapita disesuaikan terendah terjadi di Kabupaten Gowa dengan nilai 0,42 poin. Secara lengkap perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

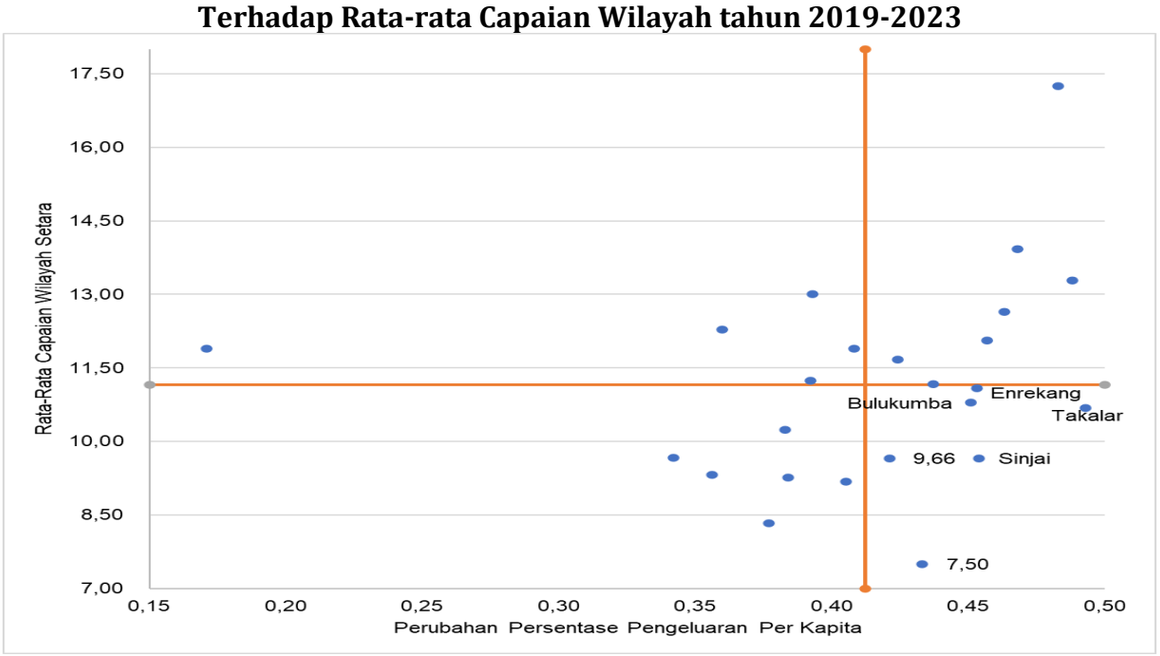
Grafik II-21
Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Juta Rupiah/Orang/Tahun)
Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024(diolah)

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian pengeluaran per kapita disesuaikan baik itu berdasarkan nilai perubahan, pertumbuhan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

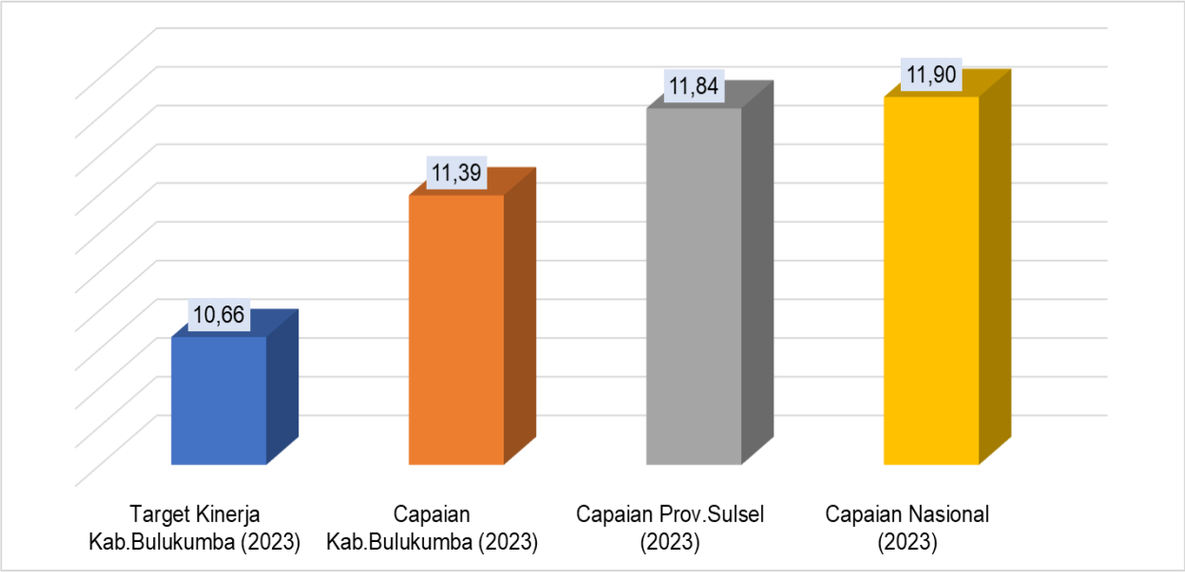
Kuadran II-10
Analisis Kuadran Perubahan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024(diolah)

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023 masih lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2023 capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 11,39 juta rupiah, Provinsi Sulawesi selatan sebesar Rp.11,84 juta dan Nasional Rp.11,90 juta. Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Sulawesi Selatan dengan Nasional secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-22
Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

10. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2019-2023 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar 33,96 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 41,90 juta rupiah. Jika capaian PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba tahun 2023 dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 69,70 juta rupiah dan capaian Nasional sebesar 75,00 juta rupiah, maka nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba masih jauh tertinggal. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-25
Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2019 - 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
PDRB/PDB Perkapita (ADHB)						
Bulukumba	Juta Rp	33,96	33,34	35,97	38,66	41,90
Sulawesi Selatan	Juta Rp	57,18	55,68	59,50	65,35	69,70
Nasional	Juta Rp	59,07	56,90	62,20	71,00	75,00
PDRB/PDB Perkapita (ADHK)						
Bulukumba	Juta Rp	20,46	19,69	20,43	20,99	21,63
Sulawesi Selatan	Juta Rp	37,35	36,25	37,50	38,97	40,29
Nasional	Juta Rp	41,02	39,78	40,78	42,46	44,14

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025(diolah)

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan kesejahteraan rakyat. Jika melihat PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) khususnya wilayah yang setara dengan Kabupaten Bulukumba, daerah setara yang memiliki PDRB Perkapita tertinggi adalah Kabupaten Bone dengan nilai PDRB ADHB sebesar 57,02 juta rupiah, dan daerah yang

memiliki nilai PDRB ADHB terendah adalah Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 29,32 Juta Rupiah. Selangkapnya pada tabel berikut.

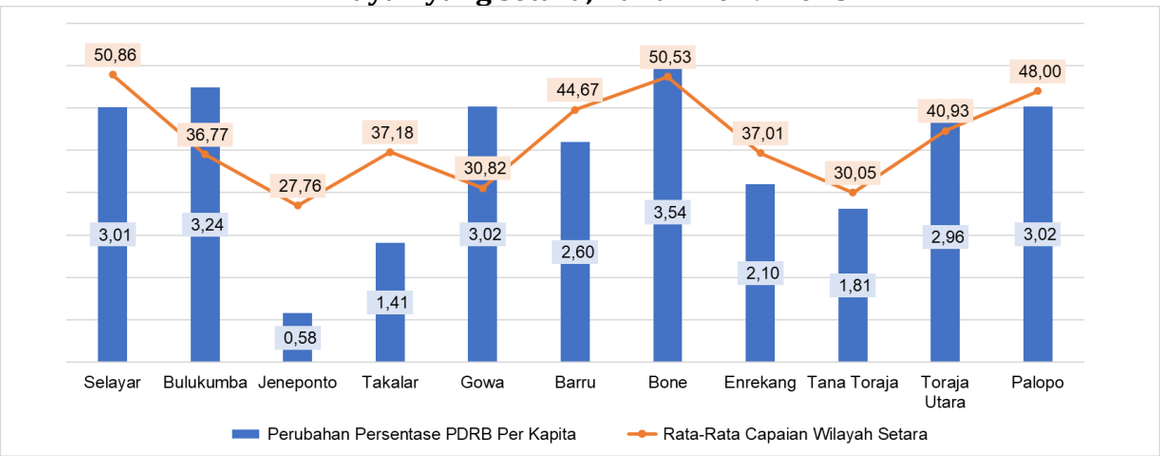
Tabel II-26
Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/ Kota	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					Perubahan Persentase PDRB Per Kapita	Rata-Rata Capaian Wilayah Setara
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Selayar	47,99	46,73	49,47	53,56	56,57	3,01	50,86
2	Bulukumba	33,96	33,34	35,97	38,66	41,90	3,24	36,77
3	Jeneponto	27,74	25,70	27,28	28,74	29,32	0,58	27,76
4	Takalar	34,42	34,03	36,58	39,73	41,14	1,41	37,18
5	Gowa	27,50	28,20	30,36	32,50	35,52	3,02	30,82
6	Barru	41,80	40,36	43,46	47,56	50,16	2,60	44,67
7	Bone	47,81	45,68	48,67	53,48	57,02	3,54	50,53
8	Enrekang	35,28	33,54	36,03	39,05	41,15	2,10	37,01
9	Tana Toraja	31,66	27,10	28,53	30,57	32,38	1,81	30,05
10	Toraja Utara	41,08	37,37	39,12	42,07	45,03	2,96	40,93
11	Palopo	43,79	43,66	46,63	51,45	54,47	3,02	48,00

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025 (diolah)

Adapun perkembangan PDRB Per kapita ADHB pada daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bone sebesar 3,54 poin dan pertumbuhan terendah dialami oleh Kabupaten Jeneponto sebesar 0,58 poin. Adapun pertumbuhan PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Bulukumba berada pada angka 3,24 poin. Untuk nilai rata-rata PDRB Perkapita pada daerah setara, Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi daerah yang tertinggi nilai capaiannya, yaitu sebesar 50,86 juta rupiah, dan Kabupaten Jeneponto menjadi daerah yang memiliki capaian terendah dengan nilai rata-rata sebesar 27,76 juta rupiah. Adapun nilai rata-rata PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba sebesar 36,77 juta rupiah. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

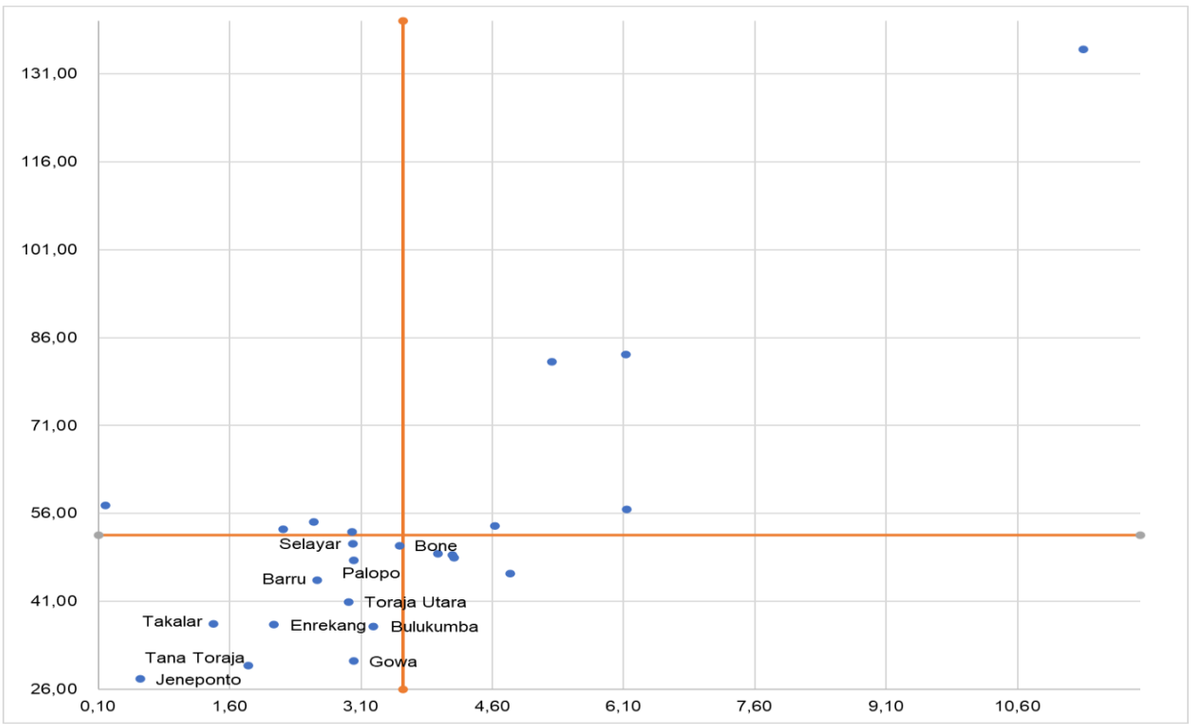
Grafik II-23
Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Gambaran perkembangan PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Bulukumba dan daerah setara pada tahun 2023 secara kuadran dapat dilihat pada gambar berikut.

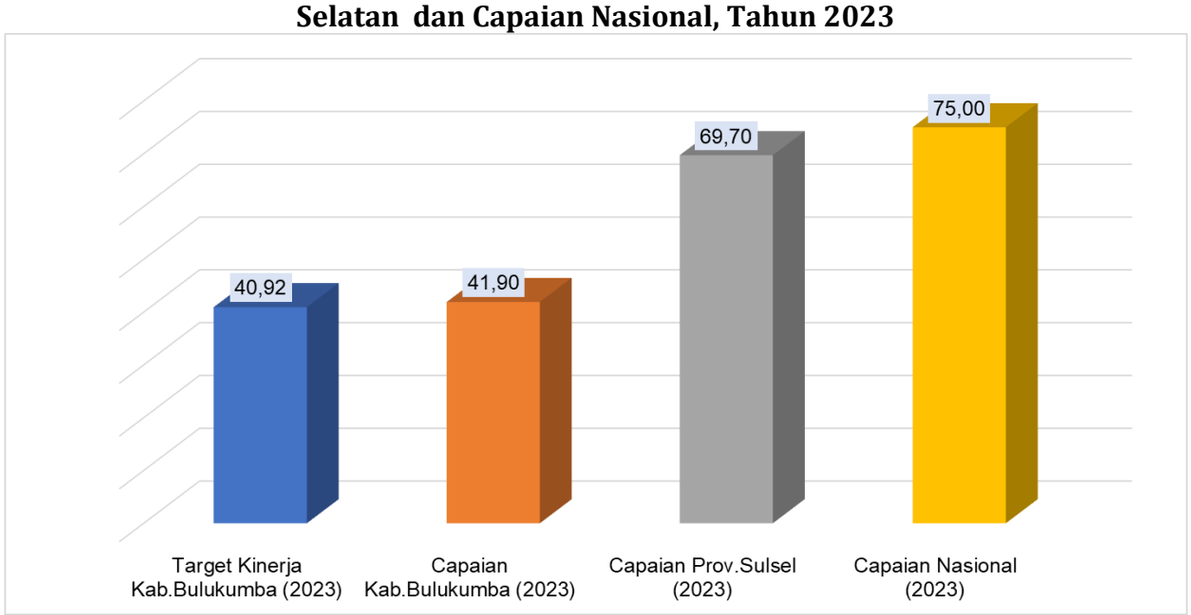
Kuadran II-11
Analisi Kuadran Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB) Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah, Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)

Jika dibandingkan capaian Perekonomian Indonesia tahun 2023 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku mencapai mencapai Rp75,0 juta dan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan ADHB tahun 2023 sebesar 69,70 juta rupiah, capaian PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba masih jauh lebih rendah yaitu hanya sebesar 41,90 juta rupiah dan mencapai nilai yang ditargetkan yaitu 40,92 persen dan kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) terjadi tren kenaikan setiap tahunnya. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-24
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional, Tahun 2023



Sumber : Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2024 (diolah)

11. Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian

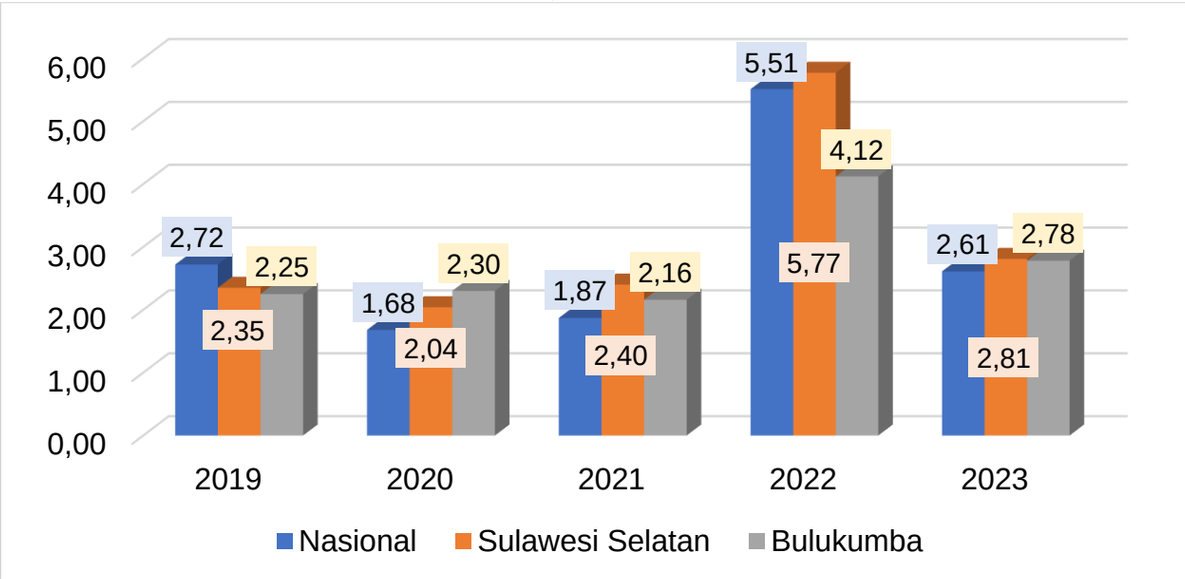
tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

Pencapaian inflasi Indonesia tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran 3%±1. Capaian inflasi tahun 2023 tersebut tercatat sebesar 2,61% (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022, yakni sebesar 5,51% (yoy). Lebih lanjut, di luar periode terdampak pandemi (2020-2021), realisasi inflasi tersebut merupakan yang terendah sejak tahun 2000. Perkembangan inflasi Desember 2023 dipengaruhi oleh pergerakan seluruh komponen inflasi. Komponen harga diatur Pemerintah (administered prices/AP) mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm), atau 1,72% (yoy). Secara bulanan (mtm) dan tahunan (yoy), tarif angkutan udara, rokok kretek filter, dan rokok kretek putih menjadi komoditas penyumbang inflasi IHK Desember 2023. Sementara komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm), atau 1,80% (yoy). Secara tahunan inflasi inti masih terjaga meskipun dalam tren melandai. Lebih lanjut, berdasarkan catatan Trading Economics, realisasi inflasi inti Indonesia merupakan salah satu yang terendah yakni berada di peringkat 10 dari 86 negara.

Komoditas utama penyumbang inflasi (y-on-y) pada Desember 2023, antara lain beras, cabai rawit, angkutan udara, rokok kretek filter, emas perhiasan, cabai merah, bawang putih, labu siam/jipang, gula pasir, dan kacang panjang.

Jika pada tahun 2023 nilai Inflasi Kabupaten Bulukumba diperbandingkan dengan nilai inflasi Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, Tingkat Inflasi di Kabupaten Bulukumba masih rendah dengan nilai 2,78 persen, dibandingkan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai sebesar 2,81 persen dan untuk inflasi Nasional sebesar 2,61 persen.

Grafik II-25
Perkembangan Laju Inflasi Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2019 -2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

12. Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Selama kurung waktu 2021-2023 kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bulukumba mengalami fluktuatif (cenderung naik turun), dapat dilihat pada tabel kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bulukumba mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel II-27
Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Bulukumba 2020 - 2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB		24,80	24,32	24,42	24,33

13. Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian

Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 – 2022 namun terjadi penurunan pada tahun 2023 sebesar -1,43 persen disebabkan gagal panen yang dipengaruhi oleh perubahan cuaca.

Tabel II-28
Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian		-0,77	1,48	3,81	-1,43

14. Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB;

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB antara tahun 2020-2023 mengalami peningkatan fluktuasi.

Tabel II-29
Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB		11,94	12,95	12,57	13,15

15. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan

Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2023 mengalami peningkatan fluktuasi, salah satu penyebab sehingga terjadi penurunan pada tahun 2022 adalah kondisi perubahan cuaca.

Tabel II-30
Pertumbuhan PDRB Sub sektor Perikanan Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan		-1,93	8,78	-0,31	6,89

16. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB;

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nlai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Tabel II-31
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB		23,44	23,39	24,12	6,54

17. Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri;

Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri antara tahun 2020-2023 mengalami peningkatan fluktuasi.

Tabel II-32
Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri
Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri		-4,85	12,23	6,68	5,09

18. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD;

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dians-dinas, dan penerimaan lainnya. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan atau dapat dijadikan andalan bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dari sektor pariwisata, karena sektor pariwisata memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Penerimaan sektor pariwisata bersumber dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan retribusi objek wisata berupa karcis masuk ke obyek wisata. Penerimaan sektor pariwisata inilah yang nantinya menjadi salah satu penambah pendapatan asli daerah (PAD

Kabupaten Bulukumba termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2020-2025. Sementara kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil. Peningkatan jumlah tempat wisata sampai dengan tahun 2023 dan penetapan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menjadi potensi peningkatan PAD dari sektor pariwisata sehingga menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bulukumba ke depannya.

Tabel II-33
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
PAD sektor pariwisata	Rupiah	3.757.615.000	5.969.481.661	7.310.431.000	6.006.209.260
Total PAD	Rupiah	168.422.009.341	153.236.211.454	169.419.982.131	187.567.739.401
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Persen	2,23	3,90	4,31	3,20

19. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata;

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan implikasi bahwa jika pendapatan asli daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, dimana pendapatan asli daerah merupakan salah satu dari faktor pertumbuhan ekonomi. Sumber-sumber PAD Kabupaten Bulukumba diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kontribusi PDRD pada sektor pariwisata cukup besar pada penerimaan PAD. Pertumbuhan PAD sektor pariwisata mengalami fluktuasi. Penurunan Pertumbuhan PAD sektor pariwisata di tahun 2020 terjadi akibat pandemi Covid 19 dengan angka pertumbuhan hanya 1,31 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sehingga penerimaan PAD sektor pariwisata turun drastis. Pada tahun 2022 pasca

Covid 19, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk peningkataan penerimaan PAD disegala sektor diantaranya sektor pariwisata. Upaya yang dilakukan membawa pertumbuhan positif sebesar 58,85 persen. Akan tetapi pertumbuhan PAD sektor pariwisata kembali menurun di tahun 2023 akibat adanya regulasi kewenangan pengelolaan retribusi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba di beberapa spot-spot wisata di Kawasan Pantai Bira.

Pertumbuhan PAD sektor pariwisata untuk 4 (empat) tahun terakhir di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-34
Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata; Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata		1,31	58,85	22,48	22,16

20. Indeks Daya Saing Infrastruktur;

Berdasarkan Indeks Infrastuktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Bulukumba mengalami trend fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya bencana alam dan faktor usia bangunan.

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota/kabupaten berdasarkan persentase infrastuktur layanan dasar. Adapun komponen layanan dasar yang dimaksud adalah persentase jalan dalam kondisi baik, persentase luas irigasi dalam kondisi baik, persentase jumlah sampah yang tertangani, dan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Tabel II-35
Indeks Daya saing infrastruktur Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Indeks Daya saing infrastruktur		72,61	69,13	83,12	83,20

2.1.2.1 Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan Kabupaten Bulukumba mengalami kenaikan yaitu dari 63,98 pada tahun 2022 menjadi 64,84 pada tahun 2023. Masih rendahnya indeks pendidikan di daerah ini tentunya perlu mendapat perhatian yang lebih serius bagi pemerintah daerah, terutama dalam era otonomi daerah sekarang ini, karena masa depan pendidikan sangatlah bergantung pada pemerintah daerah.

Tabel II-36
Indeks Pendidikan Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Indeks Pendidikan	Angka/ Nilai	62,15	63,32	63,98	64,84

2. Indeks Kesehatan;

Indeks Kesehatan Kabupaten Bulukumba terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun2022 sebesar 82,57 menjadi 83,09 pada tahun 2023.

Tabel II-37
Indeks Kesehatan Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023

Indeks Kesehatan	Angka/ Nilai	73,72	74,00	82,57	83,09

3. Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi

Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2023 mengalami peningkatan fluktuasi dikarenakan jumlah usia pemuda berbeda pada tiap tahunnya dan kegiatan pelaksanaan kepemudaan.

Tabel II-38
Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi
Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	Persen	18	41,67	10,71	125

4. Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani

Menjaga kerukunan agama harus meneladani tiga konsep kerukunan beragama yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Adapun Capaian Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-39
Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani
Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	Persen	100	100	100	100

Sumber : Bakesbangpol

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Adapun Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 dengan Indeks 1,81 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu 2,30 atau kategori Cukup, untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-40
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	CC (59,46)	CC (59,46)

Sumber : Setda Bag. Ortala

6. Skor LPPD/Kategori

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik di antara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing. Adapun capaian skor LPPD Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 yaitu 3,3319 atau berkategori sedang.

Tabel II-41
Skor LPPD/Kategori Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023

Skor LPPD/Kategori		n/a	2,6500	3,3319	3,526

Sumber : Setda Bag. Ortala

7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

Tabel II-42
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bulukumba 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat		2,51-3,25	2,51-3,25	3,25	3,81

Sumber : Setda Bag. Pemerintahan

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan. baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bulukumba. yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

A. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka PartisipasI Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan flujtuasi dikarenakan SMP/MTs yang tidak merata sehingga sebagian anak kesulitan untuk menjangkau fasilitas pendidikan. Selain itu, permasalahan ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab anak usia sekolah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs. Kondisi geografis Kabupaten Bulukumba juga menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan. Penyebaran sarana pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kurang merata penyebarannya di Kabupaten Bulukumba, sehingga anak usia sekolah yang ada di daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Untuk mengetahui perkembangan APK SD/MI dan APK SMP/MTs di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-43
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	**APK SD**	%	113,1	112,49	106,38	113,27	107,40
2	**APK SMP**	%	87,75	90,74	81,88	86,46	92,34

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perhitungan partisipasi murni sejak tahun 2007, tidak hanya menghitung siswa pada sekolah formal, tetapi juga termasuk siswa yang menempuh pendidikan pada pendidikan non formal (Paket A. Paket B. dan Paket C).

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Bulukumba mengalami tren yang berfluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tiap tahunnya terjadi peningkatan terkecuali pada tahun 2021 diakibatkan pandemi *Covid-19*.

Tabel II-44
Perkembangan APM Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	APM SD/MI	%	98,48	98,32	98,06	99,55	99,97
2.	APM SMP/MTs	%	82,36	83,37	74,01	83,05	92,80

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

Data diatas menunjukkan bahwa secara umum, capaian APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 belum terlalu optimal, mengingat tren capaian indikator yang berfluktuasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan adalah aksesibilitas sekolah yang belum optimal. Selain itu beberapa faktor yang penghambat pencapaian target antara lain sarana dan prasarana pendidikan dan penguatan penerapan regulasi wajib belajar yang belum optimal.

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut untuk 1000 penduduk. APS dihitung untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. Capaian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pemerintah daerah diperlukan untuk secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui perkembangan capaian APS usia 7 -12 Tahun, APS usia 13 - 15 Tahun, dan APS usia 16 - 18 Tahun di Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023 dapat diilhat pada tabel berikut.

Tabel II-45
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	APS 7 -12 Tahun	%	98,77	98,80	99,06	99,55	95,28
2.	APS 13 - 15 Tahun	%	93,14	91,91	93,91	92,72	87,04

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Bulukumba 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba 2024

4) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Angka Putus Sekolah (APS) bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan. Selain itu, APS berfungsi untuk melihat keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Capaian Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 di semua jenjang pendidikan menunjukkan tren yang berfluktuasi, hal ini menunjukkan belum optimalnya intervensi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam penanganan Angka Putus Sekolah. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan masih belum optimal. Untuk mengetahui perkembangan capaian APS SD/MI dan APS SMP/MTs, di Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023 dapat diilhat pada tabel berikut.

Tabel II-46
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	APS SD/MI	%	0,5	0,03	0,8	0,57	4,5
2.	APS SMP/MTs	%	0,9	0,11	1,2	0,15	2,5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

5) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan (AL) merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Pada tahun 2021, Angka Kelulusan di Kabupaten Bulukumba sudah mencapai 100 persen namun pada tahun 2022 terjadi penurunan kelulusan diakibatkan proses pembelajaran kurang efektif karena dipengaruhi pembatasan tatap muka (Pandemi *Covid-19*). Hal ini sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai dan juga sesuai dengan standar penilaian minimal Dinas Pendidikan. Perkembangan Angka Kelulusan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-47
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	AL SD	%	100	100	100	95,76	100
2.	AL SMP	%	100	100	100	98,68	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

6) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru saat ini dipandang sesuatu hal yang sangat penting karena seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai pendidik, guru juga turut serta dalam menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan bermutu. Olehnya itu, guru diharuskan memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1/D-IV.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, pada tahun 2021 jumlah guru dengan status sarjana mengalami penurunan drastis sebesar 70,59 persen. Untuk tahun 2022 jumlah guru lulusan S1/D-IV sebesar 85,15 persen dan tahun 2023 sebesar 100 persen, Adapun perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-48
Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	98,48	92,08	70,59	85,15	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

7) Rasio guru/murid sekolah

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas.

Untuk rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar tahun 2019-2023 menunjukkan tren fluktuatif pada kurun waktu tersebut, tahun 2019 nilai rasionya sebesar 1:14 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 1:12.

Sedangkan untuk rasio Guru/Murid SMA mengalami penurunan di tahun 2019-2022, tahun 2019 nilai rasionya sebesar 1:12 dan mengalami penurunan pada tahun 2020-2022 menjadi 1:9, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 1;14. Capaian Rasio Guru-Murid dan Sekolah di Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-49
Rasio Guru-Murid dan Sekolah Kabupaten Bulukumba,Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan Dasar	Rasio	1 : 14	1 : 13	1 : 15	1 : 13	1:12
2.	Rasio guru terhadap murid pendidikan Menengah	Rasio	1 : 12	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1:14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

8) Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah.

Pada Tahun 2022, Angka Melek Huruf di Kabupaten Bulukumba meningkat sebesar 93,31 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 91,42 persen. Angka Melek Huruf Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023, selengkapnya dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-50
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	92,9	90,3	90,63	93,31	91,42

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023

B. Urusan Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi

Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tataran

kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu, program - program kesehatan di Indonesia banyak yang menitik beratkan pada upaya penurunan AKB.

Angka Kematian Bayi merujuk kepada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. jumlah kematian bayi menurut laporan Puskesmas di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi pada 2019-2023, penurunan signifikan pada tahun 2023 yakni 1,14 . Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-51
Angka Kematian Bayi (AKB)Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kematian Bayi	Kasus	64	51	20	34	7
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran HidupKelahiran Hidup	Angka	10,05	7,53	2,90	5,24	1,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

2) Angka Kematian Balita

Sepanjang tahun 2019-2023, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup dari tahun cenderung mengalami penurunan, Rata-rata kematian Balita disebabkan oleh Diare dan Pneumonia, penyebab ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada saat anak sakit. Ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tata laksana dalam penanganan balita sakit yang belum kuat. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-52
Angka Kematian Balita (AKBa)Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kematian Balita	Kasus	70	54	50	16	3
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	10,99	7,98	7,5	9,99	0,49

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

3) Angka Kematian Neonatal

Sepanjang tahun 2019-2023, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup mengalami tren yang fluktuatif dan pada tahun 2022 tidak ditemukan Kematian Neonatal. Kematian Neonatal umumnya disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam mendeteksi dan tata laksana awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, dan kualitas kesehatan. ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-53
Angka Kematian Neonatal Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kematian Neonatal	Kasus	51	45	50	0	63
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	8,01	6,65	7,29	0,00	10,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

4) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Bulukumba terutama dikarenakan hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan. Berdasarkan dua penyebab kematian tersebut, pengoptimalan program Antenatal Care (ANC) atau disebut juga Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan akan berdampak besar dalam mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan kematian. Sebaran kasus kematian ibu.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada 2019-2023 mengalami peningkatan fluktuatif. Beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini diantaranya kondisi fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana di beberapa Kecamatan untuk penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal masih belum optimal, distribusi SDM kesehatan yang kompeten untuk kasus kegawat daruratan belum merata ditingkat puskesmas, serta belum optimalnya pelayanan Antenatal Care (ANC) sesuai standar pada semua Kecamatan sehingga deteksi resiko terlambat diketahui. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-54
Angka Kematian Ibu (AKI)Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Ibu Hamil Yang Meninggal karena Hamil, Bersalin dan Nifas	Orang	3	4	10	9	9
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	6.370	6.770	6.855	6.522	6.128
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.00 kelahiran	47,10	59,08	145,88	137,99	146,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

5) Rasio Posyandu per satuan balita

Keberadaan Posyandu dinilai dengan strata pratama, madya, purnama dan mandiri sehingga indikator keberhasilan Posyandu diukur dengan strata purnama dan mandiri, dimana jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri terhadap per satuan balita, cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari minat masyarakat untuk menjadi kader posyandu semakin meningkat. Disamping itu bertambahnya posyadu juga dipicu oleh meningkatnya kepercayaan orang tua akibat layanan posyandu yang dianggap baik. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-55
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Posyandu	Unit	581	593	593	597	597
Jumlah Balita	Orang	29.886	25.192	25.371	26.358	18.384
Rasio Posyandu per satuan Balita	Per 1.000 Balita	19,44	23,54	23.37	22,65	3,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

6) Rasio Puskesmas dan Pustu Persatuan penduduk

a) Rasio puskesmas per satuan penduduk

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan bagi masyarakat, terus ditingkatkan baik dari jumlah maupun kualitas pelayanannya. Pada Tahun 2021 jumlah puskesmas di Kabupaten Bulukumba sebanyak 20 Unit.

b) Rasio pustu per satuan penduduk

Puskesmas Pembantu (pustu) adalah sarana kesehatan yang terdepan di Masyarakat dan merupakan bagian jaringan pelayanan dari Puskesmas yang mengemban tugas memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Promotif, Preventif dan kuratif. Pada tahun 2023 terdapat 61 unit Pustu yang tersebar di 10 Kecamatan dan 136 Desa/Kelurahan.

Rasio ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, menunjukkan kondisi yang stagnan dari tahun 2019-2022 dan terdapat 1 unit pembangunan baru Puskesmas pada tahun 2023. Angka rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel II-56
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	Orang	420.603	437.607	445.699	463.981	471.688
Jumlah Puskesmas	Unit	20	20	20	20	21
Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	61	61	61	61	61
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas pembantu Pustu)	Unit	81	81	81	81	82
Rasio Puskesmas dan Pustu	Per 1000 Penduduk	0,19	0,19	0,19	0,17	0,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

7) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio ketersediaan Rumah Sakit per Satuan penduduk menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 jumlah rumah sakit 1 unit dan pada tahun 2023 menjadi 3 unit rumah sakit. Angka Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik per Satuan Penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel II-57
Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	Orang	420.603	437.607	445.699	463.981	471.688
Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	2	2	3
Jumlah Poliklinik	Unit	15	16	17	17	16
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,002	0,002	0,005	0,004	0,006
Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

8) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang termasuk tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Rasio Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan fluktuatif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-58
Rasio Dokter Per Satuan PendudukKabupaten Bulukumba
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Dokter Umum/Spesialis	Orang	40	34	64	118	60
Jumlah Penduduk	Orang	420.603	437.607	445.699	463.981	471.688
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,095	0,078	0,14	0,25	0,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

9) Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dikarenakan perhitungan tenaga medis mencakup data poliklinik hingga rumah sakit. Perkembangan Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-59
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tenaga Medis	Orang	96	88	114	153	1.372
Jumlah Penduduk	Orang	420.603	437.607	445.699	463.981	471.688
Rasio Tenaga Medis/Penduduk	Angka Per 1000 Penduduk	0,228	0,209	0,256	0,33	2,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

10) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2019 persalinan oleh tenaga kesehatan menurun ke angka 79,51 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,35 persen hingga tahun 2021 meningkt sebesar 87,46 hingga pada tahun 2023 menurun menjadi 78,78 persen. Ini diakibatkan karena adanya peran aktif tenaga medis/kesehatan melakukan sosialisasi terkait keselamatan ibu bersalin dan meningkatnya sarana dan prasarana pada seluruh layanan kesehatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-60
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Orang	5.788	6.776	6.855	6.541	6.157
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Orang	7.280	7.847	7.847	7.655	7.815
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	79,51	86,35	87,46	85,45	78,78

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

11) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Penyelenggaraan imunisasi di Indonesia diukur dengan cakupan *UCI (Universal Child Immunization)* yaitu suatu kondisi dimana minimal 80 persen bayi yang berada dalam suatu

desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap,Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan campak) Bentuk pelayanan kesehatan bayi berupa pemberian imunisasi rutin bagi bayi umur 0 – 1 tahun (BCG, DPT, Polio, Campak, HB) yang dilakukan di Posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-61
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/Kel	136	45	87	123	136
Jumlah SeluruhDesa/Kelurahan	Desa/Kel	136	136	36	136	136
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	33,1	63,97	90.44	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

12) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dari tahun 2019-2023, menunjukkan tren yang berfluktuasi, dan cakupannya telah mencapai 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor diantaranya meningkatnya surveilans gizi, sehingga kasus-kasus yg terjadi semuanya dapat ditemukan dan dilakukan intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk. Selain itu tersedianya aplikasi by name by addres Pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) sehingga data antropometri balita dan status gizinya tercatat dengan baik, selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-62
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	Balita	9	4	7	10	7
Jumlah seluruh Balita Gizi Buruk yang ditemukan	Balita	9	4	7	10	7
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

13) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC pada tahun 2019-2023 mengalami tren fluktuatif. Hal ini disebabkan karena kurangnya masyarakat untuk melakukan pemerikasaan kesehatan akibat gejala yang di timbulkan bagi penderita penyakit TBC hampir mirip dengan gejala bagi penderita *Covid-19* dan adanya pembatasan layanan kesehatan masyarakat akibat pandemic. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-63
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Jiwa/ Orang	390	237	385	530	839
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Jiwa/ Orang	579	602	540	828	1.568

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	67,4	39,4	71,3	64.0	53,51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

14) Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (Per 100.000 Penduduk)

Prevalensi Kasus TBC untuk semua tipe menunjukkan peningkatan fluktuatif dari tahun 2019-2023. Peningkatan Prevalensi Kasus TBC disebabkan dengan adanya rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyisiran kasus di Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta karena masih banyaknya kasus TBC yang ditemukan namun tidak terlaporkan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-64
Tingkat Prevalensi Tuberkolosis
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Penderita TBC	Orang	651	346	5.400	767	839
Jumlah Penduduk	Orang	420.603	437.607	445.699	463.981	471.688
Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 penduduk	154,78	79,07	121,16	165,31	177,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

15) Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis

Angka kematian pada Penderita TBC pada tahun 2017 sebanyak 6,0, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,7, tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 7,4 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 3,2 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2021 kembali meningkt sebear 6,48 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,09 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-65
Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kematian karena TB	Jiwa	31	14	35	39	24
Jumlah Penduduk	Orang	420.603	437.607	445.699	463.981	471.688
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	7,4	3,2	6,48	8,41	5,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi adalah:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila ditemukan gejala awal TBC.
- Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang masih ada di masyarakat.
- Pengobatan yang tidak tuntas sehingga risiko kematian semakin tinggi.
- Penyebab utama kematian bukan karena penyakit TBC tapi adanya penyakit komorbid (penyakit penyerta) lainnya.

16) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-202 menunjukkan tren yang fluktuatif secara jumlah, namun bersifat konstan dari segi capaian penanganan selama periode tersebut. Tahun 2017 turun menjadi 110

orang, tahun 2018 jumlahnya naik menjadi 152 orang, tahun 2019 jumlahnya kembali naik menjadi 275 kasus, namun tahun 2020 jumlah penderita penyakit DBD turun menjadi 160 orang dan pada tahun 2021 jumlah penderita mengalami penuruan sbesar 112 orang. Dari segi penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023 capaiannya sebesar 100%

Tabel II-66
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah keseluruhan penderita DBD	Jiwa	275	160	112	141	144
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	275	160	112	141	144
Cakupan Penemuan dan Penanganan Pederita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

17) Angka kejadian Malaria

Pengendalian penyakit malaria telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Angka Kejadian Malaria yang diukur dengan Annual Parasite Incidence (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan memiliki nilai signifikan dalam pengendalian malaria.

Pencapaian kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan sumber daya manusia baik dalam diagnosis dan tata laksana, serta manajemen program, dan peningkatan kapasitas tenaga laboran dalam pemeriksaan sediaan darah malaria. Selain itu dilakukan juga surveilans migrasi dan penyelidikan epidemiologi kasus positif malaria, penemuan suspek malaria baik secara aktif maupun pasif, pelaksanaaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 terhadap semua kasus positif malaria, serta pemberian pengobatan sesuai standar kepada penderita malaria. Angka kejadian malaria di kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022 menunjukkan tren yang berfluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 yakni 10 kasus penderita malaria. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-67
Angka Kejadian Malaria Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penderita Malaria	Orang/ kasus	23	5	10	23	33
Jumlah Penduduk	Jiwa	420.603	437.607	445.699	463.981	471.688
Angka Kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	5,47	1,19	0,02	4,96	7,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan berbagai factor yang menghambat diantaranya masih belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam hal penemuan kasus, minimnya anggaran pencegahan dan pengendalian malaria, serta tidak adanya regulasi daerah yang dapat mendukung pencegahan dan pengendalian malaria.

18) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total Populasi

Prevalensi HIV dari total populasi di Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Tahun 2017 terdapat 21 orang penderita HIV/AIDS

dengan angka prevalensi sebesar 0,005, dan pada tahun 2021 jumlah penderita HIV/AIDS meningkat menjadi 34 orang atau 0,34 dari total populasi penduduk dan pada tahun 2023 menjadi 0,012. Sesuai dengan tingkat epidemiologi, Kabupaten Bulukumba adalah epidemiologi terkonsentrasi artinya kasus HIV yang ada tinggi tapi berada di populasi-populasi tertentu, belum sampai ke masyarakat umum. Kendala yang dihadapi diantaranya belum semua Puskesmas dan Rumah Sakit melakukan penemuan kasus HIV dan sistem pencatatan dan pelaporan dengan Aplikasi sistem Informasi HIV AIDS belum digunakan maksimal karena terkendala sarana komputer dan jaringan wifi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-68
Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penderita HIV/AIDS	Orang	66	38	34	64	57
Jumlah Penduduk	Jiwa	420.603	437.607	445.699	463.981	471.688
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi per 100.000	%	0,016	0,009	0,34	13,79	0,012

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

19) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Pemerintah Pusat melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin sejak tahun 2008 yang merupakan peralihan program Asuransi Miskin (ASKESKIN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Kabupaten Bulukumba melalui Program Jaminan Kesehatan Gratis yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan penjaminan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin didukung dengan penganggaran kegiatan-kegiatan operasional untuk meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, keamanan dan kesehatan makanan, pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman dan realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah miskin dan masyarakat tidak mampu.Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-69
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	5,06	5,09	35,36	40,86	95,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

20) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Berdasarkan data di bawah, cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) berfluktuasi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas antar Kabupaten/kota yang variasinya cukup besar selain adanya kesenjangan, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini sehingga ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses

ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya dimana setiap ibu hamil seharusnya mendapatkan pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas padamasa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamillengkap (K4), kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-70
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Ibu Hamil yang memeriksakan Kandungan (K4)	Orang	5.262	6.026	4,497	5.771	5.628
Jumlah Ibu Hamil	Orang	7.265	8.220	8,220	8.220	8.197
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	72,43	73,3	92,42	70,21	68,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) diantaranya belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan, kondisi tempat tinggal ibu hamil dan keluarga yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan (wilayah terpencil, serta adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai masa persalinannya).

Meskipun demikian, beberapa faktor yang mendukung peningkatan cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Bulukumba diantaranya, adanya regulasi terkait pelayanan Standal Minimal untuk Pelayanan Antenatal Care yang sesuai SOP, kunjungan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil, adanya keterlibatan da perhatian tokoh masyarakat dan kader agar setiap ibu hamil memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan secara teratur, memperkuat Komunikasi, Infomasi dan Edukasi kepada Kader dan Masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, adanya pelaksanaan kelas ibu hamil di Desa dalam upaya untuk peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga, serta berjalannya Pemantauan Wilayah Setempat Program Kesehatan Ibu dan Anak

21) Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan keluarga miskin

Data pemberian makanan Pendamping ASI untuk khusus untuk keluarga miskin, tidak tersedia disebabkan dalam juknis MP-ASI yg dikeluarkan oleh kemenkes, Prioritas pemberian MP-ASI adalah diperuntukkan bagi baduta kategori kurus (BB/TB) <-2 SD sehingga tanpa memandang status kemiskinan semua balita kategori kurus mendapatkan MP-ASI. Begitu pula untuk keluarga miskin bila balitanya memiliki status gizi baik maka tidak diberikan MP-ASI. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-71
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak	%	63,63	45,25	71,31	52,65	65,66

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin						

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

22) Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin

Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang berfluktuasi, tahun 2017 nilainya sebesar 68,21 persen, tahun 2019 mningkat menjadi 80,56 persen, dan tahun 2020 capaian tersebut turun lagi menjadi 52,37 persen da di tahun 2021 meningkat m jadi 60,4 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-72
Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	80,56	52,37	60,4	85,69	95,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan merupakan instrumen penting untuk mengakselerasikan perwujudan posisi Kabupaten Bulukumba sebagai pilar utama pembangunan di kawasan selatan. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.510/X/2016 tentang Penetapan status Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bulukumba, menurut statusnya panjang jalan Kabupaten Bulukumba meningkat dari 1.039,17 Km menjadi 1.211,516 Km dan pada tahun 2023 terjadi perubahan panjang jalan sesuai dengan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: KPTS.188.45-329-2023 Tanggal 3 Juli 2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Bulukumba sehingga capaian Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan fluktuatif. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-73
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan Kondisi baik	Km	848,74	630,57	560,393	718,90	951,69
Panjang jalan kondisi sedang	Km	362,776	556,81	157,954	165,43	163,01
Panjang jalan Keseluruhan	Km	1.211,516	1.211,516	1.147,72	1.147,72	1.211,52
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,701	0,520	0,49	0,62	0,79

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba tahun 2023

2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Pembangunan jalan dilakukan untuk menunjang akses/pergerakan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sedangkan perhitungan panjang jalan didasarkan pada SK Menteri, SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba

dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dan pada tahun 2023 terjadi perubahan panjang jalan sesuai dengan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: KPTS.188.45-329-2023 Tanggal 3 Juli 2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren yang stagnan selama priode tersebut. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel II-74
Proporsi Panjang Jalan Per Satuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan Nasional	Km	87,452	87,452	87,452	87,452	87,51
Panjang Jalan Provinsi	Km	83,76	83,76	83,76	83,76	83,26
Panjang Jalan Kab/Kota	Km	1.211,52	1.211,52	1.147,72	1.211,516	1.164,08
Total Panjang Jalan	Km	1.382,728	1.382,728	1.318,932	1.318,932	1.334,84
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jml penduduk	0,0033	0,0032	0,0052	0,0030	0,0028

Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2024

3. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m) di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019-2023 mengalami tren peningkatan pada mengalami peningkatan tiap tahunnya namun pada tahun 2021 tidak dilakukan pengukuruan karena terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah, yang pada awal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menangani fisik pembangunan trotoar dan drainase/saluran pembuangan air untuk permukiman dan perumahan dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Tabel II-75
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air	Km	91,77	95,49	n/a	98,97	98,98

Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2024

4. Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik

Berdasarkan Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan fluktuasi ini dikarenakan keadaan bencana alam dan berubahnya luas keseluruhan irigasi pada tahun 2022 di Kabupaten Bulukumba karena adanya perpindahan kewenangan.

Tabel II-76
Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Luas Irigasi dalam kondisi baik	Km	15.658	16.408	17.226	8.246	16.813
Luas Keseluruhan irigasi	Km	20.777	20.777	20.777	10.160	20.777
Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	75,36	78,97	82,91	81,16	80,92

Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2024

5. Rasio Jaringan Irigasi

Berdasarkan capaian Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan fluktuasi ini dikarenakan irigasi yang dikerjakan pada tahun sebelumnya

mengalami kerusakan yang diakibatkan bencana alam yang diantar longsor, hujan deras dan faktor usia pada bangunan tersebut dan pada tahun 2023 terjadi pemuktharian database Panjang saluran irigasi dan Luas lahan budidaya pertanian (Dipakai luas sawah kewenangan Kabupaten) sehingga terjadi peningkatan rasio jaringan irigasi secara signifikan.

Tabel II-77
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Uraian Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Panjang saluran irigasi	Km	12.409	3.804	19.244	10.160	243.680
Luas lahan budidaya pertanian (Dipakai luas sawah kewenangan Kabupaten)	Ha	20.777	20.777	20.777	20.777	22.721
Rasio Jaringan Irigasi		0,60	0,18	0,93	0,49	10,72

Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2024

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1. Rasio rumah layak huni

Capaian Rasio Rumah Layak Huni di Bulukumba Tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan fluktuasi dikarenakan jumlah penduduk dan jumlah rumah layak huni pada tiap tahun meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-78
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Layak Huni	RT	103.200	103.300	103.610	192.250	107.943
Jumlah Penduduk	Orang	420.603	437.607	440.090	443292	471.688
Rasio Rumah Layak Huni		0,245	0,236	0,235	0,434	0,229

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2024

2. Persentase permukiman yang tertata

Persentase permukiman yang tertata dimana capaian dari tahun 2019-2023 mengalami capaian fluktuatif dikarenakan Luas Area Permukiman Tertata pada tiap tahunnya berbeda disebakan bencana alam maupun kondisi permukiman yang mengalami perubahan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-79
Persentase Permukiman yang Tertata
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Luas Area Permukiman Tertata	M^2	77.820	80.153	80.253	72.153	4.652
Luas Area Permukiman Keseluruhan	M^2	122.641	122.641	122.641	122.641	112.641
Persentase permukiman yang tertata	%	63,45	65,36	65,44	58,83	4,13

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2024

3. Persentase lingkungan permukiman kumuh

Persentase lingkungan permukiman kumuh kabupaten Bulukumba pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan tiap tahun, ini dapat dilihat dari data capaian pada tahun 2017 sebesar 5,00 persen dan pada tahun 2021 sebesar 11,5 persen namun pada tahun 2022 menurun menjadi 9,41 persen dikarenakan Luas Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2021 seluas 13.666 M^2 turun menjadi 11.133 M^2 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 12,04 persen atau 14.233 M^2. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-80
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	M^2	11.296	13.476	13.666	11.133	14.233
Luas Wilayah	M^2	118.252	118.252	118.252	118.252	118.252
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	9,55	11,40	11,56	9,41	12,04

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2024

4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Untuk indikator Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dari tahun 2019-2023 dimana jumlah permukiman layak huni pada tahun 2019 sebesar 103.029 unit rumah selanjutnya terjadi peningkatan sampai tahun 2023 yaitu 107.943 unit. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-81
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	201	2022	2023
Jumlah Rumah Tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau	unit	103.029	103.290	103.368	103.498	107.943
Jumlah rumah tangga MBR	unit	111.585	111.843	111.843	111.843	177.758
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	92,33	92,35	92,42	92,54	60,72

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2024

5. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah yang ditindaklanjuti dengan PP No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan kembali pentingnya penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pedoman dan sIstem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dalam lintas fungsiyang berelanjutan dan terpadu. Sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat baik yang berada diluar permukiman umum maupun di Kawasan kumuh meliputi air bersih, drainase lingkungan (sanitasi) dan jalan lingkungan yang merupakan prasrana permukiman menjadi tanggungjawab negara agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah layak huni. Saat ini masih banyak polemik terkait ketersediaan atau sengketa lahan, oleh karena itu dibutuhkan peran serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga perencanaan awal lokasi sampai dengan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan. Adapun Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023 selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-82
Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	Unit	90.970	90.020	90.289	76.391	104.469
Jumlah Rumah Tinggal	Unit	118.252	118.252	118.252	118.252	118.252

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	76,93	76,13	76,35	64,60	88,34

Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2024

6. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berkases air minum dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 Persentase penduduk berkases air minum Sebesar 83,52 persen. Mengalami penurunan pada 2021 yaitu 84,26 persen hingga pada tahun 2023 meningkat menjadi 85,75 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-83
Persentase penduduk berakses air minum Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk berakses air minum	%	83,52	84,4	84,26	85,48	85,75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2024

7. Persentase areal kawasan kumuh

Persentase areal kawasan kumuh dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-84
Persentase areal kawasan kumuh Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Luas Kawasan Kumuh	M^2	64.000	11.799	12.799	13.879	14.233
Luas Wilayah	M^2	115.467	115.467	115.467	115.467	115.467
Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	55,43	10,22	11,08	12,02	12,33

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2024

8. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan dari tahun 2019-2023 pada dasarnya mengalami pertumbuhan fluktuasi dikarenakan jumlah bangunan ber-IMB tiap tahunnya dilakukan peningkatan jumlah terdaftar namun jumlah bangunan tiap tahunnya bertambah dan diantaranya terverifikasi belum memiliki IMB. Adapun peningkatan pada tahun 2023 terdapat jumlah bangunan sebanyak 105.096 unit dan jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 59.198 unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-85
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	2,15	2,97	6,02	0,42	0,563

Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2024

E. Urusan Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Pada tahun 2019-2023, cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengalami penurunan dalam segi cakupan ataupun persentase ini didasarkan pada jumlah penduduk bertambah sedangkan jumlah Linmas tetap dan penyebab lainnya hal ini disebabkan karena berkurangnya Jumlah Petugas Linmas setelah diadakan peremajaan data Linmas dari 10 Kecamatan.

Tabel II-86
Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Petugas Linmas	Orang	1.360	1.360	1.330	1.330	1.330
Jumlah Penduduk	Orang	418.326	418.326	448.218	448.218	468.337
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	**%**	**0,33**	**0,33**	**0,30**	**0,30**	**0,28**

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2024

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023 , pada Tahun 2019 capaian sebesar 71,11%, dan tahun 2020 sampai 2023 menjadi 100% ini menunjukkan tinggat penyelesaian pelanggaran K3 semakin baik.

Tabel II-87
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan		224	306	313	83	105
Jumlah Laporan Pelanggaran K3		315	306	313	83	105
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	**%**	**71,11**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2024

3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Persentase tingkat capaian pada tahun 2019-2023 mengalami penurunan dalam segi Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran disebabkan jumlah penduduk mengalami peningkatan sementara jumlah mobil pemadam kebakaran tetap yakni 12 unit.

Tabel II-88
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019– 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	12	12	12	12	12
Jumlah Penduduk	Orang	410.405	418.326	448.218	448.218	468.337
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	0,00292	0,00287	0,00268	0,00268	0,00256

Sumber: Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2024

4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Presentase capaian pada tahun 2019 sebesar 98,90% dan ditahun 2020 sampai 2023 meningkat menjadi 100% hal ini dikarenakan ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran sudah semakin meningkat dengan adanya penempatan Posko Pemadam Kebakaran di 4 Sektor Kecamatan diantaranya : Sektor Dampang mencakup wilayah Gantarang-Kindang, Sektor Tanete mencakup wilayah Bulukumpa-Rilau Ale, Sektor Bonto Bahari mencakup wilayah Bonto Bahari-Bonto Tiro, Sektor Kajang mencakup Wilayah Kajang-Herlang.

Tabel II-89
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di KabupatenBulukumba Tahun 2019 – 2023

Keterangan (dalam persen)	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran kurang satu jam setelah pengaduan	Menit	180	80	80	73	190
Jumlah kejadian	Kasus	182	80	80	73	190
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK	**%**	**98,9**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2024

5. Presentase Penegakan Perda

Presentase tingkat capaian pada tahun 2019 sebesar 34.12% kemudian meningkat kembali menjadi 100% ditahun 2020 - 2023. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelanggaran peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum semakin berkurang selama periode 2019-2023.

Tabel II-90
Persentase Penegakan PERDA) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penyelasaian Penegakan Perda yang memuat saksi		58	60	94	60	105
Jumlah Pelanggaran Perda		170	60	94	60	105
Persentase Penegakan Perda	**%**	**34,12**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2024

F. Urusan Sosial

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba adalah menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial difokuskan pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jumlah dan jenis PMKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Data capaian pada indikator RPJMD diperoleh berdasarkan dari jumlah PMKS dan data indikator lain diluar PMKS yang ditangani yang selanjutnya dihitung sesuai dengan formula atau rumus pada masing-masing indikator untuk memperoleh capaian baik dalam satuan Unit, Buah maupun persentase. Dalam penetapan jumlah data tersebut diperoleh dari masing-masing bidang teknis yang menangani sesuai indikator RPJMD yang telah ditentukan. Berikut penjelasan pada masing-masing indikator :

1. Sarana Sosial seperti Panti Sosial

Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi , dalam hal ini Panti Asuhan pada tahun 2019-2022 berjumlah 13 Unit, namun Tahun 2023 mengalami penurunan jumlah yaitu menjadi 12 unit yang diakibatkan panti sosial tersebut berdasarkan hasil akreditasi oleh Tim dari Kemensos RI dinyatakan tidak terdaftar pada Dinas Sosial karena tidak dapat memenuhi persyaratan untuk terdaftar pada Dinas Sosial.

Tabel II-91
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Unit	13	13	13	13	12

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2024

- Faktor pendukung capaian indikator adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak lembaga/panti sosial dalam pengajuan akreditasi dan keterangan terdaftar pada Dinas Sosial.
- Faktor penghambat capaian indikator, Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial tidak secara rutin melengkapi dokumen pengajuan akreditasi lembaga.

2. Jumlah Korban Bencana yang Ditangani

Untuk Jumlah Korban Bencana yang Ditangani pada tahun 2019 – 2023 mencapai 100% karena semua korban bencana dapat dilayani sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel II-92
Jumlah Korban Bencana yang Ditangani
diKabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	483	365	60	26	101
Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Orang	483	365	60	26	101
Persentase		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2024

- Faktor pendukung capaian indikator, koordinasi dan kerjasama antar instansi baik pusat dan daerah dalam penyediaan logistik bagi korban bencana.
- Faktor penghambat capaian indikator, masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat.

3. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Sesuai dengan data yang disajikan secara umum berfluktuatif dimana pada Tahun 2019 mencapai 92% dan megalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 98.6% dan 2021 menjadi 26.8%. Salah satu faktor penurunan capaian dari tahun 2019 diakibatkan karena jumlah PMKS yang memperoleh masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada namun pada tahun 2022 dan 2023 tercapai 100%.

Tabel II-93
Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang	38.773	42.592	48.503	25.463	25.377
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	42.149	43.179	180.686	25.463	25.377
Persentase		**92,0**	**98,6**	**26,84**	**100,0**	**100,0**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2024

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat

4. Persentase PMKS yang tertangani

Persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2019 mencapai 94,2% namun pada tahun 2020 dan 2021 PMKS yang tertangani mengalami penurunan yaitu 73.6% dan 26.8% sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 meningkat menjadi 57,5% dan 57,25%.

Tabel II-94
Perentase PMKS yang tertanganidi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	39.713	31.767	48.503	26.099	25.972
Jumlah PMKS yang ada	Orang	42.149	43.179	180.686	45.365	45.365
Persentase		**94.2**	**73.6**	**26.8**	**57,5**	**57,25**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2024

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat.

5. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

pada akhir capaian RPJMD mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu diakibatkan oleh adanya pengurangan anggaran (*refocusing* penanggulangan *Covid-19*) pada program dan kegiatan yang menangani kegiatan tersebut tetapi pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 100%.

Tabel II-95
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Orang	480	270	60	26	101
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Orang	483	365	60	26	101
Persentase		**99.4**	**74.0**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2024

- Faktor pendukung capaian indikator, koordinasi dan kerjasama antar instansi baik pusat dan daerah dalam penyediaan logistik bagi korban bencana.
- Faktor penghambat capaian indikator, masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat.

6. Persentase penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Pada tahun 2019-2023 capaian Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami nilai fluktuasi dikarenakan target untuk Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial berbeda pada tiap tahunnya. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-96
Persentase penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Orang	2.148	2.251	31	1.088	222
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	Orang	2.160	3.039	33	1.119	222
Persentase		**99.4**	**74.1**	**93.9**	**97,2**	**100,0**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2024

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional dalam penanganan disabilitas dan lansia.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah diantaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

A. Urusan Tenaga Kerja

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahunnya mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2019 sebesar 19,09 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 0,93 persen, pada tahun 2021 sebesar 1,18 persen dan pada tahun 2022 menjadi 23,26 persen dimana jumlah sengketa pengusaha pekerja 4 kasus sedangkan jumlah perusahaan 172 unit dan pada tahun 2023 tidak terdapat sengketa pengusaha pekerja, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II-97
Angka sengketa pengusaha-pekerja
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun	%	19,09	0,93	1,18	23,26	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, tahun 2019-2023 berbeda pada tiap tahunnya namun pada tahun 2022 kasus yang tercatat berjumlah 4 kasus dan diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, pihak yang mewakili dalam melakukan perundingan mediasi sangat mempengaruhi pula tingkat keberhasilan penyelesaian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama, faktor budaya dan sosial ekonomi perusahaan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-98
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	62,0	38,0	38,0	100,0	100

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Persentase besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek berfluktuasi. Dimana pada tahun 2019 sebesar 94 persen sampai dengan tahun 2020 sampai 2021 meningkat menjadi 100 persen namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 97,30 persen dimana jumlah pekerja/buruh sebesar 3.853 orang sedangkan yang memperoleh program jamsostek 3.749 orang. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-99
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	94	100	100	97,30	100

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2024

4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 1,38 persen dan tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan menjadi 1 persen dan pada tahun 2023 sebesar 2,004 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-100
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan	%	1,38	1,00	1,00	2,5	2,004

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2024

5. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Besaran pemeriksaan di Perusahaan kurun waktu 2019–2023 berfluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 0,60 persen, naik menjadi 32 persen pada tahun 2020, turun sebesar 20 persen di tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,24 persen. Pada tahun 2023 persen. Selengkapnya pada tabel berikut

Tabel II-101
Besaran Pemeriksaan Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,60	32	20	0,24	0

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2024

6. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Besaran pengujian peralatan di Perusahaan kurun waktu 2019–2023 berfluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 0,826 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkat menjadi 3 persen kemudian kembali mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 2,00 dan 2022 sebesar 0,06 persen. Pada tahun 2023 sebesar 0 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-102
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019– 2023

Indikator	satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	0,826	3,00	2,00	0,06	0

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2024

7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 80 dan pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan menjadi 53 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 91,43 persen. Pada tahun 2023 sebesar 69,00 persen. Hal ini

dikarenakan pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-103
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	%	80,0	52,0	53,0	91,43	69,00

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2024

8. Rasio lulusan S1/S2/S3

Data lulusan S1/S2/S3 dan jumlah penduduk berasal dari data statistik (Bulukumba dalam Angka) menunjukkan bahwa lulusan tertinggi yaitu pada tahun 2023 sebesar 3.179 per 10.000 Penduduk. Peningkatan Rasio Lulusan S1/S2/S3 menunjukkan tingkat kemampuan secara finansial dalam pembiayaan kuliah anak dan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang semakin membaik di masyarakat. Selain itu banyaknya universitas di Kabupaten Bulukumba semakin membuka peluang kelanjutan pendidikan di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-104
Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio lulusan S1/S2/S3		739,36	758,83	718,00	741,80	3.179

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2024

9. Rasio daya serap tenaga kerja

Daya serap tenaga kerja dalam kurun waktu empat tahun paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 55,42 persen sedangkan daya serap tenaga kerja terendah pada tahun 2022 sebesar 43,21 persen. Banyaknya lowongan kerja pada sektor perdagangan, wirausaha, pertanian dan lainya. Menyebabkan peningkatan daya serap tenaga kerja pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya pandemi *Covid-19*.

Tabel II-105
Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio daya serap tenaga kerja	%	55,42	49,68	46,86	43,21	33,85

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2024

10. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan pada tahun 2022 tenaga kerja yang dilatih 160 orang sesuai dengan jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat. Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-106
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	75	100	100	100	100

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2024

11. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 0,53 persen. Pelatihan berbasis masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-107
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	%	0,53	0,53	0,53	0,47	1

Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2024

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

Pada tahun 2019 jumlah pekerja perempuan berjumlah 83.583 orang, sementara pekerja perempuan di lembaga pemerintah menurun menjadi 3592 (4,3 persen) orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah pekerja perempuan meningkat menjadi 92.095 orang sementara jumlah pekerja peremuan di lembaga pemerintah sebesar 3670 orang, secara keseluruhan jumlah pekerja perempuan naik dari tahun sebelumnya namun secara persentase menurun dari 4,3 persen menjadi 4.0 persen dan di tahun 2021 persntase partisiapsi perempuan di lembaga pemerintahan menurun sebesar 3,7 persen dan pada tahun 2023 menurun menjadi 3,35 berdasarkan Pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 3.461 jiwa dan Jumlah pekerja perempuan yaitu 103.378 jiwa.

Tabel II-108
Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	%	4.3	4,0	3,7	4,4	3,35

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2024

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba dari tahun 2019-2023 sejumlah 40 total kursi. Pada tahun 2019 terdpat 8 orang yang terpilih pada pemilu DPRD periode 2019-2025 namun pada tahun 2020-2023 berkurang menjadi 7 orang dikarenakan 1 oang mengikuti pemilu pilkada pada tahun 2020.

Tabel II-109
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20,00	17,50	17,50	17,50	17,50

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2024

3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta.

Pada tahun 2019-2023 jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan meningkat pada tiap tahunnya dikarenakan penegakan kesetaraan gender telah diberlakukan dan melihat dari jumlah penduduk kabupaten didominasi oleh perempuan.

Tabel II-110
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	83,58	92,09	92,09	96	97

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2024

4. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2019-2023, mengalami penurunan ini berdasarkan kasus yang ditemukan dan dilaporkan..

Tabel II-111
Rasio KDRT Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio KDRT		0,027	0,136	0,091	0,034	0,003

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2024

5. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Tabel II-112
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	96,38	97,07	97,77	96,00	70,18

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2024

6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih didalam unit pelayanan terpadu. Mulai Tahun 2019 sampai dengan 2023 semua kasus terlayani 100 % oleh pelayanan terpadu.

Tabel II-113
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Laporan	128	46	52	32	32
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Laporan	148	128	46	52	32
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Bulukumba, 2024

7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2019-2023 Jumlah korban KtP/A yang memperoleh

layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS dan Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KTP/A dan ke RS berbeda pada tiap tahunnya.

Tabel II-114
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit		9,38	21,74	2,00	8,06	100

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2024

8. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pada tahun 2019 jumlah perkara kekerasan yang disidangkan sebanyak 128 perkara dan lebih banyak perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan sebanyak 125 perkara sehingga persentase menjadi 97.66. Sedangkan pada tahun 2020 – 2023 persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 100% karena semua perkara yang disidangkan mendapat putusan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu sebanyak 1 perkara.

Tabel II-115
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	125	1	15	10	10
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	128	1	15	10	10
Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak		97,66	100,00	100,00	100,00	100

Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2024

C. Urusan Pangan

1. Ketersediaan pangan utama

Pangan utama berdasarkan konsumsi masyarakat di Kabupaten Bulukumba adalah beras, berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator ketersediaan pangan utama, menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bulukumba masih surplus dengan kondisi pertahun rata-rata diatas 300%. Faktor utama yang mempengaruhi stabilitas ketersediaan pangan utama adalah keseimbangan antara tingkat produksi pangan dan jumlah penduduk, ini didasarkan pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi pada tahun 2019 sebesar 393,1% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan 389,1% dan pada

tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan dengan capaian 100%. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II-116
Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan pangan utama		393,1	389,13	100	100	100

Sumber:Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein

Ketersediaan Zat Gizi Per Kapita yang terkandung dalam sejumlah bahan makanan yang siap untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk unsur gizinya. Unsur gizi utama tersebut adalah Kalori, Protein, Lemak, Vitamin dan Mineral. Adapun Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein pada tahun 2019-2023 mengalami trend fluktuatif didasarkan pada hasil produksi daerah serta ketersediaan cadangan pangan pada periode sebelumnya.

Tabel II-117
Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan Energi	kkl/kap/ hari	8.424,75	7.423,66	2.662,51	17.766,98	8.959,00
Ketersediaan Protein	gram/kap/ hari	126,01	240,77	69,0	919,76	239,78

Sumber:Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah komoditi yang dijadikan sampel pengawasan terhadap komoditi unggulan yang ditetapkan Kementerian. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan sejak terbentuknya Dinas Ketahanan Pangan yaitu pada tahun 2019, kegiatan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan meningkat pada tahun 2023. Seperti pada tabel berikut.

Tabel II-118
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kabupaten BulukumbaTahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		91	36	60	90	93,33

Sumber:Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2024

D. Urusan Pertanahan

1. Persentase luas lahan yang bersertifikat

Kinerja urusan Pertanahan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kepedulian dalam memfasilitasi masyarakat guna memiliki lahan yang memiliki kekuatan hukum. Sejak tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah memfasilitasi program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit didalam menertibkan aset dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap.

Tabel II-119
Luas Lahan Bersetifikat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Luas Lahan Bersertifikat	m^2	270.937.227	278.530.635	297.190.635	297.222.607	230.916.000
Jumlah Luas Wilayah	m^2	1.154.580.000	1.154.580.000	1.154.580.000	1.154.580.000	1.154.580.000
Persentase Luas Lahan Bersetifikat	%	23,47	24,12	25,74	25,74	20,00

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Penyelesaian kasus tanah negara

Persentase Penyelesaian kasus tanah negara dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 Penyelesaian kasus tanah negara sebesar 66,67 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,00 persen dan pada tahun 2021 mngalai peningkatan sebesar 75,00 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 20,00 persen sedangkan pada tahun 2023 tidak ada kasus yang terdaftar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II-120
Penyelesaian kasus tanah Negara di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus yang diselesaikan	Kasus	10	5	12	1	0
Jumlah Kasus yang terdaftar	Kasus	15	10	16	5	0
Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	66,67	50,00	75,00	20,00	100

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, 2024

E. Urusan Lingkungan Hidup

1. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air

Indeks kualitas air Kabupaten Bulukumba berada pada predikat sedang (50). Berdasarkan data tersebut dari Tahun ke tahun Pengukuran indeks kualitas air dari tahun 2019 ke Tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan, terlihat dari data hasil pemantauan khususnya Parameter e-Coli, Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) yang semakin meningkat namun terjadi peningkatan pada tahun 2023 diakibatkan industri olahan dan pembuangan sampah secara tidak tepat.

Dalam meningkatkan kualitas air sungai maka strategi yang perlu dilakukan adalah menurunkan beban pencemar pada sumber tercemar, memulihkan kualitas air di badan air, melakukan pemantauan kualitas air secara berkala dan perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasaranan pengelolaan air limbah. Penentuan nilai IKA (Indeks Kualitas Air) Kabupaten Bulukumba didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air pada sungai. Yang meliputi 6 (enam) sungai besar yaitu Sungai Balantieng, Sungai Bijawang, Sungai Anyorang, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, dan Sungai Raowa. Hasil pengukuran kualitas air untuk setiap sungai dilakukan pada lokasi hulu, tengah dan hilir.

Selain itu meningkatnya jumlah limbah domestik yang masuk kedalam badan sungai, hal ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Tabel II-121
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Air (IKA)	%	81,90	78,23	61,00	55,00	63,74

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara

Pengukuran indeks kualitas udara telah dilakukan / dihitung dimulai dari tahun 2018 hingga sekarang untuk Pengujian kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) titik utama yang dianggap representatif mewakili kondisi udara di Kabupaten Bulukumba. Adapun lokasi pemantauan udara yaitu BTN Ujung Bulu (perumahan), Kantor Bupati (perkantoran), Terminal (Transportasi), serta Pabrik PT.PP Lonsum, Tbk (Industri). Hasil indeks kualitas udara ambien di ke empat titik tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Bulukumba cukup baik. Tentu ini merupakan hasil yang diharapkan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Bulukumba khususnya kualitas udara ambien.

Tabel II-122
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	90,88	88,30	84,64	92,13	93,82

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan

Hasil Perhitungan data indeks kualitas lahan di Kabupaten Bulukumba termasuk dalam predikat sangat buruk (IKL 25) Kabupaten Bulukumba menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan indeks tutupan lahan antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, penggunaan Kawasan hutan untuk sektor diluar kehutanan, dan pemukiman. Adanya kecenderungan penurunan IKTL menunjukkan korelasi dengan tutupan lahan berhutan di tingkat tapak yang dimungkinkan terjadi penurunan kelas hutan menjadi non hutan di Kabupaten Bulukumba.

Dalam meningkatkan kualitas tutupan Lahan maka ada beberapa strategi yang perlu di optimalkan antara lain Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di ibu Kota Kabupaten seperti jalan, taman kota, pekarangan dan halaman perkantoran, dan keberadaan RTH ini juga dapat digunakan untuk penilaian gas rumah kaca dan cadangan karbon dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Disamping itu juga menjaga fungsi hutan ntuk terus terjaga karena Perubahan fungsi hutan akan mengganggu kualitas dan kuantitas air, kesuburan tanah, kualitas udara, dan ekosistem hutan secara keseluruhan yang pada akhirnya akan mengganggu keberlangsungan berbagai sektor seperti pertanian dan perkebunan. Kawasan hutan yang tidak berhutan dan secara alamiah harusnya berupa hutan mengindikasikan hutan belum terkelola dengan baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-123
Hasil Pengukuruan IKTL Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Hasil Pengukuruan IKTL	%	22,63	23,64	23,56	23,56	28,89

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

4. Pembinaan dan Pengawasanterkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2019 sebesar 82,35 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 68,62 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 95,93 persen dan pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 100 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-124
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	82,35	68,62	95,93	100	100

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

5. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA

Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA, sejak 2019 Terbentuk 1 Kelompok Masyarakat Hukum adat Ammatoa Kajang setelah terbitnya perbub Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Tabel II-125
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terfasilitasi Pendampingan PengakuanMHA	Kelompok	1	1	1	1	1

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

6. Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional pada tahun 2019-2023 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-126
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Klp	1	1	1	1	1

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

7. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional

Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional pada tahun 2019-2023 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-127
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Klp	1	1	1	1	1

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

8. Penetapan hak MHA

Penetapan hak MHA pada tahun 2019-2023 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-128
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penetapan hak MHA	Klp	1	1	1	1	1

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

9. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan

Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada tahun 2019-2023sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-129
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	100	100	100	100	100

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

10. Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana

Terfasilitasipenyediaan sarana/prasarana pada tahun 2019-2023 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-130
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	100	100	100	100	100

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

11. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat pada tahun 2019-2023 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-131
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Klp	1	1	1	1	1

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

12. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup pada tahun 2019 penghargaan tingkat Kabupaten 10 Sekolah dan tahun 2020 tidak ada penilaian karena COVID-19 dan ditahun 2021 sebanyak 2 sekolah

Tabel II-132
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Sekolah	ada	Tidak ada	ada	Tidak ada	Ada

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

13. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota.

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota pada tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-133
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kotaKabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

14. Timbulan sampah yang ditangani

Jumlah pengurangan Timbulan sampah yang tertangani pada tahun 2019 sebesar 12.767.36 ton dengan persentase 20,75 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton sedangkan pada tahun 2020 jumlah timbulan sampah yang tertangani sebanyak 12,957.00 ton dengan persentase 20,64 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton. Dan pada

tahun 2022 persentase timbulan sampah yang tertangani sebesar 26,03 persen kemudian tahun 2023 naik menjadi 63,14%.

Tabel II-134
Timbulan sampah yang ditangani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan sampah yang ditangani	%	20,75	20,64	24,95	26,03	63,14

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

15. Persentase jumlah sampah yang tertangani

Jumlah Penanganan sampah yang tertangani pada tahun 2019 sebesar 49.275.00 ton dengan persentase 80,07 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton, sedangkan pada tahun 2020 jumlah sampah yang tertangani sebanyak 46,172.50 ton dengan persentase 73,56 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton. Penyebab turunnya penanganan sampah yang tertangani ditahun 2020 disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana dibidang pengangkutan serperti mobil pengangkut sampah dan motor sampah dan adanya proses pengelolaaan sampah dari sumber melalui pemilahan di Bank sampah. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 94,79%.

Tabel II-135
Persentase jumlah sampah yang tertangani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	80,07	73,56	86,63	73,13	94,79

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

16. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota ,Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71 Nilai Adipura Tahun 2019 belum keluar sedangkan Adipura Tahun 2020 tidak ada karena COVID- 19 dan pada tahun 2022 Adipura keluar sebesar 74,00 persen kemudian naik menjadi 75,00 persen di tahun 2023.

Tabel II-136
TabelOperasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	0	0	26,24	74,00	75,00

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

17. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)

Pengelolaan Limbah B3 dari industri dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) sesuai kewenangan yang diatur dalam PP 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup adalah melakukan pengelolaan pada tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pengumpul Limbah B3.Pelaporan pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan peraturan bupati No

81 Tahun 2015 tentang tata cara pelaporan pengelolaan LB3 dan dilakukan secara berkala atau satu kali dalam 3 bulan.

Tabel II-137
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)	Ton/ Kg	36,75	25,13	35	35,00	35,00

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

18. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 1 Buah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-138
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	1	1	1

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

19. Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan

Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2019-2023mengalami peningkatan sebesar 29,86 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-139
Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	%	22,72	23,64	29,86	29,86	29,86

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

20. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar 25 Persen. Dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 36,62 persen .Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-140
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	%	25	25	32,36	32,36	36,62

Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

21. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati

Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati yang priodesasinya selama 5 tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengolahan terpadu keanekaragaman hayati tidak terdapat di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-141
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	0	0	0	0

Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2024

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satuidentitas resmi yang wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yangtelah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin sebagai bukti diri bahwaorang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi diIndonesia. Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah senantiasa memberidukungan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan akses pelayananpublik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el serta mendorong masyarakatuntuk segera memiliki KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yangmasih menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga ketersediaan blangko KTP-el di Kabupaten/Kota sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaanblangko KTP-el di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri danpendistribusiannya ke instansi pelaksana di Kabupaten/Kota.

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun ber KTP-el	Orang	317.864	317.477	326.380	357.885	343.859
Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	Orang	317.864	317.497	326.701	326.701	346.416
Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	**%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,10**	**0,99**

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Rasio bayi berakta kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwakelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkaithubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya.Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudahtermasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namundalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadarandan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukanpengurusan akta

kelahiran bayinya setelah lahir. Terkait dengan bayi beraktekelahiran merupakan penduduk berusia 0-5 tahun kurang 1 hari yang telahmemiliki akte kelahiran

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah bayi berakte kelahiran	Orang	4.518	2.248	7.405	5.082	3.291
Jumlah bayi	Orang	6.370	5.649	8.174	6.522	6.128
Rasio bayi berakta kelahiran	**%**	**0,71**	**0,40**	**0,91**	**0,78**	**0,54**

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Rasio pasangan berakta nikah.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya program nasional percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasangan berakta nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan buku nikah/akta perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akta perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan data perkawinannya belum tercatat dalam SIAK. Demikian halnya dengan Akta perkawinan untuk penduduk muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasil pelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnya terintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK).

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pasangan nikah non muslim berakta nikah		11.885	11.885	177	179	179
Jumlah keseluruhan pasangan nikah non muslim		218.762	218.762	177	179	179
Rasio pasangan berakta nikah		**0,05**	**0,05**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2024

4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Pemanfaatan data kependudukan adalah pemanfaatan data dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sIstem informasi administrasi kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh menteri dalam negeri. Dalam impelementasi pemberian hak akses, menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan akses kedalam basis data melalui Data Warehouse (DWH) yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan melalui jaringan komuniksi data. Dalam implementasi pemanfaatan data kependudukan telah diatur terkait tatacara dan kewenangan pemberian hak akses data kependudukan yang mana kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas atau Lembaga Pengguna skala provinsi atau badan hukum yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pusat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan.

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2024

5. Cakupan penerbitan KTP-el

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwakelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatansipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkaithubungan keperdataan penduduka. Akte kelahiran sangat penting peranannyauntuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayananterkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk denganadanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapahal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran danpemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukanpengurusan akta kelahiran hingga terkadang penduduk sudah berusia lanjutnamun belum memiliki Akta Kelahiran. Terkait dengan penerbitan aktakelahiran penduduk 0-17 tahun Data Konsolidasi Bersih (DKB) yangditerbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar untukmenentukan persentase penerbitan akta kelahiran yaitu jumlah penduduk 0-17tahun yang telah berakte kelahiran dibanding dengan jumlah penduduk 0-17 tahun dikalikan 100 persen

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan		317.864	317.477	326.380	357.885	343.859
Jumlah penduduk wajib KTP		317.864	317.497	326.701	326.701	346.416
Cakupan penerbitan KTP-el	**%**	**100,00**	**99,99**	**99,90**	**109,55**	**99,26**

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2024

6. Cakupan penerbitan akte kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan kependudukan. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran dan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukan pengurusan akta kelahiran hingga terkadang penduduk sudah berusia lanjut namun belum memiliki Akta Kelahiran. Terkait dengan penerbitan akta kelahiran ini merupakan seluruh penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran		199.647	2.248	7.405	138.243	124.474
Jumlah kelahiran		238.448	5.649	8.174	124.479	126.393
Cakupan penerbitan akte kelahiran	**%**	**83,73**	**39,79**	**90,59**	**111,06**	**98,48**

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2024

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintahan desa yang baik

Jumlah Desa yang memiliki sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintahan desa yang baik pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan positif ini dipengaruhi oleh bebarapa hal pendukung diantaranya keseriusan pemerintah Desa dalam mengembangkan

dan menata desanya sesuai dengan potensi desa yang dimiliki serta adanya dukungan anggaran baik yang bersumber dari ADD dan BDD serta tidak kalah pentingnya faktor pendukung yang sangat menentukan adalah pembinaan dan pendampingan dari pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terus memberikan pembinaan kepada seluruh aparat pemerintahan desa baik dari segi pelaksanaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, perencanaan dan penganggaran di desa, penataan kelembagaan desa dan setiap tahunnya diadakan evaluasi perkembangan desa dan Lomba desa dengan tujuan melihat sejauh mana perkembangan desa. Pada tahun 2023, 104 kantor desa dari 109 desa di Kabupaten Bulukumba memiliki sarana dan prasana Kantor desa yang baik yang mendukung dalam proses pelayanan administrasi masyarakat di desa dan jalannya pemerintahan di desa.

Tabel II-142
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perkantoran pemerintahan desa yang baik		74	75	80	80	104
Jumlah Seluruh Pemerintah Desa		109	109	109	109	109
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	66,9	68,81	73,39	73,4	95,4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM)

Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki kontribusi dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kegaiatan di Desa, namun belum Optimalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di 109 desa yang ada dikabupaten Bulukumba, sehingga Pemerintah kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Pemerintah Desa agar desa yang belum optimal dan belum jalan lembaga pemberdayaannya agar kiranya di aktifkan kembali guna menunjang program pemerintah Desa.

Tabel II-143
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM)		82	102	82	102	105
Jumlah LPM		82	102	82	102	105
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		93	93	93	93	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Kelompok Binaan PKK

Jumkah PKK yang ada dikabupaten Bulukumba dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terdiri 136 kelompok yang terdiri dari 109 PKK ditingkat Desa, 27 kelompok PKK tingkat kelurahan dan 10 kelompok PKK di tingkat Kecamatan. Keberadaan PKK ditingkat desa/Kelurahan dan Kecamatan memiliki peran yang sangat aktif, baik itu kegiatan yang ada

didesa/Kelurahan, Kecamatan maupun kegiatan ditingkat Kabupaten. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan memiliki peran penting dalam proses pembangunan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam didesa/kelurahan maupun dikecamatan untuk dikelolah semaksimal mungkin dalam peningkatan taraf hidup masyarakat didesa terutama kalangan ibu rumah tangga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerjasama dengan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba dari tahun 2019 sampai 2023 senantiasa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok Binaan PKK yang yang ada ditingkat kecamatan, Desa dan Kelurahan agar lebih aktif dan produktif mengambil peran dalam kegiatan pemberdayaan ibu ibu rumah tangga di Desa baik itu dalam hal sosialiasi terkait Pemanfaatan halaman rumah tangga yang produktif, manfaat pemberian ASI eksklusif untuk bayi, Pencegahan Gizi buruk untuk anak balita serta kegiatan lainnya yang berkontribusi dalam hal pembangunan ditingkat Desa/kelurahan.

Tabel II-144
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok Binaan PKK		136	136	136	136	136
Jumlah PKK		136	136	136	136	136
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2024

4. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif dari tahun 2019-2023 di Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya 136 PKK dari Jumlah PKK di kabupaten Bulukumba atau setiap tahunnnya mencapai target angka 100%. Kegiatan PKK baik itu ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten setiap tahunnya dilaksanakan sebagai wujud peran aktif PKK dalam proses pembangunan dan pemberdayaan perempuan, diharapkan kedepan dalam menunjang Kegiatan PKK ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dibutuhkan dukungan penganggaran yang cukup baik itu yang bersumber dari dana Desa dan APBD kabupaten, dalam hal sosialiasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kader dan pengurus PKK, kegiatan sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan penataan kelembagaan.

Tabel II-145
Persentase PKK aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PKK Aktif		136	136	136	136	136
Jumlah PKK		136	136	136	136	136
Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2024

5. Persentase Posyandu Aktif

Persentase Posyandu aktif pada tahun 2019 adalah (99,6%) 544 Posyandu dari jumlah Posyandu 546 posyandu yang tersebar di 10 Kecamatan dikabupaten Bulukumba, yang diklasifikasikan dalam empat tingkatan strata yaitu pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk terus berusaha dalam peningkatan jumlah posyandu dan peningkatan strata posyandu setiap tahunnya, dan alhamdulillah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023

total jumlah Posyandu dikabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dari sebelumnya 546 posyandu menjadi 577 Posyandu, ada penambahan 31 jumlah posyandu dan persentase posyandu aktif mencapai angka 100 %. Adapun klasifikasi tingkatan Posyandu di tahun 2020 sampai 2023 terdiri dari : Pratama 147 Posyandu, Madya 274 Posyandu, Purnama 153 Posyandu dan Mandiri 3 Posyandu. Untuk lebih meningkatkan strata posyandu diperlukan dukungan penganggaran dan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia kader posyandu yang ada ditingkat desa serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, ini menjadi tugas dan target kinerja tahun berikutnya agar kiranya strata posyandu atau tingkatan posyandu strata mandiri dapat ditingkat jumlah posyandu yang tersebar di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-146
Persentase Posyandu aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Posyandu Aktif		544	577	577	577	577
Total Posyandu		546	577	577	577	577
Persentase Posyandu aktif	%	99,6	100	100	100	100

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2024

6. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat desa dari tahun 2019-2023 berjalan dengan baik dimana setiap tahunnya desa melakukan kegiatan baik itu sifatnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dan seluruh potensi yang ada didesa tersebut dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian didesa sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa, bahwa dana desa tersebut dikelolah dan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat yang ada di desa tersebut., Pengelolaan dana Desa diatur dalam beberapa peraturan tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Desa diantaranya : Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana Desa, PMK No.205/PMK 07/2019 tentang pengelolaan dana Desa, PP No.60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN dan Perbub No.69 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Salah satu kegiatan peningkatan ekonomi di desa dengan dibentuknya Bumdes di 109 Desa dengan tujuan agar usaha ekonomi kecil menengah dan potensi unggulan didesa dapat dimanfaatkan dan dikembangkan melalui wadah Bumdes, namun kendala yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyarakat adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat desa terkait dengan peran aktif masyarakat dalam program pemberdayaan, Perlunya peningkatan kapasitas Sumber daya manusia aparat pemerintah desa serta pengelolah kegiatan termasuk didalmnya pengurus Bumdes, Perlunya penataan Kelembagaan di desa dengan baik agar menunjang program dan kegiatan yang telah direncakan oleh pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa telah melakukan bergabagai upaya pembinaan dan pendampingan termasuk didalamnya melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat pemerintah desa, pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat didesa termasuk didalamya pengelolah Bumdes, namun kendala yang kami hadapi adalah kurangnya penganggaran yang bersumber dari APBD kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan di 109 Desa di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-147
Persentase LSM aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase LSM aktif		100	100	100	100	100
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		93	93	93	93	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2024

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah 1) Kelahiran. Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanan program keluarga berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Adapun kesertaan KB pada pasangan usia subur menjadi penghambat jumlah kelahiran. 2) Kematian. Kematian juga dapat di pengaruhi beberapa faktor yaitu pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang menyebabkan angka kematian antara lain, tidak menjaga kesehatan, kurang sarana kesehatan di wiliyah tersebut seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotik, kemiskinan yang berlebihan yang menyebabkan kurangnya asupan gizi, wilayah perperangan, bencana alam, pola makan tidak teratur dan wabah penyakit. Adapun faktor yang menghambat kematian antara lain menjaga kesehatan, pola makan yang teratus, makan yang bergizi, sedikitnya angka kemiskinan, sarana kesehatan yang lengkap. 3) Migrasi. Penduduk yang datang bisa saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini bisa menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Sebaliknya penduduk yang pergi ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, dalam jumlah yang banyak, seperti menjadi TKI, bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk. Beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-148
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,54	0,57	1,04	0,63	2,76

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Total Fertility Rate (TFR)

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, juga untuk menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk.

Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat).

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Selengkanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-149
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,320	2,318	2,309	2,130	2,190

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Capaian persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam membangun daerah melalui Kampung KB pada tahun 2019 - 2023 terbentuk 11 kampung KB dan 22 perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB namun pada tahun 2021-2022 jumlah perangkat daerah berkurang menjadi 27 Perangkat daerah yang sebelumnya 36 perangkat daerah sehingga mempengaruhi Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB dan pada Tahun 2023 mengalami penurunan karena terjadi perubahan kelembagaan.

Tabel II-150
Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung Kb Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	61,11	61,11	81,48	81,48	75,40

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

4. Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk

Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk pada tahun 2021-2022 mengalami perubahan dikarenakan mengalami perubahan kelembagaan sehingga perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk berkurang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-151
Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk		15	15	3	3	7
Jumlah semua perangkat daerah		36	36	27	27	27
Persentase Perangakat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		41,67	41,67	11,11	11,11	25,92

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

5. Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 masing-masing di tetapkan 1 dokumen adapun Surat Edaran Bupati Nomor 188.6/386/DPPKB tentang Pengalokasian Dana Desa dalam Upaya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-152
Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yg Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dok	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

6. Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2019-2023 ada enam organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan data profil. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-153
Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2. Bappelitbangda 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB,P3A	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

7. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan pada tahun 2019-2023 ada tiga organisasi perangkat daerah yang melakukan pendidikan kependudukan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-154
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		1.Disdikbud 2.IBI 3.PKBM	1.Disdikbud 2.IBI 3.PKBM	1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM	1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM	1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

8. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2019-2023 dengan adanya sosialisasi Kampung KB sehingga pengendalian penduduk untuk Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga mengalami penurunan pada tahun 2022. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-155
Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anak		14.021	14.214	14.521	13.560	13.064
Jumlah keluarga		65.321	65.321	65.321	65.321	65.321
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga		21,46	21,76	22,23	20,76	21,90

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

9. Ratio Akseptor KB

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II-156
Ratio Akseptor KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Akseptor KB		8.574	9.619	6.170	9.619	14.286
Jumlah pasangan usia subur		70.501	71.429	61.163	71.429	71.429
Ratio Akseptor KB	%	12,16	13,47	10,09	13,47	21,90

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu

tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 di Kabupaten Bulukumba berfluktuatif.

Tabel II-157
Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah peserta KB aktif		53.071	51.028	45.711	53.550	
Jumlah pasangan usia subur		70.501	68.913	61.163	71.429	
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	75,28	74,05	74,74	74,97	45,70

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

11. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)

Pada tabel berikutnya memperlihatkan terdapat kecenderungan bahwa suatu kabupaten/kota yang memiliki ASFR 15-19 tahun tinggi, maka akan memiliki prevalensi stunting yang tinggi pula. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang memiliki ASFR 15-19 tahun rendah, maka akan memiliki kecenderungan prevalensi stunting yang juga rendah. Dapat dilihat pada tabel pada tahun 2019 nilai ASFR masih terlalu tinggi namun dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dapat diturunkan pada tahun 2022 menjadi 23,5.

Tabel II-158
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19)Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	89,79	89,79	67,18	23,5	45,70

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel II-159
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pasangan usia subur dengan istri diumur kurang 20 th		3.018	3.020	3.057	2.912	
Jumlah pasangan usia subur		70.501	71.429	68.913	61.163	
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	4,28	4,23	4,44	4,76	15,34

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

13. Cakupan PUS Yang Ingin Ber- KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Bahwa selama ini unmet need menjadi penyumbang cukup besar terhadap belum berpartisipasinya PUS dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana. Berdasarkan

persentase capaian unmet need pada tahun 2019 capaian sebesar 15,68 sampai pada tahun 2022 sebesar 11,62 persen belum ber KB selebihnya adalah hamil dan ingin anak segera, PUS yang hamil dan ingin anak segera secara normatif adalah bukanlah sasaran penyuluh agar mau Ber- KB sehingga PUS dalam kategori IKT dan IKD ini yang harus digarap agar menjadi peserta KB. Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karasteristik demografi sosial ekonomi, sikap dan kualitas pelayanan.

Tabel II-160
Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani		11.057	8.387	8.342	7.110	
Jumlah pasangan usia subur		70.501	71.429	68.913	61.163	
Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	15,68	11,74	12,11	11,62	20,92

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

14. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang dapat lihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun penyebab meningkatnya Persentase Pungganaan Kontrasepsi Jangka Panjang adalah adanya kesadaran masyarakat untuk ber-KB dan menggunakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang untuk menjaragkan kehamilan dan menjaga jarak kelahiran, juga dapat mengurangi resiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yang terlalu dekat. Penyebab menurunnya persentase penggunaan MKJP yaitu dropping alokon dari BKKBN Pusat sangat terbatas karena ada masalah internal di BKKBN Pusat terkait pengadaan ALOKON MKJP, sehingga berpengaruh pada penggunaan MKJP namun pada tahun 2020 persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 18,51 persen, disini bisa dilihat bahwa mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan karena pada bulan maret 2020 wabah *Covid-19* melanda Indonesia sehinggga pelayanan KB di seluruh Indonesia terbatas dan rata rata faskes tidak bisa melayani pemasangan Alokon MKJP akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mulai mengalami peningkatan sebesar 20,57 dan 20,77 dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 60,30 persen.

Tabel II-161
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP		2.164	9.408	10.496	6.641	
Jumlah akseptor KB		6.484	50.836	51.028	31.981	
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	33,37	18,51	20,57	20,77	60,30

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

15. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Indikator Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pada tahun 2019 sebesar 11,96 persen. Penyebab menurunnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yaitu dropping alokon dari BKKBN Pusat sangat terbatas karena ada masalah internal di BKKBN Pusat terkait pengadaan ALOKON MKJP, sehingga berpengaruh pada penggunaan MKJP.

Sedangkan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dengan persentase 35,05 dikarenakan Dropping Alokon dari BKKBN Pusat sudah stabil sehingga pemakaian kontrasepsi bisa meningkat.

Tabel II-162
Persentase Tinggkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	11,96	39,74	36,37	35,77	65

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

16. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita pada tahun 2019 mencapai 57,54 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi 80,95 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-163
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	57,54	80,97	83,04	80,95	65

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

17. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB pada tahun 2019 mencapai 55,74 persen dan terus meningkat pada tahun 2022 mencapai 71,54 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-164
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB		1.475	2.488	2.488	2.488	696
Jumlah anggota kelompok BKL		2.646	3.478	3.478	3.478	3.478
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB	%	55,74	71,54	71,54	71,54	12,26

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

18. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada tahun 2019 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB sebanyak 47,16 persen sampai pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan sebanyak 75.31 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-165
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB		1.031	2.283	579	922	
Jumlah anggota kelompok BKL		2.186	3.176	803	1.279	
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber-KB	%	47,16	71,88	72,10	72,09	62,1

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

19. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan

Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) berjumlah 1 unit di Kabupaten Bulukumba sehingga capaian pada tahun 2019-2022 mencapai 10 persen . Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-166
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	10	10	10	10	5

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

20. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-167
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PIK R/M		36	43	43	25	20
Jumlah kecamatan		10	10	10	10	10
Cakupan Remaja dalam PIK R/M	%	3,6	3,6	4,3	4,3	4,8

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

21. Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk telah terpenuhi berdasarkan Jumlah PKB/PLKB yaitu 74 unit dan semuanya didayagunakan.

Tabel II-168
Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dibidang Pengendalian Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

22. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 15,79 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 26,00 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-169
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri	%	15,79	15,00	27,00	26,00	10,00

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

23. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa PPKBD Setiap Desa/ Kelurahan

Rasio petugas pembantu pembina KB Desa PPKBD setiap Desa/ Kelurahan pada tahun 2019 sampai pada tahun 2023 telah terpenuhi dikarenkan sudah ada Petugas Pembantu Pembina KB Desa PPKBD di Setiap Desa maupun kelurahan. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-170
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio petugas pembantu pembina kB Desa PPKBD setiapDesa/ Kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

24. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat pada tahun 2019-2023 sudah terpenuhi. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-171
Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

25. Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengn BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR yang sesuai dengan standarisasi pelayanan pada tahun 2019 mencapai 23,56 persen dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 100 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-172
Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS		45	45	45	166	191
Jumlah Faskes dan jejaring		191	191	191	191	191

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Faskes Dan Jejarinya (Seluruh Tingkatan Wilayah) yg Bekerja Sama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR yg Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	23,56	23,56	23,56	86,91	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

26. Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa

Penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa pada tahun 2019-2023 tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu 100 persen Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-173
Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

27. Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) pada tahun 2019-2023 yaitu 0 persen ini dikarenkan belum adanya laporan maupun kasus tentang Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-174
Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

28. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga pada tahun 2019 mencapai 89,16 persen dan pada tahun 2023 terpenuhi menjadi 100 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut

Tabel II-175
Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	89,16	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Bulukumba, 2024

29. Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak pada tahun. selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-176
Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	53,44	20,16	100,00	83,90	51,40

Sumber : Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Bulukumba, 2024

30. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita pada tahun 2019-2023 berkisaran diumur 22 tahun ke atas. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-177
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	22,14	22,00	22,00	22,00	22,10

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

31. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes pada tahun 2019 sampai pada tahun 2023. Pada tahun 2019 sebesar 0,0057 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 0 persen dan pada tahun 2023, desa tidak melakukan pelaporan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBDes. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-178
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,0057	0	0,618	0,01	0

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2024

I. Urusan Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan Umum pada tahun 2019-2023 mengalami penurunan diakibatkan karena beberapa angkutan yang mengalami kerusakan yang sudah tidak layak apalagi di pengaruhi adanya angkutan seperti TAXI, Kurir dan sudah banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi.

Tabel II-179
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	24.000	17.000	17.500	9.125	69.248

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2024

2. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2019-2023 jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis sebanyak 3 unit di antanranya jumlah pelabuhan sebanyak 2 unit yaitu pelabuhan Leppe dan Pelabuhan Bira 1 Terminal Bulukumba.

Tabel II-180
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kabupaten BulukumbaTahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	3	3	3

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2024

3. Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat tahun 2019 -2023 mengalami peningkatan fluktuasi diakibatkan kurangnya layanan sehingga kendaraan angkutan tidak beroprasi, peningkatan jumlah penumpang angkutan yang singnifikan terjadi pada tahun 2022 karena telah berakhir pandemi Covid-19 atau sudah tidak terlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tabel II-181
Persentase Layanan Angkutan Darat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkutan Darat	*Unit*	332	172	51	44.571	47.014
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	*Unit*	20.500	14.500	14.448	3.865.350	207.744
Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,62	1,19	0,35	1,15	22,63

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2024

4. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan posifif pada tiap tahunnya kecuali pada tahun 2021 Pengujian Kendaraan tidak beroperasi dikarenakan Peralatan untuk uji KIR Kendaraan mengalami kerusakan

Tabel II-182
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah angkuatan umum yang tidak memiliki KIR	*Unit*	2.003	6.734	0	43.979	251
Jumlah angkutan umum	*Unit*	6.329	7.758	0	44.571	265
Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	*%*	31,65	86,80	0,00	98,67	94,72

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2024

5. Pemasangan Rambu-rambu

Pemasangan Rambu-rambu pada tahun 2019-2020 dilaksanakan pada tiap tahunnya namun untuk tahun 2021-2023 tidak laksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran setelah melewati masa Covid-19.

Tabel II-183
Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pemasangan Rambu-rambu		3	17	0	0	0
Jumlah rambu -rambu yang seharusnya tersedia		3	35	0	0	0
Pemasangan Rambu-Rambu		100,00	48,57	0,00	0,00	0,00

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2024

6. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum pada tahun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan signifikan dikarenakan pada tahun 2019-2021 diukur/dihitung berdasarkan jumlah orang yang terangkut namun pada tahun 2022 diakumulasikan berdasarkan orang dan barang, untuk barang sejumlah 3.865.350 unit dan orang 129.575 jiwa.

Hal lain yang mendasari Ini Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum berbeda pada tiap tahunnya dikarenakan masyarakat dalam mengangkut orang/barang sudan menggunakan kendaraan pribadinya.

Tabel II-184
Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	17.500	12.500	12.000	129.575	207.744

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2024

7. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019 Rasio ijin trayek sebesar 8%. Sampai pada tahun 2023 terus mengalami penurunan.

Tabel II-185
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio ijin trayek	%	8	5,04	1,14	5,37	0,83

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2024

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi yang tersurvei dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu 60 % dan seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Bulukumba dan untuk tahun berikutnya tidak dilakukan survei dikarenakan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-186
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	20211	2022	2023
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	60	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2024

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi cakupan layanan komunikasi dari tahun 2019 sampai 2023. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-187
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Layanan Telekomunikasi		1.154,58	1.154,58	1.154,58	1.154,58	1.154,58

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2024

3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon. Pada tahun 2019 sebesar 82% sedangkan pada tahun 2020 sampai 2023 tidak dilakukan survei karena adanya covid 19 sehingga diadakan pembatasan. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-188
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	82	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2024

4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Proporsi rumah tangga dengan akses internet. Proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2019 hingga 2023 tidak dilakukan survei karena adanya covid 19 sehingga diadakan pembatasan dan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-189
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi rumah tangga dengan akses internet		0	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei	Tidak dilakukan survei

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2024

5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Proporsi rumah tangga dengan akses internet yang tersurvei dilaksanakan tahun 2019 sebanyak 60 rumah,

sedangkan pada tahun 2020-2023 tidak dilakukan survei. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-190
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi		60	Tdk dilakukan survei	Tdk dilakukan survei	Tdk dilakukan survei	Tdk dilakukan survei

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2024

6. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah. persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2019-2023 mencapai target. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-191
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah		100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2024

K. Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2019-2023 secara umum mengalami berfluktuasi ini disebabkan oleh pembinaan, pendampingan serta penyuluhan yang dilakukan serta kesadaran dari para pengurus dan anggota koperasi itu sendiri, dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-192
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi aktif		201	202	201	200	201
Jumlah Keseluruhan koperasi		286	286	286	295	297
Persentase koperasi aktif	%	70,28	70,63	70,28	67,80	67,68

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Perkembangan Persentase Usaha Mikro Dan Kecil

Untuk perkembangan persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2019-2023 secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian ini tentu perlu diapresiasi secara positif karena menjadi tanda bahwa perekonomian UKM di Kabupaten Bulukumba cukup hidup dan berkontribusi baik bagi masyarakat. Secara lengkap indikator urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II-193
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah usaha mikro dan kecil		38.120	76.816	76.906	76.927	62.860
Jumlah seluruh UKM		39.662	78.392	78.482	78.503	64.436
Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	96,11	97,99	97,99	97,99	97,55

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba, 2024

L. Urusan Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional baik PMA maupun PMDN pada tahun 2019-2023 mengalami perubahan pada tiap tahunnya. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-194
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	51	58	117	2.243	60.083

Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukmba, 2024

2. Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN

Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN pada tahun 2019-2023 berbeda pada tiap tahunnya. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-195
Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional PMA/PMDN
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN	Rp (juta)	50.200	1.225.838	255.255	67.617	31.250

Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukmba, 2024

3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Urusan penanaman modal diukur melalui indikator. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)pada tahun 2019 sebesar -92 persen, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2.342 persen, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -79 dan turun pada tahun 2022 menjadi -79,55 persen dikarenakan kurang investor asing yang masuk. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-196
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-92	243	-79	-79,55	36.94

Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukmba, 2024

M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikasi, cakupan pembinaan atlet muda,

jumlah atlet berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskripsi berikut.

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator kinerja persentasi organisasi pemuda yang aktif diperoleh dengan membagi jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah organisasi pemuda yang terdaftar. Organisasi pemuda yang aktif ini berdasarkan laporan dari komite nasional pemuda Indonesia dan organisasi pemuda lainnya yang mendapatkan pembinaan dari dinas pemuda dan olahraga. Dari data di bawah dapat di lihat bahwa capaian kinerja setiap tahun selalu mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini tentunya berkat dukungan anggaran yang cukup memadai pada kegiatan pengembangan dan pembinaan kepemudaan seperti anggaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Anggaran untuk kegiatan Karya Ilmiah Remaja. Namun tentunya perlu intervensi anggaran yang lebih besar untuk peningkatan sumber daya manusia pemuda di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-197
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah organisasi pemuda yg aktif		47	48	49	50	50
Jumlah seluruh organisasi pemuda		56	56	56	56	106
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	83,93	85,71	87,47	89,29	47,17

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Persentasi Wirausaha Muda Pemula

Kabupaten Bulukumba berdasarkan data Persentasi Wirausaha Muda Pemula pada tahun 2019-2023 yakni 2,59 persen dengan kondisi stagnan dengan jumlah wirausaha muda mencapai 259 orang.

Tabel II-198
Persentase Wirausaha Muda
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase wirausaha muda	%	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan merupakan pembagian antara jumlah cabang olahraga yang di bina dengan jumlah cabang olahraga yang terdaftar. Pada tahun 2019, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga sebanyak 6 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 25%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik, taekwondo, pencak silat, karate, sepak takraw, billiard, bola volley. Pada tahun anggaran 2020, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga hanya 2 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan hanya 8,33%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik dan taekwondo. Jumlah cabang olahraga yang dibina sangat terbatas di karenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda olahraga yang dibatalkan dan dilakukannya refocussing anggaran. Namun di tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan sampai 24 cabang olahraga.

Tabel II-199
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah cabang olahraga yang dibina		6	2	18	24	24
Jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar		24	24	24	28	28
Cakupan Pembinaan Olahraga		25,00	8,33	75,00	85,71	85,71

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2024

4. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan

Cakupan pelatih yang bersertifikat dimaksud merupakan pembagian antara jumlah pelatih olahraga yang berlisensi dengan jumlah pelatih olahraga yang terdaftar. Pada tahun 2019, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 15 orang atau 25,86% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Jumlah kenaikan pelatih berlisensi dari tahun sebelumnya sebanyak 3 orang. jumlah ini sangat kecil dibanding kebutuhan, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya rasionalisasi anggaran pemerintah daerah menyebabkan beberapa kegiatan di hapus atau di kurangi volumenya, salah satunya kegiatan pelatihan pelatih olahraga berlisensi sedangkan pada tahun 2020, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi tidak mengalami penambahan. Hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya *pandemic covid 19* yang menyebabkan banyak kegiatan olahraga yang di batalkan untuk menghindari banyak kerumunan, salah satunya pelatihan pelatih berlisensi. Lain dari pada itu, adanya *pandemic covid 19* juga menyebabkan harus dilakukannya refocusing anggaran pada dinas pemuda dan olahraga, yang dampaknya terdapat banyak kegiatan yang di hilangkan, salah satunya adalah kegiatan pelatihan pelatih berlisensi tetapi pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan sebesar 29,31%.

Tabel II-200
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelatih bersertifikat		15	15	17	17	17
Jumlah seluruh pelatih		58	58	58	58	58
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan		25,86	25,86	29,31	29,31	29,31

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2024

5. Cakupan Pembinaan Atlet Usia Dini

Cakupan pembinaan atlet usia dini dimaksud merupakan pembagian antara jumlah atlet usia dini yang dibina dengan jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Atlet usia dini yang di maksud adalah atlet yang status nya masih belajar di sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Persentasi ini sangat kecil dibanding jumlah atlet yg ada dan peningkatannya pun sangat kecil dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut. Selain dari pada itu, tidak adanya *tallent scouting* dan pemandu bakat menyebabkan sulitnya mencari atlet muda yang berbakat. Selain itu juga adanya pandemic covid 19 menyebabkan harus dilakukan nya rasionalisasi dan refocusing anggaran yang tentunya berimbas pada harus di hilangkannya beberapa kegiatan. Faktor anggaran juga yang menjadi salah satu factor kegiatan pembinaan atlet usia dini hanya difokuskan untuk pelatihan dan pembinaan kepada atlet yang betul-betul berbakat dan mempunyai prospek mendapatkan prestasi di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel II-201
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun

		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah atlet pelajar yang dibina		60	85	100	123	123
Jumlah seluruh atlet pelajar		167	167	167	167	167
Cakupan pembinaan atlet muda		35,93	50,90	59,88	73,65	73,65

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2024

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah medali yang di peroleh oleh atlet dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2019, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 31 medali yang terdiri dari 10 medali emas, 11 medali perak dan 20 medali perunggu. Dari 31 medali tersebut di peroleh pada 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai. Perolehan medali ini jauh melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dimana di tahun 2019 dinas pemuda dan olahraga ditergetkan mendapatkan 15 medali atau jika di persentasikan mencapai 206% dari target. Hal ini tidak lepas dari fokus nya pembinaan yang dilakukan olah dinas pemuda dan olahraga terhadap atlet yang berbakat dan cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet hanya 3 medali yang terdiri dari 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Dari 3 medali tersebut di peroleh pada 1 cabang olahraga yaitu atletik. Pada tahun 2020 dinas pemuda dan olahraga ditargetkan mendapatkan 13 medali atau jika di persentasikan hanya mencapai 23,07% dari target. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaan nya, selain itu adanya pandemi covid 19 juga menyebabkan dilakukannya rasionalisasi dan refocusing anggaran. Dan pada tahun 2021 terdapat 3 medali dari 11 orang atlet. Atlet berprestasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 32 medali.

Tabel II-202
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah atlet berprestasi	%	31	3	11	3	32

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2024

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga adalah jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2019, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga di peroleh dari 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga dari 1 cabang olahraga yaitu atletik dan di tahun 2021 sebanyak 3 prestasi Jika dilihat dari hasil ini sangat kurang sekali, hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaannya dan pada tahun 2022 dan 2023 terdapat 2 prestasi dan 6 prestasi yang diraih.

Tabel II-203
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah prestasi olahraga	%	5	1	3	2	6

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2024

N. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bulukumba dapat diukur oleh indikator ketersediaan Buku "Kabupaten Dalam Angka" dan Buku "PDRB". Buku Kabupaten Bulukumba Dalam Angka telah tersedia setiap tahunnya.

1. Buku ”Kabupaten Dalam Angka”

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Buku ”kabupaten dalam angka”. Buku “kabupaten dalam angka” dari tahun 2019 sampai 2023 mencapai target dengan tersedia buku Kabupaten dalam Angka. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-204
Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Buku ”kabupaten dalam angka”		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Buku ”PDRB”

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Buku ”PDRB”. Buku ”PDRB” dari tahun 2019 sampai 2023 mencapai target dengan tersedia Buku ”PDRB”. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-205
Buku ”PDRB” Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2024

O. Urusan Persandian

Kabupaten Bulukumba telah menggunakan persandian dalam mengelola informasi penting daerah. Pada tahun 2019-2023 Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sudah mencapai 100 persen karena semua sistem komunikasi sudah berbasis digital.

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2024

P. Urusan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan dan budaya

Pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pada tahun 2019 sebanyak 5 jenis festival seni dan budaya yang sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah: Festival Pinisi, Songkabala Bantilang, Gowes Hutan Karet, Jelajah Hutan Karet , dan Andingingi. Pada tahun 2021 menurun menjadi 1 kegiatan festival seni budaya yang dapat dilaksanakan karena adanya pandemi *Covid-19* begitupun pada tahun 2022 festival yang diselenggarakan yakni Festival Phinisi. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 3 festival seni budaya yang diselenggarakan. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-206
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Buah	5	1	1	1	3

Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pendataan sistem informasi sejaran purbakala Kabupaten Bulukumba dan di data banyak sekali situs sejarah dan purbakala yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam mendukung indikator jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah pendataan cagar budaya untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Pada tahun 2019 sebanyak 57 benda situs cagar budaya yang dilestarikan dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 78 cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel II-207
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar	57	58	58	58	78

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

3. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mulai tahun 2019-2022 sebanyak 2 jumlah cagar budaya yang dikelola yaitu Cagar Budaya Pasanggrahan Tanete di Kecamatan Bulukumpa dan Kompleks Makam Dato Tiro Di Kecamatan Bontotiro kemudian pada tahun 2023 meningkat sebanyak 41 cagar budaya.

Tabel II-208
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu		2	2	2	2	41

Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

Q. Urusan Perpustakaan

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2019-2023 berbeda pada tiap tahunnya dikarenkan Jumlah orang dalam populasi yang dilayani dengan yang berkunjungan bervariasi, namun pada tahun 2020 menurun drastis dikarenakan dimulainya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan kekhawatir untuk berkunjung ke Perpustakaan.

Hal lain yang menjadi kendala dalam kegiatan layanan perpustakaan adalah:

a. Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan, yaitu kondisi gedung yang tidak representative, berpengaruh pada penataan ruang, jauh dibawah standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
b. Jumlah armada yang digunakan dalam memberikan layanan eksternal masih kurang untuk menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba

Tabel II-209
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kunjungan keperpustakaan selama I tahun		294.447	35.929	4.172	27.884	40.487
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani		365.603	376.258	376.258	440.090	379.384
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	80,54	9,55	1,11	6,34	10,67

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Jumlah Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Formulasi yang digunakan untuk menghitung persentase Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah dibagi dengan jumlah eksemplar buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Pada tahun 2019 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.628 judul dan 20.150 eksamplar atau 42,82% sedangkan pada tahun 2020 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 10.684 judul dan 24.828 eksemplar atau 43.03%. Penambahan buku sebanyak 2.056 judul dan 4.678 eksemplar. Jumlah pengadaan buku meningkat sebanyak 0,21 % dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 jumlah buku yang tersedia sebanyak 42,96% dan pada tahun 2022 dan 2023 meningkat yakni 71,54% dan 71,94%.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penambahan jumlah buku adalah Kondisi keuangan daerah /minimnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pengadaan buku setiap tahunnya sehingga diharapkan peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaaan buku perpustakaan.

Tabel II-210
Tabel Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah koleksi judul buku		8.628	10.684	10.727	15.933	16.227
Jumlah koleksi jumlah buku		20.150	24.828	24.969	22.272	22.557
Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	42,82	43,03	42,96	71,54	71,94

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Formulasi yang digunakan untuk menghitung rasio perpustakaan per satuan penduduk adalah jumlah perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah perpustakaan pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah perpustkaan sebanyak 300 unit dan terus bertambah hingga pada tahun 2023 sudah sebanyak 712 Unit.

Kendala yang dialami dalam penambahan jumlah perpustakaan adalah masih terdapat beberapa desa dan kecamatan yang belum membentuk perpustakaan umum di tengah tengah masyarakat.

Tabel II-211
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perpustakaan		300	414	467	707	712
Jumlah penduduk		420.603	437.607	437.607	440.090	443.292
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,71	0,95	1,07	1,61	1,61

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2024

4. Rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan pada tahun 2019-2023 mengalami penuruan secara drastis yang diakibatkan oleh adanya pembatasan pelayanan akibat *Covid-19*. Hal lain yang menjadi kendala dalam kegiatan layanan perpustakaan adalah:

a. Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan, yaitu kondisi gedung yang tidak representative, berpengaruh pada penataan ruang, jauh dibawah standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
b. Jumlah armada yang digunakan dalam memberikan layanan eksternal masih kurang untuk menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba
c. Alokasi anggaran pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II-212
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	294.447	35.929	4.172	2.324	40.487

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2024

5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Jumlah judul koleksi judul buku perpustakaan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal yang menjadi kendala adalah daya tampung gedung perpustakaan yang terbatas untuk menampung buku dan sarana pendukung lainnya, sehingga buku yang ada kami layankan dalam bentuk layanan *book loan* (Peminjaman buku) ke perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat.

Tabel II-213
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	8.628	10.684	10.727	15.933	16.227

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2024

6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Formulasi yang digunakan untuk menghitung jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat adalah: Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dibagi dengan jumlah pustkawan di Kabupaten Bulukumba. Faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat adalah kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya

Manusia pengelola perpustakaan , sehingga diharapkan tahun tahun selanjutnya alokasi anggaran pembinaan SDM dapat ditingkatkan untuk pelaksanaan diklat dan pembinaan kepustakawanan.

Tabel II-214
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat		302	302	302	335	393
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai		629	629	629	629	712
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	**%**	**48,01**	**48,01**	**48,01**	**53,26**	**55,2**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2024

R. Urusan Kearsipan

1. Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola kearsipan dari tahun 2019-2023 sudah mencapai target dikarenakan Jumlah SDM pengelola kearsipan yang dibina sudah sesuai dengan Jumlah pengelola arsip di Daerah.

Tabel II-215
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah SDM pengelola kearsipan yang dibina		46	36	36	36	36
Jumlah pengelola arsip dikabupaten Bulukumba		46	36	36	36	36
Peningkatan SDM pengelola kearsipan		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku untuk tahun 2023 adalah sebesar 44,44 persen atau 16 perangkat daerah. Hal ini disebabkan oleh aktifnya dan respons positif dari Lembaga Kearsipan Daerah yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan arsip secara baku di masing-masing instansi pemerintah untuk kemudahan dalam menelusuri arsip sebagai alat bukti dalam administrasi pemerintah dan juga sebagai identitas bangsa. Keaktifan para arsiparis dalam melaksanakan pembinaan pada instansi pemerintah dan juga swasta dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis. Atas dorongan inilah maka seluruh arsiparis yang diberikan tanggungjawab dalam pembinaan pengelolaan arsip terus menindaklanjuti agar tata kelola arsip di Provinsi Sulawesi Selatan semakin baik dari tahun ketahun. Namun faktor penghambat pencapaian target adalah jumlah arsip yang harus dikelola atau di berikan pembinaan terikat oleh regulasi dalam pelaksanaan pembinaan.

Tabel II-216
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun

		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku		1	1	3	14	16
Jumlah Perangkat Daerah		46	46	36	36	36
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	2,17	2,17	8,33	38,89	44,44

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2024

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu Pariwisata, Pertanian, Perdagangan. Perindustrian, serta Kelautan dan Perikanan.

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan secara umum mengalami fluktuasi Jumlah Produksi Ikan, ini dapat dilihat pada data capaian pada tahun 2019 sebanyak jumlah 235.997 ton dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 222.951 ton. Hal ini disebabkan oleh pengaruh perubahan cuaca ekstrim yang menghambat aktivitas nelayan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan yang sering terjadi ditahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 270.411 ton. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel:

Tabel II-217
Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi Ikan	ton	235.997	252.416	266.771	251.462	270.411
Perikanan tangkap	ton	52.652	53.860	53.830	55.522	55.612
Perikanan Budidaya	ton	183.345	198.556	212.941	195.940	214.799
Cakupan Produksi perikanan		124,83	127,95	111,9	105,5	113,4

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Cakupan Bina Kelompok Tani

Kategori kelompok yang dibina adalah kelompok yang sudah mendapat bantuan dari Dinas Perikanan Bulukumba, bantuan yang diberikan tersebut bukan hanya berupa bantuan fisik namun juga berupa bantuan non fisik seperti penyelenggaraan pelatihan teknis perikanan seperti Penangkapan ikan dan budidaya perikanan.

Kesulitan dalam meningkatkan persentase binaan kelompok adalah semakin meningkatnya jumlah kelompok tiap tahun sehingga meskipun bantuan yang diberikan ke kelompok masyarakat juga bertambah namun laju penanmbahan jumlah kelompok perikanan juga cukup besar. Oleh karena itu, terjadi fluktuasi bahkan cenderung penurunan persentasi cakupan binaan kelompok karena anggaran Dinas dari tahun ke tahun semakin menurun yang berdampak pada semakin kurangnya bantuan yang diserahkan ke kelompok masyarakat semantara jumlah kelompok juga semakin meningkat.

Tabel II-218
Cakupan Bina Kelompok Tani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kelompok yang mendapat bantuan		458	539	620	702	192
Jumlah Kelompok		687	776	958	958	958

Cakupan Bina Kelompok Perikanan		66,7	69,5	64,7	73,3	83,3

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2024

B. Urusan Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Indikator kinerja urusan pariwisata dapat dilihat dari fluktuasi kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara, lama kunjungan wisatawan, dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Dari angka kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 namun pada tahun 2023 mengalami penurunan.

Tabel II-219
Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan wisata	Orang	350.000	378.642	501.337	686.777	544.139

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Lama Kunjungan Wisata

Untuk indikator lama kunjungan wisatawan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 tetap yaitu 2 hari. Hal ini juga tergantung pada hari-hari libur Panjang yang cukup menarik animo wisatawan untuk menginap di Kawasan wisata.

Tabel II-220
Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Lama Kunjungan Wisata	Hari	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2024

3. PAD sektor pariwisata

Tabel II-221
PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
PAD sektor pariwisata	Milyar	3,27	3,75	5,96	5,31	5,98

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2024

C. Urusan Pertanian

1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan terhadap PDRB

Berdasarkan tabel diatas terlihat, terjadi penurunan nilai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba secara terus menerus dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini disebabkan antara lain; 1) semakin berkurangnya tenaga kerja dibidang pertanian khususnya subsektor tanaman pangan karena meningkatnya penggunaan alsintan, 2) semakin menurunnya penerapan teknologi tepat guna oleh petani, 3) semakin berkembangnya sektor jasa lainnya, 4) terjadinya anomali iklim yang menyebabkan kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang sering menggagalkan panen serta, 5) kurangnya dana stimulan bagi petani misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tabel II-222
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB	%	26.62	26.31	26.31	25,48	24,33

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Cakupan bina kelompok tani

Capaian Bina Kelompok Tani selama tahun 2019 yaitu 61,20 persen dan pada tahun 2023 menjadi 63,34 persen dengan Jumlah Kelompok Tani memperoleh bantuan 1.496 kelompok sedangkan Jumlah keseluruhan kelompok Tani yakni 2.804 kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-223
Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan bina kelompok tani	%	53,73	71,18	36,66	53,35	63,34

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2024

Untuk komoditi peternakan, salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bulukumba adalah sapi potong, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Peningkatan jumlah populasi pada Ayam Ras Pedaging mengalami peningkatan yang signifikan sedangkan untuk komditas Sapi Potong dan Ayam Ras Petelur mengalami penurunan dibanging pada tahun sebelumnya. Untuk perkembangan populasi dari tiga jenis komoditas unggulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-224
Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Komoditas	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Sapi Potong	Ekor	76.434	76.797	77.658	71.801	67.808
Ayam Ras Pedaging	Ekor	2.550.438	2.309.930	3.694.020	4.384.830	2.174.800
Ayam Ras Petelur	Ekor	463.793	638.724	1.176.858	839.001	610.693

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2024

D. Urusan Kehutanan

Pengelolaan hutan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah memiliki kewenangan atas kawasan hutan. mulai dari perencanaan. perizinan. dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah mempunyai kewenangan mengontrol proses perencanaan dan pemantauan sumberdaya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan yang secara implementasi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Kewenangan pengurusan kehutanan oleh provinsi meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. rehabilitasi dan reklamasi hutan. dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi pengelolaan taman hutan raya. penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi. Hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.

E. Urusan Perdagangan

1. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Persentase cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 kelompok pedagang/usaha formal tidak menerima bantuan. Namun pada tahun 2021 jumlah kelompok yang menerima bantuan sebesar 85,47% namun tahun 2022 mengalami

penurunan yaitu 28,21%. Tahun 2023 kelompok pedagang/usaha informal tidak menerima bantuan. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-225
Cakupan Bina Kelompok Perdagangan di Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda		0	0	100	33	0
Jumlah kelompok pedagang/usaha informal		117	117	117	117	147
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0	0	85,47	28,21	0

Sumber: Dinas Perdagangan ,Perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Jumlah Pasar

Jumlah pasar yang tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Bulukumba sebanyak 43 yang dihitung dari berbagai tipe pasar, tipe A sebanyak 1 Unit, tipe B sebanyak 15 Unit, tipe C sebanyak 26 Unit, dan tipe D sebanyak 1 Unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-226
Jumlah Pasar berdasarkan Kecamatan, Tipe serta Alamat
Kabupaten Bulukumba tahun 2020

No	Uraian	Tipe	Alamat
	UJUNG BULU		
1	Pasar Sentral	A	Caile
2	Pasar Kasuara	C	Tanah Kongkong
3	Pasar Cekkeng	B	Terang-terang
	GANTARANG		
1	Pasar Kalimassang	C	Mariorennu
2	Pasar Ponre	B	Matteko
3	Pasar Gunung Jati	B	Bontomacinna
4	Pasar Mannaungi	C	Gantarang
5	Pasar Dampang	C	Dampang
6	Pasar Bonto Nyeleng	C	Bonto Nyeleng
7	Pasar Borong Tellu	C	Bukit Tinggi
8	Pasar Bangkeng Buki	C	Bengkeng Buki
	KINDANG		
1	Pasar Borong Rappoa	B	Borong Rappoa
2	Pasar Pa'Baeng-Baeng	C	Anrihua
3	Pasar Cilibbo	C	Cilibbo
4	Pasar Tapolloe	C	Benteng Palioi
	UJUNG LOE		
1	Pasar Dannuang	B	Dannuang
2	Pasar Ulu Tedong	B	Gantarang
3	Pasar Allu/Tamatto	C	Tammatto
4	Pasar Seppang	C	Seppang
	HERLANG		
1	Pasar Batu Asang	B	Singa
2	Pasar Gunturu	C	Gunturu
3	Pasar Tanuntung	C	Tanuntung
4	Pasar Kupang	C	Kupang
	KAJANG		

No	Uraian	Tipe	Alamat
1	Pasar Kassi	C	Kassi
2	Pasar Kalimporo	B	Kalimporo
3	Pasar Maleleng	C	Maleleng
	RILAU ALE		
1	Pasar Bontomanai	B	Bontomanai
2	Pasar Palampang	B	Palampang
3	Pasar Balimbing	C	Bonto Mate'ne
4	Pasar Swatani	C	Swatani
5	Pasar Sampeang	B	Desa Bonto Haru
	BULUKUMPA		
1	Pasar Tanete	B	Tanete
2	Pasar Balang Riri	C	Bajiminasa
3	Pasar Dinding	D	Jojjolo
4	Pasar Salassae	C	Salasae
	BONTO BAHARI		
1	Pasar Tanah Beru	B	Sapolohe
2	Pasar Ara	C	Ara
3	Pasar Bira	C	Bira
	BONTO TIRO		
1	Pasar Batang	C	Batang
2	Pasar Hila-Hila	C	Ekatiro
3	Pasar Bonto Tangnga	B	Bonto Tangga
4	Pasar Basokeng	C	Dwitiro
5	Pasar Tamalanrea	B	Tamalanrea

Sumber: Dinas Perdagangan ,Perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba, 2024

2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatih; dan pengawasan.

A. Urusan Perencanaan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah memiliki dokumen RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba 2005-2025.

Tabel II-227
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bapperida Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dan pada periode tahun 2021 – 2026 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

Tabel II-228
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten BulukumbaTahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bapperida Kabupaten Bulukumba, 2024

Dengan berbedanya tahun perencanaan di Kabupaten Bulukumba dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dinamika pembangunan yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi terhadap penyusunan dokumen perencanaan Jangka Menengah Daerah, namun dengan meningkatkan sistem yang berbasis pada teknologi informasi sehinggah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Pemerintah Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya menyusun dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Namun karna Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian/ Lembaga terkait penyusunan dokumen perencanaan dan juga kebijakan perencanaan pada tingkat global/nasional (pembangunan berkelanjutan) sehingga memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah, serta dengan adanya perbedaan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah dinilai cukup mempengaruhi pencapaiantarget ini. Namun dengan adanya teknologi informasi yang dikembangkan sehingga dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba dapat konsisten, koheren, transparan, efektif dan efisien.

Tabel II-229
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bapperida Kabupaten Bulukumba, 2024

4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan.

Tabel II-230
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bapperida Kabupaten Bulukumba, 2024

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Dari tahun 2019-2023 mencapai 100 persen dalam arti bahwa dalam penyusunan RKPD telah mencakup seluruh program yang ada pada RPJMD, konsistensi jumlah program RPJMD dan jumlah program RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-231
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Kabupaten Bulukumba Tahun2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbngda Kabupaten Bulukumba, 2024

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD adalah jumlah program RKPD tahunan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilakukan pada tahun berkenaan. Dari tahun 2019-2023, jumlah program RKPD dan jumlah program APBD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-232
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapperida Kabupaten Bulukumba, 2024

7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kabupaten Bulukumba telah menyesuaikan dengan dokumen perencanaan RPJPD,RPJMD dan RKPD.

Tabel II-233
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapperida Kabupaten Bulukumba, 2024

B. Urusan Keuangan

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerika Keuangan, Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terdiri dari Neraca per 31 desember, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas untuk tahun berakhir dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian yang wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern yang memadai atas Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Kabupaten Bulukumba telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material , posisi laporan keuangan pemerintah daerah Per 31 desember berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan. Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada akhir periode tahun 2019 – 2023 kecuali pada tahun 2020 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel II-234
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Persentase SILPA terhadap APBD

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran, sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyebutkan bahwa SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Munculnya SILPA terjadi karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan. Selain itu, terjadinya SILPA juga karena adanya kegiatan atau program pemerintah daerah yang belum terselesaikan serta adanya pembatalan proyek yang hendak dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-235
Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,86	3,83	4,23	6,62	2,84

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2019-2023 Persentase program/kegiatan yang masuk dalam APBD terlaksana 100 persen.

Tabel II-236
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2024

4. Persentase belanja pendidikan (20%)

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20% dari APBD dan APBN.

Tabel II-237
Persentase belanja pendidikan (20%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	30,54	32,00	32,72	29,62	29,88

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2024

5. Persentase belanja kesehatan (10%)

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besaran anggaran pemerintah Daerah dialokasikan minimal 10% dari total anggaran APBD diluar gaji.

Tabel II-238
Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	19,31	18,84	22,10	18,56	17,35

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2024

6. Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)

Otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda), mengakibatkan pemda memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya adalah pemda diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 3 Tahun 2004). Pengertian mengenai keuangan daerah telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 3 Tahun 2006) sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai Tulisan Hukum – UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 2 suatu rencana keuangan tahunan pemda. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD);
4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD;
6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.

Adapun APBD yang telah di Perdakan pada tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagao berikut:

- Perda APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
- Perda APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020
- Perda APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021
- Perda APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2022 Tanggal 31 Desember 2022
- Perda APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2023 Tanggal 31 Desember 2023
-

Tabel II-239
Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2024

7. Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa pemerintah kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Tabel II-240
Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa		0,32	0,23	0,61	0,51	0,42

Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2024

8. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap pendapatan adalah kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Keberhasilan dalam menjalankan perekonomian disuatu daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu unsur dari Pendapatan Daerah adalah pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi PAD terhadap

Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantugan daerah kepada pusat. Dengan Kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah Daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah.

Berdasarkan persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah. Periode 2019 memberikan kontribusi sebesar 11.63%. Pada Tahun ini semua kelompok pajak, retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan penerimaan dari tahun pada tahun 2018. Ini disebabkan karena telah digunakannya alat transaksi pajak (M-Pos) pada beberapa hotel, restoran dan rumah makan walaupun tidak semua pelaku usaha dapat dipasangi. Sektor parawisata juga mengalami kenaikan retribusi tempat rekreasi karena meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri. Pada tahun 2019-2020 memberikan kontribusi sebesar 11.39%. Ini karena adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi pada maret 2020-2021. Tahun 2021-2023 penerimaan pajak mengalami penurunan karena adanya aturan pemerintah pembatasan skala besar dimana semua orang dilarang bepergian dan berkerumum yang berdampak pada penutupan beberapa tempat rekreasi yang mengakibatkan menurunnya tingkat hunian hotel dyang berdampak pula pada penerimaan para pengusaha restoran dan rumah makan sehingga tidak mampu membayar pajak sesuai yang ditetapkan. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Daerah. Karena PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi Daerah, maka Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD

Tabel II-241
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,63	11,39	11,19	12,31	12,54

Sumber: Bapenda Kabupaten Bulukumba, 2024

C. Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan kinerja pelayanan pada urusan kepegawaian serta diklat dapat dilihat pada indikator yaitu persentase peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan persentase jabatan struktural yang terisi berserta indikator pendukung lainnya. Berikut adalah perkembangan indikator urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019-2023 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih dari tiga bulan dan pemenuhan 20 jam pelajaran yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 70 yang ditindak lanjuti dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS atas hak PNS pada Pasal 203 ayat A tentang Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran dalam 1 tahun. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan pejabat struktural (PKA,PKP,PKN) dan Juga pelatihan Dasar CPNS/Pelatihan Prajabatan CPNS yang dianggarkan oleh BKPSDM/difasilitasi oleh BKPSDM Kab Bulukumba. Pelatihan Fungsional yang berhubungan dengan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan tidak menjadi bagian dari kegiatan BKPSDM. Pada tahun 2019 – 2023 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan sebanyak 3 bulan.

Tabel II-242
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	Bulan	3	3	3	3	3

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2023 mencapai 88,32% dari Jumlah total ASN yang ada pada Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-243
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	100	96,77	74,19	74,53	88,32

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural pada tahun 2023 mencapai 43,85% total jabatan.

Tabel II-244
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	55,81	47,06	14,71	37,73	43,85

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2024

4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2021 sebanyak 40 jabatan yang terdiri atas sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 3 (tiga) Staf Ahli Bupati Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Kasatpol PP dan Damkar, 6 (enam) Kepala Badan, dan 24 (Dua Puluh Empat) Kepala Dinas namun pada tahun 2022 berubah menjadi 32 Jabatan dikarenakan terjadi perubahan kelembangan yang telah diatur pada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pengangkatan jabatan pimpinan tinggi tersebut dilakukan melalui proses seleksi terbuka. Dalam Pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama yang dilakukan belum memenuhi empat elemen sistem MERIT yang terdiri dari Transparansi, Netralitas, Kemampuan Individu dan non Diskriminasi dengan menyeluruh. Namun dalam aspek transparansi terdapat salah satu alat ukur yang sudah terpenuhi oleh seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan disetiap Instansi yaitu menerbitkan Informasi tentang seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan dalam aspek non diskriminasi terdapat alat ukur yang sudah terpenuhi dalam seleksi jabatan tinggi pratama yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama dan kemampuan individu melalui tes cat dan wawancara oleh panitia seleksi.

Tabel II-245
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	40	40	40	32	32

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2024

5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebanyak 538 jabatan dan 2023 sebanyak 544 jabatan, penurunan ini terjadi dikarenakan Jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) telah resmi dialihkan ke jabatan fungsional.

Tabel II-246
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	2.425	2.297	2.093	538	544

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2024

D. Urusan Pengawasan

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator kinerja pertama untuk bidang urusan pengawasan adalah persentase tindak lanjut temuan. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dan dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2021 tinjak lanjut temuan mulai berkurang sebesar 56,60 persen dari tahun sebelumnya.

Rendahnya penyelesaian tindak lanjut antara lain disebabkan oleh komitmen dan penerapan tata kelola tindak lanjut yang rendah. OPD sebagai auditan banyak yang tidak menjadikan tindak lanjut sebagai prioritas. Selain itu mekanisme *reward and punishment* terhadap OPD yang cepat dan yang lambat menindaklanjuti temuan belum dilakukan. Secara umum persentase tindak lanjut temuan sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel II-247
Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase tindak lanjut temuan	%	54.2	59.5	56,60	68,4	88

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Indikator ini dihitung dengan cara jumlah ASN yang dikenai sanksi dibagi jumlah total ASN dan dikalikan dengan 100%. Dalam rentang waktu lima tahun sejak tahun 2019-2023, jumlah ASN yang dikenai sanksi mengalami fluktuasi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,273 persen hingga 0,13 persen kemudian 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,246 persen dan 2023 kembali menurun hingga 0,01 persen.

Tabel II-248
Persentase pelanggaran Pegawai Kabupaten Bulukumba 2019 - 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023

Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,315	0,273	0,13	0,246	0,01

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Jumlah Temuan BPK

Pada 2019 hingga pada Tahun 2020 mengalami penurunan. Di Tahun 2021 ada 14 temuan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Trend penurunan jumlah temuan BPK ini tentu saja suatu hal yang harus terus dipertahankan melalui sinergitas yang terjaga dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 13 temuan. Adapun trend penurunan jumlah temuan BPK sebagaimana tergambar pada Tabel berikut:

Tabel II-249
Jumlah temuan BPK Kabupaten Bulukumba 2019 - 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah temuan BPK	Temuan	10	9	14	7	13

Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2024

E. Urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase implementasi rencana Kelitbangan

Capaian indikator urusan Penelitian dan Pengembangan dapat diketahui dari beberapa indikator. Untuk Indikator Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan pada tahun 2019, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 48.28% (Dari 29 kajian yang direncanakan terealisasi 14 kajian), dan pada tahun 2020, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 6.06% (Dari 33 kajian yang direncanakan terealisasi 2 kajian) dan pada tahun 2021 jumlah kajian mencapai sebesar 85,71 persen dan pada tahun 2022 dari 5 kajian yang direncanakan terealisasi 3 kajian. Pada tahun 2023 sebesar 7,50 persen.

Berdasarkan realisasi jumlah kajian setiap tahun dari tahun 2019-2023 berfluktuasi tergantung besarnya pagu anggaran. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-250
Persentase implementasi rencana Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	48,28	6,06	85,71	60,00	7,50

Sumber : Bapperida Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Pada tahun 2019 jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 24.14% (Dari 29 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 7 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 7 kajian sedangkan pada tahun 2020, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 12.12% (Dari 33 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian) dan pada tahun 2021 dan 2022 jumlah kajian yang dimanfaatkan mecapai sebesar 100 persen. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-251
Persentase pemanfaatan hasil KelitbanganKabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan		24.14	12.12	100	100	100

Sumber : Bapperida Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Derah

Pada tahun 2019, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 62.5% (Dari 16 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 10 SKPD terealisasi) sedangkan pada tahun 2020, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 11.11% (Dari 18 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 2 SKPD terealisasi). Dan ditahun 2021 jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 70,00 persen dan pada tahun 2022 perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah mencapai 100 persen. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-252
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		62.5	11.11	70.00	100	16

Sumber : Bapperida Kabupaten Bulukumba, 2024

4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah:

Pada tahun 2019, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 83.33% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 25 kajian yang terealisasi) sedangkan pada tahun 2020, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 33.33% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 10 kajian yang terealisasi) dan pada tahun 2021 julah kajian inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 33,33 persen dan pada tahun 2022 Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah sudah mencapai 100 persen. Pada tahun 2023 sebesar 49,74 persen. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II-253
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		83.33	33.33	33,33	100	49,74

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2024

F. Sekretariat Dewan

Berikut ini adalah perkembangan indikator Sekretariat Dewan pada unsur penunjang atau pendukung daerah di Kabupaten Bulukumba.

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Untuk capaian 2019-2023 sudah tersedia/ada Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD.

Tabel II-254
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
Kabupaten Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

alat Kelengkapan DPRD Kabupaten						

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2024

2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No 12 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah, juga undang-undang No 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintahan No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tiga fungsi yaitu :

1) Fungsi Legislasi
2) Fungsi Anggaran
3) Fungsi Pengawasan

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki sekretariat DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2004 dan dipertegas dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi DPRD. Yang meliputi penyelenggaraan administrasi sekretariat DPRD, penyelenggaran administrasi keuangan DPRD mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD.

Tabel II-255
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2024

3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas-tugas DPRD, Maka Sekretariat DPRD menyusun indikator kinerja yang menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang dihubungkan dengan Visi yang di emban, Penetapan indikator kinerja bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi & Misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD menetapkan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel II-256
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2024

G. Sekretariat Daerah

Dari sisi agama, mayoritas penduduk Bulukumba beragama Islam. Menurut catatan Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 terdapat 270 protestan, 232 katolik, 9 Hindu dan 52 penganut budha di Bulukumba. Jumlah tempat peribadatan yaitu total 977 Masjid, 133 Mushola , dan 1 gereja.

Tabel II-257
Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Kabupaten Bulukumba 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja)	Unit	1.118	1.118	1.280	1.154	1.154
Jumlah Penduduk	Jiwa	420.603	437.607	440.090	443.292	471.688
Rasio tempat ibadah persatuan penduduk		**2,66**	**2,55**	**2,91**	**2,60**	**2,45**

Sumber: Sekretariat Daerah, Kemenang, BPS Kabupaten Bulukumba, 2024

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

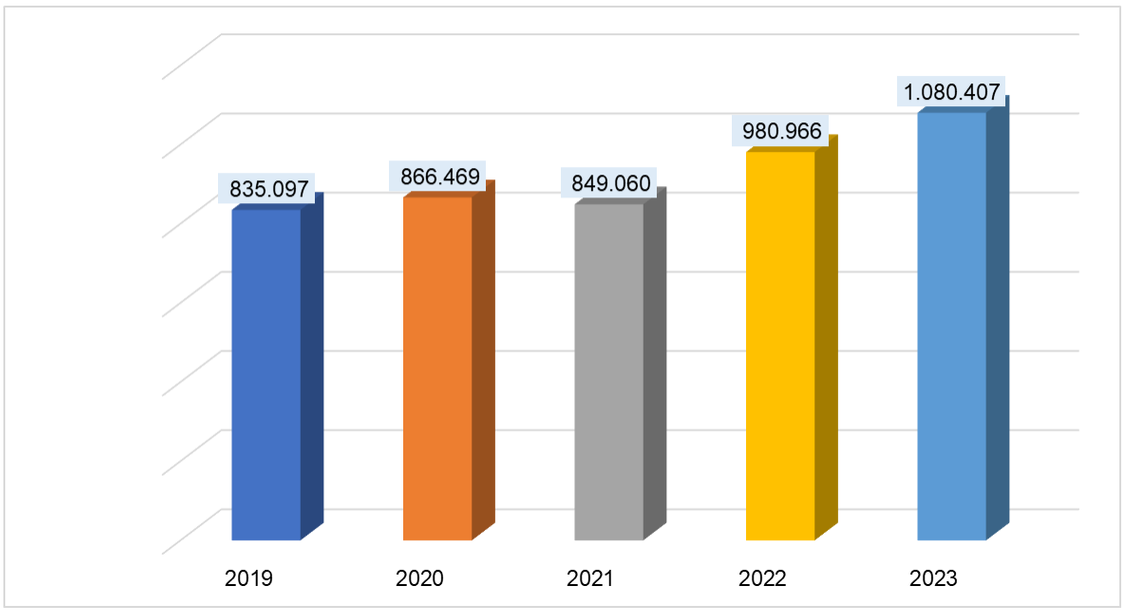
Aspek daya saing daerah terdiri dari Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur. Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya Manusia.

A. Kemampuan Ekonomi Daerah

1) **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terus mengalami pertumbuhan positif di Kabupaten Bulukumba pada 2019-2023, pada tahun 2019 mencapai rata-rata 835.097 Rupiah/Bulan dan meningkat hingga pada tahun 2023 menjadi 1.080.407 Rupiah/Bulan. sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik II-26
Rata-rata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Per Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

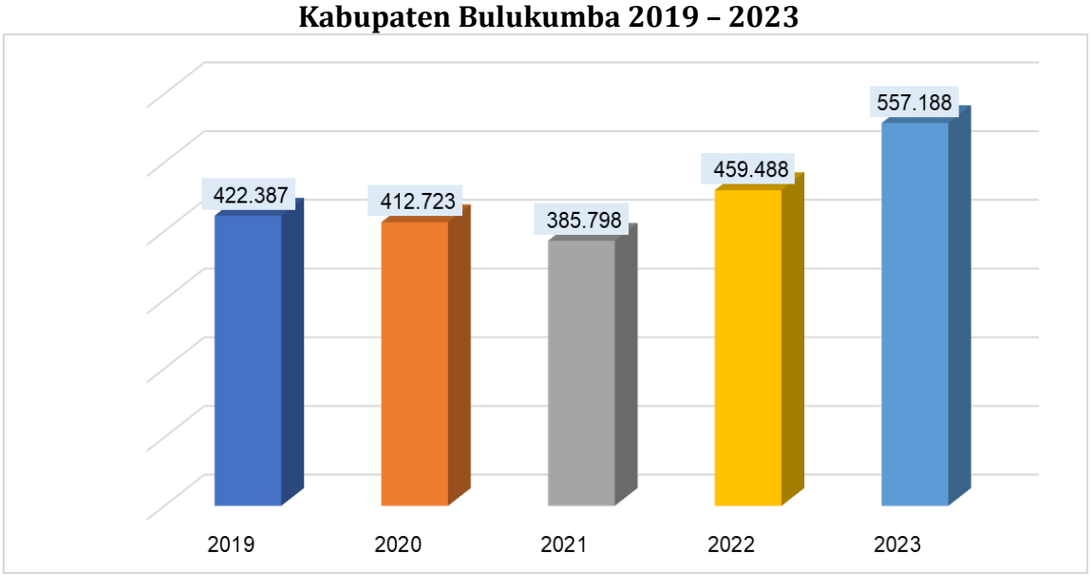


Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2024

2) **Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita**

Konsumsi non pangan Bulukumba Rata-rata Pengeluaran per Kapita menurut kelompok makanan sebesar 521.478 rupiah dan non makanan sebesar 557.188 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pangan semakin menjadi bukan konsumsi utama masyarakat sebagaimana gambar dibawah ini

Grafik II-27
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Kabupaten Bulukumba 2019 – 2023



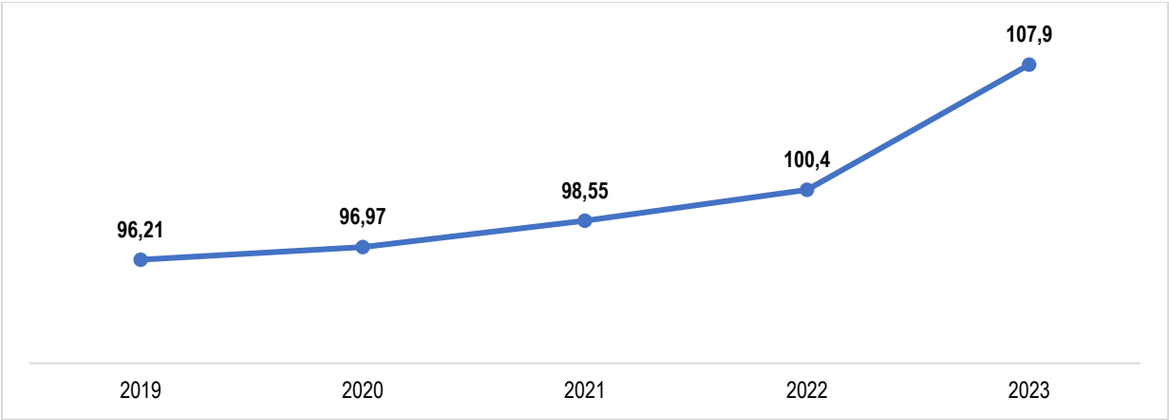
Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2024

3) **Nilai Tukar Petani**

Nilai tukar petani merupakan indikator ukuran tingkat kesejahteraan petani. Nilai tukar petani menggambarkan kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan hidup dari nilai produksi yang diperoleh. Nilai tukar petani dapat diukur pada setiap subsektor petanian. Nilai Tukar Petani menunjukkan tingkat pendapatan petani dibandingkan apa yang mereka keluarkan untuk melakukan usaha tani. Angka 100 merupakan tingkat impas antara pendapatan dan pengeluaran.

Sementara itu, untuk Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan positif, pada 2022 – 2023 mencapai di atas 100 yang menandakan bahwa yang diterima oleh petani lebih besar jika dibandingkan dengan yang dibayarkan.

Tabel II-258
Nilai Tukar Petani Tahun 2019-2023



Sumber Data : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 4 2020-2024

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Ketaatan Terhadap RTRW

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bulukumba mencapai sebanyak 70 Persen ruang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan tata ruang. dan realisasinya sudah sesuai dengan target. Realisasi ini masih belum optimal menunjukkan adanya pencapaian pada tahun 2019 karena realisasi pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang masih sebesar 80Persen. Artinya hingga tahun 2019 baru 80 Persen ruang yang sesuai RTRW dan di tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan positif menjadi 100 persen.

Tabel II-259
Kesesuaian Pemanfataan Ruang Sesuai RTRW
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang		70	80	81	100	100

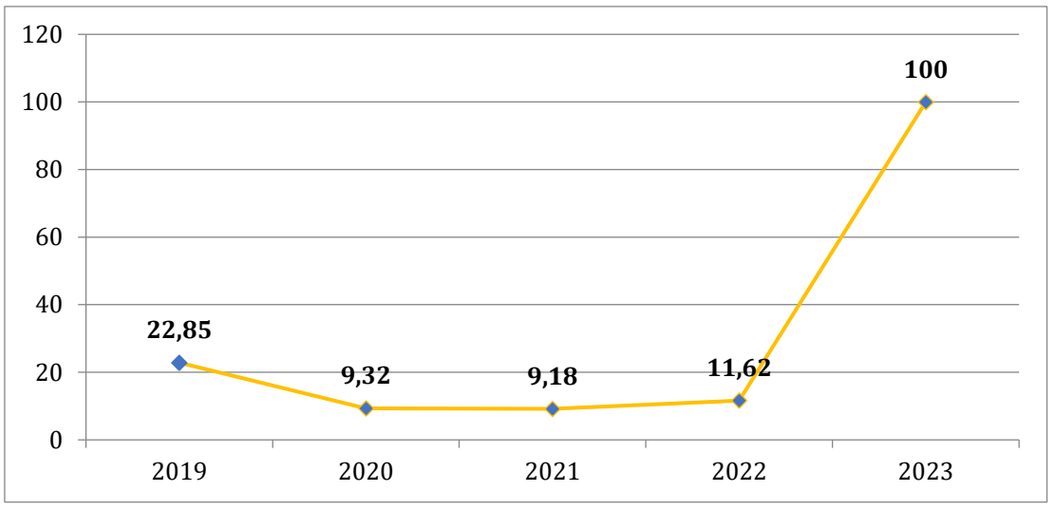
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, 2024

C. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Kriminalitas

Secara umum, fungsi Jumlah Tindak Pidana ini adalah untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, informasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena perkelahian massal yang terjadi di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah Angka Kriminalitas Tertangani dengan membangingkan jumlah penduduk dengan Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun di Kabupaten Bulukumba dari kurun waktu. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik II-28
Angka Kriminalitas yang tertangani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2023



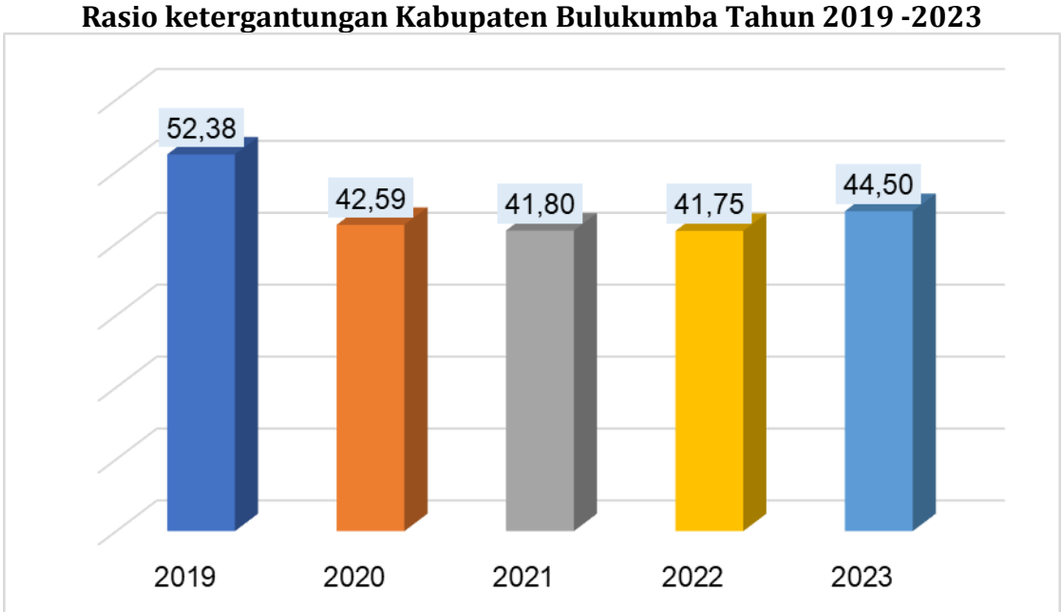
Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2024

D. Fokus Sumberdaya Manusia

1) Rasio Ketergantungan

Semakin tingginya persentase *dependency ratio*/ rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka rasio ketergantungan di Bulukumba mengalami peningkatan pada tahun 2019 namun turun pada tahun 2020 menjadi 42,59 dan mengalami pertumbuhan fluktuatif hingga tahun 2023 menjaddi 44,50. Artinya setiap 100 orang yang produktif (berusia kerja) mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang (yang belum produktif dan atau tidak produktif lagi).

Grafik II-29
Rasio ketergantungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 -2023



Sumber: Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2024, diolah

2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemeritah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Untuk

mengetahui capaia indikator kinerja dari setiap aspek/fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja. Adapun kategori interpretasi dikategorikan dalam 3 aspek diantaranya; belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>).

Adapaun gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah tahun 2023 capaian Indikator Kinerja Daerah dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel II-260
Hasil Analis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian	Target	Interpretasi
1			**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1			**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**				
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,11	4,25	<
1	1	2	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9.741,40	9.065,34	>
1	1	3	Laju inflasi	%	2,78	2,55	<
1	1	4	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	41,90	40,92	>
1	1	5	Gini Ratio	%	0,379	0,368	<
1	1	6	Persentase Penduduk miskin	%	7,22	5,99	<
1			**Kesejahteraan sosial**				
1	2	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,64	70,61	>
1	2	2	Angka Usia Harapan Hidup	angka	74,01	69,33	>
1	2	3	Angka Harapan Lama Sekolah	angka	13,43	14,28	>
1	2	4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	8,26	7,89	>
1	2	5	Pengeluaran Per Kapita Riil	Juta Rupiah	11.390	10.657	
1	2	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,78	71,50	<
1	2	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,31	2,91	>
1			**Seni Budaya Dan Olahraga**				
1	3	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kali	3	5	<
1	3	2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	85,71	3,37	
2			**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
2			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
2	**1**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**				
2	1	1	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**				
			SD	%	107,40	114,54	<
			SMP	%	93,24	97,14	<
2	1	2	**Angka Partisipasi Murni (APM)**				
			SD	%	98,86	98,69	>
			SMP	%	87,04	84,85	>
2	1	3	**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**				
			7-12 Tahun	%	95,28	98,87	<
			14-15 Tahun	%	87,04	92,24	<
2	1	4	**Angka Putus Sekolah**				
			SD	%	4,5	0,00	<
			SMP	%	2,5	0,00	<
2	1	5	**Angka Kelulusan**				
			SD	%	100	100	=
			SMP	%	100	100	=
2	1	6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	100	100	=
2	1	7	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1:12	1:8	<
2	1	8	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:14	1:7	<

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian	Target	Interpretasi
2	1	9	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	91,42	91,53	<
2	**2**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**				
2	2	1	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup		1,14	4,57	>
2	2	2	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup		0,49	9,94	>
2	2	3	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup		10,28	0,00	<
2	2	4	Angka Kematian Ibu		146,87	46,71	<
2	2	5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		*3,25*	*29,92*	<
2	2	6	Rasio Puskesmas Dan Pustu		*0,17*	*0,19*	<
2	2	7	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		*0,006*	*0,002*	>
2	2	8	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk		*0,03*	*0,04*	<
2	2	9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		*0,13*	*0,095*	>
2	2	10	Rasio Tenaga Medis/Penduduk		*2,91*	*0,242*	>
2	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	*%*	*78,78*	*86,30*	<
2	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	*%*	*100*	*100*	=
2	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	=
2	2	14	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	53,51	41,3	>
2	2	15	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	*Per 100.000 Penduduk*	177,87	93,82	>
2	2	16	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	*Per 100.000 Penduduk*	*5,09*	*2,56*	<
2	2	17	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	=
2	2	18	Angka Kejadian Malaria	*Per 1000 Penduduk*	7,00	0,24	<
2	2	19	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0,012	0,005	<
2	2	20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	95,31	10,40	>
2	2	21	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	68,66	73,17	<
2	2	22	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	%	65,66	50,43	>
2	2	23	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	95,31	89,19	>
2	**3**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**				
2	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,790	0,699	>
2	3	2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		0,0028	0,0031	<
2	3	3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air	%	98,98	100	<
2	3	4	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	80,92	81,70	<
2	3	5	Rasio Jaringan Irigasi		10,72	0,19	>
2	**4**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**				
2	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,229	0,249	<
2	4	2	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	4,13	74,46	<
2	4	3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	12,04	12,15	>

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian	Target	Interpretasi
2	4	4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	60,72	94,08	<
2	4	5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	88,34	84,74	>
2	4	6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	85,75	84,96	>
2	4	7	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,00	0,00	=
2	4	8	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		0,42	20,44	<
2	**5**		**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**				
6	5	1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,28	0,31	<
2	5	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		100	100	=
2	5	3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	0,00256	0,00305	<
2	5	4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100	100	=
2	5	5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	=
2	**6**		**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**				
2	6	1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	12	12	=
2	6	2	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	=
2	6	3	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	100,00	99,69	>
2	6	4	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	57,25	65,25	<
2	6	5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100,00	91,82	>
2	6	6	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	100,00	81,32	>
2			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
2	**1**		**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**				
2	1	1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	0,00	0,00	=
2	1	2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,001	0,02	<
2	1	3	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	100,00	3,92	>
2	1	4	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	2,004	2,09	<
2	1	5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0	0,23	>
2	1	6	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0	0,05	>
2	1	7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,69	0,79	<
2	1	8	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10.000	3179,00	762,88	>
2	1	9	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		33,85	86,22	<
2	1	10	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1	1,05	>
2	1	11	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		1	0,47	>

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian	Target	Interpretasi
2	**2**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**				
2	2	1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	3,35	4,3	<
2	2	2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	17,50	26,36	<
2	2	3	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	97,00	84,52	>
2	2	4	Rasio KDRT		0,0003	0,002	>
2	2	5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	70,18		
2	2	6	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	=
2	2	7	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	%	100	100	=
2	2	8	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100	=
2	**3**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**				
2	3	1	Ketersediaan Pangan Utama	angka	100	465,15	<
2	3	2	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	8.959,00	13.353,36	<
2	3	3	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	239,78	404,03	<
2	3	4	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	93,33	83,09	>
2	**4**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**				
2	4	1	Persentase Luas Lahan Bersetifikat	%	20,00	28,06	<
2	4	2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00	88,05	>
2	**5**		**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**				
2	5	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,74	63,45	>
2	5	2	Indeks Kualitas Air	Poin	63,74	58,95	>
2	5	3	Indeks Kualitas Udara	Poin	93,82	84,84	>
2	5	5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	100	100	=
2	5	6	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1	=
2	5	7	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	=
2	5	8	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	=
2	5	9	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100	=
2	5	10	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100	=
2	5	11	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1	=
2	5	12	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	Ada	Ada	=

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian	Target	Interpretasi
2	5	13	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100	=
2	5	14	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	63,14	29,18	>
2	5	15	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	94,79	100	<
2	5	16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	75,00	24,30	>
2	5	17	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	35,00	41,28	<
2	5	18	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	1	=
2	5	19	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	29,86	33,85	<
2	5	20	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	36,62	36,62	=
2	5	21	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	0	=
2	**6**		**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**				
2	6	1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	%	0,99	1	<
2	6	2	Rasio bayi berakta kelahiran,	%	0,54	0,8	<
2	6	3	Rasio pasangan berakta nikah,		1	0,5	>
2	6	4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	=
2	6	5	Cakupan penerbitan KTP-el	%	99,26	100	<
2	6	6	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	98,48	80	>
2	**7**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**				
2	7	1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	95,40	100	<
2	7	2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM)		100	146	<
2	7	3	Persentase Lsm Aktif	%	91	100	<
2	7	4	Persentase PKK Aktif	%	100	100	=
2	7	5	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	=
2	7	6	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	100	=
2	7	7	Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK		100	93	>
2	**8**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**				
2	8	1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	*%*	*2,76*	*0,53*	<
2	8	2	Total Fertility Rate (TFR)	*%*	2,190	2,50	>
2	8	3	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	*%*	75,40	78,58	<
2	8	4	Persentase Perangakat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	*%*	25,92	26,42	<
2	8	5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tengtang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	*%*	1	1	=

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian	Target	Interpretasi
2	8	6	Jumlah Sektor Yang Menyapakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan		1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	=
2	8	7	Jumlah Kerja Sama Penyelengaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,		1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	=
2	8	8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	2,19	13,75	<
2	8	9	Ratio Akseptor Kb	%	64,48	18,33	>
2	8	10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	45,70	74,86	<
2	8	11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		45,7	89,79	<
2	8	12	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	15,34	4,45	<
2	8	13	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	20,92	11,84	<
2	8	14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	60,30	39,09	>
2	8	15	Persentase Tinggkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	65,00	53,50	<
2	8	16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	65,00	100	<
2	8	17	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	12,26	79,78	<
2	8	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB	%	62,10	91,16	<
2	8	19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	%	5	10	<
2	8	20	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	4,8	1,03	>
2	8	21	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksaaan Pembangunan Daerah Di Bdang Pengendalian Penduduk	%	100	100	=
2	8	22	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	10,00	25,16	>
2	8	23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	=
2	8	24	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	=
2	8	25	Persentase Faskes Dan Jejarinya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	100,00	65,05	<
2	8	26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	%	100	100	=
2	8	27	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	%	0,0	0	=
2	8	28	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100,00	100	=
2	8	29	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	51,40	38,87	>

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian	Target	Interpretasi
2	8	30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	*%*	22,10	22,79	<
2	8	31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	*%*	0	0,01	>
2	**9**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**				
2	9	1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	=
2	9	2	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	69.248	12.911	>
2	9	3	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	22,63	1,17	>
2	9	4	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	*%*	94,72	100,00	<
2	9	5	Pemasangan Rambu-Rambu	*Unit*	0,00	68,66	<
2	9	6	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang	207.744	28.134	>
2	9	7	Rasio Ijin Trayek		0,83	0,010	>
2	**10**		**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**				
2	10	1	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	0	91	<
2	10	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	1154,58	0,79	<
2	10	3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	-	84,60	<
2	10	4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	-	57,91	<
2	10	5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	-	91,33	<
2	**11**		**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**				
2	11	1	Persentase koperasi aktif	*%*	67,68	75,21	<
2	11	2	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	*%*	97,55	98,97	<
2	**12**		**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**				
2	12	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	60.083	69	>
2	12	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	31.250	780.755	<
2	12	3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	*%*	36,94	25	>
2	**13**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**				
2	13	1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	*%*	47,17	90,71	<
2	13	2	Persentase wirausaha muda		2,59	3,37	<
2	13	3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	85,71	21,57	>
2	13	4	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	29,31	41,03	<
2	13	5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	73,65	52,30	>
2	13	6	Jumlah atlet berprestasi		32	19	>
2	13	7	Jumlah prestasi olahraga		6	3	>
2	**14**		**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**				
2	14	1	Buku ”Kabupaten Dalam Angka”		Ada	Ada	=
2	14	2	Buku ”PDRB”		Ada	Ada	=
2	**15**		**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**				
2	15	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	=
2	**16**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**				

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian	Target	Interpretasi
2	16	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		3	3	=
2	16	2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		78	59	>
2	16	3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		41	2	>
2	**17**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**				
2	17	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		10,67	34,67	<
2	17	2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		71,94	45,16	>
2	17	3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		1,61	1,79	<
2	17	4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun	Orang	40.487	69.007	<
2	17	5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	16.227	12.288	>
2	17	6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	55,20	63,78	<
2	**18**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**				
2	18	1	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100	100.00	=
2	18	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	44,44	1,39	>
2			**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
2	**1**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**				
2	1	1	Cakupan Produksi perikanan	%	113,40	130	<
2	1	2	Perikanan tangkap	ton	55.612	57.120,4	<
2	1	3	Perikanan Budidaya	ton	214.799	5176	>
2	1	4	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	83,30	72,2	>
2	**2**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**				
2	**2**	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	544.139	395.675	>
2	2	2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2	2-4	=
2	2	3	PAD Sektor Pariwisata	%	5,98	6,11	<
2	**3**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**				
2	3	1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		24,33	25,15	<
2	3	2	Cakupan bina kelompok tani	%	63,34	79,42	<
2	3	3	Jumlah Populasi Ternak				
			Sapi Potong	*Ekor*	67.808	79.324	<
			Ayam Ras Pedaging	*Ekor*	2.174.800	2.445.959	<
			Ayam Ras Petelur	*Ekor*	610.693	751.499	<
2	**5**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**				
2	5	1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0	0,74	<
2	5	2	Jumlah Pasar	Unit	43	43	=
2			**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**				
2	**1**		**Sekretariat Daerah**				
2	**1**	1	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk		2,70	2,76	<
2	**2**		**Sekretariat DPRD**				
2	2	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Ada	Ada	=
2	2	2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk		Ada	Ada	=

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian	Target	Interpretasi
			Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				
2	2	3	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	=
2			**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				
2	**1**		**Perencanaan**				
2	1	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	=
2	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	=
2	1	3	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	=
2	1	4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	=
2	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	=
2	1	6	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	=
2	**2**		**Keuangan**				
2	**2**	1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	=
2	2	2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	2,84	3,00	<
2	2	3	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0	=
2	2	4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	29,88	21,40	>
2	2	5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	17,35	19,44	<
2	2	6	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
2	2	7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa		0,42	0,62	<
2	2	8	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	12,54	11,76	>
2	**3**		**Kepegawaian**				
2	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	Bulan	3	3	=
2	3	2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	88,32	89,35	<
2	3	3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	43,85	84,94	<
2	**4**		**Pendidikan Dan Pelatihan**				
2	4	1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	32	29	>
2	4	2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	544	1703,112	<
2	**5**		**Penelitian Dan Pengembangan**				
2	5	1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	7,50	9,56	<
2	5	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	16	12,06	>
2	5	3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	49,74	61,01	<
2			**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**				
2	**6**		**Inspektorat Daerah**				
2	6	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	88	79,47	>

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian	Target	Interpretasi
2	6	2	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,01	0,181	>
2	6	3	Jumlah temuan BPK	Temuan	13	6	<
2			**Unsur Pemerintahan Umum**				
2	**7**		**Kesatuan Bangsa dan Politik**				
2	7	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71	70,5	>
2	7	2	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	=
2	7	3	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	=
3			**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
3			**Kemampuan Ekonomi Daerah**				
3	1	1	Rata-rata Nilai Konsumsi Pengeluaran Per Rumah Tangga		1.080.407	985.837	>
3	2	2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita		557.188	472.763	>
3	3	3	Nilai Tukar Petani		107,90	104,83	>
3			**Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**				
3	1	1	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang	%	100	92	>
3			**Iklim Berinvestasi**				
3	1	1	Angka Kriminalitas yang tertangani	%	100,00	25,95	>
3			**Sumberdaya Manusia**				
3	1	1	Rasio Ketergantungan		44,50	37,22	>

Sesuai dengan Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 dari 252 total indikator terdapat 105 indikator melampaui dari target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 64 indikator yang telah sesuai dengan target, sedangkan 83 indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Ini menjelaskan bahwa capaian kinerja Kabupaten Bulukumba berada dalam kondisi positif sehingga perlu ditingkatkan untuk tahun selanjutnya.

2.1.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Bulukumba diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan pada RPJMD Kabupaten Bulukumba, seperti pada tabel berikut.

Tabel II-261
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	Capaian SPM				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	**PENDIDIKAN**						
1.1	**Pendidikan Dasar**						
1	persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	93,41	95	82,42	94,6	97
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional						
1.2	**Pendidikan Kesetaraan**						
2	Persentase WargaNegara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	94,56	94	7,49	94,2	96,5
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional						
1.3	**Pendidikan anak usia dini**						

No	Uraian	Satuan	Capaian SPM				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	96,27	67	84,76	83,9	90
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional						
2	**KESEHATAN**						
2.1	**Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah**						
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	%	100	73,31	72,51	100	100
2.2	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**						
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%	100	85,66	87,12	100	100
2.3	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**						
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	79	87,32	100	100
2.4	**Pelayanan kesehatan balita**						
7	Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	50,02	84,71	100	100
2.5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**						
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	2,14	19,19	100	100
2.6	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**						
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	4,46	49,94	100	100
2.7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**						
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	31,41	41,96	67	100
2.8	**Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi**						
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	7,88	13,81	100	100
2.9	**Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus**						
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitusyang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	79,08	100	100
2.10	**Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**						
13	Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	63,49	90.07	84	100
2.11	**Pelayanan kesehatan orang terduga tubercolosis**						
14	Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	27,01	100	100
2.12	**Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefic ieny Virus)**						
15	Persentas orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	40,63	52,12	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**						
3.1	**Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari**						

No	Uraian	Satuan	Capaian SPM				
			2019	2020	2021	2022	2023
16	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum seharihari	%	83,53	84,4	84,26	90,26	85,80
3.2	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic**						
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	75,96	76,12	76,26	97,49	83,41
4	**PERUMAHAN DA PEMUKIMAN**						
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/k ota;**						
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100	54	100	100	100
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**						
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	%	100	-	-	93	100
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
5.1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum**						
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	71,11	100	96,9	100	100
5.2	**Pelayanan informasi rawan bencana**						
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
5.3	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**						
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
5.4	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**						
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
5.5	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**						
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**						
6.1	**Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti**						
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	92	89,8	54,55	97,64	100
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti**						
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	90	-	90.91	94,20	100
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti**						
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	92,8	41,18	67,57	99,13	100

No	Uraian	Satuan	Capaian SPM				
			2019	2020	2021	2022	2023
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**						
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	%	86,9	-	100	94,28	100
6.5	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota**						
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 2023

2.1.6.1 Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan pencapaian target indikator berdasarkan bidang urusan dapat dijelaskan bahwa :

1. Bidang Urusan Pendidikan

   Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan adalah :

   - Tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan belum 100% berkualifikasi S1/DIV
   - Sarana dan prasarana semua jenjang pendidikan belum memadai, masih terdapat beberapa sekolah dengan ruang kelas dan bangunan penunjang sekolah lainnya dalam kondisi rusak ringan dan sedang.
   - Pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah di tingkat desa dan kelurahan belum optimal.
   - Masih minimnya alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM

   Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

   - Perlunya peningkatan kompetensi untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenjang Pendidikan
   - Mengoptimalkan pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
   - Perlunya Kerjasama dengan berbagai pihak untuk lebih fokus
   - terkait dengan pendataan anak tidak sekolah seperti: Dinas Sosial, Bappelitbangda dan Pemerintah Desa/Kelurahan
   - Perlunya penambahan alokasi anggaran khususnya yang bersumber dari DAK, baik DAK Fisik maupun Non Fisik.

2. Bidang Urusan Kesehatan

   Target untuk semua indikator adalah 100% namun berdasarkan angka di atas tidak ada indikator yang mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

   - Masih rendahnya cakupan KIA terutama cakupan K4 pada beberapa puskesmas Kebutuhan dihitung berdasarkan pagu bukan berdasarkan kebutuhan
   - Terkendala pada sinkronisasi data laporan LB3 Ibu dan Anak ke PWS KIA Perencanaan dan penganggaran belum maksimal karena keterbatasan
   - Keterbatasan tenaga kesehatan puskesmas dan belum maksimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor
   - Masih rendahnya kesadaran masyarakat (*respon rate*) untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin baik di fasyankes maupun posbindu

- Bahan habis pakai/strip GCU untuk skrining yang tidak mencukupi untuk melakukan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Penjaringan sasaran yang belum optimal karena sasaran yang sangat besar dimana sasaran hipertensi adalah 33,3% dari penduduk usia > 15 tahun dan sasaran DM adalah 2.2% dari penduduk usia >15 tahun
- Pencatatan di poli puskesmas terkait pemeriksaan/screening PTM tidak mencatatkan NIK di register sehingga tidak terinput di aplikasi ASIK.
- Kurangnya pengetahuan dan peran keluarga dalam merawat pasien, aparat desa dan kecamatan yang kurang berperan aktif dalam penanggulangan ODGJ serta masih adanya pasien yang belum memiliki BPJS dan identitas kependudukan.
- Masih kurangnya informasi tentang pelayanan orang terduga tuberkulosis, jejaring internal dan eksternal pelayanan kesehatan yang kurang optimal, dan pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan pelayanan di luar wilayah serta ketersediaan sumber daya daerah yang terbatas.

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu khususnya pemeriksaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin serta sinkronisasi sistem pelaporan yang terintegrasi
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader serta memaksimalkan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit menular melalui peningkatan kapasitas dan keaktifan pokja kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Peningkatan pelayanan kefarmasian dan ketersediaan alat kesehatan bagi pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Peningkatan jumlah SDM untuk mengelola masing-masing program
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas IT yang memadai dalam penggunaan sistem pelaporan yang terintegrasi
- Pengelolaan pelayanan kesehatan ODGJ, TB dan HIV difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini dan dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK

3. Bidang Pekerjaan Umum

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang di tempuh.

- Penanganan rumah layak huni bagi korban bencana tidak dilakukan pada tahun kejadian dan harus menunggu penganggaran tahun berikutnya
- Alokasi anggaran untuk rumah layak huni bagi korban bencana tidak mencover jumlah sasaran sehingga terselesaikan secara swadaya masyarakat
- Data korban bencana yang diterima tidak memberikan gambaran kerusakan rumah sehingga memerlukan proses pendataan lanjutan sebelum penentuan calon penerima

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Melakukan verifikasi lapangan dan memberikan bantuan dengan skala prioritas
- Memastikan penerima bantuan adalah korban bencana yang sangat membutuhkan
- Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang di lapangan.

4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

   Walaupun pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2023 mencapai 100% namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

   - Kemampuan Sumber Daya Manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang belum cukup memadai dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja dan Damkar.
   - Dukungan Anggaran yang belum memadai akibat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal.
   - Disiplin dan Profesionalisme Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang masih kurang karena minimnya Diklat Profesi dan Bimbingan Tehnis serta Sarana dan Prasarana Pendukung.
   - Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum memiliki gedung kantor yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara maksimal. Jumlah ruangan kerja yang tersedia saat ini sangat terbatas, begitu juga dengan ruangan posko untuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang tidak tersedia
   - Masih rendahnya kapasitas pemerintah, masyarakat dan stake holder yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
   - Masih kurangnya jumlah PNS, yang saat ini hanya diisi oleh 14 orang yang seharusnya sebanyak 22 orang jika disesuaikan dengan analisis beban kerja
   - Masih Kurangnya Sarana Prasarana

   Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

   - Perlunya Bimbingan Tekhnis dalam rangka peningkatan Sumber Daya Aparatur Anggota Satpol.PP dan Damkar.
   - Perlunya Tambahan Anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.
   - Perlunya Diklat terkait tugas dan fungsi Satpol.PP dan Pemadam dalam menunjang Penegakan Peraturan Daerah.
   - Peningkatan Kelembagaan

5. Bidang Sosial

   Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Bulukumba yaitu belum tersedianya data akurat dan valid yang menjadi indiator pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan

2.1.7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistanable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable DevelopmentGoals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi- generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1) Tanpa Kemiskinan;
2) Tanpa Kelaparan;
3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4) Pendidikan Berkualitas;
5) Kesetaraan Gender;
6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7) Energi Bersih dan Terjangkau;
8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10) Berkurangnya Kesenjangan;
11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13) Penanganan Perubahan Iklim;
14) Ekosistem Lautan;
15) Ekosistem Daratan;
16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten. Target-target SDGs ditingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 2021.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-262
Capaian Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2023

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun				
1.2.1*Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	7,39	7,22	Dinas Sosial
1.3.1.(a)Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	90,37	94,27	Dinas kesehatan
1.3.1.(b)Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	5,3	10,04	BPJS Ketenagakerjaan
1.3.1.(c)Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persen	97,36	100	Dinas Sosial
1.3.1.(d)Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Rumah Tangga	14945	12935	Dinas Sosial
1.4.1.(a)Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	99	100	Dinas kesehatan
1.4.1.(b)Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	80,6	94,11	Dinas kesehatan
1.4.1.(c)Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	55,75	45,7	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pembendayaa Perempuan dan Perlindungan anak
1.4.1.(d)Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	85,46	85,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4.1.(e)Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	76,87	83,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4.1.(g)Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	98,41	98,86	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.	Persen	84,48	87,04	Dinas Pendidikan
1.4.1.(j)Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	98,29%	0,9829	Dinas Kependudukan dan catatan sipil
1.4.1.(k)Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rumah Tangga	NA	NA	Sekretariat Daerah bagian Ekonomi dan Pengembnagan Energi dan Sumber daya Mineral

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
1.5.1*Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	91	12326	Badan Penanggulangan Bencana
1.5.1.(a)Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	23	23	Badan Penanggulangan Bencana
1.5.1.(b)Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Orang	26	59	Dinas Sosial
1.5.1.(c)Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Orang	26	59	Dinas Sosial
1.5.1.(d)Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus9 SMAB=Sekolah/madrasah aman bencana)		NA	NA	Dinas Sosial
1.5.2.(a)Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	RP	3.000.000.000	4.068.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.				
1.a.1*Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dokumen	1	1	Dinas Sosial
1.a.2*Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persen	21,64	25,45	Dinas Sosial
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan				
2.1.1.(a)Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Persen	5,96	8,7	Dinas Kesehatan
2.2.1 *Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita bawah dua tahun/baduta.	Persen	5,4	8,2	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen	5,96	8,7	Dinas Kesehatan
2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,berdasarkan tipe.	Persen	3,3	5,95	Dinas Kesehatan

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	69,59	73,44	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	76,42	78,06	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	NA	89,6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.1*Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Persen	NA	NA	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja
TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahtraan Seluruh Penduduk Semua Usia				
3.1.1*Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka	9	9	Dinas Kesehatan
3.1.2*Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	83,72	83,72	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	86,25	86,25	Dinas Kesehatan
3.2.1*Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	0	3	Dinas Kesehatan
3.2.2*Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Persen	24	63	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Persen	43	7	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.1.(a)Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	0,63	0,63	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Orang	166	90	Dinas Kesehatan
3.3.3*Kejadian Malaria per 1000 orang.	Persen	0,047	0,069	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)Persentase Kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5*Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan kusta).	Orang	63	27	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)Persentase merokok pada penduduk umur £18 tahun.	Persen	0,011	2,8	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	16,48	28,46	Dinas Kesehatan
3.4.1. ©Prevelensi Obesitas pada penduduk umur < 18 Tahun	Persen	0,1	1,15	Dinas Kesehatan
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.				

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
3.5.1 ©Prevelensi Penyalahgunaan Narkoba		NA	NA	Dinas Kesehatan
3.5.2 *Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur >15 tahun dalam satu tahun terakhir		NA	NA	Dinas Kesehatan
3.7.1*Proporsi perempuan usia reproduksi (15 -49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Persen	22,77	20,7	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3.7.1.(a)Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	55,43	45,7	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3.7.1.(b)Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Persen	34,43	60,3	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3.7.2*Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	Persen	23,5	45,7	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3.7.2.(a)Total Fertility Rate (TFR).	TFR	2,13	2,11	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.				
3.8.1Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Persen	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.8.1.(a)Unmet need pelayanan kesehatan.	Persen	28,51	15,78	Dinas Kesehatan
3.8.2*Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Penduduk	419.304	444.665	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	90,37	94,27	Dinas Kesehatan
3.9.3.(a)Proporsi kematian akibat keracunan.	-	0	NA	Dinas Kesehatan

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
3.a.1*Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	23,75	NA	Dinas Kesehatan
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.				
3.b.1.(a)Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen	2,53	2,53	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesemoatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua				
4.1.1*Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Persen	92	92	Dinas Pendidikan
4.1.1.(a)Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	90,3	90,3	Dinas Pendidikan
4.1.1.(b)Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	71,42	71,42	Dinas Pendidikan
4.1.1.(d)Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	113,27	114,54	Dinas Pendidikan
4.1.1.(e)Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Persen	86,46	97,14	Dinas Pendidikan
4.1.1.(g)Rata-rata lama sekolah penduduk umur ³15 tahun.	Tahun	9,02	9,25	Dinas Pendidikan
4.2.2.(a)Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	93,33	94,1	Dinas Pendidikan
4.4.1*Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen	20,8	20,8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4.5.1*Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persen	82	82	Dinas Pendidikan
4.6.1.(a)Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	90,3	99,73	Dinas Pendidikan
4.6.1.(b)Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15 -59 tahun.	Persen	90,3	91,53	Dinas Pendidikan

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.				
4.a.1*Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, © air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Persen	91	91	Dinas Pendidikan
4.c.1*Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	44,35	45,25	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan Kaum Perempuan				
Target SDGs :5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.				
5.1.1*Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.				
5.2.1*Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	26	11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.1.(a)Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	50	46	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2*Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	21	68,75	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2.(a)Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.				

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
5.3.1*Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	0,11	0,09	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.1.(b)Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		23,5	45,7	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.				
5.5.1*Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	20	20	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5.2*Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	18,4	34,5	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.				
5.6.1.(a)Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6.1.(b)Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	99,35	100	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.				
5.b.1*Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Persen	84,46	84,46	Badan Pusat Statistik
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua				

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
6.1.1.(a)Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	85,46	85,8	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
6.1.1.(c)Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	85,46	85,8	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
6.2.1.(a)Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
6.2.1.(b)Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	97,88	83,41	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
6.2.1.(c)Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	136	136	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	136	136	Dinas Kesehatan
6.2.1.(f)Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Unit	720	720	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.3.1Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	%	8	8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.3.2.(b)Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	55	55	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.5.1.(a)Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sungai	NA	NA	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
6.5.1.(g)Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kegiatan	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
TUJUAN 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua				
7.2.1*Bauran energi terbarukan.		NA	PM	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan sumber Daya Mineral
7.3.1*Intensitas energi primer.		NA	PM	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan sumber Daya Mineral

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
TUJUAN 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua				
Target SDGs : 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.				
8.1.1*Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	3,81	4,11	Bapperida
8.1.1.(a)PDB per kapita.	Juta	38,88	42,27	Bapperida
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.				
8.2.1*Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Persen	8,76	8,76	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.				
8.3.1*Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen	0,31	0,31	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(a)Persentase tenaga kerja formal.	Persen	21,68	21,68	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(b)Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen	35,26	35,26	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(c)Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persen	61,33	61,33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
8.5.1*Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	34.143	34143	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.5.2*Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	0,03	0,03	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.5.2.(a)Persentase setengah pengangguran.	Persen	0,1	0,1	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.				
8.6.1*Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen	58,3	58,3	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.9.1.(a)Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	753	2.181	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	512.716	542.072	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.2*Jumlah Pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja		38	38	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.				
8.10.1*Jumlah kantor bank dan ATM per100.000 penduduk dewasa	ATM	1	1	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.10.1.(a)Rata-rata jarak lembaga keuangan (bank Umum)		2,5	2,5	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Persen	45,38	45,38	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta mendorong inovasi				
Target SDGs 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.				
9.1.2.(b)Jumlah dermaga penyeberangan.	Dermaga	2	2	Dinas Perhubungan
9.2.1*Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Persen	6,68	6,68	Dinas Perdagangan,Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.1.(a)Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	8,41	8,41	Dinas Perdagangan,Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.				
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.				
9.c.1*Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen	50	50	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.c.1.(a)Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Persen	84,46	84,46	Badan Pusat Statistik
9.c.1.(b)Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Persen	57,91	57,91	Badan Pusat Statistik
TUJUAN 10 mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara				
10.1.1*Koefisien Gini.	Koefisien	NA	0,33	Dinas Sosial

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
10.1.1.(a)Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	7,39	7,39	Dinas Sosial
10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa	109	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(c)Jumlah desa tertinggal.	Desa	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri.	Desa	14	23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.		NA	NA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.2.1*Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	NA	NA	Dinas Sosial
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.				
10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Fasilitasi Koordinasi Produk Hukum Daerah Berupa Perda, Perbup,Keputusan dan Fasilitasi Bantuan Hukum	743	743	Sekda, Bagian Hukum dan HAM
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.				
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	5,3	10,04	Dinas Sosial
TUJUAN 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan				
11.1.1.(a)Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.5.1*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	91	12236	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(a)Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
11.5.1.(c)Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Dokumen	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	RP	3.000.000.000	4.068.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6.1.(a)Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	94,77	94,77	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.b.2*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan				
Target SDGs 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.				
12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah	Ton	35	35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.5.1.(a)Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	24,95	24,95	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.				
12.6.1.(a)Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.				
12.7.1.(a)Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Persen	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TUJUAN 13.Mengambil Tindakan cepat untuk Mengangtisipasi Perubahan Iklim dan Dampaknya				
Target SDGs 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.				

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
13.1.1*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	91	12326	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber daya kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan				
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.				
14.4.1*Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Ton	55.522,60	55.612,00	Dinas Perikanan
14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk- bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.				
14.6.1.(a)Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persen	100,00	100	Dinas Perikanan
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.				
14.b.1(b)Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan	867	NA	Dinas Perikanan
TUJUAN 15.Melindungi, Merestorasi dan meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem daratan, Mengelola Hutan secara lestari, menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta menghentikan kehilangan Keanekaragaman hayati				

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
Target SDGs 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.				
15.1.1.(a)Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	29,86	29,86	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.				
15.3.1.(a)Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	32,29	32,29	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.				
15.9.1.(a)Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan				
Target SDGs 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.				
16.1.1.(a)Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	2	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2.(a)Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian	0	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3.(a)Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Kasus	78	324	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
16.1.4*Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Persen	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.				
16.2.1.(b)Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Orang	23	9	Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.3.(a)Proporsi perempuan dan laki laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Orang	23	13	Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.				
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.				
16.6.1Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Persen	85,12	85,12	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(a)Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Persen	WTP (100%)	WTP (100%)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(b)Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	64,29	64,29	Inspektorat
16.6.1.(c)Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	Na	Na	Sekda, Bagian Pembangunan
16.6.1.(d)Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	68,91	68,91	Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.				
16.7.1.(a)Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	20	20	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.7.1.(b)Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persen	NA	17,3	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
16.9.1*Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen	97,31	97,31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	98,29	98,29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.				
16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	ASN	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.				
16.b.1.(a)Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		Ada	Ada	Setda, Bagian Hukum dan HAM
TUJUAN 17. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua				
Target SDGs 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.				
17.1.1*Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rp	1.375.869.878.063	1,37587E+12	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen	NA	NA	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.2*Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	2,43	2,43	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.				

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
17.6.2.(c)Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	50,00	50,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.				
17.8.1*Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	57,91	57,91	Badan Pusat Statistik
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.				
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.				
17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen	100,00	100	Bapperida
17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen	100,00	100	Bapperida
17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		6	6	Bapperida
17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		Data SDGS masih kurang relevan dengan targetdikarenakan masih adanya beberapa data yg masih berubah tiap tahunnya		Bapperida
17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Orang	7334	7334	Bapperida

Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Sumber Data
17. 19. 2. (d)Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	100,00	100	Bapperida

2.1.7.1 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerahmemerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten. Target-target SDGs ditingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 202 indikator yang menjadi kewenangan daerah, adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan SDGs dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-263
Identifikasi Masalah hambatan dan kendala dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2023

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN				
	Kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba salah satunya dengan semakin banyaknya bantuan yang berperan membantu pengentasan kemiskinan.	Meningkatkan peran serta Pemerintah dalam Menuntaskan kemiskinan diberbagai sektor yang menunjang penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba	Dinas Sosial
	Sosial	Realisasi capaian pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangn jumlah keluarga penerima manfaat yang memperoleh program perlindungan sosial yang berasal dari Kementrian Sosial RI	Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan	Dinas Sosial
	Bencana	Terjadinya peningkatan korban meninggal, hilang dan terkena dampak diakibatkan kondisi anomali cuaca yang lebih ekstrem.	Peningkatan kewaspadan masyarakat melalui penyuluhan kepada terkait dampak bencana	BPBD
	Kesehatan	Pengaruh sosial budaya masih sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan sehingga masih sangat diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	Pemenuhan fasilitas kesehatan ditingkat Desa dan Kelurahan melalui anggaran dana Desa dan anggaran Kelurahan dan tersedianya satu tenaga kesehatan satu desa	Dinas Kesehatan
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN				

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
	Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh dari hasil perhitungan survey konsumsi pangan pada 9 kelompok pangan meliputi : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah. Selama 5 tahun terakhir capainnya fluktuatif disebabkan karena masih rendahnya daya konsumsi pada kelompok pangan tertentu misalnya buah dan sayuran, pangan hewani yang dipengaruhi oleh daya beli dan kesadaran pola konsumsi masyarakat yang masih rendah.	Dalam mendukung program stunting dengan melihat desa yang stunting melalui kegiatan pekarangan pangan lestari memberi bantuan kepada Kelompok Wanita Tani.Pekarangan pangan lestari adalah merupakan kegiatan yang mengoptimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Keuangan	Harga bahan pangan masih fluktuatif;	Penyedian lumbung pangan dan melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas dan stok bahan pangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kesehatan	intervensi pelacakan untuk kasus kekurangan gizi telah dilakukan secara maksimal dan surveilans gizi melalui E-PPBGM sudah dimonitor secara berkesinambungan	Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan masyarakat miskin, pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbaikan gizi masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran swasta serta masyarakat	Dinas Kesehatan

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
			dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, Upaya pemenuhan gizi ibu hamil diintervensi secara optimal	
	Operasional	PMT yang diberikan kepada Bumil KEK tidak sepenuhnya dikomsumsi oleh ibu hamil, masih ada bayi balita yang tidak mendapat ASI Eksklusif	Agar kegiatan Pemberian PMT bagi ibu hamil KEK dan Balita Gizi Kurang, pemberian IMD bagi semua bayi baru lahir, pendampingan kasus gizi buruk dan bumil KEK dengan melibatkan kader posyandu, pendampingan ASI Eksklusif, penguatan jaringan dan mitra lintas program lintas sektor dalam penanganan gizi kurang dan Pemberian Tablet Fe pada remaja putri 12 – 18 tahun tetap dilanjutkan dan dioptimalkan	Dinas Kesehatan
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA				
	Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya tingkat kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil; ; Masih terbatasnya kemampuan sebagian besar kader bina keluarga	Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan masyarakat miskin, pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbaikan gizi masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran swasta serta masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dinas Kesehatan

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
	Kelembagaan	Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam menurunkan angka kematian ibu, Anak balita dan bayi	Memperkuat kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program, penguatan sistem rujukan terpadu bagi ibu hamil/ ibu bersalin, pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal), pengoptimalan Peran dan tupoksi Bidan desa dan deteksi dini untuk ibu hamil yang berisiko.	Dinas Kesehatan
	Kesehatan	Pembatasan kegiatan sebagai dampak pandemic Covid 19 yang berpengaruh terhadap pencapaian program	melakukan kegiatan sebagai peningkatan upaya konseling pada masyarakat tentang Gerakan Hidup Sehat Masyarakat untuk pencapaian program yang terhambat akibat Covid 19.	Dinas Kesehatan
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA				
	Sumber Daya Manusia	Penempatan tenaga pendidik belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara kawasan pedesaan dan perkotaan	Distribusi tenaga pendidik dan peningkatan kulaitas tenaga pendidik	Dinas Pendidikan
		Capaian APK ini menunjukkan bahwa masih terdapat peserta didik yang mengikuti pendidikan pada jengjang ini berusia lebih dari usia jenjang sekolah yang seharusnya.	Rata rata lama sekolah setiap tahun mengalami peningkatan yang menunjukkan hal positif, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi semakin baik	
	Regulasi	Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah PAUD di karenakan masih minimnya kesadaran serta	Pembangunan sekolah PAUD/sederajat, dan menyusun	Dinas Pendidikan

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
		pengetahuan orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum anak disekolahkan ke tingkat pendidikan dasar	regulasi pendidikan anak usia dini sebelum anak disekolahkan ke tingkat pendidikan dasar	
		Capaian APK PAUD masi rendah, hal ini menunjukkan masih banyaknya penduduk usia 3-6 tahun yang belum mengikuti pendidikan PAUD.	Dibutuhkan peran besar seluruh masyarakat dan pemerintah untuk mendorong tingkat partisipasi lebih besar.	
	Operasional	Capaian ini mengalami penurunan disebabkan jumlah guru sertifikasi yang pensiun cukup banyak dibanding jumlah lulusan baru. Hasil ini juga disebabkan guru yang baru diangkat baik cpns maupun honorer belum bersertifikast pendidik.	Dilakukan perbaikan pada sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan tingkat partisipasi lembaga dan masyarakat yang mendukung program Keaksaraan dan pemberantasan buta aksara.	Dinas Pendidikan
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN				
	Sumber Daya Manusia	Cakupan Perempuan dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapat layanan mulai tahun 2015 sampai dengan 2023 semua kasus terlayani 100% oleh pelayanan terpadu	Meningkatkan kapasitas kaum perempuan melalui pelatihan/sosialisasi/bimtek	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kelembagaan	Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum 18 tahun sebanyak 56 orang pada tahun 2016, meningkat sebanyak 81 orang ditahun 2017, pada tahun 2018 tidak banyak mengalami peningkatan hanya bertambah 3 orang yaitu 83 orang dan kembali mengalami banyak peningkatan yaitu sebanyak 105 orang pada tahun 2019 dan kembali lagi mengalami peningkatan jumlah yang banyak yaitu	Memperkuat kelembagaan organisasi perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
		sejumlah 206 orang pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 dan 2023 belum ada capaian realisasi		
	Keuangan	Masih kurangnya alokasi anggaran terkait gender	Menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Regulasi	Tahun 2017 : RAD (Rencana Aksi Daerah) PUG, Tahun 2018 : 1.SK Bupati No.188.45.463 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pokja Plus, 2. SK Bupati No.188.45.464 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak, 3. SK Bupati No.188.45.465 tentang pembentukan tim tekhnis anggaran responsif gender. Tahun 2021 dan 2023 : Perda No.1 Tahun 2021 dan 2023 penyelenggaraan Kabupaten Layak anak.	Menyusun Rencana aksi daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Operasional	Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan	Melakukan kerjasama dengan lembaga swasta, perguruan tinggi dalam rangka penguatan peran perempuan	Bapelitbangda; Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Politik	Jumlah kursi di keanggotaan DPRD dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 jumlah kursi yang diduduki perempuan sebanyak 7 kursi dari total kursi 40 dengan presentase sebesar 17,50% dan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan kursi perempuan menjadi 8 kursi dengan presentase 20%. Dan pada tahun 2021 tetap	Mendorong partai politik agar memaksimalkan kouta perempuan dan meningkatkan penguatan politik perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
		berada dia angka 20% dan untuk Tahun 2023 data belum ada.		
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA				
	air Minum layak	Tersedianya data berdasarkan Rumah tangga sanitasi Kab.Bulukumba masih berada pada level "Layak"	Dukungan Pemerintah masyarakat dalam peningkatan layanan sumber air minum telah ditingkatkan namun pada tahun 2023 terjadi perubahan defenisi operasional dari kriteria kelayakan sarana sumber air minum, Jumlah Rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak di Kab.Bulukumba semakin meningkat setiap tahun.	Dinas Kesehatan; Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Kelembagaan	Kurang optimalnya kelembagaan pengelola air bersih dan sanitasi sehat	Memperkuat kelembagaan Kab Sehat dan Pamsimas mulai Kabupaten sampai ditingkat Desa/Kelurahan	Dinas Kesehatan; Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Keuangan	Alokasi anggaran yang masih rendah pada sektor pengelolaan air bersih dan sanitasi sehat	Mengusulkan penganggaran melalui Dana APBN, Dana Desa dan keterlibatan swasta (CSR) dalam pengelolan sanitasi sehat	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	ODF/ sanitasi	Desa/Kelurahan yang ODF dengan kategori akses jamban di Masyarakat	Semua desa/kelurahan sudah melaksanakan lima pilar STBM, dan melakukan pemetaan tentang kegiatan pengeloalaan air bersih dan sanitasi sehat	Dinas Kesehatan; Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Air Limbah	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA				
	Sumber Daya Manusia	Masih kurangnya kualitas SDM sehingga kurang mampu bersaing dalam dunia kerja	Produktivitas, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreatifitas dan inovasi masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mendorong terbentuknya usaha mikro/menegah	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Keuangan	Refocusing anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Menambah alokasi anggaran untuk pengembangan industri rumah tangga (IKM) dan pengembangan sektor pertanian dan pariwisata	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Lainya	Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian.	Proksi ketenagakerjaan yang belum memiliki produktivitas mengalami fluktuasi dalam kurun 5 tahun terakhir sehingga dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pekerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA – DAN ANTAR NEGARA				
	Sumber Daya Manusia	Rendahnya kulaitas SDM masyarakat didesa	Meningkatkan kompetensi pemerintah desa dan masyarakat dan melalui pelatihan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
	Kemiskinan	Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 menurun 0,04 persen dari tahun 2021.Dimna pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kab.Bulukumba berada pada angka 7,39 % dan pada Tahun 2021 berada pada angka 7,43%	Tetap melakukan monev dan kontrol data yang up to date untuk menurunkan persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba	Dinas Sosial
	Pertumbuhan ekonomi Desa Tertinggal;	Di Kabupaten Bulukumba tidak terdapat daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal	Alokasi anggaran berdasarkan prioritas daerah dan potensi masing-masing wilayah	Dinas sosial
	Regulasi	Kebijakan belum fokus pemerataan wilayah	Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan	Dinas Sosial, DPMD, BPS
	Desa Mandiri	Alokasi Anggaran untuk tahun 2023, ditetapkan 14 desa di Kab.Bulukumba sebagai desa Mandiri dengan kriteria syarat dipilihnya 14 desa : IDM (Indeks Desa Membangun) sudah mencapai nilai lebih besar 0,8 IDM, Indeks Sosial, Indeks Kebutuhan ekonomi, indeks kebutuhan ekologi ini merupakan validasi mulai dari tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten.	Memperbaiki infrastrutur dipedesaan	DPMD
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
	Sumber Daya Manusia	Belum sebandingnya jumlah kegiatan yang harus diawasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan dan pengendalian Bencana	Menambah jumlah personel, sarana prasarana dan meningkatkan kapasita petugas dalam pengendalian bencana	Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana
	Penataann kota	Untuk jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP belum ada di Kab.Bulukumba		Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan
	Transportasi	Berkurangnya jumlah ketersediaan kendaraan angkutan umum sehingga capaian realisasi berkurang. Kemudian juga dipengaruhi meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.	Pemerintah perlu melakukan kontrol terhadap kendaraan transportasi baik umum dan pribadi untuk ketertiban dan pelayanan transportasi yang aman	Dinas perhubungan
	Kebencanaan	Dokumen regulasi SPM kebencanaan terwujud ditingkat daerah pada tahun 2020-2023 dan alokasi anggaran sudah mendukung dan masih perlu adanya pembenahan	Menambah alokasi anggaran untuk Pembuatan Dokumen strategi pengurangan resiko bencana dan Dokumen regulasi SPM kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana
	Pengolahan sampah	Persentase sampah perkotaan yang tertangani semakin meningkt dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih	semakin meningkatkan pengelolaan sampah melalui, pemilahan , pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir sampah di TPA, dan BANK sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN				
	Sumber Daya Manusia	Terbatasnya SDM dan sarana prasarana	Menambah jumlah pesonel, sarana prasarana dan meningkatkan kapasita petugas	Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan
	Kelembagaan	Kurangnya kelembagaan pengelolaan lingkungan	Memperkuat kelembagaan pengelolaan lingkungan seperti kelembagaan Bank sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
	Keuangan	Terbatasnya anggaran pengelolaan lingkungan	Mendorong pengelolaan lingkungan dan Perbaikan Ruang terbuka Hijau melalui kerjasama dengan pihak swasta	Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan
	Regulasi	Masih kurangnya regulasi tata kelola lingkungan	Memperkuat regulasi pengelolaan yang ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA				
	Sumber Daya Manusia	Terbatasnya SDM dan sarana prasarana	Menambah jumlah pesonel, sarana prasarana dan meningkatkan kapasita petugas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kelembagaan	Kurangnya kelembagaan mitigasi bencana	Tindakan adaptasi akan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi dampak perubahan iklim.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Keuangan	Terbatasnya anggaran pengelolaan lingkungan	Mendorong pengelolaan mitigasi bencana melalui pemberdayaan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Regulasi	Masih kurangnya regulasi mitigasi bencana	Memperkuat regulasi pengelolaan sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN				
	Kasus kejahatan	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir mengalami penurunan yakni di tahun 2021 ada 3 kasus dan di tahun 2023 turun	Semakin meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pelatihan	Kesbangpol; POLRES

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
		hanya 2 kasus dan Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir mengalami peningkatan. Di tahun 2021 terdapat 56 kasus dan di tahun 2023 terdapat 78 kasus	dan pendampingan lembaga yang kompeten	
	Kelembagaan	Kesadaran masyarakat atas norma hukum dan norma sosial yang belum memadai	upaya untuk memelihara kesadaran dan pemahaman atas norma hukum dan norma sosial di seluruh kalangan masyarakat melalui kelembagaan , Oranisasi keagamaan, ormas dan pemuda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk,KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Bag.Hukum; POLRES
	Kekerasan terhadap anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan mengalami peningkatan. Di tahun 2021 terdapat 19 Kasus dan di tahun 2023 terdapat 23 Kasus	Dari Tahun 2016 sampai Tahun 2019 terjadi peningkatan kasus kekerasan baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan sedangkan di Tahun 2021 kasus kekerasan pada anak muda laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dan untuk tahun 2023 terjadi peningkatan disebabkan adanya penurunan kesadaran orang tua, dukungan keluarga terhadap anak dengan cacat fisik, ekonomi dan lingkungan dan maraknya pernikahan dini	Dinas Pengendalian Penduduk,KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; POLRES
	Operasional	Penerapan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat Pemerintah Daerah, penerapan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata dan belum	Peneraan punishment dan reward dalam pengelolaannya	Setda (Bagian Organisasi)

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
		berjalan optimal. Selain itu , pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan reformasi belum memberikan dampak perubahan yang signifikan,;		
	Keuangan	Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,berdasarkan hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 telah menyajikan secara wajar dalam semuahal material, posisi laporan keuangan pemerintah daerah per 31 desember berupa laporan Realisasi Anggaran (LRA), perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas sesuai dengan standard akuntasi pemerintah. Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada akhir periode tahun 2023 memperoleh opini wajar dengan Pengecualian (WDP). Hal ini disebabkan adanya penyajian laporan yang material yang tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.	Tahun 2023 Bulukumba ditargetkan untuk mencapai WTP	BPKD
	Politik	Proporsi kursi yang diduduki perempuan DPRD kabupaten bulukumba, jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba dari Tahun 2019 sampai tahun 2024 sebesar 40 total kursi.Pada tahun 2015 sampai tahun 2018 jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab.Bulukumba sebesar 7 Kursi jika dipersentasekan hanya 17,50% namun pada tahun 2019 sampai tahun 2024 jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab.Bulukumba	Meningkatkan kompetensi dan kualitas perempuan khususnya pembinaan politik	Kantor kesatuan bangsa dan politik; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
		meningkat dari 17,50% menjadi 20% salah satu penyebab terjadinya peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah karena meningkatnya partisipasi yang mendukung pemberdayaan perempuan.		
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
	Sumber Daya Manusia	Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola Data dan Informasi	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan lembaga yang kompeten	Badan, Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS
	Keuangan	Terbatasnya anggaran	Memprioritaskan anggaran terkait penyediaan data dan informasi	Badan, Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS
	Pajak	Pada tahun 2016 Rasio Pajak Daerah Kab.Bulukumba terhadap PDRB memberikan kontribusi 0,327, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,383.Tahun 2018 Nikai tersebut mengalami penurunan menjadi 0,382 selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,372 dan pada tahun 2020 turun menjadi0,362. Tren penurunan rasio pajak Daerah Kab.Bulukumba terhadap PDRB tahun 2018 sampai tahun 2020 bukanlah penurunan secara nilai karena jumlah pajak daerah yang diterima mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, hanya saja nilai PDRB yang merupakan nilai pembagi juga mengalami peningkatan yang	Melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui perencanaan, pengembangan, pengendalain dan evaluasi pendapatan daerah (Intensifikasi dan extenfikasi penerimaan pendapatan daerah)	Dinas Pendapatan daerah

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/Non Pemerintah
	Kategori	Analisis Capaian Realisasi		
		signifikan pada kurun waktu tersebut. Sementara itu untuk tahun 2021-2023, peningkatan terjadi dikarenakan berkurangnya proporsi dana transfer daerah dari pemerintah pusat		

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dankeuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis,efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

a. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan denganpelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
b. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikatorkinerja yang telah ditetapkan.

2. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

Tabel II-264
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8	7	7	7	7	7	7	7	1	-	-	1
2	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
3	RSUD H.A. Sultan Dg. Radja	1	2	2	2	1	2	2	1	1	-	-	1
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	11	9	9	9	9	9	9	9	2	-	-	2
5	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bulukumba	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-
10	Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10	9	9	9	9	9	9	9	1	-	-	1
13	Dinas Perhubungan	3	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	1
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	10	9	9	9	9	9	9	9	1	-	-	1

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	5	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	2
17	Dinas Perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
18	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	11	10	10	10	10	10	10	10	1	-	-	1
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	15	14	14	14	14	14	14	14	1	-	-	1
21	Sekertariat Daerah	4	3	3	3	3	3	3	3	1	-	-	1
22	Sekertariat DPRD	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
23	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
26	Inspektorat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
27	Kantor Kecamatan Ujung Bulu	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
28	Kantor Kecamatan Ujung Loe	4	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2
29	Kantor Kecamatan Bulukumpa	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
30	Kantor Kecamatan Rilau Ale	3	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	1
31	Kantor Kecamatan Gantarang	3	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	1
32	Kantor Kecamatan Kindang	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
33	Kantor Kecamatan Herlang	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
34	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
35	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
36	Kantor Kecamatan Kajang	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-

Sumber : Bapperida Kab. Bulukumba, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 184 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2023 berjumlah 170 program (jumlah pada kolom 4).
   b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat 16 program yang tidak sama diantara kedua dokumen tersebut.
2. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 170 program (jumlah pada kolom 4), dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 170 program (jumlah pada kolom 5).
   b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD tidak terdapat program yang selisih diantara keduanya.
3. Kesesuaian program RKPD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 170 program (jumlahpada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 170 program (jumlah pada kolom 6).
   b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD tidak terdapat program yang selisih diantara keduanya.
4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 184 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 170 program (kolom 10). Dengan demikian terdapat 16 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 14).
   b. Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD dan terdapat program pada APBD yang tidak direncanakan pada RPJMD.

Menjadi hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II-265
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	16	16	16	16	16	16	-	-	-
2	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	25	25	25	25	25	25	-	-	-
3	RSUD H.A. Sultan Dg. Radja	3	3	3	3	3	3		-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	17	17	17	17	17	17	-	-	-
5	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan	15	15	15	15	15	15	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Pertanahan Kab. Bulukumba									
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	9	9	9	9	9	-	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10	10	10	10	10	10	-	-	-
8	Dinas Sosial	13	13	13	13	13	13	-	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	18	18	18	18	18	18	-	-	-
10	Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	13	13	13	13	13	13	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba	11	11	11	11	11	11	-	-	-
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	22	22	22	22	22	22	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	10	10	10	10	10	10	-	-	-
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	10	10	10	10	10	10	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	17	17	17	17	17	17	-	-	-
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	10	10	10	10	10	10	-	-	-
17	Dinas Perikanan	14	14	14	14	14	14	-	-	-
18	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga	17	17	17	17	17	17	-	-	-
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	25	25	25	25	25	25	-	-	-
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	21	21	21	21	21	21	-	-	-
21	Sekertariat Daerah	18	18	18	18	18	18	-	-	-
22	Sekertariat DPRD	14	14	14	14	14	14	-	-	-
23	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	16	16	16	16	16	16	-	-	-
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	14	14	14	14	14	14	-	-	-
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	12	12	12	12	12	-	-	-
26	Inspektorat Daerah	11	11	11	11	11	11	-	-	-
27	Kantor Kecamatan Ujung Bulu	7	7	7	7	7	7	-	-	-
28	Kantor Kecamatan Ujung Loe	7	7	6	7	6	6	-	1	1
29	Kantor Kecamatan Bulukumpa	8	8	8	8	8	8	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
30	Kantor Kecamatan Rilau Ale	5	5	5	5	5	5	-	-	-
31	Kantor Kecamatan Gantarang	5	5	5	5	5	5	-	-	-
32	Kantor Kecamatan Kindang	6	6	6	6	6	6	-	-	-
33	Kantor Kecamatan Herlang	5	5	5	5	5	5	-	-	-
34	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	5	5	5	5	5	5	-	-	-
35	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	6	6	6	6	6	6	-	-	-
36	Kantor Kecamatan Kajang	5	5	5	5	5	5	-	-	-
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12	12	12	12	12	12	-	-	-

Sumber : Bapperida Kab. Bulukumba, 2024

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 452 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 452 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 452 kegiatan. (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom 8).
   b. Untuk jumlah kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100 %.
2. RKPD dan APBD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 452 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 451 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 451 (jumlah pada kolom 7), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 1 (jumlah pada kolom10).
   b. Dari 1 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 100%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan anggaran dalam pelaksaan kegiatan yang masih kurang.

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2023 sudah mengacu kepada permendagri nomor 90 tahun 2020 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD terhadap Renja Perangkat daerah, RKPD terhadap APBD. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II-266
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	63	63	57	57	57	57	6	6	6
2	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	91	91	91	91	91	91	-	-	-
3	RSUD H.A. Sultan Dg. Radja	4	4	4	4	4	4	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	39	39	39	39	39	39	-	-	-
5	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bulukumba	30	30	30	30	30	30	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	14	14	14	14	14	-	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	22	22	22	22	22	22	-	-	-
8	Dinas Sosial	35	35	35	35	35	35	-	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	35	35	35	35	35	35	-	-	-
10	Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	33	33	33	33	33	33	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba	28	28	27	27	27	27	1	1	1
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	44	44	44	44	44	44	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	22	22	22	22	22	22	-	-	-
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	22	22	22	22	22	22	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	32	32	32	32	32	32	-	-	-
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	19	19	18	18	18	18	1	1	1
17	Dinas Perikanan	37	37	37	37	37	37	-	-	-
18	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga	24	24	24	24	24	24	-	-	-
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	54	54	54	54	54	54	-	-	-
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	50	50	50	50	50	50	-	-	-
21	Sekertariat Daerah	53	53	53	53	53	53	-	-	-
22	Sekertariat DPRD	41	41	40	40	40	40	1	1	1
23	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	41	41	40	40	40	40	1	1	1
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	91	91	91	91	91	91	-	-	-
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28	28	28	28	28	28	-	-	-
26	Inspektorat Daerah	29	29	29	29	29	29	-	-	-
27	Kantor Kecamatan Ujung Bulu	18	18	18	18	18	18	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
28	Kantor Kecamatan Ujung Loe	20	20	19	19	19	19	1	1	1
29	Kantor Kecamatan Bulukumpa	19	19	19	19	19	19	-	-	-
30	Kantor Kecamatan Rilau Ale	13	13	13	13	13	13	-	-	-
31	Kantor Kecamatan Gantarang	10	10	10	10	10	10	-	-	-
32	Kantor Kecamatan Kindang	11	11	11	11	11	11	-	-	-
33	Kantor Kecamatan Herlang	10	10	10	10	10	10	-	-	-
34	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	12	12	12	12	12	12	-	-	-
35	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	15	15	15	15	15	15	-	-	-
36	Kantor Kecamatan Kajang	9	9	9	9	9	9	-	-	-
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	29	29	29	29	29	29	-	-	-

Sumber : Bapperida Kab. Bulukumba, 2024

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.147 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 1.147 (jumlah pada kolom 4). Jumlah sub kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 1.147 (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom 9).
   b. Untuk jumlah sub kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100%.
2. RKPD dan APBD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.147 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 1.136 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.136 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 11 (jumlah pada kolom 10).
   b. Dari 11 sub kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD mendapatkan untuk alokasi Anggaran disebabkan perubahan anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 99,04%.
3. Renja-PD dan APBD
   a. Sub Kegiatan dalam Renja-PD adalah sejumlah 1.147 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 1.136 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.136 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 11 (jumlah pada kolom 10).
   b. Dari 11 sub kegiatan yang tidak sesuai antara Renja-PD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD mendapatkan untuk alokasi Anggaran.

3. Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2023

Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan RKPD Perubahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-267
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

No	Perangkat daerah	APBD	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	474.451.082.183	467.388.304.547	98,51
2	Dinas Kesehatan	193.465.478.853	167.573.471.871	86,62
3	Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sultan Dg. Raja	144.611.112.920	133.482.621.077	92,30
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	200.568.356.462	176.153.407.089	87,83
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.901.747.957	11.467.353.352	88,88
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.394.214.793	2.352.496.134	98,26
7	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.107.911.006	11.033.114.896	99,33
8	Dinas Sosial	4.564.820.126	4.449.884.914	97,48
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.620.789.704	18.542.204.135	94,50
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.112.627.106	4.040.732.721	98,25
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.741.160.523	5.572.178.411	97,06
12	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.145.555.725	11.013.945.811	90,68
13	Dinas Perhubungan	22.506.526.736	20.457.993.562	90,90
14	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	4.195.493.220	4.054.310.568	96,63
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6.107.094.515	6.005.882.016	98,34
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	3.105.296.372	2.865.219.409	92,27
17	Dinas Perikanan	37.537.769.339	31.436.733.319	83,75
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	18.177.174.535	17.709.461.270	97,43
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	53.641.104.439	50.759.269.638	94,63
20	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	49.916.676.832	46.786.558.554	93,73
21	Sekretariat Daerah	26.463.671.645	25.557.742.794	96,58
22	Sekretariat DPRD	43.078.825.935	40.021.883.368	92,90
23	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.889.674.801	7.555.350.155	84,99

No	Perangkat daerah	APBD	Realisasi	%
24	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	200.184.779.165	195.097.507.481	97,46
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.468.302.892	6.151.141.162	95,10
26	Inspektorat Daerah	12.304.515.746	9.741.615.402	79,17
27	Kantor Kecamatan Ujungbulu	13.388.928.149	13.269.260.224	99,11
28	Kantor Kecamatan Ujung Loe	2.941.254.237	2.870.813.384	97,61
29	Kantor Kecamatan Bulukumpa	5.055.580.749	5.001.380.690	98,93
30	Kantor Kecamatan Herlang	3.653.160.950	3.093.734.038	84,69
31	Kantor Kecamatan Rilau Ale	5.409.668.433	3.612.239.675	66,77
32	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	2.388.602.524	2.841.423.953	118,96
33	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	3.137.540.807	5.905.757.833	188,23
34	Kantor Kecamatan Kajang	2.869.666.587	3.953.943.294	137,78
35	Kantor Kecamatan Gantarang	5.967.691.542	5.329.402.875	89,30
36	Kantor Kecamatan Kindang	4.011.176.855	2.344.706.376	58,45
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.268.831.209	18.433.243.786	95,66
	JUMLAH BELANJA	**1.646.353.865.572**	**1.543.926.289.785**	**96,19**

Sumber : Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bulukumba tahun 2023 adalah Rp.1.646.353.865.572,00,- anggaran tersebut terbagi atas 37 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 sebesar 96,19%, Pengukuran capaian target kinerja outcome/output pada program/kegiatan/sub kegiatan yang diakumulasi berdasarkan urusan dan penyerapan dana program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, adapun Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-268
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol
1	91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI	ST
2	76% ≤ 90%	TINGGI	T
3	66% ≤ 75%	SEDANG	S
4	51% ≤ 65%	RENDAH	R
5	≤ 50%	SANGAT RENDAH	SR

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja dari 37 perangkat daerah, hanya ada 1 perangkat daerah yang masuk dalam kategori Sangat Rendah yaitu Kecamatan sebesar 47,75% ini dikarenakan ada belanja transfer yang tidak sempat dibayarkan, kategori Tinggi berjumlah 19 Perangkat Daerah dan Kategori sangat tinggi berjumlah 17.

Tabel II-269
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil RKPD

No	Urusan	Rata-Rata Tingkat Capaian Rkpd			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	55,83	**R**	72,95	**S**
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	73,33	**S**	71,54	**S**
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52,41	**R**	47,41	**SR**
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	79,47	**T**	79,99	**T**
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	94,88	**ST**	89,32	**T**
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	99,20	**ST**	96,63	**ST**
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	69,47	**S**	69,44	**S**
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	99,26	**ST**	98,38	**ST**
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	70,31	**S**	72,15	**S**
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	76,43	**T**	76,68	**T**
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	95,63	**ST**	92,98	**ST**
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97,86	**ST**	97,68	**ST**
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91,27	**ST**	81,32	**T**
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89,84	**T**	87,54	**T**
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	97,02	**ST**	89,71	**T**
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	99,14	**ST**	95,48	**ST**
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	80,36	**T**	81,39	**T**
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	99,08	**ST**	96,33	**ST**
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	95,06	**ST**	91,38	**ST**
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	100,00	**ST**	99,83	**ST**
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	100,00	**ST**	99,20	**ST**
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	99,73	**ST**	94,46	**ST**
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	99,17	**ST**	83,74	**T**
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	100,00	**ST**	86,49	**T**

No	Urusan	Rata-Rata Tingkat Capaian Rkpd			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
Urusan Pemerintahan Pilihan					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	98,07	**ST**	87,68	**T**
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	98,92	**ST**	110,34	**ST**
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	88,21	**T**	84,73	**T**
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	91,67	**ST**	98,64	**ST**
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	98,31	**ST**	94,37	**ST**
6	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	96,19	**ST**	66,31	**S**
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
1	Sekretariat Daerah	99,76	**ST**	95,07	**ST**
2	Sekretariat DPRD	85,18	**T**	82,85	**T**
Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang					
1	Perencanaan	91,04	**ST**	89,93	**T**
2	Keuangan	92,39	**ST**	85,94	**T**
3	Kepegawaian	97,10	**ST**	91,70	**ST**
4	Pendidikan dan Pelatihan	100,00	**ST**	95,60	**ST**
5	Penelitian dan Pengembangan	70,63	**S**	52,38	**R**
Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan					
1	Pengawasan	84,90	**T**	77,12	**T**
Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan					
1	Kecamatan	47,75	**SR**	67,11	**S**
	Unsur Pemerintahan Umum				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	93,75	**ST**	87,67	**T**
	RKPD Kabupaten Bulukumba	88,72	**T**	85,49	**T**

Sumber : Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2023

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan tahun 2022 dipengaruhi oleh:

a) Adanya pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebesar 75 Milyar yang tidak masuk ke dalam kas daerah. Sehingga realisasinya dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah rendah.

b) Adanya PNS yang pensiun di bulan Februari dan Mei 2022, adanya penganggaran untuk honararium sebanyak 2 org yang terealisasi hanya 1 org serta ada sisa tender dari belanja modal yaitu pengadaan sarana dan prasarana, rehabilitasi gedung kantor, tender website, dan sisa pengawasan.

c) Kurangnya jumlah kasus terhadap perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan sesuai petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik perlindungan perempuan dan anak dan adanya kelebihan pembayaran gaji dan tpp, serta kelebihan pembayaran listrik dan wifi.

d) Adanya klaim ganda atas lokasi tanah untuk Perluasan Pasar Tanete dan tidak didapatkan kesepakatan harga tanah lokasi TPA Borong Manempa Desa Polewali antara pemilik lahan dan tim pengadaan tanah kabupaten.

e) Banyaknya tugas mandatory yang harus dilaksanakan bersamaan namun penugasan yg dapat dibayarkan hanya satu dan banyaknya perubahan jadwal bimtek dan jadwal bimtek yg bertepatan dengan penugasan yang penting dan mendesak (hps, penanganan inflasi, reviu parsial)

f) Beberapa paket infrastruktur gagal tender diantaranya Pembangunan Lanjutan Mall Pelayanan Publik.
g) Penetapan Perubahan APBD 2022 tidak terjadi kesepakatan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Bulukumba sehingga beberapa kegiatan yang akan mengalami pergeseran dan tambah kurang anggaran serta penyesuaian nomenklatur tidak dapat direalisasikan.

a. Adanya Mutasi Keluar dan masa pensiun pada ASN yang mempengaruhi serapan anggaran gaji di OPD.
b. Adanya pekerjaan fisik yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan (KDP).
c. Beberapa pekerjaan fisik telat selesai 100%, namun keuangan belum terealisasi disebabkan tidak adanya anggaran pada pemerintah daerah, sehingga menjadi utang di tahun berikutnya.
d. Kegiatan tidak terlaksana karena keterbatasan waktu yang bertepatan dengan kegiatan yang lain.
e. Transfer dana bantuan keuangan provinsi yang tidak terealisasi sehingga pekerjaan fisik tidak dibayarkan meskipun sudah 100%.

5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1) Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2) Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3) Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4) Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5) Adannya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6) Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7) Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengant ahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan.
3) Pengelolaan data yang baik. Sebagai bentuk tindak lanjut dan rekomendasi dari penyajian data-data tersebut diatas, maka rekomendasi sebagai Identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut bisa bermanfaat bagi keberhasilan pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena :

Untuk lebih jelasnya terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada berikut:

1. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan di OPD.
2. Untuk sub kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD-Perubahan tetapi masuk ke dalam APBD-Perubahan diharapkan kedepannya OPD agar lebih memperhatikan sub kegiatan yang rutin dilakukan.
3. Perlu Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan karena masih banyaknya kesalahan penginputan utamanya pada nomenklatur urusan dan nomer rekening kegiatan sehingga menghambat proses pengendalian dan evaluasi.
4. Proses penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD/Renja OPD sudah seharusnya menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga memudahkan dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana dan memperbaiki mutu dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah.
5. Perlu peningkatan komitmen OPD dalam penyusunan evaluasi hasil Renja OPD setiap tahunnya, agar penyusunan dan penyampaian laporan tepat waktu setiap triwulan dan sesuai dengan format yang telah ada.
6. OPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPA OPD.
7. Hasil evaluasi RKPD-Perubahan Triwulan IV Tahun 2023 sedapat mungkin menjadi bahan perumusan kebijakan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahun selanjutnya.
8. Program dan kegiatan yang tidak berjalan efektif dan efisien sedapat mungkin di evaluasi kinerjanya sehingga bisa melahirkan kebijakan untuk penganggaran di tahun depan.

Tabel II-270
Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun Anggaran 2023

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																				Dinas Dikbud	
	1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																				Dinas Dikbud	
	1	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																				Dinas Dikbud	
	1	1	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi**																			Dinas Dikbud	
	1	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	Dok					16,00	**65.069**	-	15,00	65.744,05	93,75	101,04	0,00	15,00	65.744	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Laporan					-	**5.000**											Dinas Dikbud	
	1	1	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan**																			Dinas Dikbud	
	1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Pegawai Merima Gaji dan Tunjangan	Bulan					12,00	-	-	12,00	342.743.255,12	100,00	0,00	0,00	12,00	342.743.255	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Dok					12,00	-	-	11,81	1.069.106,25	98,38	0,00	0,00	11,81	1.069.106	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Bulan					12,00	-	-										SKB	
	1	1	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Jumlah laporan Akuntansi SKPD	**Dok**					**0**	-	-										Dinas Dikbud	
	1	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	**Dok**					**12**	-	-	11,94	10.345,35	99,50	0,00	0,00	11,94	10.345	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM**																			Dinas Dikbud	
	1	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Orang					3,00	-	-	1,49	17.000,00	49,83	0,00	0,00	1,49	17.000	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Peraturan yang diSosialisasi dan diimplementasikan	Keg					-	-	-										Dinas Dikbud	
	1	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Jumlah Peraturan yang diSosialisasi dan diimplementasikan	Orang					-	-	-										Dinas Dikbud	
	1	1	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran**																			Dinas Dikbud	
	1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	110.498,10	100,00	0,00	0,00	12,00	110.498	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Bulan					12,00	-	-	12,00	6.515,75	100,00	0,00	0,00	12,00	6.516	0,00		SKB	APBD Kab
	1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia, Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	keg					9,00	-	-	7,87	39.029,00	87,39	0,00	0,00	7,87	39.029	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Keg					1,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-			SKB	APBD Kab
	1	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Jumlah Tamu yang difasiltasi	%					100,00	-	-	45,97	6.030,00	45,97	0,00	0,00	45,97	6.030	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti	Bulan					12,00	-	-	12,00	155.246,35	100,00	0,00	0,00	12,00	155.246	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti	Keg					1,00	-	-	0,00	14.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.165			SKB	APBD Kab
	1	1	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang yang disiapkan**																			Dinas Dikbud	
	1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	103.714,84	100,00	0,00	0,00	12,00	103.715	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan	Bulan					12,00	-	-	0,00	15.205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206			SKB	APBD Kab
	1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa berprestasi	Bulan					12,00	-	-	12,00	260.368,40	100,00	0,00	0,00	12,00	260.368	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	Bulan					12,00	-	-	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000			SKB	APBD Kab
	1	1	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik**																				
	1	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4	unit					87,00	-	-	86,40	22.862,41	99,31	0,00	0,00	86,40	22.862	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan Kendaraan Jabatan/dinas Dalam Kondisi Baik	unit					37,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang bertambah, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang kondisi baik	%					100,00	-	-	100,00	14.880,00	100,00	0,00	0,00	100,00	14.880	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kondisi baik	Paket					5,00	-	-	5,00	315.591,88	100,00	0,00	0,00	5,00	315.592	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	Keg					1,00	-	-	0,00	22.619,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	SKB	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	1	1				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 –18 Thun yng blum mnyisikn pndidikn dsr dn tu mnngh yng prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM)**																			Dinas Dikbud	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	1	1	2			**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Presentase bangunan kondisi baik**																		Dinas Dikbud	
	1	1	2	02.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Penambahan RKB	%					100,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang					21,00	-	-	21,00	213.336,00	100,00	0,00	0,00	21,00	213.336	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					17,00	-	-	17,00	1.382.173,00	100,00	0,00	0,00	17,00	1.382.173	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang					11,00	-	-	11,00	203.669,00	100,00	0,00	0,00	11,00	203.669	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					54,00	-	-	54,00	4.079.055,63	100,00	0,00	0,00	54,00	4.079.056	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang					111,00	-	-	99,90	16.600.658,05	90,00	0,00	0,00	99,90	16.600.658	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	%					100,00	**2.603.932**	-	99,98	2.403.532,00	99,98	92,30	0,00	99,98	2.403.532	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	%					100	-	-	99,97	1.060.243,80	99,97	0,00	0,00	99,97	1.060.244	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	%					100,00	-	-	100,00	1.841.070,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1.841.070			Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	%					100,00	-	-	95,65	1.561.603,50	95,65	0,00	0,00	95,65	1.561.604	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Mebeluer Sekolah	%					100,00	-	-	100,00	1.997.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1.997.000	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket					18,00	-	-		4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional	Keg					1,00	-	-	0,71	56.887,05	70,56	0,00	0,00	0,71	56.887	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	%					100,00	-	-	82,78	1.010.135,90	82,78	0,00	0,00	82,78	1.010.136	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar	%					100,00	-	-	100,00	40.919.673,90	100,00	0,00	0,00	100,00	40.919.674	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Dana BOS	Sekolah					350,00	-	-	322,11	57.684,91	92,03	0,00	0,00	322,11	57.685	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek ARKAS Dana BOS SD	Dok					1,00	-	-	1,00	846.941,75	100,00	0,00	0,00	1,00	846.942	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.01	30	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		%					100,00	-	-	100,00	3.796.712,00	100,00	0,00	0,00	100,00	3.796.712	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Menyelesaikan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Menengah**																		Dinas Dikbud	
	1	1	2	02.02	4	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Sekolah					-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					1,00	-	-	1,00	267.921,15	100,00	0,00	0,00	1,00	267.921	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	%					100,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Labolatorium	Ruang					4,00	-	-	4,00	2.299.723,20	100,00	0,00	0,00	4,00	2.299.723	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang					14,00	-	-	13,82	515.448,17	98,70	0,00	0,00	13,82	515.448	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Paket					12	-	-	12,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	2.800.000	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	Ruang					2	-	-	2,00	97.344,00	100,00	0,00	0,00	2,00	97.344	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Labolatorium	Ruang					1,00	-	-	1,00	340.699,00	100,00	0,00	0,00	1,00	340.699	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	35	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket					1,00	-	-	1,00	110.340,00	100,00	0,00	0,00	1,00	110.340	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional	Keg					1,00	-	-	0,93	993.348,75	92,62	0,00	0,00	0,93	993.349	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					100,00	-	-	100,00	302.649,00	100,00	0,00	0,00	100,00	302.649	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlag sekolah yang mendapatkan dana BOS	Sekolah					70,00	-	-	69,98	15.857.459,53	99,97	0,00	0,00	69,98	15.857.460	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%					100,00	-	-	79,20	45.623,62	79,20	0,00	0,00	79,20	45.624	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek ARKAS Dana BOS SMP	Dok					1,00	-	-	0,99	355.592,75	98,85	0,00	0,00	0,99	355.593			Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase warga negara usia 5 – 6 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**																		Dinas Dikbud	
	1	1	2	02.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	%					100,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	lah Sekolah yang Mendapatkan Sarana, Prasarana dan Utilitas PA	%					100,00	-	-	98,00	2.677.823,41	98,00	0,00	0,00	98,00	2.677.823	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	%					100,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud	SKB
	1	1	2	02.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	%					100,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sekolah					3,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	%					100,00	-	-	70,00	32.132,75	70,00	0,00	0,00	70,00	32.133	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOP PAUD	%					100,00	-	-	98,91	6.642.000,00	98,91	0,00	0,00	98,91	6.642.000			Dinas Dikbud	
	1	1	2	02.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan PAUD	%					100,00	-	-	83,72	41.812,00	83,72	0,00	0,00	83,72	41.812	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**																		Dinas Dikbud	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	1	1	2	02.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	PKBM					24,00	-	-	23,88	573.333,30	99,50	0,00	0,00	23,88	573.333	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	%					100,00	-	-	100,00	2.436,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2.436	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOP Kesetaraan	%					100,00	-	-	97,04	3.539.678,00	97,04	0,00	0,00	97,04	3.539.678	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	2	02.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan PAUD	%					100,00	-	-	58,33	19.381,50	58,33	0,00	0,00	58,33	19.382	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**77,40**	**2,10**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	1	4			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah**																			Dinas Dikbud	
	1	1	4	02.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**																			Dinas Dikbud	
	1	1	4	02.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%					100,00	-	-	0,00	43.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.944	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	1	5			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan**																			Dinas Dikbud	
	1	1	5	02.01		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**																			Dinas Dikbud	
	1	1	5	02.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%					100,00	-	-	71,00	13.472,50	71,00	0,00	0,00	71,00	13.473	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
	1	1	5	02.02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**																			Dinas Dikbud	
	1	1	5	02.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%					100,00	-	-	90,00	17.432,25	90,00	0,00	0,00	90,00	17.432	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**80,50**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	**2.674.001,4**	**-**		**464.886.148,908**									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	**55,83**	**1,73**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	**R**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	2				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																					
	1	2	2			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**%ib hml y mdpt pl sht str %ib hml y mdpt fsl pl sht %by br lhr mr 0-28 hr y mdpt pl sht str %Blt y brmr 0–59 bl y mdpt pl sht %nk s pdk dsr y mdpt pl sht str %or brs 15-59 th y mdpt pl sht str %or brs lb dr 60 th y mdpt pl sht str %or y brs 15 th kts y mdpt Hptns y mdpt pl sht str %or y brs 15 th kts y mdrt DM mdpt pl sht str %or ODG y mdpt pl sht str %or tdg TBC y mdpt pl sht str %or tdg bsko Trnfks HIV y mdpt pl sht str %prsln d fsl pl sht%Blt y mdpt pl sht ss str (SPM) Rso Pkms thdp jm pdk Rso Dy Tmpg RS tdp jm pdk Rso Rm Skt/pdk**																			Dinkes	
	1	2	2	02.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan**																			Dinkes	
	1	2	2	02.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Paket					14,00	-	-	13,90	3.965.507,46	99,29	0,00	0,00	13,90	3.965.507	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit					10,00	-	-	9,80	2.470.612,81	98,00	0,00	0,00	9,80	2.470.613	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,99	-	99,45	0,00	0,00	0,99	-	0,00	0,00	RSUD	APBD Kab
	1	2	2	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket					2,00	-	-	1,99	8.895.459,26	99,45	0,00	0,00	1,99	8.895.459	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					24,00	-	-	23,72	7.522.960,12	98,83	0,00	0,00	23,72	7.522.960	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.01	15	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	15.794.737,00	100,00	0,00	0,00	1,00	15.794.737	0,00	0,00	RSUD	APBD Kab
	1	2	2	02.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Paket					1,00	-	-	1,00	3.017.033,28	100,00	0,00	0,00	1,00	3.017.033	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terpenuhinya Kebutuhan BMHP Rutin dan BMHP Program	Paket					3,00	-	-	2,98	5.797.796,54	99,17	0,00	0,00	2,98	5.797.797	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan prasarana puskesmas	Paket					0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00					Dinkes	
	1	2	2	02.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas	Unit					28,00	-	-	23,90	100.240,23	85,36	0,00	0,00	23,90	100.240	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya distribusi alat kesehatan, Obat, Vaksin, dan BMHP ke Puskesmas	%					100,00	-	-	99,51	64.339,00	99,51	0,00	0,00	99,51	64.339	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar, Pengembangan dan Rujukan**																				
	1	2	2	02.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang					425,00	-	-	246,42	120.214,00	57,98	0,00	0,00	246,42	120.214	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Orang					425,00	-	-	101,07	33.339,50	23,78	0,00	0,00	101,07	33.340	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	%					100,00	-	-	99,99	109.971,50	99,99	0,00	0,00	99,99	109.972	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Orang					772,00	-	-	466,44	41.343,00	60,42	0,00	0,00	466,44	41.343	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	1	2	2	02.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Orang					50,00	-	-	29,29	33.600,00	58,57	0,00	0,00	29,29	33.600	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Orang					40,00	-	-	22,00	58.851,25	55,00	0,00	0,00	22,00	58.851	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pertemuan Triwulan pengelola Kesehatan Usila Puskesmas	%					100,00	-	-	60,38	35.859,65	60,38	0,00	0,00	60,38	35.860	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya upaya promotif, preventif dan tatalaksana penyakit Tidak Menular Kususnya Penyakit Hipertensi dan penyakit jantung	Orang					500,00	-	-	300,00	56.440,00	60,00	0,00	0,00	300,00	56.440	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya upaya promotif, preventif dan tatalaksana penyakit Tidak Menular Khususnya Penyakit Diabetes Melitus	Orang					200,00	-	-	130,00	53.044,00	65,00	0,00	0,00	130,00	53.044	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Upaya Pengendalian Penyakit Jiwa bagi ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) berat	Orang					10,00	-	-	3,00	18.596,65	30,00	0,00	0,00	3,00	18.597	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya upaya pengendalian penyakit Tuberkulosis	Orang					50,00	-	-	7,25	10.875,70	14,50	0,00	0,00	7,25	10.876	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya upaya penanggulangan kasus HIV bagi kelompok rentan dan beresiko	%					100,00	-	-	87,11	70.520,50	87,11	0,00	0,00	87,11	70.521	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya penanganan KLB	dok					2,00	-	-	0,65	2.942,15	32,60	0,00	0,00	0,65	2.942	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase tanggap darurat pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana	dok					2,00	-	-	1,10	26.798,95	55,00	0,00	0,00	1,10	26.799	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dok					7,00	-	-	5,02	493.806,35	71,71	0,00	0,00	5,02	493.806	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%					100,00	-	-	99,99	10.016,00	99,99	0,00	0,00	99,99	10.016	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dok					5,00	-	-	4,38	485.456,80	87,50	0,00	0,00	4,38	485.457	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya upaya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dok					3,00	-	-	3,00	49.980,00	100,00	0,00	0,00	3,00	49.980	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dok					2,00	-	-	0,90	15.474,00	45,00	0,00	0,00	0,90	15.474	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	%					100,00	-	-	56,60	32.113,00	56,60	0,00	0,00	56,60	32.113	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Upaya Pengendalian Penyakit Jiwa bagi ODMK (Orang dengan masalah kejiwaan)	%					100,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Upaya Promotif dan preventif dalam Pengendalian Kesehatan Jiwa dan Penyalagunaan Napza	Orang					50,00	-	-	17,25	16.417,50	34,50	0,00	0,00	17,25	16.418	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya kegiatan pertemuan pengelola Gimul puskesmas dan terbentuknya Daerah binaan perkesmas	dok					4,00	-	-	3,50	50.724,50	87,50	0,00	0,00	3,50	50.725	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dok					5,00	-	-	4,00	298.198,75	80,00	0,00	0,00	4,00	298.199	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dok					20,00	-	-	16,71	50.926.752,78	83,55	0,00	0,00	16,71	50.926.753	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan deteksi dini Penyalagunaan Napza di Faskes dan sekolah	orang					100,00	-	-	21,50	9.666,00	21,50	0,00	0,00	21,50	9.666	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	%					100,00	-	-	80,10	4.371,00	80,10	0,00	0,00	80,10	4.371	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya verifikasi Penyelenggaraan Kab.Sehat yang meliputi penguatan Lembaga Forum Kuminikasi Kecamatan Sehat, koordinasi Tim Pembina dan Forum KKS, Orientasi forum komunikasi kecamatan sehat dan Verifikasi Lokus Penyelenggaraan Kab. Sehat	dok					5,00	-	-	4,88	142.044,72	97,50	0,00	0,00	4,88	142.045	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya penyediaan operasional pelayanan puskesmas	dok					20,00	-	-	12,13	15.203.974,15	60,65	0,00	0,00	12,13	15.203.974	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Rumah sakit Pratama	%					100,00	-	-	89,75	15.767,85	89,75	0,00	0,00	89,75	15.768	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	unit					20,00	-	-	15,12	373.826,30	75,60	0,00	0,00	15,12	373.826	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan					20,00	-	-	17,55	70.622,45	87,75	0,00	0,00	17,55	70.622	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	%					100,00	-	-	69,67	19.871,00	69,67	0,00	0,00	69,67	19.871	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit					5,00	-	-	4,50	320.210,40	90,00	0,00	0,00	4,50	320.210	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase Instansi/ sarana kesehatan yang menerapkan sistem informasi berbasis teknologi (WEB)**																			Dinkes	
	1	2	2	02.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya kegiatan maklumat layanan, monev Sp2tp, Workshop Pis PK,kinerja dan pendampingan penyusunan PTP	dok					3,00	-	-	2,37	81.703,95	79,00	0,00	0,00	2,37	81.704	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dok					3,00	-	-	2,65	68.808,45	88,33	0,00	0,00	2,65	68.808	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terpenuhinya alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan internet yang diadakan	%					100,00	-	-	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Layanan Kesehatan**																			Dinkes	
	1	2	2	02.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Terlaksanya Pertemuan tentang standar Pelayanan Kefarmasian Di apotek	unit					1,00	-	-	0,25	4.219,05	25,00	0,00	0,00	0,25	4.219	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi pengelolaan rumah sakit dan faskes lainnya sesuai standar	unit					2,00	-	-	0,11	284,55	5,46	0,00	0,00	0,11	285	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	unit					22,00	-	-	21,06	26.201,60	95,73	0,00	0,00	21,06	26.202	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	2	02.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dok					3,00	-	-	2,85	222.715,51	95,00	0,00	0,00	2,85	222.716	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**68,50**	**0,00**	**0,00**		**117.096.442**	**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja			**S**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	2	3			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar**																			Dinkes	
	1	2	3	02.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Praktek Tenaga Kesehatan yang dibina dan di awasi sesuai standar**																			Dinkes	
	1	2	3	02.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase praktik tenaga kesehatan yang dibina dan di awasi sesuai standar	dok					1,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	1 2 3 02.01 2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan	dok					2,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1 2 3 02.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar**																		Dinkes	
	1 2 3 02.02 1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dok					5,00	-	-	4,00	20.216,50	80,00	0,00	0,00	4,00	20.217	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1 2 3 02.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	orang					963,00	-	-	667,07	1.847.761,64	69,27	0,00	0,00	667,07	1.847.762	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1 2 3 02.02 3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dok					2,00	-	-	0,50	4.037,75	25,00	0,00	0,00	0,50	4.038	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1 2 3 02.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang telah ditingkatkan kompetensinya**																		Dinkes	
	1 2 3 02.03 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang					963,00	-	-	662,06	1.693.450,69	68,75	0,00	0,00	662,06	1.693.451	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**40,50**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
													Predikat Kinerja	**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1 2 4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar**																		Dinkes	
	1 2 4 02.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Pesentasi apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan Umot yg memiliki izin**																		Dinkes	
	1 2 4 02.01 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksanya validasi dan Pengawasan perizinan sarana Apotek dan Toko Obat	sarana					55,00	-	-	54,88	62.633,50	99,79	0,00	0,00	54,88	62.634	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1 2 4 02.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Persentasi PKRT yg duawasi dan bersertifikat laik**																		Dinkes	
	1 2 4 02.02 2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	dok					2,00	-	-	1,60	26.580,03	80,00	0,00	0,00	1,60	26.580	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1 2 4 02.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentasi produksi pangan industri Rumah tangga yg duawasi dan bersertifikat laik**																		Dinkes	
	1 2 4 02.03 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin Produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang diproduksi oleh IRT	dok					2,00	-	-	1,99	113.807,70	99,25	0,00	0,00	1,99	113.808	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1 2 4 02.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentasi TPM dan DAM yg diawasi dan bersertifikat laik**																		Dinkes	
	1 2 4 02.04 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	%					100,00	-	-	85,00	10.849,55	85,00	0,00	0,00	85,00	10.850	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1 2 4 02.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentasi pembinaan pd sentra nakanan jajanan dan pemberian stiker**																		Dinkes	
	1 2 4 02.05 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dok					1,00	-	-	0,95	6.762,00	95,00	0,00	0,00	0,95	6.762	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1 2 4 02.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentasi pengawasan post market pd produksi dan produk makanan minunan IRT**																		Dinkes	
	1 2 4 02.06 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	unit					50,00	-	-	49,70	223.887,20	99,40	0,00	0,00	49,70	223.887	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**93,07**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
													Predikat Kinerja	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1 2 5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga Ber PHBS**																		Dinkes	
	1 2 5 02.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentasi kelompok masyarakat di desa/kelurahan yg berpartisipasi dlm pembangunan kesehatan**																		Dinkes	
	1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%					100,00	-	-	99,99	53.799,00	99,99	0,00	0,00	99,99	53.799	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1 2 5 02.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentasi masyarakat ditempat kerja dan tempat umum yg ber PHBS**																		Dinkes	
	1 2 5 02.02 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	%					100,00	-	-	60,00	24.545,93	60,00	0,00	0,00	60,00	24.546	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1 2 5 02.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi UKBM yg purnama atau mandiri**																		Dinkes	
	1 2 5 02.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentasi posyandu purnama dan mandiri	%					100,00	-	-	99,97	11.251,35	99,97	0,00	0,00	99,97	11.251	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**86,65**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
													Predikat Kinerja	**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	1	2	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)**																			Dinkes	
	1	2	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																			Dinkes	
	1	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan	dok					5,00	-	-	2,75	27.010,14	55,00	0,00	0,00	2,75	27.010	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan	dok					50,00	-	-	25,00	21.755,45	50,00	0,00	0,00	25,00	21.755	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan	Laporan					7,00	-	-	2,65	2.167,45	37,86	0,00	0,00	2,65	2.167	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan	Laporan					7,00	-	-	4,52	37.743,90	64,64	0,00	0,00	4,52	37.744	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan**																			Dinkes	
	1	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kesehatan	Bulan					12,00	-	-	12,00	57.390.709,57	100,00	0,00	0,00	12,00	57.390.710	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kesehatan	%					100,00	-	-	100,00	24.030.769,89	100,00	0,00	0,00	100,00	24.030.770	0,00	0,00	RSUD	APBD Kab
	1	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok					4,00	-	-	4,00	615.761,10	99,98	0,00	0,00	4,00	615.761	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok					2,00	-	-	1,97	80.334,00	98,50	0,00	0,00	1,97	80.334	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya peyusunan laporan keuangan akhir tahun dinas kesehatan	Laporan					10,00	-	-	9,38	46.771,35	93,75	0,00	0,00	9,38	46.771	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Telaksananya Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Keuangan Dinas Kesehatan	%					100,00	-	-	99,99	53.309,27	99,99	0,00	0,00	99,99	53.309	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					25,00	-	-	25,00	15.536,15	99,99	0,00	0,00	25,00	15.536	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dok					5,00	-	-	5,00	20.328,15	99,90	0,00	0,00	5,00	20.328	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan**																			Dinkes	
	1	2	1	02.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Ritribusi Daerah Lingkup Dinas Kesehatan	dok					5,00	-	-	5,00	379.355,71	99,95	0,00	0,00	5,00	379.356	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan**																			Dinkes	
	1	2	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Puskesmas dan Dinas Kesehatan	Dok					5,00	-	-	3,13	6.182,65	62,50	0,00	0,00	3,13	6.183	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Puskesmas dan Dinas Kesehatan	dok					8,00	-	-	8,00	8.300,00	99,99	0,00	0,00	8,00	8.300	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Dinas Kesehatan**																			Dinkes	
	1	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan alat listrik/ penerangan sesuai kebutuhan kantor	Paket					7,00	-	-	7,00	30.334,10	99,99	0,00	0,00	7,00	30.334	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.	Paket					1,00	-	-	0,98	852.897,51	97,86	0,00	0,00	0,98	852.898	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan	Paket					4,00	-	-	3,20	20.551,00	80,00	0,00	0,00	3,20	20.551	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan kebutuhan ATK Dinas Kesehatan	Paket					2,00	-	-	1,99	43.606,56	99,50	0,00	0,00	1,99	43.607	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kesehatan	Paket					2,00	-	-	2,00	28.718,20	100,00	0,00	0,00	2,00	28.718	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan kebutuhan makan Minum Tamu Dinas Kesehatan	Laporan					5,00	-	-	4,90	26.691,50	98,00	0,00	0,00	4,90	26.692	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan program kesehatan	Laporan					34,00	-	-	34,00	353.939,49	99,99	0,00	0,00	34,00	353.939	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Mobil Ambulance dan Mobil Puskesmas Keliling di Puskesmas Balang Taroang dan RS Pratama**																			Dinkes	
	1	2	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Unit					2,00	-	-	1,00	555.000,00	50,00	0,00	0,00	1,00	555.000	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																			Dinkes	
	1	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan					12	-	-	3,00	380.089,12	25,00	0,00	0,00	3,00	380.089	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan					7,00	-	-	5,65	41.030,00	80,71	0,00	0,00	5,65	41.030	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terrlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					11,00	-	-	10,81	703.440,00	98,24	0,00	0,00	10,81	703.440	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																			Dinkes	
	1	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan Kepala Dinas Kesehatan	Unit					1	-	-	0,17	4.503,70	17,00	0,00	0,00	0,17	4.504	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional dinas kesehatan	Unit					35	-	-	28,00	204.067,70	80,00	0,00	0,00	28,00	204.068	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	**2**	**1**	**02.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terlaksanya BLUD Puskesmas**							**-**												
	1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya BLUD Puskesmas	%					100	-	-	50,00	74.183,05	50,00	0,00	0,00	50,00	74.183	0,00	0,00	Dinkes	APBD Kab
	1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Bulan					12	102.200.289,11	-	0,00	93.657.114,19	0,00	91,64	0,00	0,00	93.657.114	0,00	0,00	RSUD	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	77,94	**3,05**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja								
																	T	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN						**102.200.289,108**	**-**		**301.056.092,949**								
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN										**73,33**	**0,61**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
								PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN										**S**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	3				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																				PUTR	
	1	3	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)**																			PUTR	
	1	3	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																			PUTR	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	1	3	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA yang dihasilkan	dok					39,00	-	-	39,00	182.518,70	100,00	0,00	0,00	39,00	182.519	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**																		PUTR	
	1	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Dinas PUTR	Bulan					12,00	-	-	12,00	6.828.804,60	100,00	0,00	0,00	12,00	6.828.805	0,00	0,00	PUTR	
	1	3	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Jasa Administrasi keuangan	Bulan					12,00	-	-	12,00	236.840,00	100,00	0,00	0,00	12,00	236.840	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**																		PUTR	
	1	3	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					4,00	-	-	4,00	126.572,00	100,00	0,00	0,00	4,00	126.572	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					8,00	-	-	8,00	10.260,30	100,00	0,00	0,00	8,00	10.260	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan administrasi umum**																		PUTR	
	1	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalsi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersediaJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	%					100	924,20	-	100,00	2.567,00	100,00	277,75	0,00	100,00	2.567	0,00	0,00	PUTR	
	1	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersediaJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	%					100	-	-	100,00	9.869,00	100,00	0,00	0,00	100,00	9.869	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersediaJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Buah					2000	-	-	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,00	0	0,00	0,00	PUTR	
	1	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya rapat koordinasi dan konsultasiJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	orang					28,00	-	-	28,00	130.629,46	100,00	0,00	0,00	28,00	130.629	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang barang milik daerah yang diadakan**																		PUTR	
	1	3	1	02.07	3	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	%					100,00	-	-	100,00	3.573.716,00	100,00	0,00	0,00	100,00	3.573.716	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					7,00	-	-	7,00	94.481,55	100,00	0,00	0,00	7,00	94.482	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terbayarnya jasa penunjang urusan kantor**																		PUTR	
	1	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12	-	-	12,00	110.665,99	100,00	0,00	0,00	12,00	110.666	0,00	0,00	PUTR	
	1	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan					12	-	-	12,00	2.050.138,80	100,00	0,00	0,00	12,00	2.050.139	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah aset dinas PUTR yang dipeliharan**																		PUTR	
	1	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1	-	-	1,00	26.121,91	100,00	0,00	0,00	1,00	26.122	0,00	0,00	PUTR	
	1	3	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan PerizinannyaJumlah Pajak Kendaraan Dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang terbayarkan	Unit					46	-	-	46,00	85.955,95	100,00	0,00	0,00	46,00	85.956	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	Unit					1	-	-	1,00	61.217,63	100,00	0,00	0,00	1,00	61.218	0,00	0,00	PUTR	
	1	3	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laptop, AC, Printer dan PC yang dipeliharaJumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					20	-	-	18,75	16.450,00	93,75	0,00	0,00	18,75	16.450	0,00	0,00	PUTR	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**93,76**	**16,34**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	3	2			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**																		PUTR	
	1	3	2	02.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya penanganan bangunan SDA pengendali banjir, Embung/Bangunan Penampung ari lainnya, serta normalisasi saluran sungai**																		PUTR	
	1	3	2	02.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir yang terbangun	Paket					8,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	2	02.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang terbangun, Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Paket					4,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	2	02.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Meter					50,00	-	-	50,00	186.680,65	100,00	0,00	0,00	50,00	186.681	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	2	02.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Jumlah tenaga OP kanal banjir	km					5,00	-	-	5,00	104.244,00	100,00	0,00	0,00	5,00	104.244	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	2	02.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga petugas curah hujan	dok					432,00	-	-	432,00	21.035,00	100,00	0,00	0,00	432,00	21.035	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	2	02.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah anggota P3A yang dibina dan diberdayakan	Kelompok P3A					240,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	2	02.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jaringan irigasi kondisi baik**																		PUTR	
	1	3	2	02.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah Irigasi yang ditingkatkan	Km					12,50	-	-	11,00	16.358.133,06	88,00	0,00	0,00	11,00	16.358.133	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	2	02.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah Daerah irigasi yang direhabilitasi/dipeliharaPanjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km					8,71	-	-	8,71	13.036.935,32	100,00	0,00	0,00	8,71	13.036.935	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	2	02.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah tenaga OP (POB, PPA)Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	orang					65	-	-	65,00	121.601,43	100,00	0,00	0,00					PUTR	
	1	3	2	02.02	28	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	meningkatnya kualitas data inventarisasi irigasi (data aset/eksisting/kerusakan jaringan irigasi)	%					100,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**58,80**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja			**R**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	3	3			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmproln kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)**																		PUTR	
	1	3	3	02.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)**																		PUTR	
	1	3	3	02.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu	Liter/Detik					0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	3	02.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/perdeesaan atau SPAM tematik tertentu	Liter/Detik					1,00	-	-	1,00	2.429.554,56	100,00	0,00	0,00	1,00	2.429.555	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	1	3	3	02.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang menyelenggaran SPAM yang terbina dan terawasi	Kelompok					0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	33,33	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	SR	SR	SR			SR	SR		
	1	3	4			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan**																			PUTR	
	1	3	4	02.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitas pengurangan sampah diperkotaan**																			PUTR	
	1	3	4	02.01	5	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	R.Tangga					0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	SR	SR	SR			SR	SR		
	1	3	5			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**																				PUTR	
	1	3	5	02.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**																				PUTR	
	1	3	5	02.01	3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	R.Tangga					1000,00	-	-	1000,00	952.358,04	100,00	0,00	0,00	1000,00	952.358	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	5	02.01	4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	R.Tangga					0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	5	02.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	R.Tangga					0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	5	02.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	"Jumlah Pembangunan Pengelolaan air limbah domestik pada kawasan Permukiman "	Unit					0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	SR	SR	SR			SR	SR		
	1	3	6			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)**																			PUTR	
	1	3	6	02.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase panjang talud/drainase yang baik**																			PUTR	
	1	3	6	02.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen rencana sistem drainaseJumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dok					0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	6	02.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang DibangunPanjang talud jalan yang terbangun (M)	KM					3	-	-	2,83	1.162.781,31	94,23	0,00	0,00	2,83	1.162.781	0,00	0,00	PUTR	
	1	3	6	02.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang direhabilitasi	Meter					200	-	-	200,00	284.475,30	100,00	0,00	0,00	200,00	284.475	0,00	0,00	PUTR	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	64,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	R	SR	SR			SR	SR		
	1	3	7			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**prsentase pengembagan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata**																			PUTR	
	1	3	7	02.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan yang telah terbagun di Daerah Permukiman**																			PUTR	
	1	3	7	02.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Drainase Lingkungan,Capaian Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Capaian pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meter					195,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	SR	SR	SR			SR	SR		
	1	3	8			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**																				PUTR	
	1	3	8	02.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**																				PUTR	
	1	3	8	02.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dok					400,00	-	-	400,00	244.911,90	100,00	0,00	0,00	400,00	244.912	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	8	02.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	%					100	-	-	100,00	42.337.779,64	100,00	0,00	0,00	100,00	42.337.780	0,00	0,00	PUTR	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	1	3	10			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan**																			PUTR	
	1	3	10	02.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase jalan dalam kondisi baik**																			PUTR	
	1	3	10	02.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan, Jumlah Dokumen survey kondisi jalan	Dok					2,00	-	-	2,00	208.203,88	100,00	0,00	0,00	2,00	208.204	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	10	02.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	%					100	-	-	100,00	837.439,45	100,00	0,00	0,00	100,00	837.439			PUTR	APBD Kab
	1	3	10	02.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM					20,995	-	-	15,52	47.910.983,14	73,93	0,00	0,00	15,52	47.910.983	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	10	02.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	%					100	-	-	100,00	990.571,08	100,00	0,00	0,00	100,00	990.571	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	10	02.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km					40,534	-	-	40,50	33.274.849,41	99,92	0,00	0,00	40,50	33.274.849	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	10	02.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM					0	-	-	0,00	97.231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97.232	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	10	02.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Meter					45	-	-	45,00	1.653.259,62	100,00	0,00	0,00	45,00	1.653.260	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
	1	3	10	02.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	%					100	-	-	100,00	169.689,00	100,00	0,00	0,00	100,00	169.689	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	84,23	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	T	SR	SR			SR	SR		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)						
	1	3	11			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga kerja trampil yang bersertifikat**																		PUTR	
	1	3	11	02.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga kerja terampil yang dilatih**																		PUTR	
	1	3	11	02.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah orang yang dilatih dan disertifikasi	Orang					100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	
	1	3	11	02.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peralatan laboratorium dan dokumen yang diuji**																		PUTR	
	1	3	11	02.02	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah peralatan laboratorium diuji dan jumlah dokumen uji lab yang diterbitakan	Dok					100	-	-	100,00	26.257,00	100,00	0,00	0,00	100,00	26.257	0,00	0,00	PUTR	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**50,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	3	12			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Jumlah dokumen penataan ruang yang hasilkan**																		PUTR	
	1	3	12	02.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penyusunan rencana tata ruang.2. tersususnnya persetujuan subtansi RTRW**																		PUTR	
	1	3	12	02.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyusunan rencana tata ruang.2. tersususnnya persetujuan subtansi RTRW	**%**					**100**	-	-	100,00	181.586,77	100,00	0,00	0,00	100,00	181.587	0,00	0,00	PUTR	
	1	3	12	02.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Frekuensi pengawasan dan koordinasi yang dilakukan**																		PUTR	
	1	3	12	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Frekuensi pengawasan yang dilaksanakan	Dok					12	-	-	12,00	16.036,72	100,00	0,00	0,00	12,00	16.037	0,00	0,00	PUTR	
	1	3	12	02.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Frekuensi koordinasi TKPRD yang dilaksanakan	Kali					12	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	PUTR	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**66,67**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**S**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
														924,200	**-**		**176.153.407,103**									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		**52,41**	**1,49**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN		**R**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	4				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																				Dinas P3	
	1	4	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)**							**-**											Dinas P3	
	1	4	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD**																		Dinas P3	
	1	4	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	dok					30	-	-	29,00	28.634,30	96,67	0,00	0,00	29,00	28.634	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	dok					30	-	-	29,00	12.425,80	96,67	0,00	0,00	29,00	12.426	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum,Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun**																		Dinas P3	
	1	4	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	Bulan					12	-	-	11,90	2.279.383,91	99,13	0,00	0,00	11,90	2.279.384	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa administrasi Keuangan ASN yang tersedia	Bulan					12	-	-	11,98	97.283,00	99,83	0,00	0,00	11,98	97.283	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan SKPD	Bulan					12	-	-	12,00	14.760,00	100,00	0,00	0,00	12,00	14.760			Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dok					1,00	-	-	0,94	13.775,00	93,75	0,00	0,00	0,94	13.775	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim dan Bimbingan Teknis**																		Dinas P3	
	1	4	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim	Orang					2,00	-	-	2,00	35.982,50	100,00	0,00	0,00	2,00	35.983	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Orang					3,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum**																		Dinas P3	
	1	4	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis					9	-	-	8,00	14.992,84	88,89	0,00	0,00	8,00	14.993	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit					7	-	-	6,64	96.258,02	94,86	0,00	0,00	6,64	96.258			Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Petalatan rumah tangga yang tersedia	%					100	-	-	99,50	24.482,90	99,50	0,00	0,00	99,50	24.483	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan makan dan minum tamu serta rapat yang tersedia	jenis					35	-	-	34,17	63.085,85	97,62	0,00	0,00	34,17	63.086	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Bulan					12	-	-	11,99	11.491,20	99,92	0,00	0,00	11,99	11.491			Dinas P3	
	1	4	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah biaya rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksanan	Laporan					34	-	-	33,42	149.210,37	98,28	0,00	0,00	33,42	149.210	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum**																		Dinas P3	
	1	4	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit					**0**	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,98	334.055,00	98,44	0,00	0,00	0,98	334.055	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	Unit					2,00	-	-	2,00	14.685,00	100,00	0,00	0,00	2,00	14.685	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum**																		Dinas P3	
	1	4	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Biaya tagihan listrik, wifi, dan air	Laporan					24	-	-	20,00	48.165,01	83,33	0,00	0,00	20,00	48.165			Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	Laporan					4	-	-	4,00	509.080,00	100,00	0,00	0,00	4,00	509.080	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum**																		Dinas P3	
	1	4	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Unit					23	-	-	20,53	88.158,00	89,26	0,00	0,00	20,53	88.158	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	unit					38,00	-	-	38,00	27.610,00	100,00	0,00	0,00	38,00	27.610	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**87,44**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)						
																	Predikat Kinerja	T	SR	SR			SR	SR		
	1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)						-													Dinas P3	
	1	4	2	02.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat Korban bencana atau Relokasi Program Pemerintah																		Dinas P3	
	1	4	2	02.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perumahan rawan bencana dan yang terkena relokasi	Dok					1,00	-	-	0,60	27.585,40	59,90	0,00	0,00	0,60	27.585	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	2	02.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen/Database Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota"																		Dinas P3	
	1	4	2	02.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah korban bencana yang direhab	%					100,00	-	-	91,00	83.478,31	91,00	0,00	0,00	91,00	83.478	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	2	02.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana yang terbangun	%					100,00	-	-	95,00	240.051,60	95,00	0,00	0,00	95,00	240.052	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	81,97	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	T	SR	SR			SR	SR		
	1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau																		Dinas P3	
	1	4	3	02.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen dan database Penetapan lokasi permukiman kumuh																		Dinas P3	
	1	4	3	02.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman Kumuh							-	-										Dinas P3	
	1	4	3	02.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan dan rekomendasi Pencegahan Tumbuh kembang Permukiman Kumuh	Dok					1	-	-	0,95	326.419,80	95,00	0,00	0,00	0,95	326.420	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	3	02.02	3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Kelompok					3	-	-	2,67	12.529,00	89,00	0,00	0,00	2,67	12.529	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	3	02.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani																		Dinas P3	
	1	4	3	02.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah Rumah Layak Huni yang direhab	Unit					106	-	-	98,90	332.501,80	93,30	0,00	0,00	98,90	332.502	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
	1	4	3	02.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Paket					1	-	-	0,73	2.829.377,19	72,67	0,00	0,00	0,73	2.829.377	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	87,49	0	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	T	SR	SR			SR	SR		
	1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pemukiman Yang Tertata																		Dinas P3	
	1	4	5	02.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perencanaan dan Ketersediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan							-											Dinas P3	
	1	4	5	02.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU Perumahan yang terbangun dan jumlah sarana prasarana yang terpelihara	%					100	-	-	61,00	46.889,03	61,00	0,00	0,00	61,00	46.889	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	61,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	R	SR	SR			SR	SR		
														-	-		7.762.350,818									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	79,47	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	T	SR	SR			SR	SR		
	1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			Satpol PP & Damkar	
	1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPBD)																		Satpol PP & Damkar	
	1	5	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu																		Satpol PP & Damkar	
	1	5	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen, renja perubahan, renja RKA, DPA, RKAP, DPAP, Renstra dan forum OPD Serta Terbayarnya gaji Operator SIPD/Fmis	dok					6	-	-	12,00	62.234,50	200,00	0,00	0,00	12,00	62.235	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					2	-	-										Satpol PP & Damkar	
	1	5	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					4	-	-										Satpol PP & Damkar	
	1	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persantase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana									0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12	-	-	12,00	868.783,76	100,00	0,00	0,00	12,00	868.784	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12	-	-	11,90	4.219.111,55	99,14	0,00	0,00	11,90	4.219.112	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	144.038,65	100,00	0,00	0,00	12,00	144.039			BPBD	APBD Kab
	1	5	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya jasa administrasi pengelolaan keuangan	Bulan					12	-	-	12,00	64.860,00	100,00	0,00	0,00	12,00	64.860	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	-	-	1,00	4.921,30	100,00	0,00	0,00	1,00	4.921	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					12	-	-	12,00	19.420,00	100,00	0,00	0,00	12,00	19.420	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah									0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-			Satpol PP & Damkar	
	1	5	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1	-	-	1,00	11.910,00	100,00	0,00	0,00	1,00	11.910	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana																			
	1	5	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					5	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	1	5	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					12	-	-	11,12	23.268,25	92,65	0,00	0,00	11,12	23.268			BPBD	APBD Kab
	1	5	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**																			
	1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket					12,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket					12	-	-	11,98	26.796,15	99,87	0,00	0,00	11,98	26.796	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	-	-	11,85	73.413,15	98,72	0,00	0,00	11,85	73.413	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	-	-	1,00	1.814,00	100,00	0,00	0,00	1,00	1.814	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1	-	-	1,00	22.624,05	100,00	0,00	0,00	1,00	22.624	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	-	-	1,00	9.040,25	100,00	0,00	0,00	1,00	9.040	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	-	-	1,00	3.276,78	100,00	0,00	0,00	1,00	3.277	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	-	-	12,00	70.937,00	100,00	0,00	0,00	12,00	70.937	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**																			
	1	5	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					12,00	-	-	11,97	62.436,35	99,78	0,00	0,00	11,97	62.436	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit					6,00	-	-	6,00	19.055,00	100,00	0,00	0,00	6,00	19.055	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana**																			
	1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan					12	-	-	11,79	25.401,66	98,26	0,00	0,00	11,79	25.402	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					12	-	-	12,00	18.445,00	100,00	0,00	0,00	12,00	18.445	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12	-	-	10,00	36.067,93	83,33	0,00	0,00	10,00	36.068	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan					12	-	-	12,00	1.744,85	100,00	0,00	0,00	12,00	1.745	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana**																			
	1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit					12	-	-	11,94	76.506,96	99,46	0,00	0,00	11,94	76.507	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit					12	-	-										Satpol PP & Damkar	
	1	5	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1	-	-	1,00	7.500,00	100,00	0,00	0,00	1,00	7.500	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					24	-	-	24,00	364.266,41	100,00	0,00	0,00	24,00	364.266	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					6	-	-	6,00	7.430,00	100,00	0,00	0,00	6,00	7.430	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**86,17**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja			**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	5	3			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)**							-												BPBD	
	1	5	3	02.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana**																		BPBD	
	1	5	3	02.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Sekolah					10	-	-	8,90	14.260,70	89,00	0,00	0,00	8,90	14.261	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	3	02.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang terlaksana**																		BPBD	
	1	5	3	02.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dok					1	-	-	0,97	99.434,30	96,96	0,00	0,00	0,97	99.434	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	3	02.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit					10,00	-	-	9,38	-	93,75	0,00	0,00	9,38	-	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	3	02.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dok					1,00	-	-	0,96	340.932,30	95,63	0,00	0,00	0,96	340.932	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	3	02.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang					100,00	-	-	82,00	40.999,85								BPBD	
	1	5	3	02.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana**																		BPBD	
	1	5	3	02.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Orang					12,00	-	-	11,97	537.779,05	99,74	0,00	0,00	11,97	537.779	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab
	1	5	3	02.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang					12,00	-	-										BPBD	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**95,02**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	1	5	2			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)**																		Satpol PP & Damkar	
	1	5	2	02.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum)**																		Satpol PP & Damkar	
	1	5	2	02.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	terbayarnya gaji non ASN Satuan Polisi Pamong Praja	Bulan					12,00	-	-	12,00	2.478.247,02	100,00	0,00	0,00	12,00	2.478.247	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	2	02.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dok					30,00	-	-										Satpol PP & Damkar	
	1	5	2	02.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Bulan					12,00	-	-										Satpol PP & Damkar	
	1	5	2	02.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKAD**																		Satpol PP & Damkar	
	1	5	2	02.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan					1,00	-	-	0,96	73.028,75	96,00	0,00	0,00	0,96	73.029	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	2	02.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan					12,00	-	-										Satpol PP & Damkar	
	1	5	2	02.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan					12,00	544.350,25	-	11,88	538.969,75	98,96	99,01	0,00	11,88	538.970	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	98,32	33,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	1	5	4			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM), Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**																		Satpol PP & Damkar	
	1	5	4	02.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pencegahan Pemadam, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran**																		Satpol PP & Damkar	
	1	5	4	02.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					12,00	-	-	12,00	2.958.060,00	100,00	0,00	0,00	12,00	2.958.060	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
	1	5	4	02.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit					9,00	-	-	9,00	58.595,75	100,00	0,00	0,00	9,00	58.596	0,00	0,00	Satpol PP & Damkar	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
														544.350,250	-		13.385.611,033									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	94,88	8,25	0,00			0,00	0,00		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	ST	SR	SR			SR	SR		
	1	6				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																				Dinas Sosial	
	1	6	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Sosial)**																		Dinas Sosial	
	1	6	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																		Dinas Sosial	
	1	6	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					4	-	-	4,00	28.778,50	100,00	0,00	0,00	4,00	28.779	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Dok					2	-	-	2,00	10.105,00	100,00	0,00	0,00	2,00	10.105	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Tahunan LKJ, LKPJ, LPPD, dan LAKIP yang Tersedia	Dok					5	-	-	5,00	13.848,00	100,00	0,00	0,00	5,00	13.848	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																		Dinas Sosial	
	1	6	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.798.990,22	100,00	0,00	0,00	12,00	1.798.990	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	111.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	111.000	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	-	-	1,00	1.650,00	100,00	0,00	0,00	1,00	1.650	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersdianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**																		Dinas Sosial	
	1	6	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	727,45	-	1,00	725,25	100,00	99,70	0,00	1,00	725	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit					1,00	-	56.942,40	1,00	54.484,55								Dinas Sosial	
	1	6	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	497,60	-	1,00	497,60	100,00	100,00	0,00	1,00	498	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	20.168,00	100,00	0,00	0,00	1,00	20.168	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.820,00	100,00	0,00	0,00	12,00	1.820	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Tersedia	Bulan					12,00	-	-	12,00	5.015,35	100,00	0,00	0,00	12,00	5.015	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali					40,00	-	-	40,00	63.705,15	100,00	0,00	0,00	40,00	63.705	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**adanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		Dinas Sosial	
	1	6	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					4,00	-	-										Dinas Sosial	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)						
	1	6	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																			Dinas Sosial	
	1	6	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	31.575,09	100,00	0,00	0,00	12,00	31.575	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	13.560,00	100,00	0,00	0,00	12,00	13.560	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																			Dinas Sosial	
	1	6	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bulan					12,00	-	-	11,00	62.366,62	91,67	0,00	0,00	11,00	62.367	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bulan					12,00	-	-	12,00	3.170,00	100,00	0,00	0,00	12,00	3.170	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan					12,00	-	-										Dinas Sosial	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,48**	**12,48**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	6	2			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan**																			Dinas Sosial	
	1	6	2	02.03		**Pengembangnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**berkembangnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**																			Dinas Sosial	
	1	6	2	02.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang Mendapatkan Peningkatan Potensi dan Intensif	Bulan					12,00	-	-	12,00	152.082,00	100,00	0,00	0,00	12,00	152.082	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	2	02.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					10,00	-	-	10,00	22.019,80	100,00	0,00	0,00	10,00	22.020	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	2	02.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang Mendapatkan Peningkatan Potensi	%					95,00	-	-	95,00	12.156,00	100,00	0,00	0,00	95,00	12.156	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	2	02.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Visit Home)	Bulan					12	-	-	10,80	5.012,00	90,00	0,00	0,00	10,80	5.012	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**97,50**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	6	4			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)**																			Dinas Sosial	
	1	6	4	02.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**terpeliharanya Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**																			Dinas Sosial	
	1	6	4	02.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					75,00	-	-	75,00	59.100,63	100,00	0,00	0,00	75,00	59.101	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	4	02.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Pakaian	Orang					160,00	-	-	160,00	19.040,00	100,00	0,00	0,00	160,00	19.040	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	4	02.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					20,00	-	-	20,00	68.076,24	100,00	0,00	0,00	20,00	68.076	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	4	02.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rujukan ke Fasilitas Rehabilitasi Sosial	Bulan					12,00	-	-	12,00	8.265,20	100,00	0,00	0,00	12,00	8.265	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	4	02.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**terpeliharanya Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**																			Dinas Sosial	
	1	6	4	02.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Paket					8,00	-	-	8,00	21.798,36	100,00	0,00	0,00	8,00	21.798	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	4	02.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Paket					2,00	-	-	2,00	11.475,65	100,00	0,00	0,00	2,00	11.476	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	4	02.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Fasilitas Rehabilitasi Sosial	Bulan					12,00	-	-	12,00	10.694,70	100,00	0,00	0,00	12,00	10.695	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	6	5			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Jumlah PMKS yang Tervalidasi dalam data terpadu DTKS dan SIKS-NGPersentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial**																			Dinas Sosial	
	1	6	5	02.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**terpeliharanya Anak-Anak Terlantar**																			Dinas Sosial	
	1	6	5	02.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Bulan					12,00	-	-	12,00	11.948,75	100,00	0,00	0,00	12,00	11.949	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	5	02.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data PMKS yang Valid dan Jumlah Pemberian Bantuan Sosial yang diberikan pada PMKS/PPKS**																			Dinas Sosial	
	1	6	5	02.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping dan Operator yang Memperoleh Biaya Operasional Pendataan dan Pengelolaan Data (validasi Data DTKS,PMKS,PBI BPJS Kesehatan) dan Pelabelan Penerimaan Bantuan	Bulan					12,00	-	-	11,16	74.308,00	93,00	0,00	0,00	11,16	74.308	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	5	02.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Masyarakat Miskin yang Memperoleh Surat Rekomendasi untuk BPJS Kesehatan	Bulan					12,00	-	-	12,00	321.193,80	100,00	0,00	0,00	12,00	321.194	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	5	02.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					20,00	-	-	20,00	837.138,24	100,00	0,00	0,00	20,00	837.138	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**98,25**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	6	6			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)**																			Dinas Sosial	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)		
	1	6	6	02.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**terlindungnya Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**																			Dinas Sosial	
	1	6	6	02.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Bulan					12	-	-	12,00	20.805,15	100,00	0,00	0,00	12,00	20.805	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
	1	6	6	02.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**																			Dinas Sosial	
	1	6	6	02.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Bulan					12,00	-	-	12,00	497.948,52	100,00	0,00	0,00	12,00	497.949	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	1	6	7			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara**																			Dinas Sosial	
	1	6	7	02.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**										-								Dinas Sosial	
	1	6	7	02.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Mendapatkan Pemeliharaan	Paket					3,00	-	-	3,00	75.362,55	100,00	0,00	0,00	3,00	75.363	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN			**1.225,050**	**56.942,400**		**4.449.884,914**								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	**99,20**	**2,08**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	7				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																				DPMPTSPTK	
	2	7	2			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertahun, Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)**																			DPMPTSPTK	
	2	7	2	02.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro**																			DPMPTSPTK	
	2	7	2	02.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dok					1,00	-	-											DPMPTSPTK	
	2	7	2	02.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan					10,00	-	-											DPMPTSPTK	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	7	3			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**																			DPMPTSPTK	
	2	7	3	02.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi**																			DPMPTSPTK	
	2	7	3	02.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang					480,00	-	-	479,57	117.766,25	99,91	0,00	0,00	479,57	117.766	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	7	3	02.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Pelatihan/sosialisasi**																			DPMPTSPTK	
	2	7	3	02.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga					1,00	-	-	0,77	10.636,00	76,67	0,00	0,00	0,77	10.636	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	7	3	02.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantua**																			DPMPTSPTK	
	2	7	3	02.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan	Palet					1,00	-	-	0,88	35.874,49	87,67	0,00	0,00	0,88	35.874	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**88,08**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	7	4			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan**																			DPMPTSPTK	
	2	7	4	02.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sosialisasi para penyandang Disabilitas**																			DPMPTSPTK	
	2	7	4	02.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang					4	-	-											DPMPTSPTK	
	2	7	4	02.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Data dan informasi pasar kerja online**																			DPMPTSPTK	
	2	7	4	02.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang					10,00	-	-											DPMPTSPTK	
	2	7	4	02.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulangan pekerja migran di Indonesia**																			DPMPTSPTK	
	2	7	4	02.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang					10	-	-	9,70	63.680,65	97,00	0,00	0,00	9,70	63.681	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**97,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	7	5			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).**																			DPMPTSPTK	
	2	7	5	02.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)**																			DPMPTSPTK	
	2	7	5	02.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan					10	-	-											DPMPTSPTK	
	2	7	5	02.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan**																			DPMPTSPTK	
	2	7	5	02.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara					5	-	-	4,64	44.428,42	92,81	0,00	0,00	4,64	44.428	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	2	7	5	02.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana	Kegiatan					1,00	-	-										DPMPTSPTK	
																		92,81	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	-	-		272.385,811								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	69,47	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	S	SR	SR			SR	SR		
	2	8				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																			DPPKBP3A	
	2	8	2			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD**																		DPPKBP3A	
	2	8	2	02.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten yang Terlaksana**																		DPPKBP3A	
	2	8	2	02.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD					37,00	-	-										DPPKBP3A	
	2	8	2	02.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomu pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten yang terlaksana**																		DPPKBP3A	
	2	8	2	02.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terciptanya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Dok					5,00	-	-	5,00	199.683,44	100,00	0,00	0,00	5,00	199.683	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	8	3			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**																		DPPKBP3A	
	2	8	3	02.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase pencegahan kekerasan terhadap perempuan**																		DPPKBP3A	
	2	8	3	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok					5,00	-	-	5,00	37.943,20	100,00	0,00	0,00	5,00	37.943	0,00	0,00	DPPKBP3A	
	2	8	3	02.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**persentase pencegahan kekerasan terhadap perempuan**																		DPPKBP3A	
	2	8	3	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					27,00	-	-	27,00	26.174,80	100,00	0,00	0,00	27,00	26.175	0,00	0,00	DPPKBP3A	
	2	8	3	02.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana**																		DPPKBP3A	
	2	8	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang					6,00	-	-										DPPKBP3A	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	8	4			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga**																		DPPKBP3A	
	2	8	4	02.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupatel/Kota yang Terlaksana**																		DPPKBP3A	
	2	8	4	02.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dok					2,00	-	-	2,00	199.518,05	100,00	0,00	0,00	2,00	199.518	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	8	4	02.03		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya yang terlaksana**																		DPPKBP3A	
	2	8	4	02.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan					2,00	-	-										DPPKBP3A	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	8	6			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak**																		DPPKBP3A	
	2	8	6	02.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terintegrasinya komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk pemenuhan hak-hak anak.**																		DPPKBP3A	
	2	8	6	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi					4,00	-	-	4,00	199.026,59	100,00	0,00	0,00	4,00	199.027	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	8	7			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**																		DPPKBP3A	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	2	8	7	02.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota yang terlaksana**																		DPPKBP3A	
	2	8	7	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok					2,00	-	-	2,00	38.183,30	100,00	0,00	0,00	2,00	38.183	0,00	0,00	DPPKBP3A	
	2	8	7	02.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana**																		DPPKBP3A	
	2	8	7	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					27,00	-	-	24,00	43.026,65	88,89	0,00	0,00	24,00	43.027	0,00	0,00	DPPKBP3A	
	2	8	7	02.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok					10,00	-	-											DPPKBP3A	
	2	8	7	02.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anaknya memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksanan**																		DPPKBP3A	
	2	8	7	02.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok					2,00	-	-	2,00	46.974,70	100,00	0,00	0,00	2,00	46.975	0,00	0,00	DPPKBP3A	
																		96,30	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											
															Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN											
														-	**-**		**790.530,728**									
																		99,26	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN											
															PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	9				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																				Disperketanpan	
	2	9	2			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)**																		Disperketanpan	
	2	9	2	02.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah**																		Disperketanpan	
	2	9	2	02.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur	Paket					1,00	-	-											Disperketanpan	
	2	9	2	02.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit					1,00	-	-											Disperketanpan	
																		0,00	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											
															Predikat Kinerja			**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	9	3			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita, Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita**																		Disperketanpan	
	2	9	3	02.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Terlaksanannya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan prasarana pertanian**																		Disperketanpan	
	2	9	3	02.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen	Dok					1,00	-	-	0,94	21.000,00	93,75	0,00	0,00	0,94	21.000	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	2	9	3	02.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit					1	-	-	0,94	14.442,00	93,75	0,00	0,00	0,94	14.442	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	2	9	3	02.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemeliharaan cadangan pangan kabupaten**																		Disperketanpan	
	2	9	3	02.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan					1	-	-	0,94	5.577,50	93,75	0,00	0,00	0,94	5.578	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	2	9	3	02.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Kg					1000,00	-	-	937,50	11.002,00	93,75	0,00	0,00	937,50	11.002	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	2	9	3	02.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi**																		Disperketanpan	
	2	9	3	02.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan					15,00	-	-	14,06	124.880,00	93,75	0,00	0,00	14,06	124.880	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
																		93,75	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											
															Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	9	4			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)**																		Disperketanpan	
	2	9	4	02.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota**																		Disperketanpan	
	2	9	4	02.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Dok					1,00	-	-											Disperketanpan	
	2	9	4	02.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)	Kg					10000,00	-	-	9375,00	62.289,80	93,75	0,00	0,00	9375,00	62.290	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
																		93,75	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											
															Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	9	5			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman**																		Disperketanpan	
	2	9	5	02.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten Bulukumba**																		Disperketanpan	
	2	9	5	02.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dok					1,00	-	-	0,94	23.857,44	93,75	0,00	0,00	0,94	23.857	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
																		93,75	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											
															Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)		
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN					-		-		263.048,739									
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN										70,31	0,00	0,00			0,00	0,00		
								PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN										S	SR	SR			SR	SR		
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																				Dinas P3	
	2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi																			Dinas P3	
	2	10	4	02.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara Pertanahan yang terselesaikan																			Dinas P3	
	2	10	4	02.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah	%					100,00	-	-	73,00	14.730,68	73,00	0,00	0,00	73,00	14.731	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										73,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
								Predikat Kinerja										S	SR	SR			SR	SR		
	2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum																			Dinas P3	
	2	10	5	02.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah penyelesaian Ganti Rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah"																			Dinas P3	
	2	10	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dok					8,00	-	-	7,86	3.510.924,01	98,29	0,00	0,00	7,86	3.510.924	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98,29	0,00	0,00			0,00	0,00		
								Predikat Kinerja										ST	SR	SR			SR	SR		
	2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin membuka tanah																			Dinas P3	
	2	10	9	02.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara Pertanahan yang terselesaikan																			Dinas P3	
	2	10	9	02.01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumla Sertifikat Tanah Pemda yang diterbitkan	Persil					500,00	-	-	290,05	179.347,85	58,01	0,00	0,00	290,05	179.348	0,00	0,00	Dinas P3	APBD Kab
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										58,01	0,00	0,00			0,00	0,00		
								Predikat Kinerja										R	SR	SR			SR	SR		
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN					-		-		3.705.002,536									
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN										76,43	0,00	0,00			0,00	0,00		
								PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN										T	SR	SR			SR	SR		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																				DLHK	
	2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan																			DLHK	
	2	11	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RPPLH dan D2DTKH																			DLHK	
	2	11	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH	Dok					16,00	-	-	16,00	31.743,10	100,00	0,00	0,00	16,00	31.743	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	"Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota"	Bulan					12,00	-	-										DLHK	
	2	11	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kampung Iklim dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup																			DLHK	
	2	11	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kampung yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Bulan					12,00	-	-	12,00	3.897.623,89	100,00	0,00	0,00	12,00	3.897.624	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengujian liambah air dan udara di laboratorium,terlaksananya IHT bagi personil laboratorium,tersedianya bahan kimia,terpeliharanya alat laboratorium	Bulan					12,00	-	-	12,00	270.429,90	100,00	0,00	0,00	12,00	270.430	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Kualitas Air Sungai dan Data Kulitas Air Limbah	Bulan					12,00	-	-	12,00	18.780,55	100,00	0,00	0,00	12,00	18.781	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya data kualitas air sungai pada 6 sungai di Kabupaten Bulukumba serta tersedianya data kualitas air limbah pada 5 sumber pencemar																			DLHK	
	2	11	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persen Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove	Bulan					12,00	-	-	12,00	6.243,25	100,00	0,00	0,00	12,00	6.243	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penanaman Mangrove	Paket					1,00	-	-	1,00	4.381,75	100,00	0,00	0,00	1,00	4.382	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	Paket					1	-	-	1,00	63.167,25	100,00	0,00	0,00	1,00	63.167	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Jumlah RTH yang terehab dan terbangun dalam Kota,Pembangunan Rumah Bibit Pohon dan tanaman Hias, penqadaan pohon dan pemangkasan	Bulan					12,00	-	-	12,00	5.043,25	100,00	0,00	0,00	12,00	5.043	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah RTH yang terehab dan terbangun dalam Kota,Pembangunan Rumah Bibit Pohon dan tanaman Hias, penqadaan pohon dan pemangkasan	Dok					12	-	-	12,00	900,00	100,00	0,00	0,00	12,00	900	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus"	Bulan					12,00	-	-	12,00	166.819,00	100,00	0,00	0,00	12,00	166.819	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3																			DLHK	
	2	11	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket					1,00	-	-										DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3	Bulan					12,00	-	-	12,00	27.690,00	100,00	0,00	0,00	12,00	27.690	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin K3, Presentase Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan Hidup, Persentase Ketersediaan Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Dan Peningkatan 10 Kecamatan Tentang Upaya Pengendalian Kerusakan Serta Status Lingkungan Hidup Daerah Setiap Tahun																			DLHK	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	2	11	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Bulan					12,00	-	-	12,00	2.220,00	100,00	0,00	0,00	12,00	2.220	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Bulan					12,00	-	-	12,00	104.303,36	100,00	0,00	0,00	12,00	104.303	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional"	Bulan					12,00	-	-										DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup**																		DLHK	
	2	11	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	Bulan					12,00	-	-	12,00	81.160,57	100,00	0,00	0,00	12,00	81.161	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat	Bulan					12,00	-	-	12,00	13.841,10	100,00	0,00	0,00	12,00	13.841	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup di Sekolah	Bulan					12,00	-	-	12,00	9.034,00	100,00	0,00	0,00	12,00	9.034	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	11	2			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan**																		DLHK	
	2	11	2	02.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kerja DLHK**																		DLHK	
	2	11	2	02.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH	Bulan					12,00	-	-	12,00	135.609,63	100,00	0,00	0,00	12,00	135.610	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	2	2,01	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota Tahap 1 yang disusun	Dokumen					1	-	-	1,00	128.068,50	100,00	0,00	0,00	1,00	128.069	0,00	0,00	DLHK	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota																			**DLHK**	
	2	11	3			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota**																		DLHK	
	2	11	3	02.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Presentase Sampah Yang Terkelolah**																		DLHK	
	2	11	3	02.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Pengelolaan Persampahan	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.260.770,00	100,00	0,00	0,00	12,00	1.260.770	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	3	02.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Pengelolaan Persampahan	Bulan					12,00	-	-	12,00	113.803,50	100,00	0,00	0,00	12,00	113.804	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	3	02.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Persampahan	Bulan					12,00	-	-	11,25	125.078,79	93,75	0,00	0,00	11,25	125.079	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	3	02.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Pengadaan Lahan TPA 1 Ha , Biaya Operasioanl Operator Motor,Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operaional Persampahan honor Petugas Kebersihan Luar kantor**																		DLHK	
	2	11	3	02.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah peran serta masyarakat dalam pengurangan Sampah yang menunjang program Adipura	Bulan					12,00	-	-	11,25	43.270,85	93,75	0,00	0,00	11,25	43.271	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	3	02.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Saran dan Prasarana Persampahan 1 Paket mesin Pencuci Mobil/Motor dan Mesin Chaisaw**																		DLHK	
	2	11	3	02.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Bulan					12,00	-	-	3,00	0,00	25,00	0,00	0,00	3,00	0	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	11	4			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari**																		DLHK	
	2	11	4	02.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah RTH yang terehab dan terbangun dalam Kota,Pembangunan Rumah Bibit Pohon dan tanaman Hias, pengadaan pohon dan pemangkasan**																		DLHK	
	2	11	4	02.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang terehab dan terbangun dalam Kota,Pembangunan Rumah Bibit Pohon dan tanaman Hias, pengadaan pohon dan pemangkasan	Bulan					12,00	-	-	12,00	81.733,35	100,00	0,00	0,00	12,00	81.733	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab Prov, APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	11	5			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani**																		DLHK	
	2	11	5	02.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3**																		DLHK	
	2	11	5	02.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3	Bulan					12	-	-	11,25	31.548,75	93,75	0,00	0,00	11,25	31.549	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	11	6			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin K3Presentase Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan HidupPersentase Ketersediaan Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Dan Peningkatan 10 Kecamatan Tentang Upaya Pengendalian Kerusakan Serta Status Lingkungan Hidup Daerah Setiap Tahun**																		DLHK	
	2	11	6	02.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba**																		DLHK	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	2	11	6	02.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Pelaku Usaha					30,00	-	-	28,13	13.932,25	93,75	0,00	0,00	28,13	13.932	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	11	7			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**																			DLHK	
	2	11	7	02.02		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Jumlah Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup**																			DLHK	
	2	11	7	02.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Bulan					12,00	-	-	12,00	16.362,80	100,00	0,00	0,00	12,00	16.363	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	11	8			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat**																			DLHK	
	2	11	8	02.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup di Sekolah**																			DLHK	
	2	11	8	02.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Sekolah					30,00	-	-	30,00	36.820,35	100,00	0,00	0,00	30,00	36.820	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	11	10			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**																			DLHK	
	2	11	10	02.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota**																			DLHK	
	2	11	10	02.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan					20,00	-	-	20,00	14.004,70	100,00	0,00	0,00	20,00	14.005	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	11	11			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Presentase Sampah Yang Terkelolah**																			DLHK	
	2	11	11	02.01		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pengelolaan Persampahan**																			DLHK	
	2	11	11	02.01	3	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah penanganan sampah dengan melakukan pemilahan pengumpulan pengangkutan dan pengolahan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.523.561,38	100,00	0,00	0,00	12,00	1.523.561	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	11	02.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan sampah dengan melakukan pemilahan pengumpulan pengangkutan dan pengolahan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Bulan					12,00	-	-	12,00	9.952.526,47	100,00	0,00	0,00	12,00	9.952.526	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	11	02.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peran serta masyarakat dalam pengurangan Sampah yang menuniang program Adipura	Bulan					12,00	-	-	12,00	82.825,35	100,00	0,00	0,00	12,00	82.825	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	2	11	11	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	sarana dan Prasarana Persampahan	Bulan					12,00	-	-	12,00	119.183,46	100,00	0,00	0,00	12,00	119.183	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
														-	-		18.382.481,086									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	95,63	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	12				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																			DISDUKCAPIL	
	2	12	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)**																			DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																			DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersususnnya Renstra, Renja,SOP,Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKT, Sirup,dan IKU	Dok					10,00	-	-	10,00	2.244,20	100,00	0,00	0,00	10,00	2.244	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA	Dok					1,00	-	-	1,00	1.773,45	100,00	0,00	0,00	1,00	1.773	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-P	Dok					1,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00					DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA	Dok					1,00	-	-	1,00	1.710,45	100,00	0,00	0,00	1,00	1.710	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya DPAP	Dok					1,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersususnnya Laporan Kinerja	Dok					1,00	-	-	1,00	7.487,65	100,00	0,00	0,00	1,00	7.488	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan bulanan, triwulan dan semester serta laporan evaluasi renja, LPPD dan Sensus BMD	Dok					20,00	-	-	20,00	5.855,05	100,00	0,00	0,00	20,00	5.855	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**tersedianya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																			DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12	-	-	12,00	2.290.767,14	100,00	0,00	0,00	12,00	2.290.767	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan akhir tahun	Dok					1,00	-	-	1,00	5.735,00	100,00	0,00	0,00	1,00	5.735	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan.	Dok					1	765,450	-	1,00	765,45	100,00	100,00	0,00	1,00	765	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**terciptanya dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																			DISDUKCAPIL	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	2	12	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tupoksi	Orang					2,00	-	-										DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**tersedianya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Paket					1,00	-	-	1,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	1,00	5.000	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Paket					1,00	771,100	-	1,00	771,10	100,00	100,00	0,00	1,00	771	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor.	Paket					1,00	-	-	0,97	185.307,92	97,00	0,00	0,00	0,97	185.308	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Paket					1,00	-	-	1,00	4.954,23	100,00	0,00	0,00	1,00	4.954	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Paket					1	-	-										DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket					1,00	-	-	1,00	297.737,40	100,00	0,00	0,00	1,00	297.737	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	Paket					1,00	-	-										DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bulan					12,00	-	-	12,00	118.645,44	100,00	0,00	0,00	12,00	118.645	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Unit					20,00	-	-										DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	102.270,00	100,00	0,00	0,00	12,00	102.270	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan beserta pembayaran pajaknya	Unit					1,00	-	-	1,00	29.967,11	100,00	0,00	0,00	1,00	29.967	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional beserta pembayaran pajaknya	Unit					9,00	-	-	9,00	4.400,00	100,00	0,00	0,00	9,00	4.400	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Unit					20,00	-	-	20,00	34.180,08	100,00	0,00	0,00	20,00	34.180	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Paket					1,00	-	-	1,00	1.070,00	100,00	0,00	0,00	1,00	1.070	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	
	2	12	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket					1,00	-	-										DISDUKCAPIL	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**90,33**	**9,52**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja			**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	12	2			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	2	02.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	2	02.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.	Bulan					12,00	-	-	12,00	23.943,00	100,00	0,00	0,00	12,00	23.943	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	2	02.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya peningkatan layanan pendaftaran penduduk.	Bulan					12,00	-	-	12,00	481.768,05	100,00	0,00	0,00	12,00	481.768	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	12	3			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	3	02.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan, analisis dokumen kependudukan**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	3	02.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	Bulan					12,00	-	-	12,00	193.740,00	100,00	0,00	0,00	12,00	193.740	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	3	02.01	3	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Terlaksananya pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil.	Bulan					12,00	-	-	12,00	4.631,80	100,00	0,00	0,00	12,00	4.632	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	3	02.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertikal terkait, koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil.**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	3	02.02	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertikal terkait.	Bulan					12,00	770,000	-	12,00	770,00	100,00	100,00	0,00	12,00	770	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	
	2	12	3	02.02	3	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil. Terlaksananya koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil	Bulan					12,00	-	-	12,00	182.556,66	100,00	0,00	0,00	12,00	182.557	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	3	02.03		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya supervisi bersama dengan instansi vertikal.**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	3	02.03	3	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya supervisi bersama dengan instansi vertikal.	Bulan					12	630,000	-	12,00	630,00	100,00	100,00	0,00	12,00	630	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**100,00**	**40,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	12	4			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah saluran sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	4	02.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**terkumpulnya Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**																		DISDUKCAPIL	
	2	12	4	02.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya pengolahan dan penyajian data kependudukan.	Bulan					12,00	-	-	11,25	2.915,00	93,75	0,00	0,00	11,25	2.915	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	4	02.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan.	Kerja Sama					1,00	-	-	1,00	14.808,50	100,00	0,00	0,00	1,00	14.809	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)						
	2	12	4	02.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan**																			DISDUKCAPIL	
	2	12	4	02.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	Bulan					12,00	275,500	-	12,00	275,50	100,00	100,00	0,00	12,00	276	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	4	02.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah saluran sosialisasi kebijakan kependudukan.	Buah					4,00	-	-	4,00	19.156,50	100,00	0,00	0,00	4,00	19.157	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	APBD Kab
	2	12	4	02.03	6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Terlaksananya kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.	Bulan					12	994,700	-	12,00	994,70	100,00	100,00	0,00	12,00	995	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	
	2	12	4	02.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.	Bulan					12	-	-	12,00	5.599,35	100,00	0,00	0,00	12,00	5.599	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	12	5			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Pesentase buku agregat kependudukan yang diterbitkan per tahun**									**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	DISDUKCAPIL	
	2	12	5	02.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**tersusunnya dokumen Profil Kependudukan**																			DISDUKCAPIL	
	2	12	5	02.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Tersusunnya buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Bulukumba.	Buku					1,00	-	-	1,00	8.302,00	100,00	0,00	0,00	1,00	8.302	0,00	0,00	DISDUKCAPIL	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN						**4.206,750**	-		**4.040.732,722**									
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN										**97,86**	**16,57**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
							PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN										**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	13				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																			DPMD	
	2	13	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)**																		DPMD	
	2	13	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**																		DPMD	
	2	13	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					9,00	-	-	9,00	32.518,65	100,00	0,00	0,00	9,00	32.519	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					12,00	-	-	12,00	3.914,75	100,00	0,00	0,00	12,00	3.915			DPMD	
	2	13	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**																		DPMD	
	2	13	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	2.557.285,15	11,64	2.533.316,10	96,97	0,00	99,06	11,64	2.533.316	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	68.737,10	100,00	0,00	0,00	12,00	68.737			DPMD	
	2	13	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					6	-	-	6,00	2.840,95	100,00	0,00	0,00	6,00	2.841			DPMD	
	2	13	1	02.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		DPMD	
	2	13	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					2,00	-	-	1,60	13.830,00	80,00	0,00	0,00	1,60	13.830	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																		DPMD	
	2	13	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					3,00	-	-	3,00	29.286,00	100,00	0,00	0,00	3,00	29.286	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**																		DPMD	
	2	13	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					3,00	-	-	2,95	34.913,00	98,33	0,00	0,00	2,95	34.913	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	2.584,65	100,00	0,00	0,00	1,00	2.585	0,00	0,00	DPMD	
	2	13	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					5,00	-	-	5,00	65.348,95	100,00	0,00	0,00	5,00	65.349	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					24	-	-	24,00	100.876,00	100,00	0,00	0,00	24,00	100.876			DPMD	
	2	13	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		DPMD	
	2	13	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					24,00	-	-	24,00	46.915,09	100,00	0,00	0,00	24,00	46.915	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					24,00	-	-	24,00	62.040,00	100,00	0,00	0,00	24,00	62.040	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik**																		DPMD	
	2	13	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					8,00	-	-	8,00	46.029,31	100,00	0,00	0,00	8,00	46.029	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					68,00	-	-	68,00	15.228,00	100,00	0,00	0,00	68,00	15.228	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	1,00	6.250,00	100,00	0,00	0,00	1,00	6.250			DPMD	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	13	2			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik**																		DPMD	
	2	13	2	02.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Penataan Desa**																		DPMD	
	2	13	2	02.01	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa					90,00	-	-	90,00	71.740,27	100,00	0,00	0,00	90,00	71.740	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	13	3			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik**																		DPMD	
	2	13	3	02.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Adanya kegiatan fasilitasi tata wilayah desa**																		DPMD	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)		
	2	13	3	02.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dok					10,00	-	-	9,78	97.889,19	97,83	0,00	0,00	9,78	97.889	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	97,83	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	13	4			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik**																			DPMD	
	2	13	4	02.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Administarsi pemerintahan Desa yang Baik dan akuntabilitas**																			DPMD	
	2	13	4	02.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dok					109	-	-	109,00	35.977,85	100,00	0,00	0,00	109,00	35.978			DPMD	
	2	13	4	02.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dok					121,00	-	-	121,00	1.734.601,21	100,00	0,00	0,00	121,00	1.734.601	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	4	02.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dok					88,00	-	-	88,00	37.480,30	100,00	0,00	0,00	88,00	37.480	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	4	02.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dok					24,00	-	-	23,00	68.170,70	95,83	0,00	0,00	23,00	68.171	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	4	02.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan					1,00	-	-	0,94	0,00	93,75	0,00	0,00	0,94	0	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	4	02.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dok					25,00	-	-	25,00	37.970,15	100,00	0,00	0,00	25,00	37.970	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	4	02.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang					109,00	-	-	105,00	19.053,50	96,33	0,00	0,00	105,00	19.054			DPMD	APBD Kab
	2	13	4	02.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dok					10,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	85,74	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	T	SR	SR			SR	SR		
	2	13	5			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase peningkatan status desa mandiri**									**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	DPMD	
	2	13	5	02.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan terbentuknya lembaga adat dan masyarakat hukum adat**																		DPMD	
	2	13	5	02.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dok					109,00	-	-	106,00	75.272,25	97,25	0,00	0,00	106,00	75.272	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	5	02.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					10,00	-	-	10,00	31.282,75	100,00	0,00	0,00	10,00	31.283	0,00	0,00	DPMD	APBD Kab
	2	13	5	02.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dok					10,00	-	-	10,00	298.111,70	100,00	0,00	0,00	10,00	298.112			DPMD	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	74,31	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	S	SR	SR			SR	SR		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	**2.557.285,145**		**5.572.178,413**								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	91,27	0,00	1,24			0,00	0,00		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	14				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																				DPPKBP3A	
	2	14	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PPKB, PPPA)**																		DPPKBP3A	
	2	14	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumenperencanaan dan evaluasikinerja perangkat daerahyang tersusun**																			DPPKBP3A	
	2	14	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					4,00	-	-	4,00	163.601,20	100,00	0,00	0,00	4,00	163.601	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok					2,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok					2,00	-	-										DPPKBP3A	
	2	14	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					12,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1,00	-	-	1,00	56.593,45	100,00	0,00	0,00	1,00	56.593	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertibnya laporan keuangan perangkat daerah**																			DPPKBP3A	
	2	14	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	3.964.096,77	100,00	0,00	0,00	12,00	3.964.097	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok					12,00	-	-	12,00	97.196,00	100,00	0,00	0,00	12,00	97.196	0,00	0,00	DPPKBP3A	
	2	14	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	-	-	1,00	4.948,80	100,00	0,00	0,00	1,00	4.949	0,00	0,00	DPPKBP3A	
	2	14	1	02.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan barang milik daerah tepat waktu**																			DPPKBP3A	
	2	14	1	02.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok					12,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					3,00	-	-	3,00	17.107,20								DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah**																			DPPKBP3A	
	2	14	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	7.649,25	100,00	0,00	0,00	1,00	7.649	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	4.983,90	100,00	0,00	0,00	1,00	4.984	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	75.806,10	100,00	0,00	0,00	1,00	75.806	0,00	0,00	DPPKBP3A	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	2	14	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	4.297,65	100,00	0,00	0,00	1,00	4.298	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					24	-	-	23,30	71.416,80	97,08	0,00	0,00	23,30	71.417	0,00	0,00	DPPKBP3A	
	2	14	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**																		DPPKBP3A	
	2	14	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					4,00	-	-	4,00	290.510,00	100,00	0,00	0,00	4,00	290.510	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					4,00	-	-	4,00	48.950,00	100,00	0,00	0,00	4,00	48.950	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					3,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**																		DPPKBP3A	
	2	14	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	62.626,29	100,00	0,00	0,00	12,00	62.626	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	285.555,00	100,00	0,00	0,00	12,00	285.555	0,00	0,00	DPPKBP3A	
	2	14	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**																		DPPKBP3A	
	2	14	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	-	-	1,00	6.526,50	100,00	0,00	0,00	1,00	6.527	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					6,00	-	-	6,00	39.927,49	100,00	0,00	0,00	6,00	39.927	0,00	0,00	DPPKBP3A	
	2	14	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					4	-	-										DPPKBP3A	
	2	14	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	1,00	5.707,50	100,00	0,00	0,00	1,00	5.708	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					3,00	-	-	3,00	14.740,00	100,00	0,00	0,00	3,00	14.740	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					3,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**94,58**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	14	2			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk)**																		DPPKBP3A	
	2	14	2	02.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Terpenuhinya kebijakan pemerintah terkait dengan kuantitas penduduk**																		DPPKBP3A	
	2	14	2	02.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	Dok					11,00	-	-	11,00	96.528,94	100,00	0,00	0,00	11,00	96.529	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	2	02.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal yang Terlaksana	Sekolah					5,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	2	02.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**tertibnya pelaporan dan pendataan dilapangan**																		DPPKBP3A	
	2	14	2	02.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit					1	-	-	0,67	32.730,70	66,67	0,00	0,00	0,67	32.731	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	2	02.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dok					12,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	2	02.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan					12,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	2	02.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dok					12	-	-	10,50	106.757,70	87,50	0,00	0,00	10,50	106.758	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**84,72**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja			**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	14	3			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi Dan Kelembagaan Jaringan KB**																		DPPKBP3A	
	2	14	3	02.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Meningkatnya pengetahuan masyarakat bidang klE di 10 Kecamatan**																		DPPKBP3A	
	2	14	3	02.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi					4,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	3	02.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dok					2	-	-										DPPKBP3A	
	2	14	3	02.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dok					2,00	-	-	1,40	101.561,30	70,00	0,00	0,00	1,40	101.561	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	3	02.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan					10	-	-	10,00	129.910,00	100,00	0,00	0,00	10,00	129.910	0,00	0,00	DPPKBP3A	
	2	14	3	02.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan					10,00	-	-	10,00	473.600,00	100,00	0,00	0,00	10,00	473.600	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)		
	2	14	3	02.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan					4	-	-	4,00	282.303,10	100,00	0,00	0,00	4,00	282.303	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	3	02.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Sejahteranya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**																		DPPKBP3A	
	2	14	3	02.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang					68,00	-	-	68,00	353.600,00	100,00	0,00	0,00	68,00	353.600	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	3	02.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di faskes**																		DPPKBP3A	
	2	14	3	02.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan					21,00	-	-	21,00	17.060,00	100,00	0,00	0,00	21,00	17.060	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	3	02.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang					100,00	-	-	79,00	547.745,00	79,00	0,00	0,00	79,00	547.745	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	3	02.03	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen					1,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	3	02.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit					3,00	-	-	2,00	380.489,75	66,67	0,00	0,00	2,00	380.490	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	3	02.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang					50,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	3	02.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan					11,00	-	-	11,00	12.574,40	100,00	0,00	0,00	11,00	12.574	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	3	02.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**capaian pelayanan KB/KR di lapangan melalui 4 momen**																		DPPKBP3A	
	2	14	3	02.04	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi					5,00	-	-	4,50	194.727,74	90,00	0,00	0,00	4,50	194.728	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	3	02.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung					20,00	-	-	20,00	349.837,20	100,00	0,00	0,00	20,00	349.837	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**91,42**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	14	4			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Jumlah Kecamatan terkait Keluarga Yang Mandiri, Tentram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)**																		DPPKBP3A	
	2	14	4	02.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**																		DPPKBP3A	
	2	14	4	02.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit					19,00	-	-	19,00	239.354,60	100,00	0,00	0,00	19,00	239.355	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	4	02.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan					5	-	-	5,00	172.594,80	100,00	0,00	0,00	5,00	172.595	0,00	0,00	DPPKBP3A	
	2	14	4	02.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang					60,00	-	-										DPPKBP3A	
	2	14	4	02.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang					20,00	-	-	13,18	1.509.799,95	65,88	0,00	0,00	13,18	1.509.800	0,00	0,00	DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	4	02.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan					5,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
	2	14	4	02.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan					5,00	-	-										DPPKBP3A	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**88,63**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
													-	-			**10.223.415,083**									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		**89,84**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN		**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	15				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																				Dinas Perhubungan	
	2	15	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ((Dinas Perhubungan)**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah titik PJU yang dibangun	Dok					5,00	-	-	5,00	17.481,10	100,00	0,00	0,00	5,00	17.481	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	APBD Kab
	2	15	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi umum, peningkatan pelayanan administrasi keuangan**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	3.496.465,84	100,00	0,00	0,00	12,00	3.496.466	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Belanja Jasa Admnistrasi Keuangan	Bulan					12	-	-	12,00	25.127,70	100,00	0,00	0,00	12,00	25.128	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	78.265,00	100,00	0,00	0,00	12,00	78.265	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelaksana Latpim 3**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					3,00	-	-	3,00	17.000,00	100,00	0,00	0,00	3,00	17.000	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	2	15	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedainya Pelayanan Administrasi Umum**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pembayaran komunikasi, air,listrik, dan Internet, penerangan bangunan kantor,PJU	Bulan					12,00	-	-	12,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	12,00	3.500	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	APBD Kab
	2	15	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					12,00	-	-	12,00	36.559,02	100,00	0,00	0,00	12,00	36.559	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	APBD Kab
	2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi singkronisasi dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kali					34,00	-	-	34,00	85.686,85	100,00	0,00	0,00	34,00	85.687	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	APBD Kab
	2	15	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	14.067.026,62	100,00	0,00	0,00	12,00	14.067.027	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Jasa peralatan kerja	Bulan					12,00	-	-	12,00	4.060,00	100,00	0,00	0,00	12,00	4.060	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitasi pembayaran jasa kebersihan kantor (petugas Cininq Service) penyedian perlatan jasa kebersihan kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	126.040,45	100,00	0,00	0,00	12,00	126.040	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	-	-	1,00	19.953,00	100,00	0,00	0,00	1,00	19.953	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					16,00	-	-	12,00	21.746,50	75,00	0,00	0,00	12,00	21.747	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	1,00	10.117,50	100,00	0,00	0,00	1,00	10.118	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**98,21**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	15	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelengaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya perlengkapan jalan di kabupaten/Kota**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah Perlengkapan dan pengadaan Pagar pengaman jalan yang tersedia	Paket					3,00	-	-	3,00	21.500,00	100,00	0,00	0,00	3,00	21.500	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit					2,00	-	-	1,67	1.436.076,24	83,33	0,00	0,00	1,67	1.436.076	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah PJU yang di pelihara	Titik					150,00	-	-	150,00	168.413,30	100,00	0,00	0,00	150,00	168.413	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Tersedainya Fasilitas pelayanan Terminal Tipe C**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Fasilitasi Jasa Petugas parkir, terminal dan di tepi jalan	Bulan					12,00	-	-	12,00	320.560,00	100,00	0,00	0,00	12,00	320.560	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Tersedainya Pengujian Kendaraan Bermotor**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Trafic Light dan Warning Light	Unit					6,00	-	-	6,00	99.000,00	100,00	0,00	0,00	6,00	99.000	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Fasilitasi Jasa Petugas Operator Pengujian Kendaraan Bermotor	Bulan					12,00	-	-	12,00	62.807,80	100,00	0,00	0,00	12,00	62.808	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya angkutan umum bagi masyarakat, terwujudnya pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan**																		Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bulan					12,00	-	-	10,00	144.206,65	83,33	0,00	0,00	10,00	144.207	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	2	02.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi jasa pengendalian dan pengawasan lalulintas, jumlah petugas pengendalian dan pengawasan lalulintas	Bulan					12,00	-	-	12,00	196.400,00	100,00	0,00	0,00	12,00	196.400	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**95,83**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
														-	-		**20.457.993,562**									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		**97,02**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	16				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																			DISKOMINFO	
	2	16	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)**																		DISKOMINFO	
	2	16	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perncanaan penganggaran dan evaluasi kirja**																		DISKOMINFO	
	2	16	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan	Dok					1,00	-	-	0,97	25.387,64	96,75	0,00	0,00	0,97	25.388	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi yang telah disusun dan diserahkan ke OPD yang menangani	Bulan					12,00	-	-										DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**																		DISKOMINFO	
	2	16	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.833.636,87	100,00	0,00	0,00	12,00	1.833.637	0,00	0,00	DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan dan kesekretariatan yang dilaksanakan di Kominfo.	Bulan					12,00	-	-	12,00	102.403,35	100,00	0,00	0,00	12,00	102.403	0,00	0,00	DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen/Berkas pertanggungjawaban yang dikelola dalam penatausahaan keuangan.	Kegiatan					58,00	-	-	55,10	39.300,40	95,00	0,00	0,00	55,10	39.300	0,00	0,00	DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dibutuhkan.	Dok					5,00	-	-										DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**																		DISKOMINFO	
	2	16	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III	Orang					1,00	-	-	1,00	34.000,00	100,00	0,00	0,00	1,00	34.000	0,00	0,00	DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum**																		DISKOMINFO	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)		
	2	16	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	Unit					30,00	-	-	30,00	7.476,50	100,00	0,00	0,00	30,00	7.477	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan.	Unit					3,00	-	-	3,00	21.290,35	100,00	0,00	0,00	3,00	21.290	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah tangga yang dibutuhkan.	Paket					1	-	-										DISKOMINFO	
	2	16	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor, Makanan dan Minuman yang disediakan.	Bulan					12	-	-	12,00	93.014,40	100,00	0,00	0,00	12,00	93.014	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan	Kali					55	-	-	55,00	122.699,36	100,00	0,00	0,00	55,00	122.699	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kegiatan administrasi pengelolaan yang mendorong peningkatan pencapaian Nilai SPBE	Paket					1	-	-										DISKOMINFO	
	2	16	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**																			DISKOMINFO	
	2	16	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan Peralatan Lainnya yang akan dibutuhkan	Paket					1	-	-										DISKOMINFO	
	2	16	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibutuhkan.	Unit					2	-	-										DISKOMINFO	
	2	16	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**																			DISKOMINFO	
	2	16	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan					12	-	-	12,00	311.879,92	100,00	0,00	0,00	12,00	311.880	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bulan					12	-	-	12,00	15.050,00	100,00	0,00	0,00	12,00	15.050	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Jasa Kebersihan Kantor Diskominfo	Bulan					12	-	-	12,00	30.982,80	100,00	0,00	0,00	12,00	30.983	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang terpelihara**																			DISKOMINFO	
	2	16	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	Unit					1	-	-	0,98	29.308,00	98,00	0,00	0,00	0,98	29.308	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang dipelihara	Unit					2	-	-	1,43	55.919,44	71,67	0,00	0,00	1,43	55.919	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	1	02.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Diskominfo yang memiliki izin	Bulan					12	-	-	12,00	456,00	100,00	0,00	0,00	12,00	456	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					10,00	-	-										DISKOMINFO	
	2	16	1	02.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi layanan yang dipelihara	aplikasi					2,00	-	-										DISKOMINFO	
	2	16	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Paket					1,00	-	-										DISKOMINFO	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**97,43**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	16	2			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah**															**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	DISKOMINFO	
	2	16	2	02.01	1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengelolaan informasi publik melalui media informasi publik**																			DISKOMINFO	
	2	16	2	02.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rumusan Kebijakan berupa Peraturan, Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis mengenai layanan infomasi (Perda/Perbub/SK Bupati)	Peraturan					2,00	-	-										DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	2	02.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pelaksanaan sosialisasi SP4N Lapor sebagai media pengaduan dan aspirasi masyarakat, laporan pengelolaan SP4N dan Lapor	Kali					2,00	-	-	2,00	26.440,15	100,00	0,00	0,00	2,00	26.440	0,00	0,00	DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	2	02.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan diskusi publik dengan pemangku kepentingan dengan media informasi menanggapi aduan dan isu publik	Kali					10,00	-	-										DISKOMINFO	
	2	16	2	02.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pembuatan dan pengelolaan konten dan materi Informasi dan Komunikasi Publik melalui Media Komunikasi	Paket					1,00	-	-										DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	2	02.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan pengelolaan Informasi Publik Melalui Radio SPL FM	Bulan					12,00	-	-	12,00	97.970,59	100,00	0,00	0,00	12,00	97.971	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	2	02.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Forum Konsultasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penguatan PPID	Kali					2,00	-	-										DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	2	02.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media dengan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi pembangunan daerah	Media					3	-	-	3,00	703.688,93	100,00	0,00	0,00	3,00	703.689	0,00	0,00	DISKOMINFO	
	2	16	2	02.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan talkshow dan rapat kerja dengan organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat mengenai layanan informasi publik	Kali					1	-	-										DISKOMINFO	
	2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	Kelompok					10,00	-	-										DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	2	02.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi komisi informasi sebagai lembaga informasi publik	Bulan					12,00	-	-	12,00	205.798,75	100,00	0,00	0,00	12,00	205.799	0,00	0,00	DISKOMINFO	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	16	3			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo**																			DISKOMINFO	
	2	16	3	02.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya pengelolaan domain dan sub domain milik pemerintah daerah**																			DISKOMINFO	
	2	16	3	02.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Nama Domain dan Sub Domain Terdaftar	Domain					1,00	-	-										DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	3	02.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dan penataan domain dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah	Aplikasi					4,00	-	-										DISKOMINFO	
	2	16	3	02.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi					4,00	-	-	4,00	138.907,80	100,00	0,00	0,00	4,00	138.908	0,00	0,00	DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	3	02.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya pengelolaan E-Government/SPBE baik Infrastruktur maupun sistem**																			DISKOMINFO	
	2	16	3	02.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Informasi Elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Data					5,00	-	-										DISKOMINFO	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)						
	2	16	3	02.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE	Dok					1,00	-	-											DISKOMINFO	
	2	16	3	02.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Peralatan dan perangkat elektronik di pusat data dan command center dapat di maintenance dan dipelihara	Bulan					12,00	-	-											DISKOMINFO	
	2	16	3	02.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	sistem komunikasi intra pemerintah daerah/radio komunikasi pemkab dapat dilaksanakan	Bulan					12,00	-	-											DISKOMINFO	
	2	16	3	02.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi sistem Keamanan informasi dengan instansi Pembina ditingkat Pemerintah pusat dan propinsi dapat terlaksana	Kali					5,00	-	-											DISKOMINFO	
	2	16	3	02.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik dalam lingkup pemerintah daerah dapat terlaksana.	Kali					20	-	-											DISKOMINFO	
	2	16	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Proses Bisnis Pengembangan Aplikasi SPBE yang telah tersusun	Paket					1,00	-	-											DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	3	02.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terselenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah	Bulan					12,00	-	-											DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	3	02.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas (Pembangunan War Room)	Unit					1,00	-	-											DISKOMINFO	
	2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Layanan Imigrasi					3,00	-	-											DISKOMINFO	APBD Kab
	2	16	3	02.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pengelolaan Government Chief Information Officer	Bulan					12,00	-	-											DISKOMINFO	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja		ST	SR	SR			SR	SR		
														-	-		3.895.611,238									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		99,14	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN		ST	SR	SR			SR	SR		
	2	17				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																				DisdagrinUMKM	
	2	17	2			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada**																			DisdagrinUMKM	
	2	17	2	02.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi Penerbitan Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota**																			DisdagrinUMKM	
	2	17	2	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/kota	Ijin					2,00	-	-	1,88	7.343,25	93,75	0,00	0,00	1,88	7.343	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		93,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja		ST	SR	SR			SR	SR		
	2	17	3			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Yang Dilakukan**																			DisdagrinUMKM	
	2	17	3	02.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**																			DisdagrinUMKM	
	2	17	3	02.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha					290	-	-	271,88	4.629,00	93,75	0,00	0,00	271,88	4.629	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		93,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja		ST	SR	SR			SR	SR		
	2	17	4			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Kategori Sehat**																			DisdagrinUMKM	
	2	17	4	02.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Usaha Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**																			DisdagrinUMKM	
	2	17	4	02.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha					267,00	-	-	250,31	6.639,20	93,75	0,00	0,00	250,31	6.639	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	2	17	4	02.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi					2	-	-	1,88	17.714,95	93,75	0,00	0,00	1,88	17.715	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		93,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja		ST	SR	SR			SR	SR		
	2	17	5			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan**																			DisdagrinUMKM	
	2	17	5	02.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi yang Wilayah Keanggotan dalam daerah Kabupaten/ Kota**																			DisdagrinUMKM	
	2	17	5	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang					100	-	-	93,75	368.487,95	93,75	0,00	0,00	93,75	368.488	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		93,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja		ST	SR	SR			SR	SR		
	2	17	6			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi**																			DisdagrinUMKM	
	2	17	6	02.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana**																			DisdagrinUMKM	
	2	17	6	02.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha					5,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja		SR	SR	SR			SR	SR		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	2	17	7			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM Yang Diberdayakan**																		DisdagrinUMKM	
	2	17	7	02.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**																		DisdagrinUMKM	
	2	17	7	02.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dok					1,00	-	-	0,94	5.830,80	93,75	0,00	0,00	0,94	5.831	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	2	17	7	02.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha					3280,00	-	-	3075,00	0,00	93,75	0,00	0,00	3075,00	0	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	2	17	7	02.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha					500,00	-	-	468,75	6.139,65	93,75	0,00	0,00	468,75	6.140	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	2	17	7	02.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha					21,00	-	-	19,69	232.480,00	93,75	0,00	0,00	19,69	232.480	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	2	17	7	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	Usaha					32178	-	-	30166,88	2.540,00	93,75	0,00	0,00	30166,88	2.540	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**93,75**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja						**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	17	8			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha**																		DisdagrinUMKM	
	2	17	8	02.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi**																		DisdagrinUMKM	
	2	17	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha					6,00	-	-	5,63	215.706,25	93,75	0,00	0,00	5,63	215.706	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**93,75**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja						**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-		**867.511,052**										
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN						**80,36**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN						**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	2	18				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																				DPMPTSPTK	
	2	18	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja)**	ASN																		DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	dokumen																		DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					12,00	-	-	12,00	59.271,45	99,99	0,00	0,00	12,00	59.271	0,00	0,00	DPMPTSPTK	DAK/ APBD Kab
	2	18	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok					2,00	-	-	1,97	19.804,00	98,50	0,00	0,00	1,97	19.804	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok					2,00	-	-	2,00	24.148,15	100,00	0,00	0,00	2,00	24.148	0,00	0,00	DPMPTSPTK	DAK/ APBD Kab
	2	18	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	-	-	1,00	13.314,35	100,00	0,00	0,00	1,00	13.314	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																		DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	4.118.593,72	100,00	0,00	0,00	12,00	4.118.594	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	77.609,85	99,96	0,00	0,00	12,00	77.610	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					3,00	-	-	3,00	6.944,50	100,00	0,00	0,00	3,00	6.945	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dokumen																	DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	18	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia**																		DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	-	-	1,00	4.027,30	100,00	0,00	0,00	1,00	4.027	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	70.462,20	100,00	0,00	0,00	1,00	70.462	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	10.369,00	100,00	0,00	0,00	1,00	10.369	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	18	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1,00	-	-	1,00	13.015,35	100,00	0,00	0,00	1,00	13.015	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	18	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					36	-	-	36,00	95.662,00	100,00	0,00	0,00	36,00	95.662	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia**																		DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					2,00	-	-										DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	18	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					6,00	-	-	6,00	70.697,00	100,00	0,00	0,00	6,00	70.697	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	18	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan DPMPTSPTK	Paket					1,00	-	-										DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	18	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN dan PMA**																		DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Bulan					12	-	-	12,00	118.613,24	100,00	0,00	0,00	12,00	118.613	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah buku Data Base Perizinan	Bulan					12,00	-	-	12,00	103.498,45	100,00	0,00	0,00	12,00	103.498	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	18	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang mendapat Pemeliharaan**																		DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					12,00	-	-	11,60	50.774,33	96,67	0,00	0,00	11,60	50.774	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
	2	18	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					10,00	-	-	10,00	8.300,00	100,00	0,00	0,00	10,00	8.300	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	2	18	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					10,00	-	-	10,00	17.985,00	100,00	0,00	0,00	10,00	17.985	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	94,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	18	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota**																		DPMPTSPTK	
	2	18	2	02.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerapan kebijakan investasi penanaman modal**																		DPMPTSPTK	
	2	18	2	02.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan					1,00	-	-	1,00	10.898,00	100,00	0,00	0,00	1,00	10.898	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	18	2	02.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Penerapan kebijakan investasi penanaman modal**																		DPMPTSPTK	
	2	18	2	02.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dok					1,00	-	-	1,00	40.844,00	100,00	0,00	0,00	1,00	40.844	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	18	3			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**									0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSPTK	**APBD Kab**
	2	18	3	02.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perencanaan dan terlaksananya Promosi Potensi Unggulan Daerah Kab. Bulukumba**																		DPMPTSPTK	
	2	18	3	02.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok					1,00	-	-	1,00	9.583,25	100,00	0,00	0,00	1,00	9.583	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	18	3	02.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dok					1,00	-	-	1,00	77.388,00	100,00	0,00	0,00	1,00	77.388	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	18	4			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan**																		DPMPTSPTK	
	2	18	4	02.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase administrasi pelayanan perizinan**																		DPMPTSPTK	
	2	18	4	02.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha					500,00	-	-	500,00	282.345,72	100,00	0,00	0,00	500,00	282.346	0,00	0,00	DPMPTSPTK	APBD Kab
	2	18	4	02.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang					6	-	-	6,00	12.044,00	100,00	0,00	0,00	6,00	12.044	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	18	5			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**																		DPMPTSPTK	
	2	18	5	02.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tertib administrasi pelayanan investasi**																		DPMPTSPTK	
	2	18	5	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keg Usaha					2	-	-										DPMPTSPTK	
	2	18	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha					5	-	-	5,00	240.195,70	100,00	0,00	0,00	5,00	240.196	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
	2	18	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Keg Usaha					1	-	-	1,00	166.552,35	100,00	0,00	0,00	1,00	166.552	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	18	6			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu**																		DPMPTSPTK	
	2	18	6	02.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyajian Informasi Data Base Perizinan**																		DPMPTSPTK	
	2	18	6	02.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dok					1	-	-	1,00	10.555,30	100,00	0,00	0,00	1,00	10.555	0,00	0,00	DPMPTSPTK	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
														-	-		5.733.496,206									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	99,08	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	19				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																			Disparpora	
	2	19	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Jumlah Pemuda Inovator**																		Disparpora	
	2	19	2	02.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemuda inovator**																		Disparpora	
	2	19	2	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					5,00	-											Disparpora	APBD Kab
	2	19	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					5,00	-	-	5,00	220.551,79	99,97	0,00	0,00	5,00	220.552	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
	2	19	2	02.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang					1,00	-	-	0,75	50.000,00	75,00	0,00	0,00	0,75	50.000	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
	2	19	2	02.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pelajar yang lolos paskibra	Orang					72,00	-											Disparpora	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				87,49	0,00	0,00			0,00	0,00		
														Predikat Kinerja				T	SR	SR			SR	SR		
	2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah																		Disparpora	
	2	19	3	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi atlet	prestasi																		Disparpora	
	2	19	3	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sapras olahraga yang di bangun	Paket					4,00	-	-	3,86	4.970.671,26	96,50	0,00	0,00	3,86	4.970.671	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
	2	19	3	02.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi atlet	prestasi																		Disparpora	
	2	19	3	02.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dok					6,00	-	-											Disparpora	APBD Kab
	2	19	3	02.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dok					2,00	-	-	2,00	1.249.711,20	99,99	0,00	0,00	2,00	1.249.711	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
	2	19	3	02.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi atlet	prestasi																		Disparpora	
	2	19	3	02.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang					50,00	-	-	48,00	113.957,35	96,00	0,00	0,00	48,00	113.957	0,00	0,00	Disparpora	
	2	19	3	02.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang					2,00	-	-	1,97	105.726,50	98,33	0,00	0,00	1,97	105.727	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
	2	19	3	02.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet dan pelatih yang mendapatkan penghargaan	Orang					15,00	-	-											Disparpora	APBD Kab
	2	19	3	02.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah prestasi atlet	prestasi																		Disparpora	
	2	19	3	02.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	Cabor					3,00	-	-											Disparpora	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				97,71	0,00	0,00			0,00	0,00		
														Predikat Kinerja				ST	SR	SR			SR	SR		
3	2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Jumlah gugus pramuka yang berprestasi di tingkat nasional																			Disparpora	
	2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah prestasi pramuka																			Disparpora	
	2	19	4	02.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kwartir yang mendapatkan pembinaan	Kwarcab					1,00	-	-	1,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100.000	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
														Predikat Kinerja				ST	SR	SR			SR	SR		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-		6.810.618,091								
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN				95,06	0,00	0,00			0,00	0,00		
														PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN				ST	SR	SR			SR	SR		
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																				DISKOMINFO	
	2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah																			DISKOMINFO	
	2	20	2	02.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Statistik Sektoral dengan Terlaksananya Pengumpulan Data dan Statistik Daerah																			DISKOMINFO	
	2	20	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi serta Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	Kali					5,00	-	-	5,00	125.564,03	100,00	0,00	0,00	5,00	125.564	0,00	0,00	DISKOMINFO	APBD Kab
	2	20	2	02.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tersedianya Buku Bulukumba Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka	Buah					150,00	-	-											DISKOMINFO	APBD Kab
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
														Predikat Kinerja				ST	SR	SR			SR	SR		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-		125.564,030								
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN				100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
														PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN				ST	SR	SR			SR	SR		
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																				DISKOMINFO	
	2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah																			DISKOMINFO	
	2	21	2	02.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tertib Administrasi Pesandian																			DISKOMINFO	
	2	21	2	02.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, Terlaksananya Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dapat dikelola	Bulan					12,00	-	-	12,00	33.135,30	100,00	0,00	0,00	12,00	33.135	0,00	0,00	DISKOMINFO	APBD Kab
	2	21	2	02.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dapat tersedia	Bulan					12,00	-	-											DISKOMINFO	APBD Kab
	2	21	2	02.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																			DISKOMINFO	
	2	21	2	02.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	Bulan					12,00	-	-											DISKOMINFO	APBD Kab
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
														Predikat Kinerja				ST	SR	SR			SR	SR		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-		33.135,300								
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN				100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
														PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN				ST	SR	SR			SR	SR		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																				Dinas Dikbud	
	2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	karya																			Dinas Dikbud	
	2	22	2	02.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																				Dinas Dikbud	
	2	22	2	02.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan iinvetarisasi	Keg					1,00	-	-	1,00	593.738,90	100,00	0,00	0,00	1,00	593.739	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan	sanggar																	Dinas Dikbud	
	2	22	3	02.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kesenian Tradisional	Kegiatan																	Dinas Dikbud	APBD Kab
	2	22	3	02.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kesenian Tradisional	Keg					1,00	-	-	1,00	270.809,83	100,00	0,00	0,00	1,00	270.810	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Penetapan																	Dinas Dikbud	
	2	22	5	02.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Penetapan																	Dinas Dikbud	
	2	22	5	02.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Penetapan					1,00	-	-	0,99	1.637.606,91	99,20	0,00	0,00	0,99	1.637.607	0,00	0,00	Dinas Dikbud	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
														-	-		2.502.155,643									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	99,73	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																			DISPUSIP	
	2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)	ASN																	DISPUSIP	
	2	23	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan																	DISPUSIP	
	2	23	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok					3,00	-	-	3,00	24.980,50	100,00	0,00	0,00	3,00	24.981	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dok					2,00	-	-	2,00	7.018,000	100,00	0,00	0,00	2	7.018	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dok					2,00	-	-	2,00	6.127,000	100,00	0,00	0,00	2,00	6.127	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	2.494,500	100,00	0,00	0,00	12,00	2.495	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Pengelolaan Laporan Administrasi Keuangan.																		DISPUSIP	
	2	23	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.674.340,009	100,00	0,00	0,00	12,00	1.674.340	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	64.340,000	100,00	0,00	0,00	12,00	64.340	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan					1,00	-	-	1,00	1.563,000	100,00	0,00	0,00	1,00	1.563	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Bulukumba																		DISPUSIP	
	2	23	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					7,00	-	-										DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana Aparatur								-										DISPUSIP	
	2	23	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-										DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					4,00	-	-										DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	-	-										DISPUSIP	
	2	23	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	29.677,700	100,00	0,00	0,00	12,00	29.678	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	5.134,50	100,00	0,00	0,00	12,00	5.135	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali					31,00	-	-	31,00	67.183,39	100,00	0,00	0,00	31,00	67.183	0,00	0,00	DISPUSIP	
	2	23	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang Milik daerah																		DISPUSIP	
	2	23	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan	Unit					3	-	-										DISPUSIP	
	2	23	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					8,00	-	-	8,00	260.928,35	100,00	0,00	0,00	8,00	260.928	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanay Pelayanan Administrasi sebagai penunjang Urusan perintah daerah																		DISPUSIP	
	2	23	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	30.628,92	100,00	0,00	0,00	12,00	30.629	0,00	0,00	DISPUSIP	
	2	23	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang					2,00	-	-	2,00	142.399,94	100,00	0,00	0,00	2,00	142.400	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Peningkatan Fasi;itas Pemeliharaan barang milik daerah																		DISPUSIP	
	2	23	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					7,00	-	-	7,00	20.846,50	100,00	0,00	0,00	7,00	20.847	0,00	0,00	DISPUSIP	
	2	23	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket					1	-	-										DISPUSIP	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
																	Predikat Kinerja	ST	SR	SR			SR	SR		
	2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pendudukPresentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan pendudukPersentase Jumlah KCKR daerah yang dihimpun	ketercukupan																	DISPUSIP	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)						
	2	23	2	02.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Perpupstakaan**	Pengelolaan																	DISPUSIP	
	2	23	2	02.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	Layanan					1,00	-	-											DISPUSIP	
	2	23	2	02.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Orang					4100,00	-	-											DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	2	02.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpus Sekolah					32,00	-	-											DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	2	02.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang					315,00	-	-	315,00	183.812,326	100,00	0,00	0,00	315,00	183.812	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	2	02.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Eksampiar					60,00	-	-											DISPUSIP	
	2	23	2	02.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Eksampiar					110,00	-	-											DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	2	02.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksampiar					250	-	-											DISPUSIP	
	2	23	2	02.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%					100,00	-	-											DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	2	02.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor**	Peralatan																	DISPUSIP	
	2	23	2	02.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Peralatan Rumah tangga	%					100,00	-	-	96,67	274.557,075	96,67	0,00	0,00	96,67	274.557	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	2	02.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Bahan logistik kantor	Orang					90,00	-	-											DISPUSIP	APBD Kab
	2	23	2	02.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cetakan dan penggandaan	Orang					30,00	-	-											DISPUSIP	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	23	3			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayahnyaPersentase Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialihbahasaPersentase Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya**																		DISPUSIP	
	2	23	3	02.02		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara**	Pengembangan																	DISPUSIP	
	2	23	3	02.02	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Paket					1,00	-	-											DISPUSIP	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-		**2.796.031,709**								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN									
	2	24				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																				DISPUSIP	
	2	24	2			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Pesentase Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat**	Jumlah																	DISPUSIP	
	2	24	2	02.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis**	Pengelolaan																	DISPUSIP	
	2	24	2	02.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	OPD					27	-	-	27,00	63.518,050	100,00	0,00	0,00	27,00	63.518	0,00	0,00	DISPUSIP	
	2	24	2	02.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Bulan					12,00	-	-											DISPUSIP	APBD Kab
	2	24	2	02.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip statis**	Pengelolaan																	DISPUSIP	
	2	24	2	02.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Bulan					12,00	-	-	12,00	5.669,650	100,00	0,00	0,00	12,00	5.670	0,00	0,00	DISPUSIP	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	2	24	3			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Presentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan**	dokumen																	DISPUSIP	
	2	24	3	02.04		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip alih media yang di kelolah**	Autentikasi																	DISPUSIP	
	2	24	3	02.04	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Bulan					12	-	-											DISPUSIP	APBN, DAK/APBD Kab
	2	24	3	02.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bulan					12,00	-	-											DISPUSIP	APBN, DAK/APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-		**69.187,700**								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN									
	3	25				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																				Dinas Perikanan	
	3	25				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																				Dinas Perikanan	
	3	25	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perikanan)**																				Dinas Perikanan	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	3	25	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu Laporan**																			Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					1	-	-	1,00	6.824,90	100,00	0,00	0,00	1,00	6.825	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok					1	-	-	1,00	2.936,75	100,00	0,00	0,00	1,00	2.937	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok					1,00	-	-	1,00	3.101,25	100,00	0,00	0,00	1,00	3.101	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok					1,00	-	-	1,00	5.241,50	100,00	0,00	0,00	1,00	5.242	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok					1,00	-	-	1,00	3.470,00	100,00	0,00	0,00	1,00	3.470	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan					1,00	-	-	0,75	3.769,25	75,00	0,00	0,00	0,75	3.769	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan					12,00	-	-	12,00	16.122,88	100,00	0,00	0,00	12,00	16.123	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran**																			Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	3.818.273,90	100,00	0,00	0,00	12,00	3.818.274	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	102.521,50	100,00	0,00	0,00	12,00	102.522	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pejabat yang Mengikuti Latpim**																			Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					1,00	-	-	1,00	55.213,00	100,00	0,00	0,00	1,00	55.213	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran**																			Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	1,00	3.000	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	24.892,50	100,00	0,00	0,00	1,00	24.893	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	23.344,35	100,00	0,00	0,00	1,00	23.344	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok					3,00	-	-	3,00	1.165,00	100,00	0,00	0,00	3,00	1.165	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan					12,00	-	-	12,00	6.213,85	100,00	0,00	0,00	12,00	6.214	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	137.076,03	100,00	0,00	0,00	12,00	137.076	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor**	Pemenuhan																		Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					2	-	-											Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					3	-	-	3,00	76.100,00	100,00	0,00	0,00	3,00	76.100	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	1,00	13.850,00	100,00	0,00	0,00	1,00	13.850	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan**																			Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	60.745,18	100,00	0,00	0,00	12,00	60.745	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	88.769,49	100,00	0,00	0,00	12,00	88.769	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara**	BMD																		Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					40,00	-	-	40,00	39.142,68	100,00	0,00	0,00	40,00	39.143	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					10,00	-	-	10,00	4.815,00	100,00	0,00	0,00	10,00	4.815	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	1,00	8.390,00	100,00	0,00	0,00	1,00	8.390	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					5,00	-	-	5,00	6.710,00	100,00	0,00	0,00	5,00	6.710	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**98,96**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
															Predikat Kinerja			**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	25	3			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Kontribusi PDRB sektor perikanan, Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan, Persentase Produksi Perikanan Tangkap**	PDRB																		Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Jumlah produksi perikanan**	Jumlah																	Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dok					1,00	-	-	0,75	12.815,00	75,00	0,00	0,00	0,75	12.815	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Paket					75,00	-	-	71,25	12.782.981,89	95,00	0,00	0,00	71,25	12.782.982	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Paket					6,00	-	-	6,00	2.496.475,20	100,00	0,00	0,00	6,00	2.496.475	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.02		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Bina Kelompok**	Cakupan																		Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang					160,00	-	-	160,00	5.360.223,71	100,00	0,00	0,00	160	5.360.224	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	3	02.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Orang					40,00	-	-	40,00	11.425,50	100,00	0,00	0,00	40	11.426	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.03		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Jumlah produksi perikanan**	Jumlah																		Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.03	1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dok					1,00	-	-	0,85	13.855,36	85,00	0,00	0,00	0,85	13.855	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan					1,00	-	-	1,00	13.758,00	100,00	0,00	0,00	1,00	13.758	0,00	0,00	Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	3	02.04		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan**	Peningkatan																	Dinas Perikanan	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD			K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)		
	3	25	3	02.04	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Paket					1,00	-	-											Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	3	02.04	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi					1,00	-	-											Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	3	02.05		**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan**																			Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.05	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Paket					1,00	-	-											Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.05	2	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi					1,00	-	-											Dinas Perikanan	APBD Kab
	3	25	3	02.06		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan**	Peningkatan																		Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.06	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Paket					1,00	-	-											Dinas Perikanan	
	3	25	3	02.06	2	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Paket					1,00	-	-											Dinas Perikanan	APBD Kab
																		93,57	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																		ST	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	25	4			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya, Cakupan Bina Kelompok Perikanan**																		Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan**																		Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi					1,00	-	-											Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.01	2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Diterbitkan	Rekomendasi					1,00	-	-											Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase Cakupan Bina Kelompok Perikanan**	Cakupan																	Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang					40,00	-	-											Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok					40,00	-	-											Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Orang					60,00	-	-	59,42	40.722,10	99,04	0,00	0,00	59,42	40.722	0,00	0,00		Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.03		**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan**																		Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.03	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rekomendasi					1,00	-	-											Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.03	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi					1,00	-	-											Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan**																		Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket					8,00	-	-	8,00	2.417.870,03	100,00	0,00	0,00	8,00	2.417.870	0,00	0,00		Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket					3,00	-	-	3,00	2.939.325,02	100,00	0,00	0,00	3,00	2.939.325	0,00	0,00		Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dok					1,00	-	-	1,00	11.724,71	100,00	0,00	0,00	1,00	11.725	0,00	0,00		Dinas Perikanan	
	3	25	4	02.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang					40,00	-	-											Dinas Perikanan	
																		99,76	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																		ST	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	25	6			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Tingkat Konsumsi Ikan**																		Dinas Perikanan	
	3	25	6	02.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase Konsumsi Ikan**																		Dinas Perikanan	
	3	25	6	02.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Paket					1,00	-	-	1,00	25.311,25	100,00	0,00	0,00	1,00	25.311	0,00	0,00		Dinas Perikanan	
	3	25	6	02.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Konsumsi Ikan**																		Dinas Perikanan	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	3	25	6	02.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan	Paket					6,00	755.060,67	-	6,00	798.556,55	100,00	105,76	0,00	6,00	798.557	0,00	0,00	Dinas Perikanan	
																		100,00	**52,88**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								
																	Predikat Kinerja	**ST**	**R**	**SR**			**SR**	**SR**		
													755.060,667	**-**		**31.436.733,319**									
																	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	**98,07**	**13,22**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	26				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																				Disparpora	
	3	26	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga)**																			Disparpora	
	3	26	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan**																			Disparpora	
	3	26	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					20,00	-	-	19,98	139.287,21	99,90	0,00	0,00	19,98	139.287	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
	3	26	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	-	-											Disparpora	
	3	26	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentasi realisasi keuangan**																			Disparpora	
	3	26	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	11,89	4.215.854,89	99,11	0,00	0,00	11,89	4.215.855	0,00	0,00	Disparpora	
	3	26	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah spj yang terverifikasi	%					100,00	-	-	94,84	127.904,80	94,84	0,00	0,00	94,84	127.905	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
	3	26	1	02.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentasi capaian PAD**																			Disparpora	
	3	26	1	02.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentasi PAD	%					100,00	-	-	91,66	400.306,80	91,66	0,00	0,00	91,66	400.307	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
	3	26	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**pemenuhan kebutuhan umum disparpora**																			Disparpora	
	3	26	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					50,00	-	-	50,00	142.514,50	100,00	0,00	0,00	50,00	142.515	0,00	0,00	Disparpora	
	3	26	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas ASN	Kali					40,00	-	-	40,00	358.589,83	100,00	0,00	0,00	40,00	358.590	0,00	0,00	Disparpora	
	3	26	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah BMD yang dibeli**																			Disparpora	
	3	26	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,98	153.910,59	97,69	0,00	0,00	0,98	153.911	0,00	0,00	Disparpora	
	3	26	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan penunjang kantor**																			Disparpora	
	3	26	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan pembayaran listrik	%					100,00	-	-	98,00	142.533,83	98,00	0,00	0,00	98,00	142.534	0,00	0,00	Disparpora	
	3	26	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa umum kantor	%					100,00	-	-	100,00	349.010,00	100,00	0,00	0,00	100,00	349.010	0,00	0,00	Disparpora	
	3	26	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD yang layak digunakan**																			Disparpora	
	3	26	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					20,00	-	-	19,56	89.397,03	97,80	0,00	0,00	19,56	89.397	0,00	0,00	Disparpora	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**97,90**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	26	2			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)**																			Disparpora	
	3	26	2	02.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan wisata**																			Disparpora	
	3	26	2	02.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dok					4,00	-	-											Disparpora	APBD Kab
	3	26	2	02.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi					7,00	-	-	6,91	576.721,10	98,68	0,00	0,00	6,91	576.721	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
	3	26	2	02.03		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis **Lama kunjungan wisatawan**	dok					1,00	-	-		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000	0,00	0,00	Disparpora Disparpora	APBD Kab
	3	26	2	02.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sapras pariwisata yang dibangun	Unit					10	-	-	10,00	948.161,23	100,00	0,00	0,00	10,00	948.161	0,00	0,00	Disparpora	
	3	26	2	02.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaku wisata yang di bina**																			Disparpora	
	3	26	2	02.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan					2,00	-	-											Disparpora	APBD Kab
	3	26	2	02.04	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan					2,00	-	-	1,94	239.747,42								Disparpora	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**99,34**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	26	3			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)**																			Disparpora	
	3	26	3	02.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan wisata**																			Disparpora	
	3	26	3	02.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dok					3,00	-	-	3,00	133.664,50	99,97	0,00	0,00	3,00	133.665	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
	3	26	3	02.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan	Event					8,00	-	-	7,98	1.111.696,20	99,80	0,00	0,00	7,98	1.111.696	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**99,89**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	26	5			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD**																			Disparpora	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)						
	3	26	5	02.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Lama kunjungan wisatawan**																			Disparpora	
	3	26	5	02.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang					7,00	-	-											Disparpora	APBD Kab
	3	26	5	02.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang					3,00	-	-	2,96	1.169.543,24	98,57	0,00	0,00	2,96	1.169.543	0,00	0,00	Disparpora	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-		**10.898.843,179**								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN									
	3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																				Disperketanpan	
	3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																				Disperketanpan	
	3	27	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)**																			Disperketanpan	
	3	27	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah**																			Disperketanpan	
	3	27	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					1,00	-	-	0,99	21.043,50	99,00	0,00	0,00	0,99	21.044	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dok					1,00	-	-	1,00	3.975,00	100,00	0,00	0,00	1,00	3.975	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dok					1,00	-	-	1,00	3.959,95	100,00	0,00	0,00	1,00	3.960	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dok					1,00	-	-	1,00	4.023,00	100,00	0,00	0,00	1,00	4.023	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen	Dok					1,00	-	-	1,00	3.505,70	100,00	0,00	0,00	1,00	3.506	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Bulan					12,00	-	-	11,88	14.857,00	99,00	0,00	0,00	11,88	14.857	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penyediaan gaji, tunjangan, honorarium pengelola keuangan dan laporan keuangan**																			Disperketanpan	
	3	27	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pendapatan	Bulan					12,00	-	-	11,84	15.430.576,75	98,67	0,00	0,00	11,84	15.430.577	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	11,83	191.080,00	98,58	0,00	0,00	11,83	191.080	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Dok					1,00	-	-	1,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	1,00	3.500	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah**																			Disperketanpan	
	3	27	1	02.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Bulan					12,00	-	-	11,10	3.224,00	92,50	0,00	0,00	11,10	3.224	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya keikutsertaan bimbingan teknis dan pelatihan**																			Disperketanpan	
	3	27	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang					3,00	-	-	3,00	103.231,00	100,00	0,00	0,00	3,00	103.231	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**																			Disperketanpan	
	3	27	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Paket					1,00	8.716,00	-	1,00	8.716,00	100,00	100,00	0,00	1,00	8.716	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	6.008,10	-	1,00	6.008,10	100,00	100,00	0,00	1,00	6.008	0,00	0,00	Disperketanpan	
	3	27	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	168.081,65	-	0,97	163.012,75	97,00	96,98	0,00	0,97	163.013	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	41.283,15	-	0,97	40.058,15	97,00	97,03	0,00	0,97	40.058	0,00	0,00	Disperketanpan	
	3	27	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100,00	285.336,00	-	99,63	312.591,33	99,63	109,55	0,00	99,63	312.591	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan kendaraan dinas dan sarana prasarana penunjang urusan dinas**																			Disperketanpan	
	3	27	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					5,00	-	-	4,95	167.192,15	98,93	0,00	0,00	4,95	167.192	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya layanan jasa penunjang urusan dinas**																			Disperketanpan	
	3	27	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	10,00	116.744,10	83,33	0,00	0,00	10,00	116.744	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	11,95	49.170,00	99,58	0,00	0,00	11,95	49.170	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**																			Disperketanpan	
	3	27	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					345,00	-	-	236,39	70.596,22	68,52	0,00	0,00	236,39	70.596	0,00	0,00	Disperketanpan	
	3	27	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	%					100,00	-	-	79,48	15.874,00	79,48	0,00	0,00	79,48	15.874	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,99	14.769,00	99,00	0,00	0,00	0,99	14.769	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	3	27	2			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Jumlah Produksi Pertanian**																			Disperketanpan	
	3	27	2	02.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**terlaksananya pengawasan dan pendampingan sarana pertanian**																			Disperketanpan	
	3	27	2	02.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan					5,00	-	-	4,85	5.847.525,00	96,94	0,00	0,00	4,85	5.847.525	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	2	02.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan					23,00	-	-	18,41	3.235.490,40	80,05	0,00	0,00	18,41	3.235.490	0,00	0,00	Disperketanpan	
	3	27	2	02.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, mikroorganisme**																			Disperketanpan	
	3	27	2	02.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB					4,00	-	-	3,60	1.096.003,58	89,90	0,00	0,00	3,60	1.096.004	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD			K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)		
	3	27	2	02.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dok					7,00	-	-	6,22	2.361.198,50	88,89	0,00	0,00	6,22	2.361.199	0,00	0,00	Disperketanpan	
	3	27	2	02.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dok					1,00	-	-	1,00	11.250,00	100,00	0,00	0,00	1,00	11.250	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	2	02.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan pengendalian, pengawasan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak**																		Disperketanpan	
	3	27	2	02.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton					2,00	-	-	1,66	183.600,70	83,00	0,00	0,00	1,66	183.601	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	2	02.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan					1,00	-	-	0,97	14.484,00	97,00	0,00	0,00	0,97	14.484	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	2	02.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Terlaksananya pengadaan benih/bibit dan pakan ternak**																		Disperketanpan	
	3	27	2	02.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor					170,00	-	-		190.831,25								Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	2	02.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton					2	-	-										Disperketanpan	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	3	27	3			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia**																		Disperketanpan	
	3	27	3	02.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Terlaksanannya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan prasarana pertanian**																		Disperketanpan	
	3	27	3	02.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dok					1,00	-	-										Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	3	02.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian**																		Disperketanpan	
	3	27	3	02.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit					10,00	-	-	9,36	5.807.730,00	93,55	0,00	0,00	9,36	5.807.730	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	3	02.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					31,00	-	-	29,18	9.350.877,16	94,13	0,00	0,00	29,18	9.350.877	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	3	02.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					3,00	-	-	2,97	-	99,13	0,00	0,00	2,97	-	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	3	02.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					3,00	-	-	2,97	2.483.326,00	99,13	0,00	0,00	2,97	2.483.326	0,00	0,00	Disperketanpan	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	3	27	4			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**																		Disperketanpan	
	3	27	4	02.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis**																		Disperketanpan	
	3	27	4	02.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan					50,00	-	-	37,00	23.719,00	74,00	0,00	0,00	37,00	23.719	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	4	02.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan/produk hewan daerah**																		Disperketanpan	
	3	27	4	02.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan					182,00	-	-	181,38	24.866,50	99,66	0,00	0,00	181,38	24.867	0,00	0,00	Disperketanpan	
	3	27	4	02.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah**																		Disperketanpan	
	3	27	4	02.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan					50,00	-	-	50,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	50,00	6.000	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	4	02.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan					50,00	-	-	49,48	254.929,15	98,95	0,00	0,00	49,48	254.929	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	4	02.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Terlaksananya kegiatan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**																		Disperketanpan	
	3	27	4	02.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan					50,00	-	-	50,00	43.000,00	100,00	0,00	0,00	50,00	43.000	0,00	0,00	Disperketanpan	
	3	27	4	02.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan					50,00	-	-	49,96	45.231,00	99,92	0,00	0,00	49,96	45.231	0,00	0,00	Disperketanpan	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	3	27	5			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi**																		Disperketanpan	
	3	27	5	02.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**																		Disperketanpan	
	3	27	5	02.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha					10000,00	-	-	9103,00	331.481,00	91,03	0,00	0,00	9103,00	331.481	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	5	02.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha					50,00	-	-	46,40	5.519,00	92,80	0,00	0,00	46,40	5.519	0,00	0,00	Disperketanpan	
	3	27	5	02.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha					50,00	-	-	48,40	2.254,00	96,80	0,00	0,00	48,40	2.254	0,00	0,00	Disperketanpan	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	3	27	6			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin**																		Disperketanpan	
	3	27	6	02.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penerbitan izin usaha pertanian**																		Disperketanpan	
	3	27	6	02.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dok					30,00	-	-	11,52	988,00	38,40	0,00	0,00	11,52	988	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	6	02.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan					90	-	-	54,00	11.146,75	60,00	0,00	0,00	54,00	11.147	0,00	0,00	Disperketanpan	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	3	27	7			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kelompok Tani yang dibina**																		Disperketanpan	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)						
	3	27	7	02.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian**																			Disperketanpan	
	3	27	7	02.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit					3,00	-	-	2,98	300.069,00	99,33	0,00	0,00	2,98	300.069	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	7	02.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit					10,00	-	-	9,20	39.434,00	92,00	0,00	0,00	9,20	39.434	0,00	0,00	Disperketanpan	APBD Kab
	3	27	7	02.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unan					10,00	-	-	9,70	2.077.559,21	97,00	0,00	0,00	9,70	2.077.559	0,00	0,00	Disperketanpan	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**96,11**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN			**509.424,900**	**-**								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	**88,21**	**3,27**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	28				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**																				DLHK	
	3	28	4			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana**																			DLHK	
	3	28	4	02.01		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan/Rehabilitasi TAHURA**																			DLHK	
	3	28	4	02.01	1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	"Jumlah patroli bersama masyarakat mitra polhut secara berkala, papan informasi dan bahan penyuluhan dan Study Kerja ditaman Hutan Raya juanda Jawa Barat Tersedianya papan informasi"	%					100,00	-	-	83,33	122.376,60	83,33	0,00	0,00	83,33	122.377	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	3	28	4	02.01	5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah database dan terehabilitasinya ekosistem TAHURA	Ha					25,00	-	-	25,00	21.427,60	100,00	0,00	0,00	25,00	21.428	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
	3	28	4	02.01	8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	"Jumlah Pelaksanaan Best prastice di Lokasi TAHURA model Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pengembangan masyarakat TAHURA,Terlaksananya studi banding di Lokasi TAHURA model Pelaksanaan Workshop pengembangan masyarakat TAHURA Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan TAHURA Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan TAHURA"	kelompok					3,00	-	-	2,75	15.918,85	91,67	0,00	0,00	2,75	15.919	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**91,67**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN			**-**	**-**								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	**91,67**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	30				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																				DisdagrinUMKM	
	3	30	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM)**																			DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Teredianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																			DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					2,00	-	-	2,00	30.859,30	100,00	0,00	0,00	2,00	30.859	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok					2,00	-	-	2,00	8.990,00								DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok					2,00	-	-	2,00	4.527,85	100,00	0,00	0,00	2,00	4.528	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	-	-	1,00	3.230,70	100,00	0,00	0,00	1,00	3.231	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					4,00	-	-	4,00	5.749,95	100,00	0,00	0,00	4,00	5.750	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah**																			DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	4.049.299,94	100,00	0,00	0,00	12,00	4.049.300	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok					1,00	-	-	1,00	17.160,00	100,00	0,00	0,00	1,00	17.160	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok					12,00	-	-	12,00	108.310,00	100,00	0,00	0,00	12,00	108.310	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	-	-	1,00	4.704,75	100,00	0,00	0,00	1,00	4.705	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					12,00	-	-	12,00	10.436,85	100,00	0,00	0,00	12,00	10.437	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																			DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2	-	-	2,00	14.643,00	100,00	0,00	0,00	2,00	14.643	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					50,00	-	-	40,00	5.442,00	80,00	0,00	0,00	40,00	5.442	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					10,00	-	-	10,00	47.852,24	100,00	0,00	0,00	10,00	47.852	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya/terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**																			DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit					15,00	-	-	13,00	10.943,30	86,67	0,00	0,00	13,00	10.943	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					4,00	-	-	4,00	139.380,39	100,00	0,00	0,00	4,00	139.380	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					2,00	-	-	2,00	10.113,05	100,00	0,00	0,00	2,00	10.113	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					2,00	-	-	2,00	69.411,70	100,00	0,00	0,00	2,00	69.412	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3,00	-	-	3,00	23.839,95	100,00	0,00	0,00	3,00	23.840	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok					2,00	-	-	2,00	42.350,00	100,00	0,00	0,00	2,00	42.350	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)					
	3	30	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali					50,00	-	-	50,00	440.606,03	100,00	0,00	0,00	50,00	440.606	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	3,00	255.000,00	100,00	0,00	0,00	3,00	255.000	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket					3,00	-	-										DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1,00	-	-	0,80	3.330,00	79,53	0,00	0,00	0,80	3.330	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	-	-	12,00	149.754,28	100,00	0,00	0,00	12,00	149.754	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1,00	-	-	0,32	12.085,00	32,00	0,00	0,00	0,32	12.085	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	362.977,32	100,00	0,00	0,00	12,00	362.977	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan					43,00	-	-	40,00	61.083,50	93,02	0,00	0,00	40,00	61.084	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					3,00	-	-	3,00	64.950,00	100,00	0,00	0,00	3,00	64.950	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**91,53**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	30	3			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	3	02.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	3	02.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun, Renovasi dan di Rehabilitasi	Unit					5,00	-	-	5,00	30.877.606,70	100,00	0,00	0,00	5,00	30.877.607	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	3	02.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	3	02.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dok					12,00	-	-	12,00	1.614.100,90	100,00	0,00	0,00	12,00	1.614.101	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	30	4			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	4	02.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	4	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Bulan					12,00	-	-	12,00	40.466,00	100,00	0,00	0,00	12,00	40.466	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	30	5			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Promosi Komoditi Ekspor**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	5	02.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pameran Dagang Nasional dan Lokal**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	5	02.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha					5,00	-	-	5,00	12.490,00	100,00	0,00	0,00	5	12.490	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	30	5	02.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha					5,00	-	-	5,00	79.391,00	100,00	0,00	0,00	5,00	79.391	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	30	6			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	6	02.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**																		DisdagrinUMKM	
	3	30	6	02.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera, Tera Ulang	Unit					750,00	-	-	750,00	74.162,20	100,00	0,00	0,00	750,00	74.162	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	
	3	30	6	02.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang					30,00	-	-	30,00	58.812,80	100,00	0,00	0,00	30,00	58.813	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
																	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN			-	-	**38.714.060,699**								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		**98,31**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	3	31				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																			DisdagrinUMKM	
	3	31	2			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi**																		DisdagrinUMKM	
	3	31	2	02.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**																		DisdagrinUMKM	
	3	31	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dok					1,00	-	-	0,66	692,00	65,70	0,00	0,00	0,66	692	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
	3	31	2	02.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dok					1,00	-	-	1,00	11.171,00	100,00	0,00	0,00	1,00	11.171	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)		
	3	31	2	02.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dok					1	-	-	1,00	6.934.469,25	100,00	0,00	0,00	1,00	6.934.469	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										88,57	0,00	0,00			0,00	0,00		
								Predikat Kinerja										T	SR	SR			SR	SR		
	3	31	3			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**																	DisdagrinUMKM	
	3	31	3	02.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**																	DisdagrinUMKM	
	3	31	3	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok					1,00	-	-	1,00	2.622,00	100,00	0,00	0,00	1,00	2.622	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
								Predikat Kinerja										ST	SR	SR			SR	SR		
	3	31	4			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**																	DisdagrinUMKM	
	3	31	4	02.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Pameran**																	DisdagrinUMKM	
	3	31	4	02.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dok					1,00	-	-	1,00	256.032,56	100,00	0,00	0,00	1,00	256.033	0,00	0,00	DisdagrinUMKM	APBD Kab
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
								Predikat Kinerja										ST	SR	SR			SR	SR		
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN						-	-		7.204.986,805									
								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN										96,19	0,00	0,00			0,00	0,00		
								PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN										ST	SR	SR			SR	SR		
	4	1				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		SETDA	
	4	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat Daerah)**																		SETDA	
	4	1	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, RKAP, DPA, DPAP, lingkup Sekretariat Daerah**																		SETDA	
	4	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2. Terlaksananya proses pengelolaan keuangan Setda dan Koordinasi Instansi terkait	Bulan					12,00	-	-	12,00	128.284,61	100,00	0,00	0,00	12,00	128.285	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Gaji dan Tunjangan, Administrasi Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaporan OPD**																		SETDA	
	4	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan					12,00	-	-	12,00	9.519.819,35	100,00	0,00	0,00	12,00	9.519.819	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Perbendaharaan dan sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda	Bulan					12,00	-	-	12,00	175.022,46	100,00	0,00	0,00	12,00	175.022	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					16	-	-	16,00	49.760,70	100,00	0,00	0,00	16,00	49.761	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada lingkup Sekretariat Daerah**																		SETDA	
	4	1	1	02.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kali					1,00	-	-	1,00	35.801,49	100,00	0,00	0,00	1,00	35.801	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Bimbingan Teknis Latihan Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural dan Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya**																		SETDA	
	4	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Hari-hari tertentu beserta Atribut Kelengkapannya	Pasang					51,00	-	-	51,00	139.624,00	100,00	0,00	0,00	51,00	139.624	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					2,00	-	-										SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum lingkup Sekretariat Daerah**																		SETDA	
	4	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan gedung Kantor Daerah, Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Gedung					3,00	-	-	3,00	65.388,48	100,00	0,00	0,00	3,00	65.388	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor lingkup Setda	Jenis					4,00	-	-	4,00	368.793,00	100,00	0,00	0,00	4,00	368.793	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Pelayanan dan tugas kedinasan lingkup Setda, Dialog Audiens dengan Tokoh Masyarakat, Kunjungan Kerja Pejabat Negara serta tersedianya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Sekretariat Daerah	Bulan					12,00	-	-	12,00	156.319,50	100,00	0,00	0,00	12,00	156.320	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran, Tabloid, Majalah serta Sarana Prasarana Komunikasi dan Terjalinnya Kerjasama Media Massa di Kab. Bulukumba	Bulan					12,00	-	-	12,00	106.610,00	100,00	0,00	0,00	12,00	106.610	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penerimaan kunjungan tamu Pejabat Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Terlaksananya dialog audiens dan tokoh masyarakat	Bulan					12,00	-	-	12,00	790.769,85	100,00	0,00	0,00	12,00	790.770	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi.	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.121.364,51	100,00	0,00	0,00	12,00	1.121.365	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		SETDA	
	4	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					8,00	-	-	8,00	1.523.705,00	100,00	0,00	0,00	8,00	1.523.705	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					4	-	-	4,00	294.609,00	100,00	0,00	0,00	4,00	294.609	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	2,00	57.201,69	100,00	0,00	0,00	2,00	57.202	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	1,00	672.541,38	100,00	0,00	0,00	1,00	672.541	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					6,00	-	-	6,00	248.179,40	100,00	0,00	0,00	6,00	248.179	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	4	1	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**erpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.**																		SETDA	
	4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan					12,00	-	-	12,00	695.142,91	100,00	0,00	0,00	12,00	695.143	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bupati dan Rumah Jabatan	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.201.597,60	100,00	0,00	0,00	12,00	1.201.598	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah**																		SETDA	
	4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					9,00	-	-	8,50	241.604,35	94,44	0,00	0,00	8,50	241.604	0,00	0,00	SETDA	
	4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					25,00	-	-	23,00	279.372,24	92,00	0,00	0,00	23,00	279.372	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					4,00	-	-	3,97	1.544.823,65	99,25	0,00	0,00	3,97	1.544.824	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,95	54.813,05	95,00	0,00	0,00	0,95	54.813	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**																		SETDA	
	4	1	1	02.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan					12,00	-	-	12,00	169.609,42	100,00	0,00	0,00	12,00	169.609	0,00	0,00	SETDA	
	4	1	1	02.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan					12,00	-	-	12,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	600.000	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**																		SETDA	
	4	1	1	02.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan					12,00	-	-	12,00	840.582,97	100,00	0,00	0,00	12,00	840.583	0,00	0,00	SETDA	
	4	1	1	02.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan					12,00	-	-	12,00	637.922,14	100,00	0,00	0,00	12,00	637.922	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.13		**Penataan Organisasi**	**Meningkatnya konsistensi kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan standar, Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh UPP, Terciptanya pemerintahan yang Bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja dalam rangka Reformasi Birokrasi serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah lingkup Sekretariat Daerah**																		SETDA	
	4	1	1	02.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Dokumen Evaluasi Jabatan, Dokumen Standar Kompetensi Manajerial PNS dan Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah serta tersusunnya Ranperda dan Ranperbub	Perangkat Daerah					36,00	-	-	36,00	69.991,21	100,00	0,00	0,00	36,00	69.991	0,00	0,00	SETDA	
	4	1	1	02.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik dan Penerapannya pada Unit Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SKPD					5,00	-	-	5,00	41.413,99	100,00	0,00	0,00	5,00	41.414	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Reformasi Birokrasi	Dok					6,00	-	-	6,00	26.629,86	100,00	0,00	0,00	6,00	26.630	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur dan Dokumen Peta Proses Bisnis	Perangkat Daerah					36,00	-	-	36,00	87.755,54	100,00	0,00	0,00	36,00	87.756	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dok					2,00	-	-	2,00	45.036,25	100,00	0,00	0,00	2,00	45.036	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terlaksananya Kegiatan Komunikasi Pimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Daerah, Tercapainya Kualitas Pelayanan Ketersediaan informasi Publik melalui PPID serta terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan sesuai dengan prosedur dan Peraturan yang berlaku sebagai Akuntabilitas Kinerja.**																		SETDA	
	4	1	1	02.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Keprotokolan Pimpinan Daerah dan Tersedianya Sarana Penunjang Keprotokolan	Bulan					12,00	-	-	12,00	182.033,64	100,00	0,00	0,00	12,00	182.034	0,00	0,00	SETDA	
	4	1	1	02.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan Jumpa Pers dan Dialog Publik, Pembuatan Press Rilis Kegiatan Pimpinan dan Pembuatan Sambutan Bupati/Wakil Bupati	Bulan					12,00	-	-	12,00	177.137,68	100,00	0,00	0,00	12,00	177.138	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	1	02.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Pimpinan,	Bulan					12,00	-	-	12,00	140.472,57	100,00	0,00	0,00	12,00	140.473	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,45**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	4	1	2			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu**																		SETDA	
	4	1	2	02.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terpenuhinya penyusunan dokumen LKPJ, LPPD, RLPPD serta memori serah terima jabatan dan terfasilitasinya pelaksanaan otonomi daerah serta tersedianya laporan pemerintahan yang baik di Kecamatan dan Kelurahan**																		SETDA	
	4	1	2	02.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dok					5,00	-	-	5,00	60.792,23	100,00	0,00	0,00	5,00	60.792	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	2	02.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan,	Bulan					12,00	-	-	12,00	89.305,45	100,00	0,00	0,00	12,00	89.305	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	2	02.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dok					27,00	-	-	27,00	175.154,07	100,00	0,00	0,00	27,00	175.154	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	2	02.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**erlaksananya kegiatan pada program Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial serta Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat.**																		SETDA	
	4	1	2	02.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1. Jumlah Guru Kontrak TKA/TPA Penerima Honor/Gaji	Orang					57,00	-	-	57,00	1.744.131,21	100,00	0,00	0,00	57,00	1.744.131	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	4	1	2	02.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dok					5,00	-	-	5,00	50.902,50	100,00	0,00	0,00	5,00	50.903	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	2	02.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah Calon/Jamaah Haji yang mendapatkan Pelayanan	Kali					2,00	-	-	2,00	40.469,65	100,00	0,00	0,00	2,00	40.470	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	2	02.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Meningkatnya pelayanan bantuan hukum dan penanganan kasus di Pemerintah Kabupaten, Terselesaikannya Draft Rancangan Peraturan Daerah.**																			SETDA	
	4	1	2	02.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dok					100,00	-	-	100,00	135.561,88	100,00	0,00	0,00	100,00	135.562	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	2	02.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum	Ranperda					11,00	-	-	11,00	147.426,20	100,00	0,00	0,00	11,00	147.426	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	2	02.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dok					200,00	-	-	200,00	126.804,10	100,00	0,00	0,00	200,00	126.804	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	4	1	3			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Peningkatan jumlah lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing, Persentase Jumlah Laporan DAK dan APBD dari OPD tepat waktu, Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana.**																			SETDA	
	4	1	3	02.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase ketersediaan Informasi Produksi Daerah untuk Promosi dan Investasi, Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat wilayah terpencil, Tersedianya Data Potensi Panas Bumi, Meningkatnya kemampuan modal kelompok-kelompok usaha dimasyarakat dan Tersusunnya Laporan Tingkat Inflasi di Kab. Bulukumba**																			SETDA	
	4	1	3	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dok					4	-	-	4,00	123.276,37	100,00	0,00	0,00	4,00	123.276	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	3	02.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan					12	-	-	12,00	89.313,25	100,00	0,00	0,00	12,00	89.313	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	3	02.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dok					1	-	-	0,99	47.166,55	98,50	0,00	0,00	0,99	47.167	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	3	02.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Tercapainya pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dan Pengendalian Evaluasi Program Pembangunan serta Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.**																			SETDA	
	4	1	3	02.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1. Tersusunnya evaluasi Renja/ Renstra Sekretariat Daerah dan Laporan Pembangunan	Dok					4	-	-	4,00	55.684,00	100,00	0,00	0,00	4,00	55.684	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	3	02.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan					24	-	-	24,00	22.180,90	100,00	0,00	0,00	24,00	22.181	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	3	02.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Data Laporan dan Pengadaan Pemerintah secara berkala serta Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi, Tersedianya Dokumen Data Laporan Data Alokasi Khusus (DAK) Kab. Bulukumba	Bulan					12	-	-	12,00	21.008,32	100,00	0,00	0,00	12,00	21.008	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	3	02.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Terbentuknya Pelayanan Pengadaan secara Elektronik, Tersedianya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Meningkatnya Kapasitas SDM, Asosiasi/Penyedia/Aparatur yang mengikuti pelatihan Aplikasi SPSE dan Aplikasi SIRUP**																			SETDA	
	4	1	3	02.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Terlaksananya Proses Barang dan Jasa	Dok					65,00	-	-	65,00	23.912,70	100,00	0,00	0,00	65,00	23.913	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	3	02.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dok					24,00	-	-	24,00	76.764,25	100,00	0,00	0,00	24,00	76.764	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
	4	1	3	02.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Terlaksananya Pelatihan Aplikasi SIRUP dan Aplikasi SPSE bagi ASN dan Asosiasi/Penyedia Barang Jasa	Orang					150,00	-	-	150,00	38.155,70	100,00	0,00	0,00	150,00	38.156	0,00	0,00	SETDA	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-	-	**25.557.742,794**									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN									
	4	2				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD**																			DPRD	
	4	2	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat DPRD)**																			DPRD	
	4	2	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen, Penganggaran dan Pelaporan Tepat waktu**																			DPRD	
	4	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					5,00	-	-	4,00	19.352,95	80,00	0,00	0,00	4,00	19.353	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	-	-										DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	%					100,00	-	-	82,67	6.822,40	82,67	0,00	0,00	82,67	6.822	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat DPRD Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pengeloaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan**																			DPRD	
	4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	11,74	3.035.446,65	97,86	0,00	0,00	11,74	3.035.447	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	%					100,00	-	-	93,75	128.154,05	93,75	0,00	0,00	93,75	128.154	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	23.941,10	100,00	0,00	0,00	12,00	23.941	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok					1,00	-	-	0,91	3.656,80	91,00	0,00	0,00	0,91	3.657	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dok					2,00	-	-	1,33	5.062,50	66,67	0,00	0,00	1,33	5.063	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	4	2	1	02.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penatausahaannya**																		DPRD	
	4	2	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah SKPD	%					100,00	-	-	94,50	13.922,60	94,50	0,00	0,00	94,50	13.923	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																		DPRD	
	4	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Pimpinan & Anggota DPRD dan Dinas Pimpinan & Anggota DPRD	Pasang					120,00	-	-	118,19	471.505,00	98,49	0,00	0,00	118,19	471.505	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali					3,00	-	-	2,81	-	93,75	0,00	0,00	2,81	-	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bulan					12,00	-	-	8,35	28.064,58	69,57	0,00	0,00	8,35	28.065	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																		DPRD	
	4	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	84.167,75	100,00	0,00	0,00	12,00	84.168	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	%					100,00	-	-	100,00	5.130,00	100,00	0,00	0,00	100,00	5.130	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	817.071,02	100,00	0,00	0,00	12,00	817.071	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%					100,00	-	-	93,75	15.000,00	93,75	0,00	0,00	93,75	15.000	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	851.315,52	100,00	0,00	0,00	12,00	851.316	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																		DPRD	
	4	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	%					100	-	-	74,50	21.350,00	74,50	0,00	0,00	74,50	21.350	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%					100	-	-	95,97	101.945,00	95,97	0,00	0,00	95,97	101.945	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%					100	-	-	100,00	396.544,30	100,00	0,00	0,00	100,00	396.544	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintan Daerah**																		DPRD	
	4	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya layanan Surat Menyurat	Kecamatan					10,00	-	-										DPRD	
	4	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pelayanan Jasa internet, Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Bulan					12,00	-	-	12,00	333.560,97	100,00	0,00	0,00	12,00	333.561	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Cenderamata/Plakat	Unit					19,00	-	-										DPRD	
	4	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor, Terbayarnya Gaji supporting staf Sekretariat DPRD	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.175.539,35	100,00	0,00	0,00	12,00	1.175.539	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																		DPRD	
	4	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit					1,00	-	-	0,94	29.981,75	94,00	0,00	0,00	0,94	29.982	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua dan Empat dan Terpeliharanya Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat	Unit					16,00	-	-	14,55	88.419,00	90,91	0,00	0,00	14,55	88.419	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel	%					100,00	-	-										DPRD	
	4	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan					12,00	-	-	12,00	827.848,28	100,00	0,00	0,00	12,00	827.848	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan					12,00	-	-	12,00	34.442,00	100,00	0,00	0,00	12,00	34.442	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%					100,00	-	-	100,00	228.115,00	100,00	0,00	0,00	100,00	228.115	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**																		DPRD	
	4	2	1	02.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPR	Bulan					12,00	-	-	11,85	19.143.217,00	98,75	0,00	0,00	11,85	19.143.217	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	1	02.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpeliharanya Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali					1,00	-	-	0,68	68.799,10	68,00	0,00	0,00	0,68	68.799	0,00	0,00	DPRD	APBD Kab
	4	2	1	02.16		**Layanan Administrasi DPRD**	**Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD**																		DPRD	
	4	2	1	02.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya rapat - rapat paripurna, koordinasi dan Konsultasi DPRD	Bulan					12,00	-	-	12,00	125.549,50	100,00	0,00	0,00	12,00	125.550	0,00	0,00	DPRD	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**92,56**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	4	2	2			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase PROLEGDA yang Terealisir, "Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD, Persentase Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya**																		DPRD	
	4	2	2	02.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi pembahasannya**																		DPRD	
	4	2	2	02.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dok					19,00	-	-	14,00	91.780,40	73,68	0,00	0,00	14,00	91.780	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	2	02.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksanya Rapat - rapat paripurna	Bulan					12,00	-	-	12,00	349.382,65	100,00	0,00	0,00	12,00	349.383	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	2	02.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Sinkronisasi Produk Hukum DPRD	Kali					12,00	-	-	12,00	86.346,25	100,00	0,00	0,00	12,00	86.346	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	2	02.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terciptanya Ranperda Inisiatif DPRD	Buah					2,00	-	-	1,20	149.830,10	60,00	0,00	0,00	1,20	149.830	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	2	02.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Cakupan Anggota DPRD yang Kompeten dibidangnya**																		DPRD	
	4	2	2	02.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali					6	-	-	3,30	1.595.043,37	55,00	0,00	0,00	3,30	1.595.043	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	2	02.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi dewan	Bulan					12	-	-	6,00	417.594,65	50,00	0,00	0,00	6,00	417.595	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	2	02.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bulan					12	-	-	12,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	90.000	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	2	02.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang					8	-	-	8,00	336.000,00	100,00	0,00	0,00	8,00	336.000	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	2	02.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Terfasilitasinya Kegiatan Reses dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**																		DPRD	
	4	2	2	02.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Penyerapan Aspirasi dan Kunjungan Kerja Dalam daerah	Bulan					12,00	-	-	2,46	5.106,00	20,50	0,00	0,00	2,46	5.106	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	2	02.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Penerimaan Aspirasi Masyarakat dan Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Bulan					12,00	-	-	12,00	19.629,00	100,00	0,00	0,00	12,00	19.629	0,00	0,00	DPRD	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	4	2	2	02.05	3	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	Kali					3,00	-	-	2,46	4.029.525,06	82,08	0,00	0,00	2,46	4.029.525	0,00	0,00	DPRD	
	4	2	2	02.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD serta Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**																		DPRD	
	4	2	2	02.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Tugas - Tugas DPRD	Bulan					12,00	-	-	11,10	4.767.721,71	92,50	0,00	0,00	11,10	4.767.722	0,00	0,00	DPRD	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**77,81**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN						-	-		**40.021.883,368**									
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN										**85,18**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
							PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN										**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	5	1				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																			Bappelitbangda	
	5	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Bappelitbangda)**																		Bappelitbangda	
	5	1	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan lingkup Bapelitbangda**																		Bappelitbangda	
	5	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					7,00	-	-	7,00	115.681,66	100,00	0,00	0,00	7,00	115.682	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok					2,00	-	-	2,00	14.132,95	100,00	0,00	0,00	2,00	14.133	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok					2,00	-	-	2,00	11.535,80	100,00	0,00	0,00	2,00	11.536	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					14,00	-	-										Bappelitbangda	
	5	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1,00	-	-	1,00	43.118,05	100,00	0,00	0,00	1,00	43.118	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan serta administrasi perkantoran Lingkup Bappeda Kab.Bulukumba**																		Bappelitbangda	
	5	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	4.227.307,16	100,00	0,00	0,00	12,00	4.227.307	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan dalam pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan					12,00	-	-	10,56	87.410,70	88,00	0,00	0,00	10,56	87.411	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	-	-	1,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	1,00	5.000	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Bappeda di bidang administrasi,teknis dan fungsional terutama pada sistem Perencanaan pembangunan**																		Bappelitbangda	
	5	1	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					1,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					*100,00*	-	-										Bappelitbangda	
	5	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2,00	-	-	2,00	14.643,00	100,00	0,00	0,00	2,00	14.643	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					50,00	-	-	50,00	41.560,10	100,00	0,00	0,00	50,00	41.560	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba**																		Bappelitbangda	
	5	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	6.499,75	100,00	0,00	0,00	1,00	6.500	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	1,00	7.000	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	106.995,40	100,00	0,00	0,00	1,00	106.995	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	11.733,25	100,00	0,00	0,00	1,00	11.733	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12,00	-	-	12,00	9.538,08	100,00	0,00	0,00	12,00	9.538	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					98,00	-	-	98,00	161.444,96	100,00	0,00	0,00	98,00	161.445	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok					1,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**meningkatnya kinerja aparatur Bapelitbangda**																		Bappelitbangda	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit					1,00	-	-	1,00	307.300,00	100,00	0,00	0,00	1,00	307.300	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					8,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	1,00	44.616,55	100,00	0,00	0,00	1,00	44.617	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba**																		Bappelitbangda	
	5	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	100.651,55	100,00	0,00	0,00	12,00	100.652	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					*1,00*	-	-										Bappelitbangda	
	5	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	485.982,99	100,00	0,00	0,00	12,00	485.983	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba**																		Bappelitbangda	
	5	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					*1,00*	-	-	1,00	12.128,00	100,00	0,00	0,00	1,00	12.128	0,00	0,00	Bappelitbangda	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	5	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					8,00	-	-	7,63	35.684,00	95,42	0,00	0,00	7,63	35.684	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					1,00	-	-	1,00	14.299,00	100,00	0,00	0,00	1,00	14.299	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,03	19.517,00	3,39	0,00	0,00	0,03	19.517	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	5	1	2			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD erciptanya sinergi antara Dokumen Perencanaan Daerah dan Dokumen Perencanaan OPD**																		Bappelitbangda	
	5	1	2	02.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**																				Bappelitbangda	
	5	1	2	02.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dok					*1,00*	-	-										Bappelitbangda	
	5	1	2	02.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita acara					1,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	2	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan forum gabungan OPD dalam penyusunan RPJPD, RENSTRA dan RENJA	Kali					1,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	2	02.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara					1,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	2	02.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang yang disediakan	Kecamatan					10,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	2	02.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dok					1,00	-	-	0,71	298.025,23	71,00	0,00	0,00	0,71	298.025	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	2	02.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Terwujudnya akurasi, efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan dengan dukungan basis data yang akurat guna peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui percepatan dan optimalisasi pelaksanaan program-program Pembangunan Daerah**																			Bappelitbangda	
	5	1	2	02.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	*Dok*					*1,00*	-	-										Bappelitbangda	
	5	1	2	02.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang					37,00	-	-	33,97	226.195,69	91,82	0,00	0,00	33,97	226.196	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	2	02.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku					1,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	2	02.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaskanaan pembangunan di daerah**																			Bappelitbangda	
	5	1	2	02.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan					*3,00*	-	-	2,50	135.036,23	83,33	0,00	0,00	2,50	135.036	0,00	0,00	Bappelitbangda	
	5	1	2	02.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan					4,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	5	1	3			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan**																		Bappelitbangda	
	5	1	3	02.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Trwjdnya rapat,asistensi,sosialisasi,konsult. monev peny. dok kemisk. (RPKD&LP2KD),terbentuknya tim koor pnnggulangan kmisknan&tim penye revisi RPJMDes sub bid. pmrinthn kpndudukan capil&pemb desa,Koord. bid KESOS,PPPA &PPKB,PenyMatriks. Capaian Pemb.SDGs 2018-2021,fasilitasi&verifikasi prog Kab/Kota Sehat,Kord.Keg.Penceghn & Penanganan Stunting,trbntknya tim prceptan pningktan IPM,&Koord bid pendidikan,pemuda&olah raga, perpus&arsip, Koord. Data Base Sekolah (SD,SMP)**																			Bappelitbangda	
	5	1	3	02.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinas,sosialisasi,konsultasi dan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Paket					*18,00*	-	-	16,26	109.284,24	90,36	0,00	0,00	16,26	109.284	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan					4,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan					4,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan					4,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dok					1,00	-	-	0,89	120.839,80	88,93	0,00	0,00	0,89	120.840	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan					4,00	-	-	4,00	75.724,80	100,00	0,00	0,00	4,00	75.725	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan					4,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi,konsultasi danmonitoring Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kali					24,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	5	1	3	02.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**terlaksananya keg Koordinasi, rapat koordinasi, Asistensi, Monev Penyusunan dok Pere Pembangunan Bid pnnamn modal&tenaga ,perindustrian &perdagangan, pariwisata, koperasi, usaha kecil & menengah ,Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terhadap OPD Tehnis terkait**																			Bappelitbangda	
	5	1	3	02.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	*Dok*					*1,00*	-	-	0,91	34.379,00	91,07	0,00	0,00	0,91	34.379	0,00	0,00	Bappelitbangda	
	5	1	3	02.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan					4,00	-	-	2,90	27.201,38	72,50	0,00	0,00	2,90	27.201	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan					4,00	-	-	3,00	17.932,15	75,00	0,00	0,00	3,00	17.932	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan					1,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kali					19,00	-	-	14,66	43.192,65	77,16	0,00	0,00	14,66	43.193	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan					4,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dok					4,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kali					24,00	-	-										Bappelitbangda	APBD Kab
	5	1	3	02.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Peningkatan kualitas,kuantitas bidang infrastruktur dan kewilayahan**																			Bappelitbangda	
	5	1	3	02.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kali					*27,00*	-	-	25,19	160.437,03	93,30	0,00	0,00	25,19	160.437	0,00	0,00	Bappelitbangda	
	5	1	3	02.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kali					27,00	-	-	25,44	175.786,99	94,23	0,00	0,00	25,44	175.787	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								
																		Predikat Kinerja								
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN					-	-		7.307.815,127										
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN								
																		PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN								
	5	2				**KEUANGAN**																				BPKPD	
	5	2	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPKPD)**																			BPKPD	
	5	2	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																			BPKPD	
	5	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					5,00	-	-	3,90	62.810,13	78,00	0,00	0,00	3,90	62.810	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	Dok					2,00	-	-	2,00	10.241,90	100,00	0,00	0,00	2,00	10.242	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran	Dok					2,00	-	-										BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok					2,00	-	-	2,00	6.579,80	100,00	0,00	0,00	2,00	6.580	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan	Dok					2,00	-	-										BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	-	-	1,00	3.245,30	100,00	0,00	0,00	1,00	3.245	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Bulan					12,00	-	-	12,00	75.384,70	100,00	0,00	0,00	12,00	75.385	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen laporan keuangan tepat waktu**																			BPKPD	
	5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	9.365.206,68	100,00	0,00	0,00	12,00	9.365.207	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	25.969,05	100,00	0,00	0,00	12,00	25.969	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	257.590,50	100,00	0,00	0,00	12,00	257.591	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	-	-	1,00	5.773,25	100,00	0,00	0,00	1,00	5.773	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					1,00	-	-	0,94	-	93,75	0,00	0,00	0,94	-	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok					1,00	-	-	1,00	1.799,70	100,00	0,00	0,00	1,00	1.800	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata nilai prilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN**																			BPKPD	
	5	2	1	02.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Orang					57,00	-	-	57,00	11.231,50	100,00	0,00	0,00	57,00	11.232	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2,00	-	-	1,53	46.286,00	76,67	0,00	0,00	1,53	46.286	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					6,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					9,00	-	-	8,33	7.462,00	92,50	0,00	0,00	8,33	7.462	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum kantor**																			BPKPD	
	5	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Paket					1,00	-	-	1,00	32.199,20	100,00	0,00	0,00	1,00	32.199	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					12,00	-	-	12,00	34.851,00	100,00	0,00	0,00	12,00	34.851	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	1,00	4.409,20	100,00	0,00	0,00	1,00	4.409	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	5	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor BPKD yang tersedia	Bulan					12,00	-	-	12,00	260.747,57	100,00	0,00	0,00	12,00	260.748	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar Spanduk dan Penggandaan yang disiapkan	Bulan					12,00	-	-	12,00	252.096,65	100,00	0,00	0,00	12,00	252.097	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.080,00	100,00	0,00	0,00	12,00	1.080	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BULAN					12,00	-	-	12,00	81.169,50	100,00	0,00	0,00	12,00	81.170	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BULAN					12,00	-	-	12,00	188.103,85	100,00	0,00	0,00	12,00	188.104	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**																		BPKPD	
	5	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Eselon II	Unit					1,00	-	-										BPKPD	
	5	2	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					7,00	-	-	6,91	64.320,00	98,67	0,00	0,00	6,91	64.320	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					75,00	-	-	75,00	74.000,00	100,00	0,00	0,00	75,00	74.000	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					5,00	-	-	5,00	506.001,46	100,00	0,00	0,00	5,00	506.001	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Pagar, Pintu Gerbang, dan Papan Nama Kantor"	Paket					1,00	-	-	0,50	15.000,00	50,00	0,00	0,00	0,50	15.000	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang tersedia	Buah					35,00	-	-	24,06	6.110,00	68,75	0,00	0,00	24,06	6.110	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor yang tersedia	Buah					7,00	-	-										BPKPD	
	5	2	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**																		BPKPD	
	5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pemenuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Diadakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	318.730,90	100,00	0,00	0,00	12,00	318.731	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BULAN					12,00	-	-	12,00	1.359.145,00	100,00	0,00	0,00	12,00	1.359.145	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik**																		BPKPD	
	5	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	-	-	0,90	10.563,68	90,00	0,00	0,00	0,90	10.564	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					52,00	-	-	42,62	88.541,99	81,97	0,00	0,00	42,62	88.542	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur Kantor yang dipelihara	Buah					5,00	792,50	-	5,00	792,50	100,00	100,00	0,00	5,00	793	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	Bulan					12,00	-	-	12,00	48.050,00	100,00	0,00	0,00	12,00	48.050	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					24,00	-	-	24,00	42.366,00	100,00	0,00	0,00	24,00	42.366	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**92,29**	**2,86**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	5	2	2			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**																		BPKPD	
	5	2	2	02.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**"Tersedianya dokumen perencanaan anggaran daerah, dokumen KUA PPAS, KUA Perubahan PPAS, RKA, RKAP, DPA, DPAP, Perda APBD, Perda APBDP, Perbup Penjabaran APBD, Perbup Penjabaran Perubahan APBD, Perbup pedoman penyusunan anggaran, Perbup pokok- pokok pengelolaan keuangan, Sisdur Pedoman penyusunan APBD, Data Potensi Pendapatan, DPA Belanja Pemda, DPA Pembiayaan, dll."**																		BPKPD	
	5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dok					2	-	-	2,00	144.613,75	100,00	0,00	0,00	2,00	144.614	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dok					2	-	-	2,00	58.497,54	100,00	0,00	0,00	2,00	58.498	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD terverifikasi	opd					48	-	-	48,00	84.142,75	100,00	0,00	0,00	48,00	84.143	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan rencana kerja dan anggaran SKPD terverifikasi	opd					48	-	-	45,40	34.042,00	94,59	0,00	0,00	45,40	34.042	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba terverifikasi	opd					48	-	-	48,00	23.091,60	100,00	0,00	0,00	48,00	23.092	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba terverifikasi	opd					48	-	-	44,11	18.900,00	91,89	0,00	0,00	44,11	18.900	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	Dok					2	-	-	2,00	269.420,75	100,00	0,00	0,00	2,00	269.421	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok					2	-	-	2,00	206.864,94	100,00	0,00	0,00	2,00	206.865	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah buku peraturan bupati tentang pokokpokok pengelolaan keuangan daerah dan jumlah buku sisdur keuangan tentang pedoman penyusunan APBD	Buku					2	-	-	2,00	34.331,65	100,00	0,00	0,00	2,00	34.332	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dok					1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dok					1	-	-	1,00	358.817,92	100,00	0,00	0,00	1,00	358.818	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Anggaran Pembiayaan Daerah yang dialokasikan	Bulan					12	-	-	12,00	98.367,50	100,00	0,00	0,00	12,00	98.368	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran daerah	opd					48	-	-	32,43	26.321,25	67,57	0,00	0,00	32,43	26.321	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	5	2	2	02.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Tersedianya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, pedoman pengelolaan keuangan daerah, apran dana transfer DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID, DAU Tambahan kelurahan, Dokumen penerbitan SP2D, Daftar Penguji ke bank Sulselbar, Data administrasi gaji PNS dan data TPG, Data rekonsiliasi pemungutan pajak pusat pada Pemda, laporan administrasi SPJ Penerimaan Pengeluaran, Regulasi pertanggungjawaban dan Penerbitan anggaran kas Pemerintah Daerah**																			BPKPD	
	5	2	2	02.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelaporan pengelolaan kas OPD yang terkelola dengan baik	Bulan					12	-	-											BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Bulan					12	-	-											BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah surat penyedia dana (SPD) yang diterbitkan	OPD					48	-	-	48,00	23.973,60	100,00	0,00	0,00	48,00	23.974	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dok					1	-	-											BPKPD	
	5	2	2	02.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dibuat	Dok					4	-	-	4,00	201.264,15	100,00	0,00	0,00	4,00	201.264	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan laporan pajak (PFK) yang disusun	OPD					48	-	-										BPKPD	
	5	2	2	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan laporan pajak (PFK) yang disusun	Laporan					3	-	-										BPKPD	
	5	2	2	02.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas yang disusun	Laporan					2	-	-										BPKPD	
	5	2	2	02.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah data Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait yang dibuat	Bulan					12	-	-	12,00	43.886,85	100,00	0,00	0,00	12,00	43.887	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dok					1	-	-										BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina pada pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten	opd					48	-	-	47,35	131.535,25	98,65	0,00	0,00	47,35	131.535	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**"Tersedianya dokumen pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan daerah, data rekonsiliasi pendapatan penerimaan BUD, Non BUD, Penatausahaan Akuntansi, Rancangan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD, Laporan semester Pemda, Dokumen tindak lanjut LHP BPK atas LKPD, data rekonsiliasi pelaporan, kebijakan akuntansi,Dokumen Piutang, serta materi bimtek penyusunan laporan"**																			BPKPD	
	5	2	2	02.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang disusun	Laporan					12	-	-	12,00	83.439,05	100,00	0,00	0,00	12,00	83.439	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen laporan yang dievaluasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dok					2	-	-	2,00	22.644,50	100,00	0,00	0,00	2,00	22.645	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan					3	-	-	2,80	19.991,20	93,33	0,00	0,00	2,80	19.991	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan					2	-	-	2,00	74.832,74	100,00	0,00	0,00	2,00	74.833	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok					55	-	-	55,00	99.620,70	100,00	0,00	0,00	55,00	99.621	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dok					1	-	-										BPKPD	
	5	2	2	02.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen Laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah TPTGR	Dok					1	-	-	0,60	6.472,10	60,00	0,00	0,00	0,60	6.472	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dok					1	-	-	1,00	54.381,95	100,00	0,00	0,00	1,00	54.382	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dok					2	-	-	2,00	35.827,30	100,00	0,00	0,00	2,00	35.827	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dok					1	-	-	1,00	20.438,75	100,00	0,00	0,00	1,00	20.439	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	"Jumlah OPD yang dibina pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten"	OPD					48	-	-	48,00	81.637,65	100,00	0,00	0,00	48,00	81.638	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga					1	-	-	1,00	49.169,50	100,00	0,00	0,00	1,00	49.170	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan					1	-	-										BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Tersedianya dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah meliputi alokasi Anggaran ADD, BDD, BTT, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta dokuem analisis penerimaan pinjaman pemerintah daerah**																			BPKPD	
	5	2	2	02.04	3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Analisasi Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Laporan					1	-	-	1,00	9.067,00	100,00	0,00	0,00	1,00	9.067	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapat Anggaran ADD dan BDD kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba	Desa					110	-	-	110,00	170.934.846,30	100,00	0,00	0,00	110,00	170.934.846	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana Belanja Tidak Terduga yang tersalur	Bulan					12	-	1.133.752,97	6,00	208.890,00	50,00	0,00	18,42	6,00	208.890	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)		Rp (000)		Rp (000)		
	5	2	2	02.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mendapat Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba	Desa					110	-	-	110,00	6.182.644,94	100,00	0,00	0,00	110,00	6.182.645	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Tersedianya pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan daerah, data pengelolaan keuangan daerah, implementasi SIPD, dan pemeliharaan aplikasi dan sosialisasi Bimtek SIPD dan keuangan daerah**																		BPKPD	
	5	2	2	02.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah terpelihara	Aplikasi					4	-	-	3,50	52.790,00	87,50	0,00	0,00	3,50	52.790	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	2	02.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terbina pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten	OPD					48	-	-	38,92	81.017,05	81,08	0,00	0,00	38,92	81.017	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**91,90**	**0,00**	**0,54**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	5	2	3			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset**																		BPKPD	
	5	2	3	02.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tersedianya dokumen pengelolaan barang milik daerah dokumen standar harga, RKBMD, Pedoman standar kebutuhan BMD, data BMD, Dokumen Pengguna BMD, Penghapusan BMD, Dokumen Hibah BMD, Data Rekonsiliasi BMD, Laporan akhir tahun BMD, Materi Sosialisasi BMD**																	BPKPD	
	5	2	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dok					1	-	-	1,00	30.686,20	100,00	0,00	0,00	1,00	30.686	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	3	02.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pedoman Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	1				1	-	-	1,00	9.505,55	100,00	0,00	0,00	1,00	9.506	100,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	3	02.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	"Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun"	Dok					2	-	-	2,00	13.278,60	100,00	0,00	0,00	2,00	13.279	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	3	02.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dok					1	-	-	1,00	5.842,35	100,00	0,00	0,00	1,00	5.842	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	" Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah"	Dok					3	-	-	2,90	33.452,20	96,67	0,00	0,00	2,90	33.452	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	3	02.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	"Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang terinventarisasi"	Dok					2	-	-	2,00	5.806,60	100,00	0,00	0,00	2,00	5.807	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	"Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah"	Dok					1	-	-	1,00	13.064,55	100,00	0,00	0,00	1,00	13.065	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	3	02.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan					2	-	-	2,00	27.171,00	100,00	0,00	0,00	2,00	27.171	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	3	02.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok					3	-	-	2,00	180.305,39	66,67	0,00	0,00	2,00	180.305	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	3	02.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan					4	-	-	3,00	7.878,20	75,00	0,00	0,00	3,00	7.878	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	3	02.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan					1	-	-	0,95	59.815,25	95,00	0,00	0,00	0,95	59.815	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	3	02.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang					152	-	-	80,00	10.048,45	52,63	0,00	0,00	80,00	10.048	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**90,50**	**0,00**	**0,00**			**8,33**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	5	2	4			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap pendapatan**																		BPKPD	
	5	2	4	02.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah laporan pengelolaan pendapatan daerah**																		BPKPD	
	5	2	4	02.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah rapat koordinasi / asistensi/ evaluasi/ pengelolaan PKB dan BBNKB	Bulan					12	-	-	9,00	1.299,90	75,00	0,00	0,00	9,00	1.300	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	4	02.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen teknis pemungutan PKB dan BBNKB	Bulan					12	-	-	12,00	220.553,20	100,00	0,00	0,00	12,00	220.553	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	4	02.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi/ Penyuluhan Pajak Daerah	Kecamatan					10	-	-	7,50	42.469,10	75,00	0,00	0,00	7,50	42.469	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	4	02.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara pada bada pendapatan daerah	Bulan					12	-	-	12,00	342.633,60	100,00	0,00	0,00	12,00	342.634	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	4	02.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daerah yang didata (door to door) dan Samsat sipakainge	Bulan					12	-	-	12,00	238.931,00	100,00	0,00	0,00	12,00	238.931	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	4	02.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bulan					12	-	-	12,00	266.589,60	100,00	0,00	0,00	12,00	266.590	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	4	02.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan di Badan Pendapatan Daearh	Bulan					12	-	-	12,00	56.038,58	100,00	0,00	0,00	12,00	56.039	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	4	02.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi yang dilakukan	Bulan					12	-	-	11,25	-	93,75	0,00	0,00	11,25	-	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	4	02.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah rapat evaluasi PAD untuk lingku BAPENDA	Bulan					12	-	-	12,00	28.047,60	100,00	0,00	0,00	12,00	28.048	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	4	02.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah unit kendaraan yang terjaring pada Badan Pendapatan Daerah	Bulan					12	-	-	12,00	207.617,69	100,00	0,00	0,00	12,00	207.618	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	4	02.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah laporan pemeriksaan reguler pendapatan daerah	Bulan					12	-	-	12,00	252.831,65	100,00	0,00	0,00	12,00	252.832	0,00	0,00	BPKPD	APBD Kab
	5	2	4	02.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah laporan kegiatan retribusi daerah	Bulan					12	-	-										BPKPD	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**94,89**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
													792,500	**1.133.752,969**			**195.097.507,482**									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN	**92,39**	**0,71**	**0,14**			**2,08**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	5	3				**KEPEGAWAIAN**																			BKPSDM	
	5	3	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BKPSDM)**																		BKPSDM	
	5	3	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi kinerjayang dihasilkan**																		BKPSDM	
	5	3	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					3	-	-	3,00	58.900,85	100,00	0,00	0,00	3,00	58.901	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	5	3	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan					12	-	-	12,00	4.897,35	100,00	0,00	0,00	12,00	4.897	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**																		BKPSDM	
	5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12	-	-	12,00	2.926.494,59	100,00	0,00	0,00	12,00	2.926.495	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12	-	-	12,00	73.240,00	100,00	0,00	0,00	12,00	73.240	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat Daerah**																		BKPSDM	
	5	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	-	-	1,00	5.601,13	100,00	0,00	0,00	1,00	5.601	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1	-	-	1,00	4.975,10	100,00	0,00	0,00	1,00	4.975	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan					*12*	-	-	12,00	92.341,62	100,00	0,00	0,00	12,00	92.342	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	-	-	1,00	7.391,95	100,00	0,00	0,00	1,00	7.392	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang/kegiatan yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali					53	-	-	52,18	232.397,80	98,46	0,00	0,00	52,18	232.398	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Paket					1	-	-	1,00	99.936,00	100,00	167,29	99,95	1,00	66.983	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase capaian Pengadaan Peralatan,Perlengkapan,bahan logistik,cetak,penggandaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.**																		BKPSDM	
	5	3	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					3	-	-	3,00	13.400,00	100,00	0,00	0,00	3,00	13.400	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					13	-	-	12,64	371.371,90	97,22	0,00	0,00	12,64	371.372	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase capaian Pengadaan Peralatan,Perlengkapan,bahan logistik,cetak,penggandaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.**																		BKPSDM	
	5	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12	-	-	12,00	90.998,18	100,00	0,00	0,00	12,00	90.998	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan					*12*	-	-	12,00	142.110,00	100,00	0,00	0,00	12,00	142.110	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik**																		BKPSDM	
	5	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1	-	-	1,00	17.190,00	100,00	0,00	0,00	1,00	17.190	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					10	-	-	10,00	48.401,78	100,00	0,00	0,00	10,00	48.402	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					24	-	-										BKPSDM	
	5	3	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					*15*	-	-	15,00	11.553,00	100,00	0,00	0,00	15,00	11.553	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**94,20**	**9,29**	**5,55**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	5	3	2			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba**																		BKPSDM	
	5	3	2	02.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Presentase terlaksananya Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**																		BKPSDM	
	5	3	2	02.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Formasi					*321*	-	-	321,00	107.789,55	100,00	0,00	0,00	321,00	107.790	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	2	02.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dok					30	-	-	30,00	61.137,00	100,00	0,00	0,00	30,00	61.137	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	2	02.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	ASN					6031	-	-	6031,00	39.832,30	100,00	0,00	0,00	6031,00	39.832	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	2	02.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Presentase ASN yang menduduki jabatan dan ASN yang memenuhi kenaikan pangkat serta pensiun**																		BKPSDM	
	5	3	2	02.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dok					866	-	-	866,00	419.593,74	100,00	0,00	0,00	866,00	419.594	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Periode					2	-	-	2,00	183.130,76	100,00	0,00	0,00	2,00	183.131	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	2	02.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Presentase ASN yang mengikuti Pengembangan komptensi Aparatur**																		BKPSDM	
	5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	orang					23	-	-	23,00	84.578,80	100,00	0,00	0,00	23,00	84.579	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	2	02.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Terlaksananya penilaian,evaluasi dan terukurnya kinerja ASN kabupaten bulukumba**																		BKPSDM	
	5	3	2	02.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dok					*5970*	-	-	5970,00	56.346,70	100,00	0,00	0,00	5970,00	56.347	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	2	02.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	orang					350	-	-	350,00	28.285,66	100,00	0,00	0,00	350,00	28.286	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	3	2	02.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan					*30*	-	-	30,00	151.480,91	100,00	0,00	0,00	30,00	151.481	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-	**5.333.376,663**							
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		**97,10**	**4,65**	**2,78**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN		**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	5	4				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																			BKPSDM	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD	K		K	RKPD	APBD	K		K			
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	5	4	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya**																			BKPSDM	
	5	4	2	02.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Presentase ASN yang mengikuti Pengembangan komptensi Aparatur**																			BKPSDM	
	5	4	2	02.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kali					2,00	-	-	2,00	35.452,50	100,00	0,00	0,00	2,00	35.453	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
	5	4	2	02.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**ASN yang mengikuti Pengembangan komptensi Aparatur**																			BKPSDM	
	5	4	2	02.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	orang					200,00	-	-	200,00	782.312,00	100,00	0,00	0,00	200,00	782.312	0,00	0,00	BKPSDM	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-		**817.764,500**								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN									
	5	5				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																				Bappelitbangda	
	5	5	2			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan,, Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah, Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah Penerapan Sida**																			Bappelitbangda	
	5	5	2	02.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**																			Bappelitbangda	
	5	5	2	02.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	laporan					1,00	-	-											Bappelitbangda	
	5	5	2	02.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**																			Bappelitbangda	
	5	5	2	02.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dok					1,00	-	-	0,84	27.154,13	84,00	0,00	0,00	0,84	27.154	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	5	2	02.02	2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya Kajian Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%					100,00	-	-	75,39	19.879,40	75,39	0,00	0,00	75,39	19.879	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	5	2	02.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**																			Bappelitbangda	
	5	5	2	02.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dok					1,00	-	-											Bappelitbangda	
						Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dok					1,00	115.000,000	-											Bappelitbangda	
						Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dok					1,00	931.659,000	951.659,00	1,00	49.653,15	100,00	5,33	5,22	1,00	49.653	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	5	2	02.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi**																			Bappelitbangda	
	5	5	2	02.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dok					1,00	-	-											Bappelitbangda	
	5	5	2	02.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan					2,00	-	-	1,88	150.848,35	93,75	0,00	0,00	1,88	150.848	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
	5	5	2	02.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan					10,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Bappelitbangda	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		**1.046.659,000**	**951.659,000**		**247.535,029**								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN									
	6	1				**INSPEKTORAT DAERAH**																				Inspektorat	
	6	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Inspektorat Daerah)**																			Inspektorat	
	6	1	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan perangkat Daerah**																			Inspektorat	
	6	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					6	-	-	4,00	6.205,00	66,67	0,00	0,00	4,00	6.205	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Adminstrasi keuangan perangkat daerah terkait ketersediaan gaji dan tunjangan**																			Inspektorat	
	6	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12	-	-	12,00	3.744.320,07	100,00	0,00	0,00	12,00	3.744.320	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12	-	-	12,00	85.020,00	100,00	0,00	0,00	12,00	85.020	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	-	-	1,00	972,00	100,00	0,00	0,00	1,00	972	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					12	-	-	7,00	1.400,00	58,33	0,00	0,00	7,00	1.400	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur**																			Inspektorat	
	6	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang					60	-	-	38,00	429.099,12	63,33	0,00	0,00	38,00	429.099	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	6	1	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam Hal Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**																			Inspektorat	
	6	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					*1*	-	-	0,42	100,00	42,00	0,00	0,00	0,42	100	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					2	-	-	2,00	138.098,78	100,00	0,00	0,00	2,00	138.099	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					*4*	-	-	4,00	46.445,90	100,00	0,00	0,00	4,00	46.446	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					102	-	-	96,00	379.933,24	94,12	0,00	0,00	96,00	379.933	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**																		Inspektorat	
	6	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2	-	-	2,00	517.040,00	100,00	0,00	0,00	2,00	517.040	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					11	-	-	9,00	131.870,50	81,82	0,00	0,00	9,00	131.871	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang dalam hal penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**																		Inspektorat	
	6	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Bulan					*12*	-	-	10,50	47.100,28	87,50	0,00	0,00	10,50	47.100	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan					12	-	-	10,50	97.904,00	87,50	0,00	0,00	10,50	97.904	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan**																		Inspektorat	
	6	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					*1*	-	-	0,70	12.483,50	70,00	0,00	0,00	0,70	12.484	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					5	-	-	2,69	70.239,23	53,85	0,00	0,00	2,69	70.239	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					8	-	-	5,33	7.857,00	66,67	0,00	0,00	5,33	7.857	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**80,69**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																		Predikat Kinerja					**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	6	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai**																		Inspektorat	
	6	1	2	02.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal dalam hal persentase pengawasan Pemda**																		Inspektorat	
	6	1	2	02.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan					*6*	-	-	6,00	285.184,94	100,00	0,00	0,00	6,00	285.185	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	2	02.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan					20	-	-	20,00	1.323.960,00	100,00	0,00	0,00	20,00	1.323.960	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	2	02.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan					*8*	-	-	8,00	168.900,00	100,00	0,00	0,00	8,00	168.900	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	2	02.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan					25	-	-	25,00	308.640,00	100,00	0,00	0,00	25,00	308.640	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	2	02.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	laporan					8	-	-	8,00	289.500,00	100,00	0,00	0,00	8,00	289.500	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	2	02.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dok					4	-	-	4,00	497.456,34	100,00	0,00	0,00	4,00	497.456	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	2	02.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal dalam hal persentase pengawasan Pemda**																		Inspektorat	
	6	1	2	02.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan					*20*	-	-	20,00	282.210,00	100,00	0,00	0,00	20,00	282.210	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																		Predikat Kinerja					**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	6	1	3			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persenatse Tindak Lanjut Temuan**																		Inspektorat	
	6	1	3	02.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan**																		Inspektorat	
	6	1	3	02.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya fasilitasi manajemen risiko, SPIP dan Pendampingan FCP	kegiatan					2	-	-	0,40	37.712,00	20,00	0,00	0,00	0,40	37.712	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	3	02.02		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase cakupan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah**																		Inspektorat	
	6	1	3	02.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah					*36*	-	-	34,00	134.430,00	94,44	0,00	0,00	34,00	134.430	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	3	02.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah					36	-	-	32,00	111.009,00	88,89	0,00	0,00	32,00	111.009	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	3	02.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan					3	-	-	2,00	537.950,58	66,67	0,00	0,00	2,00	537.951	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
	6	1	3	02.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah					*36*	-	-	36,00	48.573,94	100,00	0,00	0,00	36,00	48.574	0,00	0,00	Inspektorat	APBD Kab
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**74,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																		Predikat Kinerja					**S**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-		**9.741.615,402**										
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN					**84,90**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																		PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN					**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	7	1				**UNSUR KEWILAYAHAN**																												
	7	1				**KECAMATAN**																												
	7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik**																											
	7	1	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**tercapainya administrasi keuangan daerah**																											

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan					12,00	-	-	12,00	50.660,05	100,00	0,00	0,00	12,00	50.660	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayarnya gaji ASN,terwujudnya kegiatan perkatoran**																			
	7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	6.139.699,59	100,00	0,00	0,00	12,00	6.139.700	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	2.611.515,73	100,00	0,00	0,00	12,00	2.611.516	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	8,42	2.006.008,16	70,19	0,00	0,00	8,42	2.006.008	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	Bulan					12,00	-	-	12,00	2.776.805,56	100,00	0,00	0,00	12,00	2.776.806	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	3.140.514,56	100,00	0,00	0,00	12,00	3.140.515	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.477.849,04	100,00	0,00	0,00	12,00	1.477.849	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
	7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ;yang terbayar"	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.636.909,78	100,00	0,00	0,00	12,00	1.636.910	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.993.401,93	100,00	0,00	0,00	12,00	1.993.402	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai menerima gaji dan tunjangan	Bulan					12,00	-	-	12,00	3.170.277,97	100,00	0,00	0,00	12,00	3.170.278	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di Lingkup Kantor Camat Kajang	Bulan					12,00	-	-	12,00	2.452.589,02	100,00	0,00	0,00	12,00	2.452.589	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
	7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianyan pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	Bulan					12,00	-	-	12,00	53.700,00	100,00	0,00	0,00	12,00	53.700	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Penatausahaan yang di Kelola Lingkup Kantor Camat Kajang	Bulan					12,00	-	-	12,00	200.220,00	100,00	0,00	0,00	12,00	200.220	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
	7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium PNS	Bulan					12,00	-	-	12,00	98.170,00	100,00	0,00	0,00	12,00	98.170	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan pengujian keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	62.820,00	100,00	0,00	0,00	12,00	62.820	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	lancarnya Administrasi Keuangan	Bulan					12,00	-	-	12,00	339.690,00	100,00	0,00	0,00	12,00	339.690	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana"	Bulan					12,00	-	-	12,00	100.200,00	100,00	0,00	0,00	12,00	100.200	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	Bulan					12,00	-	-	12,00	118.650,00	100,00	0,00	0,00	12,00	118.650	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	57.145,00	100,00	0,00	0,00	12,00	57.145	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
	7	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	%					100,00	-	-	100,00	125.707,50	100,00	0,00	0,00	100,00	125.708	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Anggaran Lembur Kerja	%					100,00	-	-											
	7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Disusun	Dok					1,00	-	-											
	7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	"Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun"	Bulan					12,00	-	-	12,00	861,60	100,00	0,00	0,00	12,00	862	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulan					12,00	-	-	9,00	-	0,00	0,00	0,00	9,00	-	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	49.835,00	100,00	0,00	0,00	12,00	49.835	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Peningkatan administrasi umum pada kecamatan dan kelurahan**																			
	7	1	1	02.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit					6,00	-	-	6,00	25.757,76	100,00	0,00	0,00	6,00	25.758	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**tercapainya administrasi umum perangkat daerah**																			
	7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Paket					1,00	-	-	1,00	3.515,51	100,00	0,00	0,00	1,00	3.516	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Unit					6,00	-	-	6,00	57.111,55	100,00	0,00	0,00	6,00	57.112	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan perkantoran	Bulan					12,00	-	-	12,00	27.353,75	100,00	0,00	0,00	12,00	27.354	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis					19,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Paket					1,00	-	-	1,00	5.291,25	99,92	0,00	0,00	1,00	5.291	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	5.714,20	100,00	0,00	0,00	12,00	5.714	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	5.599,30	100,00	0,00	0,00	12,00	5.599	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan"	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.630,10	100,00	0,00	0,00	12,00	1.630	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan"	Bulan					12,00	-	-	12,00	22.561,96	100,00	0,00	0,00	12,00	22.562	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	26.195,86	100,00	0,00	0,00	12,00	26.196	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	11,50	25.669,00	95,86	0,00	0,00	11,50	25.669	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya Pelayanan Lepada Masyarakat	Bulan					12,00	-	-	12,00	106.624,32	100,00	0,00	0,00	12,00	106.624	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis					23,00	-	-	23,00	79.661,60	100,00	0,00	0,00	23,00	79.662	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	44.302,48	100,00	0,00	0,00	12,00	44.302	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
	7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	63.395,32	100,00	0,00	0,00	12,00	63.395	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang tersedia sampai akhir tahun	Bulan					12,00	-	-	12,00	15.147,10	100,00	0,00	0,00	12,00	15.147	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis peralatan bahan logistik barang cetakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	137.686,87	100,00	0,00	0,00	12,00	137.687	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kelola Lingkup Kantor Camat Kajang	Kantor					3,00	-	-	2,95	26.485,20	98,33	0,00	0,00	2,95	26.485	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
	7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan	Paket					1,00	-	-											
	7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis peralatan bahan logistik barang cetakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	12.973,05	100,00	0,00	0,00	12,00	12.973	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang tersedia	Bulan					12,00	-	-	12,00	1.890,00	100,00	0,00	0,00	12,00	1.890	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan					12,00	-	-	12,00	4.391,10	100,00	0,00	0,00	12,00	4.391	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan					12,00	-	-	12,00	2.152,90	100,00	0,00	0,00	12,00	2.153	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
	7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan	Jenis					15,00	-	-	15,00	8.454,60	100,00	0,00	0,00	15,00	8.455	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lancarnya Pelayanan Lepada Masyarakat	Bulan					12,00	-	-	12,00	5.467,55	100,00	0,00	0,00	12,00	5.468	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	8.346,40	100,00	0,00	0,00	12,00	8.346	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	5.400,00	100,00	0,00	0,00	12,00	5.400	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan					12,00	-	-	12,00	3.434,95	100,00	0,00	0,00	12,00	3.435	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan					12,00	-	-	12,00	27.567,68	100,00	0,00	0,00	12,00	27.568	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanya Rapat - rapat Koordinasi	Bulan					12,00	-	-	3,00	0,00	25,00	0,00	0,00	3,00	0	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan					12,00	-	-	12,00	70.294,60	100,00	0,00	0,00	12,00	70.295	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	% Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Bulan					12,00	-	-	12,00	19.068,00	100,00	0,00	0,00	12,00	19.068	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periodesasi Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka fasilitasi tamu	Bulan					12,00	-	-	12,00	23.100,00	100,00	0,00	0,00	12,00	23.100	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman	Bulan					12,00	-	-	12,00	40.740,00	100,00	0,00	0,00	12,00	40.740	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
	7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi	Bulan					12,00	-	-	11,99	63.989,00	99,94	0,00	0,00	11,99	63.989	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
	7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	27.917,67	100,00	0,00	0,00	12,00	27.918	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	Bulan					12,00	-	-	12,00	25.188,87	100,00	0,00	0,00	12,00	25.189	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
	7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Rapat Konsultasi dan Koordinasi	Bulan					12,00	-	-	12,00	84.801,20	100,00	0,00	0,00	12,00	84.801	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali					346,00	-	-	330,01	34.323,00	95,38	0,00	0,00	330,01	34.323	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi	Bulan					12,00	-	-	12,00	112.752,17	100,00	0,00	0,00	12,00	112.752	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan dari yang direncanakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	42.600,00	100,00	0,00	0,00	12,00	42.600	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	48.039,15	100,00	0,00	0,00	12,00	48.039	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	197.333,81	100,00	0,00	0,00	12,00	197.334	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasu dan Konsultasi SKPD	%					100,00	-	-	100,00	59.179,00	100,00	0,00	0,00	100,00	59.179	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Bulan					12,00													
	7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan	Bulan					12,00	-	-										Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Bulan					12,00	-	-	11,50	58.572,00	95,86	0,00	0,00	11,50	58.572	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara	Bulan					12,00	-	-										Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara	Bulan					12,00	-	-										Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**terwujudnya kegiatan perkatoran**	Bulan					12,00													
	7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Unit					1,00	-	-	1,00	24.458,50	100,00	0,00	0,00	1,00	24.459	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit					1,00	-	-	1,00	225,00	100,00	0,00	0,00	1,00	225	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional dan Lapangan yang diadakan	Bulan					12,00	-	-										Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Tersedianya Mebeler Kantor	%					100,00	-	-	100,00	26.785,00	100,00	0,00	0,00	100,00	26.785	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jenis					8,00	-	-	8,00	16.129,00	100,00	0,00	0,00	8,00	16.129	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Unit					2,00	-	-										Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia sesuai Kebutuhan	Buah					7,00	-	-										Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Bulan					12,00	-	-										Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Kantor	Bulan					12,00	-	-										Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit					2,00	-	-										Kindang	APBD Kab
	7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler Kantor yang tersedia	Bulan					12,00	-	-	12,00	24.498,00	100,00	0,00	0,00	12,00	24.498	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Milik Daerah yang akan di Kelola Kantor Camat dan Kelurahannya	Unit					50,00	-	-										KAJANG	APBD Kab
	7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah yang akan di Kelola Kantor Camat dan Kelurahannya	Unit					5,00	-	-										KAJANG	APBD Kab
	7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan mesin yang diadakan	Bulan					12,00	-	-										Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	Bulan					12,00	-	-	12,00	51.834,75	100,00	0,00	0,00	12,00	51.835	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pendukung Peralatan Kantor	Paket					1,00	-	-	1,00	13.330,00	100,00	0,00	0,00	1,00	13.330	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia"	Unit					3,00	-	-										Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					2,00	-	-	2,00	45.249,30	100,00	0,00	0,00	2,00	45.249	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
	7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	Bulan					12,00	-	-										Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	Buah					5,00	-	-										Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	Unit					3,00	-	-										Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%					100,00	-	-	100,00	27.933,00	100,00	0,00	0,00	100,00	27.933	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah yang akan di Kelola Kantor Camat dan Kelurahannya	Unit					4,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
	7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%					100,00	-	-	100,00	2.024,90	100,00	0,00	0,00	100,00	2.025	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang tersedia	Buah					2,00	-	-										Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah**	Bulan					12,00													
	7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan					12,00	-	-	12,00	5.370,00	100,00	0,00	0,00	12,00	5.370	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	105.637,22	100,00	0,00	0,00	12,00	105.637	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	21.410,82	100,00	0,00	0,00	12,00	21.411	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air dan Listrik yang dibayarkan tepat waktu	Bulan					12,00	-	-	12,00	32.021,64	100,00	0,00	0,00	12,00	32.022	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Listrik, Telekomunikasi dan Air	Bulan					12,00	-	-	12,00	17.383,73	100,00	0,00	0,00	12,00	17.384	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik"	Bulan					12,00	-	-	12,00	13.495,76	100,00	0,00	0,00	12,00	13.496	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit					4,00	-	-										Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit					4,00	-	-	4,00	5.360,00	100,00	0,00	0,00	4,00	5.360	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan					12,00	-	-	12,00	7.100,00	100,00	0,00	0,00	12,00	7.100	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa petugas Kebersihan dan Pemelihara Taman	Bulan					12,00	-	-	12,00	984,00	100,00	0,00	0,00	12,00	984	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor"	orang					10,00	-	-	9,00	77.400,00	90,00	0,00	0,00	9,00	77.400	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan gajinya	Bulan					12,00	-	-	12,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	120.000	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan					12,00	-	-	12,00	109.320,00	100,00	0,00	0,00	12,00	109.320	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	257.400,00	100,00	0,00	0,00	12,00	257.400	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Peningkatan administrasi umum pada kecamatan dan kelurahan**																			
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran telepon, air dan listrik	Bulan					12,00	-	-	12,00	11.843,51	100,00	0,00	0,00	12,00	11.844	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan					12,00	-	-	12,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	9.000	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Bulan					12,00	-	-	12,00	27.444,97	100,00	0,00	0,00	12,00	27.445	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan					12,00	-	-	12,00	18.392,70	100,00	0,00	0,00	12,00	18.393	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan					12,00	-	-	11,98	5.815,02	99,83	0,00	0,00	11,98	5.815	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
	7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Bulan					12,00	-	-											
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	%					100,00	-	-	100,00	169.200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	169.200	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	36.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	36.000	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan gajinya	Bulan					12,00	-	-	12,00	83.820,00	100,00	0,00	0,00	12,00	83.820	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	63.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	63.000	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
	7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan					12,00	-	-	12,00	22.500,00	100,00	0,00	0,00	12,00	22.500	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tercapainya pemeliharaan barang milik daerahh**																			
	7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan					12,00	-	-	11,50	14.187,25	95,86	0,00	0,00	11,50	14.187	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diservis dan berizin Roda dua"	Unit					1,00	-	-	0,88	8.360,87	88,00	0,00	0,00	0,88	8.361	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	-	-	1,00	15.727,40	99,90	0,00	0,00	1,00	15.727	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					4,00	-	-	3,80	6.316,50	95,00	0,00	0,00	3,80	6.317	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					2,00	-	-	1,00	127.799,99	50,00	0,00	0,00	1,00	127.800	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya pemeliharaan	Bulan					12,00	-	-	12,00	9.988,00	100,00	0,00	0,00	12,00	9.988	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit					2,00	-	-	2,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	2,00	1.000	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor"	Unit					8,00	-	-	8,00	20.072,83	100,00	0,00	0,00	8,00	20.073	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
	7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					7,00	-	-	7,00	12.831,76	100,00	0,00	0,00	7,00	12.832	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%					100,00	-	-	100,00	32.647,00	100,00	0,00	0,00	100,00	32.647	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit					14,00	-	-	11,00	14.225,76	78,57	0,00	0,00	11,00	14.226	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
	7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan alat kantor yang di Kelola Lingkup Kantor Camat Kajang dan Kelurahannya	Unit					12,00	-	-											
	7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit					6,00	-	-	6,00	1.460,00	100,00	0,00	0,00	6,00	1.460	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis					10,00	-	-	9,59	5.440,00	95,86	0,00	0,00	9,59	5.440	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pihak ketiga	Bulan					12,00	-	-	12,00	34.420,00	100,00	0,00	0,00	12,00	34.420	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan					12,00	-	-											
	7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan					12,00	-	-	0,00	39.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882	0,00	0,00	Bulukumpa	
	7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit					3,00	-	-											
	7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan					12,00	-	-											

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	7	1	1	02.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket					1,00	-	-											
	7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket					1,00	-	-	1,00	32.454,85	100,00	0,00	0,00	1,00	32.455	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukudng Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya"	Unit					3,00	-	-											
	7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%					100,00	-	-	100,00	18.770,00	100,00	0,00	0,00	100,00	18.770	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi"	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab
	7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	Unit					7,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan					12,00	-	-	12,00	71.980,50	100,00	0,00	0,00	12,00	71.981	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**0,00**	**0,00**		
																		Predikat Kinerja						**SR**	**SR**		
	7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana (UJUNG LOE)**																				
	7	1	2	02.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Terlaksananya pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanana umum**																				
	7	1	2	02.03	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Bulan					12	-	-										Ujung Loe	
	7	1	2	02.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**																				
	7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan					2	-	-										Gantarang	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**0,00**	**0,00**		
																		Predikat Kinerja						**SR**	**SR**		
	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan**																				
	7	1	3	02.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**persentase ketersediaan sarana dan prasarana**																				
	7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Bulan					12,00	-	-	10,80	25.744,50	90,00	0,00	0,00	10,80	25.745	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket					13,00	-	-	13,00	196.308,93	100,00	0,00	0,00	13,00	196.309	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bulan					12,00	-	-	12,00	3.569.312,50	100,00	0,00	0,00	12,00	3.569.313	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
	7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket					12,00	-	-	12,00	1.085.987,19	100,00	0,00	0,00	12,00	1.085.987	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Bulan					12,00	-	-	12,00	302.548,00	100,00	0,00	0,00	12,00	302.548	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	Paket					18,00	-	-	17,00	1.106.588,98	94,44	0,00	0,00	17,00	1.106.589	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bulan					12,00	-	-	12,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	450.000	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
	7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pemukiman	Bulan					12,00	-	-	12,00	772.810,00	100,00	0,00	0,00	12,00	772.810	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab
	7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	Paket					4,00	-	-	4,00	252.642,80	100,00	0,00	0,00	4,00	252.643	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman , Transportasi, Kesehatan dan Pendidikan Kebudyaan	%					100,00	-	-	100,00	1.325.330,40	100,00	0,00	0,00	100,00	1.325.330	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Yang Akan di Bangun di Kelurahan Laikang	Paket					8,00	-	-	8,00	1.113.879,30	100,00	0,00	0,00	8,00	1.113.879	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
	7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang di Laksanakan Kelurahan Laikang	Bulan					12,00	-	-	9,00	-	75,00	0,00	0,00	9,00	-	0,00	0,00	KAJANG	APBD Kab
	7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan, Pelatihan pendidkkan, Kesehatan, kelembagaan, pengelolaan kegiatan Masyarakat di Kelurahan	Bulan					12,00	-	-	12,00	716.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	716.000	0,00	0,00	Bonto Bahari	APBD Kab
	7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Jasa Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bulan					12,00	-	-	12,00	348.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	348.000	0,00	0,00	Bonto Tiro	APBD Kab
	7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Bulan					12,00	-	-	12,00	334.000,00	100,00	0,00	0,00	12,00	334.000	0,00	0,00	Herlang	APBD Kab
	7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bulan					12,00	-	-	12,00	150.745,95	100,00	0,00	0,00	12,00	150.746	0,00	0,00	Kindang	APBD Kab
	7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Jasa Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bulan					12,00	-	-	12,00	688.188,50	100,00	0,00	0,00	12,00	688.189	0,00	0,00	Gantarang	APBD Kab
	7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Bulan					12,00	-	-	12,00	298.198,00	100,00	0,00	0,00	12,00	298.198	0,00	0,00	Rilau Ale	APBD Kab
	7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Paket					19,00	-	-	18,66	709.074,62	98,21	0,00	0,00	18,66	709.075	0,00	0,00	Bulukumpa	APBD Kab
	7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat pendidikan dan kebudayaan dan terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro	Bulan					12,00	-	-	12,00	237.045,54	100,00	0,00	0,00	12,00	237.046	0,00	0,00	Ujung Loe	APBD Kab
	7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bulan					12,00	-	-	11,50	2.289.415,30	95,86	0,00	0,00	11,50	2.289.415	0,00	0,00	Ujung Bulu	APBD Kab
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**97,79**	**0,00**		
																		Predikat Kinerja						**ST**	**SR**		
	7	1	6			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**																				
	7	1	6	02.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Penanganan Covid 19**																				
	7	1	6	02.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terpenuhinya penyusunan program pemberdayaan masyarakat desa	Bulan					12,00	-	-										Ujung Loe	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**0,00**	**0,00**		
																		Predikat Kinerja						**SR**	**SR**		
																		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-		**48.222.662,346**										
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN						**47,75**	**0,00**		
																		PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN						**SR**	**SR**		
	8	1				**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																				Kesbangpol	
	8	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BADAN KESBANGPOL)**																			Kesbangpol	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	8	1	1	02.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																			Kesbangpol	
	8	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					7,00	-	-	6,71	15.833,50	95,86	0,00	0,00	6,71	15.834	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dok					1,00	-	-	1,00	2.101,95	100,00	0,00	0,00	1,00	2.102	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD	Dok					1,00	-	-	1,00	1.757,00	100,00	0,00	0,00	1,00	1.757	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA SKPD	Dok					1,00	-	-	1,00	1.127,00	100,00	0,00	0,00	1,00	1.127	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dok					1,00	-	-	1,00	1.631,90	100,00	0,00	0,00	1,00	1.632	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																			Kesbangpol	
	8	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	-	-	11,25	1.578.359,09	93,75	0,00	0,00	11,25	1.578.359	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	59.999,00	100,00	0,00	0,00	12,00	59.999	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	2.559,00	100,00	0,00	0,00	12,00	2.559	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	6.518,70	100,00	0,00	0,00	12,00	6.519	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah**																			Kesbangpol	
	8	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan					12,00	-	-	12,00	9.734,90	100,00	0,00	0,00	12,00	9.735	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																			Kesbangpol	
	8	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Unit					10	-	-	7,50	1.760,35	75,00	0,00	0,00	7,50	1.760	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Buah					20,00	-	-	20,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	20,00	3.000	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	Jenis					50,00	-	-	50,00	27.295,25	100,00	0,00	0,00	50,00	27.295	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis					2,00	-	-	2,00	9.651,95	100,00	0,00	0,00	2,00	9.652	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis					25,00	-	-	25,00	18.574,73	100,00	0,00	0,00	25,00	18.575	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	Kali					50,00	-	-	50,00	109.917,98	100,00	0,00	0,00	50,00	109.918	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD**																			Kesbangpol	
	8	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit					3,00	-	-	1,42	19.350,00								Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Buah					10,00	-	-	10,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	10,00	11.000	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit					5,00	-	-	4,00	66.095,70	80,00	0,00	0,00	4,00	66.096	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	1	1	02.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																			Kesbangpol	
	8	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Optimalisasi Jasa Komunikasi dan Listrik	Bulan					12,00	-	-	12,00	16.334,40	100,00	0,00	0,00	12,00	16.334	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan					12,00	-	-	10,60	83.095,05	88,33	0,00	0,00	10,60	83.095	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah SKPD**																			Kesbangpol	
	8	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Biaya Pemeliharaan, Pajak STNK Mobil Dinas Jabatan dan Motor OPerasional	Unit					5,00	-	-	2,25	22.001,00	45,00	0,00	0,00	2,25	22.001	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit					15,00	-	-	15,00	8.080,00	100,00	0,00	0,00	15,00	8.080	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
	8	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit					1,00	-	-	1,00	4.940,00	100,00	0,00	0,00	1,00	4.940	0,00	0,00	Kesbangpol	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	8	1	2			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Kegiatan Penyuluhan, Seminar Dan Sosialisasi**																			Kesbangpol	
	8	1	2	02.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring dibidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**																			Kesbangpol	
	8	1	2	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bulan					12,00	-	-	11,13	674.062,62	92,78	0,00	0,00	11,13	674.063	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	8	1	3			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat**																			Kesbangpol	
	8	1	3	02.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring dibidang pendidikan politik**																			Kesbangpol	
	8	1	3	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bulan					12,00	-	-	12,00	15.283.552,46	100,00	0,00	0,00	12,00	15.283.552	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									
																	Predikat Kinerja									
	8	1	4			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi**																			Kesbangpol	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
													K	RKPD	APBD			K	RKPD	APBD						
									K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	8	1	4			**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Terlaksanya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**																			Kesbangpol	
	8	1	4	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bulan					12,00	-	-	12,00	76.826,00	100,00	0,00	0,00	12,00	76.826	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja				**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	8	1	5			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi**																			Kesbangpol	
	8	1	5	02.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Terlaksananya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**																		Kesbangpol	
	8	1	5	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bulan					12,00	-	-	9,00	129.458,50	75,00	0,00	0,00	9,00	129.459	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**75,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja				**S**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
	8	1	6			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah**																			Kesbangpol	
	8	1	6	02.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring dibidang pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**																		Kesbangpol	
	8	1	6	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Bulan					12,00	-	-	12,00	188.625,75	100,00	0,00	0,00	12,00	188.626	0,00	0,00	Kesbangpol	APBD Kab
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	Predikat Kinerja				**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN		-	-		**18.433.243,786**									
																					93,75	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN				**ST**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM SEMUA URUSAN		**107.736.933,825**	**4.699.639,514**		**1.543.926.289,823**									
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN				**88,72**	**1,34**	**0,13**			**0,05**	**0,00**		
																	PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN				**T**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**		

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah muncul dari adanya celah/gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum termanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Masih terdapat sejumlah permasalahan pembangunan mendasar yang dihadapi Kabupaten Bulukumba sampai saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Melambatnya Pertumbuhan ekonomi
2. Belum optimalnya Sistem kesehatan daerah
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
4. Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat
5. Belum optimalnya SDM berkualitas dan berdaya saing
6. Masih rendahnya nilai tambah komoditas unggulan
7. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Untuk itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah kabupaten Bulukumba dibagi dalam 2 cakupan permasalahan, yaitu identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada sasaran pembangunan daerah untuk penentuan prioritas daerah dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaran urusan pemerintah daerah untuk penentuan prioritas masing-masing urusan.

2.3.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunanyang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiapPerangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadimasalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yangditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah haruskonsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkatdaerah pada Renja Perangkat Daerah.

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Belum Optimalnya Penduduk Usia 6 – 15 tahun yang termasuk dalam usia penduduk yang berpartisifasi dalam Pendidikan (SPM)
b. Belum optimalnya pencapaian peningkatan angka melek huruf
c. Belum Optimalnya Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah Jenjang PAUD /Kesteraan dan Pendidikan Dasar
d. Belum Optimalnya Pemenuhan kuantitas dan kualitas Tenaga Pendidik

2. Kesehatan

a. Masih tingginya presenatse balita gizi buruk .
b. Masih tingginya prevalensi angka stunting.
c. Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.
d. Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
e. Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh.
f. Masih rendahnya cakupan penanganan prevalensi HIV AIDS

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Masih rendahnya proporsi jaringan jalan dengan kondisi baik (PUTR)
b. Masih rendahnya persentase jalan yang memiliki talud/drainase saluran pembuangan air (PUTR)
c. Belum tersedianya data base talud/drainase (PUTR)
d. Masih rendahnya progres revisi RTRW Kabupaten Bulukumba serta masih terbatasnya rencana rinci tata ruang dengan rencana pembangunan daerah (PUTR)
e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan jaringan irigasi dilaksakan setelah masa panen (PSDA)
f. Peningkatan maupun penurunan persentase irigasi dalam kondisi baik sangant dipengaruhi oleh tingkta kerusakan yang biasanya akibat longsor/bencana alam dan tingginya curah hujan (PSDA)
g. Persentase irigasi dalam kondisi baik juga dapat meningkat karena pengerjaan pembenahan jaringan irigasi maupun kegiatan peningkatan jaringan irigasi (PSDA)
h. Pelaksaaan kegiatan dalam rangka penigkatan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sangat ditunjang oleh ketersediaan anggaran (PSDA)

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Masih rendahnya kawasan kumuh dan permukiman kumuh yang tertata
b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dan keterbatasan akses pembiayaan.
c. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman
d. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Cakupan petugas perlindaungan masyarakat masih kurang
b. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
c. Cakupan pelayanan bencana kebakaran terkait sarana prasarana masih belum memadai
d. Perlu penambahan armada mobil pemadam kebakaran untuk memaksimalkan pelayanan waktu tanggap (response time rate)
e. Masih minimnya petugas penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan fasilitas pendukiung lainnya.

6. Sosial

a. Masih rendahnya sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang dikelolah pemerintah Daerah
b. Masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat
c. Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan Sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
d. Jumlah jenis PMKS yang tidak didukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial professional dalam penanganan disabilitas dan lansia.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Lapangan pekerjaan semakin terbatas
b. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
c. Rendahnya tingkat pendidikan
d. Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan
e. Rendahnya kompetensi pencari kerja
f. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.
b. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
c. masih rendahnya cakupan layanan kesehatan korban kekerasan anak dan perempuan.

d. Kurangnya tenaga psikiater yang menangani trauma korban kekerasan anak dan perempuan.
e. Tidak adanya kontribusi yang diberikan perempuan dalam pekerjaan non pertanian.

3. Pangan

a. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat / Kelompok Tani dan pemenuhan kebutuhan dari budidaya pangan lokal.
b. Kelembagaan usaha pangan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal
c. Rendahnya peran serta masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
d. Kurangnya ketersediaan dan cadangan pangan serta infrastruktur pendukung kemandirian pangaan

4. Pertanahan

a. Masih minimnya penyelesaian kasus negara
b. Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infastruktur yang membutuhkan pengadaan lahan

5. Lingkungan Hidup

a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ,Sarana -Prasarana PPLHD dan PPNS belnm ada dikabupaten/Kota sehingga Pelaksanaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan ,izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan tidak terlaksana dengan baik
b. Kurangnya Tenaga Polisi kehutanan untuk pengamana Tahura Bontobahari sehingga Lokasi Tahura Bonto Bahari banyak diklain oleh Masyarakat Bonto Bahari.
c. Permasalahan dal am mengurangi dan menangani persampahan :
- SDM Pengelola belum memenuhi Standar
- Armada Pengangkutan Persampahan sudah banyak yang tidak layak pakai
- Prilaku dan Paitisipasi Masyarakat Masih rendah

d. Dimensi Cell landfill TPA Bulukumba seluas 16.208 M2 dengan kapasitas 577.512 M3 atau 190.579 ton dan diperkirakan dapat melayani kota Bulukumba sampai dengan jangka waku _+ 6 Tahun. Dimana saat ini TPA Bulukumba sudah beroperasi selama 6 tahun lebih dan total volume sampah yang masuk ke TPA sudah mencapai 109.540 ton. Sehingga luas cell landfill hanya dapat menampung sekitar 81.039 ton lagi. (kota Bulukumba sudah darurat sampah)
e. Tidak adanya alat berat (Buldozer) untuk memadatkan sampah pada cell landfill
f. Lahan untuk penempatan TPS/container yang tidak ada sehingga selama ini hanya memakai lahan kosong/milik masyarakat
g. Tidak ada container yang tetap di TPST untuk dipakai setelah memilah sampah
h. Kurangnya alat dan prasarana alah pengolahan sampah di TPST
i. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium yang mendukung kineija dal am rangka pemantauan kualitas air sungai dan air limbah di Kabupaten Bulukumba. Sarana dan prasarana utama yang seharusnya tersedia adalah Atomic Absorbtion Spektrofotometer (AAS), Ultra-Violet Visible (UV-Vis), peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), peralatan sampling, termasuk peralatan kualitas udara ambien dan emisi
j. Belum tersedianya sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
k. Instalasi ruang asam tidak berfungsi dengan baik
l. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) personil UPT Laboratorium

6. Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil

a. Kualitas jaringan perekaman biometrik KTP-el yang tidak stabil
b. Ketersediaan blangko KTP-el juga tidak memadai
c. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mengurus KTP-el masih rendah.
d. Belum seluruhnya masyarakat memiliki adminduk

7. Pemberdayaan Masyarakat danDesa

a. Masih rendahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa.
b. Belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat guna menunjang program pemerintah desa.

c. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa.

8. Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana

a. Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
b. Masih rendahnya SDM kader dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tribina di tingkat desa.
d. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga.

9. Perhubungan

a. Alat kir sudah tidak beroperasi karena mengalami kerusakan dan diberlakukannya KIR electronik
b. Menurunnya arus penumpang karena banyaknya kendaraan umum yang rusak
c. Masih kurangnya rambu-rambu di kabupaten Bulukumba
d. Masih kurangnya pengawasan sehingga izin trayek semakin berkurang dari tahun ketahun

10. Komunikasi dan Informatika

a. Perjanjian kerja sama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di kabupaten Bulukumba
b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
c. Perlunya peningkatan optimalisasi peran keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi
d. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data penguatan pengelolaan data statistik sektoral
e. Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarka hasil assessment.

11. Koperasi danUKM

a. Para pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha;
b. Kemampuan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah
c. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran;
d. Para pengelola KUKM baik laki-laki dan perempuan belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk

12. Penanaman Modal

a. Potensi penanaman Modal di Kabupaten Bulukumba masih rendah.

13. Kepemudaan danOlahraga

a. Belum optimalnya pembinaan sumber daya kepemudaan.
b. Masih rendahnya peningkatan pelatihan kewirausahan Muda untuk menunjang pembangunan Daerah
c. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia Dini dan pelajar
d. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang sesuai standar yang ditetapkan

14. Statistik

a. Belum adanya data sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah
b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral.
c. Perlunya pengelolaan data secara optimal menuju program satu data

15. Persandian

a. Masih rendahnya SDM dan sistem persandian modern yang masih menggunakan sarana dan prasarana manual.
b. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi berdasarkan hasil assesment.

16. Kebudayaan

a. Belum Optimalnya Pembinaan pelaku budaya dan kesenian pada satuan pendidikan dan daerah
b. Belum Optimalnya Pelestarian cagar budaya dan adat istiadat
c. Belum Optimalnya Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah

17. Perpustakaan

a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
b. Belum optimlanya jumlah buku dan pengadaan buku setiap tahunnya pada perpustakaan
c. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan
d. Masih kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di Desa dan Kecamatan
e. Belum optimalnya sarana dan prasarana SDM umtuk mendukung gerakan literasi masyarakat

18. Kearsipan

a. Belum mencukupinya arsip arsip didaerah
b. sarana dan prasarana arsip belum memadai
c. belum adanya landasan hukum untuk arsip Jadwal retensi arsip (JRA)
d. Terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi.
e. Belum optimalnya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi" untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penerapan e-arsip terintegrasi.

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Menjangkitnya penyakit udang dan rumput laut
b. Pencapaian peningkatan produksi terganggu karena kewenangan kelautan diambil alih provinsi sehingga program perlidungan dan pengawasan ekosistem kelautan tidak bisa dilaksanakan
c. Banyaknya negara pesaing yang juga merupakan penghasil udang dan rumput laut.
d. Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dengan standar budidaya oleh masyarakat
e. Metode penangkapan ikan yang masih cenderung tradisional
f. Terjadinya fluktuasi harga produk-produk perikanan
g. Usaha dibidang kelautan dan perikanan belum *Bankable* sehingga pihak perbankan sulit untuk menyalurkan kredit.
h. Adanya pencemaran tambak intensif secara masif sehingga menganggu budidaya rumput laut
i. Lemahnya kelembagaan nelayan,pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya.
j. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu
k. Nelayan masih tergolong miskin

2. Pariwisata

a. Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata
b. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata
c. Rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur
d. Rendahnya peran aktif dan sadar wisata dari pelaku pariwisata

3. Pertanian

a. Masih rendahnya produktivitas lahan pertanian
b. Masih rendahnya daya saing produk pertanian
c. Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh
d. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan keuangan,aset,kepegawaian, perencanaan dan pelaporan
e. Masih rendahnya pemahaman para pelaku utama pembangunan pertanian melakukan registrasi produk sebagai syarat mendapatkan sertifikat Prima
f. Pertumbuhan populasi ternak rendah (Kesehatan Hewan)
g. Sarana prasarana peternakan dan daya saing produk hewan yang belum optimal (Kesehatan Hewan)
h. Skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan Jejaring pemasaran produk hewan belum optimal (Kesehatan Hewan)
i. Keterlibatan keluarga miskin dalam kegiatan usaha peternakan masih kurang (Kesehatan Hewan)
j. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan petani peternak serta akses untuk

memperoleh informasi, teknologi dan sarana Prasarana (Kesehatan Hewan)

k. Ancaman Penyakit Hewan menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), gangguan reproduksi ternak dan Pemotongan ternak ruminansia betina produktif belum terkendali (Kesehatan Hewan)
l. Belum optimalnya produksi ternak (Kesehatan Hewan)

4. Kehutanan

a. Perlunya dibuatkan rekonstruksi palbatas karena sejak Tahun 1991 sampai sekarang belum pernah dilaksanakan rekonstrruksi palbatas,seharusnya sekali dalam 5 tahun dilaksanakan Rekonstruksi.
b. Perlunya penambahan tenaga polisi kehutanan karna luas kawasan TAHURA 3.475 Ha tidak sebanding dengan polisi kehutanan yang hanya berjumlah 2 orang saat ini, perbandingan untuk 1 tenaga polisi kehutanan dengan luasan sekitar 50 – 75 Ha /orang polisi hutan, sehingga untuk luas TAHURA 3.475 Ha membutuhkan 47 orang polisi hutan.
c. Perlunya pengganti tanaman penghijauan pada turus jalan yang sudah tua yang sering roboh pada saat hujan dan angin kencang yang dapat membahayakan masyarakat dan memperbanyak Ruang-ruang terbuka Hijau , untuk taman kota tidak adanya lahan pemerintah untuk dijadikan penambahan lahan luasan RTH pembangunan taman, penataan dan pemeliharaan taman , yang sampai saat ini seluas 13,88 % sesuai perda nomor 22 tahun 2012 harus mencapai 20 % , sesuai perbup untuk pemenuhan porsi RTH dikota kab Bulukumba maka pemerintah harus menyiapkan lahan RTH. Karena tanaman pelindung sudah mengkawatirkan sudah mengganggu ketenteraman pengguna jalan yang berbatasan perlunya dipikirkan penambahan lokasi pekuburan umum

5. Perdagangan

a. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail moderen karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
b. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal karena rendahnya anggaran pelaksanaan kegiatan serta terbatasnya jumlah sdm kemetrologian (Penera, Pengamat dan PPNS).
c. Terbatasnya sarana metrologi legal.

6. Perindustrian

a. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah.
b. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang.
c. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat promosi

2.3.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan.
b. Ketersediaan data terkini yang belum akurat
c. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
d. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal
e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2. Keuangan

a. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan pelaku usaha Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.

3. Kepegawaian dan Diklat

a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;

b. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;

4. Penelitian danPengembangan

a. Pemanfaaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
b. Belum optimalnya upaya fasiitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah

5. Pengawasan

a. belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasi pemeriksaan baik internal maupun eksternal.
b. Masih perlunya peningkatan internal para ASN dalam pelaksanaan kegiatan di OPD untuk mengurangi potensi pelanggaran.
c. Opini atas laporan Keuangan BPK-RI menjadi sebagai salah satu indikator dalam penatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan tata kelola keuangan secara akuntabel.

6. Sekretariat DPRD

a. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi(IT).

7. Sekretariat Daerah

a. Peranan Forum kerukunan umat beragama belum berfungsi secara optimal.
b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pengembangan SDM syiar Al Quran.
c. Kurangnya data akurat terkait pembinaan dan pengembangan SDM keagamaan.
d. Tingkat dukungan pemerintah akan pengembangan keagamaan masih rendah.

2.4 Isu Strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas Pembangunan pemerintah pusat.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis. Maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

2.4.1 Isu Strategis Global

2.4.1.1 Pemenuhan Ekonomi Global

Sebagaimana diketahui, terdapat lima isu strategis global yang dihadapi oleh otoritas pengambil kebijakan di dunia saat ini yaitu: (1) bagaimana mengatasi isu kesehatan akibat pandemi covid dan ketahanan pangan yang disebabkan gangguan pasokan; (2) bagaimana mengintegrasikan berbagai kebijakan makroekonomi menjadi bauran kebijakan yang efektif; (3) bagaimana menerapkan bauran kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperkuat pemulihan ekonomi; (4) bagaimana CBDC dapat dirancang sehingga dapat memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara namun tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta bagaimana meramu mitigasi dampak negatif dari asset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan melalui kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif; dan (5) bagaimana sinergi antara upaya transisi, termasuk dukungan keuangan berkelanjutan menuju *net zero carbon emissions*.

Kelima isu tersebut dilatarbelakangi kerentanan perekonomian global dengan tingkat inflasi yang tinggi dengan pemulihan yang lebih lemah. Perang yang tengah berlangsung di Ukraina, disertai dengan tindakan kebijakan dalam merespon perang dan kebangkitan COVID-19 di beberapa negara, telah memperpanjang gangguan rantai pasokan. Kondisi tersebut, seiring dengan meluasnya kebijakan *inward looking,* khususnya komoditas pangan di sejumlah negara, telah mendorong kenaikan harga komoditas internasional secara signifikan sehingga meningkatkan tekanan inflasi global. Sebagai tanggapan, beberapa negara telah memulai pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi global dan meningkatkan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara ekonomi utama juga diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Secara berkepanjangan, hal ini meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global sekaligus menahan aliran modal asing dan memperburuk tekanan mata uang di negara berkembang. Selanjutnya, dalam gala seminar yang berlangsung, dielaborasi respon terhadap kelima isu global dimaksud.

Pemulihan ekonomi global melalui jalur keuangan menjadi lebih kuat dengan merespons 5 (lima) isu strategis global sebagaimana dikemukakan dalam Gala Seminar "Monetary and Financial Sektor Policy to Support Stability and Recovery", sebagai side event yang yang menutup seluruh rangkaian side event G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali (17/7/2022).

Kelima Respon dari Isu strategis tersebut yaitu 1) Pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan (*food insecurity*) 2) menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui bauran kebijakan 3) penguatan kebijakan moneter serta makroprudensial yang didukung koordinasi melalui reformasi struktural 4) rancangan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas-batas, serta 5) mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju *net zero emission*.

Respon pertama terkait *food insecurity* dan health dibahas pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global (*Global Collaboration and Cooperation*) untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan (*food insecurity*) yang terus meningkat. Kolaborasi dan kerjasama global tersebut akan memiliki fokus pada upaya mendukung ketahanan pangan

dengan memastikan keterjangkauan (*affordability*) dan kemudahan perolehan (*accessibility*) pangan, serta meningkatkan ketersediaan data untuk pupuk. Di samping itu, disepakati pembentukan Dana Perantara Keuangan (*Financial Intermediary Fund*) untuk membantu memastikan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi untuk tindakan pencegahan (*prevention*), kesiapsiagaan (*preparedness*), dan penanggulangan (*response*) terhadap pandemi di masa depan. Dana tersebut dikelola oleh World Bank dengan komitmen awal sebesar US$1,1 miliar.

Respon kedua mengulas bauran kebijakan makroekonomi, membahas upaya untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dengan kebijakan yaitu: (1) fundamental makroekonomi yang kuat yang dapat dicapai melalui kebijakan fiskal, moneter, serta stabilitas keuangan yang terencana, terukur, dan terkomunikasi dengan baik; (2) kebijakan moneter yang *pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve*. Hal ini dicapai tidak hanya melalui suku bunga, melainkan juga instrumen lainnya antara lain stabilisasi nilai tukar, pengelolaan aliran modal, serta koordinasi dengan Pemerintah; dan (3) memperkuat sisi suplai melalui kebijakan sektor riil dan reformasi struktural.

Respon ketiga bertajuk kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk stabilitas dan pemulihan yang terdiri atas : (1) kebijakan moneter perlu kembali menitikberatkan pada stabilitas harga secara *pre-emptive* dan *forward-looking* untuk mengendalikan ekspektasi inflasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Kebijakan suku bunga tetap menjadi instrumen utama, dilengkapi dengan intervensi nilai tukar dan manajemen arus modal, terutama di negara berkembang dengan pasar keuangan yang belum dalam; (2) pentingnya pendekatan yang semakin granular dan mikro untuk menjaga kestabilan keuangan, terutama sektor korporasi dan rumah tangga. Di samping kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial juga perlu diterapkan dalam rangka memitigasi risiko-risiko terhadap stabilitas keuangan; (3) mengingat persoalan stabilitas harga saat ini bersumber pada sisi penawaran, maka koordinasi antara bank sentral dan pemerintah semakin diperlukan. Koordinasi tersebut tidak terbatas pada sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, namun juga terkait reformasi struktural. G20 berhasil menggabungkan *Integrated Policy Framework* (IPF) dari IMF dengan *Macro Financial Stability Framework* (MFSF) dari BIS untuk mengakselerasi terwujudnya stabilitas harga global.

Respon keempat menghadirkan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan asset kripto, disambut baik berbagai inisiatif rancangan CBDC, khususnya dalam penggunaan untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas-batas (*cross-border payments*). Di samping itu, rancangan CBDC juga perlu menjamin stabilitas moneter dan keuangan internasional. Diskusi juga membahas pentingnya kerangka regulasi dan pengawasan yang kokoh dari asset kripto, termasuk yang disebut stablecoin, dengan menerapkan prinsip '*same activity, same risk, same regulation'*. Tujuan yang ingin dicapai adalah memitigasi risiko dari penggunaan asset kripto dan memastikan level playing field, dengan tanpa menghambat inovasi dan inklusi. Membangun kesadaran public akan risiko penggunaan asset kripto merupakan hal penting.

Respon kelima terkait ekonomi dan keuangan hijau membahas berbagai rekomendasi dalam rangka mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju net zero emission, meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan menuju tujuan tersebut, dan meningkatkan inovasi pada instrument dan pasar keuangan berkelanjutan. Dalam hal

ini, ditekankan pentingnya pertukaran pengalaman dalam rangka mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi menuju *net zero emission*.

Presidensi G20 Indonesia memberikan referensi untuk melakukan exit strategy dari kebijakan luar biasa di masa pandemi untuk mendukung pemulihan, serta mengatasi efek luka memar (*scaring effect*) untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang tinggi. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia berhasil mengajak semua anggota untuk berkomitmen mempertahankan stabilitas keuangan global, termasuk dengan terus berkoordinasi dalam langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional. Presidensi G20 Indonesia berhasil meyakinkan anggota untuk memperkuat komitmen mendukung transisi yang berjalan mulus (*orderly*), adil (j*ust*), dan terjangkau

2.4.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's)

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca tahun 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumberdaya alam. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi. Serta pembangunan yang lebih berpihak kepada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditahun 2016-2030 antara lain:

1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana mana;
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua;
4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6) Memastikan ketersediaan daan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Inklusif dan ekonomi berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9) Membangun infrastuktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Dan mendorong inovasi;
10) Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara;
11) Membuat kota kota dan pemukiman manusia inklusif. Aman. Tangguh dan berkelanjutan;
12) Pastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, menggantikan dan mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan; dan
17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi Muatan KLHS yang telah disesuaikan dengan Analisis tujuan pembangunan berkelanjutan dimana Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 202 indikator yang menjadi kewenangan. Adapun Rekomendasi Muatan KLHS yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 diantaranya sebagai berikut:

1) Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian maka disarankan untuk menerapkan pendekatan intensifikasi pertanian dikarenakan kemampuan lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bulukumba terbatas.
2) Pangan merupakan kebutuhan primer untuk kebutuhan hidup manusia, tetapi perlu diperhatikan bahwa perubahan tata guna lahan untuk kawasan pertanian dapat menghilangkan potensi pertanian. Sehingga, perencanaan pusat kegiatan dapat diletakkan pada daerah yang memiliki jasa ekosistem penyedia pangan sedang.
3) Air merupakan sumber kehidupan manusia, namun perlu diperhatikan bahwa pada area yang memiliki nilai jasa ekosistem penyediaan tinggi perlu tetap perlu dipertahankan eksistensinya sehingga ketersediaan air tetap *sustain*.
4) Apabila nilai jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir tinggi maka pada area tersebut mengindikasikan mempunyai daya tampung yang baik, sehingga rencana pembangunan dapat diarah ke daerah tersebut untuk menghindari terendamnya permukiman dari bencana banjir.
5) Apabila nilai jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dengan nilai tinggi maka pada area tersebut mengindikasikan mempunyai daya tampung yang baik. Sehingga rencana kegiatan pembangunan harus menghindari area jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencanaalam dari sangat rendah hingga rendah.
6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah pada daerah-daerah yang memiliki kerentanan sangat tinggi.
7) Sebagai upaya menghadapi resiko bencana maka perlu dilakukan :
   - Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
   - Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
   - Peningkatan kapasitas pemulihan bencana

2.4.1.3 Perubahan Iklim

Secara umum perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia.

Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan pengunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Faktor yang menyebabkan perubahan iklim diantaranya:

a. Efek gas rumah kaca
b. Pemanasan Global
c. Kerusakan lapisan ozon
d. Kerusakan fungsi hutan
e. Penggunaan *Cloro Flour Carbon* (CFC) yang tidak terkontrol
f. Gas buang industri

Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim yang terjadi secara terus menerus mempengaruhi kondisi alam antara lain:

a. Curah hujan tinggi
b. Musim kemarau yang berkepanjangan
c. Peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub
d. Terjadinya bencana alam angina putting beliung

Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsaMengenai Perubahan Iklim), Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution) menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacapada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam komitmen Pemerintah, dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunanrencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada aspek adaptasi dilakukan penguatan kapasitas masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalammenghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah daerah yang rentan.

Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukansemata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secaraaktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitrapembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing -masing

2.4.1.4 Revolusi Industri 4.0

Secara ringkas, terdapat 6 fase dalam sejarah revolusi industri, yaitu Revolusi Industri 1.0 yang berkisar pada tahun 1780 dan fokus pada mechanisation; Revolusi Industri 2.0 pada 1870 fokus pada electrification; Revolusi Industri 3.0 pada tahun 1970 untuk automation; Revolusi Industri 3.5 pada 1980 tentang globalisation; Revolusi Industri 4.0 yang sedang terjadi sekarang yaitu digitalisation; serta Revolusi Industri 5.0 di masa depan yang akan fokus pada personalisation.

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya, sehingga memiliki efek disruption industri disetiap negara pada keseluruhan sistem serta meluas mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, kesehatan, pendidikan dan hubungan sosial kemasyarakatan. Pada bidang ekonomi ditandai dengan munculnya bidang pekerjaan baru (data miner. Analis big data. Ilmuwan kecerdasan buatan) dan hilangnya beberapa pekerjaan lama; pekerjaan yang dilakukan oleh manusia digantikan dengan mesin atau robot yang mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang pekerjaan tersebut. Bidang organisasi dan institusi publik yang menghendaki pengambilan keputusan dilakukan secara cepat. Sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisis big data dan kecerdasan buatan, sedangkan pada bidang sosial kemasyarakatan, revolusi industri 4,0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif pada perubahan perilaku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Bila disikapi dengan positif. Era revolusi industri 4.0 membawa peluang secara ekonomi makro berupa proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, dunia akan segera memasuki Era Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 yang disebut Revolusi Personalisation menjadi fokus utama terhadap pengalaman konsumen yang hendak dicapai. Kustomisasi yang tinggi menjadi salah satu karakteristiknya. Selain itu, Era 5.0 menuntut untuk pasokan yang responsif dan terdistribusi, pengalaman interaktif produk, serta kembalinya sistem ke tenaga kerja.

Untuk bisa menghadapi Era 5.0, seorang individu setidaknya harus memiliki 4 kompetensi dasar yaitu:

1. *Technical competency*, yaitu berhubungan dengan hard skills yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan baru, contohnya kemampuan coding, information security, dan kemampuan memahami manusia serta budaya.
2. *Critical competency*, sebuah metode pendekatan untuk menyelesaikan problematika dan tugas, contohnya kreativitas, entrepreneurship, dan analisis.
3. *Personal competency*, yaitu kemampuan diri untuk menghadapi tantangan secara efektif, contohnya kegesitan, kemauan untuk terus belajar, dan daya tahan mental yang kuat.
4. *Social competency*, yaitu tentang cara kita menjadi lebih terbuka dan peka untuk bekerja bersama, contohnya kecerdasan emosional, teamwork and cooperation, serta kemampuan interkultural.

Agar bisa memiliki semua kemampuan, ada beberapa hal yang saling berkaitan dan membawa efek domino kepada satu sama lain. Misalnya, kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh infrastruktur. Sementara pembangunan infrastruktur terkadang tidak merata karena adanya ketimpangan sosial ekonomi. Hal tersebut kemudian akan berhubungan dengan otonomi daerah yang juga berimbas pada kebijakan industri.

2.4.2 Isu Straegis Nasional

2.4.2.1 Transformasi Ekonomi

Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara maju dan salah satu 5 kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa, maka perlu disusun strategi-strategi nasional.

Transformasi ekonomi harus kita lakukan. Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 6 (enam) Strategi besar Transformasi Ekonomi sebagai "Game Changer" dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 adalah:

Strategi 1 Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, dengan memperhatikan: (1) Sistem Kesehatan; (2) Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter; (3) Perlindungan Sosial; (4) Riset dan Inovasi.

Strategi 2 Produktivitas Sektor Ekonomi, dengan memperhatikan: (1) Produktivitas Tenaga Kerja; (2) Modernisasi Pertanian; (3) Industrialisasi; (4) Promosi UMKM; (5) Modernisasi Sektor Jasa.

Strategi 3 Ekonomi Hijau, dengan memperhatikan: (1) Bauran Kebijakan Energi; (2) Transfortasi Bersih; (3) Pengelolaan Sampah; (4) Blue Economy; (5) Transisi Energi.

Strategi 4 Transformasi Digital, dengan memperhatikan: (1) Sumber Daya Manusia; (2) Infrastruktur Digital; (3) Digitalisasi; (4) Pemanfaatan Digital.

Strategi 5 Integrasi Ekonomi Domestik, dengan memperhatikan: (1) Infrastruktur Konektivitas (superhubungan, Hubungan Laut, Hubungan Udara); (2) Koridor Ekonomi/Wilayah Pembangunan; (3) Domestic Value Chain.

Strategi 6 Pemindahan Ibukota Negara (IKN), dengan memperhatikan: (1) Sumber Pertumbuhan Baru; (2) Menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.

Keenam strategi di atas juga disertai perbaikan enabling environment yaitu reformasi birokrasi, reformasi fiskal, dan reformasi sektor keuangan.

2.4.2.2 Pengembangan Wilayah

Dalam mencapai sasaran Prioritas Nasional 2 di tahun 2025, terdapat beberapa isu strategis dalam pengembangan wilayah yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Strategis (Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)) dengan meningkatkan peran badan pengelola kawasan dalam memanfaatkan peluang investasi dan promosi, serta peningkatan kualitas dan daya saing SDM Kawasan.
2. Mewujudkan komoditas unggulan sebagai pengungkit ekonomi wilayah dan kawasan dengan risiko kerentanan pada kondisi eksternal seperti bencana alam dan kondisi iklim.
3. Penguatan pengaturan kawasan perotaan yang lebih holistik dan trans – sektor.
4. Penyelesaian Rencana Tata Ruang untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan perizinan berbasis elektronik, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.
5. Pengembangan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, perdesaan, dan perbatasan negara melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kapasitas SDM sebagai upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah.
6. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan dan keuangan daerah yang lebih efektif dan efesien untuk penyediaan pelayanan dasar.

2.4.2.3 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
6. Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap

indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

2.4.2.4 Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba yang berusia 15- 65 tahun sebesar 94,12 persen. Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

2.4.3 Isu Strategis Daerah

2.4.3.1 Isu Strategis Sulawesi Selatan

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*sustanable*). Artinya semua jenis pelayanankesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya di masyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkanpelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting. Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia,belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena merekatidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya,faktor jarak dan transportasi.

Rumah sakit regional telah dibangun pada masa RPJMD 2018-2023 agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberipelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya masih dibutuhkan operasional dan pengembangan rumahsakit regional tersebut dengan dukungan SDM yang memadai, dan layanan yangramah anak, lansia, perempuan dan penyandang disabilitas.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung

Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidakdimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalamberinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya.

Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktorpendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan)bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

3. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang baik. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Strategis. Namun karena kualitas yang kurang baik dikabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimanaIndeks layanan infrastruktur tahun 2021 sebesar 79,44 jaringan jalan dalam mantap pada tahun 2021 baru mencapai 70,01% dari panjang jalan 2.009,35km. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak berat yang berakibat capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi.

Di Sulawesi Selatan persentase jalan provinsi dalam kondisi baik adalah 38,98% dikarenakan masih banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Dengan demikian diperlukan adanya penanganan terhadap jalan yang rusak berat agardapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

4. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah.

5. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SulawesiSelatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada padausia produktif. Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Sumberdaya alam yang terkandung di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yangdapat memberikan nilai tambah (*added value*) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan dayadukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan

ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdayaalam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses,partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dankebutuhan yang berbeda.

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalampertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu:

1. Hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
2. Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalamnegeri.
3. Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.
4. Percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (debottlenecking).
5. Meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi,meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar.Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat strukturindustri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektorpertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan,perkebunan dan kehutanan. Dengan hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

6. Sulawesi Selatan sebagai Poros Maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km2 diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar.Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahariyang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti *shortsea shipping* untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara,Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistempelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai diSelayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanan danmemodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan aksesdi seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akanmenguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusatkonektivitas kawasan timur Indonesia.Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai-nilaipositif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapakegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan. Kawasan pesisir Sulawesi Selatan memiliki potensi pengembangan yangsangat tinggi dan merupakan usaha padat karya. Tercatat lebih kurang 33.576 pengelola rumput laut atau 102.873 anggota rumah tangga di Sulawesi Selatan atau 39% dari seluruh anggota rumah tangga di Indonesia yang mengusahakan rumput laut. Potensi ini perlu didukung pemerintah dengan memperpanjang rantai nilai rumput laut untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak.

2.4.3.2 Isu Strategis Kabupaten Bulukumba

Isu strategis Kabupaten Bulukumba merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi berdasarkan dinamika isu-isu strategis internasional, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Isu Strategis Kabupaten Bulukumba dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal

   Dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat Bulukumba khususnya peningkatan nilai tukar petani dan menurunnya angka kesenjangan (Indeks Gini) serta penurunan rasio ketergantungan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif

   Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemantapan kesejahteraan masyarakat ini merupakan lanjutan dari peningkatanpembangunan sumberdaya manusia, yang diharapkan akan meningkat baik padapendidikan, kesehatan serta pendapatan masyarakat Kabupaten Bulukumba.Pembangunan pada penggalan terakhir ini diharapkan dapat menyempurnakan tingkatkesejahteraan masyarakat menuju Bulukumba yang bermarwah, maju dan sejahtera
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

   Pemantapkan kualitas sumberdaya manusia. Infrastruktur dan perekonomian masyarakat menuju Bulukumba yang majudan sejahtera. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur inimerupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sebelumnya yang diharapkan telah membentuk struktur perekonomian daerah yang kuat baik perekonomian yang mendukung industri maupun perekonomian berbasis masyarakat. Kualitas sumber daya yang memiliki daya saing yang baik serta infrastrukut konektifitas yang telah lancara ntar kawasan.
4. Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan

   Peningkatan penciptaan kawasan-kawasan ekonomi lokal yang telah direncanakan pada pembangunan berbasis spasial Kabupaten Bulukumba. Penguatan lokus pembangunan ini dilakukan secara terintegrasi dan mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan nasional serta provinsi.Pembangunan yang terarah dan terintegrasi pada lokus-lokus ini dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat serta mendorong peningkatan produktifitas danjiwa wirausaha (*enterprenuership*) generasi muda yang berbasis pada UMKM (*Start Up*) sehingga sub sektor perekonomian semakin maju.
5. Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah

   Pemulihan ekonomi dan kondisi masyarakat sudah mulai membaik kembali akibat dari pandemi Covid-19. Difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan sebagai penopang utama terhadap

pengembangan perekonomian masyarakat berbasis potensi unggulan daerah dengan mengedepankan penggunaan dan penerapan teknologi.

6. Meningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.

2.5 Inovasi Daerah

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki "penyakit-penyakit" di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur). Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Kabupaten Bulukumba melakukan pembinaan Inovasi Daerah sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang merupakan program nasional. Dalam mengembangkan inovasi, Kabupaten Bulukumba didamping oleh LAN RI Jakarta melalui Laboratorium Inovasi dengan model 5D + 1 yaitu :

Drum-Up; menggugah semangat dan membangun Komitmen berinovasi dimana tahapan awal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan laboratoriu inovasi; juga tahapan ini mengembangkan semangat inovasi dari pimpinan dan para innovator baik secara individu maupun kolektif, sehingga memunculkan kemauan berinovasi.

Diagnose; mengindentifikasi dan menemukan ide inovasi, pada tahap ini dilakukan memfasilitasi dan menemukan ide inovasi dimana memfasilitasi innovator untuk menemukan ide inovasi, yang gagasan-gagasan yang mengandung unsur kebaruan serta dapat meningkatkan kinerja organisasi (output formulir ide inovasi

Design; Rencana Aksi Inovasi, dimanan ide inovasi dituangkan ke dalam rencana aksi sehingga inovasi siap untuk diimplementasikan, output dari tahap ini adalah Formulir rencana aksi (metode yang digunakan : workshop dan Coaching.

Deliverer; implementasi, monitoring, dan evaluasi inovasi, tahapan ini pelaksanaan inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain yang meliputi: a. Launching inovasi dan penendatanganan kontrak kinerja inovasi, b. Aktualisasi/ implementasi Rencana Aksi Inovasi, c. Monitoring progress peleksanaan rencana aksi inovasi

Display; festival dan promosi inovasi yaitu memperkenalkan, mensosialisasikan, akuntabilitas kinerja, dan mendapatkan masukan stakeholders sehingga ke depannya, inovasi dapat dilanjtkan dan dikembangkan lebih baik.

Document; pendokumentasian inovasi dimana kegiatan mencatat atau merekam peristiwa yang dianggap penting dalam proses pengembangan inovasi

Pembinaan LABORATORIUM INOVASI (LABINOV-22) oleh LAN RI Jakarta. Melahirkan sebanyak 85 Inovasi Daerah Tahun 2022 dari Inovator yang pada saat ini telah di Launching yaitu: 27 Badan/ Dinas (OPD); 6 Bagian di sekretariat Daerah; 2 Puskesmas (Puskesmas Ponre dan Puskesmas Bontobangun); 10 Kecamatan Se Kab. Bulukumba; 3 Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; dan 3 satuan Pendidikan SMP/MTs. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah membuat Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 38 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Yang mendorong ASN di semua sektor membudayakan Inovasi dalam tugas-tugasnya. Selanjutnya tahun 2023 telah dilakukan pendampingan dan menghimpun ide gagasan inovasi terhadap: UPT Puskesmas Kecamatan; UPT SPF SMP; UPT SPF SD di Kecamatan Ujung Bulu; dan Perangkat Desa (sebanyak 5 Desa) di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil penilaian keberlanjutan pelaksanaan Inovasi melalui LABORATORIUM INOVASI tahun 2022 yang telah dilakukan oleh LAN RI dan penggembangannya Kabupaten Bulukumba dari 9 nominasi Kabupaten pengembang keberlanjutan Inovasi dampingan LAN RI, Kabupaten Bulukumba menempati rangking I dan Menerima Penghargaan MAHAKARTI BHAKTI NAGARI (INAGARA Award) dari Lembaga Administrasi Negara LAN RI tahun 2023 sesuai surat Nomor:5108/S.1/KDK.01.1 tentang Undangan Penerima Penghargaan INAGARA Award tahun 2023. Adapun rincian jumlah Inovasi Kabupaten Bulukumba bisa dilihat pada tabel berikut;

Tabel II-271
Daftar Inovasi Kabupaten Bulukumba

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
1	GELIAT (Gerakan Literasi Berbasis Digital)	Kurangnya Minat Baca Siswa	Gerakan literasi berbasis digital diharapkan Agar siswa memiliki minat baca.	Gerakan Minat Baca Siswa	litersi digital	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Nur Asni, SPd, MPd & M. Arwin Basra, S.Pd, M.Pd
2	Passapu (Pengelohan Sampah Terpadu)	Banyaknya sampah plastik	Pemanfaatan sampah Peastik dalam pembuatan Batako bertujuan untuk mengurangi penggunaan semen	Pengelohan sampah plastik	Batako dari limbah plastik	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Nur Asni, SPd, MPd & M. Arwin Basra, S.Pd, M.Pd
3	Salassae Ri MangEi (Sarana Pengelolaan Sampah Organik Non Kimia untuk merawat Ekosistem)	Kurangnya pengelolaan sampah organik	Pengelolaan sampah dengan bekerjasama dengan masyarakat khususnya KSPS (Komunitas Swabina Petani Salassae) untuk mengelolah sampah organic dengan menggunakan zat pengurai non kimia.	Mengelolah sampah organic dengan menggunakan zat pengurai non kimia.	Pengelah Sampah Organik	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Dr. Kasmawati Zainuddin, S.Pd.,M.Pd & A.Nurfajriana S.Pd
4	5 G-Gerakan Sabtu Menyapa (GSM) – Gerakan Guru Berbagi (GGB)- Gerakan Selasa Digital (GSD) – Gerakan Selasa Digital (GSD)- Gerakan Pagi Mengaji (GPM)- Gerakan Da'I Muda (GDM)	Kurangnya kapasitas Jaringan	5 G merupakan generasi kelima dari teknologi nirkabel, menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas dari jaringan sebelumnya.Brand 5 G dengan harapan dan tujuan agar SMPN 17 Bulukumba mencetak generasi yang mumpuni dalam teknologi.	Peningkatan Kapasitas jaringan	5 G Nirkabel				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Dr. Kasmawati Zainuddin, S.Pd.,M.Pd & A.Nurfajriana S.Pd
5	STROBERI (Sistem Tanaman Hidroponik Berbasis Limbah)	Kurangnya pemilahan Sampah	Sistem Tanaman Hidroponik Berbasis Limbah. Warga sekolah memilah sampah/ barang bekas untuk keperluan	Warga sekolah memilah sampah	Sistem Hidroponik				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Zainuddin, S. Pd., M. Pd.
6	(SIMANIS8)Sekolah Inovasi Mandiri Wirausaha SMPN 8	Belum termanfaatkan produksi lokal	Berinisiatif untuk membantu masyarakat sekolah dan masyarakat umum bagaimana	Memanfatkan hasil bumi	Pemanfatan hasil bumi				SK Bupati Bulukumba,	Andi Nurwinah Pangki S.Pd.,M.Pd.

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			cara memanfaatkan hasil bumi seperti ubi jalar membuat makanan.						No.188.45-216 Tahun 2023	
7	Tabarat Literasi Milenia (Tabungan Akhirat Literasi Minggu Libur Ceria)	Belum adanya literasi berinfaq	Mewujudkan sekolah yang agamis ,beriman dan bertaqwa.Program Tabarat Literasi Milenia yaitu mengajak kepada segenap warga sekolah serta masyarakat untuk belajar berinfaq.	Literasi Melenia	Sekolah berinfaq				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Andi Nurwinah Pangki S.Pd.,M.Pd.
8	AKSIPA (Akses Informasi Terpadu)	Kurangnya informasi anak ke orang tua	Media yang digunakan orang tua peserta didik, untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses pembelajaran di sekolah. Penyampaian informasi kepada orang tua peserta didik.	Informasi ke orang tua siswa	Media Informasi Orang tua siswa				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Sahrul, S.Pd.,M.Pd & Andi Murdhana Baeda, S.Pd. Gr
9	SIKAPAL (Sikolana Ana Pa,Rumpu Laue)	Kurangnya kehadiran disekolah	Siswa yang orang tuanya adalah nelayan atau petani rumput laut yang seringkali kehadirannya sangat kurang karena membantu orang tuanya bekerja atau bertani rumput laut.	Memfasilitasi siswa yang membantu orang tuanya sebagai nelayan	Mengatasi ketidak hadiran diisekola				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Ichtiar Akmal, S.Pd. & Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.
10	SIKOLA GAE (Sarana Informasi Komunikasi Orang Tua Lewat Layanan Guru	Kurangnya kehadiran disekolah	SIKOLA GAE dalam dialek konjo berarti Sekolah Pagae artinya sekolah bagi anak nelayan. SIKOLA GAE menjadi Sarana	sekolah nelayan	anak bersekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Umar Tawakkal, S. Ag.,M.Pd.I & Hasriani, S. Pd
11	DASI 18 (Daur Ulang Sampah Plastik SMP 18)	Sampah plastik	Mengumpulkan sampah plastik dari lingkungan sekitar sekolah untuk di daur ulang sehingga lingkungan sekitar bebas sampah plastik. Bank sampah.	Pengolahan sampah plastik	Daur Ulang Sampah Plastik				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Amir Alif,S.Pd& Andi Nurhayati Hafid, S.Si., Gr

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
12	SALAM SOBAT (Sekolah Alam Solusi Tuntaskan Wajib Belajar)	kurangnya layanan belajar	Sekolah berbasis alam semesta anak belajar dan menerima materi di tempat yang dikelilingi alam.	Sekolah alam	Belajar diluar kelas				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Syuaib, S. Pd. I. M. Si & Herlinah, S.Pd., Gr.
13	LAKMUS (Lempar Ke Jaring dan Kumpulkan Sampahmu)	kurangnya pengelohan sampah	Sarana yang digunakan oleh peserta didik dalam memungut dan membuang sampah, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih dan sehat.	Kebersihan lingkungan sekolah	Menciptakan lingkungan bersih				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Ansar, S. Pd., M. Si. & Sry Wahyuni, S. Pd. I
14	PERAK DI TAS (Peningkatan Karakter Peserta Didik dengan Pendekatan Masjid)	Adanya siswa yang melakukan pelanggaran	Kunjungan rumah terhadap peserta didik yang seringmembuat pelanggaran dan berkonsultasi dengan orang tua peserta didik mengenai perilaku anaknya. Sertapersetujuan bahwa anaknya siap untuk diikutkan dalamkegiatan pendekatan Masjid.	Kunjungan Rumah	Mengatasi pelanggaran siswa				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Ansar, S. Pd., M. Si. & Sry Wahyuni, S. Pd. I
15	PUTSAL (Pungut Sampah, Kelola)	Banyaknya sampah plastik	PUTSAL (Pungut,Sampah, Kelola) merupakan kegiatan daur ulang seperti kerajinan tangan dan pupuk komposdan ini akan menjadi salah satu penggerak ekonomi.	Daur ulang sampah	Daur Ulang Sampah Plastik				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Asniar, S.Pd., M.M & Gusnadi, S.Pd., M.Pd
16	SAPIHI (Satu Apotik Hidup) tiap Kelas	Belum adanya apotik hidup di setiap kelas	Satu Apotik Hidup) tiap kelas merupakan kegiatan layanan masyarakat sekolah yang bersifat edukatif, akan obat-obatan herbal.	Apotik Hidup	Edukasi apotik hidup				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Asniar, S.Pd., M.M & Gusnadi, S.Pd., M.Pd
17	Penerapan Supervisi Berbasis Coaching	kurangnya supervisi	Penerapan Supervisi Berbasis Coaching	supervisi	supervisi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Aminuddin, S.Pd.,M.Si

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
18	PUSAKA (Pungut Sampah, Kantongi)	kurangnyapengolaan limbah	Kegiatan penanggulangan sampah di lingkungan sekolah dengan menggunakan kantong dari limbah tekstil.	Penanggulanagn sampah	penanggulaagn sampah dari limbah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Dra. A. Ratnawati,M.Pd & Abdul Rahman, S.Pd
19	ASSIKOLAKI (Akses Kondisi Sekolah Terkini)	Kurannya informasi orang tua	Akses informasi untuk seluruh Warga Sekolah dan Orang Tua/wali Peserta didik untuk mengetahuiperkembangan peserta didik.	Informasi perkembangan anak	akses informasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	ST. Haena, S.Pd.,M.Pd & Amiruddin, S.Pd.
20	SIPETTAKI (Idaman Peduli Tatakrama dan Tata Lingkungan yang Inovatif)	Kurang peduli lingkungan sekolah	Idaman Peduli Tatakrama dan Tata Lingkungan yang Inovatif.	Tatakrama	tata lingkunga sekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Asri Ali,S.Pd.,M.Pd
21	FA DEWAN (Fasilitasi Desa Swasembada Air Minum)		Kolaborasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perusda dan Lembaga Masyarakat Desa dalam penyediaan air minum layak konsumsi.	Kolaborasi Prusda	Penyediaan Air Minum layak Konsumsi	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	H. ANDI AGUS SALIM ISHAK, SOS, M.Si
22	Kembang Desa (Kerjasama Antar Desa Membangun Desa Cerdas)	program yang tidak berkelanjutan	Program Desa yang berkesinambungan, sebagai tindak lanjut dari program Kementrian Desa.	Program Berkelanjutan	Tindak Lanjut Program Kemendes				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	H. ANDI AGUS SALIM ISHAK, SOS, M.Si
23	SAPA (Sahabat Pegawai Bulukumba)	Pegawai yang tidak mempertahankan Rumah tangga	Edukasi dan fasilitas mediasi kepada pasangan pegawai agar tetap mempertahankan rumah tangga.	Pembinaan pasangan Rumah tangga Pegawai	Pembinaan Rumah tangga Pegawai				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Andi Dewi Ratu, S.STP,MAP
24	KADO PERNIKAHAN DUKCAPIL	Optimalisi layanan KTP-e	Kado yang diberikan oleh pihak Dukcapil berupa Kartu Keluarga,KTP-el sepasang pengantin dengan perubahan status.	KTP-e bagi pengantin dengan perubahan status	KTP-e				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
25	LOKET MU (Layanan Oline Kependudukan Terpadu Masyarakat Umum)	Layanan online jasa kependudukan	Inovasi Loket-MU Layanan Online Kependudukan dan jasa antar dokumen kependudukan	Layanan antar Dokumen Kependudukan	Jasa Antar Dokumen Kependudukan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-	ENDANG MULIANI,S.Sos

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
									462Tahun 2022	
26	PINISI DUKCAPIL (Pusat Informasi Iovasi DUKCAPIL)	Tidaknya Wadah berhimpun Inovasi Dukcapil	PINISI DUKCAPIL adalah pusat informasi Inovasi Dukcapil yang merupakan sebuah wadah untuk menghimpun semua Inovasi Dukcapil.	Wadah berhimpun Inovasi	Kumpulan Inovasi Dukcapil				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
27	SEKOLAH SADAR ADMINDUK	belum tersosialisasinya tertib administrasi kependudukan	Pelayanan dan sosialisasi disekolah terkait tertib administrasi kependudukan.	Layanan tertib administrasi kependudukan	Tertib administrasi Kependudukan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
28	GAMMARA (Gerakan Masyarakat Menuju Sadar ADMINDUK)	belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Pelayan yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah meningkatan kepemilikan Dokumen Kependudukan	optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Dokumen Kependudukan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
29	LORONG JELITA (Layanan Jemput Bola Identitas Anak dari Lorong Ke Lorong)	belum dilakukan jemput KIA	Layanan jemput bola kepemilikan Kartu Identitas Anak “KIA” dari lorong ke lorong.	Jemput KIA	Masyarakat Memiliki KIA				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
30	MY KTP-EL, MY DREAM	wajib KTP-e	Pelayanan jemput bola yang diberikan kepada anak usia 17 tahun yang wajib KTP-EL.	KTP-e	Masyarakat Memiliki KTP-e				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
31	FOTOKU ONLINE (Formulir Persyaratan Dokumen Kependudukan) Online	Foto online Barcode	Fotoku online adalah pelayanan persyaratan dan formulir melalui link pelayanan dan barcode.	Pengisian formulir link layanan barcode	Barcode layanan Link				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	NURAFIAH,S.KOM
32	Go Panrita (Pelayanan Kartu Identitas Anak)	Melibatkan forum anak KIA	Layanan berupa ajakan/edukasi Forum Anak dalam kepemilikan KIA.	Edukasi forum Anak kepemilikan KIA	Anak Memiliki Kepemilikan KIA				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
33	MAWAR (Ramah Warga)	layanan Rumah	Memberikan pelayanan yang Ramah dari petugas Dukcapil.	Layanan Rumah	mempermudah layanan dokumen				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ENDANG MULIANI,S.Sos
34	LANIKAJI (Layanan Penelitian Dan Pengkajian)	Optimalisasi Kelitbangan	layanan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) bagi SKPD/OPD di Kabupaten Bulukumba.	Layanan Kelitbangan	Kelitbangan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Dr.Drs.Baharuddin Patangngai,SE.,Msi
35	NILAN (Klinik Laboratorium Inovasi)	belum optimalnya layanan inovator dalam rancang bangun inovasi	Melayani Inovator OPD dalam rancang bangun Inovasi Daerah	rancang bangun Inovasi Daerah	Inovator terlayani membuat rancang bangun Inovasi daerah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	A.Wahyudin. K, SE
36	E-MONEV SIPAKATAU	Belum optimalnya perencanaan pengimputan dokumen RPJMD	Proses awal adalah penginputan dokumen RPJMD pada aplikasi e-Planning di menu e-RPJMD pada halaman ini berisi informasi mengenai executive summary pencapaian program dan kegiatan selama 5 tahun (periode RPJMD) dsb.	e-Planning RPJMD	e-Planning RPJMD				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	AHRIYANI HAKIM, ST, MT
37	KOMPETISI INOVASI	Belum dilakukan kompetisi	Kompetisi inovasi untuk mengukur tingkat kualitas dan keterjangkauan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui inovasi daerah Dan pemberian penghargaan bagi inovator	Mmengukur tingkat kematangan Inovasi daerah	Komepetisi Inovasi daerah Sinopan			V	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	BASO S, S.Pd, M.Kes
38	WORKSHOP CHAMPION INOVASI	belum optimal pembekalan terhadap inovator daerah	Pembekalan dan penataan pengelolaan inovasi daerah bagi inovator OPD dan Badan untuk menghadapi lomba tingkat regional maupun nasional di bidang inovasi	Pembekalan Inovator Daerah	Optimalisasi Inovator Daerah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Rakhmat Riswan, SKM,M.Kes

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
39	ONE BASE, ONE MAP, ONE POLICY (Satu Data, Satu Peta, Satu Regulasi)	Belum optimalnya tata kelola data	Peraturan Presiden No 39 tentang " Mengatur Penyelenggaraan Tata Kelola Data yang di hasilkan oleh instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan"	Tata kelola data bahan perencanaan	Tata kelola data				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Ir. A. PUTRI A. RUMPANG, MSC
40	LEGO LEGO SI CANTIK	Belum optimalnya kualitas data	Menerapkan standar data yang telah ditetapkan untuk menghasilkan data yang berkualitasMelalui regulasi Lego Lego si CANTIK's.	Data Yang berkualitas dalam Perencanaan	Data Perencanaan Yang Berkualitas				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Ir. A. PUTRI A. RUMPANG, MSC
41	Peduli Bijangta (Peduli Keluarga)	Belum optimal dokumen ODGJ	Mengunjungi pasien ODGJ, membantu pengobatan dan mengurus dokumen kependudukan. Pasien yang telah sembuh diberikan pembinaan dan keterampilan.	Kunjungan Pasien ODGJ	Layanan ODGJ				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Hj. Jawadwipa & Drs. A. MAPPIWALI
42	Gadis Manis (Gerakan Validasi Pemutahiran Data Penerima Layanan Sosial)	Belum akuratnya data	Gerakan validasi data yang akurat bagi penerima layanan sosial dengan cara mendatangi rumah (door to door).	Data akurat	Data Akurat layanan sosial				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Drs. A. MAPPIWALI
43	Sistem Aspirasi Online	Optimalisasi layanan aspirasi	Aplikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh masyarakat dan dapat langsung direspon.	Penyampaian aspirasi DPRD	Aplikasi Layanan Aspirasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Kamarudin
44	Go Asesment { Goment}	Belum adanya layanan cepat bagi layanan pendidikan	Go Asesment mengarahkan para siswa lebih aktif dan kreatif Hari ini selesai jangan tunggu sampai besok: perlunya pelayanan yang prima dalam pendidikan.	Asessment siswa dengan cepat	Layanan Cepat				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	A.Syahrul Alam, SE
45	Lisua Massikola (Gerakan Kembali Bersekolah)	Belum meningkatnya	Meningkatkan semangat belajar anak serta	Semangat belajar siswa	meningkatkan semangat belajar				SK Bupati Bulukumba,	A.Syahrul Alam, SE

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
		semangat belajar siswa	meminimalisir angka putus sekolah di Kab.Bulukumba.						No.188.45-462Tahun 2022	
46	MERAPAT (Media Pelaporan Cepat)	Belum adanya sistem pelaporan	Suatu sistem pelaporan kasus yang dibuat secara online, dapat di akses melalui media sosial DPPPA.	Pelaporan Online	Media Sosial DPPPA				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Andi Farah Fekicia, S.Psi
47	GERAKAN 1000 AKSEPTOR	Belum adanya ruangan layanan akseptor	Menyediakan ruangan layanan bagi akseptor/masyarakat yang ingin ber KB.	Penyediaan ruangan akseptor	Layanan Akseptor				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	LISMAYANTI,S.Sos,M.AP
48	GALERI UPPKS	Belum adanya Konsep Galeri UPPKA	Galeri UPPKA adalah bangunan dengan konsep mini market sebagai pusat penjualan bagi hasil produksi usaha kelompok-kelompok UPPKA.	Konsep UPPKA	Galeri UPPKA				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	LISMAYANTI,S.Sos,M.AP
49	DAHSAT (Dapur Sehat)	Belum optimalnya edukasi perbaikan gizi	Sosialisasi dan edukasi perbaikan gizi bagi ibu hamil, balita dan ibu menyusui.	Edukasi Perbaikan Gizi	Perbaikan Gizi Anak				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	LISMAYANTI,S.Sos,M.AP
50	PLUIT AKU (Pelayanan Langsung Izin Trayek Angkutan Umum)	Belum optimalnya garai layanan izin trayek	Gerai layanan pengurusan izin trayek di dalam kawasan terminal induk untuk memudahkan pegusaha/sopir angkutan umum.	Optimalnya garai Izin trayek	Izin Trayek				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Drs.MUHAMMAD AMRY
51	TERONG PUSTAKA (Teras Dongeng Perpustakaan)	rendahnya minat baca	Sarana pelayanan untuk membangkikan minat baca masyarakat khususnya bagi anak usia dini atau usia Taman Kanak-kanak.	Meningkatkan minat baca	Minat baca bagi anak usia dini				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Armawati S.Sos
52	Pena (Perpustakaan Untuk Anak)	belum adanya literasi pustaka	literasi dan mensosialisasikan perpustakaan pada anak yang dalam perawatan di Rumah Sakit / klinik maupun pada	Literasi Pustaka bagi perawatan rumah sakit	Literasi Pustaka di Rumah sakit dan klinik				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-	ANDI ELIZ INDAYANI,SE

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			kegiatan lainnya seperti kelas balita.						462Tahun 2022	
53	WISATA PUSTAKA	belum Optimalisasi pengenalan Perpustakaan	Kegiatan memperkenalkan perpustakaan kepada anak, agar mereka dapat mengetahui perpustakaan sejak dini.	Pengenalan Perpustakaan sejak dini	sosialisasi Perpustakaan sejak dini				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Armawati S.Sos & Rismayani,S.Sos.MM
54	Tasbih Pustaka (Disabilitas Bisa Perpustakaan Peduli)	belum optimalnya perpuustakaan inklusif	Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dengan mengundang para penyandang disabilitas ke perpustakaan untuk berkegiatan.	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dengan mengundang para penyandang disabilitas ke perpustakaan untuk berkegiatan	layanan perpustakaan inklusif				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Rismayani,S.Sos.MM
55	Smart Laperjadin Smart Laporan Perjalan Dinas)	Bellum optimalnya laporan Pengelolaan keuangan	Laporan pengelolaan keuangan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel	Pengelolaan keuangan yang profesional	Pengelolaan keuangan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Ubayd Mantsur, A.Md
56	SIAP (Sistem Aplikasi Perizinan)	Belum menggunakan sistem layanan cepat	Sisten layanan yang cepat, mudah, murah, transparan,pasti, dan terjangkau oleh pelayanan terpadu satu pintu.	Layanan yang cepat, mudah, murah, transparan,pasti, dan terjangkau oleh pelayanan terpadu satu pintu.	Pelayanan cepat				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	SUFIRMAN,SE, IBU MALA, MAULANA
57	GARDU KENCAN SI PTM (Gerakan Terpadu Kenali, Cegah dan Atasi Penyakit Tidak Menular)	belum dilakukan pengendalian deteksi dini	Mengendalikan penyakit tidak menular dimasyarakat dengan kegiatan deteksi dini.	Pengendalian Penyakit	Deteksi penyakit tidak menular di masyarakt				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	WIDYASTUTI, S.Kep.,Ns
58	SISKA CANTIK (Sistem Informasi dan Edukasi Cara Siswa Memantau Jentik)	belum adanya edukasi anak	Edukasi anak-anak sekolah melalui UKS Sekolah mencegah penularan DBD.	Edukasi anak mencegah DBD	Pencegahan DBD				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-	MUH. YUSRAN YUNUS, SKM

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
									462Tahun 2022	
59	Edukasi anak-anak sekolah melalui UKS Sekolah mencegah penularan DBD.	Kurangnya pelayanan penyuluhan	Informasi dan penyuluhan di ruang pelayanan puskesmas.	Pelayanan Penyuluhan di Puskesmas	Penyuluhan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	YUNITA SRILAWATI KARTIKA DEWI, SKM
60	Digital Kobotoolbox (Efisiensi Pengumpulan Data Digital Kobotoolbox)	Belum tersedia pusat penyedia	Pusat penyedia, pemrosesan & analisis dari tally sheet/kuisioner dan sebagai penyimpanan utama data.	Tersedia pusat penyedia pemorosesan dan analisis dari tally sheet	Tally Sheet				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	AHMAD ARFAN, S.IP, MT
61	KAMPUNG SAPI(Kawasan Pengembangan Bibit Unggul Sapi Potong	belum optimalnya pembibitan sapi unggul	Kawasan ini akan menghasilkan bibit unggul hasil persilangan antara sapi Bali dan sapi Wagyu.	Kawasan pemabibitan sapi	Sapi Unggul				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Ir. Suriya Darma, S.Pt, M.Si, IPM
62	RETRIBUSI PASAR NON TUNAI	masih sulitnya penarikan retribusi dan realisasi PAD	Memudahkan dalam penarikan retribusi dan laporan realisasi serta mampu meningkatkan PAD.	Mempermuda Penarikan Retribusi PAD	Meningkatkan PAD				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	Munthasir Nawir, S.STP,M,Si.
63	ALASAN LIHAI (Aplikasi Layanan Pengawasan Lingkungan Hidup Akurat dan Terintegrasi)	sulitnya pengelolaan LH	Sistem yang dibangun untuk memudahkan pelaporan pengelolaan dan pemantauan LH bagi pelaku usaha dan kegiatan.	Memudahkan pelaporan pengelolaan dan pemantauan LH	Pengelolaan LH				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	MUHAMMAD ARDI NUR S.Kel.,M.Si
64	PANDU BERSOLEK (Pengarsipan Dokumen Berbasis Elektronik)	sulitnya tools administrasi kepagawaian	Aplikasi pelayanan ini menjadi tools mempermudah administrasi kepegawaian	pelayanan mempermudah administrasi Kepegawaian	akses informasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	MUHAMMAD ARDI NUR S.Kel.,M.Si
65	SI PAPA LH(Sistem Informasi Pelayanan Persampahan dan Lingkungan Hidup)	belum adanya layanan LH	layanan Bidang LH mengenai berbagai layanan persampahan.	Adanya layanan LH	Layanan LH				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	MUHAMMAD ARDI NUR S.Kel.,M.Si

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
66	SIMPEDA (SIMPATIK PENEGAKAN PERDA)	Belum optimalnya Penegakan perda	Sistem Penanganan Penegakan Perda dan Perbup di Wilayah Kabupaten Bulukumba	Optimalnya pengekan Perda dan Perbub	Penegakan Perda dan Perbub				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	HJ. AHRYANTI, SP
67	SIMDA (SIAP MEMBANTU DAMKAR)	belum terbentuknya relawan SIMDA di desa	Relawan SIMDA di beberapa desa mengurangi tingkat kerugian masyarakat yang berada disektar kebakaran.	Terbentuknya Relawan SIMDA di desa	SIMDA di Desa				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ABD. RAHMAN, S.AP
68	ASAP PAK (AKSI CEPAT, TEPAT PEMADAM KEBAKARAN)	Belum optimalnya sistem pelaporan bahaya kebakaran	Sistem pelaporan terjadinya bahaya kebakaran lewat aplikasi android.	Optimalnya pelaporan bahaya kebakaran	pelaporan aplikasi Android				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ABD. RAHMAN, S.AP
69	PELAYANAN DASAR KORBAN KEBAKARAN	Belum optimalnya sistem pelaporan bahaya kebakaran	Sistem pelaporan terjadinya bahaya kebakaran lewat aplikasi android.	Optimalnya pelaporan bahaya kebakaran	pelaporan aplikasi Android				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022	ABD. RAHMAN, S.AP
70	POJOK BACA DIGITAL	Belum dilakukan kegiatan Pojok baca Digital	Dengan mengusung judul kegiatan yaitu ”POJOK BACA DIGITAL” untuk memudahkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mendapatkan suasana baru serta meningkatnya ilmu pengetahuan guna mendukung dan membantu upaya pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat bulukumpa.	Dilaksanakan kegiaan Pojok Baca Digital	Dilaksanakan kegiaan Pojok Baca Digital	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	A. RIDWAN M, S.Sos
71	MARIKI’ TERTIB	Belum dilaksananakan pelayanan secara cepat dan mudah	MARIKI’ TERTIB di inspirasi atas kondisi yang terjadi pada kantor kecamatan Bontobahari dimana seluruh proses	Telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah	telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah			(√)	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	EKA ARGIAN SAMPARADJA

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			pelayanan masyarakat selama ini dilaksanakan secara cepat dan mudah di ruangan pelayanan, namun proses layanan tersebut mengabaikan tupoksi dari masing-masing seksi dan pengarsipan hasil dokumen layanan.							
72	Ruangan Pelayanan Yang Nyaman Dan Wifi Gratis	Belum Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Dengan inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bontotiro dengan mekanisme pembenahan dan penataan ruangan pelayanan yang telah tersedia berupa pengecetan tembok, pengadaan kursi tunggu dan pengadaan AC, kemudian pemanfaatan wifi yang telah tersedia bagi masyarakat terutama siswa/siswi yang akan megerjakan tugas dan keperluan lainnya.	Telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bontotiro dengan mekanisme pembenahan dan penataan ruangan pelayanan yang telah tersedia berupa pengecetan tembok, pengadaan kursi tunggu dan pengadaan AC,	telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bontotiro dengan mekanisme pembenahan dan penataan ruangan pelayanan yang telah tersedia berupa pengecetan tembok, pengadaan kursi tunggu dan pengadaan AC,			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	H.ANDI RAHMAT SYAERI P.S.IP.,M.Adm.,KP
73	Sistem Administrasi Pelayanan Kecamatan berbasis Online	Belum Akurat aplikasi pengurusan terkait kependudukan	Aplikasi ini dibuat untuk membantu memudahkan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan pengurusan terkait kependudukan, seperti surat-surat, kartu kuning atau berkas izin lainnya. Website Profile dimaksudkan sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran	Terlaksananya Aplikasi permohonan pengurusan terkait kependudukan, seperti surat-surat, kartu kuning atau berkas izin lainnya.	Terlaksananya Aplikasi permohonan pengurusan terkait kependudukan, seperti surat-surat, kartu kuning atau berkas izin lainnya.	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	ANDI MUH. ARFAH AP, S.STP.,M.AP

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			tentang potensi Kecamatan Kindang, seperti menampilkan info wisata, usaha, data statistik Penduduk, Kesehatan, Pendidikan dan Statistik lainnya secara online.							
74	Datata Tepat, Mudah dan Aman (Datata TEMAN)	Belum Akurat data terkait pelayanan dan perizinan	Data-data terkait pelayanan dan perizinan masih sangat susah untuk diakses dikecamatan hal ini dibuktikan dengan dibutuhkannya waktu yang lama untuk memperoleh segelintir data dimaksud, hal ini mungkin disebabkan karena pengimputan data yang masih secara manual menggunakan buku register sehingga membutuhkan waktu dalam hal perekapan ataupun besar kemungkinan terjadi kehilangan data.	Terlaksananya Data-data terkait pelayanan dan perizinan	Terlaksananya Data-data terkait pelayanan dan perizinan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	ANDI ASHADI, SE,MM
75	SI BANDUL (Sistem Informasi Bank Data Ujung Loe)	Belum akurat pelayanan Data	Pelayanan data kantor Kecamatan Ujung Loe	Hasil Akurat Pelayanan Data	Hasil Akurat Pelayanan Data	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	AKHMAD IHWAN NOOR, S.Pd, M. Adm. Pemb.
76	TERAS PELAYANAN (Terpusat, Ramah, dan Puas Pelayanan Kantor Kecamatan Rilau Ale)	Belum akurat pelayanan administrasi dan konsultasi	Membuat tempat Pelayanan Administrasi dan konsultasi di Halaman Kantor Kecamatan Rilau Ale.	Hasil Akurat Pelayanan Administrasi dan konsultasi	Hasil Akurat Pelayanan Administrasi dan konsultasi	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	A.Asdar Alif, S.Sos.,M.A.P
77	PETIR (Penyelenggaraan Pemerintahan terintegrasi)	Belum terlaksana pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan pengawasan dari kecamatan, untuk meningkatkan SDM yang ada di kelurahan maupun di desa.	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan dari kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan dari kecamatan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	ISWANDY BADDU, S.SOS
78	POLWAN (POS LAYANAN MALAM WARGA HERLANG)	Belum meningkatkan kualitas layanan	Meningkatkan kualitas layanan warga Kecamatan Herlang yang efektif dan efesien	Meningkatnya kualitas layanan warga Kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan warga Kecamatan	√			SK Bupati Bulukumba,	ASRAENI, SH

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			melalui POLWAN (Pos Layanan Malam Warga Herlang).	Herlang yang efektif dan efesien	Herlang yang efektif dan efesien				No.188.45-462 Tahun 2022	
79	PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Belum Akurat Administrasi	Pelayanan administrasi di kecamatan terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan.	Hasil Akurat Administrasi Di kecamatan terbitnya dokumen	Hasil Akurat Administrasi Di kecamatan terbitnya dokumen	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	HARIS. H, SE
80	BANG JAKA BER TUDANG SIPULUNG (Bangkitkan Jalinan Komunikasi Bersama Tudang Sipulung)	Belum Tercapai mengenai informasi perkembangan proses pembelajaran	Sarana orang tua peserta didik mengenai informasi mengenai perkembangan proses pembelajaran di sekolah.	Tercapainya peserta didik mengenai informasi pembelajaran	Tercapainya peserta didik mengenai informasi pembelajaran			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Misrah, S.Pd., M.Pd. & Ulfiyah, S.Pd., M.Pd.
81	OUDY BER JAS (Outdoor Study dengan Ber Jelajah Alam Sekitar)	Belum adanya media pembelajaran bagi peserta didik	Media pembelajaran bagi peserta didik, seperti hutan sekolah, green house, dapur hidup, apotik hidup dan taman-taman sekolah.	Adanya Media pembelajaran bagi peserta didik, seperti hutan sekolah, green house	Adanya Media pembelajaran bagi peserta didik, seperti hutan sekolah, green house			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Misrah, S.Pd., M.Pd. & Ulfiyah, S.Pd., M.Pd.
82	HARUS PINTAR (Hafal Rumus melalui Pintu dan Tangga Rumus)	Belum Adanya media pembelajaran	Media pembelajaran berupa tangga dan pintu kelas yang dapat digunakan peserta didik mengingat rumus-rumus Matematika dan IPA.	Adanya Media pembelajaran berupa tangga dan pintu kelas yang dapat digunakan peserta didik	Adanya Media pembelajaran berupa tangga dan pintu kelas yang dapat digunakan peserta didik	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Misrah, S.Pd., M.Pd. & Ulfiyah, S.Pd., M.Pd.
83	PUISI KELAS (Penggunaan Kartu Siswa Izin Keluar Kelas)	Belum terlaksana penggunaan kartu siswa izin keluar kelas	Penggunaan kartu siswa Izin keluar kelas, meminimalisir keluar kelas tanpa tujuan yang jelas.	Terlaksananya penggunaan kartu siswa izin keluar kelas	Terlaksananya penggunaan kartu siswa izin keluar kelas	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MUHAMMAD ASDAR, S.Pd, M.Pd
84	Ratu dan Raja BaCA GaungKan LiTERASi (ATUR ACAK TERAS)	Belum dilaksanakan seleksi tertulis,wawancara dan penyuluhan literasi	• Diawali dengan seleksi tertulis, wawancara, dan penyuluhan literasi di apel pagi,penghitungan tingkat intensitas kunjung ke perpustakaan • Melibatkan pegawai perpustakaan sebagai tim seleksi/juri pada ATUR ACAK	Terlaksasananya seleksi tertulis,wawancara da penyuluhan literasi	terlaksasananya seleksi tertulis,wawancara da penyuluhan literasi			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MUHAMMAD ASDAR, S.Pd, M.Pd

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			TERAS • Figur dalam membaca dan tindak lanjutnya berupa pojok-pojok baca, lorong-lorong baca, taman baca, donator buku.							
85	SAKOSAGU (Satu Komik Satu Guru)	Belum akurat guru membuat media pembelajaran berbasis IT	Guru membuat media pembelajaran berbasis IT dalam bentuk komik.	Hasil Akurat Guru membuat pembelajaran berbasis IT	Hasil Akurat Guru membuat pembelajaran berbasis IT			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Kaharuddin Sultan, S.Pd
86	SALAM BERKAH (Program Siswa Belajar Sambil Bersedekah)	Belum terlaksana menyisihkan sebagian uang jajan	Menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disimpan pada celengan hemat dan gemar menabung.	Terlaksananya menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disimpan pada celengan	Terlaksananya menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disimpan pada celengan			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Kaharuddin Sultan, S.Pd
87	SAGU (Satu Buku Satu Minggu)	Belum meningkatnya minat baca peserta didik	Meningkatkan minat baca peserta didik, menamatkan buku tersebut selama kurung waktu 1 minggu.	Meningkatnya minat baca peserta didik	Meningkatnya minat baca peserta didik			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	Kaharuddin Sultan, Hajraeni, & Andi Rahmiati
88	CARADDE (Cara Cepat , Ramah Dan Terdepan)	Belum Akurat Aplikasi untuk guru	Aplikasi yang dibuat untuk guru dalam menginput nilai dan identitas siswa.	Hasil Akurat Apliksi guru dalam menginput nilai dan identitas siswa	Hasil Akurat Apliksi guru dalam menginput nilai dan identitas siswa	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	SUWARDI,S.Pd.,M.Si
89	LEGO-LEGO LAMACCA	Belum tersedia ruang khusus dan layanan belajar	Tersedianya Ruang Khusus dan layanan Belajar luar kelas (Lego-Lego Lamacca) tempat Belajar secara terbuka.	Hasil tersedianya Ruang Khusus dan layanan Belajar luar kelas	hasil tersedianya Ruang Khusus dan layanan Belajar luar kelas			√	SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MULIATI NUR,S.Pd.,M.Si
90	GETAR BELUT (Gerakan Tabur Benih Dilaut)	Belum terlaksananyakegiatan gerakan tabur benih di laut	Getar Belut adalah gerakan tabur benih di laut sebagai upaya memulihkan ekosistem laut.	Terlaksananya kegiatan gerakan tabur benih dilaut	Terlaksananya kegiatan gerakan tabur benih dilaut	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	YUSLI SANDI S.Kel,M.Si
91	PROMINA (Proposal Masyarakat Interaktif untuk Nelayan)	Belum adanya media interaktif secara online	Media interaktif secara online bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sektor perikanan.	Adanya Media interaktif secara online bagi masyarakat	Adanya Media interaktif secara online bagi masyarakat	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	YUSLI SANDI S.Kel,M.Si
92	Well Come Snack dan Drink	Belum tersedia pangan dan	Pangan dan Minuman Lokal Khas Bulukumba.	Tersedianya Pangan dan	Tersedianya Pangan dan	√			SK Bupati Bulukumba,	HANDARIAH.S.Sos

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
	" SEDAPKEPUNCAK " (Selamat Datang Di Bulukumba Kusapa Engkau Dengan Kue Dan MinumanKu)	minuman lokal khas bulukumba		minuman lokas khas bulukumba	minuman lokas khas bulukumba				No.188.45-462 Tahun 2022	
93	E-OFFICE TERMINI (TERTIB ADMINISTRASI)	Belum meningkatkan kualitas layanan administrasi	Peningkatan kualitas layanan administrasi dengan cepat.	Hasil pmeningkatnya kualitas layanan administrasi dengan cepat	Hasil pmeningkatnya kualitas layanan administrasi dengan cepat	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	A.NIRWANA, S.Sos
94	SINTA CALA (Sistem Informasi dan Data Kecamatan-Kelurahan)	Belum akurat data kecamatan-kelurahan	Layanan informasi dan data Kecamatan-Kelurahan terintegrasi serta terkini yang ada di Kab.Bulukumba	Hasil Akurat data informasi kecamatan-kelurahan	Hasil Akurat data informasi kecamatan-kelurahan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	A. TENRI OLLE
95	MEDIASI (Media Daring Informasi dan Konsultasi)	Belum akurat layanan aparatur sipil negara	Layanan Aparatur Sipil Negara pelayanan informasi, konsultasi, pendampingan hukum, dan atau permohonan mediasi secara daring.	Hasil akurat layanan aparatur sipil negara pelayanan informasi konsultasi	Hasil akurat layanan aparatur sipil negara pelayanan informasi konsultasi	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MUHAMMAD RESKI ISMAIL, SH.
96	GO TAHFIDZ (Penyediaan layanan Karantina Tahfidz)	Belum adanya pembinaan dan pelatihan belajar seni baca tulis	Pusat pembinaan dan pelatihan bagi qari-qariah dan hafidz-hafidzah belajar seni baca tulis Al Qur'annya.	Adanya pembinaan dan pelatihan bagi hafidz hafidzah bejajar seni baca alquran	Adanya pembinaan dan pelatihan bagi hafidz hafidzah bejajar seni baca alquran	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	SALMAH, SE., MM
97	KLINIK PEPES YANLIK (Klinik Pelayanan Pendampingan Supervisi Pelayanan Publik Perangkat Daerah)	Belum adanya layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat	Membantu OPD untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat.	Terlaksananya layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat	terlaksananya layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	TENRI SARI MM
98	SILA JATI (Sistem Layanan Jadwal Tentative)	Belum akurat layanan aplikasipermohonan kehadiran	Tersedianya layanan aplikasi permohonan kehadiran / undangan kepada pimpinan sesuai jadwal, waktu dan tempat rencana kegiatan.	Hasil akurat layanan aplikasi permohonan kehadiran	Hasil akurat layanan aplikasi permohonan kehadiran	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	DANI SUSANTO, S,Pi

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
99	DIKERJA (APLIKASI PELAPORAN KINERJA DAN ABSENSI BERBASIS ANDROID)	Belum akurat data absensi berbasis android	Absensi berbasis Android dengan menggunakan sistem GPS dan Sensor Wajah.	Hasil akurat data absensi android dengan menggunaka sistem gps dan sensor wajah	Hasil akurat data absensi android dengan menggunaka sistem gps dan sensor wajah	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	SYAFARUDDIN, S.Sos, M.Adm.Pemb
100	POT SIANA (Pembentukan Posko Terpadu Siaga Bencana)	Belum tersedia ruang atau tempat layanan oline	Tersedianya ruang atau tempat dan layanan Online sebagai tempat pengaduan dan laporan pada saat tanggap darurat bencana.	Tersedianya ruanng atau tempat layanan online	Tersedianya ruanng atau tempat layanan online	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	SYAMSUDDIN, S.AP
101	APPTI (Aplikasi Pemantauan dan Pemeriksaan Tindaklanjut)	Belum akurat notifikasi melalui perangkat android	Menyediakan fitur notifikasi melalui perangkat android mengenai penugasan, permintaan dokumen maupun informasi.	Hasil akurat notifikasi melalui perangkat android	Hasil akurat notifikasi melalui perangkat android	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	ARFIANTI ADHIYATI SAIRA
102	PUSAT DATA DAN INFORMASI (PASTImi)	Belum akurat pusat data dan informasi	PUSAT DATA DAN INFORMASI (PASTImi) adalah Sistem Pengelolaan Pusat Data yang terintegrasi dan Pengelolaan Informasi Satu Pintu yang merupakan node (simpul) strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba.	Hasil akurat Pusat data dan Informasi Sistem Pengelolaan Pusat Data yang terintegrasi dan Pengelolaan Informasi Satu Pintu	Hasil akurat Pusat data dan Informasi Sistem Pengelolaan Pusat Data yang terintegrasi dan Pengelolaan Informasi Satu Pintu	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	RUDY RAMLAN, SSTP
103	SI KASPER (Sistem Informasi Kawasan Permukiman)	Belum akurat data tentang kawasan pemukiman berbasis GIS	Menyediakan data tentang Kawasan permukiman yang berbasis GIS untuk pengembangan Kawasan Permukiman di Kab.Bulukumba.	Hasil akurat data tentang kawasan pemukiman berbasis GIS	Hasil akurat data tentang kawasan pemukiman berbasis GIS	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MUNASIB, ST & HENDRI PRASETYAWAN, ST
104	RINDU JAKI-PR (Ruang Informasi, Pengaduan dan	Belum tersedia layanan ruang informasi	Inovasi Penyediaan layanan Ruang Informasi Pengaduan dan pembinaan disesuai dengan Kebutuhan yang	Tersedianya layanan Ruang Informasi Pengaduan dan	Tersedianya layanan Ruang Informasi Pengaduan dan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	MUH.ASDAR,ST.,MT./ A. ROMY, SH.

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
	Pembinaan Jasa Konstruksi)	pengaduan dan pembinaan	merupakan Ruang khusus dan layanan secara online yang disediakan untuk informasi bagi pelaku jasa konstruksi, pelaku pemanfaatan ruang dan masyarakat secara umum di kab.Bulukumba	pembinaan disesuai dengan Kebutuhan yang merupakan Ruang khusus dan layanan secara online	pembinaan disesuai dengan Kebutuhan yang merupakan Ruang khusus dan layanan secara online					
105	SIMPADA (Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah)	Belum tersedianya informasi bagi pelaku jasa kontruksi	Informasi bagi pelaku jasa konstruksi, pelaku pemanfaatan ruang dan masyarakat umum.	Tersedianya informasi bagi pelaku jasa kontruksi	Tersedianya informasi bagi pelaku jasa kontruksi	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	ANDI NURHIDAYAT, SE.,MM
106	SIGAP BIRA (Siap Tanggap Bira)	Belum ada posko kesehatan bagi wisata	Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira	Ketersidaan Posko kesehatan	Layanan Kesehatan wisata di Bira	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes
107	Gardu Kencang si PTM Poli	Belum ada posko kesehatan bagi wisata	Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira	Ketersidaan Posko kesehatan	layanan kesehatan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes
108	Poli Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak	Belum ada posko kesehatan bagi wisata	Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira	Ketersidaan Posko kesehatan	layanan kesehatan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes
109	Pasta GigiMu (Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan Gigi dan mulut melalui media Vidio dan leaflet	Belum ada posko kesehatan bagi wisata	Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira	Ketersidaan Posko kesehatan	layanan kesehatan	√			SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022	dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes
110	SESI SADUL SAKAN (Setiap Siswa Wajib Membaca Satu Judul Buku Dalam Satu Pekan)	Pertemuan Orang Tua dan siswa	Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik dan komite sekolah untuk membahas rencana	Pertemuan dengan orang tua siswa	Layanan Pendidikan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Rosmini, S.Pd / Sulfiana, S. Pd

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			danpelaksanaan program termasuk meminta sumbangan buku bekas dari orang tua peserta didik ataumasyarakat.							
111	POLISI SAMPAH (Pungut Olah Jual Hasil Limbah Sampah)	Kerjasama kebersihan sekolah	Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik dan komite sekolah untuk membahas rencanadan pelaksanaan program POLISI SAMPAH	Kebersihan sekolah	Kebersihan sekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Amrullah, S.Pd / A. Harmawati, S. Pd
112	PELAJU MACCA (Petik Olah Jual Merica)	Belum adanya pengolahan merica	Kecamatan Rilau Ale dan Bulukumpa adalah daerah penghasil merica terbesar di KabupatenBulukumba, bahkan merica yang berasal dari 2 kecamatan ini mencapai 70% (hasil sensus)	pengolahan merica	pengolahan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Idaharyani, S. Pd, M. Pd / Yulianti,S.Pd
113	SESI SAPON (Setiap Siswa Menanam Minimal Satu Pohon Produktif)	kerja sama	Mengajak orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah untuk membahas rencana aksi	Kerja Sama	Kerja sama				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Firmansyah, S. Pd / A.Asrayani AS, S. Pd
114	VICON OIL 42 (Virgin Coconut Oil SMPN 42 Bulukumba	Belum produksi Vicon Oil	Mengajak orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah untuk ikut serta mengolahVicon Oil 42	Produksi Vicon Oil	Vicon Oil				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Diana Rista, S. Pd /Ernawati, S. Pd
115	GSB (Giat Shalat Berjamaah)	Penjadwalan	Pada jam pelajaran dibuat jadwal pelaksanaan shalat berjamaah dari pukul 11,50 – 12,30. Kemudian diisi dengan litersi keagamaan berupa membaca Al.quran.kultum dan kegiatan ibadah lainnya Akan dibuat group link dengan orang tua peserta didik tentang informasi pelaksaanaan shalat berjammah pserta didik dirumah.	Sholat berjamaah	Informasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Nurhalim, S.Pd, /Arman,S.Pd

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
116	LAMPU (Pengolahan Sampah Terpadu)	Belum adanya pengolahan sampah	Inovasi Lampu (Pengolahan Sampah Terpadu) sampah daun merupakan langka dalam menanggulangi sampah yang ada dilingkungan sekolah danmegolahnya menjadi pupuk kompos yang sangat berguna bagi tanaman tentunya bagi warga sekitar sekolah termasuk juga untuk tanaman dalam lingkungan sekolah tersebut. Pengolahan sampah menjadi pupuk kompos diharapkan menjadi langkah awal dalam upaya pelestarian lingkungan khususnya dalam lingkungan sekolah, sehingga generasi selanjutnya tetap dapat menikmati keindahan alam.	Pengolahan sampah plastik	Pelestarian lingkungan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Drs. H. SYARIFUDDIN, M.S
117	PESOHOR 25 (Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Holtikultura	Beelum adanya pengolahan komoditas	Salah satunya dengan menyiapkan pangan segar yang bisa dinikmati dari perkebunan SMP Negeri 25 Bulukumba, kegiatan PESOHOR 25 kedepannya diharapkan mampu memberikan hasil berupa komoditas-komoditas harian yang sifatnya segar. Dalam artian tanaman yang ditanam dilahan kosong 25 di konsumsi secara langsung setelah di panen langsung.	Pengolahan komoditas	Pengolahan produk				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Drs. Muhammad Jusman dan Nurasma Hasni, S.Pd.I
118	BCA (Bell Cinta Al-Qur'an	Belum adanya bell baca Quran	Inovasi Bell Cinta Alquran (BCA) adalah Inovasi yang dilator belakangi oleh kondisi ,	Belll Baca Quran	Tanda Bell				SK Bupati Bulukumba,	Danial,S.Pd,M.M dan Muhammad Yamin,S.Pd

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			Masih kurangnya komunikasi atau perhatian orang tua dengan pihak sekolah dalam memantau						No.188.45-216 Tahun 2023	
119	INOVASI TTG (Teknologi Tepat Guna) VCO	Belum ada penerapan tepat guna	Inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) UPT SPF SMPN 13 Bulukumba merupakan suatu Langkah nyata yangdilakukan oleh pihak sekolah dan masyarakat dalam rangka penerapan Ilmu Pengetahuan yang tepat guna	Penerapan tepat guna	TTG				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	ACI,S.Pd, M.Pd. /FACHMY KHARTADYNATA, S.Pd
120	PATRIOT MAS 28 (Pusat Informasi Terpadu & Layanan Komunikasi Orang Tua,Masyarakat Dan Warga Sekolah 28)	Belum adanya Website	Inovasi PATRIOT 28 ini berupa website layanan terpadu yang dapat diakses langsung oleh orang tua dan masyarakat. Layanan ini berisi berbagai informasi terkait perkembangan sekolah, informasi perkembangan peserta didik,	adanya Website	Jaringan Website				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Sudirman, S.Pd., & Sella Arzyta AS, S.Pd
121	KONEKSITAS DACIL (Koneksitas Data Dapodik Dan Capil)	Kerja sama	Koneksitas DACIL (Koneksitas Data DAPODIK dan DUKCAPIL) merupakan layanan yang di gunakan untuk mengkoneksikan data DAPODIK dan DUKCAPIL	Kerjasama	Replikasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	MUHAMMAD ASDAR, S.Pd.,M.Pd
122	MELATIKU (Menyulap Lahan Tidur Menjadi Kebun	Belum menafaatkan lahan	Melatiku Singkatan Dari Menyulap Lahan Tidur Menjadi Kebun Sekolah Inovasi Ini	Pemafaatan lahan	Pemanfaatan lahan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj.SUARNI AZIS
123	PANAIK (Pengolahan Ikan Menjadi Abon Ikan)	Belum ada pengolahan Ikan	Ikan merupakan salah satu hasil laut yang dikonsumsi masyarakat karena merupakan sumber protein yang mudah dicerna dan kadar lemak relatif	adanya pengolahan ikan	Pengolahan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	H. Syahrir, S.Pd, M.Si. dan Nurfalah Sari, S.Pd.

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			rendah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan							
124	MA'SIFA (Mengolah Sardine Produktif)	Belum ada pengolahan sardine	Inovasi Mengolah Sardine Produktif (MA'SIFA) adalah ide/gagasan baru	adanya pengolaha sardine	Pengolahan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	MUHAMMAD YUSUF
125	WALASUJI (Mengawal Perilaku Siswa Terpuji)	Perilaku siswa	Walasuji (Mengawal Perilaku Siswa Terpuji) dimaksudkan untuk mengantisipasi perilaku negative danperundungan melalui penerapan disipilin positif	berperilaku	Berperilaku baik				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Abdul Azis, S.Pd., M.Pd. / Amri, S.Ag., MM
126	SI KOIN EMAS (Sistem Komunikasi, Informasi Edukasi Masyarakat)	Belum ada sistem Komunikasi	Si Koin Emas (Sistem Komunikasi, Informasi, Edukasi Masyarakat) merupakan Sistem Informasi ManajemenSekolah yang berbasis Teknologi. Melalui media ini orang tua dan masyarakat mendapatkan informasi seputarpendidikan secara umum serta satuan pendidikan secara khusus	Sistem Komunikasi	Sistem Informasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Abdul Azis, S.Pd., M.Pd. / Amri, S.Ag., MM
127	BATU AMBAR (Membuat Penatausahaan Administrasi Menggunakan Barcode)	Belum ada barcode	Batu Ambar (Membuat Penaatausahaan Administrasi menggunakan Barcode)	Barcode	Penatausahaan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Abdul Azis, S.Pd., M.Pd. / Amri, S.Ag., MM
128	MANTAPKI (Pemanfaatan Tanaman Penduduk di sekitar Sekolah)	Tanaman diekitar sekolah	MANTAPKI (Pemanfaatan Tanaman Penduduk Sekitar Sekolah) merupakan inovasi yang dilatarbelakangi perhatian yang mendalam akan berkurangnya	pemanfaatan tanaman	pemanfaatan lingkungan sekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Marasiah, S.Pd dan Ristawadi, S.S.
129	PEMUDA BERKARYA (Pengembangan Pemasaran Usaha Kue Khas Daerah)	Belum adanya sistem pengembangan	Pemuda Berkarya (pengembangan pemasaran usaha kue khas Daerah) adalah inovasi yang dilatarbelakangi	ada sistem pemasaran	Pemasaran kue tradional				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	HJ. ANDI ARIDAH MALIK, S.Pd.M.M dan ANDI RAHMAT, SE

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
		pemasaran kue khas	oleh belum Adanya sistem pengembangan pemasaran usaha kue khas Bontobahari, masihRendahnya kuaitas Kue Khas							
130	BAJABU TA'(Pengembangan	Pengolahan hasil bumi	BAJABUTA' merupakan inovasi yangilatarbelakangi perhatian yang mendalam akan kurangnya pemanfaatan dan pengolahan hasil bumi yang sangat melimpah di daerah sekitar SMP Negeri 35 Bulukumba, yaitu Buah Kelapa	Pengolahan	Pengolhan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj. Juhaedah
131	PALLABA (Pallapi Babua) Pelapis Perut'	Mengatasi tidak sarapan	Meminimalisir peserta didik yang sakit akibat tidak sarapan,sehingga pembelajaran dapat berjalan	Saapan	dapat mengikuti kegiatan disekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj. Rosmayani, S. Pd .,M.Pi. &Nurlaela,S.Pd
132	SATU REGU (Hari Sabtu Refleksi Guru)	Belum diprogramkan	rogram rutin kepala sekolah yang dilaksanakan setiap hari sabtu. Kegiatan ini dikemas dalam rapat rutin sekola	diprogramkan	Tindak Lanjut Program Kemendes				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Muhammad Arfin, S.Pd., M.Pd.
133	TARSIH (Duta Kebersihan Sekolah)	Belum ada model informasi	eserta didik yang menjadi model atau contoh menyampaikan informasi tentang kebersihan sekolah.	Ada model informasi	informasi				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj Sitti Nurbaya,S.Pd
134	KAMEKAMEHA (Kami Mengaji, Kami Menghafal Al-Qur'an Juz Amma)		Meningkatkan literasi al-Qur'an di sekolah. Agar murid-murid terbiasa membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Diharapkan dapat membentuk karakter murid yang religius.						SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj Sitti Nurbaya,S.Pd
135	SI KOCAK Sikola Cakka (Sekolah Bersih)	Belum menajaga kebersihan kelas	Sosialisasi pembiasaanpeserta didik di setiap kelas, menjaga kebersihan dari sampah.	Kebersihan kelas	Kebersihan sekolah				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Eka Fausiah Azsahrah,S.Pd

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
136	RUMAH KACA (Rutinitas Jumat Harus Membacakan Cerita)	Belaum lancar membaca	Guru memilih secara acak siswa setiap hari jumat untuk membacakan sebuah cerita	lancar membaca	Membaca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj.Hasmiati,S.Pd.,MM &Pratiwi Risnaeni, S.Pd
137	S2R (Sehat Segar ala Risma)	Mengatasi Lingkungan	Mengatasi masalah lingkungan dimana wabah virus mudah menyerang bagi yang memiliki imun tubuh rendah.	Lingkungan	Kekebalan tubuh				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
138	QuKi (Quizizz	Belum metode quiss	Pembelajaranberbasis permainan aplikasi Quizizz	Metode	Metode				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
139	Program “Sami Sar”(Satu Minggu Satu Karya)	Belum minat baca	Program yang dapat membangkitkanminat baca peserta didik serta menghasilkan	membangkitkan minat baca	Minat baca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
140	Nilaru (Klinik layanan Guru		Inovasi Pembelajaran Berbasis Permainan dengan menggunakan metode Treasure Hunt(mencari topik pembelajaran)						SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
141	Trans GB (Treasure Hunt yang di aplikasikan dengan Gaya Belajar)		Inovasi Penyediaan layanan untuk para guru menyampaikan masalah dan kebutuhan serta tempat pelatihan untuk para guru mengikuti						SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
142	SABU PAKET (Satu Bulan Satu Kegiatan)		empat pelatihan untuk para guru mengikutipelatihan/bimbingan						SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusnaely, S.Pd
143	CURI DAGU (Cukup Sehari Dalam Seminggu	Ketarutan berbelanja	Cukup belanja sehari dalam seminggu dengan membiasakan murid membawa bekal sehat yang dibawa dari rumah dengan menggunakan wadah yang	Berbelanja	Jajanan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj. Andi Suyatmy, S.Pd.SD, Muh. Arfah, S.Pd,Ramlah Asmadi, S.Pd & Ariyanti, S.PdI

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			tidak menghasilkan sampah di sekolah.							
144	MACCA (Mari Membaca)	Belum da pembimbingan	Bimbingan secara khusus dan bergilir setiap kelasnya di perpustakaan untuk membaca.	Ada pembimbingan	pembimbingan				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Ratih Yulvitasari, S. Pd
145	JUBAH (Jumat Ibadah)		Siswa melakukan shalat duha setiap hari jumat.						SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj Nahdiah Malik,S.Pd & Dirmawati, S.Pd
146	KURAMPAS (Kurangi Sampah Plastik)	Belum ada kesadaran siswa	meningkatkan kesadaran warga sekolah mengurangi sampah plastik	meningkatkan kesadaran siswa	Perilakusiswa				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hj.Roslinah, S.Pd.SD.,M.M
147	PLASTIK (Pojok Baca Kelas Estetik)	Belum minat baca	Upaya terwujudnya peningkatan minat baca murid melalui daya dukung pojok baca atau sudut baca di setiap kelas.	Minat bca	minat baca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Irman, S.Pd
148	SUKU (Sudut Baca Sahabatku)	Belum minat baca	Untuk meningkatkan minat baca siswa, dilakukan inovasi dengan menyiapkan sudut baca di setiap kelas yang dilengkapi dengan buku bacaan.	Minat bca	minat baca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusniar, S.Pd
149	SEBAREN (Sekolah Berbasis Pesantren)	Belum minat baca	Model Pendidikan yang mengintegrasikan sistem Pendidikan formal dan pembelajaran pesantren.	Minat bca	minat baca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Jusman.M,S.Pd,MM
150	GARASI SEKOLAH (Gerakan Literasi Sebelum Bel Masuk)	Belum minat baca	Meningkatkan minat baca murid setelah sampai di sekolah pada pagi hari sebelum Bel Tanda masuk Berbunyi.	Minat bca	minat baca				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	Hasrita Anwar, S.Pd
151	Mewujudkan Minat Baca (BELAJAR) Peserta Didik	Belum ada layanan online	Layanan secara online yang disediakan untuk Pengaduan dan Kosultasi terhadap	Layaan online	online				SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023	H. Muhammad Bahri S. Pd

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			kurangnya minat baca belajar pada Anak peserta didik.							
152	Menjadikan Desa Batukaropa sebagai Desa Wisata Jambu Air	Belum terlaksananya Desa Wisata Buah Jambu Air	Inovasi Menjadikan Desa Batukaropa menjadi Desa Wisata Buah Jambu Air dengan memberikan Pengetahuan terhadap Petani Jambu melalui Pelatihan-pelatihan dan memberikan Sarana tempat menjual yang Layak,sehinggah dapat membantu mengembangkan usaha warga.	Hasil terlaksananya Desa Wisata Buah Jambu Air	Hasil terlaksananya Desa Wisata Buah Jambu Air	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Taufik Laenre, S.Sos
153	Merefitalisasi Lapangan Sepak Bola Menjadi Sarana Multi Fungsi	Belum tersedianya sarana multifungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola	Inovasi Penyediaan sarana multi fungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola selain sebagai sarana olahraga juga dapat difungsikan sebagai sarana wisata kuliner, dan pendidikan, dengan harapan dapat melahirkan generasi – genearsi berprestasi dibidang olahraga, pendidikan dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha kuliner.	Tersedianya sarana multifungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola	Tersedianya sarana multifungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Ridwan
154	(Degit) Desa Digital	Belum akurat aplikasi diplaystore	Warga mendownload aplikasi diplaystore lalu membuat akun login menggunakan NIK, lalu menunggu verifikasi yang dikirim melalui SMS. Setelah mendapat akun warga bisa masuk diaplikasi dan bisa menggunakan sesuai kebutuhannya. (Kami hanya melayani warga desa Kambuno) yakni bisa	Hasil Akurat Aplikasi diplaystore lalu membuat akun login menggunakan NIK, lalu menunggu verifikasi yang dikirim melalui SMS.	Hasil Akurat Aplikasi diplaystore lalu membuat akun login menggunakan NIK, lalu menunggu verifikasi yang dikirim melalui SMS.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Akmal Yuhniani.M

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			mengimput data sendiri dan mencetaknya dimana saja							
155	Penggunaan Sistem Informasi dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital	Belum akurat penggunaan sistem informasi	Layanan Penggunaan Sistem Informasi dalam Pelayanan administrasi Masyarakat merupakan Layanan administrasi kepada masyarakat menggunakan sistem informasi yang mana sebelumnya dilakukan secara manual yang mana data masyarakat pemohon layanan masih diketik secara manual, dengan adanya penggunaan sistem informasi yang digunakan bisa menekan waktu pengerjaan karena data-data pemohon bisa diambil dari basis data kependudukan tanpa diinput secara manual. Selain itu masyarakat yang ada di tempat lain dan di luar daerah yang merupakan anggota masyarakat desa yang bersangkutan dapat mengurus persuratan dan permohonan lainnya tanpa harus mendatangi kantor desa.	Hasil akurat penggunaan sistem informasi	Hasil akurat penggunaan sistem informasi	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jamaluddin
156	PAKDE DAMAIKAN HATI (Pemerintah Desa Datang Menyerahkan Akte Kematian) dalam rangka pemutakhiran data kependudukan khususnya warga yang meninggaldi Desa Bulo-	Belum tercapainya pemerintah desa datang menyerahkan akte kematian	Inovasi PAKDE DAMAIKAN HATI (Pemerintah Desa Datang Menyerahkan Akte Kematian) ini dilakukan penyerahan pada saat Takziah terakhir bagi yang meninggal dengan melibatkan Kepala Dusun dan Imam Dusun dan Bekerjasama dengan	Tercapainya Pemerintah Desa datang menyerahkan Akte Kematian	Tercapainya Pemerintah Desa datang menyerahkan Akte Kematian			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Mappilawa,SE

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
	Bulo Kecamatan Bulukumpa		Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam penerbitan akte kematian masyarakat desa Bulo-Bulo, Inovasi ini merupakan replikasi/ pengembangan dari Inovasi PAKU PANRITA yang dicanangkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.							
157	Purwarupa Duwila (Posyandu Wisata Lamanda)	Menghambat capaian imunisasi di wilayah kerja	Dari Kegiatan ini kami dari tim fasilitator Puskesmas Bontotiro sangat bersyukur karena kami bisa terlibat dan menjadi salah satu garda terdepan dalam membentuk Purwarupa di Posyandu yang mana semua ide yang kita dapat hasil dari apa yang kita pelajari dari Worshop HCD (Human Centered Design). Dari Kegiatan ini kami dapat memberikan pengantar terkait metode HCD untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat capaian imunisasi di wilayah kerja UPT Puskesmas Bontotiro yang di implementasikan di Posyandu . Cakupan imunisasi dasar lengkap Puskesmas Bontotiro meningkat setelah adanya Program HCD	Meningkatnya capaian imunisasi di wilayah kerja	Meningkatnya capaian imunisasi di wilayah kerja	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Agusman,SKM,M.Kes
158	GaPuRa BuTTaKu (Gerakan Sepuluh Rumah	Kurangnya upaya dalam memutus mata rantai	GaPuRa BuTTaKu adalah salah satu upaya yang ditempuh oleh Inovator dan Tim dalam	Mencegah penularan penyakit	Mencegah penularan penyakit	√			SK Bupati Bulukumba No.	Ahmad, SKM

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
	untuk Bulukumba Tanpa Tuberkulosis dan Kusta)	penularan penyakit tuberculosis,kusta dan frambusia	rangka memutus mata rantai penularan penyakit Tuberculosis, Kusta dan Frambusia melalui kegiatan deteksi dini dalam lingkup kecil yaitu dalam lingkup per 10 (Sepuluh) rumah. Dengan lingkup kecil ini akan lebih efektif, efisien dalam penemuan terduga dan kasus baru serta mempermudah dalam Pengawasan Minum Obat (PMO).	tuberculosis,kusta dan frambusia	tuberculosis,kusta dan frambusia				188.45-216 Tahun 2023	
159	Bulukumba Integrasi Kesehatan Jiwa Terpadu (BIJANTA)	Kurangnya peningkatan cakupan pelayanan ODGJ	Inovasi BIJANTA berdampak signifikan pada peningkatan cakupan pelayanan ODGJ, di mana pada tahun 2020 kasus ODGJ yang ditemukan di lokus Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 22 orang, pada tahun 2021 mengalami peningkatan cakupan sebanyak 60 orang, dan pada tahun 2022 menjadi 84 orang. Kualitas Layanan ODGJ menjadi lebih efektif dan efisien serta berkurangnya kasus ODGJ yang terpasung, meningkatnya peran keluarga dalam merawat dan memantau minum obat	Peningkatan cakupan pelayanan ODGJ	Peningkatan cakupan pelayanan ODGJ	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Arhan, S.Kep.,Ns., M.Kep
160	Aksi Masyarakat Deteksi dan Intervensi Kesehatan Jiwa (ASMARA DI JIWA)	Kurangnya pencatatan pelaporan dan pemantauan	Pencatatan pelaporan dan pemantauan dan evaluasi - Pentatatan dan pelaoran - Kordinasi stake holder Kordinasi berkala	Meningkatkan Pencatatan pelaporan dan pemantauan dan evaluasi	Meningkatkan Pencatatan pelaporan dan pemantauan dan evaluasi	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Arhan, S.Kep.,Ns., M.Kep

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
161	Bidan Peduli Dan Lindungi Ibu Hamil (BIDAN PELANGI)	Kurangnya pencegahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi	Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih kerap terjadi untuk itu kegiatan inovasi bidan Puskesmas Caile adalah BIDAN PELANGI dalam artiannya bidan peduli dan lindungi ibu hamil, sebagai bentuk sayang pada ibu hamil merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.	Meningkatkan pencegahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi	Meningkatkan pencegahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Susdiana, Amd.Keb
162	Pantau Langsung Minum Obat Kecacingan (PALANG MUKA)	Kurangnya pencegahan anak menderita kecacingan	Inovasi pantau langsung minum obat kecacingan (PALANG MUKA). Penyakit kecacingan merupakan salah satu penyakit terabaikan terkadang belum dianggap penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan. Namun dampak yang ditimbulkan oleh kondisi dimana anak sekolah yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dapat terhambat apabila anak menderita kecacingan	Meningkatkan pencegahan anak penderita kecacingan	Meningkatkan pencegahan anak penderita kecacingan	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Hj. Masnah, S.Kep, Ns
163	Konseling ASI dan Perawatan Payudara (KASI PEPAYA)	Kurangnya motivasi peningkatan cakupan ASI eksklusif	Angka persalinan relatif banyak di Puskesmas Caile sehingga memotivasi dan mengedukasi ibu-ibu baru dalam rangka meningkatkan cakupan ASI eksklusif diwilayah Puskesmas. Kegiatan diawali dengan ibu hamil	Meningkatkan Motivasi ibu-ibu baru dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif diwilayah Puskesmas	Meningkatkan Motivasi ibu-ibu baru dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif diwilayah Puskesmas	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Marlina, SKM

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			mendaftarkan diri melalui hotline WA Puskesmas Caile kemudian petugas memberikan jadwal tersedia. Ibu hamil datang ke Puskesmas sesuai jadwal pemeriksaan kehamilan terlebih dahulu setelahnya akan mendapatkan konseling ASI dan perawatan perawatan dari petugas gizi.							
164	DIOPER LAB (Digitalisasi Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium)	Kurangnya digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan	Dengan inovasi digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan akan lebih memudahkan mencari data, mengolah data, merakapitulasi data yang secara berkala dibutuhkan oleh puskesmas, dengan begitu data tersebut tidak lagi ditulis secara manual pada buku	Meningkatkan digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan	Meningkatkan digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Regina Andini Maulidya, S.Tr.Kes
165	KASITAU (Keluarga Siap Pantau)	Kurangnya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi	Merupakan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi pendek dan sangat pendek serta pemanfaatan aplikasi primaku dan pojok skrining untuk mendeteksi status gizi pendek dan sangat pendek	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	dr. NURUL HIDAYAH. R
166	MASSEDI (Mari Cegah Stunting Sejak Dini)	Kurangnya menggunakan metode door to door untuk pencapaian posyandu	Merupakan inovasi dengan melibatkan kader-kader kesehatan di desa serta petugas puskesmas melakukan sweeping ibu hamil, bayi dan balita secara rutin menggunakan metode door to door dimana kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pencapaian	Meningkatkan metode door to door untuk pencapaian sasaran kegiatan posyandu dimana tidak semua warga secara rutin datang membawa anak	Meningkatkan metode door to door untuk pencapaian sasaran kegiatan posyandu dimana tidak semua warga secara rutin datang membawa anak	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	ANDI MUHAMMAD HAERUL, SKM

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			sasaran kegiatan posyandu dimana tidak semua warga secara rutin datang membawa anak bayi/balita mereka ke posyandu, sehingga petugas dapat melakukan pelacakan secara keseluruhan terhadap seluruh kelompok umur bayi-balita serta ibu hamil dalan pencegahan dan penanggulangan stunting	bayi/balita mereka ke posyandu,	bayi/balita mereka ke posyandu,					
167	KADAR MANIS (Peningkatan Kesadaran Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil di Puskesmas)	Kurangnya alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil	1. Membuat alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil 2. Menyiapkan register dan kartu kontrol kesehatan gigi dan mulut untuk ibu hamil 3. Membuat leaflet tentang "Pentingnya ibu hamil menjaga kesehatan gigi dan mulut" 4. Melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil 5. Melakukan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil	Meningkatkan Alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil	Meningkatkan Alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jindasari Said, S.ST dan dr. ANDI FIRJATULLAH EL FIRMAN
168	PILAR BERSEPAKAT (Penggunaan Media Sosial Instagram dan Facebook sebagai Media Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat)	Kurangnya mempublikasikan informasi ke media sosial	1. Membuat alur pengiriman dokumentasi media sosial Puskesmas 2. Membuat SK penanggungjawab masing-masing program 3. Menyiapkan link Google Drive 4. Mempublikasikan Informasi Ke Media sosial	Meningkatkan publikasi informasi ke media sosial	Meningkatkan publikasi informasi ke media sosial	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jindasari Said, S.ST dan Saripa,S.K.M
169	PIKNIK SANTAI (Pojok Konseling Klinik Sanitasi)	Kurangnya alur pelayanan klinik sanitasi	1. Membuat Alur Pelayanan Klinik Sanitasi 2. Membuat Perencanaan	Meningkatkan alur pelayanan klinik sanitasi	Meningkatkan alur pelayanan klinik sanitasi	√			SK Bupati Bulukumba No.	Jindasari Said, S.ST dan Intan Rahmawati, SKM

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			Klinik Sanitasi 3. Melakukan Sosialisasi Alur Pelayanan Klinik Sanitasi 4. Melakukan Pelayanan Klinik Sanitasi 5. Melakukan Evaluasi Pelayanan Klinik Sanitasi						188.45-216 Tahun 2023	
170	PESAN GANAS (Penyuluhan dan pemeriksaan gigi geligi anak usia sekolah di wilayah UPT Puskesmas Ujung Loe)	Kurangnya koordinasi dengan pihak sekolah terkait penyuluhan kesehatan gigi	1. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait kegiatan yang akan dilakukan 2. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi 3. Melakukan pemeriksaan keadaan gigi geligi anak usia sekolah untuk mengetahui kondisi keadaan gigi dan mulut 4. Melakukan rujukan kepada siswa yang memiliki masalah kesehatan gigi	Meningkatkan Koordinasi dengan pihak sekolah terkait penyuluhan kesehatan gigi	Meningkatkan Koordinasi dengan pihak sekolah terkait penyuluhan kesehatan gigi	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jindasari Said, S.ST dan Ika Rista Mutmainna, A.Md.Kes
171	PERI SURVEILANS (Optimalisasi Pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Melalui Pembentukan Jaringan Surveilans Diwilayah UPT Puskesmas Ujung Loe)	Kurangnya sosialisasi dengan petugas poskesdes dan pustu	P2 UPDATE (Melakukan sosialisasi dengan petugas Poskesdes dan Pustu) 2. Surveillance Squad (Melakukan pembetukan jaringan surveilans) 3. Weekly Report (Perekapan dan pelaporan mingguan) 4. Monev SKDR (Evaluasi kegiatan Pelaporan KDR)	Meningkatkan P2 update sosialisasi dengan petugas poskesdes dan pustu	Meningkatkan P2 update sosialisasi dengan petugas poskesdes dan pustu	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jindasari Said, S.ST dan Rahmi, SKM
172	PERI GIGI UTAMA (Pentingnya upaya preventif pada perawatan gigi anak di wilayah puskesmas Ujungloe)	Kurangnya edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi anak	1. Melakukan edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga Kesehatan gigi anak. 2. Melakukan penyuluhan tentang masa tanggal dan erupsi gigi 3. Mengenalkan keanak alat	Meningkatkan edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi anak	Meningkatkan edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi anak	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Jindasari Said, S.ST dan drg. Fitria Sultan

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			alat pemeriksaan gigi agar menghilangkan rasa takut. 4. Melakukan pemeriksaan keadaan gigi geligi anak untuk mengetahui kondisi keadaan gigi dan mulut.							
173	EPIN DPT (Edukasi Pemberian Vaksin Dpt)	Kurangnya edukasi pemberian vaksin DPT pada bayi umur 9 bulan	Inovasi berupa edukasi pemberian vaksin DPT (EPIN DPT) pada bayi umur 9 bulan dengan menggunakan perangkat berupa poster, flyer dan vidio agar menarik minat ibu balita yang diharapkan dapat menjadi pengetahuan di masyarakat khususnya di wilayah puskesmas lembanna	Meningkatkan edukasi pemberian vaksin DPT (EPIN DPT) pada bayi umur 9 bulan dengan menggunakan perangkat berupa poster, flyer dan vidio	Meningkatkan edukasi pemberian vaksin DPT (EPIN DPT) pada bayi umur 9 bulan dengan menggunakan perangkat berupa poster, flyer dan vidio			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Sudirman SKM,S.Kep,Ns,M.Kes
174	OPTIMIS (OPTImalisasi penyaMpaian Informasi tentang penderita hipertenSi)	Kurangnya pengoptimalisasia n penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat	Gagasan kreatif untuk penyelesaian isu di atas kaitkan dengan penerapan manjemen program di puskesmas dimana perlunya pengoptimalisasian penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat dalam membantu mengatasi masalah-masalah yang muncul, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu memberikan gagasan pemecahan dengan " OPTIMIS (Optimalisasi penyampaian informasi tentang Hipertensi pada pasien di ruang tunggu pasien Puskesmas Kajang)"	Meningkatkan pengoptimalisasian penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat	Meningkatkan pengoptimalisasian penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	SIRAJUDDIN, SKM, M.Kes
175	TAMAN BUSA UNTUK ELSA (Taman Buah Dan	Kurangnya penyiapan bibit,	Kegiatan inovasi ini diawali dengan penyiapan bibit,	Meningkatkan penyiapan bibit,	Meningkatkan penyiapan bibit,	√			SK Bupati Bulukumba No.	PUTRINI, SKM

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
	Sayur Untuk Keluarga Sehat)	pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman.	pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat diterapkannya GERMAS dan salah satu indicator PHBS (Makan buah dan sayur setiap hari), serta mengurangi pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.	pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman.	pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman.				188.45-216 Tahun 2023	
176	Publikasi Informasi Kesehatan Menggunakan Display Screen Ruang Tunggu Puskesmas	Kurangnya display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini	Informasi Kesehatan disajikan dalam bentuk video dan diputar secara terus menerus di display screen ruang tunggu Puskesmas. Video akan diupdate secara continue sehingga informasi yang diberikan sesuai dengan current issue kesehatan. Dengan pemanfaatan display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini maka secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku sehat.	Meningkatkan display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini maka secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku sehat.	Meningkatkan display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini maka secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku sehat.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	ANDI ISMAINAR BAHTIAR, S.Kep., Ns
177	SEHARI USIL (Sehat Dan Ceria Di Usia Lanjut)	kurangnya minat ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya dan masih kurangnya	Inovasi Sehat Dan Ceria Di Usia Lanjut (SEHARI USIL) sesuai dengan kebutuhan Lansia yang dimana Usila masih merasa malas ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya	Meningkatkan kebutuhan Lansia yang dimana Usila masih merasa malas ke Puskesmas untuk	Meningkatkan kebutuhan Lansia yang dimana Usila masih merasa malas ke Puskesmas untuk	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Dr. BENAWA

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
		pengetahuan tentang penyakit	dan masih kurangnya pengetahuan tentang penyakit degenaratif dimana usila menginginkan konsultasi pskikologis secara langsung dengan dokter.	memeriksakan kesehatannya dan masih kurangnya pengetahuan tentang penyakit	memeriksakan kesehatannya dan masih kurangnya pengetahuan tentang penyakit					
178	GEMA SEGAR (Gerakan Masyarakat Sehat Bugar)	Kurangnya hasil jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan diabetes	Inovasi masyarakat wajib olah raga, dicetuskan berdasar hasil jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan Diabetes melitus sangat tinggi sehingga terasa wajib untuk dilakukan edukasi tentang pentingnya berolahraga dengan melibatkan lintas sektor pemerintahan (Kecamatan, koramil, Polsek, Kel/Desa) dalam hal ini berbentuk edaran masyarakat wajib sehat dengan berolah raga.	Meningkatkan jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan Diabetes melitus sangat tinggi sehingga terasa wajib untuk dilakukan edukasi tentang pentingnya berolahraga	Meningkatkan jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan Diabetes melitus sangat tinggi sehingga terasa wajib untuk dilakukan edukasi tentang pentingnya berolahraga	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	ASGOW SYAM
179	EPEK PASAR" Eliminasi Penyakit Kecacingan Pada uSia Anak pelajaR (SD)	Kurangnya Eliminasi Penyakit Kecacingan Pada uSia Anak pelajaR (SD)	Inovasi "EPEK PASAR" (Eliminasi Penyakit Kecacingan Pada uSia Anak pelajaR (SD) merupakan inovasi yang perlu diterapkan dan diberlakukan di masyarakat khususnya pada usia anak sekolah dasar, karena 9 dari 20 siswa masi terinfeksi penyakit kecacingan, sehingga perlu perhatian khusus untuk membantu mengobati dan menhindarkan siswa dari penyakit kecacingan	Meningkatkan Eliminasi Penyakit Kecacingan Pada uSia Anak pelajaR (SD)	Meningkatkan Eliminasi Penyakit Kecacingan Pada uSia Anak pelajaR (SD)	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	ASMAL ARDIANTO, S.S.T
180	FIARA (Festival Imunisasi Anak Rilau Ale)	Kurang melibatkan peran petugas kesehatan	FIARA ini dilaksanakan dengan melibatkan peran petugas kesehatan , pemerintah kecamatan/desa, dan kader	Meningkatkan peran petugas kesehatan , pemerintah	Meningkatkan peran petugas kesehatan , pemerintah	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	YUNITA SRILAWATI KARTIKA DEWI, SKM

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Bentuk pelaksanaan kegiatan antara lain pemberian reward, penyuluhan tentang imunisasi,dan lomba bertema imunisasi bagi kader dan balita yang disertai dengan pemberian hadiah bagi peserta lomba.	kecamatan/desa, dan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya.	kecamatan/desa, dan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya.					
181	TABE' MA (Tadarus sebelum Belajar di Hari Jumat)	Kurangnya murid menghafal surah surah pendek	Murid-murid menghafal surah surah pendek dan tadarus sebelum belajar setiap jumat agar literasi baca tulis memiliki ruang di pagi hari.	Meningkatkan murid-murid menghafal surah pendek	Meningkatkan murid-murid menghafal surah pendek	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Abbas,S.Pd
182	LENTERA (Kaleng Literasi)	Kurangnya minat Baca	Mengajak murid yang tidak mahir membaca untuk memilih kartu yang berisi gambar dan tulisan dalam kaleng kemudian mengamati dan memperhatikan gambar serta tulisan di belakang gambar.	Meningkatkan murid yang tidak mahir membaca untuk memilih kartu yang berisi gambar	Meningkatkan murid yang tidak mahir membaca untuk memilih kartu yang berisi gambar	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Abbas,S.Pd
183	CATUR (Baca Tulis Cerita Gambar)	Kurangnya Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid	Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar bisa meningkatkan literasi melalui "CATUR".	Meningkatkan Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar bisa meningkatkan literasi melalui "CATUR".	Meningkatkan Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar bisa meningkatkan literasi melalui "CATUR".	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Abbas,S.Pd
184	CARITA (Baca Tulis Cerita)	Kurangnya kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis .	Memenuhi kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis .	Meningkatkan kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis .	Meningkatkan kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis .	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Abbas,S.Pd

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
185	GEDHUFAN (Gemar Salat \Dhuha dan Hafalan)	Kurangnya minat baca	Sarana dan prasana meningkatkan minat baca, proses ketepatan waktu pada saat salat serta meningkatkan minat hafalan murid.	Meningkatkan minat baca, proses ketepatan waktu pada saat salat serta meningkatkan minat hafalan murid.	Meningkatkan minat baca, proses ketepatan waktu pada saat salat serta meningkatkan minat hafalan murid.			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Hasni,S.Pd
186	SIDAK (Validasi Data Dapodik)	Kurangnya data siswa yang terkoneksi dengan dukcapil	Inovasi data siswa yang terkoneksi dengan Dukcapil adalah upaya yang dilakukan mengurangi data siswa Dapodik yang tidak singkron.	Meningkatkan data siswa yang terkoneksi dengan dukcapil	Meningkatkan data siswa yang terkoneksi dengan dukcapil	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Halija, S.Pd.MM & Ramlia, S.Pd
187	POCAKTIK (Pojok Baca Kelas Estetik)	Kurangnya minat baca	Memilih satu buku fiksi kemudian masing-masing peserta didik Menamatkan buku tersebut selama kurung waktu 1 minggu.	Meningkatkan membaca buku fiksi	Meningkatkan membaca buku fiksi			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Hj.Rosmala,S.Pd.SD
188	TERIK (Literasi Asyik)	Kurangnya kegiatan yang dilakukan murid sebelum/setelah melakukan pembelajaran	Terik (Literasi Asyik) adalah kegiatan yang dilakukan murid sebelum / setelah melakukan pembelajaran melakukan berbagai bentuk literasi.	Meningkatkan kegiatan yang dilakukan murid sebelum/setelah melakukan pembelajaran	Meningkatkan kegiatan yang dilakukan murid sebelum/setelah melakukan pembelajaran			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Syarifuddin,S.Pd.,M.Si
189	TASPEN DATA (Tasbih Peluntur Noda Hitam)	Kurangnya karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan	Menumbuhkan karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan, kegiatan ini dilakukan dengan menuliskan hal baik atau hal buruk yang dilakukan hari ini lalu memasukkan ke dalam toples.	Meningkatkan karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan	Meningkatkan karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Syarifuddin,S.Pd.,M.Si
190	SAKA EMBA (Satu Kata Empat Bahasa)	Kurangnya murid menguasai kosa kata dalam bahasa indonesia	Setiap murid menuliskan kosa kata dalam bahasa Indonesia, kemudian mencari bahasa bugis/Makassar, Inggris dan	Meningkatkan murid menguasai kosa kata dalam bahasa indonesia	Meningkatkan murid menguasai kosa kata dalam bahasa indonesia	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Syarifuddin,S.Pd.,M.Si

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			Arab atau bahasa asing untuk kata tersebut.							
191	SISE'BU (Siap Selalu Dengan Buku).	Kurang berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik	Berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik untuk dibacanya sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah itu dianjurkan untuk selalu membawa buku untuk dibaca.	Meningkatkan berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik untuk dibacanya sampai batas waktu yang ditentukan.	Meningkatkan berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik untuk dibacanya sampai batas waktu yang ditentukan.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Bahrir
192	BIASBAKU (Membiasakan Baca Buku)	Kurangnya minat baca peserta didik disekolah	Inovasi BIAS BAKU (Membiasakan baca buku) adalah upaya untuk menumbuhkan minat bacapeserta didik di sekolah,	Meningkatkan minat baca peserta didik disekolah	Meningkatkan minat baca peserta didik disekolah	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Sitti Isramiah, S. Pd
193	PAMESIN ASAM PEKSPA (Pemanfaatan Media Spiritual Kit Dan Aplikasi Sinc Dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien)	Kurangnya konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk),	Kegiatan inovasi ini diawali dengan membuat konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk), kemudian dilakukan edukasi dan sosialisasi penggunaan spiritual kit tersebut serta aplikasi SINC (Spiritual Islamic Nursing Care) dalam memberikan asuhan keperawatan spiritual kepada perawat yang bertugas di Ruang Rawat Inap Puskesmas Herlang.	Meningkatkan konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk),	Meningkatkan konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk),	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	A. ALIMIN NOSTIB, S.Kep, Ns, M.Kes

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
194	KELABAKAN MAS (Kelas Bapak-Bapak Andalan Puskesmas)	Kurangnya berkoordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada	Inovasi Kelas Bapak-Bapak Andalan Puskesmas, dimulai dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada beserta dengan latar belakangnya dan kemudian menyampaikan ide atau inovasi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.	Meningkatkan koordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada	Meningkatkan koordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	ANDI NUR SRIMULYA WIDI, S.Tr.Kes
195	RINDU BUMIL (alaRm kalender pengINgat jaDwal kUnjungan iBU haMIL)	Kurangnya layanan alarm kalender ibu hamil	Inovasi Penyediaan layanan alarm kalender dimulai dengan melakukan pendataan terhadap semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas. Kemudian mengolah data hamil tersebut dengan mengelompokkan ibu hamil berdasarkan usia kehamilan dan kunjungan keberapa selama masa kehamilannya.	Meningkatkan layanan alarm kalender dimulai dengan melakukan pendataan terhadap semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas.	Meningkatkan layanan alarm kalender dimulai dengan melakukan pendataan terhadap semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	dr. DONNA MARISSA & Khaerunnisa', SKM
196	BANK Data GOLDA dan Pendonor Desa	Kurangnya pelayanan kegiatan penyiapan pendonor bagi ibu hamil	Inovasi Bank Data Golda dan Pendonor desa merupakan inovasi UPT Puskesmas salassae berupah peningkatan pelayanan dari kegiatan penyiapan pendonor bagi Ibu hamil sebanyak 4 orang, dengan melakukan pemeriksaan golongan darah secara masif ke desa-desa sehingga setiap masyarakat desa dapat mengetahui golongan darahnya kemudian untuk orang-orang yang	Meningkatkan pelayanan kegiatan penyiapan pendonor bagi ibu hamil	Meningkatkan pelayanan kegiatan penyiapan pendonor bagi ibu hamil	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	A.M SURIYADI,M.A S.KM.

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			memenuhi syarat untuk melakukan donor darah akan disiapkan sebagai calon pendonor bagi orang yang membutuhkan baik Ibu hamil maupun lainnya dengan dilakukan screening pemeriksaan kesehatan mulai dari Berat badan, tekanan darah , penyakit menular dan cek golongan darah setelah memenuhi syarat dilakukan penandatanganan form persetujuan kesediaan mendonor jika diminta kemudian datanya disimpan dalam bentuk Drive yang dapat diakses oleh pihak puskesmas dan UTD RSUD Dg.Raja Ketika Dibutuhkan							
197	DASTING (Dapur Stunting)	Kurangnya pencegahan angka stunting	Inovasi DASTING (Dapur Stunting) merupakan inovasi untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Balibo.	Meningkatkan pencegahan untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Balibo.	Meningkatkan pencegahan untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Balibo.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	MEGAWATI, SKM
198	KONTER PKM (Konsultasi Terpadu Penyakit Tidak Menular)	Kurangnya konsultasi terpadu penyakit tidak menular	Inovasi Konsultasi Terpadu Penyakit Tidak Menular merupakan tempat khusus dalam penyediaan layanan Konsultasi, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan Sesuai Indikasi penyakit bagi sasaran usia > 15 tahun, Tim posbindu PTM turun kemasyarakat dengan pelayanan prima yang terdiri	Meningkatkan konsultasi terpadu penyakit tidak menular	Meningkatkan konsultasi terpadu penyakit tidak menular			√	SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	HISBAIR S.KEP, NS, M.KES & SARWENDI SAIN, S.KEP, NS

No	Nama Inovasi	Latarbelakang	Deskripsi Penyusunan	Outcome	Output	Kategori Inovasi			Regulasi	Penanggungjawab
						Baru	Modif	Replik		
			dari multi disiplin profesi yang turun langsung ke masyarakat.							
199	MY GOLDA (Cek dan deteksi golongan darah melalui direct check system dan aplikasi My Golda)	kurangnya tim inovasi membuat pos cek golda	Tim Inovasi akan membuat Pos Cek Golda yang tersebar di Desa/Kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang sifatnya gratis. Setiap masyarakat yang sudah cek Golda akan mendapat kartu (card detection). Card Detection adalah kartu yang memudahkan Tim inovasi untuk mendeteksi Status Golda karena sudah dilengkapi barcode dan tercacat di sistem dan di input di aplikasi My golda	Meningkatkan Tim Inovasi akan membuat Pos Cek Golda yang tersebar di Desa/Kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang sifatnya gratis.	Meningkatkan Tim Inovasi akan membuat Pos Cek Golda yang tersebar di Desa/Kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang sifatnya gratis.	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	BAHARUDDIN, SKM.,M.kes & Nurilma, A.Md.keb
200	POSE DADAR (Program Sejuta Pendonor Darah)	Kurangnya Program Sejuta Pendonor Darah	POSE DADAR (Program Sejuta Pendonor Darah) Program Sejuta Pendonor Darah merupakan program inovasi di UPT Pusksamas Manyampa yang bertujuan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan darah melalui calon pendonor yang telah diperiksa golongan darahnya	Meningkatkan Program Sejuta Pendonor Darah	Meningkatkan Program Sejuta Pendonor Darah	√			SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023	Sukiah Syam,S.Kep.Ns & Muhammad Syahrul Ramadhan, SKM

Pada pelaksanaan dan tindaklanjut Peraturan Bupati Bulukumba Nomor. 38 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah Di Kabupaten Bulukumba serta pemberian penghargaan bagi inovator, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kompetisi Inovasi dengan nama KOMPETISI INOVASI PANRITA SINOPAN BULUKUMBA 2023 dengan cara penjaringan kematangan inovasi beserta dokumen pendukung. 5 (Lima) Inovasi telah mengikuti beberapa kompetisi baik lokal, Provinis, Nasional dan Internasional yang diikuti oleh Lima OPD diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan dua Inovasi Unggulan Gammara sebagai juara satu event kompetisi SINOPAN yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai juara satu dan Inovasi LORONG JELITA yang berhasil lolos Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat provinsi Sulawesi Selatan dan berhasil lolos sebagai TOP 30, selain itu inovasi LORONG JELITA sempat meraih juara dua dan juara favorit diajang kompetisi Tingkat Internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka melalui kompetisi COPSI 2023 yang diikuti oleh beberapa negara. Selain itu lolos sebagai finalis kompetisi Internaional selanjutnya yang dilaksanakan oleh *Quanzhou Award* 2023 dan OECD-OPSI 2023. Inovasi Kareba dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga lolos sebagai lima besar dalam ajang kompetisi BANK INDONESIA dan ditahun 2024 Inovasi SIMBOL meraih lima besar dalam kompetisi yang sama ditahun 2024. Selain itu Inovasi Promina dari Dinas Perikanan juga lolos sebagai TOP 30 dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) provinsi Sulawesi Selatan. Selengkapnya dapat dilhat pada tabel berikut;

Tabel II-272
Tabel Kompetisi Inovasi Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional Dan Internasional Tahun 2022-2023

No	Nama Inovasi	Instansi	Jenis kompetisi					Keterangan
			KIPP Provinsi	Bank Indonesia (BI)	*Quanzhou Award*	COPSI	OECD-OPSI	
1	GAMMARA	DINAS DUKCAPIL						JUARA SATU SINOPAN 2023
2	LORONG JELITA	DINAS DUKCAPIL	TOP 30 2023		FINALIS (Internasional) 2023	JUARA DUA DAN FAVORIT 2023	FINALIS (Internasional) 2023	KOMPETISI Internasional
3	PROMINA	DINAS PERIKANAN	TOP 30 2023					Piagam Penghargaa dari Gubernur Sulawesi Selatan
4	KAREBA	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	TOP 30 2022	LIMA BESAR 2023			FINALIS (Internasional) 2023	
5	SIMBOL	BAPPENDA		LIMA BESAR 2024				

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mendorong pencapaian program prioritas dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2025 disusun dengan mengacu pada kebijakan ekonomi yang termuat dalam dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025.

Kerangka ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2025 yang didalamnya juga memuat kerangka pendanaan tahun yang sama, merupakan gambaran tentang perkiraan keadaan ekonomi Kabupaten Bulukumba Tahun 2025, perkiraan tersebut didasari pada perekonomian global, nasional dan regional.

Dalam rangka memenuhi target kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025, gambaran tentang kondisi perekonomian tahun bersangkutan menjadi bagian penting untuk merumuskan kerangka pendanaan yang selanjutnya akan dituangkan pada KUA dan PPAS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025. Kerangka pendanaan tersebut menjadi basis dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien.

Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Bulukumba diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama dengan mewujudkan tujuan bersama dari kebijakan pembangunan dengan berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar penduduk serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan dari arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2025 maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua program yang telah dan sedang dilaksanakan untuk kemudian dilakukan penajaman terhadap prioritas pembangunan daerah.
2. Menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
3. Mengupayakan melahirkan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan dengan tetap menyelaraskan dengan isu dan permasalahan yang muncul pada setiap bidang.
4. Terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta menumbuhkan iklim investasi dengan menjamin adanya kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bulukumba serta mendorong *high-cost economy*.

3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Bulukumba pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru disertai dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan

meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Letak Bulukumba yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Bulukumba merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bulukumba rekatif stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Bulukumba dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selaras dengan tema pembangunan Tahun 2025, Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuktumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri,pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor sebagai komoditas nilai-nilai tambah- membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Bulukumba terus mengalami defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk,multiplier effect-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya.Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Bulukumba menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir- produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan berkembang menjadi daerah industry maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industry berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidamg pertanian sangat diperlukan mengingat pandemicmenjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat renewable lebih muda untuk dapat *sustainable* dan *environmental friendly* serta dapat mendukung kampanye *global green economy*.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global

Perang menghadapi pandemi virus belum usai. Hampir seluruh negara,termasuk di Asia dan Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Boleh jadi, peperangan melawan pandemi virus belum akan tuntas dalam waktu cepat. Kalaupun, mudah-mudahan, bisa secepatnya tertangani lantaran keberadaan vaksin semakin nyata, setiap negara masih harus menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang rontok sebagai konsekuensi penanganan pandemi.

Setelah berbulan-bulan diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi,banyak negara mulai melakukan upaya menyeimbangkan kebijakan antara dua persoalan yang sesungguhnya bukan pilihan. Banyak negara kini mulai berupaya menghindari keruntuhan total perekonomian sekaligus mencegah meluasnya atau munculnya gelombang barupandemi, plus distribusi vaksin. Keseimbangan pilihan tersebut

jelas bukan perkara mudah. Tetapi, setidaknya, celah-celah pemulihan ekonomi ditengarai mulai terlihat.

Prospek perekonomian global 2023 diramalkan bergerak ke arah stagflasi, yakni perekonomian yang stagnan dibarengi inflasi tinggi. Invasi militer Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 telah mengganggu rantai pasokan global yang mendorong kenaikan harga di sektor energi dan pangan secara ekstrim. Itulah yang menjadi faktor utama lonjakan inflasi global yang mendorong bank-bank sentral serempak menaikkan suku bunga acuan secara agresif untuk meredamnya. Tak heran jika sentimen negatif terhadap prospek ekonomi global terus mengemuka, yang membuat para pengambil kebijakan dan pucuk pimpinan dunia usaha di muka bumi terus gelisah.

Mereka melihat konflik geopolitik dan inflasi sebagai ancaman ekonomi utama yang paling mendesak selama setahun ke depan, bahkan ke tahun depannya lagi.
Di Eropa, risiko dari harga energi yang fluktuatif telah nyata, menyusul risiko inflasi dan ketidakstabilan geopolitik. Krisis energi telah mendorong inflasi melonjak hingga tembus 10% yang memaksa Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga acuan (kini di level 2,5%), diikuti bank sentral Inggris (kini di level 3,5%), untuk segera melandaikan inflasi. ECB diperkirakan akan mengerek suku bunga ke level puncak sebesar 3% pada Mei 2023.

Bayang-bayang resesi ekonomi di Eropa tercermin dari memburuknya perekonomian Jerman dan Inggris. Kenaikan luar biasa harga gas sebagai sumber energi utama telah memiskinkan banyak warga Jerman dan Inggris sehingga menggerus tingkat konsumsi. Pada gilirannya, hal ini menekan pertumbuhan ekonomi. Di Jerman, produk domestik bruto (PDB) 2023 bakal menyusut menjadi sebesar 1%.

Dengan kenaikan suku bunga acuan yang agresif, inflasi memang melandai. Namun, langkah ini dilematis, karena daya dorong ke pertumbuhan ekonomi pupus seiring erosi daya beli masyarakat pada 2023 dan 2025. Tapi, itulah pilihan kebijakan yang ada di tengah berkecamuknya perang di Ukraina. Di AS, pertumbuhan ekonomi sudah melambat sebagai akibat dari pengetatan kebijakan The Fed, yang pada akhirnya diperkirakan akan memicu "resesi ulangan" mulai kuartal II-2023. Pada saat itu PDB diramalkan minus 1,1% dengan tingkat pengangguran 5,5% pada kuartal I-2025.

Sebagai catatan, AS sempat mengalami resesi pada semester I-2022, kemudian tumbuh positif pada kuartal III-2022. Namun, agresivitas bank sentral AS menaikkan suku bunga acuan (Fed fund rate/FFR) membuat resesi terulang lagi pada kuartal II-2023, sebagai upaya mengarahkan inflasi ke target 2% pada 2025. Sebuah *long journey of recovery* yang harus ditempuh dengan yakin dan teguh.

Perbaikan ekonomi Tiongkok akan menjadi salah satu kunci utama pemulihan ekonomi global tahun 2023. Namun, perlu dicermati adanya perubahan arah kebijakan ekonomi negara ini yang cukup ekstrim. Model pertumbuhan Tiongkok bergerak dari sebelumnya yang sangat bergantung pada sektor properti, realestat dan infrastruktur, ke model pertumbuhan berbasis ekonomi digital dan hijau yang memainkan peran lebih besar.

Paralel dengan itu, melemahnya permintaan global karena efek perang di Ukraina yang menyebabkan perlambatan ekspor secara cepat juga mengubah orientasi pasar Tiongkok ke pasar domestik untuk menjaga momentum pertumbuhan. Dengan pelonggaran penguncian, konsumsi domestik akan berperan signifikan untuk pemulihan ekonomi Tiongkok secara berkelanjutan mulai 2023 nanti, di mana penjualan ritel diperkirakan tumbuh 6,8% dengan PDB nasional tumbuh 4,8%. Bahkan jika pengendalian Covid-19 bisa cepat tuntas, ekonomi Tiongkok punya potensi tumbuh 5,2%.

3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional

Tantangan ekonomi global pada tahun 2024 dapat dirangkum ke dalam beberapa aspek utama. Pertama, melemahnya permintaan global menjadi tantangan utama yang

dihadapi Indonesia. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, dan gejolak ekonomi di beberapa negara berpotensi mengurangi permintaan terhadap ekspor Indonesia, yang dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional dan performa sektor ekspor.

Selanjutnya, ketidakpastian terkait kebijakan moneter global menjadi perhatian serius. Perubahan dalam kebijakan moneter oleh bank sentral utama, terutama Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat, menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global. Kenaikan suku bunga atau pengurangan stimulus moneter dapat berdampak pada arus modal dan nilai tukar mata uang, termasuk mata uang Rupiah. Fluktuasi mata uang ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi daya saing ekspor, inflasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, ketegangan dalam perdagangan internasional, seperti konflik tarif antara negara-negara besar, juga menjadi salah satu tantangan signifikan. Ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi prospek ekspor Indonesia dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

Volatilitas harga komoditas merupakan faktor lain yang dapat menghadirkan tantangan bagi ekonomi Indonesia. Perubahan harga minyak, batu bara, logam, dan komoditas ekspor lainnya dapat berdampak pada pendapatan negara, neraca perdagangan, dan performa sektor komoditas.

Terakhir, potensi krisis keuangan global juga menjadi risiko yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan utang, gelembung aset, atau ketidakstabilan sistem keuangan global dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Krisis keuangan global akan memengaruhi aliran modal, suku bunga, dan stabilitas pasar keuangan global, menciptakan tantangan tambahan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tantangan ekonomi di tingkat domestik memainkan peran krusial dalam menggambarkan prospek pertumbuhan Indonesia di tahun 2024. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin mengandalkan faktor domestik menjadi fokus utama. Momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia diproyeksikan akan lebih tergantung pada faktor-faktor internal karena adanya estimasi perlambatan permintaan global di tahun 2024. Meskipun pengeluaran fiskal tinggi selama periode pemilihan umum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kekhawatiran terkait berlanjutnya pengeluaran fiskal sepanjang tahun dapat memperlambat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di tahun tersebut.

Kedua, kebijakan moneter yang bersifat kondusif menjadi perhatian berikutnya. Stabilitas inflasi domestik dan meredanya tekanan pasar keuangan di Indonesia membuka peluang untuk kebijakan moneter yang lebih longgar pada tahun 2024. Meskipun demikian, ketidakpastian terkait suku bunga global yang fluktuatif tetap menjadi faktor yang membuat Bank Indonesia berada dalam kewaspadaan. Diperkirakan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga acuan (BI7-DRR) sebesar 50-75 basis poin pada tahun 2024, bergantung pada kebijakan dovish yang diambil oleh Federal Reserve Amerika Serikat.

Dengan mempertimbangkan kondisi global tersebut dan sesuai tema RKP 2025 yaitu ***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2025, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen; (2). Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 38,6 %; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5-5,0 persen; (4). Tingkat Kemiskinan 7,0-8,0 persen, (5). Gini Ratio sebesar 0,379 – 0,382 nilai; dan (6). Indeks Modal Manusia0,56 nilai.

3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan diharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 secara optimal diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui kolaborasi dan gotong royong antar daerah dalam mengembangkan ekonomi regional. Dibutuhkan effort dari masing-masing Pemda dalam memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) karena Pemda sebagai

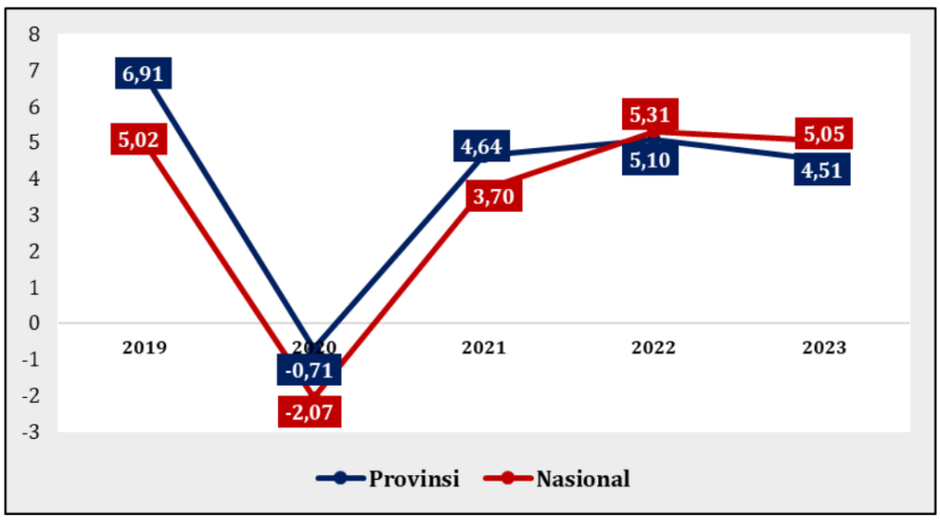
interpreneur yang harus terlibat aktif dan inovatif untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas bisnis di daerah.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,51 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua kategori lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 13,63 persen; disusul Jasa Lainnya sebesar 11,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,28 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,63 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan selama dua tahun terakhir berada dibawah Pertumbuhan Ekonomi Nasional.Tahun 2023 merupakan tahun yang cukup berat karena faktor cuaca yang ekstrem sangat mempengaruhi Pertanian Sulawesi Selatan. Hantaman banjir di awal tahun dan Elnino yang berkepanjangan membuat sejumlah produksi pertanian mengalami penurunan produksi, seperti komoditi tanaman pangan hingga harga perikanan yang anjlok akibat faktor cuaca tersebut.

Tabel III-1
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

2. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, nainya harga barang dan jas tersebut menyebabkan turunnya nilai uang sehingga infalsi dapat juga diartikan sebagai menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa tertentu. Laju inflasi nasional sejak tahun 2018hingga 2020 terus mengalami penurunan, namunlaju inflasimengalami peningkatan pada tahun 2021hingga 2022.Pada Desember 2023, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan mengalami inflasi yearonyearsebesar 2,81 persen dengan Indeks Harga konsumen (IHK) sebesar 117,49dari 5 kota IHK tercatat seluruh kota (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo)mengalami inflasi yearonyear. Inflasi yearonyeartertinggi terjadi di Kota Makassar sebesar 2,89 persen sedangkan inflasi yearonyearterendah terjadi di Kota Palopo sebesar 2,21 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 8 kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami kenaikan indeks harga yaitu sebesar 1,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 0,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok transportasi sebesar 1,19 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen;kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21

persen; dan kelompok perawatanpribadi dan jasa lainnya sebesar 0,64 persen. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; dan kelompok

rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen.Komoditas utama penyumbang inflasi (y-on-y) pada Desember 2023,antara lain beras, cabai rawit, angkutan udara, rokok kretek filter, emas perhiasan, cabai merah, bawang putih, labu siam/jipang, gula pasir, dan kacang panjang.Gambaran perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-2
Perbandingan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Laju Inflasi	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan	%	2,35	2,04	2,40	5,77	2,81
Nasional	%	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

TingkatPengangguran Terbukamerupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 4,33 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 4,39 persen,lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,25 persen. TPT laki-laki turun sebesar 0,52 persen poin dibandingkan Agustus 2022, sedangkan TPT perempuan naik sebesar 0,35 persen poin dibandingkan Agustus 2022.Apabila dilihatmenurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,24 persen)jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,80 persen).Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,60 persen poin. Sementara itu, TPT perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,89 persen poin.

Tabel III-3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Wilayah	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Selatan	%	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33
Nasional	%	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

4. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen,meningkat 0,04 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat0,07 persen poin terhadap Maret 2022.Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 4,98 persen, naik menjadi 5,01 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 11,81 persen, naik menjadi 11,91 persen pada Maret 2023.Dibandingkan dengan Nasional selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2023 mengalami tren menurun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan masih lebih rendah meskipun mengalami tren meningkat..

Tabel III-4
Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2019	2020	2021	2022	Maret 2023
Sulawesi Selatan	8,56	8,99	8,53	8,66	8,70
Nasional	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

5. Gini Ratio

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,377.Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 akan tetapi tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,377.Jika dilihat berdasarkan daerah,Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,386, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,378 tetapi turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,339, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,324 dan juga naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,336. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-5
Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indeks Gini	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	Maret 2023
Perkotaan	Indeks	0,393	0,384	0,387	0,378	0,386
Perdesaan	Indeks	0,354	0,352	0,334	0,324	0,339
Perkotaan + Perdesaan	Indeks	0,391	0,382	0,377	0,365	0,377

Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2023

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalammenjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agarmasing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makroekonomi Sulawesi Selatan 2025 dan pencapaian target Nasional, mulaipertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkatpengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah.Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangatdiperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebihpenting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

Dengan melihat kondisi perekonomian global dan nasional tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025, maka RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 mengusung tema ***Peningkatan perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing"***, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2025, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 5,67-6,82 persen, (2). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,03 persen; (3). Tingkat Kemiskinan 8,20 persen, (4). Gini Ratio sebesar 0,356; dan (5). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,49 (6). Pendapatan Perkapita Rp. 74,55 Juta,-

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2025 maka ditetapkanlah 5 Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata
5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
6. Pembentukan Karakter dan Akhlaq SDM yang Berintegritas, Religious dan Loyal Serta Profesional

3.1.1.5 Tantangan Perekonomian Daerah

Dengan melihat kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2025, maka RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 mengusung **""Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia"**, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2025, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05-5,19 persen; (2). Inflasi berkisar antara 2,23 persen; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,48 persen; (4). Tingkat Kemiskinan sebesar 6,44 persen (5). Gini Ratio sebesar 0,345 dan (6). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,60 tahun.

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2025, maka ditetapkanlah 10 Prioritas Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bulukumba. 10 Prioritas Pembangunan tersebut, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Pemantapan reformasi birokrasi
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

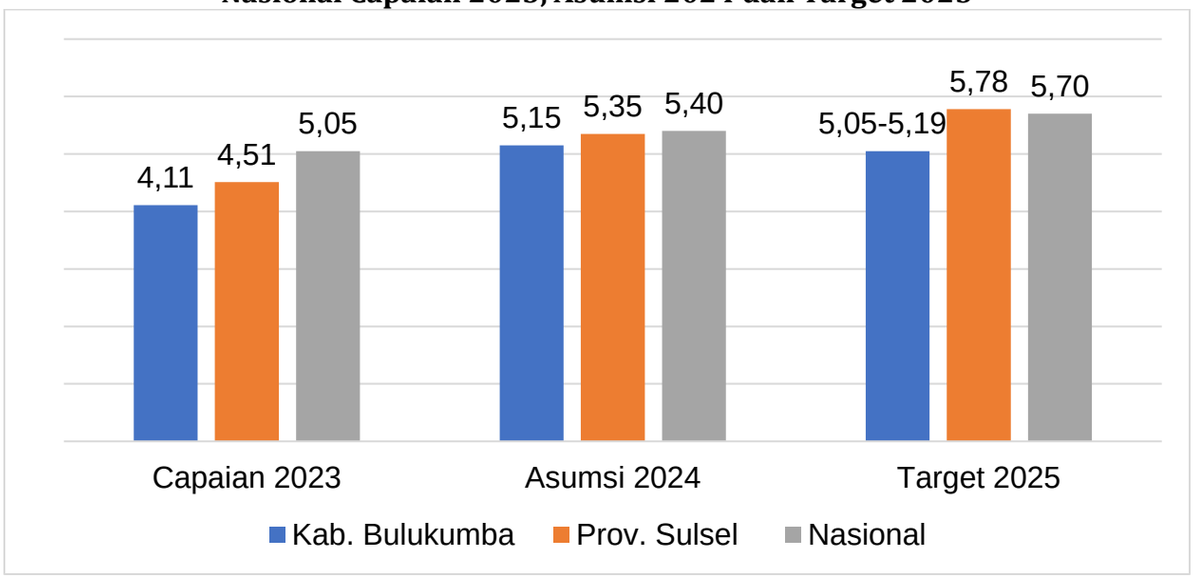
3.1.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga. Saat ini, tahun dasar PDRB harga konstan ialah tahun 2010. PDRB atas dasar harga konstan 2010 dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) sebesar 3,56 persen.

Pertumbuhan ekonomi year-on-year sebesar 4,11%. Pertumbuhan ekonomi ini dibedakan menjadi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yaitu sebesar Rp18.870,56 Miliar dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yaitu sebesar 9.741,40 Miliar. Sementara itu untuk PDRB Per Kapita sebesar Rp 41,90 Juta. Jika dilihat menurut Lapangan Usaha, Pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada sektor Jasa Lainnya (11,64%), Konstruksi (10,77), Pengadaan Listrik dan Gas (10,57), Jasa Perusahaan (8,19%), dan Jasa Keuangan dan Asuransi (7,89%). Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan share tertinggi sebesar 37,59% diikuti Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,59, serta Sekotr Konstruksi sebesar 11,53%. Pertumbuhan PDRb juga dilihat menurut pengeluaran dengan detail pertumbuhannya sebagai berikut: PMTB (9,21%), LNPRT (6,66%), Konsumsi Ruta (3,14%), dan Konsumsi Pemerintah (0,91)

Dengan melihat kondisi Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2023 sebesar 4,11 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2022 yaitu 3,81 persen , maka ditahun 2025 Kabupaten Bulukumba memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05-5,19 persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,78 dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen.

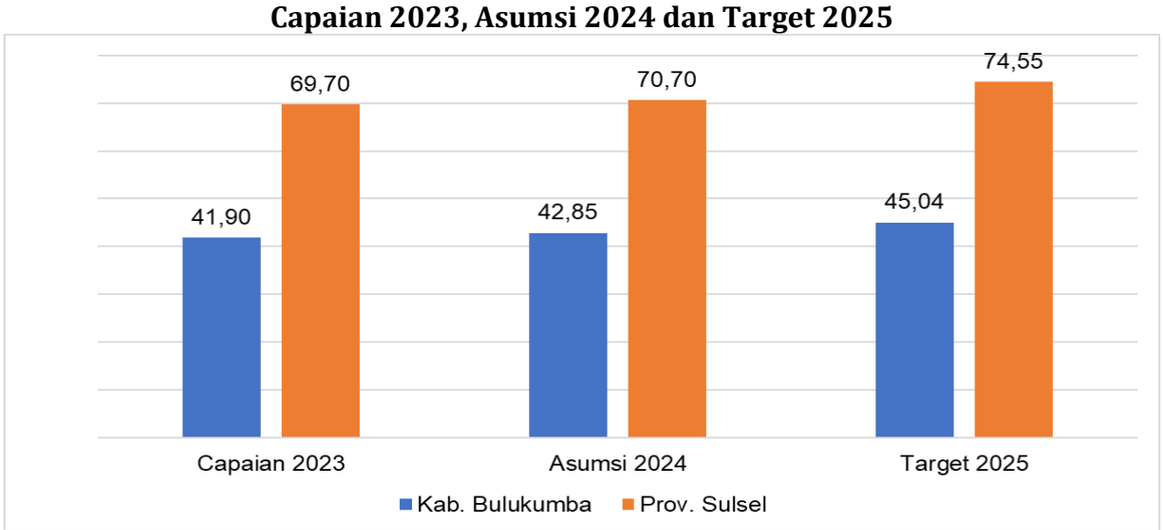
Grafik III-1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, Asumsi 2024 dan Target 2025



Sumber : RKP 2025 dan RKPD 2025 Pro. Sulsel Diolah oleh Bapperida Bulukumba, 2023

Sedangkan untuk PDRB perkapita Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bulukumba rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Bulukumba pada tahun 2023 sebesar Rp. 41,90 juta.Dan pada tahun 2024, ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 42,85 juta, kemudian untuk tahun 2025 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 45,04 Juta.

Grafik III-2
PDRB Perkapita Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian 2023, Asumsi 2024 dan Target 2025



Sumber : BPS, RPJMD 2021-2026 Kab. Bulukumba, diolah

3.1.1.5.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 202 sebesar 9,36 persen. Sementara di Sulawesi Selatan tingkat kemiskinan berada pada tingkat 8,70 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 7,22 persen.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah. Selain itu. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba menurun dari tahun sebelumnya pada tahun 2023 berada pada angka 7,22 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

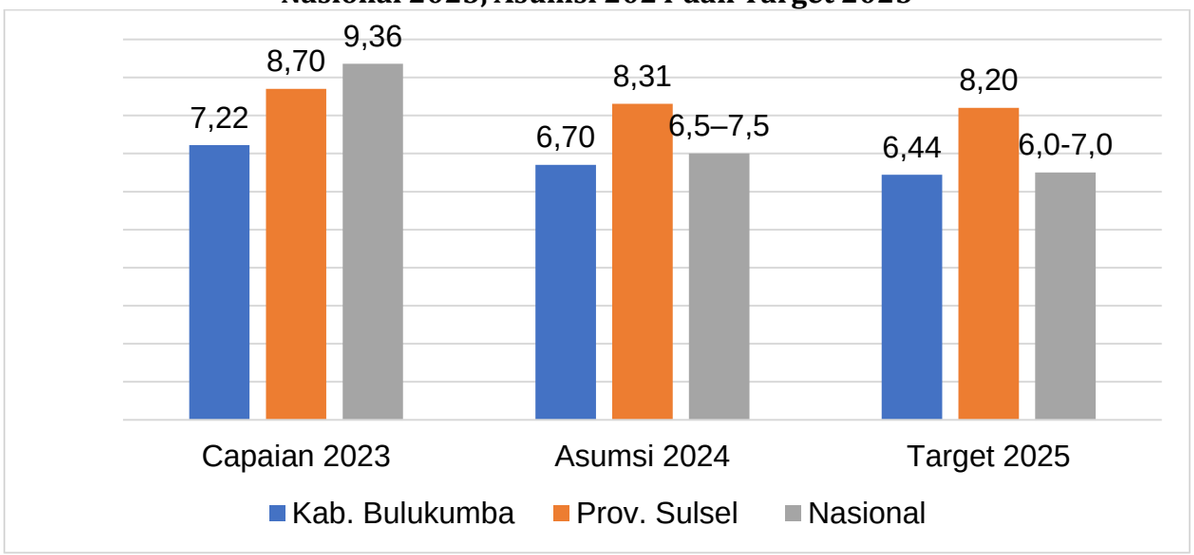
Tabel III-6
Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018- 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase penduduk Miskin (%)
2019	330.161	30.49	7,26
2020	351.180	30.00	7,10
2021	369.022	31,31	7,43
2022	390.040	31,29	7,39
2023	406.882	30,65	7,22

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2024

Penduduk miskin di Bulukumba pada tahun 2024 diprediksi akan mencapai 6,70 persen. Namun pada tahun 2025, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat memasuki dampak dari masa resesi, maka pemerintah Bulukumba menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 6,44 persen, Sulawesi Selatan sebesar 8,20 dan target Nasional yaitu 6,0-7,0 persen.

Grafik III-3
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2023, Asumsi 2024 dan Target 2025



Sumber : RKP 2025 dan RKPD 2025 Pro. Sulsel Diolah oleh Bapperida Bulukumba, 2023

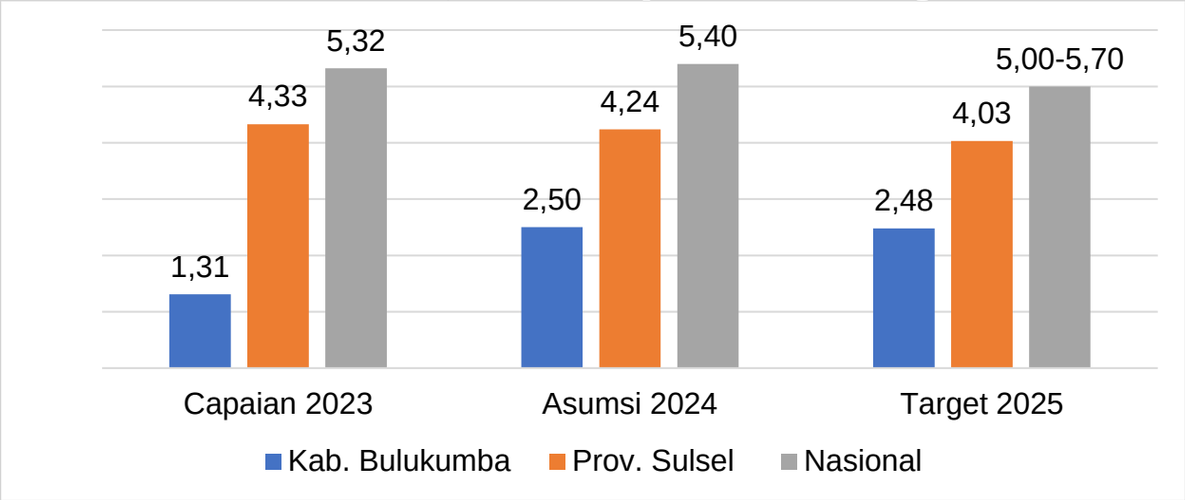
3.1.1.5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan Kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 sebanyak 248.205 jiwa, dimana 244.955 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2023 adalah sebesar 1,31. Dapat dikatakan bahwa sekitar 1-2 dari 100 angkatan kerja yang ada di Bulukumba menganggur.

Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Bulukumba pada tahun 2024 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,50 persen walaupun capaian sebelumnya masih rendah dari capaian tahun 2023 yang mencapai 1,31 persen dan jika dibandingkan dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yang mencapai 4,33 persen dan capaian Nasional sebesar 5,32 persen. Sementara untuk tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di target oleh Kabupaten Bulukumba sebesar 2,48 persen,

pemerintah sulawesi selatan sebesar 4,03 persen atau target Nasional yaitu 5,00-5,70 persen.

Grafik III-4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025



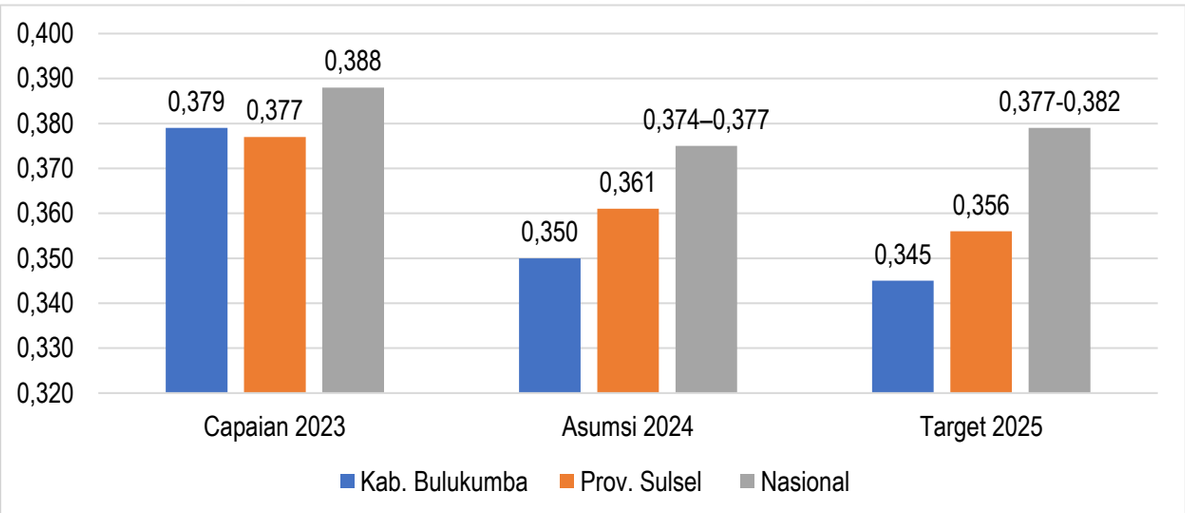
Sumber : RKP 2025 dan RKPD 2025 Pro. Sulsel Diolah oleh Bapperida Bulukumba, 2024

3.1.1.5.4 Gini Ratio

Koefisien Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.

Gini Ratio Periode September tahun 2023 Kabupaten Bulukumba mencapai 0,379 persen, Provinsi Sulawesi Selatan mencapai sebesar 0,0,377, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,388. Untuk tahun 2024, Gini Ratio di Kabupaten Bulukumba diprediksi mencapai 0,355, Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,361, dan pada tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia 0,374-0,377. Sementara pada tahun 2025, angka Gini Rasio Bulukumba ditargetkan 0,345, Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 0,356 sedangkan target Nasional sebesar 0,377-0,382.

Grafik III-5
Gini Rasio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025



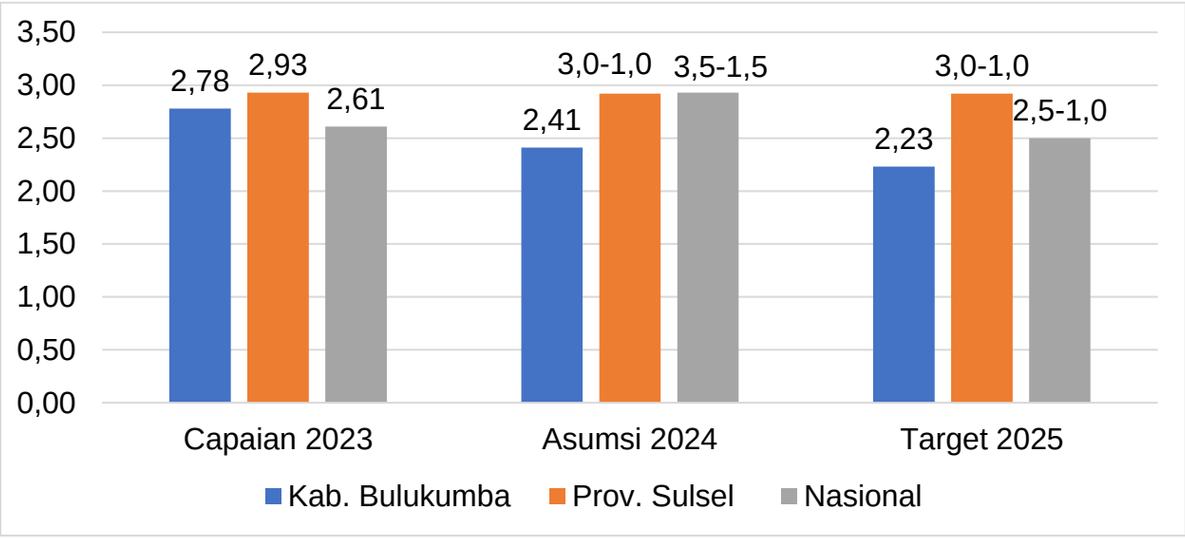
Sumber : RKP 2025 dan RKPD 2025 Pro. Sulsel diolah oleh Bapperida Bulukumba, 2024

3.1.1.5.5 Inflasi

Pada Desember 2023 di Bulukumba terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,78 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,67. Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2023 tercatat inflasi sebesar 0,52 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 2,78 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,45 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,18 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,00 persen; kelompok transportasi sebesar 0,10 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,35 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,53 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,09 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,90 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,16 persen. Sedangkan, kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,75 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi y-on-y pada Desember 2023, antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, emas perhiasan, gula pasir, bawang putih, minyak goreng, rokok kretek filter, tempe, dan sabun cair/cuci piring.

Grafik III-6
Inflasi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Capaian 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025



Sumber: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022, diolah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis sebelumnya diuraikan sebagai berikut.

Kapasitasfiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah dapat diukur melalui penerimaan pendapatan daerah, meliputi (1).pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2).Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak; (3).Lain-lain pendapatan yang sah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan konstruksi awal kemampuan fiskal daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang didalamnya memuat kebijakan penganggaran serta kerangka pendanaannya. Untuk mengukur dan menjaga konsistensi proses perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan maka arah kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan melalui dokumen RKPD harus saling berkaitan sebagai satu rangkaian proses perencanaan tahunan yang merupakan dasar dari penyusunan APBD.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam kesempatan memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Keberadaan UU HKPD juga menyederhanakan sistem perpajakan, yang meliputi penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak, dan cara pembayaran pajak. Sehingga diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar serta mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajiban membayar pajak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. Selain itu, PP ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, PP ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda, Perda, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalian potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba diarahkan pada “penguatan kapasitas kelembagaan pengelola potensi serta penguatan regulasi dan strategi pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam kerangka optimalisasi sumber-sumber pendapatan”.Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 difokuskan pada:

1. mengoptimalkan Pendapatan Daerah dalam upaya pencapaian khususnya Pendapatan Asli Daerah.
2. Peningkatan pendapatan daerah guna meningkatkan ruang fiskal daerah dan Meningkatkan kemandirian Fisikal untuk Kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah
3. upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi akan didorong untuk lebih akuntabel sekaligus mendekatkan jangkauan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
4. selain PAD, peningkatan pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi perhatian

5. Struktur Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya berupa bagi hasil pajak, dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat serta Pendapatan lainnya.

Kebijakan Pendapatan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan daerah sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Taransfer/Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Berkaitan dengan pencapaian target penerimaan daerah dari komponen Pendapatan Daerah , maka beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :

a. Melakukan pembenahan manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh dan dapat diketahui masyarakat.
b. Menurunkan tingkatkebocoran pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan sistem pengawasan.
c. Melakukan penyesuaian tarif baru sesuai ketentuan yang berlaku, yang didahului dengan sosialisasi
d. Memperbaiki pelayanan kepada masyarakatdalam hal pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Adapun realiasi, asumsi dan target Pendapatan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel III-7

Realisasi, Asumsi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023-2026

Kode	Uraian	Realisasi 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2026
4	**PENDAPATAN**	**1.501.279.916.220,04**	**1.555.095.998.416,00**	**1.595.264.186.099**	**2.147.647.649.966**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**187.558.438.871,26**	**205.011.753.056,00**	**283.232.247.663**	**397.859.526.193**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	44.115.871.619,00	74.320.354.000,00	114.672.798.077	140.123.667.488
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.281.237.272,00	29.229.646.000,00	22.902.742.175	103.585.858.705
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.693.669.916,00	5.000.000.000,00	3.200.000.000	12.500.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120.467.660.064,26	96.461.753.056,00	142.456.707.411	141.650.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.313.259.477.348,78**	**1.330.634.245.360,00**	**1.311.323.938.436**	**1.650.202.523.773**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.205.838.857.205,00	1.237.263.250.550,00	1.251.944.631.000	1.333.555.305.004
4.2.2	Transfer Pemerintah Antar Daerah	107.420.620.143,78	93.370.994.810,00	59.379.307.436	316.647.218.769
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**462.000.000,00**	**19.450.000.000,00**	**708.000.000**	**99.585.600.000**
4.3.1	Pendapatan Hibah	462.000.000,00	600.000.000,00	420.000.000	69.585.600.000
4.1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	18.850.000.000,00	288.000.000	30.000.000.000

Sumber : BPKAD, SIPD RI Perencanaan Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Belanja daerah merupakan bentuk kuantitatif dari semua bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan fungsi otonomi daerah, belanja daerah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Penganggaran belanja daerah harus terstruktur dan mengarah pada pencapaian target dari tiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang. Berdasarkan kelompok belanja, maka belanja daerah diurai menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer berdasarkan tujuan pembelanjaannya.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

3.2.2.4. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2022 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;

c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Berdasarkan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulukumba yang di fokuskan pada pembangunan dan penguatan ekonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025 periode ke 4 (Empat) maka kebijakan belanja daerah Kabupaten Bulukumba secara makro diarahkan pada“pembelanjaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip-prinsip pembelanjaan yang transparan dan akuntabel serta efisien, efektif dan proporsional”.Kebijakan belanja tersebut merupakan bagian dari strategi penganggaran pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023, arah kebijakan makro belanja tersebut adalah bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menjamin keberlangsungan proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Arah kebijakan belanja tersebut juga merupakan bentuk sinergitas perencanaan kegiatan satu tahunan pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Tabel III-8
Realisasi, Asumsi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023-2025

Kode	Uraian	Realisasi 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2026
5	**BELANJA**	**1.543.906.409.566,51**	**1.555.095.998.416,00**	**1.595.264.186.099**	**2.097.647.649.966**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.012.990.471.491,86**	1.057.929.130.567,00	**1.187.026.715.442**	**1.182.926.319.287**
5.1.1	Belanja Pegawai	616.860.242.592,00	656.851.649.309,00	728.958.124.879	791.645.092.699
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	366.165.555.094,86	355.636.435.966,00	437.169.030.063	358.647.055.728
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	6.700.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	28.610.389.839,00	44.828.703.964,00	19.619.429.500	20.434.170.860
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.354.283.966,00	612.341.328,00	1.280.131.000	5.500.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**353.682.271.435,65**	**317.435.393.474,00**	**207.057.668.847**	**680.819.292.473**
5.2.1	Belanja Tanah	3.439.865.700,00	402.978.850,00	3.704.317.000	5.255.565.080
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	63.586.099.794,00	42.332.123.266,00	34.317.384.565	121.464.779.509
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	142.113.539.674,84	113.916.971.935,00	157.102.231.608	415.876.512.059
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.842.685.088,00	155.429.037.567,00	11.685.099.874	132.768.177.615
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.618.145.178,81	5.137.281.856,00	248.635.800	5.454.258.210
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	81.936.000,00	217.000.000,00	0	0
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**66.830.500,00**	**1.439.629.972,00**	**5.469.103.545**	**10.000.000.000**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	66.830.500,00	1.439.629.972,00	5.469.103.545	10.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**177.166.836.139,00**	**178.291.844.403,00**	**195.710.698.265**	**223.902.038.206**
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	6.182.644.939,00	8.312.174.942,00	13.986.118.674	24.370.952.619
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	170.984.191.200,00	169.979.669.461,00	181.724.579.591	199.531.085.587

Sumber : BPKAD, SIPD RI Perencanaan Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

3.2.2.4 Penganggaran Kemiskinan Ekstrem, Standar Pelayanan Minimal dan Penanganan Stunting

Pada Penyusunan Penganggaran menjadi salah satu fokus 3 program kegiatan intervensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang selaras dengan Program Nasional dalam melakukan Pelayanan Publik kepada Masyarakat yaitu Intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim , Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan penanganan Stunting melalui intervensi gizi sensitif dan Spesifik. Untuk itu diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat komitmen dan kerja sama dalam mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Adapun Penganggaran Penanganan Stunting, Standar Pelayanan Minimanl dan Kemiskinan Ekstrem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-9
Penganggaran Kemiskinan Ekstrem, Standar Pelayanan Minimal dan Penanganan Stunting Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Kemiskinan Ekstrem	SPM	Penanganan Stunting
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.129.712.164,00	89.972.646.000,00	
2	Dinas Kesehatan	45.937.000.600,00	1.297.762.300,00	49.576.578.550,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	309.877.000,00	5.476.795.117,00	
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.112.056.200,00	438.057.000,00	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		546.547.000,00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		3.259.635.900,00	
7	Dinas Sosial	2.150.838.000,00	1.957.530.500,00	
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	256.326.200,00		
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.225.450.768,00		
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.112.100.000,00		49.576.578.550,00
11	Dinas Perhubungan	497.933.600,00		
12	Dinas Perikanan	2.951.972.660,00		
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.726.591.350,00		
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja	499.999.904,00		

Sumber : SIPD RI Perencanaan Tahun 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayan Daerah

Pembiayaan daerah adalah pengeluaran pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Pada tahun 2025 kebijakan pembiayaan makro Kabupaten Bulukumba diarahkan pada "*efisiensi dan efektifitas pembiayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat*". Melihat keterbatasan APBD Kabupaten Bulukumba, maka untuk mensiasati kondisi tersebut maka penganggaran pembangunan yang bersifat ekspansif akan diupayakan dianggarkan secara kemitraan baik dengan melibatkan kerja sama pihak swasta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Pusat.

Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk penerapan tatanan normal baru diberbagai aspek kehidupan, baik di aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kebijakan new normal menuntut untuk dilakukan pembatasan kontak fisik namun unsur pemerintah daerah dituntut untuk tetap produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat umum.

Tabel III-10
Realisasi, Asumsi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target 2026
6	**PEMBIAYAAN**	**89.170.928.271,23**	**0,00**	**0,00**	**85.100.000.000**
6.1	**PENERIMAAN DAERAH**	**89.170.928.271,23**	**0,00**	**0,00**	**35.100.000.000**
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	89.170.928.271,23	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	35.100.000.000
6.2	**PENGELUARAN DAERAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000.000**
6.2.1	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000

Sumber : BPKAD, SIPD RI Perencanaan Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

3.3 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnyakebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan mendorongPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari alternatifpendanaan dalam membangun. Sumber- sumber pendanaan pembangunan nonAPBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1)APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan BinaLingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3)Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan UtangDaerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Bulukumba selain bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi. Adapun alokasi pendanaan yang melalui dana dekonsestrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III-11
Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019-2023

No	Kementerian / SKPD	Pagu (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**Kementerian Pertanian :** Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.336.389.000	-	4.358.413.000	2.220.436.000	341.421.650
2	**Kementerian Perdagangan** Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.000.000.000	-	-	-	2.897.481.436
3	**Kementerian PU** Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-	2.085.000.000	-	-	-
Jumlah Total		**8.336.389.000**	**2.085.000.000**	**4.358.413.000**	**2.220.436.000**	**3.238.903.086**

Sumber: Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2023

3.3.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untukmelakukan kerjasama dengan badan usaha.Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak

pemerintahdaerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorongpembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu,teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publiksehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapatberkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dankerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk "menciptakan pangsa pasar". Salah satu persoalanyang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidangbidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yangjuga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunaninfrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.3.3 Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiriatas : **(1) Pinjaman Daerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yangmengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yangbernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajibanuntuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupapengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana KerjaPemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimalpembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, visi,misi, dan program kepala daerah terpilih, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2025 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati yangtermuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, capaian target pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”

Visi 2021-2026 merefleksikan arah Pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dilaksanakan dengan fokus prioritas yang lebih jelas, strategis dan berdaya ungkit tinggi. Selain itu, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba periode kedua (2019-2023) yang berbunyi: “Mengembangkan berbagai bidang pembangunan sebagai modal dasar pembangunan khususnya kualitas sumberdaya manusia yang handal”, maka visi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD periode ini juga bermaksud untuk mewujudkan pembangunan yang maju dari sisi profesionalisme penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan akses dasar masyarakat, pengembangan kualitas manusia yang unggul dan ekonomi daerah serta kelestarian lingkungan hidup yang mendukung kemandirian daerah sehingga ketiganya dapat menjadi modal dasar dalam mewujudkan kualitas sumber daya

manusia yang handal. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjelasan Visi Kabupaten Bulukumba 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-1
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

VISI		PENJELASAN VISI
"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF, YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA"	PRODUKTIF	Mendorong seluruh sektor pembangunan. Meliputi ekonomi. SDM. Infrastruktur. Sosial kemasyarakatan. Lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera.
	BERKARAKTER	Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk beperikehidupan dan kemasyarakatan.
	KEARIFAN LOKAL	Potensi adat. Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan.
	MAJU	Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi "maju" yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
	SEJAHTERA	Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat / penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik baik bagi perempuan maupun laki-laki

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel Tabel IV.2

Tabel IV-2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukuba yang rukun dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya, menjadi syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
2	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	Sebagai wilayah administrasi, pembangunan harus ditopang dengan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang prima. Transparan. Akuntabel. Efektif. Dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang prima dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki Aparatur Sipil Negara dengan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan serta sarana prasarana penunjang yang memadai menjadi dasar dalam peningkatkan tata Kelola pemerintah dan layanag publik yang lebih baik.

NO	MISI	PENJELASAN MISI
3	Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor	Untuk menjadi Kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan dibidang pertanian, pengembangan perdagangan dan industri serta pembangunan pasar. Kabupaten Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
4	Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah. Nasional dan Internasional	Untuk menjadi Kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan dibidang Kelautan dan Perikanan, pengembangan perdagangan dan industri serta pengembangan /pembangunan pasar. Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang.
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang berpendidikan, rukun, dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya. Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera.
6	Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang sehat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera. Hal ini juga merupakan lanjutan program pembangunan periode sebelumnya pada misi yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai program dari misi-misi tersebut telah mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bulukumba namun masih akan terus ditingkatkan.
7	Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Kabupaten Bulukumba memiliki kondisi alam yang indah, dan asri. Kondisi alam ini memiliki keterkaitan erat dengan kultur dan budaya masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga potensi Bulukumba dapat dijadikan sasaran objek wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat
8	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat	Pembangunan daerah pada hakikatnya mengedepankan pentingnya kebutuhan infrastruktur fisik. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur fisik merupakan alasan utama mengapa Kabupaten Bulukumba terus mendorong penyediaan infrastruktur fisik yang lebih memadai. Sarana infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan, jembatan, pasar, perumahan, sanitasi, listrik dan telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mewujudkan kemajuan wilayah Kabupaten Bulukumba.
9	Pembangunan dan Meningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah	Untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera maka diperlukan pengembangan ekonomi terutama peningkatan produktivitas serta pengembangan industri untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

NO	MISI	PENJELASAN MISI
10	Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme	Meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional melalui pembinaan generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan Profesionalisme.
11	Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Untuk menjadi desa yang maju dan sejahtera maka perlu untuk mengedepankan pentingnya peran pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba untuk secara aktif mengembangkan potensi perekonomian desa sehingga dapat menjadi desa yang lebih maju dan mandiri. Untuk itu Desa perlu meningkatkan potensi dan produktivitas unggulan agar lebih cepat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa.
12	Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan	Mendorong ketercapaian tujuan pembangunan yang tentunya tidak terlepas dari meningkatnya kondisi lingkungan yang nyaman dan tertib sehingga dapat menurunkan konflik-konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang yang salah satunya dapat dilihat dari menurunnya tingkat kriminalitas lingkungan.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Bulukumba dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerahmenjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telahditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima)tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2023 menjadi landasan RKPD Tahun 2025, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV. 3.

Tabel IV-3
Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi / Tujuan / Sasaran	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Satuan**	**Capaian 2023**	**Asumsi 2024**	**Target 2025**
Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat					
Tujuan 1 Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	**1 Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Angka	71	71	72
Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	2 Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100
Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik					
Tujuan 2 Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	**3 Indeks Reformasi Birokrasi**	Angka	CC	B	B

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi / Tujuan / Sasaran	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Satuan**	**Capaian 2023**	**Asumsi 2024**	**Target 2025**
Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Skor LPPD/Kategori	Skor	3,526	3,5415	3,5560
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	5 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,81	3,26-4,00	3,26-4,00
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor					
Tujuan 3 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	**6 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB**	%	24,33	22,04	22,02
Sasaran 4 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	7 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	-1,43	8,14	4,69
Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional					
Tujuan 4 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	**8 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB**	%	13,15	13,55	13,89
Sasaran 5 Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	9 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	6,89	7,66	10,22
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal					
Tujuan 5 Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	**10 Indeks Pembangunan Manusia**	Angka	73,64	71,17	74,60
Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	11 Indeks Pendidikan	Angka	64,84	66,21	67,31
Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat					
Tujuan 6 Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	**12 Indeks Kesehatan**	Angka	83,09	76,36	77,15
Sasaran 7 Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13 Usia Harapan Hidup	Tahun	74,01	69,63	70,14
Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara					
Tujuan 7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	**14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD**	%	2,5	3,26	3,51
Sasaran 8 Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	15 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	-22,16	6,76	7,34
Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat					
Tujuan 8 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	**16 Gini Ratio**	Angka	0,379	0,350	0,345
Sasaran 9 Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	17 Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90	92	94

VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi / Tujuan / Sasaran	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran**	**Satuan**	**Capaian 2023**	**Asumsi 2024**	**Target 2025**
Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah					
Tujuan 9 Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	**18 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB**	%	6,54	25,36	25,83
Sasaran 10 Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	19 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	5,09	10,63	10,42
Misi 10 Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme					
Tujuan 10 Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	**20 Indeks Pembangunan Pemuda**	Angka	72,72	59,94	61,57
Sasaran 11 Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	21 Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi	%		27	36
Misi 11 Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat					
Tujuan 11 Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	**22 Indeks Desa Membangun**	Angka	0,76	0,78	0,80
Sasaran 12 Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	23 Persentase Desa Mandiri	%	21,01	4,59	6,42
Tujuan 12 Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	**24 Indeks Rasa Aman**	Angka	14	15	15
Sasaran 13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	25 Peresentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	100	89,66	90,20

Berdasarkan Tabel IV – 3 di atas, menunjukkan tujuan dan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Bulukumba yang terdiri atas 12 tujuan, 13 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 12 indikator tujuan dan 13 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Bulukumba sebanyak 25 indikator.

Tujuan dan sasaran yang terdapat pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba 2021 – 2026 diarahkan pula untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD 2005–2025 serta Sasaran RKP 2025. Berdasarkan analisis yang dilakukan keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2025 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025 dengan sasaran RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025, RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-4
Keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2025 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025 dengan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025

RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026	RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025	RKP Nasional Tahun 2025	RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025
Mewujudkan Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Mandiri melalui Pengembangan Agroindustri	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian dan Perikanan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Produktif	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas
	Meningkatnya Produksi hasil Perikanan			
	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara			
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya SDM Yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal		Menurunnya Angka Kemiskinan
	Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Meningkatnya kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Meningkatnya Produktifitas Generasi Muda (Generasi Emas)	Meningkatkan kualitas generasi muda		Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja
				Meningkatnya Kualitas SDM yang kompetitif dan inklusif
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Amanah serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Prima Yang Responsif, Profesional, Transparan Dan Akuntabel		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026	RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025	RKP Nasional Tahun 2025	RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025
	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Meningkatnya Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Optimalnya kualitas pelayanan Publik
	Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama			
Terwujudnya Kabupaten Bulukumba yang Bersih Lingkungan dan Alam yang Ramah	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Mewujudkan Infrastruktur Untuk Peningkatan Produktivitas	Meningkatnya aksesibilitas Infrastruktur wilayah
		Meningkatnya Pelestarian lingkungan hidup		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasidan mitigasi perubahan iklim
Mewujudkan Kemandirian dan Dayasaing Daerah dengan Meningkatkan Kerjasama Antarpulau yang Berbasis Regional dan Nasional	Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas
		Meningkatkannya perekonomian masyarakat perdesaan		

4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 untuk Periode *RPJMD Tahap Keempat Tahun 2021-2026* maka Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba berlandaskan pada pembangunan tahap sebelumnya yang telah dilaksanakan dandicapai Kabupaten Bulukumba pada RPJMD Tahap Pertama, RPJMD Tahap Kedua,RPJMD Tahap Ketiga, RPJMD Tahap Keempat diarahkan untuk melanjutkan danmenyempurnakan pembangunan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya padaberbagai bidang pembangunan. RPJMD Tahap Keempat ditujukan untuk mewujudkanmasyarakat Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustrimelalui percepatan pembangunan di segala bidang.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tingginyatingkat pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Paritas Daya Beli pada IPM Bulukumba, sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien danefektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan statusgizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan dayasaing perekonomianyang kompetitif dan bergerak dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasadengan tetap berbasis pada pertanian tanpa mengabaikan keterpaduan antar sektor.Lembaga perekonomian berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin semakin berkurang.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing antara lain dengan dititikberatkan pada upaya pencapaian sumberdaya manusia yang berkarakter cerdas, tangguh,kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan nilai-nilai religius yang dicirikandengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat indonesia yang beragama, beriman,dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan ciri khasnya sebagai orang bugis.

Pembangunan aspek pemerintahan telah mencapai hal yang diinginkan yakni telahmemahami dan menerapkan 10 (sepuluh) prinsip tata pemerintahan yang baik (goodgovernance) yakni partisipasi; penegakan hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap;wawasan ke depan; akuntabilitas; pengawasan; efisiensi dan efektivitas; danprofesionalisme, peningkatan kondisi keamanan yang telah dicapai, peningkatankemampuan dan kapasitas aparatur, serta aspek keuangan daerah sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

4.2.1 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2025 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2025 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2025 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

Sinergitas proses perencanaan pembangunan merupakan suatu keharusan dalam proses pembangunan, perumusan proses perencanaan harus dilakukan secara berjenjang

demi mewujudkan konsistensi arah dan tujuan pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang padu dan berkelanjutan.

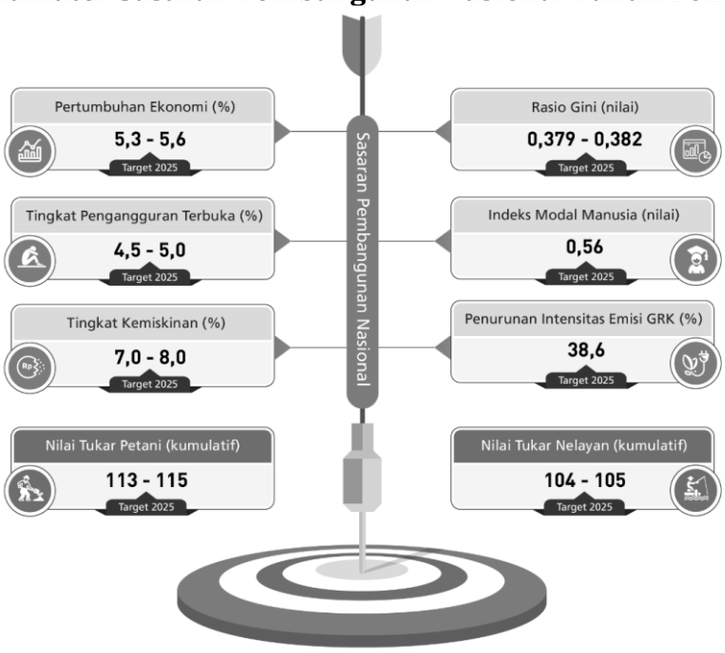
4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan Tahapan Awal untuk Indonesia Emas 2045, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, kebijakan pembangunan tahun 2025, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2025 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2025, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan Perkuatan Fondasi Transformasi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun pertama dari RPJMN Tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2025 menjadi sangat strategis. Tema tersebut dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran pertama RPJMN Tahun 2025-2029, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2026.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2025 juga menitik beratkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025 ditunjukkan oleh tabel berikut.

Gambar IV-1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024

4.2.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional adapun sasaran pembangunan tahun 2025 adalah: (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi,(b) tingkat pengangguran terbuka, (c) Gini Ratio, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Tabel Keselarasan Prioritas RKPD dan Nasional Tahun 2025, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV-5
Keselarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Bulukumba
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Pembangunan sumber daya manusia
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
	Peningkatan Kemitraan antar institusi
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
	Peningkatan produktifitas generasi muda
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan kemandirian desa
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Pemantapan reformasi birokrasi
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pelestarian lingkungan hidup

Adapun Highlight Indikasi Intervensi berdasarkan Prioritas Nasional pada Kabupaten Bulukumba dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel IV-6
Highlight Indikasi Intervensi berdasarkan Prioritas Nasional berdasarkan RKP Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Bulukumba
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	○ Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat ○ Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	○ Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan di 12 kabupaten ○ Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di 12kabupaten untuk meningkatkan ketahanan bencana ○ Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial ○ Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian ○ Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	○ Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim ○ Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitasregional dan penguatan konektivitas digital ○ Pengembangan jejaring desa wisata di Provinsi Sulawesi Selatan ○ Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	○ Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian,kehutanan, dan perikanan ○ Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) ○ Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) ○ Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi saranaprasarana olahraga ○ Pembangunan kualitas keluarga ○ Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahanperkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan

Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Bulukumba
	○ Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus padapercepatan peningkatan layanan akses pendidikan anakusia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanulathfal) ○ Fasilitasi literasi digital
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	○ Hilirisasi industri rumput laut ○ Hilirisasi industri kakao ○ Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	○ Pemugaran permukiman kumuh di **Kabupaten Bulukumba**, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Wajo
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	○ Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga ○ Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	○ Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana,dan prasarana pencarian dan pertolongan

4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar IV-2
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025



4.2.1.4 Topik Pembangunan Nasional

Dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional

dan provinsi agar pembangunan tahunan Kabupaten Bulukumba dapat menunjang pembangunan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Pemerintah mengusung tema pembangunan *"**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"."*** Dengan 6 Topik Pemnangunan Nasional yang ditetapkan pada tahun 2025, lebih lanjut dilihat pada grafik berikut:

Grafik IV-1
Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)



Sumber : Rapat Komite MRPN 30 Januari 2024

4.2.2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Prioritas Pemerintah pusat tersebut kemudian menjadi cerminan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi dalam merencanakan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2025 dan mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2025. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan ***"Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing"***, dengan 6 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025,yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata
5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka keterkaitan pembangunan daerah RKPD Prov. Sulawesi Selatan 2025, RKPD Kab. Bulukumba 2025 difokuskan pada sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV-7
Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2025
1.Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif	3. Pemantapan reformasi birokrasi,
	8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
	9. Peningkatan kemandirian desa
2.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata	2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
	7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2025
3.Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,
	10. Peningkatan produktifitas generasi muda
4.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Merata	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
	5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan
5.Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	6. Pelestarian lingkungan hidup.

Sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, maka Kabupaten Bulukumba menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada Tabel sebagai berikut

Tabel IV-8
Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2025

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Pemantapan reformasi birokrasi (3)	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
							Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa
							Penetapan APBD (Tepat Waktu)
							Persentase SILPA terhadap APBD
							Persentase Belanja Pendidikan (20%)
							Persentase Belanja Kesehatan (10%)
							Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan
						Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK
							Persentase Pelanggaran Pegawai
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persenatse Tindak Lanjut Temuan
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)
							Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)
							Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)
							Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
						Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk
						Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.
						Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah
						Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
				Peningkatan Kemitraan antar institusi (8)	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)
				Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana (7)	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman		Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)
							Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)
						Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
							Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
							Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibt dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat
						Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
						Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
						Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
				Peningkatan kemandirian desa (9)	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik
					Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan status desa mandiri
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	Indeks Williamson	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan (2)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentasepanjang talud/ drainase yang baik
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah		Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)
						Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih
							Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)
						Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
							Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
						Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman
							Persentase Pemukiman Yang Tertata
						Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
						Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya, Fungsi Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
							(Flora dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Produktifitas Total Daerah	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan (4)	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina
					Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian
							Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh
							Persentase Kelompok Tani yang dibina
						Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan
					Meningkatnya Produksi hasil Perikanan		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan
							Produksi Perikanan Tangkap
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya
							Cakupan Bina Kelompok Perikanan
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan
					Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan
					Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
					Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
					Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada
						Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan
						Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi
						Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan (5)	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM)
		Menurunya angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan		Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (SPM)
							Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)
							Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
		Meningkatnya Kualitas SDM yang	IPM				Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
		Kompetitif dan Inklusif					
							Persentase orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM)
							Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
							Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
							Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk
							Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk
							Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama.
						Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)
							Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belummenyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM)
							Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
							Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional

No.	Provinsi Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba		Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Impact/ Outcome
	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Ssaaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas		
						Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	IKLH	Pelestarian lingkungan hidup (6)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentasepanjang talud/ drainase yang baik
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah		Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)
						Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih
							Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)
						Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
							Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
						Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman
							Persentase Pemukiman Yang Tertata
						Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
						Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya, Fungsi Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Perencanaan pembangunan pada tahun 2025 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial.

Melihat tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, maka untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025, mengusung tema pembangunan **"Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia",** dengan 10 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
3. Pemantapan reformasi birokrasi,
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,
5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup.
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 difokuskan pada indikator Tujuan dan sasaran namun terdapat 2 indikator yakni IPM dan Gini Ratio mengalami penyesuaian untuk pencapaian prioritas Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan serta berdasarkan evaluasi pada capaian tahun sebelumnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV-9
Sasaran Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target	
					RPJMD Periode 2025	RKPD Tahun 2025
1	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	72	72
		Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100
		Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,70	75,60
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	67,31	67,31
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio	Angka	0,334	0,345
		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	94	94
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	B	B
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,5560	3,5560
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,26 – 4,00	3,26 – 4,00
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,02	22,02
		Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	4,69	4,69
		Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	13,89	13,89
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	10,22	10,22
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,51	3,51

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target	
					RPJMD Periode 2025	RKPD Tahun 2025
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	7,34	7,34
		Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	25,83	25,83
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,42	10,42
5	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	77,15	77,15
		Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,14	70,14
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio	Angka	0,334	0,345
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	94	94
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman	Angka	15	15
		Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	90,20	90,20
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun	Angka	0,80	0,80
		Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	%	6,42	6,42
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	61,57	61,57
		Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	36	36

Prioritas Pembangunan Tahun 2025 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan Tahun 2025, sebagai mana tabel sebagai berikut:

Tabel IV-10
Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Kabupaten Bulukumba	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi Sul-Sel				
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal	Transformasi Digital		Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif	Pemantapan reformasi birokrasi (3)	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
					Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori
							Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat
						Peningkatan Kemitraan antar institusi (8)	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman
							Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani
						Peningkatan kemandirian desa (9)	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun
							Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri
2	Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDG's)	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian. Sulawesi Selatan sebagi poros maritim	Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan (2)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio/ Indeks Gini
							Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Kabupaten Bulukumba	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi Sul-Sel				
3	Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDG's)	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan (4)	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB
4	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran				Peningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana (7)	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian
							Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB
							Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
							Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
							Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata
							Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB
							Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis			Kabupaten Bulukumba	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran
		Global	Nasional	Provinsi Sul-Sel				
5	Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Masih Tinggi	Pandemi Covid-19		Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan (5)	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
							Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
6	Masi Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	Standar Pelaynan Minimal (SPM)	Pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembangunan sumber daya manusia (1)	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
				Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.			Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani
							Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia
							Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
7	Adanya Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi	Pandemi Covid-19	Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Kontraksi	Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)	Pengelolaan dan produktifitas sumber daya alam	Peningkatan produktifitas generasi muda (10)	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda
							Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi
8	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	Perubahan Iklim		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.	Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah	Pelestarian lingkungan hidup (6)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio/ Indeks Gini
							Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur

Prioritas Pembangunan 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan arah kebijakan RPJMD 2021-2026 sebagai mana pada tabel yang menggambarkan arah kebijakan RPJMD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel IV-11
Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2025

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	Meningkatkan Kesadaran Toleransi Dan Beragama Dalam Masyarakat	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
			Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Layanan Publik	Pemantapan reformasi birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dan Ekspor	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB
			Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian
4	Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional Dan Internasional	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB
			Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
6	Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio
			Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur
			Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
			Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)

No	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
7	Mengembangkan Destinasi Wisata Untuk Menarik Wisatawan Domestik Dan Mancanegara	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata
8	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman
		Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani
			Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur
9	Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB
			Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri
10	Membina Generasi Muda Yang Berkarakter Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas Dan Profesionalisme	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda
			Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi
11	Membangun Desa Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun
			Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri
12	Penegakan Supremasi Hukum Dan Pertahanan Dan Keamanan	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio
			Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur

4.2.3.1 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPJMD Kabupaten Bulukum sebagaimana pada tabel berikut:

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPJMD Kabupaten Bulukum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV-12
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung
1	Pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 –18 Thun yng blum mnylsikn pndidikn dsr dn tu mnngh yng prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	BPKPD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	BPKPD
			Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai	Inspektorat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persenatse Tindak Lanjut Temuan	Inspektorat Daerah
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Dinas Sosial

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung
				(SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	
			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan, Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan, Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya, Cakupan Bina Kelompok Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	Dinas Perikanan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	Dinas Pariwisata, Pemuda danOlahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS	Dinas Kesehatan
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Permukiman	prsentase pengembagan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	BPBD
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	Satpol PP, Damkar, Penyelamatan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan status desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Perangkat Daerah Penanggung
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4.2.3.2 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD

RKPD sebagai perencanaan Tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPJMD yang tergambarkan melalui sasaran prioritas pembangunan, dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel IV-13
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2025

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
1	Pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71
		Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100
		Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,60
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	66,21
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio/ Indeks Gini	Angka	0,350
		Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	92
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	B
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,5415
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,26-4,00
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,04
		Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	8,14
		Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	13,55
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	7,66

No	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD Tahun 2025
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	3,26
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,76
		Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	25,36
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,63
5	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	76,36
		Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,63
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas	Gini Ratio/ Indeks Gini	Angka	0,350
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	92
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Rasa Aman	Angka	15
		Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	89,66
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor	Indeks Desa Membangun	Angka	0,78
		Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	%	4,59
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	59,94
		Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	27

4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bulukumba, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatandan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Strategi Salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan daerah Bulukumba, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulukumba adalah memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulukumba guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal.

Strategi pembangunan daerah Bulukumba tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Bulukumba Tahun 2025. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPJMD. Adapun Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Strategi dan Arah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV-14
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Pembangunan sumber daya manusia	Peningkatan fasilitasi dan pembinaan keagamaan serta sarana dan prasarana ibadah	Akselerasi peningkatan kualitas SDM Keagamaan
		Peningkatan akses,kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan peningkatan kualitas guru,	Akselerasi peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar dalam meluluskan tamatan
2.	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Peningkatan akses dankualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah,	Penyediaan infrastruktur sumberdaya air
3.	Pemantapan reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas dankapasitas aparatur serta peningkatan kualitas pelayananpublic yang didukung oleh penerapan TIK	Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
4.	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Mengoptimalkan produksi dan produktifitas pertanian serta peningkatan upaya pendampingan petani oleh penyuluh pertanian	Peningkatan lapangan kerja,investasi dan industrialisasi
		Mengoptimalkan produksi dan nilai tambah produk perikanan,	Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian,peternakan, dan perikanan dan kemaritiman

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	Strategi	Arah Kebijakan
			mempercepat pertumbuhan sektor perikanan
		Peningkatan daya saing industri, khususnya industri pengolahan komoditasunggulan wilayah diiringi dengan penguatan danpeningkatan kinerja UMKM serta penguatan distribusiperdagangan,	Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya
		Peningkatan jumlahkunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD,	Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
			Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;
5.	Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan	Peningkatan akses, mutu,dan upaya pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kesehatan	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
			Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar
6.	Pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan akses dankualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah,	Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan persampahan
7.	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Peningkatan akses dankualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah,	Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon
8.	Peningkatan Kemitraan antar institusi	Peningkatan ketaatan hukum dan upaya penegakan hukum	peningkatan sinergitas untuk menjaga kamtibmas
			Terwujudnya perdamaian dan ketertiban masyarakat
9.	Peningkatan kemandirian desa	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh peningkatan peran masyarakat desa	Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan kemaritiman

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	Strategi	Arah Kebijakan
		dankerjasama antar kawasan perdesaan	
10.	Peningkatan produktifitas generasi muda	Peningkatan kualitasdan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan danolahraga disertai optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan olahraga	terwujudnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan pemuda yg berkualitas dan terintegrasi

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bulukumba

Pedoman Penyusunan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian 5 dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Pasal 153, disebutkan Kaidah perumusan kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) huruf k dicantumkan dengan kalimat, “Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD” Pada pasal 178 ayat 1,2,3 dan 4. Disebutkan ayat 1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Ayat 2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Ayat 3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Dan Ayat 4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam perencanaan 6 pembangunan daerah, khususnya penyusunan rancangan awal RKPD untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi dokumen perencanaan kerja Pemerintah Daerah, dalam satu tahun yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bulukunba.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Berdasarkan hasil risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses DPRD Kabupaten Bulukumba, maka secara umum permasalahan pembangunan di Kabupaten Bulukumba, antara lain:

1. Sejumlah permasalahan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Bulukumba terkait pembangunan infrastruktur khususnya di pedesaan adalah sarana dan prasarana jalan yang masih perlu ditingkatkan, penyediaan infrastruktur pertanian dan perikanan, penyediaan air bersih serta fasilitas sarana pendidikan dan layanan kesehatan serta kesejahteran hidup.

2. Permasalahan pemberdayaan kelompok tani maupun kelompok nelayan yang masih belum optimal sehingga masih dibutuhkan pendampingan penyuluhan maupun pemberian bantuan sarana dan prasarana. .
3. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Sektor pendapatan daerah, masih belum optimalnya hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah hal ini antara lain disebabkan: kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran masyarakat, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di awal tahun ini, diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, bagi aparat pemerintah daerah khususnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
6. Adanya dampak perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Bulukumba antara lain menurunnya produksi pertanian, degradasi lingkungan, kurangnya air bersih, pendangkalan sungai sehingga perlu menyusun perencanaan program dan kegiatan sebagai langkah adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Sebagaimana tertuang dalam Bab III tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp.1.595.264.186.099** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp. 283.232.247.663** dan pendapatan transfer sebesar **Rp. 1.311.323.938.436,** serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 708.000.000.** Berdasarkan target Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2025, dengan jumlah belanja **Rp. 1.595.264.186.099**.

Belanja daerah tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow* program priority, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2025 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025.

Tabel V-1
Rincian Rencana Pendanaan Kab. Bulukunba Tahun 2025

Kode	Uraian	Target 2025	Target RPJMD 2026
5	**BELANJA**	**1.595.264.186.099**	**2.097.647.649.966**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.187.026.715.442**	**1.182.926.319.287**
5.1.1	Belanja Pegawai	728.958.124.879	791.645.092.699
5.1.2	Belanja Barang	437.169.030.063	358.647.055.728
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	6.700.000.000
5.1.4	Belanja Hibah	19.619.429.500	20.434.170.860
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.280.131.000	5.500.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**207.057.668.847**	**680.819.292.473**
5.2.1	Belanja Tanah	3.704.317.000	5.255.565.080
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	34.317.384.565	121.464.779.509
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	157.102.231.608	415.876.512.059
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.685.099.874	132.768.177.615
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	248.635.800	5.454.258.210
5.2.6	Belanja Aset Lainnya		0
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.469.103.545**	**10.000.000.000**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.469.103.545	10.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**195.710.698.265**	**223.902.038.206**
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	13.986.118.674	24.370.952.619
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	181.724.579.591	199.531.085.587

Sumber : SIPD RI Perencanaan Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan

dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2025, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 10 (Sepuluh) prioritas pembangunan.

Tabel V-2
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	Pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	75 %	242.306.000,00	75 %	244.750.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	15 %	353.680.000,00	15 %	189.277.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %	2.348.743.675,00	100 %	2.383.974.830,13	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 –18 Thun yng blum mnylsikn pndidikn dsr dn tu	100 %	123.143.942.164,00	100 %	139.748.958.079,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				mnngh yng prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM)					
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	100 %	23.691.000,00	100 %	472.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	100 %	2.680.536.000,00	100 %	2.479.122.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100 %	51.070.431.000,00	100 %	65.787.522.652,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82.61 %	12.225.679.800,00	82.61 %	2.213.216.807.750,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	93 %	2.959.109.117,00	93 %	4.029.789.900,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	92%	570.000.000,00	92%	3.403.125.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	85 %	438.757.000,00	85 %	2.827.329.725,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	84 %	254.144.500,00	84 %	236.354.475,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100 %	5.727.654.600,00	100 %	15.830.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan	90 %	892.522.200,00	90 %	1.535.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari					
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Penataan Organisasi)	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %	225.000.000,00	100 %	228.375.000,00	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan	100 %	964.775.300,00	100 %	1.116.895.230,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase	95 %	204.089.349.460,00	95 %	264.500.310.641,00	BPKPD

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan					
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	100 %	2.245.994.100,00	100 %	1.170.165.197,00	BPKPD
			Program Kepegawaian Daerah	Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba	55 %	472.530.600,00	55 %	1.630.200.000,00	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya	72 %	638.742.200,00	72 %	3.992.021.000,00	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai	57 %	3.283.257.000,00	57 %	4.524.752.486,00	Inspektorat Daerah

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persenatse Tindak Lanjut Temuan	60 %	1.409.222.000,00	60 %	1.690.202.083,00	Inspektorat Daerah
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	100 %	520.621.500,00	100 %	664.433.605,00	Dinas Sosial
			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	100 %	587.843.200,00	100 %	970.850.000,00	Dinas Kependudukan dan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
									Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	90 %	242.158.800,00	90 %	889.400.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah	100 %	482.200.000	100 %	1.321.704.516	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	100 %	321.260.000	100 %	3.300.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	76 Investor	124.330.000,00	76 Investor	287.885.950,00	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
4	Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Jumlah Produksi Pertanian	76 %	3.136.329.100,00	76 %	22.652.848.231,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan Dan	Persentase prasarana sektor	90 %	10.761.741.000,00	90 %	10.751.600.000,00	Dinas Pertanian dan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Pengembangan Prasarana Pertanian	pertanian yang tersedia					Ketahanan Pangan
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	45 %	17.820.000,00	45 %	56.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina	59 %	614.082.700,00	59 %	790.500.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	100 %	18.674.000,00	100 %	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Produksi hasil Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kontribusi PDRB sektor perikanan, Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan, Persentase Produksi Perikanan Tangkap	53709,90 Ton	6.087.944.500,00	53709,90 Ton	4.784.232.106,00	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya, Cakupan Bina Kelompok Perikanan	190.793 Ton 86 Persen	3.490.267.500,00	190.793 Ton 86 Persen	4.557.500.000,00	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	90%	391.725.160,00	90%	1.298.000.000,00	Dinas Perikanan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	7 Objek 95 %	1.348.799.800,00	7 Objek 95 %	17.584.788.431,00	Dinas Pariwisata, Pemuda danOlahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	12 event 95 %	250.000.000,00	12 event 95 %	2.047.668.441,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	76,3 %	1.682.108.000,00	76,3 %	1.850.318.800,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	50%	2.672.965.200,00	50%	2.940.126.200,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	45%	114.467.600,00	45%	125.914.360,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM
5	Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan	Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	100 Persen	103.365.386.757,00	100 Persen	232.107.427.416,70	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	90 Persen	598.500.500,00	90 Persen	5.638.057.625,00	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Domestik Dan Mancanegara	Daya Manusia Kesehatan						
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	90 Persen	571.628.850,00	90 Persen	370.207.943,60	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga Ber PHBS	78 Persen	232.993.200,00	78 Persen	987.957.297,80	Dinas Kesehatan
6	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	100 %	2.680.536.000,00	100 %	2.479.122.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100 %	51.070.431.000,00	100 %	65.787.522.652,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82.61 %	12.225.679.800,00	82.61 %	2.213.216.807.750,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir	93 %	2.959.109.117,00	93 %	4.029.789.900,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Penyediaan Air Minum	minum shri-hri (SPM)					
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	92%	570.000.000,00	92%	3.403.125.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	85 %	438.757.000,00	85 %	2.827.329.725,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	84 %	254.144.500,00	84 %	236.354.475,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100 %	5.727.654.600,00	100 %	15.830.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan	90 %	892.522.200,00	90 %	1.535.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
				,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari					
7	Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100 %	1.020.798.000,00	100 %	1.490.500.000,00	BPBD
8	Peningkatan Kemitraan antar institusi		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100 %	2.934.333.000,00	100 %	3.414.848.635,00	Satpol PP, Damkar, Penyelamatan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	75 %	1.772.491.000,00	75 %	3.305.189.140,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	169.513.000,00	100 %	186.464.300,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	83%	236.487.000,00	83%	260.135.700,00	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	100.000.200,00	100 %	11.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
9	Peningkatan kemandirian desa	Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan	Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	70%	1.000.000,00	70%	66.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	100%	10.000.000,00	100%	292.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100%	1.854.340.568,00	100%	3.010.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	515.110.000,00	100%	106.020.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Peningkatan produktifitas generasi muda	Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Inovator	5 orang 100 %	1.161.408.600,00	5 orang 100 %	706.627.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	2 orang 100 %	9.815.811.750,00	2 orang 100 %	59.150.121.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Penyelesaian	Persentase penetapan tanah	100 %	100.000.200,00	100 %	11.000.000,00	Dinas Perumahan,

No.	Prioritas Kabupaten Bulukumba	Sasaran Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (*Outcome*)	Tahun 2025		Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung
					Target		Target		
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	untuk pembangunan fasilitas umum					Kawasan Permukiman dan Pertanahan

5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Untuk matriks rencana kerja dan pendanaan daerah program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel V-3
Rekap pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Bulukumba

No	OPD	Pagu RKPD Tahun 2025 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	564.834.885.552,00
2	Sanggar Kegiatan	63.738.859,00
3	Dinas Kesehatan	179.706.261.245,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja	136.212.808.140,00
5	Puskesmas Caile	4.089.703.173,00
6	Puskesmas Ujung Loe	3.704.603.516,00
7	Puskesmas Ponre	3.026.026.336,00
8	Puskesmas Bonto Bangun	4.700.238.246,00
9	Puskesmas Tanete	3.745.080.472,00
10	Puskesmas Bonto Bahari	3.653.459.781,00
11	Puskesmas Gattareng	2.499.202.968,00
12	Puskesmas Bontonyeleng	2.885.028.203,00
13	Puskesmas Borong Rappoa	2.359.768.769,00
14	Puskesmas Manyampa	816.371.850,00
15	Puskesmas Palangisang	1.794.340.428,00
16	Puskesmas Balibo	2.075.557.916,00
17	Puskesmas Salassae	2.258.743.524,00
18	Puskesmas Lembanna	2.220.689.077,00
19	Puskesmas Herlang	2.483.348.689,00
20	Puskesmas Bonto Tiro	2.084.421.478,00
21	Puskesmas Karassing	1.517.609.722,00
22	Puskesmas Batang	2.061.561.116,00
23	Puskesmas Tanah Toa	1.771.771.095,00
24	Puskesmas Kajang	2.529.845.239,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	90.733.332.004,00
26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9.623.914.567,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.820.198.099,00
28	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.907.831.002,00
29	Dinas Sosial	5.765.086.553,00
30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.994.963.434,00
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.813.279.252,00
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.952.167.267,00
33	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.775.297.692,00
34	Dinas Perhubungan	20.002.550.233,00
35	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	3.373.414.892,00
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja	7.083.340.317,00
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.700.131.355,00
38	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	3.029.192.549,00
39	Dinas Perikanan	14.855.815.117,00
40	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	19.922.937.417,00
41	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	34.531.107.410,00
42	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.345.330.596,00
43	Sekretariat Daerah	26.848.352.014,00
44	Sekretariat DPRD	33.437.672.670,00
45	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	10.564.974.579,00

No	OPD	Pagu RKPD Tahun 2025 (Rp.)
46	Badan Keuangan dan Aset Daerah	232.849.408.941,00
47	Badan Pendapatan Daerah	12.529.933.950,00
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.416.698.657,00
49	Inspektorat Daerah	11.978.498.543,00
50	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU	12.147.975.011,00
51	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE	2.802.305.675,00
52	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA	4.720.500.218,00
53	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE	3.652.394.164,00
54	KANTOR KECAMATAN GANTARANG	5.285.621.875,00
55	KANTOR KECAMATAN KINDANG	2.534.968.667,00
56	KANTOR KECAMATAN HERLANG	3.105.000.007,00
57	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO	3.002.951.979,00
58	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI	5.943.321.242,00
59	KANTOR KECAMATAN KAJANG	4.018.305.686,00
60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.100.347.071,00
	Total Anggaran	**1.595.264.186.099,00**

Perumusan Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat. Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun ke tiga periode Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, dan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah. Perincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, yang dijabarkan kedalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2025 yang disertai dengan indikator dan terget kinerja tahun 2025, serta target tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel V-4
Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba			564.834.885.552				540.843.346.461	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			512.688.702.552				537.795.846.461	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			512.688.702.552				537.795.846.461	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100%	389.445.853.388			100%	397.164.888.382	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi	100%	23.634.000			100%	194.250.000	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	9.774.000	Kab. Bulukumba	DAU	16 Dokumen	105.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	13.860.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	5 Laporan	89.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan	100%	387.925.399.488			100%	394.014.957.595	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3496 Orang/ bulan	386.575.732.488	Kab. Bulukumba	DAU, DAK.NF TPG PNSD, DAK.NF TAMSIL GURU PNSD	3496 Orang/ bulan	392.793.807.595	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.322.400.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	1.168.650.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	26.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	27.267.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	26.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	72.588.000			100%	26.250.000	
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	72.588.000	Kab. Bulukumba	DAU	2 Laporan	15.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	2 Laporan	10.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM	100%	13.500.000			100%	200.550.000	
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	13.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	3 Orang	68.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	300 Orang	66.150.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	300 Orang	66.150.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	192.504.100			100%	926.554.125	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	4 Paket	21.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	4 Paket	105.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.194.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Paket	52.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.902.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Paket	68.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.438.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Paket	70.804.125	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.009.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	31.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	127.960.000	Kab. Bulukumba	DAU	300 Laporan	367.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	2 Dokumen	210.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	356.667.000			100%	445.498.537	
1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	281.922.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	209.248.537	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	10 Unit	105.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	74.745.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	5 Unit	131.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disiapkan	1 Tahun	811.290.800			1Tahun	807.859.775	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	158.404.800	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	151.609.775	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	652.886.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	656.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik	65%	50.270.000			70%	548.968.350	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	33.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	4 Unit	272.818.350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	85 Unit	13.650.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	16.770.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	25 Unit	52.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	2 Unit	210.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 –18 Thun yng blum mnylsikn pndidikn dsr dn tu mnngh yng prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM)	100%	123.143.942.164			100%	139.748.958.079	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase bangunan kondisi baik	70%	77.742.848.164			80%	74.946.580.779	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15 Ruang	0	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	11 Ruang	3.569.658.750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	1.200.000.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	23 Ruang	1.903.818.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.200.000.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	11 Ruang	1.243.971.750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	2.985.763.164	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	42 Unit	3.003.714.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	0	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	20 Ruang	2.855.727.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	300.000.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	15 Ruang	1.266.977.250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	1.200.000.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	10 Ruang	1.492.774.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah								
						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	10 Paket	17.613.000	Kab. Bulukumba	DAKF	10 Paket	1.312.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	5 Unit	525.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	11.982.000	Kab. Bulukumba	DAU	150 Peserta Didik	574.956.459	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	11.280.000	Kab. Bulukumba	DAU	5 Orang	474.600.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
						Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	350 Satuan Pendidikan	39.593.180.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF	350 Satuan Pendidikan	41.572.839.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	350 Satuan Pendidikan	14.715.000	Kab. Bulukumba	DAU	50 Satuan Pendidikan	730.799.895	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30 Orang	38.580.000	Kab. Bulukumba	DAU	30 Orang	141.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar								
						Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	15 Ruang	9.000.000.000	Kab. Bulukumba	DAKF	15 Ruang	3.517.542.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	9.900.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Dokumen	220.806.075	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	44.440.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Kegiatan	186.125.100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	3.000.000.000	Kab. Bulukumba	DAKF	11 Ruang	1.189.886.250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	474.500.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	15 Unit	1.351.680.750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40 Ruang	18.240.895.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	2 Ruang	5.711.454.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	400.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAKF	20 Paket	2.100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	95%	29.865.191.000			98%	49.394.965.000	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	0	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	10 Ruang	2.686.110.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.200.000.000	Kab. Bulukumba	DAKF	5 Ruang	1.460.245.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	0	Kab. Bulukumba	DAKF	5 Ruang	3.491.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium								
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Ruang	3.000.000.000	Kab. Bulukumba	DAKF	5 Ruang	3.402.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir								
						Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	5 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAKF	5 Unit	1.052.341.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	1.310.000.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	10 Unit	2.252.769.750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	7.000.000.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	12 Ruang	4.819.027.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	400.000.000	Kab. Bulukumba	DAKF	4 Ruang	844.651.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	500.000.000	Kab. Bulukumba	DAKF	7 Ruang	2.239.125.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium								
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	600.000.000	Kab. Bulukumba	DAKF	14 Ruang	2.646.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	19 Unit	1.802.220.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah								
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	0	Kab. Bulukumba	DAKF	1 Paket	283.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAKF	5 Unit	525.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1632 Peserta Didik	9.249.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Peserta Didik	1.971.720.250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	175 Orang	14.190.000	Kab. Bulukumba	DAU	7 Orang	787.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	69 Satuan Pendidikan	15.380.560.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF	70 Satuan Pendidikan	16.149.588.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	69 Satuan Pendidikan	11.982.000	Kab. Bulukumba	DAU	70 Satuan Pendidikan	105.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30 Orang	14.190.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Orang	141.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	10.920.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Dokumen	315.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	14.100.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Kegiatan	210.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	0	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	10 Ruang	1.611.666.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	400.000.000	Kab. Bulukumba	DAKF	10 Paket	598.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase warga negara usia 5 – 6 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	85%	11.575.947.000			90%	9.986.983.125	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	2.235.000.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	1 Unit	918.218.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	6.516.000	Kab. Bulukumba	DAU	2 Orang	189.840.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	429 Satuan Pendidikan	6.613.200.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAK.NF-BOP PAUD	368 Satuan Pendidikan	6.943.860.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD								
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	429 Satuan Pendidikan	11.457.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Satuan Pendidikan	419.120.625	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	9.774.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Dokumen	105.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.600.000.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAK FISIK-BIDIK - REGULER-PAUD	5 Unit	386.190.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD								
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	1.100.000.000	Kab. Bulukumba	DAKF	10 Paket	525.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang	0	Kab. Bulukumba	DAKF	4 Ruang	499.753.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90%	3.959.956.000			95%	5.420.429.175	
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	9.774.000	Kab. Bulukumba	DAU	100 Orang	472.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	24 Satuan Pendidikan	3.859.900.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF, DAK.NF-BOP	24 Satuan Pendidikan	4.052.895.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	24 Satuan Pendidikan	49.920.000	Kab. Bulukumba	DAU	24 Satuan Pendidikan	252.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35 Orang	22.914.000	Kab. Bulukumba	DAU	35 Orang	52.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	200 Peserta Didik	17.448.000	Kab. Bulukumba	DAU	200 Peserta Didik	433.034.175	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	0	Kab. Bulukumba	DAKF	1 unit	157.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	undefined	undefined undefined	0			-	330.750.000	
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	undefined	undefined undefined	0			-	330.750.000	
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	105.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	225.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	100%	23.691.000			100%	472.500.000	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang ditingkatkan kompetensinya untuk memenuhi standar kompetensi	30 PTK	23.691.000			30PTK	472.500.000	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30 Dokumen	23.691.000	Kab. Bulukumba	DAU	30 Dokumen	472.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	90%	75.216.000			90%	78.750.000	
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah	100%	46.860.000			100%	26.250.000	
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	46.860.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	26.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Nonformal	100%	28.356.000			100%	52.500.000	
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	21.840.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	26.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	6.516.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	26.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			52.146.183.000				3.047.500.000	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			52.146.183.000				3.047.500.000	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100%	15.669.000			100%	55.000.000	
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi	100%	15.669.000			100%	55.000.000	
2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.669.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	2 Laporan	55.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	75%	52.011.508.000			75%	1.417.500.000	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	1 Kegiatan	0			1Kegiatan	787.500.000	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	0	Kab. Bulukumba	DAU	3 Objek	787.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	52.011.508.000			1Kegiatan	525.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya								
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	52.001.734.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Objek	105.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional								
						Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	262.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan								
						Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	5 Sertifikat	9.774.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	5 Sertifikat	157.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan	100%	0			100%	105.000.000	
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat								
						Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Orang	105.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan	60%	13.032.000			60%	525.000.000	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian	1 Kegiatan	13.032.000			1Kegiatan	525.000.000	
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	13.032.000	Kab. Bulukumba	DAU	100 Orang	525.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	0			-	105.000.000	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0			-	105.000.000	
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota								
						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Orang	105.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	60%	105.974.000			60%	945.000.000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang di Tetapkan	100%	64.374.000			100%	157.500.000	
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya								
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	64.374.000	Kab. Bulukumba	DAU	5 Objek	157.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Peresentase Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu	100%	41.600.000			100%	787.500.000	
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya								
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	41.600.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Objek	787.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)			63.738.859				111.089.851	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			63.738.859				111.089.851	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			63.738.859				111.089.851	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	100%	63.738.859			100%	111.089.851	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	10.939.000			100%	55.650.000	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	740.000	Kab. Bulukumba	DAU	2 Paket	15.750.000	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	2 Paket	10.500.000	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.199.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	29.400.000	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disiapkan	1 Tahun	52.799.859			1Tahun	55.439.851	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.799.859	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	17.639.851	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	37.800.000	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
					Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba			179.706.261.245				197.676.887.370	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			179.154.239.445				197.069.663.390	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			179.154.239.445				197.069.663.390	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	74.385.730.138			100%	81.824.303.152	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	204.462.400			100%	224.909.245	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	104.896.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	3 Dokumen	115.386.040	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	53.058.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	58.364.735	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.515.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Laporan	10.466.995	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	36.992.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Laporan	40.691.475	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)	100%	70.253.843.558			100%	77.279.227.914	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1337 Orang/ bulan	65.490.037.058	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	14000 Orang/ bulan	69.156.439.326	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.605.300.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	7.610.086.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	72.360.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	6 Laporan	79.596.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	26.388.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	29.027.020	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	22.440.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	18 Laporan	24.684.715	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	37.318.100	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	41.050.240	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	terlaksananya pengelolaan administrasi retribusi yankes di puskesmas dan jaringannya	100%	707.063.200			100%	777.769.740	
1	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	707.063.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Dokumen	777.769.740	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai standar	100%	31.578.100			100%	32.751.895	
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	9.060.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	9.734.450	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21 Dokumen	12.100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	21 Dokumen	12.623.600	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112 Orang	10.417.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	112 Orang	10.393.845	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum di instansi kesehatan, puskesmas dan jaringannya	100%	811.540.000			100%	2.045.004.251	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.172.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	34.700.050	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	254.140.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	10 Paket	1.424.917.311	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	33.627.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	64.691.935	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	127.749.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	100.051.875	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.458.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	65.069.565	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	32.668.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Laporan	34.119.415	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	292.723.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Laporan	321.454.100	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasiobal dan pusk keliling serta ambulans	100%	233.640.000			100%	7.480.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	233.640.000	Kab. Bulukumba	DAU	2 Unit	7.480.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang pelayanan urusan pemerintahan bidang kesehatan	100%	1.911.638.880			100%	2.153.057.724	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	705.538.880	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Laporan	788.551.724	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	41.440.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Laporan	45.584.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.164.660.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Laporan	1.318.922.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan bidang kesehatan	100%	231.964.000			100%	230.945.561	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.200.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	15.915.636	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	212.764.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	35 Unit	215.029.925	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0–59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk	100 Persen	103.365.386.757			100 Persen	232.107.427.417	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan	100%	47.741.861.047			100%	182.170.669.960	
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								
						Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	2.761.460.000	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DAU	1 Unit	66.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	16.529.199.347	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	1 Unit	16.641.919.800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	22 Unit	5.142.042.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	22 Unit	25.892.924.365	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	28.800.000	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	DAU, DAU	3 Unit	1.100.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	25 Unit	16.891.924.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	10 Unit	16.642.262.747	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	10 Unit	3.600.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	15.320.800.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	1.092.310.700	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAKF	10 Unit	11.582.427.985	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	22 Unit	250.283.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	825.312.400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	200.000.000	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	DAU	3 Unit	16.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.594.475.000	Kab. Bulukumba	DAU	3 Paket	11.285.922.953	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								
						Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Paket	247.766.200	Kab. Bulukumba	DAU	2 Paket	379.099.710	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian indikator Standar pelayanan minimal bidang kesehatan	100%	55.197.429.910			100%	49.389.739.786	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5234 Orang	142.742.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	5738 Orang	169.400.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5470 Orang	153.020.000	Kab. Bulukumba	DAU	6790 Orang	197.999.890	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5210 Orang	30.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	6000 Orang	168.080.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25899 Orang	162.345.000	Kab. Bulukumba	DAU	33670 Orang	170.201.240	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4639 Orang	47.534.000	Kab. Bulukumba	DAU	5535 Orang	133.570.800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	30.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	1200 Orang	203.247.770	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	146.145.000	Kab. Bulukumba	DAU	1200 Orang	161.992.600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19034 Orang	85.574.400	Kab. Bulukumba	DAU	21000 Orang	204.135.910	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7820 Orang	83.253.300	Kab. Bulukumba	DAU	8020 Orang	201.578.850	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	974 Orang	81.463.600	Kab. Bulukumba	DAU	950 Orang	199.610.015	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11119 Orang	39.370.000	Kab. Bulukumba	DAU	7600 Orang	141.654.700	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10,220 Orang	296.315.000	Kab. Bulukumba	DAU	9400 Orang	270.947.600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	26.716.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Dokumen	29.387.820	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	7 Dokumen	44.615.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	46.196.205	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	3.554.744.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH CHT, DAK.NF, DAU	4 Dokumen	3.910.219.500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	28.940.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	31.834.385	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	125.468.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK.NF	12 Dokumen	138.015.020	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	105.980.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	116.578.495	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	167.992.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	184.791.365	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	124.599.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	137.059.670	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	818 Orang	80.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1600 Orang	88.000.055	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1025 Orang	84.999.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2000 Orang	93.500.055	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	3 Dokumen	30.000.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	21 Dokumen	22.406.670	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	382.212.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAK.NF	21 Dokumen	428.453.850	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	43.966.557.800	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	22 Dokumen	33.558.432.875	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah								
						Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	104028 Orang	114.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	300000 Orang	125.950.220	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	31.607.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	96 Paket	34.767.810	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	164.259.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	180.684.900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	648.863.800	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Balang Taroang	DAK.NF	252 Dokumen	713.750.194	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	22 Dokumen	3.303.784.710	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete	DAU	21 Dokumen	6.360.069.320	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	20 Unit	124.550.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	21 Unit	136.949.835	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	66.164.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Laporan	88.340.945	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3 Dokumen	40.516.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	10 Dokumen	44.567.985	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	405.966.400	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	257.363.237	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	100.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	100 Orang	110.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota								
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	99.999.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	220.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	4 Dokumen	76.630.000	Kab. Bulukumba	DAU	4 Dokumen	110.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentasi instansi/sarana kesehatan yg menerapkan sistem informasi berbasis teknologi (web)	100%	123.757.000			100%	197.418.265	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	123.757.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	197.418.265	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan	69%	302.338.800			71%	349.599.406	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	59.174.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Unit	65.091.400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 Unit	11.124.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	3 Unit	12.237.500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	21 Unit	200.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	22 Unit	41.270.506	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	22 Dokumen	32.040.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	24 Dokumen	231.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	90 Persen	598.500.500			90 Persen	5.638.057.625	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentasi praktek tenaga kesehatan yg dibina dan diawasi	90%	24.649.100			100%	27.665.000	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	5 Dokumen	11.499.100	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	8 Dokumen	13.200.000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	13.150.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	14.465.000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar	95%	213.001.000			100%	5.213.456.847	
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	12.971.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	14.985.199	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	85 Orang	173.675.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	5000 Orang	5.168.032.345	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	26.354.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	30.439.303	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi tenaga kesehatan yg telah ditingkatkan kompetensinya	90%	360.850.400			95%	396.935.778	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	360.850.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	500 Orang	396.935.778	DINAS KESEHATAN
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar	90 Persen	571.628.850			90 Persen	370.207.944	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pesentasi apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan Umot yg memiliki izin	92%	108.581.000			100%	54.081.798	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	77 Dokumen	108.581.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	54.081.798	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentasi PKRT yg duawasi dan bersertifikat laik	65%	31.486.800			70%	31.340.573	
1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								
						Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	31.486.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	31.340.573	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentasi produksi pangan industri Rumah tangga yg duawasi dan bersertifikat laik	65%	179.404.800			70%	156.065.196	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	179.404.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAK.NF	4 Dokumen	156.065.196	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentasi TPM dan DAM yg diawasi dan bersertifikat laik	97%	27.310.850			98%	20.055.626	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	27.310.850	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	20.055.626	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentasi pembinaan pd sentra nakanan jajanan dan pemberian stiker	62%	25.000.000			88%	9.357.646	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	9.357.646	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentasi pengawasan post market pd produksi dan produk makanan minunan IRT	63%	199.845.400			65%	99.307.105	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	199.845.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	65 Unit	99.307.105	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Ber PHBS	78 Persen	232.993.200			78 Persen	987.957.298	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentasi kelompok masyarakat di desa/kelurahan yg berpartisipasi dlm pembangunan kesehatan	24%	69.999.600			25%	713.129.619	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	69.999.600	Kab. Bulukumba	DAU	4 Dokumen	713.129.619	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentasi masyarakat ditempat kerja dan tempat umum yg ber PHBS	49%	94.679.600			53%	180.502.678	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	94.679.600	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	180.502.678	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi UKBM yg purnama atau mandiri	35%	68.314.000			40%	94.325.000	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	68.314.000	Kab. Bulukumba	DAU	40 Dokumen	94.325.000	DINAS KESEHATAN
X					NON URUSAN			552.021.800				306.847.805	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			552.021.800				306.847.805	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	552.021.800			100%	306.847.805	
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu layanan Rumah Sakit dan Puskesmas	100%	552.021.800			100%	306.847.805	
X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20 Unit Kerja	552.021.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU, DAK.NF	20 Unit Kerja	306.847.805	DINAS KESEHATAN
					Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja Kab. Bulukumba			136.212.808.140				173.931.299.824	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			136.212.808.140				173.931.299.824	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			136.212.808.140				173.931.299.824	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	123.722.318.052			100%	123.340.357.640	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)	100%	23.972.318.052			100%	28.740.357.640	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	362 Orang/ bulan	23.972.318.052	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	14000 Orang/ bulan	28.740.357.640	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu layanan Rumah Sakit dan Puskesmas	100%	99.750.000.000			100%	94.600.000.000	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	99.750.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PENDAPATAN DARI BLUD	20 Unit Kerja	94.600.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0–59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk	100 Persen	12.490.490.088			100 Persen	50.590.942.184	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan	100%	12.490.490.088			100%	46.468.716.416	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAKF	3 Unit	10.108.716.416	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	12.490.490.088	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAKF	10 Unit	25.250.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	20 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAKF	21 Unit	110.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit								
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAKF	3 Unit	11.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi capaian indikator Standar pelayanan minimal bidang kesehatan	100%	0			100%	4.122.225.768	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAKF	5738 Orang	612.371.416	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAKF	6790 Orang	2.922.822.557	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAKF	6000 Orang	587.031.795	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA
					Puskesmas Caile Kab. Bulukumba			4.089.703.173				4.498.673.490	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.089.703.173				4.498.673.490	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.089.703.173				4.498.673.490	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	4.089.703.173			100%	4.498.673.490	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	4.089.703.173			100%	4.498.673.490	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	10 Unit Kerja	4.089.703.173	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	LLPDS	20 Unit Kerja	4.498.673.490	PUSKESMAS CAILE
					Puskesmas Ujung Loe Kab. Bulukumba			3.704.603.516				3.879.495.457	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.704.603.516				3.879.495.457	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.704.603.516				3.879.495.457	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	3.704.603.516			100%	3.879.495.457	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	3.704.603.516			100%	3.879.495.457	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	3.704.603.516	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Bijawang Kab. Bulukumba, Ujungloe, Salemba Kab. Bulukumba, Ujungloe, Lonrong Kab. Bulukumba, Ujungloe, Manjalling Kab. Bulukumba, Ujungloe, Padang Loang Kab. Bulukumba, Ujungloe, Seppang Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang Kab. Bulukumba, Ujungloe, Garanta	LLPDS	20 Unit Kerja	3.879.495.457	PUSKESMAS UJUNG LOE
					Puskesmas Ponre Kab. Bulukumba			3.026.026.336				3.328.628.970	
X					NON URUSAN			3.026.026.336				3.328.628.970	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.026.026.336				3.328.628.970	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	3.026.026.336			100%	3.328.628.970	
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.026.026.336			100%	3.328.628.970	
X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Unit Kerja	3.026.026.336	Kab. Bulukumba, Gantorang, Jalanjang Kab. Bulukumba, Gantorang, Bonto Sunggu Kab. Bulukumba, Gantorang, Bialo Kab. Bulukumba, Gantorang, Matekko Kab. Bulukumba, Gantorang, Barombong Kab. Bulukumba, Gantorang, Paenre Lampoe Kab. Bulukumba, Gantorang, Mario Rennu	LLPDS	20 Unit Kerja	3.328.628.970	PUSKESMAS PONRE
					Puskesmas Bonto Bangun Kab. Bulukumba			4.700.238.246				4.563.221.959	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.700.238.246				4.563.221.959	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.700.238.246				4.563.221.959	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	4.700.238.246			100%	4.563.221.959	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.700.238.246			100%	4.563.221.959	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja	4.700.238.246	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	LLPDS	20 Unit Kerja	4.563.221.959	PUSKESMAS BONTO BANGUN
					Puskesmas Tanete Kab. Bulukumba			3.745.080.472				3.401.580.360	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.745.080.472				3.401.580.360	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.745.080.472				3.401.580.360	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	3.745.080.472			100%	3.401.580.360	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	3.745.080.472			100%	3.401.580.360	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja	3.745.080.472	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Batulohe Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Barugae Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Balang Pesoang Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tibona Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Tanete Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Jawijawi Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Balla Saraja Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Bonto Minasa	LLPDS	20 Unit Kerja	3.401.580.360	PUSKESMAS TANETE
					Puskesmas Bonto Bahari Kab. Bulukumba			3.653.459.781				3.367.342.311	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.653.459.781				3.367.342.311	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.653.459.781				3.367.342.311	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	3.653.459.781			100%	3.367.342.311	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Kesehatan	1 PKM	3.653.459.781			100%	3.367.342.311	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	3.653.459.781	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	20 Unit Kerja	3.367.342.311	PUSKESMAS BONTO BAHARI
					Puskesmas Gattareng Kab. Bulukumba			2.499.202.968				2.655.412.203	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.499.202.968				2.655.412.203	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.499.202.968				2.655.412.203	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	2.499.202.968			100%	2.655.412.203	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 PKM 100 %	2.499.202.968			100%	2.655.412.203	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit Kerja	2.499.202.968	Kab. Bulukumba, Gantorang, Gattareng Kab. Bulukumba, Gantorang, Bonto Macinna Kab. Bulukumba, Gantorang, Benteng Melawang Kab. Bulukumba, Gantorang, Benteng Gattareng Kab. Bulukumba, Gantorang, Bonto Raja Kab. Bulukumba, Gantorang, Bonto Masila Kab. Bulukumba, Gantorang, Padang	LLPDS	20 Unit Kerja	2.655.412.203	PUSKESMAS GATTARENG
					Puskesmas Bontonyeleng Kab. Bulukumba			2.885.028.203				3.173.531.023	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.885.028.203				3.173.531.023	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.885.028.203				3.173.531.023	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	2.885.028.203			100%	3.173.531.023	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	2.885.028.203			100%	3.173.531.023	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	2.885.028.203	Kab. Bulukumba, Gantorang, Taccorong Kab. Bulukumba, Gantorang, Bonto Nyeleng Kab. Bulukumba, Gantorang, Palang Barae Kab. Bulukumba, Gantorang, Dampang Kab. Bulukumba, Gantorang, Polewali Kab. Bulukumba, Gantorang, Bukit Harapan Kab. Bulukumba, Gantorang, Bukit Tinggi	LLPDS	20 Unit Kerja	3.173.531.023	PUSKESMAS BONTONYELENG
					Puskesmas Borong Rappoa Kab. Bulukumba			2.359.768.769				2.595.745.646	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.359.768.769				2.595.745.646	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.359.768.769				2.595.745.646	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	2.359.768.769			100%	2.595.745.646	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	2.359.768.769			100%	2.595.745.646	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit Kerja	2.359.768.769	Kab. Bulukumba, Kindang, Garuntungan Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa Kab. Bulukumba, Kindang, Kindang Kab. Bulukumba, Kindang, Tamaona Kab. Bulukumba, Kindang, Oro Gading Kab. Bulukumba, Kindang, Kahayya	LLPDS	20 Unit Kerja	2.595.745.646	PUSKESMAS BORONG RAPPOA
					Puskesmas Manyampa Kab. Bulukumba			816.371.850				899.386.314	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			816.371.850				899.386.314	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			816.371.850				899.386.314	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	816.371.850			100%	899.386.314	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	816.371.850			100%	899.386.314	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	816.371.850	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Paccaramengang Kab. Bulukumba, Ujungloe, Manyampa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	20 Unit Kerja	899.386.314	PUSKESMAS MANYAMPA
					Puskesmas Palangisang Kab. Bulukumba			1.794.340.428				1.973.774.471	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.794.340.428				1.973.774.471	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.794.340.428				1.973.774.471	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	1.794.340.428			100%	1.973.774.471	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1.794.340.428			100%	1.973.774.471	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						0	5 0	1.794.340.428	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Tammatto Kab. Bulukumba, Ujungloe, Balong Kab. Bulukumba, Ujungloe, Balle Angin	LLPDS	20 Unit Kerja	1.973.774.471	PUSKESMAS PALANGISANG
					Puskesmas Balibo Kab. Bulukumba			2.075.557.916				2.211.924.773	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.075.557.916				2.211.924.773	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.075.557.916				2.211.924.773	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ASN berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)	100%	2.075.557.916			100%	2.211.924.773	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	2.075.557.916			100%	2.211.924.773	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Unit Kerja	2.075.557.916	Kab. Bulukumba, Kindang, Mattiro Walie Kab. Bulukumba, Kindang, Arinhua Kab. Bulukumba, Kindang, Benteng Palioi Kab. Bulukumba, Kindang, Balibo Kab. Bulukumba, Kindang, Sipaenre Kab. Bulukumba, Kindang, Somba Palioli Kab. Bulukumba, Kindang, Sopa	PAD	20 Unit Kerja	2.211.924.773	PUSKESMAS BALIBO
					Puskesmas Salassae Kab. Bulukumba			2.258.743.524				2.086.386.256	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.258.743.524				2.086.386.256	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.258.743.524				2.086.386.256	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	2.258.743.524			100%	2.086.386.256	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	2.258.743.524			100%	2.086.386.256	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	2.258.743.524	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Bonto Mangiring Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Salassae Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Jojjolo Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Bulo Bulo	LLPDS	20 Unit Kerja	2.086.386.256	PUSKESMAS SALASSAE

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Puskesmas Lembanna Kab. Bulukumba			2.220.689.077				2.411.094.205	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.220.689.077				2.411.094.205	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.220.689.077				2.411.094.205	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	2.220.689.077			100%	2.411.094.205	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	2.220.689.077			100%	2.411.094.205	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	2.220.689.077	Kab. Bulukumba, Kajang, Bonto Rannu Kab. Bulukumba, Kajang, Bonto Biraeng Kab. Bulukumba, Kajang, Lembanna Kab. Bulukumba, Kajang, Tambangan Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Kajang, Sangkala	LLPDS	20 Unit Kerja	2.411.094.205	PUSKESMAS LEMBANNA
					Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba			2.483.348.689				2.483.480.113	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.483.348.689				2.483.480.113	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.483.348.689				2.483.480.113	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	2.483.348.689			100%	2.483.480.113	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	2.483.348.689			100%	2.483.480.113	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Unit Kerja	2.483.348.689	Kab. Bulukumba, Herlang, Tanuntung Kab. Bulukumba, Herlang, Bonto Kamase Kab. Bulukumba, Herlang, Singa Kab. Bulukumba, Herlang, Gunturu Kab. Bulukumba, Herlang, Pataro	LLPDS	20 Unit Kerja	2.483.480.113	PUSKESMAS HERLANG
					Puskesmas Bonto Tiro Kab. Bulukumba			2.084.421.478				2.359.254.882	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.084.421.478				2.359.254.882	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.084.421.478				2.359.254.882	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	2.084.421.478			100%	2.359.254.882	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 PKM	2.084.421.478			100%	2.359.254.882	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja	2.084.421.478	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Lamanda Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Buhung Bundang Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Paku Balaho Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Caramming Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Tri Tiro Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Dwi Tiro Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Eka Tiro	LLPDS	20 Unit Kerja	2.359.254.882	PUSKESMAS BONTO TIRO
					Puskesmas Karassing Kab. Bulukumba			1.517.609.722				1.512.564.026	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.517.609.722				1.512.564.026	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.517.609.722				1.512.564.026	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	1.517.609.722			100%	1.512.564.026	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1.517.609.722			100%	1.512.564.026	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	1.517.609.722	Kab. Bulukumba, Herlang, Karassing Kab. Bulukumba, Herlang, Borong Kab. Bulukumba, Herlang, Tugondeng	LLPDS	20 Unit Kerja	1.512.564.026	PUSKESMAS KARASSING

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Puskesmas Batang Kab. Bulukumba			2.061.561.116				2.042.078.005	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.061.561.116				2.042.078.005	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.061.561.116				2.042.078.005	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	2.061.561.116			100%	2.042.078.005	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyaediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 PKM	2.061.561.116			100%	2.042.078.005	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Unit Kerja	2.061.561.116	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Bonto Bulaeng Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Bonto Marannu Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Bonto Barua Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Tamalanrea Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Bonto Tangnga Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Batang	LLPDS	20 Unit Kerja	2.042.078.005	PUSKESMAS BATANG
					Puskesmas Tanah Toa Kab. Bulukumba			1.771.771.095				1.744.845.838	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.771.771.095				1.744.845.838	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.771.771.095				1.744.845.838	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ASN berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)	100%	1.771.771.095			100%	1.744.845.838	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1.771.771.095			100%	1.744.845.838	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	6 Unit Kerja	1.771.771.095	Kab. Bulukumba, Kajang, Sapanang Kab. Bulukumba, Kajang, Pattiroang Kab. Bulukumba, Kajang, Malleleng Kab. Bulukumba, Kajang, Batu Nilamung Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Toa	LLPDS	20 Unit Kerja	1.744.845.838	PUSKESMAS TANAH TOA
					Puskesmas Kajang Kab. Bulukumba			2.529.845.239				2.782.829.763	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.529.845.239				2.782.829.763	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.529.845.239				2.782.829.763	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)	100%	2.529.845.239			100%	2.782.829.763	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	2.529.845.239			100%	2.782.829.763	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	10 Unit Kerja	2.529.845.239	Kab. Bulukumba, Kajang, Laikang Kab. Bulukumba, Kajang, Lembang Lohe Kab. Bulukumba, Kajang, Lolisang Kab. Bulukumba, Kajang, Pantama Kab. Bulukumba, Kajang, Lembang Kab. Bulukumba, Kajang, Possi Tanah Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Jaya	LLPDS	20 Unit Kerja	2.782.829.763	PUSKESMAS KAJANG
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bulukumba			90.733.332.004				99.806.665.204	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			82.544.183.517				90.798.601.869	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			82.544.183.517				90.798.601.869	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100%	1.555.017.800			100%	4.530.490.034	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	296.317.500			100%	535.241.000	
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	281.490.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	269.241.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	14.827.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	15 Laporan	266.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	40.200.000			100%	52.500.000	
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	40.200.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	10 Orang	52.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	101.166.000			100%	100.064.000	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket	5.682.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	34 Paket	3.564.750	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	6.699.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	400 Paket	5.525.150	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	88.785.000	Kab. Bulukumba	DAU	120 Laporan	90.974.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang barang milik daerah yang diadakan	27 Unit	30.975.500			27Unit	2.671.918.834	
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar								
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	2.575.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	13.120.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	27 Unit	10.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit	17.855.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	27 Unit	86.418.834	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya jasa penunjang urusan kantor	24 Orang / Bulan	889.974.000			24Orang / Bulan	912.548.700	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	155.874.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	163.667.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	734.100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	748.881.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset dinas PUTR yang dipelihara	104 Unit	196.384.800			104Unit	258.217.500	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	42.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	95.110.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	4 Unit	124.383.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	58.514.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	77.059.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	15.760.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	27 Unit	14.175.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	83.52 %	12.225.679.800			83.52 %	13.448.247.780	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan bangunan SDA pengendali banjir, Embung/Bangunan Penampung ari lainnya, serta normalisasi saluran sungai Persentase pengangan bangunan SDA pengendalian banjir, embung, pintu air , seawall. sungai, kanal banjir dan hidrologi	359 Satuan 100 Persen	498.660.400			100Persen	548.526.440	
1	03	02	2.01	0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	162.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	28 Dokumen	194.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir								
						Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 KM	336.660.000	Kab. Bulukumba	DAU	49 KM	648.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	0102	Pembangunan Breakwater								
						Panjang Breakwater yang Dibangun	2 KM	400	Kab. Bulukumba	DAU	2 KM	440	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.01	0111	Pembangunan Bendungan								
						Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	0	Kab. Bulukumba, Kindang, Kahayya	DAU	1 Bendungan	1.071.430.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	100%	11.727.019.400			100%	11.303.127.250	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan								
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM	10.519.874.400	Kab. Bulukumba	DAU, DAU, DAKF	41 KM	1.596.731.850	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5 KM	91.182.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	29 KM	9.586.594.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM	1.115.963.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	85 KM	119.800.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)	94%	2.959.109.117			94%	4.029.789.900	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM/Perpipaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	167 Unit	2.959.109.117			180Unit	4.029.789.900	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2,5 Liter/ Detik	2.740.414.117	Kab. Bulukumba	DAU	75 Liter/ Detik	2.459.789.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10 Unit	218.695.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Unit	1.570.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik (SPM)	100%	2.517.686.000			100%	1.788.586.900	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	2.517.686.000			100%	1.788.586.900	
1	03	05	2.01	0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan								
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	20 Unit	139.066.000	Kab. Bulukumba	DAU	20 Unit	629.063.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan								
						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	3 M^3/ Hari	28.620.000	Kab. Bulukumba	DAU	3 M^3/ Hari	159.523.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan								
						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	2 M^3/ Hari	2.350.000.000	Kab. Bulukumba, Gantorang, Polewali	DAU	2 M^3/ Hari	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)	100%	2.680.536.000			100%	2.479.122.000	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Talud/drainase yang baik	32.02 Km	2.680.536.000			32.02Km	2.479.122.000	
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan								
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	5 Sistem Drainase Perkotaan	1.730.536.000	Kab. Bulukumba	DAU	60 Sistem Drainase Perkotaan	1.954.122.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan								
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	950.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	60 Sistem Drainase Perkotaan	525.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung pemerintah yang dibangun dan rekomendasi IMB yang terbit	86%	9.236.345.000			86%	6.197.911.650	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang terbangun dan jumlah rekomendasi IMB yang terbit	419 Unit	9.236.345.000			419Unit	6.197.911.650	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400 Dokumen	9.159.535.000	Kab. Bulukumba	DAU	19 Dokumen	6.115.213.650	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 bulan Dokumen	76.810.000	Kab. Bulukumba	DAU	400 Dokumen	82.698.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	100%	51.070.431.000			100%	65.787.522.652	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik	142 km	51.070.431.000			190km	65.787.522.652	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan								
						Panjang Jalan yang Dibangun	0,25 KM	0	Kab. Bulukumba	DAU	36 KM	1.050.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan								
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi	40 KM	32.442.877.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	26 KM	44.198.061.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	15 KM	7.677.067.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	25 KM	14.262.093.300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan								
						Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	4 Jembatan	0	Kab. Bulukumba	DAU	4 Jembatan	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan								
						Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan	5.695.766.000	Kab. Bulukumba	DAU	20 Jembatan	2.032.066.002	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.211,52 KM	15.835.000	Kab. Bulukumba	DAU	3 KM	177.801.750	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan								
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	5.238.886.000	Kab. Bulukumba	DAU	50 KM	3.517.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja trampil yang bersertifikat	100%	45.234.300			100%	81.619.125	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja trampil yang dilatih	100 orang	35.772.300			100orang	51.718.275	
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	35.772.300	Kab. Bulukumba	DAU	100 Orang	51.718.275	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan laboratorium dan dokumen yang diuji	7 Unit	9.462.000			7Unit	29.900.850	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	9.462.000	Kab. Bulukumba	DAU	7 Dokumen	29.900.850	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah dokumen penataan ruang yang hasilkan	100%	254.144.500			100%	236.354.475	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan ruang yang hasilkan	3 Dokumen	202.064.500			3Dokumen	210.104.475	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	202.064.500	Kab. Bulukumba	DAU	3 Dokumen	210.104.475	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pengawasan dan koordinasi yang dilakukan	100%	52.080.000			-	26.250.000	
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang								
						Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	52.080.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	26.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
X					NON URUSAN			8.189.148.487				9.288.030.374	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.189.148.487				9.288.030.374	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	100%	8.189.148.487			100%	9.288.030.374	
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dihasilkan dan dievaluasi	63 Dokumen	201.093.400			66Dokumen	219.568.860	
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	201.093.400	Kab. Bulukumba	DAU	50 Dokumen	219.568.860	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7.988.055.087			100%	8.595.961.514	
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/ bulan	7.988.055.087	Kab. Bulukumba	PAD, DAU	98 Orang/ bulan	8.595.961.514	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang barang milik daerah yang diadakan	27 Unit	0			27Unit	472.500.000	
X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	2 Unit	472.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba			9.623.914.567				13.036.724.575	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.625.559.167				12.419.011.569	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			5.625.559.167				12.419.011.569	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"	100%	3.969.832.967			100%	5.303.280.144	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"	34 Dokumen	37.369.300			34Dokumen	135.683.552	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen Dokumen	21.204.100	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	30 Dokumen	64.283.212	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34 Dokumen	16.165.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	4 Dokumen	71.400.340	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum,Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	12 Bulan	2.906.431.487			12Bulan	3.941.882.541	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	2.781.794.887	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DBH, DAU	30 Orang/ bulan	3.684.451.686	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	29.077.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DBH, DAU	1 Dokumen	185.844.175	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	73.281.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DBH, DAU	1 Dokumen	65.593.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	22.277.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	1 Laporan	5.993.680	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim dan Bimbingan Teknis	2 Orang	40.065.000			2Orang	73.886.000	
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	35.065.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Orang	57.386.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	5.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	3 Orang	16.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	287.146.900			12Bulan	542.648.986	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.003.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	12 Paket	6.565.735	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	69.422.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Paket	165.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4.959.500	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	12 Paket	28.600.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	73.079.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	1 Paket	110.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.229.600	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DBH	1 Paket	12.483.251	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	108.452.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DBH	12 Laporan	220.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	23.262.500			15Unit	400.235.000	
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	23.162.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Unit	345.235.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	15 Unit	55.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	569.499.780			12Bulan	105.270.000	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.699.780	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Laporan	78.870.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	457.800.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	12 Laporan	26.400.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	106.058.000			12Bulan	103.674.065	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	67.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	12 Unit	77.054.065	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	38.558.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	30 Unit	26.620.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak Huni dan kawasan kumuh	100%	438.757.000			100%	2.827.329.725	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen/Database Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota"	1 Dokumen	400.000			1Dokumen	246.729.725	
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani								
						Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Dokumen	5.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana								
						Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Dokumen	77.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus								
						Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Dokumen	55.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	109.229.725	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat Korban bencana atau Relokasi Program Pemerintah	100%	200.000			-	203.500.000	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana								
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Orang	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	5 Orang	38.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	5 Orang	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	5 Orang	165.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat Korban bencana atau Relokasi Program Pemerintah	1 Paket	437.457.000			1Paket	1.711.600.000	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Unit Rumah	257.257.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	20 Unit Rumah	5.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana								
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	100.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	15 Unit Rumah	5.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	13 Rumah Tangga	20.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	13 Rumah Tangga	220.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	15 Rumah Tangga	10.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	15 Rumah Tangga	655.600.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota								
						Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	50.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	1 Unit Rumah	275.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
						Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	5 Unit Rumah	275.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6 Unit Rumah	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	6 Unit Rumah	275.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100%	200.000			-	363.000.000	
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Laporan	88.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.05	0003	Pembangunan Rumah Khusus								
						Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	2 Unit	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	2 Unit	275.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	400.000			-	275.000.000	
1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik								
						Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Dokumen	55.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Laporan	33.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	100.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Sistem Informasi	165.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.06	0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan								
						Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	1 Dokumen	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Dokumen	22.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	100%	100.000			-	27.500.000	
1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)								
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	1 Laporan	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Laporan	27.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Program Permukiman dan Permukiman Kumuh Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	100 % 94,42 %	570.000.000			94,66% 94,66% 94,66% 100%	3.403.125.000	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Pencegahan Timbulnya Kawasan Kumuh Baru	1 Dokumen	200.000			1Dokumen	27.500.000	
1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik								
						Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Dokumen	5.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Laporan	22.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen dan database Penetapan lokasi permukiman kumuh	1 Dokumen	300.000			1Dokumen	101.200.000	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP								
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Dokumen	33.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh								
						Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Kelompok Masyarakat	7.700.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh								
						Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	100.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Dokumen	60.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	92%	569.500.000			92%	3.274.425.000	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	568.900.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	40 Unit Rumah	918.027.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka Kab. Bulukumba	PAD, DAU	1 Dokumen	5.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh								
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Laporan	22.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh								
						Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Dokumen	5.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh								
						Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	10 Ha	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	10 Ha	1.333.398.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
						Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50 Unit	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	50 Unit	880.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh								
						Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	10 Ha	110.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau serta	94%	300.000			-	99.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	92%	300.000			-	99.000.000	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 Unit Rumah	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Unit Rumah	55.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru								
						Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	1 Unit	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Unit	38.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Orang	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Orang	5.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	100%	646.669.200			100%	786.276.700	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perencanaan dan Ketersediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100%	646.669.200			100%	786.276.700	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	175.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	1 Dokumen	165.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi	9.999.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	100 Lokasi	181.276.700	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
						Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	5 Lokasi	461.570.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	5 Lokasi	275.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan								
						Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	1 Lokasi	165.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.998.355.400				617.713.006	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			3.998.355.400				617.713.006	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	100%	100.000.200			100%	11.000.000	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	100%	100.000.200			100%	11.000.000	
2	10	04	2.01	0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota								
						Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	100.000.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	10 Berita Acara	11.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tersedianya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum	100%	3.673.355.000			100%	595.713.006	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum	15 Persil	3.673.355.000			15Persil	595.713.006	
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	3.673.355.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	14 Dokumen	595.713.006	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terlaksananya Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Terwujudnya Pengelolaan Tanah Kosong, dan Terwujudnya Pengelolaan Izin Lokasi	100%	225.000.200			100%	11.000.000	
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	"Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah (PEMDA) yang sudah Terbit dan Izin Lokasi"	100%	225.000.200			100%	11.000.000	
2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah								
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	225.000.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	1 Dokumen	11.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bulukumba			2.820.198.099				3.898.566.328	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.820.198.099				3.898.566.328	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.820.198.099				3.898.566.328	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPBD)	100%	1.799.400.099			100%	2.408.066.328	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	27.336.600			-	62.500.000	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	27.336.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	4 Dokumen	55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	7.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan	100%	1.564.117.699			100%	1.789.700.000	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	1.409.407.699	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	12 Orang/ bulan	1.650.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	154.710.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	12 Dokumen	132.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Dokumen	7.700.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	0			-	5.500.000	
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	-	DAU	2 Laporan	5.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	28.702.800			12Bulan	66.000.000	
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.577.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	12 Dokumen	11.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	22.125.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	6 Orang	55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100%	102.353.400			100%	242.366.328	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Paket	5.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.762.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	12 Paket	16.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	76.591.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	12 Laporan	220.366.328	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0			100%	44.000.000	
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	5 Unit	44.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	40.455.200			100%	71.500.000	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.090.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	44.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.364.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	12 Laporan	27.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	36.434.400			100%	126.500.000	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	36.434.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	5 Unit	99.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	22.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	5.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100%	1.020.798.000			100%	1.490.500.000	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	330.000.000			100%	363.000.000	
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	30.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	100 Orang	33.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	300.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	1 Dokumen	330.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100.000.000			100%	258.500.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	10 Unit	55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang	66.884.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	50 Orang	55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	99.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 laporan	22.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	33.116.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Kawasan	27.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	546.547.000			100%	720.500.000	
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas								
						Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	5.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	546.547.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DBH	2 Dokumen	660.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	20 Orang	22.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	20 Orang	33.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	44.251.000			100%	148.500.000	
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	22.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	50 Orang	22.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 Kegiatan	44.251.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH, DAU	12 Kegiatan	33.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota								
						Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	22.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota								
						Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Dokumen	38.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	11.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Bulukumba			11.907.831.002				15.866.256.602	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.907.831.002				15.866.256.602	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11.907.831.002				15.866.256.602	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Satpol, Damkar dan Penyelamatan)	100%	5.709.196.202			100%	7.875.203.917	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satpol PP dan Damkar Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol.PP dan Damkar	100 % 100 %	68.234.600			100%	100.235.990	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	68.234.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	68.458.280	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	5.345.285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	5.345.285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.048.285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	5.348.285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Laporan	5.345.285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	4 Laporan	5.345.285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP dan Damkar Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP dan Damkar	100 % 100 %	4.971.147.852			100%	5.325.313.265	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58/ 14 Orang/ bulan	4.893.466.652	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Orang/ bulan	5.230.294.550	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.780.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	71.346.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.921.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Laporan	5.413.430	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.980.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	12.914.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	5.345.285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100 % 100 %	0			100%	29.158.855	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	5.345.285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.345.285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	2 Laporan	5.345.285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Laporan	13.123.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	44.250.000			100%	269.676.000	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	536 Paket	132.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	7.392.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	44.250.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	7 Orang	115.434.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	20 Orang	9.900.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	7 Orang	4.950.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar Terpenuhinya Pengadministrasian Umum Satpol.PP dan Damkar	100 % 100 %	91.914.950			100%	179.254.887	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Paket	2.713.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Paket	2.141.975	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Paket	3.511.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	24.050.150	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	0 Paket	25.486.073	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.538.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Paket	9.944.275	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	1.188.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	4 Laporan	3.752.364	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59.326.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	130.517.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Kantor Satpol PP dan Damkar Terpenuhinya Pengadaan Barang Kantor Satpol.PP dan Damkar	100 % 100 %	20.478.800			100%	1.195.205.985	
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	542.253.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	1 Unit	584.339.025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	9 Unit	19.270.680	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.478.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	4 Unit	22.722.480	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	4 Unit	15.620.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	5.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	5.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang Pelayanan Kantor Satpol PP dan Damkar Terpenuhinya jasa Penunjang Pelayanan Kantor Satpol.PP dan Damkar	100 % 100 %	49.140.000			100%	69.833.335	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	3.300.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.140.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	64.614.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	1.919.335	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Kantor Satpol PP dan Damkar Terpeliharanya Barang Milik Daerah Kantor Satpol.PP dan Damkar	100 % 100 %	464.030.000			100%	706.525.600	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	10.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	22.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	449.970.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	18 Unit	511.352.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.060.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	8 Unit	8.173.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	15 Unit	5.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	77.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	82.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100%	2.934.333.000			100%	3.414.848.635	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Situasi yang aman dan tentram serta kondusif dalam wilayah Kabupaten Bulukumba	100%	2.463.100.000			100%	2.899.116.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	73.700.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	13.860.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia								
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Orang	8.316.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	3.850.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan								
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 laporan	82.280.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa								
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	2.463.100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	2.709.410.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah								
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	3.850.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Unit	3.850.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terciptanya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba	100%	465.571.500			100%	511.882.635	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 Laporan	100.374.700	Kab. Bulukumba	DBH	2 Laporan	110.412.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah								
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	200.556.000	Kab. Bulukumba	DBH	12 Laporan	220.365.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	164.640.800	Kab. Bulukumba	DBH	2 Laporan	181.104.935	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terciptanya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	5.661.500			100%	3.850.000	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS								
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	5.661.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	3.850.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM), Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	3.264.301.800			100%	4.576.204.050	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Bulukumba	100%	3.130.385.900			100%	4.385.115.900	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	722.700.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	3.125.720.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	3.419.297.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	6.600.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	5.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	55.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran								
						Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Orang	11.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	4.665.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Unit	165.018.700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terpenuhinya Peralatan pencegahan kebakaran	100%	0			100%	7.700.000	
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	2 Dokumen	3.850.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								
						Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	14 Dokumen	3.850.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	0			100%	3.850.000	
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran								
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	3.850.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	133.915.900			100%	167.658.150	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat								
						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	133.915.900	Kab. Bulukumba	DAU	1 Orang	147.308.150	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	10 Desa/ Kelurahan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Desa/ Kelurahan	16.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana								
						Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Dokumen	3.850.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlakssananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	0			100%	11.880.000	
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia								
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	11.880.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
					Dinas Sosial Kab. Bulukumba			5.765.086.553				7.619.724.592	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.765.086.553				7.619.724.592	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.765.086.553				7.619.724.592	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Sosial)	100%	2.904.436.153			100%	4.099.099.965	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	19.179.200			100%	59.614.888	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	14.827.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	8 Dokumen	26.379.100	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.250.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	6 Laporan	13.853.788	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.101.700	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	12 Laporan	19.382.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Kesejahteraan ASN, dan Peningkatan sistem dan capaian Laporan Keuangan	100%	2.366.727.503			100%	2.592.631.981	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	2.310.847.503	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD, DAU	22 Orang/ bulan	2.427.631.981	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.880.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	410 Dokumen	148.500.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	1 Laporan	16.500.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja, Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai/ASN	100%	80.920.000			100%	114.664.000	
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	80.920.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	4 Orang	89.012.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	18 Orang	25.652.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	131.809.450			100%	270.052.966	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.273.650	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	1 Paket	3.214.560	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	21.400.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	8 Paket	49.911.366	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.614.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	1 Paket	7.920.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.489.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	1 Paket	33.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	2.100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	1 Paket	6.173.640	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	7.143.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	4 Laporan	9.929.700	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	82.788.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	53 Laporan	159.903.700	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berupa kendaraan roda dua dan meubeleur kantor	100%	0			100%	618.152.700	
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	- Unit	535.652.700	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	- Unit	55.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	10 Unit	27.500.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meninkatnya Jasa dan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	278.200.000			100%	315.270.230	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.760.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Laporan	49.686.230	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	241.440.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	2 Laporan	265.584.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah	100%	27.600.000			100%	128.713.200	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	21.750.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	13 Unit	94.743.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5.850.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	18 Unit	5.830.000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	28.140.200	DINAS SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	98%	930.240.000			98%	813.041.900	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kemampuan, Keahlian, Keterampilan, Kesejahteraan serta Potensi Sumber Daya Pekerja Sosial dan Kelembagaan Sosial Meningkatnya Kemampuan, Keahlian,Keterampilan, Kesejahteraan serta Potensi Sumber Daya Pekerja Sosial dan Kelembagaan Sosial	98 % 100 %	930.240.000			100%	813.041.900	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Orang	643.880.000	Kab. Bulukumba	PAD, DBH, DAU	53 Orang	717.266.000	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	31.574.000	Kab. Bulukumba	PAD, DBH, DAU	10 Orang	44.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	254.786.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	17 Lembaga	38.575.900	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)								
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Sertifikat	0	Kab. Bulukumba	DAU	8 Sertifikat	13.200.000	DINAS SOSIAL
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	100%	520.621.500			100%	664.433.605	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Layanan Perlindungan Rehabilitasi Sosial dan Kesejahteraan PMKS (Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) diluar Panti Sosial.	98%	399.914.000			100%	452.118.205	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	145.312.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	100 Orang	126.180.010	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang								
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	9.513.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	220 Orang	33.319.990	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	87.891.500	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	50 Orang	77.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.694.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	20 Orang	8.728.500	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	8.630.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	20 Orang	26.185.500	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	51.984.500	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	50 Orang	70.497.625	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak								
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	8.386.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	10 Orang	6.040.540	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	3.992.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	10 Orang	6.040.540	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.177.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	15 Orang	20.075.000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.502.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	10 Orang	17.457.000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	16.260.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	10 Orang	15.186.600	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	31.572.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	8 Orang	45.406.900	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial	98%	120.707.500			100%	212.315.400	
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	65 Orang	83.270.000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	10 Orang	5.500.000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	25 Orang	37.984.100	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan								
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	70.707.500	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	15 Orang	85.561.300	DINAS SOSIAL
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Jumlah PMKS yang Tervalidasi dalam data terpadu DTKS dan SIKS-NGPersentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	98%	393.000.000			98%	1.005.400.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Meningkatkan Layanan Penjangkauan, Rujukan, dan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Meningkatnya Layanan Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100 % 100 %	0			100%	27.500.000	
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar								
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	7 Orang	27.500.000	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Layanan dan Pengelolaan data Fakir Miskin dan PMKS, serta Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keluarga fakir Miskin dan PMKS	100%	393.000.000			100%	977.900.000	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	136 Keluarga	20.230.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH, DAU	30 Keluarga	181.500.000	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Keluarga	128.400.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	50 Keluarga	352.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat								
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	244.370.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	70 Orang	444.400.000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100%	948.934.500			100%	732.640.950	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Bantuan Logistik Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	357.874.500			100%	223.700.950	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	120.545.000	Kab. Bulukumba	DAU	60 Orang	145.859.450	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	13.550.000	Kab. Bulukumba	DAU	60 Orang	16.395.500	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi								
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit	121.583.500	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	50 Unit	16.973.000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	52.750.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	50 Orang	27.500.000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial								
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	49.446.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	50 Orang	16.973.000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemamuan Keterampilan Petugas dan Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Bencana Alam dan Sosial	100%	591.060.000			100%	508.940.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	591.060.000	Kab. Bulukumba	PAD, DAU	100 Orang	508.940.000	DINAS SOSIAL
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara	100%	67.854.400			100%	305.108.172	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Menengkatnya Pelestarian Taman Makam Pahlawan, Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan dan KSN	4 Buah	67.854.400			4Buah	305.108.172	
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	- Dokumen	165.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	67.854.400	Kab. Bulukumba	DAU	4 Makam	140.108.172	DINAS SOSIAL
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba			13.994.963.434				35.300.296.581	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.686.790.686				28.673.494.600	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			8.686.790.686				28.673.494.600	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	100%	950.703.916			100%	5.768.310.600	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Dokumen 38 Dokumen	58.080.000			38Dokumen	125.600.000	
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	58.080.000	Kab. Bulukumba	DAU	8 Dokumen	53.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	2 Dokumen	8.800.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Dokumen	8.800.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	6.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Dokumen	5.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	30 Laporan	18.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	100.125.400			100%	413.775.000	
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	90.640.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	391.775.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	9.485.400	Kab. Bulukumba	DAU	5 Laporan	22.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	0			-	95.000.000	
2	11	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah								
						Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim III Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 Orang 0 %	0			0%	115.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	0 Orang	90.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	0 Orang	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Persentase Pemenuhan administrasi umum	100 % 100 %	125.234.250			100%	586.500.000	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.007.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Paket	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Paket	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.701.250	Kab. Bulukumba	DAU	3 Paket	95.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.124.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Paket	7.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	24 Dokumen	4.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70.401.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	460.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan kebutahan barang milik daerah	100 % 100 %	143.477.250			100%	681.135.600	
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	1 Unit	495.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	4 Unit	35.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	143.477.250	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	10 Unit	151.135.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 % 100 %	451.277.016			100%	3.509.200.000	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	4.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	154.737.016	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	280.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	296.540.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Laporan	3.225.200.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 % 12 Bulan	72.510.000			100%	242.100.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	40.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	5 Unit	71.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	28.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	9 Unit	108.100.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.510.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Unit	13.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	95%	0			95%	165.000.000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH	2 Dokumen	0			2Dokumen	165.000.000	
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	5 Dokumen	165.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota	22,81%	970.173.170			22,81%	5.308.184.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Iklim yang dibentuk untuk menjaga Kerusakan Lingkungan Akibat Perubahan Iklim	23 Lokasi	938.173.170			23Lokasi	4.918.184.000	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	1.600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	153.732.800	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	489.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	03	2.01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota								
						Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Unit	600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota								
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	784.440.370	Kab. Bulukumba	DAU	11 Dokumen	2.229.184.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Data Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bulukumba	6 Air sungai dan 5 air limbah sumber pencemar	32.000.000			6Air sungai dan 5 air limbah sumber pencemar	90.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat								
						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan	32.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	11 Laporan	90.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Terahibilitasinya kawasan Pantai Lahan Kritis	20000 Batang	0			20000Batang	300.000.000	
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi								
						luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	120 Ha	0	Kab. Bulukumba	DAU	120 Ha	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari	95%	634.777.000			95%	950.000.000	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Taman Kehati dan TAHURA yang dikelolah dengan baik	95%	634.777.000			100%	950.000.000	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Ha	634.777.000	Kab. Bulukumba	DAU	25 Ha	800.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	105 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	105 Unit	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	100%	72.229.000			100%	137.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	persentase limbah B3 yang dkendalikan dengan baik	48 Pasyankes dan Perbengkelan	72.229.000			48Pasyankes dan Perbengkelan	137.000.000	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3								
						Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	72.229.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	48 Laporan	137.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin K3Presentase Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan HidupPersentase Ketersediaan Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Dan Peningkatan 10 Kecamatan Tentang Upaya Pengendalian Kerusakan Serta Status Lingkungan Hidup Daerah Setiap Tahun	95%	31.070.000			95%	110.000.000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan dan Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin LH dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	95%	31.070.000			100%	110.000.000	
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 % Badan Usaha	31.070.000	Kab. Bulukumba	DAU	100 % Badan Usaha	110.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	5.256.000			100%	55.000.000	
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Presentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH	100%	5.256.000			100%	55.000.000	
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH								
						Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	12 Dokumen	5.256.000	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	1 Dokumen	55.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat	100%	289.472.000			100%	265.000.000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengetahuan masyarakat di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	30 Sekolah	289.472.000			30Sekolah	265.000.000	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup								
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15 Dokumen	257.634.000	Kab. Bulukumba	DAU	30 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	220 Orang	31.838.000	Kab. Bulukumba	DAU	220 Orang	65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat								
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	50 Lembaga	0	Kab. Bulukumba	DAU	50 Lembaga	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	5.455.000			100%	85.000.000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Presetase Tindak lanjut Pengaduan	20 Pengaduan	5.455.000			20Pengaduan	85.000.000	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota								
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	100 Pengaduan	5.455.000	Kab. Bulukumba	DAU	20 Pengaduan	85.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Sampah Yang Terkelolah	100%	5.727.654.600			100%	15.830.000.000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	% Pemenuhan Sampah yang terkelolah	100%	5.727.654.600			100%	15.830.000.000	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	55.177.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	10 Kelompok	65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	95.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	10 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	10 Unit	3.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota								
						Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah								
						Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	62 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	62 Unit	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan								
						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	400000 Ton	3.180.840.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	400000 Ton	4.614.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah								
						Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	1500 Ton	0	Kab. Bulukumba	DAKF	47.756,60 Ton	6.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional								
						jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	20000 Ton	2.491.637.600	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Gantorang, Taccorong	PAD, DAU	47.756,60 Ton	1.256.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			892.522.200				1.535.000.000	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			892.522.200				1.535.000.000	
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana	100%	892.522.200			100%	1.535.000.000	
3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Terjaganya Kelestarian Sumber daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan TAHURA dikecamatan Bt.Bahari	100%	892.522.200			100%	1.535.000.000	
3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota								
						Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	6 Desa	0	Kab. Bulukumba	DAU	4 Desa	310.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	2 Dokumen	450.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota								
						Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	3475 Ha	892.522.200	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	3475 Ha	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	04	2.01	0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota								
						Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	3475 Ha	0	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	3475 Ha	375.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
X					NON URUSAN			4.415.650.548				5.091.801.981	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			4.415.650.548				5.091.801.981	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	100%	4.415.650.548			100%	5.091.801.981	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	4.414.182.048			100%	5.081.801.981	
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	4.414.182.048	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Orang/ bulan	5.081.801.981	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Persentase Pemenuhan administrasi umum	100 % 100 %	1.468.500			100%	10.000.000	
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.468.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Paket	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba			4.813.279.252				8.852.250.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.813.279.252				8.852.250.000	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.813.279.252				8.852.250.000	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	100%	3.940.982.052			100%	6.741.000.000	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra, renja, SOP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKT, Sirup, dan IKU.Tersusunnya RKATersusunnya RKA-PTersusunnya DPATersusunnya DPA-PTersusunnya Laporan KinerjaTersusunnya laporan bulanan, triwulan dan semester serta laporan evaluasi renja, LPPD dan Sensus BMD	100%	18.812.000			100%	79.500.000	
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6.186.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	10 Dokumen	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.915.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	2 Dokumen	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.712.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	1 Dokumen	12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.725.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	1 Laporan	6.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.273.200	Kab. Bulukumba	DBH	20 Laporan	6.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASNLancarnya administrasi pelaksanaan Tugas ASNLancarnya penatausahaan keuangan SKPDLancarnya penyusunan akuntansi SKPDTersusunnya laporan akhir tahunTersedianya bahan tanggapan pemeriksaan.Tersusunnya laporan keuangan secara berjenjangTersusunnya laporan akhir tahun	100%	2.639.368.162			100%	2.592.500.000	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ bulan	2.581.705.762	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	33 Orang/ bulan	2.490.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.130.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.328.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	1 Laporan	7.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.204.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	1 Dokumen	6.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Laporan	7.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya RKBMD, Tersedianya laporan BMD, Terlaksananya penatausahaan BMD	100%	0			100%	52.000.000	
2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	2 Dokumen	17.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	2 Laporan	17.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Laporan	18.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya sapras kedispilinan pegawai, Tersedianya pakaian dinas, Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi pegawai, Terlaksananya sistem informasi kepegawaian, Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tupoksi, terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan, Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	0			100%	205.000.000	
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Paket	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	18.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	3 Orang	75.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	5 Orang	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	10 Orang	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor, Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, Tersedianya bahan logistik kantor., tersedianya barang cetak dan penggandaan, Tersedianya bahan bacaan, Tersedianya makanan dan minuman tamu kantor, Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis, Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	100%	514.745.700			100%	1.398.000.000	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.642.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	1 Paket	9.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Paket	250.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.927.300	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	1 Paket	8.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	472.297.400	Kab. Bulukumba	DAU	1 Paket	550.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.279.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	1 Paket	75.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	7.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Laporan	8.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.600.000	Kab. Bulukumba	DBH	12 Laporan	400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Dokumen	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	55.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Tersedianya Kendaraan dinas operasional/ lapangan, Tersedianya Mebel, Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, Tersedianya aset tetap lainnya, Tersedianya Gedung Kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya"	100%	501.292.750			100%	1.512.000.000	
2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	-	1 Unit	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	5 Unit	57.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	65.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	501.292.750	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD	30 Unit	1.135.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	2 Unit	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Tersedianya Jasa Surat menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa pelayanan umum kantor"	100%	184.003.440			100%	502.000.000	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Laporan	7.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	128.803.440	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	320.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	2 Laporan	75.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.200.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan beserta pembayaran pajaknya, Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional beserta pembayaran pajaknya, Terpeliharanya mebel kantor., Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Tersedianya pemeliharaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	82.760.000			100%	400.000.000	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	20.700.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	4 Unit	75.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	22.920.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	7 Unit	75.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	26 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	26 Unit	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	39.140.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	20 Unit	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk	100%	587.843.200			100%	970.850.000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kecamatan yg mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	587.843.200			100%	918.350.000	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	9.366.000	Kab. Bulukumba	DBH	12 Dokumen	42.350.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	65.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk								
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	150 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	150 Orang	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	578.477.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	700.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	38.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk								
						Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	38.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.	12 bulan	0			12bulan	27.500.000	
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	27.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	terbinanya dan diawasinya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Bulan	0			12Bulan	25.000.000	
2	12	02	2.04	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	12.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk								
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	12.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.	95%	242.158.800			95%	889.400.000	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan, analisis dokumen kependudukan	100%	242.158.800			100%	826.000.000	
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil								
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan	230.460.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Layanan	210.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	12 Dokumen	11.698.800	Kab. Bulukumba	DBH	12 Dokumen	16.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan								
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	12 Paket	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Paket	600.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertikal terkait, koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil.	100%	0			100%	28.400.000	
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam								
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Laporan	12.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	10 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	10 Laporan	16.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya supervisi bersama dengan instansi vertikal.	100%	0			100%	35.000.000	
2	12	03	2.03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil								
						Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Laporan	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah saluran sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	4 Buah	42.295.200			4 Buah	240.500.000	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan	100%	25.866.200			100%	78.000.000	
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	10 Dokumen	13.062.800	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	10 Dokumen	13.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12.803.400	Kab. Bulukumba	DBH	1 Dokumen	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	5 Laporan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pelaporan penyelenggaraan adminduk.	100%	0			100%	45.000.000	
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	50 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	50 Dokumen	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	100%	16.429.000			100%	117.500.000	
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	17.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	12.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	11.764.000	Kab. Bulukumba	DBH	4 Laporan	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi								
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan	4.665.000	Kab. Bulukumba	DBH	12 Laporan	18.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pesentase buku agregat kependudukan yang diterbitkan per tahun	100 persen	0			100 persen	10.500.000	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	tersusunnya dokumen Profil Kependudukan	100%	0			100%	10.500.000	
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Dokumen	6.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain								
						Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	4.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bulukumba			5.952.167.267				113.995.842.221	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.952.167.267				113.995.842.221	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.952.167.267				113.995.842.221	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	100%	3.571.716.699			100%	4.607.342.221	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	44.273.000			100%	20.950.000	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	39.844.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Dokumen	11.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.429.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	4.950.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	3.169.009.399			100%	3.440.592.221	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	3.099.509.799	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	33 Orang/ bulan	3.332.592.221	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.262.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Dokumen	88.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.237.200	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	15.850.000			100%	26.500.000	
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.850.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Laporan	16.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.320.000			100%	202.500.000	
2	13	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	1.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	45 Paket	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	45 Dokumen	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	45 Dokumen	1.320.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	45 Dokumen	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Orang	82.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	33 Orang	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98.920.100			100%	292.300.000	
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	30 Paket	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	DAU	3 Paket	16.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.585.100	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	3.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	44.999.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	0 Paket	71.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	5 Paket	5.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	5.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.336.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	3 Dokumen	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	34.674.200			100%	275.000.000	
2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	33.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	1.174.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	18 Unit	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	33.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	10 Unit	187.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	163.950.000			100%	240.000.000	
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.750.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	160.200.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	220.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan	100%	42.720.000			100%	109.500.000	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	17.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	8 Unit	33.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	22.800.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	6 Unit	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	33 Unit	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	2.920.000	Kab. Bulukumba	DAU	68 Unit	16.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	70%	1.000.000			70%	66.000.000	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik	70%	1.000.000			80%	66.000.000	
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	90 Desa	1.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	90 Desa	66.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Adanya kerjasama antar desa dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di desa	100%	10.000.000			100%	292.500.000	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	109 Desa	10.000.000			109Desa	292.500.000	
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	25 Dokumen	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	50 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	50 Dokumen	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	10.000.000	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU	4 Dokumen	82.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100%	1.854.340.568			100%	3.010.000.000	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100%	1.854.340.568			100%	3.010.000.000	
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	109 Dokumen	5.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	109 Dokumen	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	121 Dokumen	1.790.340.768	Kab. Bulukumba	PAD, DAU	109 Dokumen	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	109 Orang	2.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	109 Orang	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	109 Dokumen	9.999.800	Kab. Bulukumba	DAU	109 Dokumen	330.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa								
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	5.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	2.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa								
						Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	109 Dokumen	2.500.000	Kab. Bulukumba	DAU	109 Dokumen	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	109 Dokumen	30.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	109 Dokumen	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD								
						Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	170 Orang	2.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	170 Orang	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa								
						Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	109 Desa	5.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	109 Desa	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	2.500.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Dokumen	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terlaksananya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan provinsi	100%	515.110.000			100%	106.020.000.000	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	515.110.000			100%	106.020.000.000	
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	109 Dokumen	5.110.000	Kab. Bulukumba	DAU	109 Dokumen	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	654 Lembaga	100.000.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	654 Lembaga	105.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	5 Dokumen	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50 Laporan	10.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	50 Laporan	275.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	109 Dokumen	400.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	109 Dokumen	550.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Keluarga	85.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bulukumba			13.775.297.692				15.645.781.508	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.775.297.692				15.645.781.508	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			659.160.000				886.600.000	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD	60%	20.000.000			60%	110.000.000	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	69%	20.000.000			65%	110.000.000	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	2 Dokumen	110.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	169.513.000			100%	186.464.300	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	40%	39.040.000			-	42.944.000	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	39.040.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF	5 Dokumen	42.944.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komrehensif	45%	107.138.000			-	117.851.800	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Layanan	107.138.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF	16 Layanan	117.851.800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi	45%	23.335.000			-	25.668.500	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	80 Orang	23.335.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF	80 Orang	25.668.500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga	35%	100.000.000			35%	165.000.000	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pembelajaran keluarga yang terstandarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Persentase layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasiembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	40 % 50 %	100.000.000			40% 60%	165.000.000	
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	12 Dokumen	165.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	750 Nilai	133.160.000			750 Nilai	165.000.000	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha	50 % 750 Nilai	133.160.000			60% 800Nilai	165.000.000	
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	133.160.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	14 Organisasi	165.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	83%	236.487.000			83%	260.135.700	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak	83%	62.460.000			-	68.706.000	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA								
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	75 Orang	62.460.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF	75 Orang	68.706.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang di kuatkan dan dikembangkan di lintas kab/kota	83%	128.342.000			-	141.176.200	
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK								
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	16 Layanan	128.342.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF	16 Layanan	141.176.200	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif	83%	45.685.000			-	50.253.500	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/								
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	105 Orang	45.685.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF	105 Orang	50.253.500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			13.116.137.692				14.759.181.508	
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PPKB, PPPA)	100%	5.415.558.692			100%	6.042.645.658	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, peganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	212.969.000			100%	75.700.000	
2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	170.661.700	Kab. Bulukumba	DAU	4 Dokumen	29.700.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Laporan	11.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	34.307.300	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Laporan	35.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%	4.640.973.802			100%	5.296.638.058	
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	4.535.973.802	Kab. Bulukumba	PAD, DAU	12 Orang/ bulan	5.191.138.058	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Dokumen	100.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	5.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang tersusun	3 Laporan	6.150.000			3Laporan	5.500.000	
2	14	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.150.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	5.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	153.500.000			100%	264.807.600	
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	30.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	7 Paket	35.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.264.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	59.904.680	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.500.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Paket	4.902.920	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	53.736.000	Kab. Bulukumba	DAU	24 Laporan	165.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	325.414.890			100%	345.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	77.634.890	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	75.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	247.780.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	270.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara/ direhabilitasi	100%	76.551.000			100%	55.000.000	
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16.500.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	15.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	60.051.000	Kab. Bulukumba	DAU	4 Unit	40.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk)	100%	381.675.000			100%	552.267.760	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantias penduduk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	10 kecamatan 10 Kecamatan	241.675.000			10kecamatan 10Kecamatan	400.907.760	
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal								
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	5 Satuan Pendidikan	141.675.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK, DAU	5 Satuan Pendidikan	290.907.760	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	10 Dokumen	110.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bahan-bahan dan data untuk pengambilan kebijakan pemetaan pengendalian penduduk yang tersedia Bahan-bahan dan Data untuk pengambilan kebijakan pemetaan pengendalian penduduk yang tersedia	12 bulan 12 Bulan	140.000.000			12Bulan 12bulan	151.360.000	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga								
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	30.000.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	12 Laporan	30.360.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB								
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	110.000.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	12 Dokumen	121.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi Dan Kelembagaan Jaringan KB	100%	4.865.804.000			100%	5.465.858.090	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal yang terlaksana Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Didayagunakan	10 Kecamatan 10 Kecamatan	1.247.600.000			10Kecamatan 10Kecamatan	1.372.360.000	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8 Laporan	160.000.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	4 Laporan	176.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana								
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	556.000.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	10 Laporan	611.600.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	150.000.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	10 Laporan	165.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	181.600.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	2 Dokumen	199.760.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	19 Organisasi	200.000.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	10 Organisasi	220.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	10 Kecamatan	1.057.800.000			10Kecamatan	1.163.580.000	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	68 Orang	408.000.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKKB-BOKB	12 Orang	448.800.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
						Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	649.800.000	Kab. Bulukumba	DAKF	4 Laporan	714.780.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang teregister yang mendapat ketersediaan alat kontrasepsi MKJP	21 Faskes	1.427.154.000			21Faskes	1.572.509.400	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21 Laporan	22.500.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	21 Laporan	24.750.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 Orang	645.478.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	21 Orang	712.665.800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB								
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	738.876.000	Kab. Bulukumba	DAKF	7 Unit	812.763.600	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11 Laporan	20.300.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	900 Laporan	22.330.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah pelayanan KB dan KR bergerak/bakti sosial diwilayah dan sasaran khusus	10 kecamatan	1.133.250.000			10kecamatan	1.357.408.690	
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	200.000.000	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	5 Organisasi	330.833.690	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas								
						Jumlah DASHAT di Kampung KB	45 Unit	660.000.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	45 Unit	726.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas								
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20 Kampung	273.250.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	20 Kampung	300.575.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Jumlah Kecamatan terkait Keluarga Yang Mandiri, Tentram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	100%	2.453.100.000			100%	2.698.410.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlaksana Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana	10 kecamatan 10 Kecamatan	330.000.000			10kecamatan 10Kecamatan	363.000.000	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	19 Unit	180.000.000	Kab. Bulukumba	DAK.NF-BOKB-KB	19 Unit	198.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
						Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100 Orang	150.000.000	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK, DAU	100 Orang	165.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 organisasi	2.123.100.000			4organisasi	2.335.410.000	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
						Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	1.011.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAK.NF-BOKB-KB	10 laporan	1.112.100.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
						Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	1.112.100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAK.NF-BOKB-KB	10 laporan	1.223.310.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba			20.002.550.233				24.391.474.036	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0				33.000.000	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0				33.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti tanggap bencana (Fasilitasi Petugas Reviter dan Tsunami)	95%	0			95%	33.000.000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terpenuhinya pelayanaan pencegahan dan kesiap-siagaan bencana	95%	0			100%	33.000.000	
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana								
						Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	1 Dokumen	33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.002.550.233				24.358.474.036	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			20.002.550.233				24.358.474.036	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ((Dinas Perhubungan)	100%	4.878.726.913			100%	18.510.722.856	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersedianya Dokumen Program SKPD dan Renstra, Lakip.Iku, RKA, DPA, RA, Perjanjian Kinerja SPIP, tersedianya monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD terlaksanya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber PAD melalui Uji Petik.	100 % 5 Dok	7.350.000			100%	43.537.670	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7.350.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	5 Dokumen	43.537.670	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	100%	4.516.139.625			100%	4.262.780.238	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ bulan	4.254.762.025	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD, DAU	51 Orang/ bulan	4.118.210.098	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	153.787.100	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	55.838.640	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	107.590.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	88.731.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	0			100%	16.107.300	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Orang	16.107.300	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengadministrasian umum Dinas Perhubungan	100%	89.952.100			100%	315.278.260	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	70 Paket	4.273.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	9.380.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	2 Paket	176.856.900	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.487.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Paket	43.143.760	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	54.084.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	34 Laporan	91.004.100	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Dinas Perhubungan	100%	0			100%	86.900.000	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	86.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang Pelayanan Dinas Perhubungan	100%	190.682.688			100%	13.669.926.388	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.282.788	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	13.504.686.973	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3.410.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	6.699.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.989.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	158.540.415	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan adminitrasi umum Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan	12 Bulan 100 %	74.602.500			100%	116.193.000	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	16.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	47.320.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Unit	72.193.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.282.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	1 Unit	27.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelengaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C Persentase tersedianya fasilitas penyelengaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	100 % 90 %	15.123.823.320			95% 100%	5.847.751.180	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di kabupaten/Kota yang tersedia Tersedianya perlengkapan jalan di kabupaten/Kota	12 Bulan 100 %	14.121.765.720			100%	3.376.058.324	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	50 Unit	2.553.622.808	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit	868.710.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	150 Unit	375.250.316	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan								
						Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 Unit	13.253.055.720	Kab. Bulukumba	DAU	12 Unit	447.185.200	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan pelayanan dan keberfungsian terminal Tipe C	100%	462.060.000			100%	1.314.425.915	
2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C								
						Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	83 Orang	462.060.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Orang	1.314.425.915	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Terlaksanya pengujian kendaraan bermotor Uji kear Terlaksanya pengujian kendaraan bermotor Uji kear	12 Bulan 100 %	42.064.000			100%	383.379.926	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	6 Unit	110.190.966	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
						Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	4 Laporan	33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 Unit	42.064.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Unit	240.188.960	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya angkutan umum bagi masyarakat, terwujudnya pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan Tersedianya angkutan umum bagi masyarakat, terwujudnya pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan	12 Bulan 100 %	497.933.600			100%	773.887.015	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	342.060.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	518.853.500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit	155.873.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Unit	255.033.515	DINAS PERHUBUNGAN
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bulukumba			3.373.414.892				6.000.878.394	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.848.049.552				5.378.828.394	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.848.047.552				5.288.078.394	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100%	2.848.044.352			100%	3.726.725.744	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	64 Dokumen	0			64Dokumen	50.820.652	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	34.320.652	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	16.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.416.467.532			100%	3.180.564.700	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	2.193.301.032	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD, DAU	12 Orang/ bulan	2.913.056.225	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	24.320.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU, PBH	12 Dokumen	143.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	198.846.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU, PBH	12 Dokumen	110.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	14.508.475	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0			100%	33.000.000	
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Orang	33.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	72.658.000			100%	227.205.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.046.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU, PBH	12 Paket	11.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Paket	27.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Paket	11.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.612.000	Kab. Bulukumba	DAU, PBH	12 Laporan	165.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	12.705.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%	0			100%	88.000.000	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	0 Unit	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Unit	33.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	322.394.020			100%	5.500.000	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	322.394.020	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	5.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	36.524.800			100%	141.635.392	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	10.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU, PBH	12 Unit	27.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	20.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU, PBH	12 Unit	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor								
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Unit	4.300.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU, PBH	12 Unit	7.325.392	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Unit	12.705.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	12 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Unit	26.400.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	2.224.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU, PBH	0 Unit	12.705.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah	100%	160.000.000			100%	846.352.650	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi publik dan terkelolanya opini dan informasi publik melulai media informasi Terlaksananya pengelolaan informasi publik melalui media informasi publik	100 % 100 %	1.600			100%	846.352.650	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik								
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Permohonan	113.201.550	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik								
						Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	12 Persentase	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Persentase	154.861.300	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12 Media	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Media	193.289.800	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik								
						Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	12 Dokumen	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	330.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	12 Orang	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Orang	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	0 % 100 %	1.600			100%	715.000.000	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengelolaan domain dan sub domain milik pemerintah daerah Tersenggaranya sistem dan aplikasi dalam kerangka SPBE	36 Domain 100 %	400			100%	220.000.000	
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa								
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12 Dokumen	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	220.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pengelolaan E-Government/SPBE baik Infrastruktur maupun sistem	100%	1.200			100%	495.000.000	
2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi								
						Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	12 Dokumen	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	220.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Aplikasi	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Aplikasi	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota								
						Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	12 Perangkat Daerah	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Perangkat Daerah	220.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			8.000.000				52.250.000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	800			100 Persen	52.250.000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Statistik Sektoral dengan terlaksananya pengumpulan data dan statistik daerah Tersedianya data statistik sektoral dengan terselengaranya pengumpulan data dan statistik daerah	100 % 100 %	800			100%	52.250.000	
2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral								
						Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	12 Orang	400	Kab. Bulukumba	DAU	12 Orang	24.750.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia								
						Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	27.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			1.200				38.500.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	100 % 36 OPD	120.000.000			36OPD 100%	38.500.000	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tertib Administrasi Pesandian Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	100 % 100 %	800			100%	27.500.000	
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dokumen	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Dokumen	16.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Laporan	11.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	400			-	11.000.000	
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	12 Perangkat Daerah	400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	12 Perangkat Daerah	11.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
X					NON URUSAN			525.365.340				622.050.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			525.365.340				622.050.000	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	100%	525.365.340			100%	622.050.000	
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	44.765.340			100%	127.050.000	
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.765.340	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU, PBH	12 Paket	127.050.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	480.600.000			100%	495.000.000	
X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.520.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU, PBH	12 Laporan	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	472.080.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD, DAU, PBH	12 Laporan	440.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba			7.083.340.317				15.849.605.183	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.917.199.217				15.549.605.183	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			516.959.904				1.639.607.686	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertahun	100%	0			-	56.100.000	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro	100 Persen	0			-	56.100.000	
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro								
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	28.050.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro								
						Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	20 Orang	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	20 Orang	28.050.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi di kabupaten Bulukumba	100%	499.999.904			-	926.475.000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	undefined undefined	499.999.904			-	462.000.000	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	480 Orang	499.999.904	Kab. Bulukumba	DAU	480 Orang	462.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelatihan/sosialisasi	1 Kegiatan	0			-	37.125.000	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Lembaga	37.125.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Produktivitas pada Perusahaan Keci	100%	0			-	427.350.000	
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil								
						Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	9 Perusahaan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	9 Perusahaan	427.350.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	2.24 %	16.960.000			-	541.168.729	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi para penyandang Disabilitas	1 Kegiatan	0			-	74.242.049	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan								
						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	30 Orang	74.242.049	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan informasi pasar kerja online	12 BLN	0			-	374.649.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online								
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1000 Orang	374.649.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulangan pekerja migran di Indonesia	12 BLN	16.960.000			-	92.277.680	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)								
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	16.960.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Orang	92.277.680	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100%	0			-	115.863.957	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)	1 BLN	0			-	52.250.000	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan								
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	10 Perusahaan	52.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan	1 Kegiatan	0			-	63.613.957	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	5 Perkara	40.445.240	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi								
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	23.168.717	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			6.400.239.313				13.909.997.497	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	4.627.071.213			100%	9.713.828.958	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	64.377.000			-	445.442.280	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	47.147.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Dokumen	165.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.050.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.050.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	30.442.280	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.130.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Laporan	50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.021.174.063			-	4.858.704.671	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ bulan	3.953.699.063	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	41 Orang/ bulan	4.349.068.974	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	324.044.655	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	62.740.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Dokumen	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	35.591.042	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.735.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Kalumeme	DAU	12 Laporan	50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera	100%	0			-	319.311.300	
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Orang	133.492.700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	50 Orang	16.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	10 Orang	169.318.600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia	100%	77.114.200			-	1.151.863.912	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	46.417.401	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Paket	330.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.846.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Paket	45.283.652	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	33.466.400	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Paket	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	3 Paket	79.433.957	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Dokumen	5.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	40.801.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Laporan	545.228.902	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Pra saran Yang tersedia	100%	32.738.000			-	1.834.659.650	
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	3 Unit	1.430.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	3 Unit	160.659.650	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	32.738.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	50 Unit	200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	44.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia	100%	395.249.280			-	857.102.000	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	14.300.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.589.280	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	32.802.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	315.660.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	660.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah	100%	36.418.670			-	246.745.145	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	20.650.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	15 Unit	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	3 Unit	8.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	11.360.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	20 Unit	50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.408.670	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Unit	88.495.145	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada	100 Persen	0			100 Persen	346.500.000	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penerbitan Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	100 Persen	0			-	110.000.000	
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Unit Usaha	110.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten/Kota	100 %	0			-	236.500.000	
2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	0	Kab. Bulukumba	DAU	5 Unit Usaha	236.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Yang Dilakukan	76,1 Persen	16.060.100			76,1 Persen	50.000.000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	16.060.100			-	50.000.000	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	290 Unit Usaha	16.060.100	Kab. Bulukumba	DAU	290 Unit Usaha	50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Kategori Sehat	78.3 %	75.000.000			78.3 %	176.000.000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	75.000.000			-	176.000.000	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	267 Unit Usaha	75.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	267 Unit Usaha	66.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan								
						Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	1 Unit Usaha	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit Usaha	110.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan	75 Persen	0			75 Persen	429.334.400	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi yang Wilayah Keanggotan dalam daerah Kabupaten/ Kota	65 Persen	0			-	429.334.400	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	280 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	280 Orang	429.334.400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	3,7 Persen	0			3,7 Persen	1.344.015.339	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100 Persen	0			-	1.344.015.339	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	3330 Unit Usaha	0	Kab. Bulukumba	DAU	3330 Unit Usaha	220.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								
						Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	500 Unit Usaha	0	Kab. Bulukumba	DAU	500 Unit Usaha	82.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	21 Unit Usaha	0	Kab. Bulukumba	DAU	21 Unit Usaha	821.515.339	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro								
						Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	33178 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	33178 Orang	55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro								
						Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	10302 Unit Usaha	0	Kab. Bulukumba	DAU	10302 Unit Usaha	165.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	Persen Persen	1.682.108.000			Persen Persen	1.850.318.800	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	2,74 Persen	1.682.108.000			-	1.850.318.800	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro								
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 Unit Usaha	1.682.108.000	Kab. Bulukumba	DAU	40 Unit Usaha	1.850.318.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			166.141.100				300.000.000	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			166.141.100				300.000.000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN	100%	166.141.100			-	300.000.000	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	166.141.100			-	300.000.000	
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	166.141.100	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Dokumen	300.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba			3.700.131.355				5.274.433.877	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.700.131.355				5.274.433.877	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			3.700.131.355				5.274.433.877	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja)	100%	2.962.979.505			100%	4.271.880.082	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50.126.300			100%	71.796.967	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31.098.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	52.392.967	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.020.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Dokumen	7.524.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.208.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Dokumen	11.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	799.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Laporan	880.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.235.801.647			100%	3.771.474.953	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	2.172.591.747	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Orang/ bulan	3.694.733.453	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.210.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	73.441.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.999.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	3 Laporan	3.300.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0			100%	24.750.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Orang	24.750.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia	100%	124.653.050			100%	102.436.196	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.240.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	4.664.550	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.207.650	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	66.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.101.900	Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Loka	DAU	1 Paket	11.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.913.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Laporan	8.771.646	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.190.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	12.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Pra saran Yang tersedia	100%	0			100%	3.850.000	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	1.100.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	1.650.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	1.100.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia	100%	503.421.808			100%	246.015.220	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	372.251.808	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	126.846.720	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	131.170.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	119.168.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang mendapat Pemeliharaan	100%	48.976.700			100%	51.556.746	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	42.966.700	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	9 Unit	47.156.746	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	2.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.010.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Unit	1.100.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	1.100.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	20%	0			20%	25.997.290	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan Kebijakan Invertaris Penanaman Modal	1 peraturan	0			1peraturan	1.198.890	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								
						Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	1.198.890	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyajian informasi penanaman Modal	125 Buku	0			125Buku	24.798.400	
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	25 Dokumen	19.298.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	5.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	76 Investor	9.982.250			76 Investor	22.246.675	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Terlaksananya Promosi Pontensi Unggulan Daerah Kab.Bulukumba	76 Investor	9.982.250			76Investor	22.246.675	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.982.250	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	11.705.100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	10.541.575	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	100%	124.330.000			100%	287.885.950	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase administrasi Pelayanan Perizinan	12 Bulan	124.330.000			12Bulan	287.885.950	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah								
						Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	1.100.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	23 Pelaku Usaha	120.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	23 Pelaku Usaha	280.014.845	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Pelaku Usaha	2.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko								
						Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5 Kegiatan Usaha	4.330.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	5 Kegiatan Usaha	4.571.105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	500/ 500000 Rp (M)/ Dollar	602.839.600			500/ 500000 Rp (M)/ Dollar	663.123.880	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib administrasi pelayanan Invertasi	76 Investor	602.839.600			76Investor	663.123.880	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya								
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2 Kegiatan Usaha.	90.424.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAK.NF	2 Kegiatan Usaha.	99.467.390	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	12 Pelaku Usaha	331.563.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAK.NF	12 Pelaku Usaha	364.719.620	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal								
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	180.851.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAK.NF	100 Kegiatan Usaha	198.936.870	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	100%	0			100%	3.300.000	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penyajian Informasi data base Perizinan	1 Buku	0			1Buku	3.300.000	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	3.300.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Bulukumba			3.029.192.549				9.715.802.980	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.029.192.549				9.715.802.980	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			2.959.907.149				9.656.088.930	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)	100%	2.450.747.149			100%	9.593.652.243	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keterpaduan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan kinerja tepat waktu KeterpaduanDokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan kinerja tepat waktu	100 % 100 Persen	60.063.200			100%	55.732.600	
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	39.237.600	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	3 Dokumen	32.824.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.554.800	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Dokumen	9.410.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.554.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Dokumen	9.410.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	3.716.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	4.087.600	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji & Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja ASN Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan dan Pengujiaan Verifikasi Keuangan SKPD dan Tersedianya laporan Keungan Akhir tahun	12 Dokumen	1.980.060.853			100%	2.178.066.938	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	1.926.092.853	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	12 Orang/ bulan	2.118.702.138	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51.810.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	56.991.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.158.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Laporan	2.373.800	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 Persen	7.981.000			100%	13.179.100	
2	23	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	7.981.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Orang	13.179.100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi umum Terpenuhinya dokumen administrasi umum	100 % 100 Persen	84.074.900			100%	141.182.389	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.011.700	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	1.122.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.031.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	1.141.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.229.700	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Paket	26.630.890	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	3.850.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	53.302.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	43 Laporan	108.438.249	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengadaan barang milik daerah persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengadaan barang milik daerah	100 % 100 Persen	43.479.300			100%	55.286.000	
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	4.579.300	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	6 Unit	7.700.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	38.900.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	8 Unit	47.586.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 Persen	253.709.696			100%	7.126.225.216	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.189.696	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	6.919.953.216	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	168 Laporan	196.520.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD, DAU	14 Laporan	206.272.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana pemeliharaan barang miliki daerah Terpenuhinya sarana dan prasarana pemeliharaan barang miliki daerah	100 % 100 Persen	21.378.200			100%	23.980.000	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	16.100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	9 Unit	17.710.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.278.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	6.270.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pendudukPresentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan pendudukPersentase Jumlah KCKR daerah yang dihimpun	98%	475.770.500			98%	54.638.457	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan perpustakaan	98%	263.051.000			98%	23.628.275	
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan								
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	6.003.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	38 Perpustakaan	4.332.900	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	120.121.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Perpustakaan	4.332.900	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47 Orang	77.310.200	Kab. Bulukumba	DAU	47 Orang	12.602.975	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan								
						Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	3 Dokumen	8.094.000	Kab. Bulukumba	DAU	3 Dokumen	379.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan								
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	357 Eksemplar	51.522.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	357 Eksemplar	1.980.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembudayaan gemar membaca	100%	212.719.500			100%	31.010.182	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	11 Perpustakaan	114.048.000	Kab. Bulukumba	DAU	11 Perpustakaan	8.451.850	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat								
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	10 Lokus	98.671.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	10 Lokus	22.558.332	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayahnyaPersentase Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialihbahasaPersentase Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya	100%	33.389.500			100%	7.798.230	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan naskah kunomilik daearah kabupaten/kota	100%	31.007.500			100%	6.973.230	
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno								
						Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang	31.007.500	Kab. Bulukumba	DAU	1 Orang	6.973.230	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengembangan kolesksi budaya etnis nusantara	100%	2.382.000			100%	825.000	
2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara								
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	20 Eksemplar	2.382.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	20 Eksemplar	825.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			69.285.400				59.714.050	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terlaksananya Pengumpulan data arsip yang mempunyai nilai informasi, pengolahan dan penyimpanan data base arsip	100%	69.285.400			100%	59.714.050	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100%	69.285.400			100%	59.714.050	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis								
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	37 Berkas	37.562.500	Kab. Bulukumba	DAU	12 Berkas	41.318.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis								
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	37 Berkas	31.722.900	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Berkas	18.395.300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
					Dinas Perikanan Kab. Bulukumba			14.855.815.117				16.469.388.375	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			14.855.815.117				16.469.388.375	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			14.855.815.117				16.469.388.375	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perikanan)	100%	4.885.877.957			100%	5.829.656.269	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen 19 Dokumen	42.526.500			19Dokumen	80.091.000	
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.689.500	Kab. Bulukumba	DAU	2 Dokumen	20.617.850	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	7.150.275	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	7.150.275	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	7.700.275	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	7.700.275	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	14.497.450	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	21.837.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	15.274.600	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji Tunjangan yang dibayarkan Jumlah Gaji Tunjangan yang terbayarkan	12 Bulan 12 Bulan	4.360.261.155			12Bulan	4.872.913.777	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ bulan	4.280.041.155	Kab. Bulukumba	DAU	12 Orang/ bulan	4.735.413.777	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	80.220.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	126.500.000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	11.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan	1 Orang	0			1Orang	55.000.000	
3	25	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Orang	55.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	12 Bulan	177.166.150			12Bulan	310.471.492	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.004.200	Kab. Bulukumba	DAU	12 Paket	3.850.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.722.450	Kab. Bulukumba	DAU	1 Paket	38.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	21.917.500	Kab. Bulukumba	DAU	1 Paket	27.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	3 Dokumen	3.300.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.971.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	16.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.551.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	220.821.492	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	8 Unit	33.543.750			8Unit	59.950.000	
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	10.450.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	33.543.750	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	33.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	16.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	224.890.402			12Bulan	264.000.000	
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.290.802	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	132.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	143.599.600	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	132.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	53 Unit	47.490.000			53Unit	187.230.000	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	33.300.000	Kab. Bulukumba	DAU	39 Unit	110.230.000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.220.000	Kab. Bulukumba	DAU	5 Unit	5.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.700.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	66.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	4.270.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	5.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	53709,90 Ton	6.087.944.500			53709,90 Ton	4.784.232.106	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan Tangkap	53709.90 Ton	5.687.964.500			2dok 56167.56ton	434.000.000	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan								
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	6.722.500	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	44.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap								
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit	350.000.000	-	DAU	55 Unit	385.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap								
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	454 Unit	5.331.242.000	Kab. Bulukumba	DAU	454 Unit	5.000.000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10 Kelompok 200 Orang	399.980.000			3Paket	4.207.232.106	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil								
						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	125 Orang	399.980.000	Kab. Bulukumba	DAU	20 Orang	3.921.232.106	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil								
						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Kelompok	286.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase TPI yang operasional (%) Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap	100 % 100 %	0			100%	110.000.000	
3	25	03	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
						Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	7 Dokumen	38.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
						Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	0	Kab. Bulukumba	DAU	7 Layanan	71.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	120 Rekomendasi	0			120Rekomendasi	11.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT								
						Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	120 Dokumen	5.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT								
						Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	1 Rekomendasi	0	Kab. Bulukumba	DAU	120 Rekomendasi	5.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Pengadaan Kapal	2 Rekomendasi	0			2Rekomendasi	11.000.000	
3	25	03	2.05	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT								
						Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Dokumen	5.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.05	0003	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)								
						Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Rekomendasi	5.500.000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal yang terdaftar	120 Rekomendasi	0			120Rekomendasi	11.000.000	
3	25	03	2.06	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT								
						Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	120 Dokumen	5.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.06	0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)								
						Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Rekomendasi	5.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kontribusi PRDB sektor perikanan (%) Peningkatan produksi perikanan budidaya Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya,Cakupan Bina Kelompok Perikanan	12,6 % 190.793 Ton 86 Persen	3.490.267.500			86Persen 100% 100% 192.700Ton 100% 86Persen 86Persen	4.557.500.000	
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	2 Rekomendasi	0			2Rekomendasi	11.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	04	2.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								
						Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Rekomendasi	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Rekomendasi	5.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Rekomendasi	5.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Pembudidaya yang memperoleh kegiatan pemberdayaan Jumlah Pembudidaya yang memperoleh kegiatan pemberdayaan Jumlah Saprodi Budidaya	12 Kelompok 100 Orang 1 Paket 1 Paket 4 kali 180 Orang 70 Orang 3 Paket	399.988.500			100Orang 1Paket	176.000.000	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil								
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3 Kelompok	0	Kab. Bulukumba	DAU	3 Kelompok	33.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3 Kelompok	0	Kab. Bulukumba	DAU	3 Kelompok	33.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	399.988.500	Kab. Bulukumba	DAU	2 Kelompok	110.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	2 Rekomendasi	0			2Rekomendasi	11.000.000	
3	25	04	2.03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Rekomendasi	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Rekomendasi	5.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Rekomendasi	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Rekomendasi	5.500.000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) Jumlah Saprodi Budidaya Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya	90 Orang 3 kali 6 Kelompok 3 Paket 6 Paket	3.090.279.000			3kali 6Kelompok	4.359.500.000	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74 Unit	1.760.279.000	Kab. Bulukumba	DAU	3 Unit	2.837.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	33.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 Unit	1.330.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	14 Unit	1.401.500.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat								
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	33.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	55.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	90%	391.725.160			90%	1.298.000.000	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Usaha Mikro	1 kali	0			1kali	110.000.000	
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko								
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Unit Usaha	110.000.000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembinaan Usaha Pengolahan yang dilaksanakan	1 Kali	391.725.160			1kali 1kali	1.188.000.000	
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	8 Pelaku Usaha	391.725.160	Kab. Bulukumba	DAU	1 Pelaku Usaha	1.188.000.000	DINAS PERIKANAN
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Bulukumba			19.922.937.417				93.105.327.138	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.687.730.617				71.217.309.983	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			17.687.730.617				71.217.309.983	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Kegiatan	100%	6.507.676.817			100%	11.153.561.983	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencenaan yang disusun	20 dok	164.891.300			20dok	8.000.000	
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	164.891.300	Kab. Bulukumba	DAU	10 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	8.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	20 Laporan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase realisasi keuangan	100%	5.027.481.877			100%	9.022.294.162	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ bulan	4.969.251.877	Kab. Bulukumba	DAU	32 Orang/ bulan	8.646.980.762	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	52.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	58.230.000	Kab. Bulukumba	DAU	8 Dokumen	225.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	59.313.400	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	6.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	11.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	11.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	1 Dokumen	11.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persentase pencapaian PAD	100%	1.000.000.000			100%	1.000.000.000	
2	19	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Dokumen	1.000.000.000	Kab. Bulukumba	PAD, DAU	100 Dokumen	1.000.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administasi umum	100%	63.282.600			100%	265.017.821	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	64 Paket	0	Kab. Bulukumba	DAU	64 Paket	24.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.201.400	Kab. Bulukumba	DAU	12 Paket	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	46.979.900	Kab. Bulukumba	DAU	44 Paket	145.517.821	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3.880.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Paket	19.500.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	9.221.300	Kab. Bulukumba	DAU	10 Laporan	76.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumaah pengadaan barang milik daerah	5 unit	58.296.600			5unit	557.100.000	
2	19	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	5 Unit	175.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	52.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	210.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	58.296.600	Kab. Bulukumba	DAU	5 Unit	120.100.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang	100%	121.881.240			100%	272.100.000	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	Kab. Bulukumba	DAU	300 Laporan	2.100.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	120.381.240	Kab. Bulukumba	DAU	100 Laporan	270.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah BMD yang dipelihara	19 unit	71.843.200			20unit	29.050.000	
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	65.433.200	Kab. Bulukumba	DAU	7 Unit	15.250.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.410.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Unit	6.200.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Unit	7.600.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda Inovator Jumlah Pemuda Inovator	100 % 5 orang	1.161.408.600			100% 5orang	706.627.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah presentase pemuda yang aktif di organisasi kepemudaan	85%	1.161.408.600			87,50%	596.627.000	
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota								
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	5 Dokumen	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	5 Dokumen	51.627.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota								
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 Orang	252.583.100	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	250 Orang	85.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota								
						Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	400 Kegiatan	863.206.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU, HIBAH, DAU	400 Kegiatan	320.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	3 Orang	45.619.500	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	3 Orang	140.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi yang mendapatkan pemebinaan	1 OKP	0			1OKP	110.000.000	
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota								
						Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Orang	110.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional Jumlah Pemuda inovator	100 % 2 orang	9.815.811.750			2orang 100%	59.150.121.000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun	5 pkt	7.906.065.000			5pkt	37.798.190.000	
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	7.906.065.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	1 Unit	37.798.190.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kejuaraan yang pertandingkan	5 event	737.775.200			5event	21.033.326.250	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								
						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	737.775.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU, DAU	1 Kegiatan	33.326.250	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga								
						Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	28 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	28 Orang	21.000.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah atlet berprestase yang mendapat pembinaan	25 atlet	1.171.971.550			25atlet	220.674.750	
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah								
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	2 Orang	200.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU, DAU	2 Orang	104.127.750	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga								
						Jumlah penerima Penghargaan olahraga	50 Orang	241.971.750	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU, DAU	50 Orang	37.925.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota								
						Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2 Orang	729.999.800	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	2 Orang	78.622.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah organisasi olahraga yang mendapatkan pembinaan	5 orang	0			5orang	38.080.000	
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota								
						Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	50 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	-	50 Dokumen	38.080.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah olahraga rekreasi yang dibina	2 Cabor	0			2Cabor	59.850.000	
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan								
						Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Unit	59.850.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Jumlah gugus pramuka yang berprestasi di tingkat nasional Jumlah gusus pramuka yang berprestasi tingkat Nasional	100 % 2 Orang	202.833.450			2Orang 100%	207.000.000	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	jumlah gugus pramuka yang berprestasi tingkat nasional	2 Gudep	202.833.450			2Gudep	207.000.000	
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah								
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	202.833.450	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	1 Organisasi	110.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah								
						Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Unit	97.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.598.799.800				20.785.067.155	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.598.799.800				20.785.067.155	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah objek wisita yang dikelolah Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	7 Objek 95 %	1.348.799.800			7Objek 100%	17.584.788.431	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengambangan kawasan wisata	3 Dok	0			3Dok	397.567.163	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
						Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	0	Kab. Bulukumba	DAU	3 Lokasi	397.567.163	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana dibangun/dipelihara	16 Pkt	1.348.799.800			17Pkt	16.827.743.893	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	36 Lokasi	448.800.000	Kab. Bulukumba	DAU	36 Lokasi	596.517.500	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit	500.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Unit	15.721.226.393	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	399.999.800	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	2 Laporan	510.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengendalian yang dilaksanakan	2 1 Kali	0			21 Kali	359.477.375	
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota								
						Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	2 Usaha	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Usaha	249.477.375	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota								
						Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	2 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Laporan	110.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	jumlah event pariwisata yang diselenggarakan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)	12 event 95 %	250.000.000			13event 100%	2.047.668.441	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event pariwisata yang diselenggarakan	10 Event	250.000.000			10Event	2.047.668.441	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	250.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Kegiatan	1.759.172.407	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	0	Kab. Bulukumba	DAU	4 Promosi	288.496.034	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah peletihan kewirausahaan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	11 kali 1,68 %	0			1,70% 12kali	1.152.610.283	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan	7 Pkt	0			7Pkt	1.152.610.283	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	5 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	5 Orang	677.931.166	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata								
						Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	2 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Orang	474.679.117	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
X					NON URUSAN			636.407.000				1.102.950.000	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			636.407.000				1.102.950.000	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Kegiatan	100%	636.407.000			100%	1.102.950.000	
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencenaan yang disusun	20 dok	0			20dok	16.000.000	
X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	-	2 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	16.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administasi umum	100%	138.367.000			100%	550.950.000	
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	138.367.000	Kab. Bulukumba	DAU	40 Laporan	550.950.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumaah pengadaan barang milik daerah	5 unit	0			5unit	51.000.000	
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Unit	51.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang	100%	498.040.000			100%	485.000.000	
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Persen Laporan	498.040.000	Kab. Bulukumba	DAU	100 Laporan	485.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba			34.531.107.410				56.561.215.072	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			478.961.850				1.568.600.000	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			478.961.850				1.568.600.000	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina	100%	0			100%	258.500.000	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah	2 Paket	0			2Paket	258.500.000	
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya								
						Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	192.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik								
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	-	12 Laporan	11.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 unit	55.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita, Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	4.377,56/ 104,70 Kkal/ Gram/ Kap/ Hr	298.122.950			4.377,56/ 104,70 Kkal/ Gram/ Kap/ Hr	959.300.000	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi harga pangan dan NBM serta meningkatnya kinerja kelembagaan usaha pangan dan jaringan distribusi pangan	12 Laporan	136.256.000			12Laporan	52.800.000	
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya								
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	96.051.000	Kab. Bulukumba	DAU, DID	1 Laporan	4.400.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia								
						Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	11.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota								
						Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Unit	9.900.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota								
						Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	30.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	11.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)								
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	10.205.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	16.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi serta pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan kabupaten	15.000 Kg	136.183.000			15.000Kg	286.000.000	
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal								
						Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Dokumen	2.200.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Ton	128.200.000	Kab. Bulukumba	DAU	15000 Ton	247.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	0 Ton	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Ton	27.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota								
						Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	1 Ton	7.983.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Ton	8.800.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya target skor PPH pemanfaatan lahan pekarangan dan penanekaragaman konsumsi pangan, berragam, bergizi, seimbang dan aman	12 Bulan	25.683.950			12Bulan	620.500.000	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun								
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	20.683.950	Kab. Bulukumba	DAU	15 Laporan	605.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	5 Laporan	5.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100%	163.018.900			100%	294.800.000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya dokumen peta rawan pangan	1 Dokumen	17.902.500			1Dokumen	9.900.000	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan								
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	17.902.500	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	9.900.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan daerah	1 Laporan	145.116.400			1Laporan	284.900.000	
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	137.448.400	Kab. Bulukumba	DAU	30000 Dokumen	275.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota								
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	7.668.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	9.900.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman	45%	17.820.000			45%	56.000.000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar pada daerah kabupaten	100%	17.820.000			100%	56.000.000	
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	100 Dokumen	6.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan								
						Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	200 Dokumen	6.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	17.820.000	Kab. Bulukumba	DAU, DID	90 Dokumen	27.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan								
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	100 Dokuman	16.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			34.052.145.560				54.992.615.072	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			34.052.145.560				54.992.615.072	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	100%	18.762.399.260			100%	19.855.166.841	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba yang lebih baik Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24 Dokumen 100 %	75.469.800			24Dokumen	119.928.578	
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Dokumen	23.898.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	21.404.900	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	4.895.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.249.900	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	3.960.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.265.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	8.415.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	3.960.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	6 Laporan	17.325.578	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	48.550.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	57.475.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas keuangan DPKP Kab. Bulukumba Terlaksananya administrasi kegiatan perangkat daerah	12 bulan 100 %	17.929.142.592			12bulan	16.848.144.332	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	191 Orang/ bulan	17.820.097.792	Kab. Bulukumba	DAU	12 Orang/ bulan	16.626.284.332	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	106.560.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	217.360.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.484.800	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	4.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah DPKP Kab. Bulukumba Terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah	3 Laporan 100 %	2.503.000			3Laporan	10.480.000	
3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	3.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.503.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	3.520.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Laporan	3.960.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kab. Bulukumba Terlaksananya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	2 bulan 100 %	31.895.000			2bulan	62.700.000	
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	31.895.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Orang	56.650.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Orang	6.050.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Kab. Bulukumba Terlaksananya penadministrasian umum perangkat daerah	12 Bulan 100 %	332.787.800			12Bulan	842.196.207	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.383.800	Kab. Bulukumba	DAU	1 Paket	12.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.630.300	Kab. Bulukumba	DAU	40 Paket	11.577.500	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	104.605.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Paket	280.012.708	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.285.800	Kab. Bulukumba	DAU	1 Paket	57.285.999	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	1.320.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.512.900	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	30.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	200.370.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	450.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor DPKP Meningkatnya kualitas pelayanan kantor OPD	13 Unit 100 %	25.766.700			43Unit	1.272.980.179	
3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	10 Unit	817.308.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	2.606.700	Kab. Bulukumba	DAU	5 Unit	38.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	23.160.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	88.480.675	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	27.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Unit	36.670.137	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Unit	264.521.367	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum DPKP Kab. Bulukumba Meningkatnya pelayanan administrasi umum OPD	12 Bulan 100 %	277.764.368			12Bulan	305.912.440	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.204.368	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	193.136.920	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.560.000	Kab. Bulukumba	DAU	5 Laporan	112.775.520	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas seluruh aset dan pengamanan aset kantor DPKP Kab. Bulukumba Meningkatnya kualitas seluruh aset dan pengamanan aset OPD	362 Unit 100 %	87.070.000			375Unit	392.825.105	
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	26.500.000	Kab. Bulukumba	DAU	351 Unit	65.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	265 Unit	40.600.000	Kab. Bulukumba	DAU	265 Unit	60.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar								
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	10 Unit	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	19.970.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Unit	75.350.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	50.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Unit	2.456.300	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	40.018.805	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan Persentase Jumlah Produksi Pertanian	25 % 78 %	3.136.329.100			80% 28%	22.652.848.231	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rasio kelompok tani yang berusaha tani sesuai anjuran	26%	2.716.777.600			33%	11.000.000.000	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	1.392.640.600	Kab. Bulukumba	DAU, DID	568 Laporan	7.000.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	1.324.137.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	4.000.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan produksi dan mutu produksi pertanian	18.500 Pohon/ Ha	233.242.000			18.500Pohon/ Ha	8.986.348.231	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman								
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	221.802.000	Kab. Bulukumba	DAU	83300 Dokumen	3.000.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman								
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	11.440.000	Kab. Bulukumba	DAU	75000 Dokumen	1.000.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman								
						Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	4.986.348.231	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	10.500 Ekor	0			10.500Ekor	0	
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil								
						Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	10500 Laporan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	4 Laporan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Frekwensi pengawasan mutu khasiat dan keamanan obat hewan	0 Kali	0			0Kali	0	
3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan								
						Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	10 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Laporan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.04	0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan								
						Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	0 Kasus	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Kasus	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase cakupan trehadap pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit ternak	6.000 Kg/ Ekor	138.500.000			6.000Kg/ Ekor	146.500.000	
3	27	02	2.05	0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak								
						Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	2000 Dokumen	22.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan								
						Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Laporan	50.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.05	0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak								
						Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1000 Laporan	27.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak								
						Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	2000 Laporan	22.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak								
						Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	2 Laporan	138.500.000	Kab. Bulukumba	DAU, DID	12 Laporan	25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan	86%	47.809.500			86%	2.520.000.000	
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								
						Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Ton	47.809.500	Kab. Bulukumba	DAU, DID	150000 Ton	450.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								
						Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	50 Ekor	0	Kab. Bulukumba	DAU	210 Ekor	2.000.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain								
						Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3000 Dosis	0	Kab. Bulukumba	DAU	3000 Dosis	70.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia	90%	10.761.741.000			90%	10.751.600.000	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terbangunnya kawasan pertanian berbasis komoditas Terbangunnya kawasan pertanian berbasis komoditas	100 % 2 Dokumen	0			2Dokumen	475.000.000	
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	375.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian								
						Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Dokumen	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Menurunnya jumlah luas areal pertanian yang mengalami kekeringan Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	0 Unit 100 %	10.761.741.000			0Unit	10.276.600.000	
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian								
						Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	4 Unit	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani								
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	1.000.000.000	Kab. Bulukumba	DAKF	4 Unit	2.887.700.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit								
						Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	728.640.000	Kab. Bulukumba	DAKF	3 Unit	924.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya								
						Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	715.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	2.910.000.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	5 Unit	2.433.300.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani								
						Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	20 Unit	5.723.101.000	Kab. Bulukumba	DAU, DAKF	9 Unit	3.316.600.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan								
						Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	400.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10.94 %	484.433.500			10.94 %	447.500.000	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase wabah penyakit hewan yang berhasil dikendalikan Persentase wabah penyakit hewan yang berhasil dikendalikan	14 % 14 persen	165.890.000			14persen	245.000.000	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 Laporan	165.890.000	Kab. Bulukumba	DAU, DID	5000 Laporan	245.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan Persentase Pengawasan Pemasukan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	60 % 60 Persen	15.000.000			60Persen	30.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)								
						Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	2 laporan	15.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	700 laporan	30.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM								
						Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	2 Laporan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur Petugas Pelayanan Jasa Laboratorium, Medik dan Paramedik Veteriner (Non ASN) Persentase aparatur petugas pelayanan medik dan paramedik veteriner	100 persen 100 %	190.543.500			100persen	0	
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium								
						Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner								
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	10 Laporan	190.543.500	Kab. Bulukumba	DAK.NF	8 Laporan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya pendampingan dan pengawasan masyarakat veteriner veteriner	100 persen 100 %	113.000.000			100persen	142.500.000	
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	113.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	15 Laporan	30.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner								
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	300 Dokumen	30.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan								
						Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	0 Unit Usaha	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Unit Usaha	82.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Terlaksananya penerapan dan pengawasan terhadap persyaratan teknis kesejahteraan hewan	100 persen 100 %	0			100persen	30.000.000	
3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha								
						Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	3 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	6500 Unit	30.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	89%	274.486.000			89%	295.000.000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Menurunnya Kasus serangan OPT	295.000.000 Kasus	274.486.000			295.000.000Kasus	295.000.000	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5000 Ha	274.486.000	Kab. Bulukumba	DAU, DID	1 Ha	220.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1000 Ha	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Ha	20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
						Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1000 Ha	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Ha	55.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin	50%	18.674.000			50%	200.000.000	
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Izin Usaha Pertaian yang kegiatan Usahataninya dalam Daerah Kab/Kota	120 Unit Usaha	18.674.000			120Unit Usaha	150.000.000	
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian								
						Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	10 Dokumen	18.674.000	Kab. Bulukumba	DAU	60 Dokumen	150.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian								
						Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	250 Laporan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan/pasar hewan rumah potong hewan	0 Unit Usaha	0			0Unit Usaha	16.103.620	
3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Dokumen	7.853.620	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan								
						Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Laporan	2.750.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan								
						Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Laporan	2.750.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06	2.02	0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan								
						Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	2.750.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Terlaksananya Pengwasan Izin Usaha	0 Kali	0			0Kali	33.896.380	
3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan								
						Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Laporan	28.396.380	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan								
						Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	0 Laporan	5.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Persentase Kelompok Tani yang dibina	19.00 % 60 %	614.082.700			19.00% 61%	790.500.000	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Produksi/Produktivitas Pertanian	100%	614.082.700			100%	790.500.000	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa								
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	327.676.800	Kab. Bulukumba	DAU, DAK.NF	15 Unit	235.250.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	9.647.000	Kab. Bulukumba	DAU	140 Unit	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10 Unit	149.121.900	Kab. Bulukumba	DAKF	1 Unit	305.250.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota								
						Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	10 Unit	127.637.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Unit	150.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Bulukumba			9.345.330.596				11.808.966.623	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.345.330.596				11.808.966.623	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			6.953.140.346				9.155.169.818	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	4.125.006.546			100%	5.862.783.358	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100%	33.812.200			100%	66.150.040	
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	28.935.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH	4 Dokumen	31.828.940	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH	2 Dokumen	14.355.385	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH	2 Dokumen	5.254.535	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.876.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH	2 Laporan	5.500.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH	4 Laporan	9.211.180	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium	100%	3.485.177.596			100%	3.852.287.392	
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	3.364.277.596	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	35 Orang/ bulan	3.700.705.357	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12.720.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH	1 Dokumen	13.992.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	108.180.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	118.998.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Laporan	7.106.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	12 Laporan	11.486.035	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang ikut Pelatihan	100%	0			100%	218.359.900	
3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bentengnge	DAU	2 Orang	45.490.500	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	0	Kab. Bulukumba	DAU	35 Orang	11.624.800	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	15 Orang	161.244.600	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Kantor	100%	115.817.200			100%	239.281.521	
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Paket	77.598.950	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Paket	23.283.651	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Paket	5.500.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.808.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH	1 Paket	27.289.350	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.040.700	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH	1 Paket	5.544.770	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Dokumen	5.500.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	85.968.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH	89 Laporan	94.564.800	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Kantor	100%	29.037.000			100%	966.775.700	
3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	1 Unit	924.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	3 Unit	10.835.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	29.037.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	3 Unit	31.940.700	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor	100%	424.489.800			100%	471.338.780	
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	4.400.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	185.433.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	203.976.300	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.220.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	1 Laporan	1.342.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	237.836.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	PAD, DBH, DAU	1 Laporan	261.620.480	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	36.672.750			100%	48.590.025	
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	26.200.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	33 Unit	28.820.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	8.250.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.472.750	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH	1 Unit	11.520.025	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	50%	2.672.965.200			50%	2.940.126.200	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi	100%	1.045.603.200			100%	1.150.028.000	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	1.045.603.200	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	2 Unit	1.150.028.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola	100%	1.627.362.000			100%	1.790.098.200	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1.627.362.000	Kab. Bulukumba	PAD, DBH, DAU	1 Dokumen	1.790.098.200	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	30.23 %	40.701.000			30.23 %	44.771.100	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	40.701.000			100%	44.771.100	
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	40.701.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	1 Laporan	44.771.100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Promosi Komoditi Ekspor	100%	0			100%	181.574.800	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pameran	4 Kali	0			4Kali	181.574.800	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional								
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	5 Pelaku Usaha	123.505.800	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal								
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	5 Pelaku Usaha	58.069.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	45%	114.467.600			45%	125.914.360	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	45%	114.467.600			50%	125.914.360	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	250 Unit	67.766.600	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	250 Unit	74.543.260	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	64 Orang	46.701.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	64 Orang	51.371.100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.392.190.250				2.653.796.805	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	8.29 %	1.980.730.250			8.29 %	2.201.190.805	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang di Bina dan yang di Bantu	100%	1.980.730.250			100%	2.201.190.805	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	7.970.250	Kab. Bulukumba	DBH	1 Dokumen	8.767.275	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	22.387.530	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.972.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK.NF	1 Dokumen	2.170.036.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	83.33 %	411.460.000			83.33 %	452.606.000	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	411.460.000			100%	452.606.000	
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas								
						Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	411.460.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH	1 Dokumen	452.606.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
					Sekretariat Daerah Kab. Bulukumba			26.848.352.014				27.251.077.294	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			24.768.309.859				25.139.834.507	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			24.768.309.859				25.139.834.507	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat Daerah)	100%	21.261.289.606			100%	21.580.208.950	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran,sarana dan Prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	100 % 100 %	128.990.200			100%	130.925.053	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan Dokumen	128.990.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan Terlaksananya Administrasi keuangan dan Perangkat daerah	100 % 100 %	12.038.246.764			100%	12.218.820.465	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan Orang/ bulan	11.799.710.564	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Orang/ bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan Dokumen	201.048.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan Laporan	37.487.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	1 Dokumen 100 %	83.290.000			1Dokumen	84.539.350	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan Dokumen	83.290.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.	100 % 100 %	164.497.000			100%	166.964.455	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Persen Paket	142.372.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	100 Persen Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	22.125.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan terlaksananya pelayanan administrasi umum	100 % 100 %	2.085.532.500			100%	2.116.815.488	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	65.155.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	3 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	52.630.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	170.186.350	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan Dokumen	126.720.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan Laporan	1.170.900.350	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan Laporan	499.940.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	100 % 100 %	1.327.597.800			100%	1.347.511.767	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 jenis Unit	99.535.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	5 jenis Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.358.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	79.316.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	20 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 jenis Unit	130.388.300	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	5 jenis Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	100 % 100 %	2.298.676.001			100%	2.333.156.141	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen Laporan	872.022.460	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	100 Persen Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	50.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	1.376.653.541	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	100 % 100 %	1.104.626.000			100%	1.121.195.390	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	250.360.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	35 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Unit	354.080.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	95 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	-	95 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	401.250.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	98.936.000	Kab. Bulukumba	DAU	10 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.	100 % 100 %	954.875.641			100%	969.198.776	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan Orang/ Bulan	234.875.641	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Orang/ Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	120.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan Orang/ Bulan	600.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Orang/ Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	- Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	100 % 100 %	600.000.000			100%	609.000.000	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	600.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	- Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	100 % 100 %	225.000.000			100%	228.375.000	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 Persen Dokumen	35.030.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	100 Persen Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen Laporan	26.997.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	15.889.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100 Persen Dokumen	27.170.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	100 Persen Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	119.913.600	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	- Meningkatnya komunikasi pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan informasi publik.	100 % 100 %	249.957.700			100%	253.707.066	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Bulan Laporan	129.861.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Bulan Laporan	120.096.700	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 % 100 %	2.996.624.525			100% 100%	3.041.573.893	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian Tapal Batas wilayah administrasi antar daerah, Penyediaan dokumen LKPJ, Penyusunan Dokumen LPPD, terpahaminya PATEN bagi aparatur Kecamatan.	100%	258.276.950			100%	262.151.104	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	34.139.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	3 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12 Dokumen	162.017.750	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	62.120.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya guru kontrak TKA/TPA sebagai penerima gaji, terlaksananya kegiatan STQ dan Pembinaan Mental Spiritual serta Pengajian Rutin.	100%	2.348.743.675			100%	2.383.974.830	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	1.688.936.675	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	211.726.800	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	12 Dokumen	448.080.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya bantuan hukum penanganan kasus, tersedianya dokumen LHP, terlaksananaya penyuluhan hukum terpadu dan terselesaikannya Draf rancangan Perdan serta kajian produk hukum daerah.	5 Dokumen 100 %	389.603.900			100% 5Dokumen	395.447.959	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100 Persen Dokumen	50.000.000	Kab. Bulukumba	DAU	100 Persen Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum								
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	19 Kasus	139.604.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	19 Kasus	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen	199.999.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	3 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan jumlah lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing, Persentase Jumlah Laporan DAK dan APBD dari OPD tepat waktu, Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana.	100%	510.395.728			100%	518.051.664	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Meningkatnya dokumen potensi produksi daerah secara berkala, terlaksananya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi yang berbasis kerakyatan.	4 Dokumen 100 %	348.147.528			4Dokumen 100%	353.369.741	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	47.030.528	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	158.997.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	142.120.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersedianya dokumen penyusunan perencanan sekertariat Daerah,Jumlah dokumen Data laporan Tepra secara berkala dan laporan Capaian Fisik serta data laporan hasil Monitirin pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah.	100%	39.840.000			100%	40.437.600	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	100 Persen Dokumen	20.120.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	100 Persen Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Bulan Laporan	19.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Bulan Laporan	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya pelatihan Aplikasi Sirup dan Aplikasi SPSE dan Asosiasi/penyedia Barang Jasa.	100%	122.408.200			100%	124.244.323	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan Dokumen	24.622.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan Dokumen	73.030.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	36 OPD Orang	24.756.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	36 OPD Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH
X					NON URUSAN			2.080.042.155				2.111.242.787	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.080.042.155				2.111.242.787	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat Daerah)	100%	2.080.042.155			100%	2.111.242.787	
X	XX	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	- Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	100 % 100 %	480.000.000			100%	487.200.000	
X	XX	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	480.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
X	XX	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	- Meningkatnya komunikasi pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan informasi publik.	100 % 100 %	1.600.042.155			100%	1.624.042.787	
X	XX	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Bulan Laporan	1.600.042.155	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Bulan Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
					Sekretariat DPRD Kab. Bulukumba			33.437.672.670				39.583.370.587	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			10.745.303.850				15.173.563.915	
4	02				SEKRETARIAT DPRD			10.745.303.850				15.173.563.915	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat DPRD)	100%	2.875.131.050			100%	4.608.864.643	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen, Penganggaran dan Pelaporan Tepat waktu	100%	50.497.500			100%	50.223.314	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	27.647.900	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DBH	5 Dokumen	26.688.072	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	22.849.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DBH	12 Laporan	23.535.242	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat DPRD Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pengeloaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	100%	166.309.100			100%	160.644.207	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	139.758.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	10 Dokumen	138.465.681	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11 Dokumen	21.582.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	11 Dokumen	17.028.526	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.968.300	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	1 Laporan	5.150.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penatausahaannya	100%	18.840.000			100%	18.494.800	
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	18.840.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	2 Laporan	18.494.800	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0			100%	584.520.000	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	85 Paket	540.750.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	44 Orang	43.770.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	620.519.300			100%	1.367.565.999	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.999.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DBH	1 Paket	19.027.911	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	1 Paket	5.150.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	414.824.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	1 Paket	822.044.318	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	200.695.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	44 Laporan	521.343.770	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	36.900.000			100%	69.293.250	
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	36.900.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	7 Unit	69.293.250	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintan Daerah	100%	1.735.689.150			100%	1.911.525.747	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	419.938.150	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	12 Laporan	449.017.211	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.315.751.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	12 Laporan	1.462.508.536	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	116.944.000			100%	291.099.050	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.500.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	4 Unit	41.901.550	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.944.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	2 Unit	35.407.500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	69.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	10 Unit	213.790.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	0			100%	0	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	40 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	129.432.000			-	155.498.276	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan	129.432.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	PAD	4 Laporan	155.498.276	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase PROLEGDA yang Terealisir, "Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD, Persentase Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya	100%	7.870.172.800			100%	10.564.699.272	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi pembahasannya	100%	518.947.600			100%	562.607.457	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20 Dokumen	130.368.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	PAD	19 Dokumen	133.368.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	323.580.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	PAD	4 Dokumen	336.183.459	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan								
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	20 Dokumen	14.999.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	19 Dokumen	38.055.998	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DBH	1 Dokumen	55.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan Anggota DPRD yang Kompeten dibidangnya	100%	150.000.000			100%	3.432.083.650	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD								
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	200 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	PAD	200 Dokumen	2.887.743.650	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	5 Orang	43.260.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi								
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	8 Orang	346.080.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD								
						Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	40 Dokumen	150.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DBH	40 Dokumen	155.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Reses dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	327.400.000			100%	365.800.000	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	40 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	40 Laporan	10.300.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD								
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	40 Dokumen	25.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	40 Dokumen	25.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses								
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	120 Dokumen	302.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	PAD	120 Dokumen	330.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD serta Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	6.873.825.200			100%	6.204.208.165	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	200 Dokumen	6.873.825.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	200 Dokumen	6.204.208.165	SEKRETARIAT DPRD
X					NON URUSAN			22.692.368.820				24.409.806.672	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			22.692.368.820				24.409.806.672	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat DPRD)	100%	22.692.368.820			100%	24.409.806.672	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat DPRD Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pengeloaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	100%	3.476.905.820			100%	4.075.830.712	
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ bulan	3.469.852.520	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	44 Orang/ bulan	4.070.900.205	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	7.053.300	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	2 Dokumen	4.930.507	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0			100%	0	
X	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	85 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	24.926.000			100%	35.000.000	
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	24.926.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	40 Dokumen	35.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0			100%	253.385.000	
X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	1 Unit	110.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	3 Unit	15.150.000	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	10 Unit	128.235.000	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	63.180.000			100%	136.765.250	
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	50.400.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	16 Unit	85.716.600	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	10 Unit	2.575.000	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	12.780.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	10 Unit	48.473.650	SEKRETARIAT DPRD
X	XX	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	19.127.357.000			100%	19.908.825.710	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
X	XX	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD								
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/ Bulan	19.127.357.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	40 Orang/ Bulan	19.908.825.710	SEKRETARIAT DPRD
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Bulukumba			10.564.974.579				11.668.972.036	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			10.564.974.579				11.668.972.036	
5	01				PERENCANAAN			9.052.703.679				10.005.474.046	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Bappelitbangda)	100%	7.080.563.279			100%	7.766.619.606	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persenntase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	205.000.000			100%	225.500.000	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	106.170.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	8 Dokumen	116.787.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	23.550.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Dokumen	25.905.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Dokumen	16.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	14 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27 Laporan	60.280.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	66.308.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenntase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%	5.315.254.979			100%	5.824.780.476	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ bulan	5.177.754.979	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD, DAU	12 Orang/ bulan	5.695.530.476	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	122.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH, DAU	12 Dokumen	112.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	1 Laporan	11.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	1 Laporan	5.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	pemenuhan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	198.939.000			100%	218.832.900	
5	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Paket	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	58.893.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Orang	64.782.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49 Orang	140.046.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	50 Orang	154.050.600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan adminstrasi umum kantor	100%	229.062.900			100%	251.969.190	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.776.600	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	5.254.260	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.898.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	98.888.350	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.481.600	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	10.429.760	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.940.600	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	10.934.660	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	114.965.600	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	98 Laporan	126.462.160	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	89 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	60 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	85 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	509.726.400			100% 100Persen	560.699.040	
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	317.000.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	8 Unit	348.700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	192.726.400	-	DBH	1 Unit	211.999.040	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	547.000.000			100%	601.700.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.900.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	10.890.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	0 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	537.100.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	590.810.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100%	75.580.000			100%	83.138.000	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.000.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	18.700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	43.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	10 Unit	47.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	15.580.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	17.138.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100%	1.007.365.100			100%	1.121.959.210	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	666.781.100			100%	733.459.210	
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya								
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	248.229.400	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK, DBH	20 Dokumen	273.052.340	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik								
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	20.513.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Berita Acara	22.564.850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah								
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	40.461.600	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	1 Berita Acara	44.507.760	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	38.517.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	1 Berita Acara	42.369.360	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan								
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	27 Usulan	42.086.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	10 Usulan	46.294.600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	276.973.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	1 Dokumen	304.670.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	pemenuhan terhadap analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidan perencanaan pembangunan daerah	100%	215.000.000			100%	236.500.000	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah								
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	4 Orang	140.500.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	4 Orang	154.550.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	74.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	1 Buku	81.950.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemenuhan terhadap pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	125.584.000			100%	152.000.000	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	125.584.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	3 Laporan	152.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan	100%	964.775.300			100%	1.116.895.230	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	pemenuhan terhadap dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembanguan manusia	100%	175.000.000			100%	248.142.400	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	75.000.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	18 Dokumen	138.142.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	60.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	15 Dokumen	66.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	40.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	4 Laporan	44.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	24 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	pemenuhan terhadap dokumen pertencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	150.000.000			100%	165.000.000	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	60.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	29 Dokumen	66.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	50.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	4 Laporan	55.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	24 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	40.000.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	19 Dokumen	44.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	24 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pemenuhan terhadap dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	639.775.300			100%	703.752.830	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	186.023.200	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD, PAJAK ROKOK	27 Dokumen	204.625.520	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	186.460.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	23 Laporan	205.106.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	165.092.100	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	27 Dokumen	181.601.310	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	102.200.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	31 Laporan	112.420.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.512.270.900				1.663.497.990	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan,, Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah, Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah Penerapan Sida	100%	1.512.270.900			100%	1.663.497.990	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	"Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan"	100%	100.000.000			100%	110.000.000	
5	05	02	2.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan								
						Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan								
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Rekomendasi	110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembanhan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	0			100%	0	
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembanhan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	1.100.000.000			100%	1.210.000.000	
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	220.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	400.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	440.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	500.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Dokumen	550.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	312.270.900			100%	343.497.990	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	283.270.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Dokumen	311.597.990	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4 Laporan	29.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	100 Laporan	31.900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
					Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bulukumba			232.849.408.941				283.921.608.564	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			232.849.408.941				283.921.608.564	
5	02				KEUANGAN			232.849.408.941				283.921.608.564	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPKPD)	100%	28.050.359.481			100%	18.572.416.813	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai standar	100%	197.500.400			100%	303.200.240	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	95.200.300	Kab. Bulukumba	DBH	4 Dokumen	81.929.500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	4 Dokumen	14.483.580	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	2 Dokumen	14.483.690	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	2 Dokumen	13.438.580	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	2 Dokumen	13.438.580	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	8.500.100	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	2 Laporan	6.999.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	75.800.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	12 Laporan	158.427.310	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	25.212.887.731			100%	14.687.092.713	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ bulan	24.763.652.831	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD, DAU	101 Orang/ bulan	14.086.601.736	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	97.914.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	12 Dokumen	148.906.961	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	337.820.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Dokumen	434.971.386	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	1 Laporan	12.612.600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	1 Laporan	3.000.030	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	1 Dokumen	1.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian yang berstandar Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian yang berstandar	100 % 100 %	61.551.000			100%	127.471.756	
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.286.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	57 Dokumen	11.130.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	42.355.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	3 Orang	72.125.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	2.310.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	6 Orang	8.797.520	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10.600.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	11 Orang	35.419.236	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	593.846.550			100%	1.115.488.184	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.485.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	1 Paket	19.125.238	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.026.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	12 Paket	21.520.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.900.700	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	1 Paket	16.184.702	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	163.481.650	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH	1 Paket	427.855.356	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.586.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	12 Paket	273.833.701	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	12 Dokumen	3.494.641	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	132.530.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	12 Laporan	47.452.137	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249.837.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	12 Laporan	306.022.409	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor / barang miilik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.092.013.800			100%	1.431.304.444	
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	510.500.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	27.355.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	6 Unit	435.556.679	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	75 Unit	177.958.215	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	1.064.658.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	5 Unit	35.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	1 Unit	45.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	35 Unit	200.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	7 Unit	27.289.550	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa administrasi perkantoran	95%	777.160.000			95%	643.831.955	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.680.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	283.705.926	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	724.480.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	360.126.029	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor / pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	115.400.000			95%	264.027.521	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	30.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	70.300.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	52 Unit	123.346.060	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	5 Unit	2.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Unit	76.064.743	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	14.600.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	24 Unit	32.616.718	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	95%	204.089.349.460			95%	264.500.310.641	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun	95%	1.597.178.300			95%	2.368.555.920	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	168.876.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	2 Dokumen	165.230.760	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	163.575.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	2 Dokumen	145.169.760	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	29.618.000	Kab. Bulukumba	DBH	36 Dokumen	208.066.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	20.200.000	Kab. Bulukumba	DBH	36 Dokumen	158.755.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD								
						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	29.190.000	Kab. Bulukumba	DBH	36 Dokumen	53.779.700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	25.700.000	Kab. Bulukumba	DBH	36 Dokumen	53.779.700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	342.900.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	2 Dokumen	393.485.500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	278.073.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	2 Dokumen	424.203.500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	27.533.800	Kab. Bulukumba	DBH	2 Dokumen	89.325.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	30.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	354.428.000	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	1 Dokumen	442.741.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	25.811.900	Kab. Bulukumba	DBH	1 Dokumen	85.150.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	59 Orang	131.272.600	Kab. Bulukumba	DBH	36 Orang	118.870.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi pengeluaran kas terhadap realisasi penerimaan kas daerah	95%	709.499.250			95%	824.188.440	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	55.499.800	Kab. Bulukumba	DBH	12 Dokumen	75.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya								
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	24.999.800	Kab. Bulukumba	DBH	1 Laporan	30.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	59 Dokumen	74.999.800	Kab. Bulukumba	DBH	36 Dokumen	71.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DBH	1 Dokumen	20.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	150.499.800	Kab. Bulukumba	DBH	4 Dokumen	205.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	59 Dokumen	49.999.800	Kab. Bulukumba	DBH	36 Dokumen	20.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	50.499.800	Kab. Bulukumba	DBH	3 Laporan	20.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	30.000.000	Kab. Bulukumba	DBH	2 Dokumen	20.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait								
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	123.000.100	Kab. Bulukumba	DBH	12 Dokumen	213.251.950	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	55.000.000	Kab. Bulukumba	DBH	1 Dokumen	20.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	59 Orang	95.000.350	Kab. Bulukumba	DBH	36 Orang	129.936.490	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen akuntansi pelaporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)	95%	780.161.000			95%	845.379.940	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	168.772.000	Kab. Bulukumba	DBH	12 Laporan	132.899.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban								
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	69.610.000	Kab. Bulukumba	DBH	2 Dokumen	86.169.520	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran								
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	20.000.000	Kab. Bulukumba	DBH	3 Laporan	53.999.990	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	129.495.000	Kab. Bulukumba	DBH	2 Laporan	69.438.020	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	55 Dokumen	110.686.000	Kab. Bulukumba	DBH	55 Dokumen	112.851.020	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
						Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	14.000.000	Kab. Bulukumba	DBH	1 Dokumen	21.863.620	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	22.560.000	Kab. Bulukumba	DAU	1 Dokumen	27.420.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	72.840.000	Kab. Bulukumba	DBH	2 Dokumen	74.189.920	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah								
						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	34.300.000	Kab. Bulukumba	DBH	1 Dokumen	62.753.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DBH	1 Dokumen	20.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	59 Orang	37.100.000	Kab. Bulukumba	DBH	36 Orang	90.786.190	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	100.798.000	Kab. Bulukumba	DBH	1 Lembaga	44.550.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah								
						Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DBH	1 Laporan	48.459.660	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	95%	200.704.801.910			95%	260.146.003.341	
5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	2.300.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan								
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	109 Laporan	181.249.579.691	Kab. Bulukumba	DBH, DAU	109 Laporan	178.848.524.546	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak								
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.469.103.545	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	72.532.570.915	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota								
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	109 Laporan	13.986.118.674	Kab. Bulukumba	PAD	109 Laporan	6.464.907.880	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengguna system aplikasi terhadap jumlah OPD	95%	297.709.000			95%	316.183.000	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	138.924.000	Kab. Bulukumba	DBH	4 Dokumen	99.923.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	59 Orang	158.785.000	Kab. Bulukumba	DBH	36 Orang	216.260.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset	95%	709.700.000			95%	848.881.110	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	95%	709.700.000			95%	848.881.110	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga								
						Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	48.490.000	Kab. Bulukumba	DBH	1 Dokumen	99.871.010	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah								
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	32.817.500	Kab. Bulukumba	DBH	1 Dokumen	14.399.690	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	27.602.500	Kab. Bulukumba	DBH	2 Dokumen	117.798.150	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah								
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	23.730.000	Kab. Bulukumba	DBH	1 Dokumen	25.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	131.208.000	Kab. Bulukumba	DBH	3 Laporan	90.876.230	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Laporan	25.297.500	Kab. Bulukumba	DBH	3 Laporan	133.590.540	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	28.494.500	Kab. Bulukumba	DBH	1 Laporan	28.710.730	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	85.799.000	Kab. Bulukumba	DBH	2 Laporan	10.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	22.916.000	Kab. Bulukumba	DBH	2 Laporan	37.974.020	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	100.231.000	Kab. Bulukumba	DBH	3 Dokumen	151.496.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	29.458.000	Kab. Bulukumba	DBH	4 Laporan	17.488.440	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	104.608.000	Kab. Bulukumba	DBH	1 Laporan	66.320.460	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	521 Orang	49.048.000	Kab. Bulukumba	DBH	521 Orang	55.355.840	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba			12.529.933.950				13.586.508.154	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			12.529.933.950				13.586.508.154	
5	02				KEUANGAN			12.529.933.950				13.586.508.154	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	10.283.939.850			100%	12.416.342.957	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai standar	100%	94.101.000			-	70.945.954	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31.154.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	2 Dokumen	26.915.889	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.049.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	4.900.197	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.096.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	1 Dokumen	3.747.249	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.884.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	1 Laporan	2.773.562	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	46.915.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	32.609.057	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	8.416.918.900			-	10.171.905.170	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ bulan	8.279.793.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	57 Orang/ bulan	10.018.538.577	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	22.235.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	30.153.321	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	107.835.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	114.562.558	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.054.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Laporan	3.811.198	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Laporan	2.419.879	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Dokumen	2.419.637	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian yang berstandar	100%	5.966.800			-	6.666.738	
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.868.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	3.036.919	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	3.098.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	5 Orang	3.629.819	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	354.572.400			-	375.279.031	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.170.100	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	2.407.719	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.491.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	2.953.005	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.100.700	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	55.782.395	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	222.320.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Paket	215.379.758	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Dokumen	1.452.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	17.287.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	18.827.184	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.003.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	78.476.970	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor / barang miilik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	344.522.350			-	601.150.000	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	4 Unit	463.650.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	344.522.350	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	9 Unit	137.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa administrasi perkantoran	100%	987.078.400			-	1.176.360.064	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	123.038.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	12 Laporan	148.876.464	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	864.040.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Laporan	1.027.483.600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor / pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	80.780.000			-	14.036.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	1 Unit	4.235.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	69.780.000	Kab. Bulukumba	DAU	52 Unit	9.801.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	100%	2.245.994.100			100%	1.170.165.197	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah buku Standar Harga yang disusun	100%	2.245.994.100			-	1.170.165.197	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah								
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	5.949.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	2 Dokumen	1.282.540	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	130.137.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	2 Dokumen	58.776.053	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	34 Laporan	48.907.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	34 Laporan	36.871.725	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	34 Unit	276.750.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	34 Unit	175.840.225	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	34 Laporan	784.530.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	34 Laporan	183.980.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	34 Laporan	97.904.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	34 Laporan	107.520.600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	115.773.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	2 Obyek Pajak	50.941.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah								
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	41.682.800	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	2 Dokumen	11.545.760	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah								
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	186.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	2 Layanan	76.403.393	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah								
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	174.860.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	1 Dokumen	33.238.398	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	119.985.400	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	1 Dokumen	88.379.792	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	1 Dokumen	72.214.945	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	219.497.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	1 Dokumen	241.447.696	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	44.014.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	1 Laporan	31.722.570	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba			5.416.698.657				11.280.239.290	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.416.698.657				11.280.239.290	
5	03				KEPEGAWAIAN			4.777.956.457				7.288.218.290	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penyusunan perenca naan,keuangan dan administrasi umum urusan pemerintahan daerah	100%	4.305.425.857			100%	5.658.018.290	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	16.466.000			19Dokumen	28.942.980	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	16.466.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	3 Dokumen	21.792.980	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Dokumen	2.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Dokumen	2.750.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	2.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.829.404.957			100%	5.028.325.310	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	3.751.044.957	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD, DAU	45 Orang/ bulan	4.981.025.310	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	78.360.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Dokumen	46.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	1.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0			100%	13.750.000	
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	45 Paket	550.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	5 Orang	11.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	5 Orang	2.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi umum perangkat Daerah	100%	157.864.300			100%	223.300.000	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	2.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Paket	16.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.402.300	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	3.300.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	5 Dokumen	3.300.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	78.462.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Laporan	165.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	11.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	36.506.600			100%	103.000.000	
5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	0 Unit	70.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	11.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	36.506.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	2 Unit	22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	218.304.000			100%	192.500.000	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	1.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.584.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	165.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	132.720.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	26.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara dengan Baik	100%	46.880.000			100%	68.200.000	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	33.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	25.700.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	11 Unit	22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	24 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	24 Unit	2.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	5.680.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	25 Unit	5.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	5.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Pelayanan administrasi kepegawaian, Pengadaan Pegawai yang transparan dan akuntabel, Sistem Informasi Kepegawaian Satu data dengan Sistem yang lain, Meningkatkan Disiplin ASN, Pemberian insentif berdasarkan kinerja ASN	55%	472.530.600			55%	1.630.200.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase terlaksananya Penga daan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Presentase terlaksananya Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 % 100 %	76.769.500			100%	775.500.000	
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK								
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	321 Dokumen	48.030.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	321 Dokumen	297.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian								
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	300 Dokumen	13.554.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	30 Dokumen	220.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN								
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Lembaga	16.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	44.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian								
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5550 Laporan	15.185.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	6031 Laporan	198.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Presentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi Jabatan	100%	264.769.600			100%	599.872.284	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	866 Dokumen	181.135.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	866 Dokumen	379.872.284	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	83.634.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Dokumen	220.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	100 % 100 %	0			100%	172.327.716	
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN								
						Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	200 Orang	27.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center								
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	50 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	50 Dokumen	22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	35 Orang	106.327.716	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	50 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	50 Dokumen	16.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase Penilain dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	130.991.500			100%	82.500.000	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5550 Dokumen	100.940.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	5970 Dokumen	33.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai								
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	350 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	350 Orang	33.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	30.051.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	25 Laporan	16.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			638.742.200				3.992.021.000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural,fungsional serta pelatihan teknis lainnya	75%	638.742.200			75%	3.992.021.000	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	PresentaseAparatur sipil Negara Yang Mengikuti Diklat Pengembangan Komptensi Teknis/Fungsional	100%	0			100%	49.500.000	
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Orang	22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Dokumen	27.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase Aparatur sipil Negara yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi Struktural	100%	638.742.200			100%	3.942.521.000	
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota								
						Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	200 Orang	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	200 Orang	27.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	200 Laporan	638.742.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH, DAU	200 Laporan	3.915.021.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba			11.978.498.543				16.842.737.038	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.978.498.543				16.842.737.038	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			11.978.498.543				16.842.737.038	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Inspektorat Daerah)	100%	7.286.019.543			100%	10.627.782.469	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8.917.000			100%	17.900.160	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.917.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	6 Dokumen	8.383.510	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Laporan	9.516.650	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah terkait ketersediaan gaji dan tunjangan	100%	4.830.178.393			100%	6.942.763.216	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	4.659.498.393	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	40 Orang/ bulan	6.790.567.710	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	161.060.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Dokumen	137.070.506	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.058.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	8.470.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	6.561.500	Kab. Bulukumba	DAU	17 Laporan	6.655.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pengawasan	100%	545.238.000			100%	1.874.006.860	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	545.238.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	60 Orang	1.874.006.860	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	515.061.900			100%	755.525.620	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	360.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Paket	3.302.377	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	2.200.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	140.909.300	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	3 Paket	169.223.243	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59.299.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Paket	72.600.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	314.493.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	102 Laporan	508.200.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	80.877.250			100%	259.266.817	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	3 Unit	111.684	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	6 Unit	121.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	80.877.250	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	11 Unit	65.555.133	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	10 Unit	72.600.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang dalam hal penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta layanan umum kantor	100%	1.016.986.400			100%	254.830.949	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	423.360.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	71.740.007	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	593.626.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	183.090.942	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah dalam hal persentase penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	288.760.600			100%	523.488.847	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	9.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	56.558.183	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	57.100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	13 Unit	231.869.151	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	222.160.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	18 Unit	23.071.062	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	211.990.451	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai	56%	3.283.257.000			56%	4.524.752.486	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	2.936.357.000			100%	3.861.452.486	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14 Laporan	320.100.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	14 Laporan	511.729.889	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	1.077.060.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	1.819.331.005	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja								
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan	255.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	8 Laporan	159.440.490	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan								
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Laporan	408.510.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	25 Laporan	420.729.632	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan	297.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	8 Laporan	478.321.470	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	578.687.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	4 Dokumen	471.900.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 % 100 %	346.900.000			100%	663.300.000	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	346.900.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	20 Laporan	663.300.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persenatse Tindak Lanjut Temuan	65%	1.409.222.000			65%	1.690.202.083	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	100%	178.960.000			100%	225.383.554	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	178.960.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Rekomendasi	225.383.554	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase cakupan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	100%	1.230.262.000			100%	1.464.818.529	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39 perangkat daerah	255.850.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	36 perangkat daerah	110.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12 perangkat daerah	161.131.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 perangkat daerah	174.520.720	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	747.281.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	3 Kegiatan	913.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 perangkat daerah	66.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	36 perangkat daerah	267.297.809	INSPEKTORAT DAERAH
					KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU			12.147.975.011				0	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			346.710.000				0	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			346.710.000				0	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (UJUNGBULU)	100%	346.710.000			100%	0	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu Terlakasanaya administrasi keuangan perangkat daerah	100 % 12 Bulan	346.710.000			100%	0	
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	346.710.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Dokumen	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7					UNSUR KEWILAYAHAN			11.801.265.011				0	
7	01				KECAMATAN			11.801.265.011				0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (UJUNGBULU)	100%	9.352.815.011			100%	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu Terlakasanaya administrasi keuangan perangkat daerah	100 % 12 Bulan	7.228.695.211			100%	0	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	7.228.695.211	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	14 Orang/ bulan	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase kepergawaian perangkat daerah terlaksanya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 % 100 %	58.572.000			100%	0	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	58.572.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	5 Orang	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum kantor terlaksanaya administrasi umum perangkat daerah	100 % 12 Bulan	595.605.650			100%	0	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	18.215.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Paket	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	106.521.250	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Paket	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20555885 Paket	46.475.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	20555885 Paket	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	120.375.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	304.018.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlakasanaya pengadaan barang milik daerah	100 % 12 Bulan	364.811.800			100%	0	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	114.006.100	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	3 Unit	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	250.805.700	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Unit	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksanaya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % 12 Bulan	955.687.350			100%	0	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.690.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	134.157.350	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	814.840.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 % 12 Bulan	149.443.000			100%	0	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	22.658.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Unit	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	59.970.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Unit	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	66.814.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Unit	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (UJUNGBULU)	100%	2.448.450.000			100%	0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 % 100 %	2.448.450.000			100%	0	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	445.600.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Unit	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	2.002.850.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	12 Pokmas / Ormas	0	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU
					KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE			2.802.305.675				4.523.715.756	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.647.165.825				4.265.608.446	
7	01				KECAMATAN			2.647.165.825				4.265.608.446	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ASN perangkat daerah berkinerja beik, kategori baik	100%	2.229.930.325			100%	3.321.279.446	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.129.698.161			100%	3.072.536.446	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	2.075.998.161	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	PAD, DAU	100 Orang/ bulan	3.002.045.116	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.700.000	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	100 Dokumen	70.491.330	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	35.410.000			100%	97.900.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.850.000	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	6 Paket	29.700.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.118.400	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH	1 Paket	7.700.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.085.600	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH	12 Paket	5.500.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.356.000	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH	12 Laporan	55.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	100%	19.550.400			100%	55.000.000	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	19.550.400	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	8 Unit	55.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	22.922.364			100%	35.002.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.922.364	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	12 Laporan	27.500.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	5 Laporan	7.502.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	22.349.400			100%	60.841.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	8.059.400	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU, DBH	1 Unit	16.500.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.600.000	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU, DBH	5 Unit	11.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	11.690.000	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH	10 Unit	11.341.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	1 Unit	22.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (UJUNG LOE)	100%	417.235.500			100%	934.329.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	417.235.500			100%	934.329.000	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	21.156.000	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	1 Lembaga Kemasyarakatan	54.329.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	137.600.000	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	13 Unit	609.840.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	258.479.500	Kab. Bulukumba	PAD	1 Pokmas / Ormas	270.160.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (UJUNG LOE)	100%	0			100%	10.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang melakukan koordinasi dan asistensi APBDesa di kecamatan Persentase pemenuhan asistensi APBDesa	100 % 100 %	0			100%	10.000.000	
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa								
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	0	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	2 Dokumen	10.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
X					NON URUSAN			155.139.850				258.107.310	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			155.139.850				258.107.310	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (UJUNG LOE)	100%	155.139.850			100%	258.107.310	
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	39.459.850			100%	74.099.310	
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.349.650	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH	12 Paket	29.549.310	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.110.200	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH	12 Laporan	44.550.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	100%	0			100%	33.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	0 Unit	33.000.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	115.680.000			100%	151.008.000	
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.680.000	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	PAD, DBH, DAU	12 Laporan	151.008.000	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE
					KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA			4.720.500.218				8.487.948.711	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.720.500.218				8.487.948.711	
7	01				KECAMATAN			4.720.500.218				8.487.948.711	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BULUKUMPA)	100%	3.434.207.218			100%	6.085.710.711	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.008.301.710			100%	5.103.130.750	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ bulan	2.947.436.710	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	37 Orang/ bulan	4.971.545.428	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	60.865.000	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	131.585.322	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	14.201.000			100%	59.625.515	
7	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	14.201.000	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	12 Dokumen	59.625.515	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Aparatur	100%	493.600			100%	60.000.000	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	493.600	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	4 Orang	60.000.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	129.712.100			100%	303.537.290	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.980.500	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	4 Paket	20.454.443	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.518.750	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	4 Paket	66.751.070	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.853.200	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	4 Paket	18.364.170	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.421.850	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	4 Paket	82.481.577	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3.672.800	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	4 Paket	16.065.170	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.875.000	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	12 Laporan	25.022.800	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	31.390.000	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	350 Laporan	74.398.060	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.387.500			100%	228.749.384	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	2 Unit	150.381.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	6.387.500	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	7 Unit	38.516.478	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	5 Unit	39.851.906	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	254.243.608			100%	271.648.474	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.243.608	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	42.170.764	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	12 Laporan	18.320.610	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	215.000.000	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	211.157.100	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100%	20.867.700			100%	59.019.298	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1.500.000	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	3 Unit	1.694.000	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	6.940.000	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	8 Unit	8.222.445	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	12.427.700	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	7 Unit	49.102.853	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BULUKUMPA)	100%	1.286.293.000			100%	2.402.238.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	1.286.293.000			100%	2.402.238.000	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	521.725.000	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	12 Unit	1.681.566.600	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	764.568.000	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	19 Pokmas / Ormas	720.671.400	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA
					KANTOR KECAMATAN RILAU ALE			3.652.394.164				6.306.460.735	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.652.394.164				6.306.460.735	
7	01				KECAMATAN			3.652.394.164				6.306.460.735	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana (RILAU ALE)	100%	3.257.394.220			100%	5.337.558.075	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.053.322.308			100%	5.074.743.370	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ bulan	2.969.236.308	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	39 Orang/ bulan	4.822.254.563	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	82.950.000	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	12 Dokumen	251.411.431	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.136.000	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	1 Laporan	1.077.376	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	0			100%	1.211.035	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	2 Orang	1.211.035	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan Menunjang Administrasi umum perangkat Daerah	100 % 100 %	96.313.700			100%	136.119.710	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	5.024.500	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	18 Paket	8.554.135	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	26.862.400	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	15 Paket	39.608.140	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.126.800	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	2 Paket	3.334.516	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	22.500.000	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	10 Laporan	72.669.555	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	341 Laporan	39.800.000	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	341 Laporan	11.953.364	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana Tersedianya Barang milik daerah	100 % 100 %	32.005.450			100%	21.282.008	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	1 Unit	1.214.339	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	8.806.500	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	3 Unit	12.529.564	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.513.750	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	3 Unit	3.413.962	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7.685.200	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	2 Unit	4.124.143	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terciptanya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 % 100 %	58.137.962			100%	58.603.741	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.817.962	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	18.736.622	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	12 Laporan	3.106.934	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.320.000	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	36.760.185	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Biaya pemeliharaan	100%	17.614.800			100%	45.598.211	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	11.524.800	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	2 Unit	15.964.601	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.090.000	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	10 Unit	14.816.805	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	1 Unit	14.816.805	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (RILAU ALE)	100%	394.999.944			100%	968.902.660	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan	100%	394.999.944			100%	968.902.660	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	163.658.744	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	5 Unit	656.722.660	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	231.341.200	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	6 Pokmas / Ormas	312.180.000	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE
					KANTOR KECAMATAN GANTARANG			5.285.621.875				0	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.285.621.875				0	
7	01				KECAMATAN			5.285.621.875				0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Gantarang)	100%	4.139.142.425			100%	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 % 100 Persen	3.808.141.551			100Persen	0	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	3.689.491.551	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	50 Orang/ bulan	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	118.650.000	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	12 Dokumen	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	1 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	100%	22.125.000			100Persen	0	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	22.125.000	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	1 Orang	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	143.228.050			100Persen	0	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	0	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	20 Paket	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	86.976.650	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	26 Paket	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.580.400	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	15 Paket	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349 Laporan	43.671.000	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	349 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 Persen	0			100Persen	0	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	7 Unit	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	5 Unit	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	3 Unit	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang	100%	155.527.824			100Persen	0	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.207.824	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	12 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.320.000	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	12 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100%	10.120.000			100Persen	0	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	8.700.000	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	2 Unit	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.420.000	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	6 Unit	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	0			100%	0	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	% Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat % Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	undefined undefined 100 Persen	0			100Persen	0	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	2 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	1.146.479.450			100%	0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100 % 100 Persen	1.146.479.450			100Persen	0	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	600.000.000	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	20 Unit	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	546.479.450	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	PAD	12 Pokmas / Ormas	0	KANTOR KECAMATAN GANTARANG
					KANTOR KECAMATAN KINDANG			2.534.968.667				3.784.661.894	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			652.730.500				1.974.596.748	
7	01				KECAMATAN			652.730.500				1.974.596.748	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (KINDANG)	100 Persen	302.730.500			100 Persen	1.044.596.748	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya pengatministrasian aparatur pemerintah	100 Persen	82.620.000			100Persen	197.323.836	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	82.620.000	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	DAU	12 Dokumen	197.323.836	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Laporan	0	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran,sarana dan Prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	100%	48.086.000			100%	175.982.089	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	48.086.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	DAU	12 Paket	173.053.889	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Dokumen	2.928.200	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang kebutuhan aparat	100%	40.394.500			100%	292.376.672	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	1 Unit	38.000.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	DAU	12 Unit	245.518.867	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	40.394.500	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	DAU	4 Unit	8.857.805	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang di kindang	100%	98.880.000			100%	344.421.839	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.800.000	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	56.462.651	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.080.000	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	287.959.188	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	100%	32.750.000			100%	34.492.312	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	32.750.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 Unit	24.728.312	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Unit	9.764.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Kindang)	100%	350.000.000			100%	930.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	diberdayakannya masyarakat di kelurahan	100%	350.000.000			100%	930.000.000	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	DAU	2 Unit	774.359.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	150.000.000	Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	PAD	12 Pokmas / Ormas	155.641.000	KANTOR KECAMATAN KINDANG
X					NON URUSAN			1.882.238.167				1.810.065.146	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.882.238.167				1.810.065.146	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (KINDANG)	100 Persen	1.882.238.167			100 Persen	1.810.065.146	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya pengatministrasian aparatur pemerintah	100 Persen	1.827.318.667			100Persen	1.592.668.406	
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	1.827.318.667	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Kindang, Borong Rappoa	PAD, DAU	12 Orang/ bulan	1.592.668.406	KANTOR KECAMATAN KINDANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran,sarana dan Prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	100%	54.919.500			100%	206.501.640	
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	Kab. Bulukumba	DAU	12 Paket	10.980.750	KANTOR KECAMATAN KINDANG
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.213.500	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	DAU	12 Paket	22.230.014	KANTOR KECAMATAN KINDANG
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	52.706.000	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	173.290.876	KANTOR KECAMATAN KINDANG
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang kebutuhan aparat	100%	0			100%	10.895.100	
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0	Kab. Bulukumba	DAU	4 Unit	10.895.100	KANTOR KECAMATAN KINDANG
					KANTOR KECAMATAN HERLANG			3.105.000.007				5.246.505.791	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.095.052.607				5.206.355.791	
7	01				KECAMATAN			3.095.052.607				5.206.355.791	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (HERLANG)	100%	2.322.710.457			100%	3.523.812.378	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan perangkat Daerah	100%	2.092.466.701			100%	3.047.990.000	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan	1.993.886.701	Kab. Bulukumba	PAD, DAU	23 Orang/ bulan	2.928.200.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	98.580.000	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	12 Dokumen	119.790.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0			-	26.620.000	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	3 Orang	26.620.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah	100%	104.716.850			100%	269.825.522	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	43.109.650	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	100 Paket	155.727.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	4.257.200	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	0 Paket	7.526.683	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	57.350.000	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	100 Laporan	106.571.839	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	13.933.500			100%	25.239.885	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13.933.500	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	3 Unit	25.239.885	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	106.193.406			100%	138.516.971	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.593.406	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	14.436.971	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	12 Laporan	16.500.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96.600.000	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	12 Laporan	107.580.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.400.000			100%	15.620.000	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.400.000	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	3 Unit	15.620.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (HERLANG)	100%	772.342.150			100%	1.682.543.413	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya pelayanan di kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen 100 %	772.342.150			100Persen	1.682.543.413	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	280.862.050	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	6 Unit	1.190.728.133	KANTOR KECAMATAN HERLANG
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	491.480.100	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	100 Pokmas / Ormas	491.815.280	KANTOR KECAMATAN HERLANG
X					NON URUSAN			9.947.400				40.150.000	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.947.400				40.150.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (HERLANG)	100%	9.947.400			100%	40.150.000	
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0			100%	26.840.000	
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	6 Unit	26.840.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.947.400			100%	13.310.000	
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	9.947.400	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	4 Unit	13.310.000	KANTOR KECAMATAN HERLANG
					KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO			3.002.951.979				4.967.944.139	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.002.951.979				4.967.944.139	
7	01				KECAMATAN			3.002.951.979				4.967.944.139	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BONTO TIRO)	100%	2.554.971.979			100%	4.167.198.139	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	2.192.235.591			95%	3.493.676.835	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	2.148.195.591	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	35 Orang/ bulan	3.389.943.715	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dokumen	44.040.000	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU	25 Dokumen	103.733.120	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0			100%	22.125.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU	1 Orang	22.125.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	109.330.800			100%	211.012.905	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	19.894.600	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DBH	15 Paket	50.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	1.751.200	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DBH	25 Paket	6.012.905	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	32.270.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	20 Laporan	55.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	55.415.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	PAD, DBH	150 Laporan	100.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	26.282.600			100%	180.000.000	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU	1 Unit	80.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Eka Tiro	DAU	3 Unit	25.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	26.282.600	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Eka Tiro	PAD	4 Unit	50.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Eka Tiro	DAU	1 Unit	25.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang	100%	183.121.388			100%	199.448.470	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	26.161.388	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU	30 Laporan	30.250.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	156.960.000	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	35 Laporan	169.198.470	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	44.001.600			100%	60.934.929	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	34.071.600	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	7 Unit	29.855.538	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU	5 Unit	6.354.204	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.930.000	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DBH	1 Unit	24.725.187	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BONTO TIRO)	100%	447.980.000			100%	800.746.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	447.980.000			100%	800.746.000	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	106.710.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	1 Unit	452.746.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	341.270.000	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	PAD, DAU, DAU	7 Pokmas / Ormas	348.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO
					KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI			5.943.321.242				7.565.125.644	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.070.799.592				2.722.050.534	
7	01				KECAMATAN			2.070.799.592				2.722.050.534	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BONTO BAHARI)	100%	670.906.712			100%	808.050.534	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan dan 43 ASN Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium PNS Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan 100 Persen	128.250.000			12Bulan	142.065.000	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen Dokumen	128.250.000	Kab. Bulukumba	DAU	12 dokumen Dokumen	142.065.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	27 Paket dan 36 Laporan Persentase Tersedianya Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Rapat Rapat Konsultasi dan Koordinasi	100 Persen 100 persen	191.403.200			100Persen	255.891.531	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	108.455.000	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	600 Paket	137.770.043	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20000 Paket	10.167.200	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	20000 Paket	22.366.928	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 LAPORAN Laporan	72.781.000	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	400 LAPORAN Laporan	95.754.560	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit Persentase Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Mebeler Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Persen 100 Persen	16.700.000			100Persen	49.976.806	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Tanahl Lemo	DBH	4 Unit	16.976.806	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.700.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	3 Unit	33.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan Terbayarnya Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan 12 Bulan	267.261.312			12Bulan	251.363.200	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan Laporan	39.141.312	Kab. Bulukumba	PAD	12 laporan Laporan	38.500.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan Laporan	228.120.000	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	PAD, DBH	12 laporan Laporan	212.863.200	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Unit Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Persen 100 Persen	67.292.200			100Persen	108.753.997	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	12.192.200	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DBH	4 Unit	16.353.997	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	40.000.000	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DBH	4 Unit	44.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	15.100.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DBH	12 Unit	48.400.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BONTO BAHARI)	100%	1.399.892.880			100%	1.914.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2021 Unit dan 2021 Pokmas / Ormas Persentase Bertambahnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Persen 100 Persen	1.399.892.880			100Persen	1.914.000.000	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	799.892.880	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	4 Unit	880.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	600.000.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	100 Pokmas / Ormas	1.034.000.000	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
X					NON URUSAN			3.872.521.650				4.843.075.110	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.872.521.650				4.843.075.110	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BONTO BAHARI)	100%	3.872.521.650			100%	4.843.075.110	
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan dan 43 ASN Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium PNS Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan 100 Persen	3.872.521.650			12Bulan	4.843.075.110	
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	3.872.521.650	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	40 Orang/ bulan	4.843.075.110	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI
					KANTOR KECAMATAN KAJANG			4.018.305.686				4.399.010.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.018.305.686				4.399.010.000	
7	01				KECAMATAN			4.018.305.686				4.399.010.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (KAJANG)	100%	3.356.686.026			100%	4.089.010.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gajidan tunjangan ASN dan terbayarnya Honorarium PNS	100%	3.019.564.233			100%	3.655.000.000	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan Orang/ bulan	2.863.084.233	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	14 Bulan Orang/ bulan	535.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen Dokumen	156.480.000	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	36 Dokumen Dokumen	120.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35 Dokumen Laporan	0	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	35 Dokumen Laporan	3.000.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Logistik Kantor, Tersedianya Makanan dan minuman serta terlaksananya Rapat Konsultasi dan Koordinasi	100%	141.578.900			100%	115.410.000	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.992.000	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	4 Paket	5.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	32.247.500	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	3 Paket	35.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	8.204.400	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	3 Paket	5.500.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 kegiatan Laporan	51.500.000	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	6 kegiatan Laporan	25.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	41.635.000	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DBH	350 Laporan	44.910.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Mebeler Kantor dan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	136.856.050			100%	150.000.000	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	5 Unit	0	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	83.662.050	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	8 Unit	75.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	53.194.000	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	5 Unit	75.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran,terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik serta terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	100%	12.561.843			100%	13.600.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.561.843	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	1 Laporan	13.600.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa pemeliharaan biaya , pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas serta tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	46.125.000			100%	155.000.000	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	21.925.000	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	9 Unit	5.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	7.100.000	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	3 Unit	55.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.100.000	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DBH, DAU	1 Unit	95.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (KAJANG)	100%	661.619.660			100%	310.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	661.619.660			100%	310.000.000	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 kegiatan Unit	333.184.260	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	2 kegiatan Unit	110.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 kegiatan Pokmas / Ormas	328.435.400	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	PAD, DAU	2 kegiatan Pokmas / Ormas	200.000.000	KANTOR KECAMATAN KAJANG
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			6.100.347.071				7.608.779.421	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			6.100.347.071				7.608.779.421	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.100.347.071				7.608.779.421	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BADAN KESBANGPOL)	100%	2.548.487.671			100%	2.577.832.421	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 Persen	111.705.500			100Persen	79.097.700	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	90.230.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Dokumen	55.244.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.622.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	9.449.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.157.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	6.726.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	3.613.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.695.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Dokumen	4.064.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpoenuhan dokumen laporan administrasi dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	1.978.902.701			100Persen	2.139.822.441	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	1.889.054.601	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	19 Orang/ bulan	2.045.502.281	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	62.140.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Dokumen	77.913.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	22.212.500	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	10.362.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.495.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	18 Laporan	6.045.160	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik	100 Persen	11.880.200			100Persen	13.068.000	
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.880.200	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	13.068.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya administrasi kepegawaian badan kesatuan bangsa dan politik	100 Persen	22.125.000			100Persen	27.500.000	
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	22.125.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Orang	27.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	147.698.320			100Persen	111.665.280	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	520.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	3.327.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.096.900	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	3.343.120	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.775.700	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	19.258.635	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.461.800	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Paket	8.246.865	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	19.590.020	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Laporan	21.546.460	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.253.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	55.942.700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100 Persen	100.477.950			100Persen	55.000.000	
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	49.587.600	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	27.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.890.350	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	2 Unit	27.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah persentase terpenuhinya unsur penunjang gedung kantor	100 Persen	106.200.000			100Persen	116.820.000	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	106.200.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	12 Laporan	116.820.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 Persen	69.498.000			100Persen	34.859.000	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.618.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	18.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	18.200.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	3 Unit	880.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	1 Unit	8.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.680.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	10 Unit	6.479.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kegiatan Penyuluhan, Seminar Dan Sosialisasi	100%	1.027.882.400			100%	1.130.670.860	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kegiatan Penyuluhan Seminar dan Sosialisasi	100%	1.027.882.400			100Persen	1.130.670.860	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	27.600.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	50 Orang	30.360.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka								
						Jumlah Paskibraka	72 Orang	1.000.282.400	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU, DAU	73 Orang	1.100.310.860	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	75%	1.772.491.000			75%	3.305.189.140	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat	100 Persen	1.772.491.000			100Persen	3.305.189.140	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	1.772.491.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	150 Orang	3.305.189.140	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	85%	155.500.000			85%	161.060.000	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan di awasi	100 Persen	155.500.000			100Persen	161.060.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	155.500.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Orang	161.060.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi	75%	242.306.000			75%	244.750.000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Kerukunan umat beragama dan kasus intoleransi yang terjadi	100 Persen	242.306.000			100Persen	244.750.000	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	242.306.000	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	100 Orang	244.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah	15%	353.680.000			15%	189.277.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik di daerah	100 Persen	353.680.000			100Persen	189.277.000	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	148.960.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	150 Orang	79.277.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	204.720.000	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	50 Dokumen	110.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H								**1.595.264.186.099**				**2.097.647.649.966**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), SPM dan TPB.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembanguan merupakan indicator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yangdiselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta danpihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. PDRB Perkapita ADHB
6. Gini Ratio
7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI-1
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2023-2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	73,64	71,17	74,60	71,70
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,22	6,70	6,44	6,05
	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	30.650	26.152	27.241	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,31	2,50	2,48	3,17
	Jumlah Penganggur	Orang	3.250	2.675	2.326	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,11	5,15	5,05-5,19	5,45
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	41,90	42,85	45,04	45,04
6	Gini Ratio	Angka	0,379	0,350	0,345	0,334
7	Penurunan Emisi GRK	Gg Co2-Eq	462.952,90	461.102,29	460.180,08	460.180,08

Sumber : RPKD Provinsi Sulsel 2025, BPS, DLHK , Bapperida Kab. Bulukumba 2024, diolah

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untukmengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2025 Kabupaten Bulukumba

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71	71	72	72
2	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100	100	100	100
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC (59,46)	B	B	B
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,526	3,5415	3,556	3,556
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,81	3,26-4,00	3,26-4,00	3,26-4,00
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	24,33	22,04	22,02	22,02
7	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	-1,43	8,14	12,83	12,83
8	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB	%	13,15	13,55	13,89	13,89
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	6,89	7,66	10,22	10,22
10	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,64	71,17	74,60	71,70
11	Indeks Pendidikan	Angka	64,84	66,21	67,31	67,31
12	Indeks Kesehatan	Angka	83,09	76,36	77,15	77,15
13	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,01	69,63	70,14	70,14
14	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,5	3,26	3,51	3,51
15	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	-22,16	6,76	7,34	7,34
16	Gini Ratio	Angka	0,379	0,350	0,345	0,334
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90	92	94	94
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	6,54	25,36	25,83	25,83
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	5,09	10,63	10,42	10,42
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	72,72	59,94	61,57	61,57
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	125	27	36	36
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0,763	0,78	0,8	0,8
23	Persentase Desa Mandiri	%	21,01	4,59	6,42	6,42
24	Indeks Rasa Aman	Angka	14	15	15	15
25	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	100	89,66	90,2	90,2

Sumber : Bapperida Kab. Bulukumba 2024, diolah

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi.Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disa

Tabel VI-3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2025 Kabupaten Bulukumba

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1			**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1			**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**						
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,11	5,15	5,05-5,19	5,45	
1	1	2	PDRB ADHK	Rp, Miliar	9.741,40	9171,79	9.267,01	9.267,01	
1	1	3	Laju inflasi	%	2,78	2,42	2,23	2,41	
1	1	4	PDRB Perkapita ADHB	Rp, Juta	41,90	42,83	45,04	45,04	
1	1	5	Gini Ratio	%	0,379	0,350	0,345	0,334	
1	1	6	Persentase Penduduk miskin	%	7,22	6,70	6,44	6,05	
1			**Kesejahteraan sosial**						
1	2	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,64	71,17	74,60	71,7	
1	2	2	Angka Usia Harapan Hidup	angka	74,01	69,874	70,47	70,47	
1	2	3	Angka Harapan Lama Sekolah	angka	13,43	14,791	15,37	15,37	
1	2	4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	8,26	7,916	7,91	7,91	
1	2	5	Pengeluaran Per Kapita Riil	Juta Rupiah	11.390	10.693	10.725	10.725	
1	2	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,78	72,844	74,19	74,19	
1	2	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,31	2,50	2,48	3,17	
1			**Seni Budaya Dan Olahraga**						
1	3	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	kali	3	7	8	8	
1	3	2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	85,71	3,61	3,85	3,85	
2			**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
2			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**						
2	**1**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**						
2	1	1	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**						
			SD	*%*	107,40	115,19	115,19	115,19	DisDikbud
			SMP	*%*	93,24	101,72	101,72	101,72	DisDikbud
2	1	2	**Angka Partisipasi Murni (APM)**						
			SD	*%*	98,86	98,72	98,72	98,72	DisDikbud
			SMP	*%*	87,04	85,50	85,50	85,50	DisDikbud

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	1	3	**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**						
			7-12 Tahun	*%*	95,28	98,87	98,87	98,87	DisDikbud
			14-15 Tahun	*%*	87,04	92,21	92,21	92,21	DisDikbud
2	1	4	**Angka Putus Sekolah**						
			SD	*%*	4,5	0,00	0,00	0,00	DisDikbud
			SMP	*%*	2,5	0,00	0,00	0,00	DisDikbud
2	1	5	**Angka Kelulusan**						
			SD	*%*	100	100	100	100	DisDikbud
			SMP	*%*	100	100	100	100	DisDikbud
2	1	6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv	%	100	100	100	100	DisDikbud
2	1	7	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	rasio	1:12	1:6	1:6	1:6	DisDikbud
2	1	8	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:14	1:6	1:6	1:6	DisDikbud
2	1	9	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	91,42	91,47	91,47	91,47	DisDikbud
2	**2**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**						
2	2	1	Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup		1,14	3,78	3,78	3,78	Dinas Kesehatan
2	2	2	Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup		0,49	9,84	9,84	9,84	Dinas Kesehatan
2	2	3	Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup		10,28	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
2	2	4	Angka Kematian Ibu		146,87	35,47	35,47	35,47	Dinas Kesehatan
2	2	5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita		*3,25*	*35,49*	*35,49*	*35,49*	Dinas Kesehatan
2	2	6	Rasio Puskesmas Dan Pustu		*0,17*	*0,19*	*0,19*	*0,19*	Dinas Kesehatan
2	2	7	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk		*0,006*	*0,002*	*0,002*	*0,002*	Dinas Kesehatan
2	2	8	Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk		*0,03*	*0,04*	*0,04*	*0,04*	Dinas Kesehatan
2	2	9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk		*0,13*	*0,096*	*0,096*	*0,096*	Dinas Kesehatan
2	2	10	Rasio Tenaga Medis/Penduduk		*2,91*	*0,258*	*0,258*	*0,258*	Dinas Kesehatan
2	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	*%*	*78,78*	*88,59*	*88,59*	*88,59*	Dinas Kesehatan
2	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	Dinas Kesehatan
2	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	14	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta	%	53,51	35,6	35,6	35,6	Dinas Kesehatan

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	2	15	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	*Per 100.000 Penduduk*	177,87	78,81	78,81	78,81	Dinas Kesehatan
2	2	16	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	*Per 100.000 Penduduk*	*5,09*	*1,22*	*1,22*	*1,22*	Dinas Kesehatan
2	2	17	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	18	Angka Kejadian Malaria	*Per 1000 Penduduk*	7,00	0	0	0	Dinas Kesehatan
2	2	19	Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi	%	0,012	0	0	0	Dinas Kesehatan
2	2	20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	95,31	15,97	15,97	15,97	Dinas Kesehatan
2	2	21	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	68,66	72,53	72,53	72,53	Dinas Kesehatan
2	2	22	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin	%	65,66	46,71	46,71	46,71	Dinas Kesehatan
2	2	23	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	%	95,31	95,37	95,37	95,37	Dinas Kesehatan
2	**3**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**						DinasPUTR
2	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	0,790	0,880	0,880	0,880	DinasPUTR
2	3	2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		0,0028	0,0029	0,0029	0,0029	DinasPUTR
2	3	3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air	%	98,98	100	100	100	DinasPUTR
2	3	4	Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	80,92	83,52	83,52	83,52	DinasPUTR
2	3	5	Rasio Jaringan Irigasi		10,72	0,18	0,18	0,18	DinasPUTR
2	**4**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**						
2	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,229	0,251	0,251	0,251	DPKPP
2	4	2	Persentase Pemukiman Yang Tertata	%	4,13	80,25	80,25	80,25	DPKPP
2	4	3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	12,04	13,06	13,06	13,06	DPKPP
2	4	4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	60,72	94,62	94,62	94,62	DPKPP
2	4	5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	88,34	87,08	87,08	87,08	DPKPP
2	4	6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	85,75	85,07	85,07	85,07	DPKPP
2	4	7	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,00	0,00	0,00	0,00	DPKPP

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	4	8	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan		0,42	59,46	59,46	59,46	DPKPP
2	**5**		**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						
6	5	1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,28	0,30	0,30	0,30	Satpol PP, PP
2	5	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		100	100	100	100	Satpol PP, PP
2	5	3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	0,00256	0,00309	0,00309	0,00309	Satpol PP, PP
2	5	4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100	100	100	100	Satpol PP, PP
2	5	5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	Satpol PP, PP
2	**6**		**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**						
2	6	1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	12	12	12	12	Dinas Sosial
2	6	2	Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	6	3	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	100,00	100	100	100	Dinas Sosial
2	6	4	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	57,25	54,15	54,15	54,15	Dinas Sosial
2	6	5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100,00	92,08	92,08	92,08	Dinas Sosial
2	6	6	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	100,00	78,96	78,96	78,96	Dinas Sosial
2			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**						
2	**1**		**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**						
2	1	1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	0,00	0,00	0,00	0,00	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,001	0,00	0,00	0,00	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	3	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	100,00	6,95	6,95	6,95	PMPTSP dan Tenaga Keja

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	1	4	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	2,004	2,36	2,36	2,36	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0	0,21	0,21	0,21	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	6	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0	0,03	0,03	0,03	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	0,69	0,87	0,87	0,87	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	8	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10,000	3179,00	798,09	798,09	798,09	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	9	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		33,85	99,40	99,40	99,40	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	10	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan		1	1,13	1,13	1,13	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	1	11	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat		1	0,51	0,51	0,51	PMPTSP dan Tenaga Keja
2	**2**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**						
2	2	1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	3,35	4,2	4,2	4,2	Dinas PPKB & P3A
2	2	2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	17,50	32,15	32,15	32,15	Dinas PPKB & P3A
2	2	3	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	97,00	86,04	86,04	86,04	Dinas PPKB & P3A
2	2	4	Rasio KDRT		0,0003	0,001	0,001	0,001	Dinas PPKB & P3A
2	2	5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	70,18				Dinas PPKB & P3A
2	2	6	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	2	7	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	Dinas PPKB & P3A

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	2	8	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	%	100	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	**3**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**						
2	3	1	Ketersediaan Pangan Utama	angka	100	507,44	507,44	507,44	DPKP
2	3	2	Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari)	angka	8.959,00	24.676,00	24.676,00	24.676,00	DPKP
2	3	3	Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	angka	239,78	1.031,60	1.031,60	1.031,60	DPKP
2	3	4	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	%	93,33	90,95	90,95	90,95	DPKP
2	**4**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**						
2	4	1	Persentase Luas Lahan Bersetifikat	%	20,00	31,18	31,18	31,18	DPKPP
2	4	2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DPKPP
2	**5**		**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**						
2	5	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,74	63,99	63,99	64,53	DLHK
2	5	2	Indeks Kualitas Air	Poin	63,74	59,05	59,05	59,15	DLHK
2	5	3	Indeks Kualitas Udara	Poin	93,82	84,94	84,94	85,04	DLHK
2	5	5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	DLHK
2	5	6	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	%	1	1	1	1	DLHK
2	5	7	Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional	Kelompok	1	1	1	1	DLHK
2	5	8	Penetapan Hak MHA	Kelompok	1	1	1	1	DLHK
2	5	9	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Kelompok	100	100	100	100	DLHK
2	5	10	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Kelompok	100	100	100	100	DLHK
2	5	11	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	Kelompok	1	1	1	1	DLHK

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	5	12	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Kelompok	Ada	Ada	Ada	Ada	DLHK
2	5	13	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota,	sekolah	100	100	100	100	DLHK
2	5	14	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	63,14	32,47	32,47	32,47	DLHK
2	5	15	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	94,79	100	100	100	DLHK
2	5	16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	%	75,00	22,81	22,81	22,81	DLHK
2	5	17	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri)	Ton/Kg	35,00	46,15	46,15	46,15	DLHK
2	5	18	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Buah	1	2	2	2	DLHK
2	5	19	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	29,86	36,95	36,95	36,95	DLHK
2	5	20	Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	%	36,62	39,93	39,93	39,93	DLHK
2	5	21	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	0	0	0	0	DLHK
2	**6**		**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**						
2	6	1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk,	%	0,99	1	1	1	Disdukcapil
2	6	2	Rasio bayi berakta kelahiran,	%	0,54	0,8	0,8	0,8	Disdukcapil
2	6	3	Rasio pasangan berakta nikah,		1	0,5	0,5	0,5	Disdukcapil
2	6	4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100	100	Disdukcapil
2	6	5	Cakupan penerbitan KTP-el	%	99,26	100	100	100	Disdukcapil
2	6	6	Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	98,48	80	80	80	Disdukcapil
2	**7**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**						
2	7	1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	95,40	100	100	100	DPMD

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	7	2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM)		100	146	146	146	DPMD
2	7	3	Persentase Lsm Aktif	%	91	100	100	100	DPMD
2	7	4	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	DPMD
2	7	5	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	DPMD
2	7	6	Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100	100	100	100	DPMD
2	7	7	Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK		100	93	93	93	DPMD
2	**8**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**						
2	8	1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	*%*	*2,76*	*0,52*	*0,52*	*0,52*	Dinas PPKB & P3A
2	8	2	Total Fertility Rate (TFR)	*%*	2,190	2,61	2,61	2,61	Dinas PPKB & P3A
2	8	3	Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	*%*	75,40	86,92	86,92	86,92	Dinas PPKB & P3A
2	8	4	Persentase Perangakat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	*%*	25,92	63,57	63,57	63,57	Dinas PPKB & P3A
2	8	5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tengtang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk	*%*	1	1	1	1	Dinas PPKB & P3A
2	8	6	Jumlah Sektor Yang Menyapakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan		1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB	Dinas PPKB & P3A
2	8	7	Jumlah Kerja Sama Penyelengaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan,		1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM	Dinas PPKB & P3A

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	8	8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	2,19	13,37	13,75	13,75	Dinas PPKB & P3A
2	8	9	Ratio Akseptor Kb	%	64,48	21,60	21,60	21,60	Dinas PPKB & P3A
2	8	10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	45,70	74,36	74,36	74,36	Dinas PPKB & P3A
2	8	11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		45,7	89,79	89,79	89,79	Dinas PPKB & P3A
2	8	12	Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	15,34	4,53	4,53	4,53	Dinas PPKB & P3A
2	8	13	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	20,92	10,57	10,57	10,57	Dinas PPKB & P3A
2	8	14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	60,30	42,04	42,04	42,04	Dinas PPKB & P3A
2	8	15	Persentase Tinggkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	65,00	66,97	66,97	66,97	Dinas PPKB & P3A
2	8	16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	65,00	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	17	Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb	%	12,26	88,55	88,55	88,55	Dinas PPKB & P3A
2	8	18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB	%	62,10	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	%	5	10	10	10	Dinas PPKB & P3A
2	8	20	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	4,8	0,63	0,63	0,63	Dinas PPKB & P3A
2	8	21	Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksaaan Pembangunan Daerah Di Bdang Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	22	Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri	%	10,00	23,84	23,84	23,84	Dinas PPKB & P3A
2	8	23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	24	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	Dinas PPKB & P3A

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	8	25	Persentase Faskes Dan Jejarinya (Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	*%*	100,00	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa	*%*	100	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	27	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims)	*%*	0,0	0	0	0	Dinas PPKB & P3A
2	8	28	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	*%*	100,00	100	100	100	Dinas PPKB & P3A
2	8	29	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	*%*	51,40	39,68	39,68	39,68	Dinas PPKB & P3A
2	8	30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	*%*	22,10	23,05	23,05	23,05	Dinas PPKB & P3A
2	8	31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes	*%*	0	0,01	0,01	0,01	Dinas PPKB & P3A
2	**9**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**						Dinas Perhubungan
2	9	1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	3	3	Dinas Perhubungan
2	9	2	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Unit	69.248	10.924	10.924	10.924	Dinas Perhubungan
2	9	3	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	22,63	1,07	1,07	1,07	Dinas Perhubungan
2	9	4	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	*%*	94,72	100,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
2	9	5	Pemasangan Rambu-Rambu	*Unit*	0,00	74,68	74,68	74,68	Dinas Perhubungan
2	9	6	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang	207.744	28.237	28.237	28.237	Dinas Perhubungan
2	9	7	Rasio Ijin Trayek		0,83	0,014	0,014	0,014	Dinas Perhubungan
2	**10**		**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**						Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	10	1	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer	%	0	99	99	99	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
2	10	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	1154,58	0,83	0,83	0,83	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
2	10	3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon	%	-	86,00	86,00	86,00	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
2	10	4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	%	-	63,38	63,38	63,38	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
2	10	5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	%	-	98,74	98,74	98,74	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
2	**11**		**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**						Dina Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Tenaga Kerja
2	11	1	Persentase koperasi aktif	%	67,68	76,00	76,00	76,00	Dina Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Tenaga Kerja
2	11	2	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	97,55	99,65	99,65	99,65	Dina Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Tenaga Kerja
2	**12**		**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**						Dinas PMPTSP
2	12	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	60.083	74	74	74	Dinas PMPTSP
2	12	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp (juta)	31.250	814.435	814.435	814.435	Dinas PMPTSP
2	12	3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	36,94	30	30	30	Dinas PMPTSP

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	**13**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**						Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	47,17	94,28	94,28	94,28	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	2	Persentase wirausaha muda		2,59	3,85	3,85	3,85	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	85,71	20,55	20,55	20,55	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	4	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan	%	29,31	50,69	50,69	50,69	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	73,65	57,43	57,43	57,43	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	6	Jumlah atlet berprestasi		32	19	19	19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	13	7	Jumlah prestasi olahraga		6	3	3	3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**14**		**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**						Statistik
2	14	1	Buku ”Kabupaten Dalam Angka”		Ada	Ada	Ada	Ada	Statistik
2	14	2	Buku ”PDRB”		Ada	Ada	Ada	Ada	Statistik
2	**15**		**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**						Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	15	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah,	%	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
2	**16**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**						DisDikbud
2	16	1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		3	3	3	3	DisDikbud
2	16	2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		78	60	60	60	DisDikbud
2	16	3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		41	2	2	2	DisDikbud
2	**17**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		10,67	28,23	28,23	28,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah		71,94	49,12	49,12	49,12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		1,61	2,71	2,71	2,71	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun	Orang	40.487	84.714	84.714	84.714	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	16.227	13.456	13.456	13.456	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	%	55,20	81,30	81,30	81,30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**18**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	18	1	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	100	100	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	18	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	44,44	1,84	1,84	1,84	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2			**Urusan Pemerintahan Pilihan**						
2	**1**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**						Dinas Perikanan
2	1	1	Cakupan Produksi perikanan	%	113,40	134	134	134	Dinas Perikanan

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	1	2	Perikanan tangkap	ton	55.612	59.165,0	59.165,0	59.165,0	Dinas Perikanan
2	1	3	Perikanan Budidaya	ton	214.799	5176	5176	5176	Dinas Perikanan
2	1	4	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	83,30	74,7	74,7	74,7	Dinas Perikanan
2	**2**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**						Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**2**	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	544.139	460.991	460.991	460.991	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	2	2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2	2-4	2-4	2-4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	2	3	PAD Sektor Pariwisata	%	5,98	7,34	7,34	7,34	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	**3**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**						DPKP
2	3	1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB		24,33	24,46	24,46	24,46	DPKP
2	3	2	Cakupan bina kelompok tani	%	63,34	85,86	85,86	85,86	DPKP
2	3	3	Jumlah Populasi Ternak						DPKP
			Sapi Potong	*Ekor*	67.808	80.329	80.329	80.329	DPKP
			Ayam Ras Pedaging	*Ekor*	2.174.800	2.499.367	2.499.367	2.499.367	DPKP
			Ayam Ras Petelur	*Ekor*	610.693	828.599	828.599	828.599	DPKP
2	**5**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**						Dina Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Tenaga Kerja

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	5	1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0	0,78	0,78	0,78	Dina Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Tenaga Kerja
2	5	2	Jumlah Pasar	Unit	43	43	43	43	Dina Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Tenaga Kerja
2			**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**						
2	**1**		**Sekretariat Daerah**						Sekretariat Daerah
2	**1**	1	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk		2,70	2,87	2,87	2,87	Sekretariad Daerah
2	**2**		**Sekretariat DPRD**						DPRD
2	2	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten		Ada	Ada	Ada	Ada	DPRD
2	2	2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada	DPRD
2	2	3	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	DPRD
2			**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**						
2	**1**		**Perencanaan**						Bapperida
2	1	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bapperida
2	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bapperida
2	1	3	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bapperida
2	1	4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100	100	Bapperida

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	100	100	Bapperida
2	1	6	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	100	100	Bapperida
2	**2**		**Keuangan**						BPKAD
2	**2**	1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2	2	2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	2,84	2,50	2,50	2,50	BPKAD
2	2	3	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	%	0	0	0	0	BPKAD
2	2	4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	29,88	21,80	21,80	21,80	BPKAD
2	2	5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	17,35	19,84	19,84	19,84	BPKAD
2	2	6	Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak)	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
2	2	7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa		0,42	1,02	1,02	1,02	BPKAD
2	2	8	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	12,54	11,41	11,41	11,41	Bapenda
2	**3**		**Kepegawaian**						BKPSDM
2	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	Bulan	3	3	3	3	BKPSDM
2	3	2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	88,32	89,99	89,99	89,99	BKPSDM
2	3	3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	43,85	96,68	96,68	96,68	BKPSDM
2	**4**		**Pendidikan Dan Pelatihan**						BKPSDM
2	4	1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	32	29	29	29	BKPSDM
2	4	2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	544	1.441	1440	1440	BKPSDM
2	**5**		**Penelitian Dan Pengembangan**						Bapperida
2	5	1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	7,50	12,55	12,55	12,55	Bapperida
2	5	2	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	16	13,91	13,91	13,91	Bapperida
2	5	3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	49,74	61,35	61,35	61,35	Bapperida
2			**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**						
2	**6**		**Inspektorat Daerah**						Inspektorat
2	6	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	88	100	100	100	Inspektorat
2	6	2	Persentase pelanggaran Pegawai	%	0,01	0,000	0,000	0,000	Inspektorat

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Target RPJMD 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	6	3	Jumlah temuan BPK	Temuan	13	4	4	4	Inspektorat
2			**Unsur Pemerintahan Umum**						
2	**7**		**Kesatuan Bangsa dan Politik**						Kesbangpol
2	7	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71	71,5	71,5	71,5	Kesbangpol
2	7	2	Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah	%	100	100	100	100	Kesbangpol
2	7	3	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	5	5	Kesbangpol
3			**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
3			**Kemampuan Ekonomi Daerah**						
3	1	1	Rata-rata Nilai Konsumsi Pengeluaran Per Rumah Tangga		1.080.407	1.080.641	1.080.641	1.080.641	BPS
3	2	2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita		557.188	532.129	532.129	532.129	BPS
3	3	3	Nilai Tukar Petani		107,90	107,22	107,22	107,22	BPS
3			**Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**						
3	1	1	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang	%	100	99	99	99	
3			**Iklim Berinvestasi**						
3	1	1	Angka Kriminalitas yang tertangani	%	100,00	26,92	26,92	26,92	Polres
3			**Sumberdaya Manusia**						
3	1	1	Rasio Ketergantungan		44,50	33,56	33,56	33,56	BPS

Sumber : Instansi Vertikal, Organiasi Perangkat Daerah, Bapperida Kabupaten Bulukumba 2024, diolah

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis danMutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yangberhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan,keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii)perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikanpada tabel berikut ini:

Tabel VI-4
Capaian Indikator SPM Tahun 2022 dan Target Indikator SPM Tahun 2023-2025
Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025
1	**PENDIDIKAN**				
1.1	**Pendidikan Dasar**				
1	persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	97	100	100
1.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional	%	35,07	100	100
1.2	**Pendidikan Kesetaraan**				
2	Persentase WargaNegara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	96,5	100	100
2.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional	%	45,10	100	100
1.3	**Pendidikan anak usia dini**				
3	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	90	100	100
3.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional	%		100	100
2	**KESEHATAN**				
2.1	**Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah**				
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	%	100	100	100
2.2	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**				
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%	100	100	100
2.3	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**				
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.4	**Pelayanan kesehatan balita**				
7	Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100

No	Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025
2.5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**				
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.6	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**				
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**				
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.8	**Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi**				
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.9	**Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus**				
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.10	**Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**				
13	Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.11	**Pelayanan kesehatan orang terduga tubercolosis**				
14	Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
2.12	**Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefic ieny Virus)**				
15	Persentas orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**				
3.1	**Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari**				
16	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum seharihari	%	85,80	100	100
3.2	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic**				
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	83,41	100	100
4	**PERUMAHAN DA PEMUKIMAN**				
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;**				
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100	100	100
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**				
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	%	100	100	100
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
5.1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum**				

No	Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkadat	%	100	100	100
5.2	**Pelayanan informasi rawan bencana**				
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
5.3	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**				
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
5.4	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**				
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
5.5	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**				
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
6	**SOSIAL**				
6.1	**Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantardiluar panti**				
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti**				
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti**				
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**				
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100
6.5	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota**				
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah, Bapperida Kab. Bulukumba 2024, diolah

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untukmengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional

dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadiprioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten.

Penetapan target tahun 2025 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals*(TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-5
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun					
1.2.1*Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	7,22	6,21	5,99	Dinas Sosial
1.3.1.(a)Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	94,27	97,05	100,00	Dinas kesehatan
1.3.1.(b)Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	10,04	14,65	16,97	BPJS Ketenagakerjaan
1.3.1.(c)Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persen	100	100,00	100,00	Dinas Sosial
1.3.1.(d)Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Rumah Tangga	12935	10956,80	10272,00	Dinas Sosial
1.4.1.(a)Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	100	90,02	90,93	Dinas kesehatan
1.4.1.(b)Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	94,11	100,00	100,00	Dinas kesehatan
1.4.1.(c)Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	45,7	65,92	66,25	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pembendayaa Perempuan dan Perlindungan anak
1.4.1.(d)Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	85,8	87,78	88,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4.1.(e)Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	83,41	90,04	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4.1.(g)Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	98,86	103,74	107,32	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.	Persen	87,04	96,60	101,88	Dinas Pendidikan
1.4.1.(j)Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	0,9829	66,51%	67,16%	Dinas Kependudukan dan catatan sipil
1.4.1.(k)Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rumah Tangga	NA	27167,60	21522,75	Sekretariat Daerah bagian Ekonomi dan Pengembnagan Energi dan Sumber daya Mineral

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
1.5.1*Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	12326	0,00	0,00	Badan Penanggulangan Bencana
1.5.1.(a)Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	23	30,00	35,00	Badan Penanggulangan Bencana
1.5.1.(b)Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Orang	59	483,00	517,50	Dinas Sosial
1.5.1.(c)Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Orang	59	546,53	596,91	Dinas Sosial
1.5.1.(d)Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus9 SMAB=Sekolah/madrasah aman bencana)		NA	NA	NA	Dinas Sosial
1.5.2.(a)Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	RP	4.068.000.000	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.					
1.a.1*Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dokumen	1	1	1	Dinas Sosial
1.a.2*Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persen	25,45	24,44	24,70	Dinas Sosial
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan					
2.1.1.(a)Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Persen	8,7	4,36	2,73	Dinas Kesehatan
2.2.1 *Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita bawah dua tahun/baduta.	Persen	8,2	4,96	4,14	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen	8,7	1,22	0,77	Dinas Kesehatan

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,berdasarkan tipe.	Persen	5,95	0,59	0,00	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	73,44	9,88	8,23	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	78,06	87,21	90,52	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	89,6	85,84	88,80	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.1*Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Persen	NA	PM	PM	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja
TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahtraan Seluruh Penduduk Semua Usia					
3.1.1*Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka	9	1,91	1,39	Dinas Kesehatan
3.1.2*Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	83,72	88,59	89,31	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	86,25	6,38	5,99	Dinas Kesehatan
3.2.1*Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka	3	5,32	4,99	Dinas Kesehatan
3.2.2*Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Persen	63	5,32	4,99	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Persen	7	6,02	5,65	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persen	100	99,67	100,00	Dinas Kesehatan
3.3.1.(a)Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	0,63	1,91	1,39	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Orang	90	90,02	90,93	Dinas Kesehatan
3.3.3*Kejadian Malaria per 1000 orang.	Persen	0,069	0,00	-0,01	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)Persentase Kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	100	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.3.5*Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan kusta).	Orang	27	82,80	69,00	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)Persentase merokok pada penduduk umur £18 tahun.	Persen	2,8	0,14	0,12	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	28,46	6,61	6,40	Dinas Kesehatan

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
3.4.1. (c)Prevelensi Obesitas pada penduduk umur < 18 Tahun	Persen	1,15	-0,14	-0,21	Dinas Kesehatan
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.					
3.5.1 (e)Prevelensi Penyalahgunaan Narkoba		NA	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.5.2 *Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur >15 tahun dalam satu tahun terakhir		NA	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.7.1*Proporsi perempuan usia reproduksi (15 -49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Persen	20,7	PM	PM	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3.7.1.(a)Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	45,7	85,86	88,58	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3.7.1.(b)Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Persen	60,3	32,55	36,07	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3.7.2*Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	Persen	45,7	PM	PM	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3.7.2.(a)Total Fertility Rate (TFR).	TFR	2,11	1,39	1,16	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.1Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Persen	NA	80,31	83,23	Dinas Kesehatan
3.8.1.(a)Unmet need pelayanan kesehatan.	Persen	15,78	9,39	8,80	Dinas Kesehatan

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
3.8.2*Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Penduduk	444.665	417248,76	434369,21	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	94,27	89,07	93,38	Dinas Kesehatan
3.9.3.(a)Proporsi kematian akibat keracunan.	-	NA	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.a.1*Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	NA	31,38	27,99	Dinas Kesehatan
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.					
3.b.1.(a)Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen	2,53	1,63	1,95	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesemoatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua					
4.1.1*Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Persen	92	97,20	99,00	Dinas Pendidikan
4.1.1.(a)Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	90,3	100,00	119,93	Dinas Pendidikan
4.1.1.(b)Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	71,42	88,57	92,86	Dinas Pendidikan
4.1.1.(d)Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	114,54	112,94	113,05	Dinas Pendidikan
4.1.1.(e)Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Persen	97,14	108,89	113,43	Dinas Pendidikan
4.1.1.(g)Rata-rata lama sekolah penduduk umur ³15 tahun.	Tahun	9,25	10,64	11,55	Dinas Pendidikan
4.2.2.(a)Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	94,1	76,63	87,81	Dinas Pendidikan
4.4.1*Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen	20,8	25,60	28,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
4.5.1*Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persen	82	113,19	115,29	Dinas Pendidikan
4.6.1.(a)Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	99,73	99,93	100,00	Dinas Pendidikan
4.6.1.(b)Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15 - 59 tahun.	Persen	91,53	93,30	93,40	Dinas Pendidikan
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.					
4.a.1*Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Persen	91	97,20	99,00	Dinas Pendidikan
4.c.1*Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persen	45,25	61,78	65,52	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan Kaum Perempuan					
Target SDGs :5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.					
5.1.1*Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	1	6	6	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.					
5.2.1*Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	11	13,04	10,87	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
5.2.1.(a)Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	46	42,6	35,5	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2*Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	68,75	13,2	11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2.(a)Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	100	78,4	84	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.					
5.3.1*Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	0,09	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3.1.(b)Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		45,7	PM	PM	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.					
5.5.1*Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	20	22,72	23,39	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5.2*Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	34,5	19,87	20,24	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the					

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.					
5.6.1.(a)Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	0	9,39	8,80	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6.1.(b)Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	100	4,73	4,85	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.					
5.b.1*Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Persen	84,46	98,27	99,72	Badan Pusat Statistik
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua					
6.1.1.(a)Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	85,8	92,46	93,35	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
6.1.1.(c)Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	85,8	92,46	93,35	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
6.2.1.(a)Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	NA	PM	PM	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
6.2.1.(b)Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	83,41	60,52	66,42	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
6.2.1.(c)Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	136	136	136	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	136	136	136	Dinas Kesehatan
6.2.1.(f)Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Unit	720	2,47	2,80	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
6.3.1Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	%	8	24,04	25,30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.3.2.(b)Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	55	82,63	87,03	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.5.1.(a)Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sungai	NA	6	7	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
6.5.1.(g)Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kegiatan	Ada	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang
TUJUAN 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua					
7.2.1*Bauran energi terbarukan.		PM	PM	PM	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan sumber Daya Mineral
7.3.1*Intensitas energi primer.		PM	PM	PM	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan sumber Daya Mineral
TUJUAN 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua					
Target SDGs : 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.					
8.1.1*Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	4,11	1,81	2,15	Bapperida
8.1.1.(a)PDB per kapita.	Juta	42,27	44,36	46,84	Bapperida
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.					
8.2.1*Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Persen	8,76	9,43	9,76	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					
8.3.1*Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen	0,31	0,40	0,44	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(a)Persentase tenaga kerja formal.	Persen	21,68	45,33	45,48	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(b)Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen	35,26	36,86	37,27	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.3.1.(c)Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persen	61,33	18,98	21,05	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.5.1*Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	34143	55994,52	61457,40	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.5.2*Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	0,03	0,02	0,02	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.5.2.(a)Persentase setengah pengangguran.	Persen	0,1	0,08	0,08	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.					
8.6.1*Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen	58,3	53,33	57,14	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
8.9.1.(a)Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	2.181	820,40	952,25	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	542.072	289463,20	292246,50	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.2*Jumlah Pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja		38	0	0	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.					
8.10.1*Jumlah kantor bank dan ATM per100.000 penduduk dewasa	ATM	1	1,80	2,00	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.10.1.(a)Rata-rata jarak lembaga keuangan (bank Umum)		2,5	0	0	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Persen	45,38	50,29	54,46	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta mendorong inovasi					
Target SDGs 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.					
9.1.2.(b)Jumlah dermaga penyeberangan.	Dermaga	2	24	30	Dinas Perhubungan
9.2.1*Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Persen	6,68	8,12	8,29	Dinas Perdagangan,Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
9.2.1.(a)Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	8,41	5,62	5,67	Dinas Perdagangan,Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.					
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.					
9.c.1*Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen	50	70,00	75,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.c.1.(a)Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Persen	84,46	98,24	99,18	Badan Pusat Statistik
9.c.1.(b)Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Persen	57,91	44,72	45,15	Badan Pusat Statistik
TUJUAN 10 mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara					
10.1.1*Koefisien Gini.	Koefisien	0,33	0,36	0,35	Dinas Sosial
10.1.1.(a)Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	7,39	6,14	5,90	Dinas Sosial
10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Desa	0	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(c)Jumlah desa tertinggal.	Desa	0	2,20	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri.	Desa	23	125	130	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.		NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.2.1*Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	NA	7,66	7,61	Dinas Sosial

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.					
10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Fasilitasi Koordinasi Produk Hukum Daerah Berupa Perda, Perbup,Keputusan dan Fasilitasi Bantuan Hukum	743	PM	PM	Sekda, Bagian Hukum dan HAM
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.					
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	10,04	14,65	16,97	Dinas Sosial
TUJUAN 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan					
11.1.1.(a)Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	100	95,94	96,83	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.5.1*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	12236	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(a)Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Persen	100	60,00	50,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(c)Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	RP	4.068.000.000	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6.1.(a)Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	94,77	79,44	80,92	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.b.2*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan					

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
Target SDGs 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.					
12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah	Ton	35	75,39	87,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.5.1.(a)Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	24,95	65,27	65,89	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.					
12.6.1.(a)Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	1	3	4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.					
12.7.1.(a)Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Persen	0	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TUJUAN 13.Mengambil Tindakan cepat untuk Mengangtisipasi Perubahan Iklim dan Dampaknya					
Target SDGs 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.					
13.1.1*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	12326	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 14. melestarikan dan memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber daya kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan					

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.					
14.4.1*Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Ton	55.612,00	57824,03	58815,02	Dinas Perikanan
14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk- bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.					
14.6.1.(a)Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persen	100	100,00	100,00	Dinas Perikanan
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.					
14.b.1(b)Jumlah nelayan yang terlindungi.	Nelayan	NA	1040,40	1083,75	Dinas Perikanan
TUJUAN 15.Melindungi, Merestorasi dan meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem daratan, Mengelola Hutan secara lestari, menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta menghentikan kehilangan Keanekaragaman hayati					

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
Target SDGs 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.					
15.1.1.(a)Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	29,86	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.					
15.3.1.(a)Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	32,29	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.					
15.9.1.(a)Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan					
Target SDGs 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.					
16.1.1.(a)Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	0	PM	PM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2.(a)Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian	4	PM	PM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3.(a)Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Kasus	324	PM	PM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
16.1.4*Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Persen	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.					
16.2.1.(b)Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Orang	9	PM	PM	Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.3.(a)Proporsi perempuan dan laki laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Orang	13	PM	PM	Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.					
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.					
16.6.1Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Persen	85,12	95,17	96,09	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(a)Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Persen	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(b)Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	64,29	73,75	76,91	Inspektorat
16.6.1.(c)Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	Na	99,10	99,59	Sekda, Bagian Pembangunan
16.6.1.(d)Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	68,91	64,62	66,85	Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.					
16.7.1.(a)Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	20	22,72	23,39	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
16.7.1.(b)Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persen	17,3	57,60	68,25	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.9.1*Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen	97,31	93,15	97,66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	98,29	81,12	81,90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.					
16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	ASN	1	3	4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.					
16.b.1.(a)Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		Ada	Ada	Ada	Setda, Bagian Hukum dan HAM
TUJUAN 17. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua					
Target SDGs 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
17.1.1*Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rp	1,37587E+12	135.263.350.787	136.563.959.929	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen	NA	1,20	1,40	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
17.1.2*Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	2,43	1,00	1,01	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.					
17.6.2.(c)Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen	50,00	70,00	75,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.					
17.8.1*Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	57,91	46,14	46,92	Badan Pusat Statistik
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.					
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.					
17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen	100	100,00	100,00	Bapperida
17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen	100	93,34	100,00	Bapperida
17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		6	14	15	Bapperida

Uraian	Satuan	Capaian 2023	Asumsi 2024	Target 2025	Sumber Data
17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.					Bapperida
17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Orang	7334	10377	10972	Bapperida
17. 19. 2. (d)Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	100	100,00	100,00	Bapperida

Sumber : Instansi Vertikal, Organiasi Perangkat Daerah, Bapperida Kabupaten Bulukumba 2024, diolah

BAB VII
PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran yang berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026, serta memperhatikan RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, dan RKP Tahun 2025.

Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba berfungsi sebagai landasan,pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2025 ini sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2025. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD Tahun 2025 yang mana untuk memastikan APBD Tahun 2025 telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan - penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencanayang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah.

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dankonsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat,kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan danpenyelenggara Pemerintah Daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparasi informasi publik, maka RKPD agardipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dankegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja,akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 yang nantinya menjadi harapan untuk pelaksanaanya, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2025 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJPD dan RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunanlainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2025.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2025 yaitu : “***Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang

sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

4. RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025, diharapkan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah,sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

Jalan Dr. Soetomo No. 1 Bulukumba

Email : bappelitbangdabulukumba@gmail.com